

KEBIJAKAN SOSIAL

SEJARAH, TEORI, KONSEP, DAN PRAKTIK



DEKKI UMAMUR RAIS, S.SOS., M.SOC.SC
DODY SETYAWAN, S.SOS., M.AP

Dekki Umamur Rais, S.Sos., M.Soc.SC
Dody Setyawan, S.Sos., M.AP

KEBIJAKAN SOSIAL
SEJARAH, TEORI, KONSEP, DAN PRAKTIK



Penerbit Forind

KEBIJAKAN SOSIAL

SEJARAH, TEORI, KONSEP, DAN PRAKTIK

Copyright©:

Dekki Umamur Rais, S.Sos., M.Soc.SC

Dody Setyawan, S.Sos., M.AP

ISBN: 978-623-99722-2-6

Editor: Abd. Rohman

Cover & Layout : Tim Forind

Diterbitkan oleh Forind

Jl. Raya Tlogomas 05 No. 24 Tlogomas

Malang Jawa Timur

KEBIJAKAN SOSIAL

SEJARAH, TEORI, KONSEP, DAN PRAKTIK

Malang: Forind, 2022

15,5 x 23 cm

xii + 564 hlm

Cetakan Pertama November 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA PENULIS

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat terselesaikan. Tidak kurang, hampir tiga tahun lamanya waktu yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan buku ini. Baru, memasuki tahun ketiga penulis bisa menyelesaikan buku ini, walaupun masih jauh dari kata sempurna.

Kebijakan sosial (*Social Policy*) merupakan bagian dari kebijakan publik (*public policy*). Melalui Kebijakan Sosial pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial. Kebijakan sosial merupakan salah satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial guna mewujudkan kesejahteraan sosial seperti yang dicita-citakan dan diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara.

Sebagian besar dari buku ini membahas sejarah perkembangan politik negara kesejahteraan, transformasi ideologi politik negara menjadi kebijakan sosial, praktek-praktek negara kesejahteraan dan kebijakan sosial, kebijakan sosial sebagai kebijakan publik, perencanaan kebijakan sosial, Analisa kebijakan sosial, implementasi kebijakan sosial, advokasi kebijakan sosial, serta monitoring dan evaluasi kebijakan sosial.

Pembaca umumnya hanya memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana caranya mengupas sebuah kebijakan melalui konsep dan teori. Sangat jarang ditemukan karya yang selain menyediakan kerangka konseptual, juga sekaligus mengupas mengenai produk yang dihasilkan dari proses kebijakan sosial itu sendiri. Serta bagaimana parakek-praktek tersebut dilakukan. Seperti yang kita ketahui, buku yang secara khusus membahas diskursus kebijakan sosial, walaupun ada tetapi tidak banyak di Indonesia. Padahal praktek kebijakan sosial sering kali dilakukan oleh pemerintah, baik itu langsung maupun tidak langsung. Meskipun sangat ringkas, buku ini mencoba mengisi relung yang masih kosong tentang diskursus Kebijakan sosial. Harapannya, melalui penyajian konsepsi, konteks, bentuk praktek, dan

sekaligus *framework* kajian kebijakan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan publik.

Buku ini memaparkan arsitektur kebijakan sosial sebagai bidang studi dan praktek. Penulis berusaha untuk menggabungkan pembahasan teori dengan pemahaman kebijakan sosial dalam praktik. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan praktisi terkait ruang lingkup, jangkauan dan tujuan dari subjek sambil mengembangkan kesadaran kritis dari masalah, isu dan kesalahan umum. Dengan penyajian Bahasa yang sederhana, penulis berharap pembaca bisa menangkap apa itu kebijakan sosial dan mengapa itu penting; melihat kebijakan sosial dalam konteks sosialnya; mempertimbangkan kebijakan, peran negara dan pelayanan sosial; mengeksplorasi isu-isu dalam administrasi sosial dan pemberian layanan; dan berfokus pada metode dan pendekatan subjek. Sedangkan untuk praktisi, ada diskusi tentang teknik dan pendekatan yang digunakan untuk menerapkan kebijakan sosial dalam praktik. Harapan Penulis, semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia ilmu pengetahuan maupun kepentingan empiris yang berkaitan dengan kebijakan sosial dan hubungannya dengan kebijakan publik.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam membantu menyelesaikan proses penulisan buku ini. Dengan tulisan yang masih belum sempurna ini, penulis tetap mengharapkan tanggapan, masukan, dan kritikan untuk pengembangan naskah buku yang lebih baik lagi dikemudian hari.

Malang, Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BALIK HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA PENULIS	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

Bagian 1 : POLITIK NEGARA KESEJAHTERAAN DAN KEBIJA-

KAN SOSIAL	1
A. Tipologi Negara Kesejahteraan.....	6
B. Rezim Negara Kesejahteraan	14
C. Ideologi dalam Pusaran Rezim Negara Kesejahteraan	15
D. Ideologi Politik dan Kesejahteraan	26
E. Komponen-komponen Rezim Negara Kesejahteraan	32
F. Prinsip-prinsip Negara Kesejahteraan	33
G. Makna Teori Negara Kesejahteraan	34
H. Karakteristik Negara Kesejahteraan	35
I. Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Sosial.....	37
J. Negara Kesejahteraan dalam Masyarakat Modern	39
K. Tantangan Masa Depan Politik Negara Kesejahteraan	41

Bagian 2 : DEMOKRASI SOSIAL, NEGARA KESEJAHTE-

RAAN, DAN KEBIJAKAN SOSIAL	49
A. Nilai-nilai Dasar Demokrasi Sosial	51
B. Demokrasi Sosial dan Keadilan Sosial	57
C. Demokrasi Sosial dalam Negara Kesejahteraan	60
D. Demokrasi Sosial dan Kebijakan Sosial	61

Bagian 3 : KEADILAN SOSIAL DAN KEBIJAKAN SOSIAL.....

A. Keadilan Sosial	74
B. Mendefinisikan Keadilan	85

C. Jenis-jenis Keadilan	104
D. Tujuh Aliran Keadilan Sosial	107
E. Kebutuhan akan Keadilan Sosial	121
F. Prinsip-prinsip dan Isu Keadilan Sosial	125
G. Keadilan Sosial dan Kebijakan Sosial	128
Bagian 4 : ISU-ISU DAN PROBLEMA KEBIJAKAN SOSIAL.....	141
A. Institusi Keluarga	142
B. Kesejahteraan Anak	146
C. Kesetaraan Gender	149
D. Rumah Layak Huni	154
E. Akses Pendidikan	161
F. Kelaparan dan Kemiskinan	164
G. Pemenuhan Hak Perempuan	166
H. Ketenagakerjaan	169
I. Akses Perawatan Kesehatan	177
J. Isolasi sosial	183
K. Lingkungan dan Perubahan Iklim	187
L. Pembangunan Berkelanjutan	192
Bagian 5 : MASALAH SOSIAL DAN KEBIJAKAN SOSIAL	194
A. Masalah Sosial.....	195
B. Konstruksi Sosial Masalah-masalah Sosial	197
C. Perspektif Sosiologis tentang Masalah Sosial	199
D. Masalah Sosial, Perspektif Teoritis	200
E. Tahap Perkembangan Masalah Sosial	208
F. Sifat Masalah Sosial	209
G. Elemen-elemen Masalah Sosial.....	211
H. Dampak Masalah Sosial	213
I. Penyebab terjadinya Masalah Sosial.....	213
J. Reaksi Terhadap Masalah Sosial	216
K. Kategori Masalah Sosial.....	217
L. Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial.....	218
Bagian 6 : PERUBAHAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN	
SOSIAL.....	222
A. Perubahan Sosial	223

B. Mengubah Tataan Sosial	227
C. Latar Belakang Sejarah	228
D. Penjelasan Tentang Perubahan Sosial	232
E. Sumber Perubahan Sosial	236
F. Teori-teori Perubahan Sosial	238
G. Pola Perubahan Sosial	269
H. Sifat Perubahan Sosial	274
I. Faktor-faktor Perubahan Sosial	279
J. Mekanisme Perubahan Sosial	293
K. Proses Perubahan Sosial	297
L. Agen Perubahan Sosial	299
M. Faktor-faktor yang Mempromosikan Perubahan Sosial	300
N. Penerimaan dan Penolakan Terhadap Perubahan Sosial	302
O. Problem Sosial dan perubahan Sosial	303
P. Subjek Kebijakan Sosial	305
Q. Prinsip dan Konsep Kebijakan Sosial	310
R. Mempromosikan Perubahan Sosial Melalui Kebijakan Sosial	313
S. Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Sosial	316
T. Tantangan Masa Depan Kebijakan Sosial	319

Bagian 7 : PERUBAHAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN

SOSIAL.....	330
A. Apa itu Kesejahteraan?	334
B. Sejarah Kesejahteraan Sosial	340
C. Kesejahteraan Sosial dan Negara Kesejahteraan	341
D. Tujuan Kesejahteraan Sosial	342
E. Pentingnya Kebijakan Kesejahteraan Sosial	347
F. Sistem Kesejahteraan Sosial	347
G. Fungsi Kesejahteraan Sosial	348
H. Komponen Kesejahteraan Sosial	350
I. Pendekatan Kesejahteraan Sosial	350
J. Kebijakan Kesejahteraan Sosial	353
K. Keadilan dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	355

L. Analisa Kebijakan Kesejahteraan Sosial	357
M. Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	366
N. Proses Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	369
O. Administrasi Kesejahteraan Sosial	370
P. Proses Administratif dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial	376
Q. Fitur Administrasi Kesejahteraan Sosial	386
R. Fungsi Administrasi Kesejahteraan Sosial	387
S. Agensi Kesejahteraan Sosial	389
T. Tipe-tipe Agensi Kesejahteraan Sosial	389
U. Layanan Kesejahteraan Sosial	393
V. Program Kesejahteraan Sosial	395
W. Karakteristik Kesejahteraan Sosial	397
X. Metode Pengukuran Kesejahteraan	397
Y. Kesejahteraan Sosial Hari ini	409

Bagian 8 : KEBIJAKAN SOSIAL SEBAGAI KEBIJAKAN

PUBLIK

A. Sifat Kebijakan	413
B. Proses Formal: Hukum dan Negara	414
C. Pemerintah dan Kebijakan Sosial	416
D. Pelayanan Sosial	417

Bagian 9 : PROSES KEBIJAKAN SOSIAL

A. Jenis-jenis Kebijakan	421
B. Memahami Proses Pembuatan Kebijakan, Politik, dan Keputusan.....	425
Tahapan Proses Kebijakan	437
Siklus Kebijakan	450

Bagian 10 : ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

DAN KEBIJAKAN SOSIAL

A. Administrasi Sosial	456
B. Kebijakan dan administrasi Sosial	457
C. Administrasi Kesejahteraan Sosial	459
D. Layanan Publik	464
E. Sejarah Perkembangan Layanan Sosial	465

F. Layanan Kesejahteraan Sosial.....	466
G. Penyediaan (Pelaksanaan) Layanan Sosial	470
H. Universalitas dan Selektivitas dalam Pelayanan Sosial..	472
I. Fungsi-fungsi Pelayanan Sosial	473
J. Tahap-tahap Pelayanan Sosial	476
Bagian 11 : ADVOKASI KEBIJAKAN SOSIAL.....	478
A. Advokasi, Konsep, dan Definisi.....	479
B. Tipe-tipe Advokasi	484
C. Advokasi Kebijakan	487
D. Advokasi Sosial	495
E. Advokasi dan Perubahan Sosial	496
F. Menggunakan Advokasi Kebijakan Sebagai Advokasi Sosial	498
G. Hasil yang Diharapkan dari Advokasi Kebijakan	499
H. Tujuan dan Fungsi Advokasi	499
I. Komponen-komponen Inti Advokasi Kebijakan	501
J. Elemen Kampanye Advokasi Kebijakan	507
K. Empat Lingkup Pengaruh: Siapa yang Terlibat dalam Kebijakan Advokasi?	510
L. Mengembangkan Strategi Advokasi	513
M. Tahapan Perencanaan Advokasi	513
N. Memilih Pendekatan Advokasi	514
O. Memilih Strategi Advokasi yang Efektif	515
P. Tujuh Tahapan Advokasi Kebijakan yang Efektif	516
Q. Kemampuan Dasar dalam Melakukan Advokasi Kebijakan	522
R. Monitoring dan Evaluasi Advokasi Kebijakan	527
DAFTAR PUSTAKA	541
TENTANG PENULIS	563

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Model Kesejahteraan Leibfried (1991)	15
Tabel 2	: Tiga Model Kesejahteraan Mishra (1981)	22
Tabel 3	: Pola Kesejahteraan Dalam Tiga Tipe Masyarakat Ideal	24
Tabel 4	: Rangkuman Tiga Perspektif Teoritis Masalah Sosial	200
Tabel 5	: Penyebab Perubahan Sosial dan Dampaknya	269
Tabel 6	: Penyebab Tingkat Kelahiran	281
Tabel 7	: Model Pendekatan Perilaku atau Rasional..	364
Tabel 8	: Model Pendekatan Inkremental	365
Tabel 9	: Potensi Tantangan Evaluasi Kebijakan.....	465
Tabel 10	: Proses Pembuatan Kebijakan	450
Tabel 11	: Daftar Inventaris Pertanyaan Pengukuran Kapasitas Diri dan Lembaga	503
Tabel 12	: Contoh Strategi Advokasi	515
Tabel 13	: Tahapan Advokasi Kebijakan yang Efektif ..	516
Tabel 14	: Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi	530
Tabel 15	: Contoh Model Logika	534

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Diagram Model Kesejahteraan Residual.....	7
Gambar 2	: Diagram Model Kesejahteraan Kinerja – Pencapaian Industrial (Titmuss).....	10
Gambar 3	: Diagram Model Redistributif Institusional (Titmuss).....	11
Gambar 4	: Gambaran Spektrum Pergerakan Ideologi Dari Kiri ke Kanan.....	32
Gambar 5	: Diagram Jumlah Pekerja Informal Indonesia (Februari 2018-Februari 2021).....	172
Gambar 6	: Diagram Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja (Februari 2021).....	173
Gambar 7	: Diagram Faktor-faktor Perubahan Sosial.....	279
Gambar 8	: Diagram <i>Cultural Lag</i>	290
Gambar 9	: Hubungan Antara Kebijakan Publik, Kebijakan Sosial, dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial.....	353
Gambar 10	: Proses Perumusan Kebijakan Sosial.....	370
Gambar 11	: Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2017..	403
Gambar 12	: Diagram Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Indonesia dari Tahun 2013 – 2020.....	405
Gambar 13	: Perbandingan Skor dari 2013 -2020 dan Grafik Kenaikan Kebahagiaan Indonesia Periode 2013-2020.....	405
Gambar 14	: Fase pengembangan kebijakan dan jenis evaluasi.....	449
Gambar 15	: Ringkasan Advokasi Kebijakan.....	491
Gambar 16	: Diagram Kapasitas Advokasi Kebijakan yang Efektif.....	502
Gambar 17	: Struktur Dasar Model Logika.....	533
Gambar 18	: Contoh Indikator dengan Pendekatan Model Logika.....	536
Gambar 19	: Penggunaan Metode dalam Pengumpulan Data.....	538
Gambar 20	: Contoh Metode <i>Policymaker Ratings</i>	539

Dekki Umamur Rais, S.Sos., M.Soc.SC
Dody Setyawan, S.Sos., M.AP

KEBIJAKAN SOSIAL
SEJARAH, TEORI, KONSEP, DAN PRAKTIK

POLITIK NEGARA KESEJAHTERAAN DAN KEBIJAKAN SOSIAL

Kita Pahami bahwa sebagian besar negara demokrasi modern hari ini merupakan 'negara kesejahteraan'. Pembentukan negara-negara kesejahteraan di negara-negara demokratis merupakan perkembangan yang cukup luar biasa pada abad ke-20. Dalam negara kesejahteraan, peran dan fungsi pemerintah sangat luas dan beragam. Di zaman modern, tanggung jawab dan fungsi pemerintah telah meningkat melampaui batas-batas normal. Konsep negara pada periode awal adalah 'kebijakan negara', yaitu, pemerintah harus melakukan fungsi kedaulatan bersama dengan mewujudkan sistem keselamatan dan keamanan publik dan itu menjadi tugas utama setiap pemerintahan negara. Tetapi, demokrasi telah mengubah wajah, peran, dan fungsi pemerintahan yang sesungguhnya. Saat ini, melalui konsep 'negara kesejahteraan', makna demokrasi telah didefinisikan kembali melalui serangkaian kebijakan yang mampu memenuhi hajat hidup orang banyak.

Adanya kesenjangan yang sangat besar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dalam suatu negara tidak hanya menunjukkan adanya tanda-tanda kegagalan sebuah negara dalam mengelola keadilan sosial, tetapi kemiskinan yang akut dengan perbedaan penguasaan ekonomi yang mencolok akan menimbulkan dampak buruk dalam segala segi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut akan dirasakan mulai dari rasa ketidakberdayaan masyarakat miskin, hingga berdampak buruk pada demokrasi, kelompok-kelompok miskin akan dengan mudahnya menerima suap (menjual suaranya dalam pemilihan umum) akibat keterjepitan ekonomi, sebagaimana banyak disinyalir sedang terjadi di Indonesia. Dalam beberapa kali pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah praktek politik uang terjadi. Bahkan, adanya rasa frustrasi yang tinggi di kalangan kelompok-kelompok miskin akan mudah disulut untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, yang

berakibat kontra produktif bagi pembangunan negara dan perkembangan demokrasi.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka dikembangkanlah konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), sebuah sistem kenegaraan yang berusaha untuk memperkecil jurang pemisah antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin melalui berbagai usaha pelayanan kesejahteraan untuk warga negaranya. Secara sederhana, negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang menitik beratkan pada kepentingan kesejahteraan warga negaranya. Tujuan dari negara kesejahteraan bukan hanya untuk menghilangkan perbedaan dalam ekonomi masyarakat, tetapi memperkecil kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat.

Negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu suatu negara yang memberikan tunjangan jaminan sosial (*social security benefits*) yang luas seperti pelayanan kesehatan negara, pensiunan yang dikelola negara, tunjangan untuk orang sakit dan pengangguran, dan lain sebagainya. Dalam perspektif yang lebih luas, negara kesejahteraan mengandung dimensi ekonomi dan politik. Dalam perspektif ekonomi, negara kesejahteraan adalah sistem ekonomi yang dipraktekkan oleh suatu pemerintahan dalam bentuk program-program kesejahteraan sosial (*social welfare*) seperti pelayanan kesehatan (*health care*), pendidikan (*education*), tenaga kerja (*employment*), dan jaminan sosial (*social security*). Negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintahan yang dimaksudkan untuk kesejahteraan (kesejahteraan rakyat). Dengan kata lain, negara kesejahteraan merupakan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan 'kesejahteraan' warga negara. Oleh karena itu, Negara kesejahteraan mengambil tanggung jawab penting dalam mewujudkan kesejahteraan, seperti kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya.

Kesejahteraan menyiratkan berbagai manfaat atau berbagai mode bantuan yang akan diberikan kepada orang-orang (warga negara) melalui berbagai kebijakan. Bisa dalam bentuk uang atau layanan-layanan sosial. Prakteknya bisa dalam bentuk pembayaran tunai, subsidi, konsesi, hibah dan distribusi publik dengan kerangka kesejahte-

raan. Langkah-langkahnya (proses) kesejahteraan bisa saja berbentuk redistribusi pendapatan pemerintah kepada yang membutuhkannya. Sementara, dalam perspektif politik, negara kesejahteraan adalah negara yang mempromosikan kesejahteraan publik (*public welfare*) sebagaimana perspektif ekonomi. Bedanya, realisasi dari program *welfare state* tersebut (hanya) digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan melawan oposisi. Dari dua perspektif di atas, mengindikasikan bahwa negara kesejahteraan merupakan suatu bentuk program kebijakan negara dalam berbagai bentuk perlindungan sosial yang ditujukan kepada publik.

Negara kesejahteraan atau *welfare state* digunakan untuk menyatakan suatu negara yang pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga negaranya (Midgley, 1997). Konsep ini menyatakan hal yang ideal untuk dibandingkan dengan kenyataan yang ditemui di suatu negara tertentu. Jadi, suatu negara dapat dinilai berdasarkan seberapa banyak pelayanan-pelayanan sosial yang disediakan untuk warga negaranya. Dalam pandangan Midgley (1997), istilah *welfare state* di kalangan kesejahteraan sosial dan kebijakan sosial, perlu dikemukakan pendapat beberapa ahli yang membuat penggolongan atas usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh negara berdasarkan kriteria mereka masing-masing, yang mempunyai implikasi pada konsep negara kesejahteraan itu sendiri.

Di Inggris, konsep *welfare state* dipahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin (Suharto, 1997; Spicker, 2002). Berbeda dengan sistem dalam *The Poor Law* yang dimaksud, kesejahteraan negara difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain. Kesejahteraan negara ditujukan untuk menyediakan layanan-layanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. *Welfare State* berupaya untuk mengintegrasikan setiap sistem sumber daya negara dan melakukan

penyelenggaraan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya (Spicker, 1995). Menurutny, negara kesejahteraan merupakan anak kandung sah dari pergumulan ideologi dan teori, khususnya aliran sayap kiri (*left wing view*), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik. Namun, menariknya, konsep kesejahteraan negara justru tumbuh subur dan berkembang luas di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis sebagaimana seharusnya.

Di negara-negara Barat, kesejahteraan negara sering dipandang sebagai strategi 'penawar racun' kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, *welfare state* sering disebut sebagai bentuk dari 'kapitalisme baik hati' (Suharto, 2006). Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut *welfare state*. Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut *welfare state*, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis.

Menurut Briggs (1961), negara kesejahteraan adalah negara di mana kekuasaan terorganisasi yang dengan sengaja digunakan (melalui politik dan administrasi) untuk memodifikasi permainan kekuatan pasar setidaknya dalam tiga arah - pertama, dengan menjamin pendapatan minimum individu dan keluarga terlepas dari nilai pasar, dari pekerjaan mereka, atau milik mereka. Kedua, dengan mempersempit tingkat ketidaksetaraan dengan memungkinkan individu dan keluarga untuk memenuhi "kemungkinan sosial" tertentu (misalnya, penyakit, usia tua dan pengangguran) yang mengarah pada krisis individu dan keluarga. Ketiga, dengan memastikan bahwa semua warga negara tanpa perbedaan status atau kelas diberikan standar pelayanan terbaik yang

tersedia dalam kaitannya dengan berbagai layanan sosial tertentu yang disepakati.

Singkatnya, negara kesejahteraan memodifikasi dampak pasar, dengan cara menyediakan jaminan minimum (mengurangi kemiskinan); mencakup berbagai risiko sosial (keamanan), dan menyediakan layanan tertentu (perawatan kesehatan, perawatan anak dan orang tua, dll.) - dengan standar terbaik yang tersedia di negara penganut negara kesejahteraan. Negara-negara kesejahteraan berbeda dalam hal tingkat ambisi dan campuran antara aspek-aspek ini: Cakupan mungkin termasuk berbagai risiko dan layanan yang luas atau sempit, serta minimum dapat mengurangi kemiskinan atau bertujuan memberikan kesetaraan. Definisi Briggs di atas berkaitan dengan tradisi pemikiran kebijakan sosial dalam hal kewarganegaraan (pemikirnya adalah TH Marshall, Richard Titmuss di LSE, Walter Korpi, dan Gøsta Esping-Andersen).

Menurut J.M. Keynes dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah 'utility' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan orang sebanyak mungkin. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai "bapak kesejahteraan negara" (*father of welfare states*).

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem kesejahteraan negara adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Di Inggris, dalam laporannya mengenai *Social Insurance and Allied Services*, yang terkenal dengan nama *Beveridge Report*, Beveridge menyebut kemelaratan, kebodohan, keinginan, kemalasan, dan penyakit sebagai '*the five giant evils*' yang harus diperangi (Spicker, 1995; Bessant, et al,

2006). Dalam laporan itu, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang dipandanginya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (*from cradle to grave*). Pengaruh laporan Beveridge tidak hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan bahkan hingga ke AS yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di negara-negara tersebut. Sayangnya, sistem ini memiliki kekurangan. Karena berpijak pada prinsip dan skema asuransi, ia tidak dapat mencakup risiko-risiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak mampu membayar kontribusi (premi). Asuransi sosial gagal merespons kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti orang cacat, orang tua tunggal, serta mereka yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dalam jangka waktu lama. Manfaat dan pertanggungjawaban asuransi sosial juga sering kali tidak kuat, karena jumlahnya kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasar secara minimal.

Dalam konteks kapitalisme, Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara (Harris, 1999). Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Marshall, melihat sistem kesejahteraan negara sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespons konsekuensi-konsekuensi kapitalisme.

A. Tipologi Negara Kesejahteraan

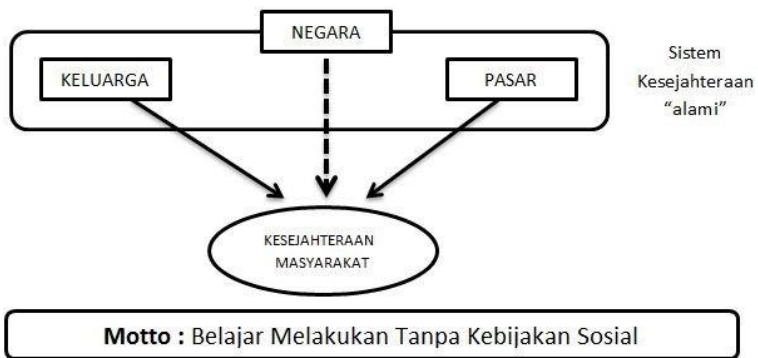
Tipologi pertama dan yang sering diungkapkan oleh banyak orang adalah tipologi yang dibuat oleh Wilensky dan Lebeaux. Mereka mengemukakan dua konsepsi kesejahteraan sosial. Konsepsi pertama mereka sebut sebagai konsepsi residual dan konsepsi institusional. Dalam perkembangannya Titmuss kemudian menam-

bahkan satu tipologi negara kesejahteraan, sehingga menjadi tiga model yakni redistributif institusional.

1. Model kesejahteraan residual

Model residual juga dikenal sebagai model “jaring pengaman”. Artinya hanya orang-orang yang tidak mampu saja yang bisa mengklaim kesejahteraan melalui layanan sosial. Bagi keluarga atau individu yang mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri tidak berhak untuk mengakses pelayanan sosial model ini. Model ini menerapkan pelayanan yang selektif, dipengaruhi oleh paham konservatif dan didorong oleh ideologi neo-liberal dan pasar bebas. Pelayanan diberikan dengan skema waktu yang singkat dan diberhentikan jika dirasa sudah cukup. Model ini berbasis rezim kesejahteraan liberal dan dicirikan dengan jaminan sosial yang terbatas terhadap kelompok selektif serta dorongan yang kuat bagi pasar untuk mengurus pelayanan publik.

Gambar 1. Diagram Model Kesejahteraan Residual



Sumber: Teori dan Praktek Negara Kesejahteraan di Eropa (www.ips.uw.edu.pl/rszarf/welfare-state/)

Apakah tipe ini merupakan bagian dari negara kesejahteraan?. Bila dilihat dari awal kemunculan dan tujuannya, negara kesejahteraan residual tak lebih dari sebuah katup pengaman untuk menyelamatkan kapitalisme dari pemberontakan kaum pekerja. Tipe ini, jika mau jujur, sebenarnya bukanlah tipe negara kese-

jahteraan, melainkan negara kapitalis yang berusaha mempertahankan kepentingan sistem kapitalismenya. Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial hanya akan memainkan peranannya apabila struktur masyarakat yang normal dan alamiah (lembaga keluarga dan lembaga ekonomi) mengalami disfungsi sosial atau tidak berfungsi. Konsep residual ini cenderung berfungsi sebagai tindakan kedaruratan (*emergency*), karena apabila lembaga yang bersifat alamiah tadi masih berfungsi dengan baik, maka konsep ini tidak dapat dipergunakan (dihentikan jika kondisi sudah normal). Dalam model ini, pembuatan kebijakan sosial akan dilakukan jika pasar swasta dan keluarga sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan. Sederhananya, pelayanan sosial akan diberikan jika lembaga-lembaga swasta (pasar) yang ada dalam masyarakat dan lembaga keluarga sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

2. Model kesejahteraan kinerja-pencapaian industrial

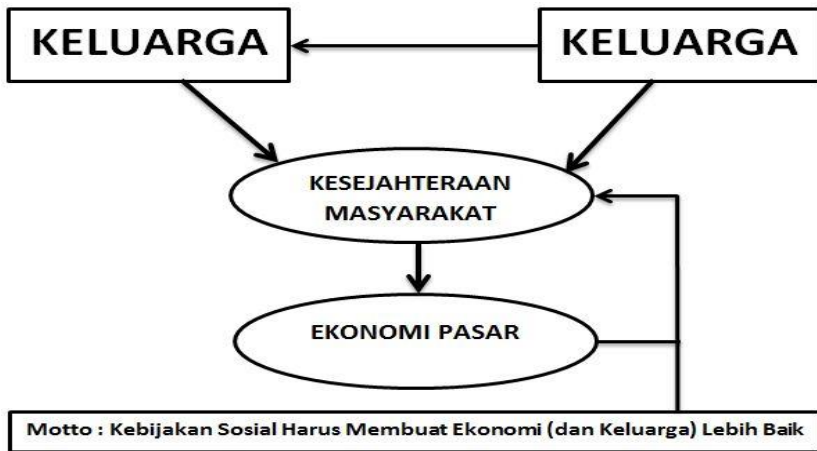
Beberapa kebijakan sosial dapat dilihat sebagai cara untuk mendukung pengembangan ekonomi (Titmuss, 1974). Pendidikan misalnya, dapat dilihat sebagai persiapan anak-anak untuk mengakses pekerjaan, dan perawatan kesehatan sebagai cara untuk mempertahankan kondisi dan produktivitas tenaga kerja. Contoh terbaik dari sistem ini adalah asuransi sosial ala Bismarck, berupa pemberian manfaat atas kontribusi dan usaha kerja keras para pekerja.

Secara historis, model ini dioperasikan di beberapa negara bagian, khususnya negara yang secara ekonomi dekat dengan sosialis (ekonomi yang dikendalikan sosialis), seperti bekas negara-negara sosialis. Walaupun begitu model ini juga beroperasi di beberapa negara kapitalis seperti Jerman, Prancis, dan beberapa negara lainnya di seluruh dunia. Ketentuan kebijakan sosial model ini terkait erat dengan ekonomi (model *handmaiden*) dan tujuan produksi. Model '*Handmaiden*', melihat kesejahteraan sebagai hal yang penting untuk melengkapi pengembangan industri. Kebijakan sosial dibuat untuk membantu pertumbuhan ekonomi

dengan cara melayani tenaga kerja, memberikan layanan kepada industri dan menawarkan keamanan asasi untuk pembangunan. Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial, model ini biasanya berpedoman pada jasa, prestasi kerja (kinerja), dan masa pengabdian dalam kerja. Pedoman-pedoman tersebut digunakan dalam melakukan pembayaran jaminan sosial seperti pensiunan publik dan asuransi sosial. Bentuk lainnya bisa berupa tunjangan pengangguran, tunjangan untuk orang cacat dan disabilitas. Bisa juga dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis untuk semua warga negara yang digunakan untuk membangun sumber daya manusia seperti yang dilakukan oleh negara Kuba dan Barbados.

Model ini berdasarkan ekonomi Keynesian yang melihat pengeluaran untuk kesejahteraan sebagai pengatur ekonomi yang berguna, membantu menyeimbangkan ekonomi dalam masa resesi. Namun, menurut Atkinson (1995), walaupun negara-negara maju umumnya membelanjakan lebih banyak untuk kesejahteraan daripada negara-negara kurang berkembang, negara-negara maju dengan belanja kesejahteraan yang lebih tinggi umumnya tidak melakukannya dengan lebih baik atau lebih buruk daripada negara-negara maju yang menghabiskan lebih sedikit anggaran untuk kesejahteraan. Dalam pandangan model ini, Kebijakan sosial adalah mitra penting bagi perekonomian. Tujuannya adalah untuk mengembangkan modal manusia, memastikan persatuan, solidaritas, dan komitmen pekerja.

Gambar 2. Diagram Model Kesejahteraan Kinerja – Pencapaian Industrial (Titmuss)



Sumber: Teori dan Praktik Negara Kesejahteraan di Eropa (www.ips.uw.edu.pl/rszarf/welfare-state/)

3. Model redistributif institusional

Kehidupan masyarakat modern sangat kompleks, sehingga tidak mungkin setiap individu memenuhi semua kebutuhannya, baik melalui keluarga maupun lingkungan kerjanya, dan hal itu dianggap sebagai suatu kondisi yang normal. Karena itu, kesejahteraan sosial dianggap sebagai suatu sistem pemenuhan kebutuhan yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern. Model ini bersifat universal, mencakup semua populasi warga, serta terlembaga dalam basis kebijakan sosial yang luas dan vital bagi kesejahteraan masyarakat.

Model ini dikembangkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. tujuannya untuk memfasilitasi kembali pembangunan kehidupan negara yang hancur akibat perang, mendukung pertumbuhan, dan menciptakan lapangan kerja secara penuh. Pada tahun 1948, untuk pertama kalinya, negara kesejahteraan Inggris diperkenalkan. Gagasan pengembangan model ini didasarkan pada gagasan bahwa

warga suatu negara memiliki hak dasar untuk mendapatkan kesejahteraan (Marshall).

Dalam model ini, lembaga kesejahteraan sosial adalah bagian dari masyarakat yang terintegrasi dan dilembagakan. Model Institusional melihat kebutuhan dan status ketergantungan pada warga negara, misalnya kebutuhan warga yang baru lahir, masa kanak-kanak, dan usia tua sebagai aspek normal dari kehidupan sosial. Pendekatan ini didasarkan pada penerimaan timbal balik tanggung jawab sosial untuk kebutuhan ini dan ketentuan umum untuk semua (Spicker, 2008). Model ini mendorong penyediaan layanan universal di luar pasar dan didasarkan pada kebutuhan individu. Saat ini, negara yang bisa dijadikan sebagai rujukan terbaik dalam penerapan model ini adalah negara-negara kawasan Skandinavia.

Model kesejahteraan institusional adalah model di mana kebutuhan dan ketergantungan diterima sebagai hal yang normal dalam masyarakat, atau 'dilembagakan'. Menurut Titmuss (1974), 'keadaan ketergantungan' yang dialami masyarakat harus diterima sebagai sesuatu yang normal dari kehidupan sosial. Kita, anak-anak kita pada tahap tertentu, mungkin akan berada dalam kondisi sakit, atau menjadi tua. Sistem institusional dikenali sebagai tanggung jawab sosial untuk kebutuhan ini dan membuat ketentuan umum yang sesuai. Model institusional didasarkan pada penerimaan tanggung jawab sosial untuk kondisi ketergantungan yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial.

Gambar 3. Diagram Model Redistributif Institusional (Titmuss)



Sumber: Teori dan Praktik Negara Kesejahteraan di Eropa (www.ips.uw.edu.pl/rszarf/welfare-state/)

Ramesh Mishra (1999), mengemukakan bahwa negara-negara industri dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu *differentiated welfare states* (negara kesejahteraan yang dibedakan) dan *integrated welfare states* (negara kesejahteraan yang terintegrasi). Norman Furniss dan Timothy Tilton (1977), membuat penggolongan yang terdiri atas tiga golongan. Model mereka meliputi *positive state* (negara positif), *social security state* (negara jaminan sosial) dan *social welfare state* (negara kesejahteraan sosial). Tipologi usaha kesejahteraan oleh negara yang sering dikutip oleh banyak penulis adalah yang dikemukakan oleh Gosta Esping-Andersen. Dalam berbagai Tulisannya Esping-Andersen (1990) menggunakan tipologi yang terdiri atas tiga golongan dengan menggunakan konsep dekomodifikasi (*decommodification*) sebagai kriteria utamanya. Menurutnya, dekomodifikasi tenaga kerja ini merupakan kriteria yang berguna untuk menentukan sejauh mana pemerintah suatu negara melakukan intervensi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial warga negaranya. Dekomodifikasi dipahami sebagai sejauh mana kesejahteraan rumah tangga tidak tergantung pada apa yang dapat mereka jual di pasar, dan defamilialisme _ dipahami sebagai sejauh mana hasil kesejahteraan tidak tergantung pada posisi orang dalam rumah tangga.

Dengan menggunakan dekomodifikasi sebagai kriteria utama untuk menggolongkan penyediaan kesejahteraan oleh negara, Esping-Andersen mengemukakan tiga jenis “rezim kesejahteraan” yaitu *liberal welfare state* (negara kesejahteraan liberal), *conservative-corporatist welfare state* (negara kesejahteraan konservatif-korporatis) dan *social democratic welfare state* (negara kesejahteraan sosial demokrasi). Di negara kesejahteraan liberal, ada sedikit dekomodifikasi tenaga kerja dan pandangan bahwa kesejahteraan sosial jangan sampai mengurangi etika kerja yang telah diterima secara luas. Di negara kesejahteraan konservatif-korporatis, tingkat dekomodifikasi tenaga kerja adalah moderat dan pandangan yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak warga negara diterima. Sedangkan negara kese-

jahteraan sosial demokratis ditandai oleh tingkat dekomodifikasi tenaga kerja yang tinggi.

Esping-Andersen (1990) menyebut tipologi yang dikembangkannya menjadi beberapa sebutan tipologi, diantaranya:

- *Residual welfare state*

Ciri-ciri dari negara ini adalah jaminan sosial terbatas bagi kelompok target yang selektif, di mana pasar mendapat dorongan kuat untuk mengurus pelayanan publik, seperti yang dilakukan oleh negara-negara Anglo – Saxon (Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat). Model ini sangat lekat dengan rezim kesejahteraan liberal. Selain pemberian jaminan sosial yang terbatas dan selektif, ciri lainnya adanya kesempatan bagi swastanisasi pelayanan publik. Biasanya pelayanan sosial yang diberikan dengan waktu tertentu yang relatif pendek dan kecil.

- *Social insurance welfare state*

Model ini juga dikenal sebagai model korporasi dengan ciri sistem jaminan sosial yang tersegmentasi serta peran keluarga yang kuat sebagai pemasok kesejahteraan. Negara-negara yang mempraktekkan model ini adalah Belgia, Perancis, Jerman, Italia dan Spanyol. Model ini sangat lekat dengan ciri rezim kesejahteraan Konservatif. Jaminan sosial yang diberikan oleh negara kepada warga negara dilakukan secara terlembaga dan luas. Untuk membuat skema jaminan sosial mereka menggabungkan tiga pilar yaitu: Pemerintah, dunia usaha, dan kaum pekerja. Pelayanan sosial diberikan kepada warga negara yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. Penggagas dari model ini adalah Otto Van Bismarck sehingga dikenal sebagai model Bismarck.

- *Universalist welfare state*

Sebutan lain dari model ini adalah *Scandinavian Welfare State* dengan ciri cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok target luas serta tingkat dekomodifikasi yang ekstensif. Negara-negara yang mempraktekkan model ini adalah Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia dan Belanda. Model ini lekat

dengan rezim kesejahteraan sosial demokrat di mana jaminan sosial yang diberikan kepada warga negaranya bersifat menyeluruh.

B. Rezim Negara Kesejahteraan

Rezim mengacu kepada seperangkat norma, prinsip, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, baik itu dilakukan secara eksplisit maupun implisit, dengan tujuan untuk menyatukan harapan para aktor dalam tempat tertentu dalam kehidupan tatanan sosial (Krasner dan Gough dalam Triwibowo, dkk, 2006). Sementara menurut Esping-Andersen (1990; 1999), rezim kesejahteraan dipahami sebagai artikulasi program dan institusi kesejahteraan - termasuk negara, pasar, dan rumah tangga - mengasuransikan rumah tangga terhadap risiko sosial, dan karenanya mempromosikan serta melindungi kesejahteraan. Rezim kesejahteraan ini mengacu pada pola interaksi yang saling berkaitan dalam produksi dan alokasi kesejahteraan antara negara, sistem pasar, dan keluarga. Esping-Andersen, kemudian membaginya dalam varian-varian yang lebih kecil berdasarkan besar kecilnya peran aktor-aktor dalam negara kesejahteraan yang meliputi rezim kesejahteraan liberal, sosial demokrat dan konservatif.

Model kesejahteraan pada hari ini secara umum merujuk pada tipe ideal atau setidaknya dalam pemahaman normatif tentang kesejahteraan. kebanyakan untuk model ini para pakar banyak merujuk pada karya Esping-Andersen. Perbedaan utama dengan model pendekatan lainnya adalah pada bagian analisis dan pengklasifikasian rezim kesejahteraan yang didasarkan pada bukti empiris. Namun, pada pembuktian yang sama bisa saja terjadi penafsiran yang berbeda dengan berbagai cara yang berbeda pula. Leibfried (dalam Spicker, 2000), misalnya, menjelaskan empat ciri khas kesejahteraan di negara maju (fokus utamanya negara Eropa).

Tabel 01. Model Kesejahteraan Leibfried (1991)

Model Kesejahteraan	Negara	Pendekatan
Skandinavia	Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia	Kesejahteraan Maksimum (paling tinggi)
Negara-negara 'Bismarck'	Jerman dan Austria	Institusional
Negara-negara Anglo-Saxon,	Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru,	Residual
Negara-negara Latin (Latin Rim)	Spanyol, Portugal, Yunani, Italia, dan mungkin Prancis	Rudimentary

Sumber : Spicker 2013, Principles of social welfare an introduction to thinking about the welfare state

C. Ideologi dalam Pusaran Rezim Negara Kesejahteraan

Dalam tulisannya *The Welfare State and Equality*, Harold L. Wilensky (1975), tidak menemukan adanya hubungan positif antara ideologi dan pengembangan negara kesejahteraan. Berbeda dengan Harold, Mencher (1967), mengatakan bahwa kebijakan kesejahteraan kontemporer tidak hanya ditentukan oleh masalah teknis. Ada masalah ideologis mendasar yang mempengaruhi sifat pengambilan keputusan sosial dan ekonomi serta memiliki pengaruh penting bagi arah perkembangan masyarakat. Menurut (Spicker, 2013), prinsip tidak dibentuk secara acak; mereka muncul dalam ideologi, sekumpulan set ide yang saling terkait, seperti 'konservatisme' dan 'sosialisme'. Tetapi doktrin-doktrin ini lebih kompleks daripada apa yang sering disajikan oleh mereka, dan ada kontradiksi dalam posisi ketika dipegang orang. Sebuah Pemahaman akan prinsip sangat penting untuk memahami cara orang berpikir. Spicker (2013) menambahkan, bahwa sering kali sulit untuk memisahkan prinsip moral dari isu-isu seperti hak dan kebebasan, atau keadilan dan negara dari demokrasi dan kewarganegaraan. Sebagian terjadi karena masalah praktis yang tidak hanya menimbulkan satu masalah, tetapi banyak masalah.

Ada banyak masalah yang muncul dari nilai intrinsik ide-ide itu sendiri; ada koneksi yang jelas dan langsung di antara mereka. Pandangan bahwa orang ketika mengambil pendekatan redistribusi akan dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang kebebasan, moralitas, altruisme, hak, kewarganegaraan, negara, kekuasaan, kesetaraan dan keadilan; sama saja, semua konsep ini dipengaruhi oleh setidaknya beberapa hal lainnya. Ini berarti bahwa ide-ide cenderung dibentuk menjadi sebuah sistem pemikiran, bukan secara acak; prinsip-prinsip itu saling memberi informasi dan saling menguatkan. Sistem pemikiran ini disebut sebagai ideologi, serangkaian konsep yang saling terkait. “Bagikan dua karakteristik utama: citra masyarakat dan program politik. ... Sebuah ideologi ... memberikan perspektif yang koheren untuk memahami dan bertindak atas dunia sosial.” (Eccleshall dalam Spicker, 2013).

Ideologi Marxis melihat masyarakat dalam hal konflik antara kelas-kelas ekonomi, dan analisis kesejahteraannya terkonsentrasi pada hubungannya dengan bentuk kekuasaan. Fabians seorang sosialis, yang dipengaruhi oleh pemikiran Titmuss, Tawney dan Crosland, percaya pada reformasi masyarakat secara bertahap, dan melihat kesejahteraan sebagai sarana utama untuk mencapai kesetaraan sosial yang lebih besar. Sementara Keynes dan Beveridge yang 'enggan terhadap kolektivitas' akhirnya menerima 'ekonomi campuran' sebagai basis ideologi kesejahteraannya. Bagi mereka, negara kesejahteraan adalah suatu keharusan korektif terhadap kegagalan pasar yang kompetitif untuk memberikan keamanan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lain lagi dengan Hayek dan Friedman yang secara terang-terangan 'anti-kolektivistis', mereka menghargai kebebasan individu dan perusahaan swasta, serta melihat negara kesejahteraan yang tumbuh sebagai ancaman bagi otonomi dan kemandirian masyarakat.

George dan Wilding (1977; 1985), membedakan ideologi menjadi empat ideologi utama. Mereka berusaha untuk membantu mengidentifikasi perbedaan ideologi konvensional antara kiri, tengah dan kanan. Menurut mereka, kiri dan kanan adalah istilah yang agak kabur, terkait dengan keyakinan yang dipegang oleh seseorang dan afiliasi

politik seseorang. Seseorang yang secara politis berafiliasi dengan sayap 'kiri' berarti dia sosialis. Mereka menentang kebebasan pasar, mendorong kesejahteraan untuk kelas pekerja, dan kesetaraan hasil yang lebih besar. Sementara, seseorang yang berhaluan sayap 'kanan' adalah seorang individualis, yang mendukung pasar bebas, pembela dari segala sesuatu dan sebagainya. Menjaga kepentingan mereka agar mendapatkan keuntungan paling banyak dari masyarakat. Sementara kelompok politik 'golongan tengah' berdiri di antara mereka (kanan atau kiri). mereka adalah kelompok yang mendukung ekonomi campuran, hak-hak individu, dan tindakan kolektif. “Pada akhirnya yang membagi empat kelompok pemikir sosial tersebut adalah pandangan mereka yang berbeda tentang kebebasan dan kesetaraan” (George dan Wilding, 1985).

Tetapi ide-ide kebebasan dan kesetaraan, sebagaimana mereka gambarkan, pada gilirannya tergantung pada pandangan masyarakat, negara, dan ekonomi. Pandangan kebebasan yang diungkapkan oleh kelompok 'anti-kolektivistis' bukan hanya model kebebasan individu, tetapi juga terkait dengan konsep ekonomi pasar bebas, dan pembenaran utama mereka untuk masalah ketidaksetaraan adalah bahwa dalam ekonomi bebas kondisi seseorang adalah tidak setara. Sebaliknya, bagi kaum Marxis, dengan menggunakan spektrum lain, melihat kebebasan "dalam hal penghilangan rintangan untuk emansipasi manusia dan realisasi diri" (George dan Wilding, 1985). Mereka memandang organisasi ekonomi masyarakat kapitalis telah bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan.

Jika ditelaah jauh ke belakang, banyak nilai-nilai agama yang mempengaruhi sikap politik sebagian besar negara Eropa. Nilai-nilai agama turut berperan serta dalam merepresentasikan masing-masing rezim kesejahteraan, khususnya dalam kerangka etik negara kesejahteraan. Ideologi-ideologi tersebut merupakan proyeksi dari nilai religiusitas yang mempengaruhinya. Barr (1998) misalnya, secara gamblang menyatakan bahwa kerangka etik negara kesejahteraan adalah doktrin karitatif sosial (*social charity*) gereja yang bersumber dari nilai-nilai Katolik. Bukan hanya Barr saja, sarjana lainnya seperti Huber dan Stephens (2001), serta Manow (2004) menengarai hal

yang sama, bahwa ada keterkaitan erat antara nilai agama, khususnya doktrin sosial Katolik dengan desain kerangka awal pembentukan negara kesejahteraan negara-negara Eropa. Manow kemudian mengurainya secara lengkap. Menurutnya, adanya perbedaan rezim kesejahteraan di negara-negara Eropa karena dipengaruhi oleh “ragam” nilai-nilai dasar agama. Sebagai contoh, negara dengan basis Protestan reformis lebih berorientasi pada rezim kesejahteraan liberal. Sementara negara dengan basis Protestan Lutheran cenderung memilih sosial demokrat sebagai rezim kesejahteraannya. Jika negara tersebut berbasis Katolik Roma, maka ada kecenderungan negara tersebut akan memilih rezim kesejahteraan konservatif.

Sejarah munculnya negara kesejahteraan merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap mekanisme pasar yang tidak adil dan cenderung eksplosif sehingga tidak bisa membawa kepada kesejahteraan asas manusia. Dalam prakteknya mekanisme pasar menyebabkan adanya jarak yang luar biasa dalam stratifikasi sosial masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan pemikiran etika Katolik yang mempengaruhi peta pemikiran timbulnya negara kesejahteraan. Dalam etika Katolik menurut Kelly (1994) sangat alergi dengan *Selfishness* (orientasi diri) dan *avarice* (ketamakan). Etika tersebut kemudian memunculkan konsep keadilan sosial yang akan melegitimasi negara untuk melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar.

Munculnya paham keadilan sosial, dalam perjalanannya kemudian berkembang menjadi dua aliran, yakni Welfarism dan egalitarianism. Aliran Welfarism menganggap semua manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat untuk memastikan setiap individu bisa memiliki akses penuh terhadap sumber-sumber kebutuhannya. Masalahnya, dalam sistem kapitalis dengan *laissez-faire*nya tidak mampu untuk menjawab atau menjamin tuntutan tersebut, sehingga negara harus hadir untuk melakukan intervensi dengan cara memodifikasi mekanisme pasar yang cenderung tidak adil tersebut. Intervensi dilakukan dengan harapan agar mekanisme pasar mampu memenuhi tanggung jawab distribusinya. Sebaliknya, egalitarianism dengan tegas menyatakan bahwa kemakmuran hasil produksi masyarakat harus

didistribusikan dengan adil. Egalitarianism melihat kapitalisme dengan mekanisme pasarnya cenderung mendorong (membenarkan) adanya kesenjangan pendapatan dan kemakmuran diantara para individu, sehingga egalitarianism membutuhkan negara untuk memastikan distribusi kemakmuran telah terdistribusi secara merata dan adil.

Kaum liberal memiliki keyakinan bahwa kapitalisme merupakan sistem yang paling efisien dibandingkan dengan sistem lainnya. Walaupun efisien, kaum liberal juga tahu bahwa kapitalisme mempunyai dampak negatif berupa lahirnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kelompok liberal memiliki keyakinan besar bahwa negara bisa mengatasi masalah-masalah tersebut (George dan Wilding dalam Barr, 1998). Kelompok liberal sendiri terbagi dalam dua kutub. Pertama, kelompok *natural-right libertarian* yang dimotori oleh Nozick. Menurut kelompok ini, jika negara melakukan intervensi, maka negara telah melakukan kesalahan-kesalahan moral. Kedua, kelompok *empirical libertarian*, tokohnya adalah Hayek dan Friedman. Kelompok ini berbeda dengan kelompok yang pertama. Bagi kelompok kedua, jika negara melakukan intervensi maka akan menurunkan kesejahteraan. Mereka meyakini pentingnya fungsi redistribusi kesejahteraan dari negara untuk menjamin keadilan sosial dan kesetaraan dalam sistem kapitalis (Barr dalam Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Menurut Beveridge (dalam Barr, 1993), adalah suatu hal yang penting untuk menggunakan kuasa negara, sepanjang itu diperlukan tanpa menggunakan batasan apapun, serta untuk menghindari lima penyakit utama di dalam masyarakat, seperti ketamakan, penyakit menular, ketidakpedulian, kekejaman (*squalor*), serta kesia-siaan (*idleness*). Keyakinan tersebut serupa dengan keyakinan Keynes yang memandang bahwa kapitalisme tidak bisa mengatur dirinya sendiri (George dan Wilding, 1976). Keynes (dalam George dan Wilding, 1976), menunjukkan bahwa kapitalisme tidak selalu dengan sendirinya bisa mengkoordinir permintaan dan penawaran dengan harmonis melalui mekanisme pasar bagi keseluruhan perekonomian, khususnya ketika terjadi defisit permintaan agregat.

Sementara, kaum kolektivis seperti Keynes, Galbraith, dan Beveridge, sependapat dengan pandangan liberal dan percaya

tentang pentingnya kehadiran negara dalam perekonomian. Bagi mereka, negara dibutuhkan untuk memikul tanggung jawab pengelolaan ekonomi dengan tujuan untuk memelihara agregat permintaan yang akan menjamin kesempatan kerja secara penuh. Mereka juga percaya perekonomian tanpa kehadiran negara tidak akan mampu melawan kemiskinan (George dan Wilding, 1976). Keynes, Galbraith, dan Beveridge, memandang kapitalisme sebagai sebuah sistem yang paripurna. Negara kesejahteraan dalam sistem kapitalisme adalah usaha agar nilai-nilai kapitalisme bisa diterima secara moral melalui kehadiran negara dalam sistem ekonomi kapitalis. Mereka berusaha menyelamatkan muka kapitalisme dengan cara menghapus nilai-nilai kapitalisme yang tidak bisa diterima secara moral. Karena bagi Keynes, kesalahan kapitalisme bukan pada nilai-nilai dasarnya, tetapi lebih kepada persoalan teknis. Keynes yakin jika kapitalisme dikelola dengan bijaksana, maka kapitalisme akan menjadi alat yang sangat efisien untuk mencapai kemakmuran ala kapitalis. Negara kesejahteraan bagi Keynes bisa menjadi jalan tengah antara anarki *laissez-faire* dan keganasan totaliterisme (George dan Wilding, 1976).

Perspektif residual sangat kental kaitannya dengan kelompok konservatif. Seperti yang digambarkan oleh Zastrow (2000) dan Pasons, dkk. (1994), kelompok ini cenderung anti perubahan. Bagi mereka perubahan hanya akan menghasilkan kehancuran bagi tradisi dan kepercayaan, sehingga dampak negatifnya lebih besar dibanding dengan dampak positifnya. Karenanya, ekonomi dengan mekanisme pasar tidak boleh diintervensi oleh negara. Kelompok ini berasumsi 'biarlah pasar yang mengatur kesejahteraan' dan 'biarlah pasar yang memenuhi kebutuhan individu'. Menurut kelompok ini, daripada bersusah payah untuk melakukan intervensi terhadap pasar, pemerintah lebih baik mendukungnya melalui pemberian insentif pajak yang baik. Kelompok yang terkenal dengan pendekatan *blaming the victim approach* (menyalahkan korban) ini menganggap terjadinya persoalan sosial seperti kemiskinan adalah kesalahan masing-masing individu bukan sistem sosialnya, sehingga sepatutnyalah mereka menanggung sendiri akibatnya. Kalaupun ada campur tangan negara, menurut kaum residualis tidak lebih dari sekedar '*Charity for*

unfortunates'. Kelompok residualis meyakini negara kesejahteraan dengan tampilan *rudimentary*, selektivitas, dan melibatkan pendekatan *means-tested* adalah model yang tepat untuk dijalankan dalam sistem kesejahteraan sosial suatu negara (Spicker, 1995; Suharto, 2005).

Sementara pendekatan Institusional yang dipengaruhi oleh ideologi Liberal percaya bahwa perubahan adalah baik dan membawa pada kemajuan (Zastrow, 2000; Pasons, et.al, 1994). Bagi kaum liberal, ekonomi pasar dan kesejahteraan perlu diatur sedemikian rupa untuk menjamin adanya kesetaraan dan kompetisi yang adil. Kelompok ini membenarkan pemerintahan negara untuk mengatur (intervensi) pasar dan memberikan pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah hal yang sah dan tepat dalam masyarakat modern. Warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan sosial.

Dalam pendekatan Institusional, model negara kesejahteraan bersifat universal. Intervensi pemerintah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya secara luas dan berkelanjutan. "... intervensi dan peraturan pemerintah selalu diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia, untuk mengatur dampak kapitalisme, dan memberikan peluang yang sama untuk mencapai kesuksesan. Mereka akan memperluas egalitarianisme dan hak-hak kaum minoritas." (Zastrow, 2000). Pendekatan Institusional cenderung mendekati ideologi radikal. Menurut Parson, et, al (1994), penganut pendekatan Institusional cenderung menyalahkan sistem sebagai penyebab masalah-masalah sosial (*blaming the system approach*). Individu dan kelompok rentan dianggap sebagai warga negara yang sehat, partisipatif, dan aktif. Bukan individu yang menyebabkan kemiskinan tetapi sistem yang tidak berpihaklah yang menjadi penyebabnya. Akar masalahnya adalah sistem sosial yang menindas, tidak adil, seksis, dan rasis yang kemudian menjadi kapitalis.

Untuk lebih memahami tentang pengaruh ideologi dalam negara kesejahteraan ada baiknya kita membaca lagi apa yang disampaikan oleh Mishra (1981). Dalam pandangannya, Mishra menguraikan tiga set pandangan umum kesejahteraan, yang ia sebut sebagai 'residual', 'institusional' dan 'sosialis'.

Tabel 02. Tiga Model Kesejahteraan Mishra (1981)

	RESIDUAL	INSTITUSIONAL	SOSIALIS
<i>Sikap Untuk :</i>			
Intervensi Negara	Minimal	Optimal	Total
Kebutuhan sebagai dasar ketentuan	Margjinal	Sekunder	Primer
Bentuk Layanan	Terbatas	Luas	Komprehensif
Populasi yang dilindungi	Minoritas	Mayoritas	Semua
Tingkat Manfaat	Rendah	Sedang	Tinggi
Jumlah % dari pendapatan nasional yang dihabiskan untuk kesejahteraan	Rendah	Sedang	Tinggi
Klien	Orang miskin	Warga masyarakat	Sebagian masyarakat
Status Klien	Rendah	Sedang	Tinggi
Orientasi	Paksaan	Utilitarian	Solidaritas
Peran Pelayanan oleh Swasta	Primer	Sekunder	Marjinal

Sumber: Spicker (2013), dalam *“Principles of social welfare an introduction to thinking about the welfare state”*

Presentasi Mishra menunjukkan model-model ini tidak berbeda dalam hal yang fundamental maupun tingkatannya. Model tersebut mencerminkan pandangan umum tentang urutan sejarah yang dilalui dalam terbentuknya 'negara kesejahteraan' Inggris. Tampaknya, mungkin untuk beralih dari satu model ke model berikutnya - konsisten dengan pandangan bahwa 'negara kesejahteraan' adalah tahapan menuju sosialisme. Tetapi, menurut Spicker (2013), deskripsi proses perubahan pandangan dan kebijakan tidak dapat dengan mudah diperluas ke diskusi tentang prinsip-prinsip. Sulit untuk melihat bagaimana seseorang dapat bergeser dari satu prinsip ke prinsip lain, dari model kebebasan individu ke model sosial, atau dari pandangan keadilan sebagai basis utama ke bentuk lain berdasarkan kebutuhan.

Spicker menambahkan, berdasarkan hasil ujian secara mendalam, kesan yang tercipta dari suatu kemajuan sebagian besar didasarkan pada salah tafsir tentang makna 'kesejahteraan institusional'. Kesejahteraan Institusional tidak hanya memperlakukan kebutuhan sebagai yang 'sekunder', dan tidak hanya mencakup 'mayoritas' populasi. Tentang model kelembagaan, Titmuss (dalam Spicker, 2013), mendeskripsikan bahwa setiap orang pada titik tertentu dipandang sebagai pihak yang berkewajiban, dan karenanya setiap orang mendapat manfaat sebagai warga negara, yaitu melalui penyediaan layanan sosial yang menjamin tersedianya perlindungan. Prinsip ini sangat mendasar bagi gagasan 'negara kesejahteraan'. Jelas, jika kesejahteraan institusional ditafsirkan dengan cara ini, itu akan tumpang tindih dengan model 'sosialis' Mishra. Namun, ada perbedaan penting yang harus dibuat antara keduanya. Model sosialis, yang sama dengan pandangan institusional tentang kesejahteraan, menekankan unsur solidaritas, dan menyiratkan bahwa manfaat akan dibayarkan pada tingkat yang optimal. Tetapi orientasi sistem 'sosialis' mungkin juga egaliter solidaristik, sedangkan dalam kesejahteraan, sumber daya negara didistribusikan kembali untuk melindungi warga negara dan menawarkan jaminan sosial (dalam arti luas) sebagai hak. Dalam model sosialis, distribusi sumber daya diatur menurut konsep keadilan sosial yang egaliter. Kesejahteraan institusional bukan hanya sebuah tahap peralihan antara residual dan model sosialis; mungkin lebih tepatnya dapat digambarkan sebagai alternatif untuk keduanya (Spicker, 2013).

Melalui tulisannya *Social Justice*, Miller (1976) memodifikasi pendekatan Mishra. Miller kemudian mengidentifikasi berbagai ide keadilan dengan model masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat hirarkis atau feodal dicirikan oleh adanya perpecahan sosial yang kaku, dan konsep keadilannya menyiratkan distribusi berdasarkan status. Sementara masyarakat pasar dicirikan dengan sifat individualis dan kompetitif; keadilan didasarkan pada keadaan sebenarnya, diukur dengan imbalan yang diterima oleh seseorang dari hasil persaingan dengan orang lain. Sedangkan masyarakat kolektivistis, hak dan tanggung jawab dibagikan secara merata kepada semua orang

sebagai anggota komunitas. Miller, menyebutnya sebagai masyarakat 'primitif', karena hanya dalam masyarakat primitiflah tingkat kolektivisme dan dukungan timbal balik yang tinggi itu ada. Namun secara umum, masyarakat saat ini menyebutnya sebagai 'sosialis', di mana distribusi yang adil dibuat sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 03. Pola Kesejahteraan Dalam Tiga Tipe Masyarakat Ideal

Tipe Masyarakat yang ideal	Hirarkis	Individualis	Kolektivis
Unit Sosial Organisasi	Keluarga	Individu	Komunitas
Status Individu	Terikat dengan tugas	Independen	Warga negara
Organisasi Politik	Aristokrasi	Demokrasi representatif	Demokrasi partisipatif
Moral Dasar Kesejahteraan	Karikatif	Residual	Institusional
Bentuk Kesejahteraan	Sukarela / pekerjaan	Selektif	Universal
Bentuk Pertukaran	<i>Ritualised</i>	<i>Balanced</i>	<i>Generalized</i>
Bentuk Stigma	Kasta	Individual	Sosial
Interpretasi Kebebasan	Tugas	Individual	Sosial
Dasar Keadilan	Status	Desert	Kebutuhan
Basis Hak	Dianggap	Diakuisisi	Universal

Sumber: Spicker (2013), dalam buku *Principles of social welfare an introduction to thinking about the welfare state*.

Kondisi masyarakat yang berbeda akan berpengaruh terhadap timbulnya ide, sistem, dan pola pikir yang berbeda. Masyarakat hirarkis sangat bergantung kepada konsep tugas - tugas keluarga, bergantung kepada orang-orang di atas dirinya sendiri dalam hierarki, serta kesejahteraan didasarkan pada tugas donor, bukan hak penerima. Sementara masyarakat individualis menekankan kemerdekaan dan kompetisi. Kesejahteraan bagi kaum individualis akan terwujud dalam

pasar yang kompetitif. sedangkan masyarakat kolektivis menekankan adanya solidaritas dan saling mendukung.

Diagram di atas sangat membantu dalam memetakan kenyataan sosial tentang pola-pola masyarakat ideal, bagaimana kemudian ide, sistem dan gagasan bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dan menjadi ciri khas masing-masing model masyarakat. Diagram di atas secara jelas mampu membuktikan bukan hanya prinsip saja yang berbeda, dan bukan hanya nilai saja yang berbeda, tetapi model masyarakatnya pun juga berbeda dalam pikiran.

Namun, menarik apa yang disampaikan oleh Tawney (dalam George dan Wilding, 1976), yang mengatakan bahwa negara kesejahteraan bukan merupakan wujud dari sosialisme. Walaupun terdapat persinggungan antara liberal dengan kolektivis sosial demokrat dalam hal “keadilan sosial” dan “tugas serta tanggung jawab bersama yang kuat untuk membantu yang lemah”. Namun persinggungan tersebut tidak bisa serta merta menghapuskan perbedaan mendasar diantara pemikiran liberal dengan kolektivis. Kelompok kolektivis memandang negara kesejahteraan sebagai bentuk tahapan (*a staging post in the transition*) peralihan dari *laissez-faire* menuju sosialisme sejati (Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Bagi kelompok kolektivis Marxian ini lebih radikal lagi, bahwa terbentuknya negara kesejahteraan tidak lebih dari hanya sekedar tipu muslihat untuk melindungi kepentingan mereka agar terus bisa berkompetisi secara bebas dan memperoleh keuntungan maksimal dari hasil berkompetisi. Bagi mereka, Negara Kesejahteraan hanya berfungsi untuk membantu memenuhi kebutuhan industri mereka, tidak lebih.

Pandangan kolektivis marxian, pada awal berkembangnya negara kesejahteraan mungkin sangat benar, khususnya di kawasan Eropa kontinental yang mayoritasnya konservatif. Namun seiring dengan menguatnya pengakuan hak sosial universal warga negara oleh beberapa negara, seperti di negara eropa kawasan Skandinavia, maka pandangan kolektivis Marxian perlu ditinjau ulang.

D. D. Ideologi Politik dan Kesejahteraan

Kita dapat mengidentifikasi sejumlah tradisi pemikiran politik dan sosial yang luas, atau ideologi di Inggris yang berkembang sejak abad ke-19, termasuk, yang paling penting, yaitu liberalisme dan sosialisme (Pearson dan Williams, 1984). Pemikiran tersebut terkait erat dengan partai-partai politik yang ada di kawasan benua Eropa. Partai-partai tersebut memiliki semacam kesinambungan kelembagaan dalam periode waktu yang lama. Hingga abad ke - 19, pemikiran-pemikiran tersebut masih mempengaruhi corak pemikiran dan cara berjuang partai-partai politik di sana. Tidak hanya di Eropa, pengaruh sosialisme dan liberalisme bahkan di ekspor ke negara-negara lain di luar benua Eropa, katakanlah Australia, Amerika Latin, dan sebagian Asia.

Posisi politik secara umum biasanya diidentifikasi melalui spektrum dari 'kiri' ke 'kanan'. Pengklasifikasian ini awalnya terjadi di dalam parlemen Prancis, anggota partai konservatif duduk di kursi bagian kanan, sementara kelompok sosialis duduk di sebelah kiri. Dari situlah awal mula penyebutan kelompok kanan dan kelompok kiri. Istilah kanan dan kiri ini cukup lazim sebagai sebutan dalam pemikiran politik, tetapi maknanya cukup kabur; apa yang dianggap sebagai 'kiri' dan 'kanan' lebih berkaitan dengan konvensi daripada dengan argumen intelektual. Ada berbagai macam penggolongan dalam kelompok 'kiri' dan 'kanan'. Kiri biasanya diwakili kelompok demokrat sosial, sosialis sendiri, dan Marxis. Sedangkan kelompok kanan diwakili oleh Kristen demokrat, Konservatif, Liberal dengan pasar bebasnya, dan kelompok Fasis.

1. Liberalisme

Liberalisme klasik muncul pada awal abad ke-19 dan biasanya dikaitkan dengan sekelompok gagasan yang mengidentifikasi - *laissez-faire*, hak-hak alami, individualisme, kebebasan, dan negara minimalis. Liberalisme klasik dikaitkan dengan perkembangan ilmu sosial ekonomi politik - cikal bakal ekonomi modern. Nilai terpenting bagi kaum liberal adalah kebebasan, dan salah satu cara mendefinisikan liberalisme adalah dengan cara menyebutnya sebagai ideologi kebebasan.

Gagasan mendasar pemikiran liberal lainnya adalah individualisme. Keuntungan dari sistem ekonomi pasar bebas berasal dari nilai-nilai individualisme, yaitu perilaku egois yang membabi buta dari berbagai individu yang sedang berinteraksi sebagai pembeli atau penjual di berbagai mekanisme pasar, baik itu pasar tenaga kerja, pasar modal maupun pasar barang. Tindakan individu dianggap lebih unggul daripada tindakan kolektif (setidaknya dalam bentuk tindakan pemerintah). Individualisme diekspresikan secara moral melalui kepercayaan perilaku khas liberal dengan menjunjung tinggi hak 'alami' individu atau hak-hak 'manusia'. Kebebasan dalam moral yang sebenarnya bertentangan dengan pengertian ekonomi ditafsirkan sebagai kepemilikan dan seperangkat hak (kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, kebebasan keyakinan dan beribadah sesuai agama masing-masing, kebebasan dari penangkapan dan pemenjaraan yang sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan sebagainya) (Gray, 1986; Bellamy, 1992; Vincent, 1992; Freedman, 1996).

Kaum liberal klasik berpendapat bahwa peran negara harus diminimalkan - dikurangi sedemikian rupa untuk tidak campur tangan dan mengatur sesedikit mungkin serta menempatkan dirinya sekecil mungkin dalam kehidupan sosial. Negara adalah kekuatan koersif dengan kata lain pemaksaan itu sendiri dapat dimaknakan sebagai tindakan jahat. Di sisi lain, negara juga penting, negara harus mengamankan kesejahteraan umum dengan memberikan kerangka hukum umum, tidak memihak, tidak korup, dan mampu memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan harta benda. Negara tidak perlu bersusah payah menyediakan kesejahteraan. Negara hanya perlu mempromosikan dan memberikan kesempatan yang terbaik agar individu bisa bergabung, membuat kontrak, dan bertukar secara bebas satu sama lain melalui pasar atau bentuk tindakan sukarela lainnya. Tindakan sosial dan penyediaan barang-barang kesejahteraan lebih efektif bila dilakukan dengan cara mendorong keswadayaan dan kemandirian individu secara komersial melalui pasar, serta dengan berbagai bentuk aksi sukarela dan asosiasi untuk tujuan amal dan saling membantu. Negara hanya

perlu memberikan semacam jaring pengaman sosial yang minimum untuk warga negara yang benar-benar melarat dan tidak mampu.

2. Marxisme

Kaum Marxis melihat masyarakat berada dalam konflik antar kelas ekonomi. Kelas dominan (kelas borjuis atau kapitalis) memiliki dan mengendalikan alat-alat produksi, sementara kelas pekerja industri (proletariat), dieksploitasi oleh mereka. Analisis kesejahteraan Marxis memusatkan perhatiannya pada hubungannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Negara dilihat sebagai instrumen kelas kapitalis yang berkuasa, atau sebagai satu set sistem yang kompleks yang mencerminkan kontradiksi masyarakat yang menjadi bagiannya. Marxis mengembangkan kesejahteraan melalui kekuatan resistensi kelas pekerja terhadap eksploitasi.

Marxisme bukanlah doktrin tunggal, ia telah berdiri dalam berbagai bentuk pendapat dalam rangka membuat analisa yang kritis terhadap masyarakat 'kapitalis' (Spicker, 2014). Neo-Marxis berpendapat bahwa negara memiliki dua fungsi utama: pertama, meningkatkan kondisi akumulasi modal - yaitu, kesempatan bagi industri untuk menghasilkan laba. Kedua, adalah untuk melegitimasi sistem kapitalis, dengan memperkenalkan langkah-langkah (seperti kebijakan kesejahteraan, pensiunan, dan layanan kesehatan) yang mengarahkan orang untuk menerima sistem apa adanya. Persyaratan akumulasi dan legitimasi mungkin bertentangan, dan biaya legitimasi telah menyebabkan 'krisis legitimasi'.

3. Sosialisme

"Tidak ada yang namanya Sosialisme". "Ada lebih banyak Sosialisme ... Ada beberapa definisi dari konsep dan banyak cara untuk benar-benar mengonsepnya." (Vincent dalam Spicker, 2014). Menurut Spicker (2014), sosialisme dapat bermakna:

- a) Gerakan umum untuk peningkatan masyarakat dengan cara tindakan kolektif.

- b) Seperangkat metode pendekatan yang digunakan untuk tindakan kolektif, seperti kerja sama, gotong royong, perencanaan, dan layanan kesejahteraan sosial.
- c) seperangkat argumen untuk organisasi sosial dan ekonomi berdasarkan kepemilikan atau kontrol oleh masyarakat.
- d) Sebuah model masyarakat yang ideal berdasarkan kerja sama dan kesetaraan. dan,
- e) Rentang nilai.

Beberapa sumber mencampurkan antara sosialisme dengan Marxisme, bahkan ada yang menganggap sama, bahwa Sosialisme adalah Marxisme atau sebaliknya. Pandangan seperti itu terutamanya muncul dari kritikus sayap kanan yang mengarahkan Marxisme pada Sosialisme. Sebagai catatan, bahwa sesungguhnya hubungan antara Marxisme dan Sosialisme terbatas; arus utama pemikiran sosialisme di Eropa didasarkan pada gerakan kolektif sosial, itu sangat berbeda dari komunisme, dan filosofi serta pendekatannya hanya sedikit saja yang berkaitan dengan Marx.

Menurut Spicker (2014), Sosialisme paling jelas bisa diidentifikasi melalui nilai-nilainya, bukan melalui setiap set keyakinan. Nilai-nilai sosialisme diantaranya: Pertama, Sosialisme bersifat kolektif; orang harus dipahami melalui konteks sosial, bukan sebagai individu. Bermakna bahwa Sosialisme yang selama ini sering diwakili oleh Eropa dimaknai sebagai 'solidaritas', yang berarti tidak hanya semata-mata berdiri untuk bahu-membahu tetapi juga merancang penciptaan sistem bantuan bersama. Kedua, Sosialisme berarti kebebasan dan pemberdayaan. Mendorong orang agar mampu untuk melakukan sesuatu melalui tindakan kolektif. Ketiga, Sosialisme adalah egaliter, dalam arti bahwa sosialis berkomitmen untuk melakukan pengurangan atau penghapusan kerugian yang timbul di dalam masyarakat.

Prinsip pemberdayaan, kesetaraan, dan solidaritas kemudian ditransformasikan dalam bentuk slogan baru oleh kelompok sosialis, yakni “kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan”. slogan

tersebut kemudian diinterpretasikan dalam bentuk tindakan kolektif dan tema-tema sosial lainnya. Merujuk pada deklarasi Partai sosialis Eropa, mereka mengatakan bahwa “Kebebasan, kesetaraan, solidaritas dan keadilan adalah nilai dasar kami” (Spicker, 2014).

4. Sosial Demokrat

Sosial Demokrasi, seperti halnya sosialisme, lebih baik digambarkan sebagai seperangkat nilai daripada sebuah model pengembangan masyarakat (Spicker, 2014). Seperti Sosialis, Sosial Demokrat percaya pada tindakan kolektif, memungkinkan orang untuk bertindak, dan mengurangi kerugian. Perbedaan antara sosial demokrat dan sosialis agak sedikit kabur, karena cita-cita mereka mungkin memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Ada dua aspek penting yang perlu dicatat untuk dijadikan sebagai pembeda. Pertama, banyak kaum sosial demokrat adalah individualis daripada kolektivistis; bahkan jika mereka harus menerima argumen untuk saling membantu atau melakukan pengurangan kerugian, mereka akan lebih menekankan pada kebebasan individu untuk mengembangkan hak-hak individu (seperti yang dilakukan oleh kaum liberal), dan sering kali juga melakukan pembatasan terhadap peran negara. Kedua, beberapa Sosial Demokrat tidak peduli untuk melakukan usaha dalam menghilangkan ketidaksetaraan, tetapi hanya untuk mengurangi dampaknya melalui pengaturan sosial yang melindungi orang dari konsekuensi (dampak) buruk mekanisme ekonomi pasar.

5. Konservatisme

Konservatisme lebih tepatnya bisa disebut sebagai kelompok sayap kanan tradisional, tapi bukan Liberal. Konservatif percaya akan pentingnya tatanan sosial. Hal tersebut tercermin dalam penghormatan terhadap tradisi, penekanan pada pentingnya agama, dan penekanan pada pentingnya ketidaksetaraan - seperti ketidaksetaraan kelas atau kasta - sebagai dasar untuk hubungan sosial yang terstruktur (Beer dalam Spicker, 2014). Kelompok kon-

servatif percaya jika tidak ada reformasi sosial, maka masyarakat akan memberikan revolusi.

6. Demokrasi Kristen

Pemikiran 'Kristen Demokratis' berkaitan erat dengan konservatisme. Seperti kaum konservatif, mereka sangat menekankan ketertiban. Ketertiban harus dicapai melalui tindakan negara dengan melalui pengekangan moral. Pandangan dan pemikiran tersebut merefleksikan pengaruh agama Katolik dalam pandangan politik. Ajaran sosial Katolik menekankan pentingnya batasan negara dan tanggung jawab individu dalam keluarga dan masyarakat (Coote dalam Spicker, 2014). Maka, dalam prakteknya kelompok ini cenderung mendukung adanya batasan peran negara. Namun, pada saat yang sama juga menerima tanggung jawab moral untuk kesejahteraan sosial, solidaritas, kohesi sosial dan dukungan bagi orang miskin.

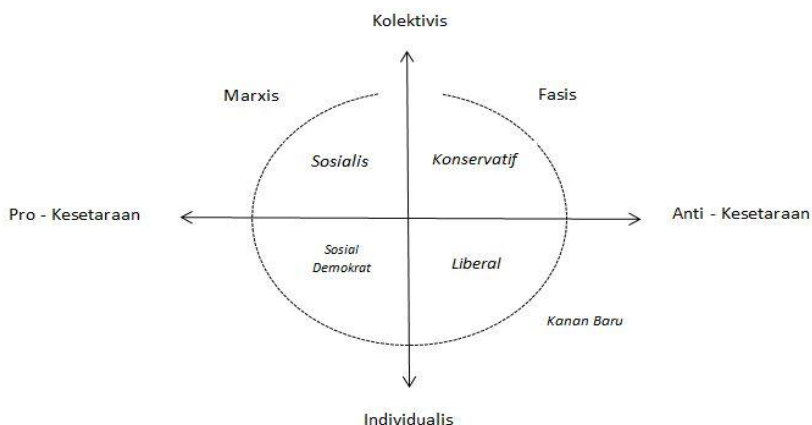
7. Esktrēm Kanan

Ekstrem kanan dikaitkan dengan dua jenis sikap otoritarianisme. Pertama, reaksi, yaitu gerakan untuk 'mengembalikan keadaan' ke waktu sebelumnya; gerakan-gerakan reaksioner penting di banyak negara Eropa, di mana gerakan-gerakan itu dikaitkan dengan perlawanan terhadap liberalisme, gerakan nasionalis, dan penekanan terhadap kekuatan militer, tetapi mereka memiliki sedikit relevansi langsung dengan kesejahteraan.

Fasisme contohnya. Fasisme adalah bentuk kolektivisme otoriter yang berpendapat bahwa negara, bangsa atau ras lebih penting daripada individu manapun. Walaupun ada banyak kritikus yang berpendapat bahwa fasisme tidak memiliki ideologi nyata (Woolf dalam Spicker, 2014). Kritik ini didasarkan pada posisi politik yang diambil pasca-perang dalam upaya untuk menyangkal daya tarik romantis dan emosional dari banyak pemikiran fasis. Fasisme menarik bagi nasionalisme dan rasisme, nilai-nilai pekerjaan, keluarga, dan negara. Fasisme memiliki agenda sosial yang kuat. Nazi Jerman misalnya, mereka memiliki keinginan yang kuat

untuk menumbuhkan supremasi rasial dan perluasan intervensi negara dalam masyarakat dan ekonomi melalui penekanan sosialisasi (baik itu melalui sekolah maupun gerakan pemuda) dan kebijakan eugenic (Gunberger dalam Spicker, 2014).

Gambar 4. Gambaran Spektrum Pergerakan Ideologi Dari Kiri ke Kanan



Sumber : Spicker (2014)

E. Komponen-komponen Rezim Negara Kesejahteraan

Operasionalisasi rezim kesejahteraan menurut Gough (dalam Barrientos, 2012) dibedakan menjadi tiga komponen utama: kesejahteraan Campuran (*welfare mix*), hasil kesejahteraan (*welfare outcomes*), dan efek stratifikasi. Kesejahteraan campuran menggambarkan artikulasi negara, pasar, rumah tangga dan aktor internasional di negara tertentu. Sementara Hasil kesejahteraan (*welfare outcomes*) menggambarkan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam melindungi populasi dari risiko sosial. Dalam konteks pendapatan yang tinggi, Esping-Andersen menekankan dekomodifikasi, dipahami sebagai sejauh mana kesejahteraan rumah tangga tidak tergantung pada apa yang dapat mereka jual di pasar, dan defamilialisme, dipahami sebagai sejauh mana hasil kesejahteraan tidak tergantung pada posisi orang dalam rumah tangga. Komponen ketiga yakni efek stratifikasi, mewakili

cara lembaga kesejahteraan menghasilkan dan memperkuat struktur sosial. Efek stratifikasi menjelaskan efek distribusional rezim kesejahteraan campuran dan hasil kesejahteraan (*welfare outcomes*).

Tiga komponen utama rezim kesejahteraan telah diidentifikasi dengan jelas, melalui ‘pembagian perlindungan sosial antara publik dan swasta yang menyediakan konteks struktural de-komodifikasi, hak-hak sosial, dan hubungan stratifikasional rezim negara kesejahteraan’ (Esping-Andersen, 1990 dalam Powel dan Barrientos, 2004). Esping-Andersen lebih jauh berpendapat bahwa rezim kesejahteraan dapat diidentifikasi pada masing-masing komponen ini, atau pada gabungan ketiganya. Seperti yang ia katakan, pengelompokan dimensi dasar yang panjang dari keduanya cukup jelas pada indikator tunggal, dan terbukti apakah kami mengumpulkan indikator yang berbeda (Esping-Andersen, 1990). Sepanjang rezim kesejahteraan tunggal, kesejahteraan campuran, hasil kesejahteraan dan efek stratifikasi saling terkait erat, serta berbeda baik secara individu maupun agregat di seluruh rezim kesejahteraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, dalam hal mengidentifikasi rezim kesejahteraan, itu penting bukan di mana seseorang memulai (Esping-Andersen, 1990).

F. Prinsip-prinsip Negara Kesejahteraan

Secara garis besar ada lima prinsip utama negara kesejahteraan yang menjadi dasar (sekaligus menjadi ciri) sistem negara kesejahteraan. Negara-negara yang menganut Negara Kesejahteraan berusaha untuk mewujudkan kelima prinsip tersebut sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Lima prinsip itu diantaranya:

1. Cabang-cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Tujuannya agar kebutuhan rakyat atas produksi barang yang bersangkutan dapat diperoleh oleh rakyat dengan harga yang terjangkau dan tidak memberatkan kehidupan rakyat. Misalnya listrik, gas dan minyak bumi, air bersih, dan angkutan umum yang murah.
2. Usaha-usaha swasta di luar cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibolehkan, tetapi negara harus

melakukan pengaturan, sehingga tidak terjadi monopoli atau oligopoli yang akan mendistorsi pasar, atau bentuk-bentuk lain yang merugikan kesejahteraan rakyat.

3. Negara harus terlibat secara langsung dalam usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya, seperti menyediakan berbagai macam bentuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Pelayanan-pelayanan tersebut harus dapat dijangkau oleh semua warga negara tanpa kecuali. Jumlah dan jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh negara bergantung pada kemampuan negara. Kedua jenis pelayanan tersebut (kesehatan dan pendidikan) merupakan keharusan yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu, negara juga bisa menyediakan jaminan sosial dan jaminan hari tua bagi setiap warga negaranya. Para pemikir di bidang Negara Kesejahteraan menganggap perlu pelayanan negara dilakukan “sejak dari buaian hingga liang kubur” (*from cradle to the grave*).
4. Mengembangkan sistem perpajakan progresif, yaitu sistem pajak yang dalam prosentasenya semakin tinggi (membesar) bagi orang yang semakin kaya dan bagi usaha yang semakin besar. Melalui sistem perpajakan dan sistem jaminan yang dikembangkan oleh negara, diharapkan perbedaan antara mereka yang kaya dan miskin di dalam negara yang bersangkutan akan berkurang, dan orang miskin juga akan berkurang.
5. Pembuatan kebijakan sosial harus dilakukan secara demokratis. Ini artinya, negara kesejahteraan menganut sistem demokrasi di dalam pengelolaan negaranya.

G. Makna Teori Negara Kesejahteraan

Secara garis besar ada empat makna dari teori Negara Kesejahteraan.

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*).
Kesejahteraan sosial (*social welfare*) dilihat sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia mem-

peroleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

2. Sebagai pelayanan sosial

Umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).

3. Sebagai tunjangan sosial

Kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya.

4. Sebagai proses atau usaha terencana

Sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari empat makna kesejahteraan di atas. Secara substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian kesejahteraan yang pertama, kedua, dan keempat, dan ingin menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga. Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

H. Karakteristik Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan dalam beberapa kebijakannya memiliki beberapa karakteristik umum diantaranya:

1. Negara kesejahteraan menjamin adanya jaminan sosial.

Dalam keadaan ekonomi yang sudah makmur, meskipun sifat-sifat kapitalisme masih terlihat, Negara kesejahteraan biasanya menggunakan ekonomi campuran. Bahkan ketika kombinasi fitur kapi-

talistik dan sosialistik ada, pemerintah memainkan peranan penting yang cukup dominan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat.

2. Negara kesejahteraan bersifat sosialistis.
Hal tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip kesetaraan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, di mana kesejahteraan bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil.
3. Melakukan kontrol atas semua kegiatan ekonomi.
Dalam negara kesejahteraan, semua perusahaan swasta diatur oleh pemerintah.
4. Negara kesejahteraan bahkan menyediakan fasilitas dasar untuk semua warganya.
Penyediaan peralatan layanan untuk setiap individu adalah kewajiban bagi negara. Sebuah pemerintahan negara kesejahteraan biasanya berusaha menyediakan layanan ekonomi dan sosial seperti pendidikan umum, kesehatan masyarakat, transportasi umum, perumahan, dan bantuan keuangan lainnya kepada rakyatnya.
5. Menjalankan berbagai unit perusahaan.
Kepemilikan dan pengoperasian perusahaan industri, bisnis, dan kegiatan komersial lainnya juga dilakukan oleh pemerintahan negara kesejahteraan.
6. Negara kesejahteraan memastikan terwujudnya keadilan bagi semua.
Dalam negara kesejahteraan, manusia biasa harus berurusan dengan pihak berwenang untuk banyak kebutuhan mereka. Sebagai contoh; petugas administrasi, pejabat pengendali, otoritas penegak hukum, petugas layanan sosial, pegawai publik, dan lain-lain. Dalam semua transaksi tersebut, negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan dan memenuhi persyaratan mereka.

Dalam karakteristik lainnya, negara kesejahteraan dalam merencanakan kegiatan biasanya meliputi kegiatan ekonomi yang meliputi produksi sekaligus distribusi. Adalah tugas negara kesejahteraan untuk merumuskan kebijakan nasional dan merencanakan setiap

kegiatan ekonomi secara seimbang. Kebijakan industri, kebijakan perdagangan, kebijakan komersial, kebijakan perbankan, dan lain-lain dibingkai secara khusus untuk mengendalikan kegiatan tersebut. Karakteristik lainnya dalam negara kesejahteraan berupa fungsi pengaturan. Negara kesejahteraan mengatur dan mengendalikan semua perusahaan swasta yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kontrol tersebut meliputi pendaftaran, perizinan, perpajakan, dan lain-lain. Karakteristik terakhir adalah terkait kesejahteraan buruh yang juga berada di bawah bidang tugas negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan berkewajiban untuk membuat undang-undang dalam rangka mencegah eksploitasi pekerja, dan untuk memastikan keamanan serta kesejahteraan mereka yang bekerja di perusahaan, industri, pabrik, dan sektor pekerjaan lainnya.

I. Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Sosial

Ada empat prasyarat terwujudnya negara kesejahteraan, yaitu *social citizenship, full democracy, modern industrial relation systems, rights to education, dan expansion of modern mass education*. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Menurut Spicker (2014), Nama 'kebijakan sosial' digunakan untuk merujuk pada kebijakan yang digunakan pemerintah untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, untuk cara-cara di mana kesejahteraan dikembangkan dalam masyarakat, dan untuk subjek studi akademis.

Daniel Beland (2010), mendefinisikan kebijakan sosial sebagai program yang bertujuan untuk mendukung orang miskin, memerangi ketimpangan dan mempromosikan solidaritas kewarganegaraan, mengurangi ketergantungan terhadap pasar (yaitu, de-komodifikasi), dan atau untuk melindungi para pekerja dan keluarga mereka dari resiko ekonomi tertentu. Kebijakan sosial memiliki dampak besar pada warga negara, khususnya ketika ekonomi sedang mengalami

masa-masa sulit, keamanan nasional berada dalam kondisi tingkat tinggi, dan negara sedang menghadapi bencana alam. Di saat seperti itu, kebijakan sosial membantu melindungi warga negara dari dampak ancaman peristiwa yang terjadi. Kebijakan sosial juga berupaya membantu mengurangi ketergantungan pasar dengan memberikan layanan mandiri kepada warga negara (kemandirian) dengan mempromosikan gagasan bahwa kita sebagai individu harus memenuhi kewajiban sosial tertentu (mempromosikan solidaritas kewarganegaraan). Hal tersebut akan membantu warga negara untuk memerangi kondisi tidak-setaraan yang dihadapinya melalui penyediaan kebutuhan hak dasar sosial untuk warga negara. Selain itu, kebijakan sosial juga biasanya diterapkan untuk membantu masyarakat miskin atau merestrukturisasi kebijakan yang sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi tujuan pembuatan kebijakan.

Maka, dalam arti yang pertama, kebijakan sosial berkaitan langsung dengan layanan sosial dan negara kesejahteraan. Dalam pengertian yang kedua, lebih luas lagi, ia berdiri untuk berbagai masalah yang meluas jauh di luar tindakan pemerintah - sarana di mana kesejahteraan dipromosikan, dan kondisi sosial serta ekonomi yang membentuk perkembangan kesejahteraan. Karena tujuannya yang luas dan ambisius, maka kebijakan sosial dalam promosi kesejahteraan memiliki cakupan yang sangat luas juga. Beberapa cakupan kebijakan sosial dalam negara kesejahteraan diantaranya:

1. Sektor sosial yang mencakup kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, serta perumahan.
2. Asuransi sosial yang mencakup persoalan-persoalan tunjangan pensiunan (jaminan hari tua), tunjangan untuk pengangguran, dan tunjangan untuk orang cacat.
3. Perlindungan sosial yang mencakup masalah subsidi untuk kebutuhan makanan, jaring pengaman sosial yang ditargetkan secara khusus untuk mengendalikan persoalan-persoalan sosial, seperti pembangunan infrastruktur untuk membuka akses ekonomi atau membuka keterisoliran sosial, pemberian makanan tambahan untuk kelompok-kelompok rentan, dan transfer pendapatan kepada kelompok rentan.

4. Pelayanan sosial yang meliputi perawatan kesehatan untuk kelompok rentan (misalnya Penyandang cacat, orang tua, dan anak yatim).
5. Hak sosial. Contohnya adalah penjaminan atau pemenuhan hak sosial pekerja anak, hak-hak kaum perempuan, dan hak-hak sosial untuk kelompok buruh (tenaga kerja).

Kebijakan sosial secara luas adalah kepedulian negara terhadap penyediaan barang dan jasa untuk publik dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Ada berapa titik tumpu perhatian kebijakan sosial dalam negara kesejahteraan.

1. Berkaitan dengan persoalan akses terhadap sumber daya
Maka, hal tersebut akan berkaitan dengan kebijakan, terutama dari sisi perencanaan dan implementasi. Oleh karenanya, bagaimana kemudian akses tersebut dirancang?. Apakah barang dan jasa sosial yang disediakan oleh negara atau swasta dirancang untuk membantu orang miskin dan kelompok rentan tersebut dapat diakses baik secara fisik (dalam hal cakupan) dan secara finansial (dalam hal biaya) dengan mudah?.
2. Kualitas
Apakah layanan sosial yang telah diberikan kepada orang miskin dan kelompok rentan telah memadai dan tepat?. Apakah orang miskin dan kelompok rentan tersebut telah mendapatkan pelayanan yang baik?.
3. Relevansi
Apakah layanan yang disediakan untuk orang miskin dan kelompok rentan bisa memenuhi kebutuhan aktual mereka serta memberikan solusi yang relevan untuk masalah yang mereka hadapi?.
4. Kesesuaian
Apakah mekanisme desain dan pemberian layanan sosial sudah sensitif terhadap sistem mata pencaharian, kegiatan, dan kendala masyarakat miskin serta kelompok rentan?.

J. Negara Kesejahteraan dalam Masyarakat Modern

Negara kesejahteraan adalah lembaga penting dalam masyarakat modern. Di Eropa Barat, pilar-pilar dasar perlindungan sosial pertama

kali muncul sekitar tahun 1900-an, tetapi istilah negara kesejahteraan modern merupakan istilah yang diciptakan pada awal 1940-an dan dikembangkan mulai tahun 1950-an hingga 1970-an. Perlindungan sosial kemudian diperluas ke cakupan risiko dan layanan sosial yang lebih luas, cakupan diperluas ke sebagian besar penduduk, dan tingkat kompensasi mencapai jauh di atas tingkat subsistensi. Sebagai akibatnya, ekstraksi pajak mencapai antara sepertiga dan setengah ekonomi (GDP), kadang-kadang lebih. Sejak tahun 1980-an negara-negara kesejahteraan terus berkembang, tetapi biasanya tanpa menaikkan tingkat perpajakan.

Negara-negara kesejahteraan juga telah berkembang di negara-negara industri baru, bahkan di negara-negara bekas komunis yang sedang bertransisi ke ekonomi pasar. Di antara “pendatang baru” yang signifikan, adalah Cina. Negeri Tiongkok mulai mengembangkan negara kesejahteraan modern pada 1990-an.

Mengambil pandangan yang luas, negara kesejahteraan tampaknya secara intrinsik terkait dengan ekonomi pasar dan industrialisme, seperti yang diklaim oleh para penulis fungsionalis lebih dari 50 tahun yang lalu (Wilensky & Lebaux, 1958). Namun, model kesejahteraan yang berbeda atau "rezim kesejahteraan" dapat ditelusuri kembali ke periode formatif. Sejak tahun 1980-an atau 1990-an, sebagian besar negara kesejahteraan telah mengalami restrukturisasi, rekalisasi atau bahkan transformasi yang signifikan, tetapi ini tidak menghilangkan perbedaan "rezim". Dalam bukunya *Three Worlds of Welfare Capitalism* (1990) Gøsta Esping-Andersen menunjukkan bahwa perbedaan utama antara rezim kesejahteraan adalah tingkat dekomodifikasi. Dalam masyarakat kapitalis, tenaga kerja adalah komoditas, dan karakteristik utama dari kebijakan sosial adalah fungsinya untuk meringankan kondisi sosial pekerja dari fakta fundamental mekanisme ekonomi pasar.

Kritik tentang negara kesejahteraan dalam masyarakat modern adalah Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang belum berkurang, serta kebijakan kesejahteraan sosial yang belum berhasil. Peluang yang disediakan untuk kesejahteraan menyebabkan efek negatif pada

struktur keluarga, meningkatkan tingkat perceraian, dan merusak nilai-nilai moral.

K. Tantangan Masa Depan Politik Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan adalah bentuk lain ekonomi pasar kapitalis yang tak terelakkan, tetapi secara historis dikembangkan dalam arah yang berbeda. Situasi tersebut telah mengkristal dalam tiga komplekser kelembagaan yang disebut sebagai rezim kesejahteraan. Berbagai rezim kesejahteraan menghadapi tantangan yang agak berbeda di masa depan, dan kemungkinan besar akan bereaksi dengan cara yang berbeda. Hal tersebut bergantung pada rezimnya. Salah satu tantangan utama adalah menyesuaikan usia kerja dengan keinginannya untuk terus sejahtera. Tantangan utama lainnya adalah meningkatkan daya saing dengan memprioritaskan investasi sosial, khususnya pendidikan bagi generasi muda, tetapi juga peningkatan keterampilan, dan tentu saja penelitian yang bisa memastikan tumbuhnya inovasi.

Tantangan-tantangan ini mungkin besar, tetapi tampaknya sulit untuk menyatakan bahwa tantangan ini lebih besar daripada tantangan yang dialami oleh negara-negara kesejahteraan sebelumnya. Harus diperhatikan, walaupun persoalan-persoalan sosial problemnya masih sama, tetapi akan selalu ada tantangan sosial baru. Peningkatan kualitas kesehatan yang cukup besar untuk usia menengah dan usia lanjut di beberapa negara dunia memunculkan terjadinya gradien sosial yang signifikan, dan ada tantangan sosial berupa peningkatan kualifikasi hidup untuk generasi muda. Persoalan lain yang dihadapi oleh beberapa negara adalah terjadinya gelombang migrasi akibat konflik sosial. Di satu sisi, migrasi dapat membantu menghindari penurunan populasi di negara-negara yang paling terpengaruh oleh penurunan tingkat kesuburan, tetapi sekaligus juga menimbulkan tantangan lain untuk menghindari konflik sosial baru, seperti persoalan etnis.

Negara kesejahteraan akan selalu menghadapi tantangan, walaupun pada saat ini sebagian negara di dunia telah mengalami peningkatan kekayaan dan produksi yang luar biasa. Hal itu selalu menjadi

pertanyaan mendasar, apakah tantangan masa depan negara kesejahteraan akan lebih besar jika dibandingkan dengan tantangan negara kesejahteraan di masa lalu?, mengingat tingkat produksi dan kekayaan di beberapa negara dunia saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang cukup besar?. Ini tidak berarti bahwa negara-negara kesejahteraan tidak mungkin tidak berubah. Sebaliknya, ada kecenderungan perubahan yang cukup signifikan yang sedang berlangsung saat ini, termasuk di dalamnya beberapa negara Nordik yang menganut paham negara kesejahteraan. Apa yang menjadi penyebabnya?, politiklah jawabannya. Hal tersebut sudah terjadi sejak kelahiran negara kesejahteraan itu sendiri. Faktor-faktor politik masih terus terjadi hingga sekarang. Politis, ideasional, dan faktor-faktor kelembagaan telah menjadi pendorong perubahan yang penting. Tentu saja, selain itu ada juga faktor ekonomi, sosial, dan lainnya yang juga ikut mendorong sistem ekonomi pasar untuk ikut serta mengembangkan berbagai macam paradigma negara kesejahteraan.

Beberapa fakta menarik saat ini adalah adanya kecenderungan yang cukup signifikan di beberapa negara maju untuk melakukan konvergensi proporsi produk domestik bruto yang dibelanjakan untuk kesejahteraan. Hasilnya, faktor politik bisa menentukan apakah negara bisa memberikan kesejahteraan atau tidak. Selain itu, faktor politik bisa menentukan pembiayaan dan bisa menentukan hasil distribusi. Fakta politik sebagai faktor penentu telah terjadi hingga sekarang, dan bahkan, jika negara-negara kesejahteraan harus menyesuaikan dengan perubahan di sekitarnya, maka politik, ideasional, dan faktor-faktor institusional pasti akan menjadi penentu utama nasib masa depan negara-negara kesejahteraan termasuk di Indonesia.

Masalah sosial yang krusial hari ini adalah Kebutuhan sosial yang belum terpenuhi di satu sisi, peningkatan ketidaksetaraan, kemiskinan dalam pekerjaan, tingkat pengangguran, kurangnya layanan sosial yang memadai, kurangnya keterampilan untuk mengisi pekerjaan hari ini dan membuat pekerjaan untuk hari besok di sisi lain. Kapasitas program sosial yang ada untuk memberikan keamanan ekonomi saat ini kebanyakan sedang terganggu oleh struktur pekerjaan akibat

perubahan teknologi yang sangat cepat dan persaingan internasional yang semakin intens.

Di beberapa negara maju, pekerjaan manufaktur dengan bayaran yang menjanjikan bagi mayoritas warga negara telah bergerak ke luar negeri, mengosongkan kelas menengah, karena orang-orang dengan keterampilan tinggi juga ikut pindah untuk mendapatkan bayaran yang lebih tinggi, sementara mereka yang tidak memiliki keterampilan terdegradasi ke dalam layanan pekerjaan bergaji rendah. Akibatnya, distribusi pendapatan pasar yang tidak setara, telah menjadi sebuah fenomena umum di beberapa negara, hal tersebut bisa dilihat dari menurunnya angka serikat pekerja dan bangkitnya sektor keuangan. Ini merupakan perkembangan yang menantang yang bisa dinyatakan dalam dua cara penting. Pertama, kondisi tersebut meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya pada saat tingkat pertumbuhan sedang lambat dan tingkat hutang yang tinggi membatasi ketersediaan sumber daya bagi mereka. Kedua, untuk menjaga kemakmuran nasional dalam pendekatan ekonomi baru ini, pemerintah harus memastikan bahwa mereka bisa memiliki akses terhadap teknologi mutakhir dan pekerja dilengkapi dengan keterampilan yang memadai untuk mengeksploitasi kemajuan tersebut. Ini adalah tantangan sosial dan ekonomi sekaligus.

Dari perspektif yang egaliter, pemerintah mendapatkan tugas, tidak hanya memberikan keterampilan yang mencukupi, tetapi untuk memastikan keterampilan tersebut didistribusikan secara luas ke seluruh populasi. Jika tidak, sebagian besar tenaga kerja hanya dikontrak dengan bayaran yang rendah. Jika mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan atau keuntungan dari kondisi ekonomi seperti itu, maka akan banyak orang yang kehilangan manfaat dari ekonomi yang berteknologi tinggi. Apalagi, jika kegagalan ini berlangsung lama maka akan memberikan konsekuensi logis terhadap stratifikasi sosial. Ketika ketidaksetaraan pendapatan meningkat, penurunan mobilitas sosial terjadi, dan menutup peluang peningkatan sosial, maka di situlah meritokrasi dalam masyarakat demokratis gagal.

Dimensi lain yang juga menjadi permasalahan Negara kesejahteraan saat ini adalah dimensi antar generasi. Di saat yang sama banyak sekali anak muda berada dalam kondisi berisiko tinggi, pengangguran misalnya. Banyak negara yang memiliki angka pengangguran yang sangat tinggi di kalangan anak mudanya. Jelas mereka semua adalah generasi produktif, tetapi bermasalah terhadap akses pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan anak muda menghalangi masuknya generasi muda ke dalam pekerjaan utama yang menjadi penyangga utama produktivitas negara. Tidak adanya pekerjaan yang stabil akan berpengaruh langsung terhadap pembentukan keluarga baru sehingga memberi tekanan pada tingkat kelahiran. Tentu saja kondisi tersebut dapat melemahkan masyarakat dalam menghadapi prospek tingkat pertumbuhan akibat pengaruh populasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan luar biasa bagi politik negara kesejahteraan agar bisa menghadang timbulnya kelas bawah baru. Adanya kelas bawah baru tentu juga akan menjadi ancaman sosial bagi sebuah negara khususnya masalah keamanan. Untuk menghadapi masalah tersebut (timbulnya kelas bawah baru) banyak negara kesejahteraan menyiasatinya dengan mengeluarkan tunjangan, dan melibatkan mereka dalam praktek-praktek sosial. Negara-negara ini terkadang harus menghabiskan anggaran yang besarnya tiga kali lipat dari dana pensiunan. Bagi negara yang siap, tidak masalah. Sebaliknya bagi yang tidak siap, itu merupakan masalah baru yang akan menjadi lingkaran setan terbentuknya kerentanan dan kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan tantangan politik kontemporer negara kesejahteraan untuk melakukan reformasi kesejahteraan.

Negara kesejahteraan Keynesian adalah yang paling banyak penganutnya di dunia. Pendekatan Keynesian dibangun dan dikembangkan tiga dekade setelah Perang Dunia II berakhir. Pendekatan ini mencoba keluar dari politik kelas, di mana perpecahan politik di antara kelas-kelas sosial tampak besar. Dalam prakteknya, negara kesejahteraan Keynesian mencerminkan kompromi kelas, di mana pihak yang mewakili kelas pekerja yang terorganisir menerima kapitalisme yang dikelola dalam pertukaran program sosial, sementara para pengelola modal setuju untuk membayar sejumlah uang melalui jaring pengaman

sosial sebagai bentuk kompromi antara industri dengan kelompok pekerja. Tetapi pembelahan kelas tidak lagi mendominasi isu-isu politik negara-negara demokrasi maju. Pasca perang, kemakmuran yang berbasis kelas terus berkurang, sehingga menjadi sulit untuk mengidentifikasi mana kelompok kanan dan mana kelompok kiri serta berbicara untuk kepentingan kelas yang kohesif. Hari ini, baik kanan maupun kiri sama-sama sibuk untuk menggalang dukungan dari pemilih yang terfragmentasi dan terpotong-potong oleh perpecahan yang berakar dari nilai-nilai sosial baru. Selain itu, kelompok kanan maupun kiri sama-sama sibuk untuk meyakinkan skeptisme publik bahwa mereka bisa beradaptasi dalam pusaran globalisasi. Banyak yang harus dilakukan oleh mereka untuk menjawab skeptisisme tentang apa yang dapat dicapai oleh pemerintahan kanan maupun kiri di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang melambat serta gagasan Neo-liberal yang semakin unggul.

Untuk memungkinkan semua itu bekerja dengan baik, maka pemerintah perlu melakukan investasi sosial. Menurut Morel, *et. al.* (2007), investasi sosial adalah orientasi baru dalam kebijakan sosial. Dilakukan untuk melengkapi layanan ekonomi baru berbasis pengetahuan. Dalam investasi sosial, pengetahuan dianggap sebagai penggerak produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi berbasis pengetahuan terletak pada keterampilan dan tenaga kerja yang fleksibel, yang dapat dengan mudah beradaptasi dengan segala kebutuhan ekonomi yang terus berubah. Investasi sosial diharapkan menjadi motor dari perubahan tersebut.

Selain itu, investasi sosial juga bertujuan untuk mengatasi risiko sosial baru yang tidak dipenuhi oleh model negara kesejahteraan yang lama. Intinya, investasi sosial merupakan upaya untuk memodernisasi negara kesejahteraan pasca perang agar dapat mengatasi risiko sosial baru dengan lebih baik. Sasarannya adalah kondisi struktur masyarakat kontemporer, seperti populasi orang tua (*ageing*), orang tua tunggal, kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pekerjaan dengan kepentingan kehidupan keluarga, kurangnya karir yang berkelanjutan, tenaga kerja kontrak, dan mereka yang memiliki keterampilan rendah atau tertinggal.

Investasi sosial menjadi paradigma yang mendesak dalam kebijakan sosial. Ada beberapa alasan penting berkaitan dengan kemendesakan investasi sosial, di antaranya:

1. Era perkembangan ekspansionis model Keynesian yang menekankan pada Negara kesejahteraan industrialis harus ditinjau ulang.
2. Adanya tuntutan penawaran yang berorientasi pada *retrenchment* (privatisasi negara kesejahteraan).
3. Membalikkan hubungan antara ekonomi dan sosial serta hubungan antara pasar tenaga kerja dengan kebijakan sosial yang menuntut adanya perbaikan yang lebih baik lagi.

Selain itu, Kebijakan sosial juga harus dilihat sebagai faktor produktif yang penting untuk pembangunan ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja. Ini merupakan sebuah terobosan mendasar dari pandangan Neo-liberal tentang kebijakan sosial sebagai kompensasi atas perilakunya yang cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Fitur dari kebijakan tersebut adalah penekanannya pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang secara luas ditafsirkan sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas orang, sehingga bisa berkontribusi kepada masyarakat serta peningkatan ekonomi. Program-program semacam itu memang melibatkan pengeluaran sumber daya publik dengan menargetkan kelompok-kelompok yang paling tidak diuntungkan; tapi, tidak seperti itu kebijakan redistributif tradisional, kebijakan model tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas produktif bangsa bukan hanya semata untuk mengurangi kemiskinan. Program-program tersebut termasuk upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan populasi, langkah-langkah untuk memfasilitasi masuknya kembali para pengangguran ke dalam pekerjaan, dan langkah-langkah yang difokuskan untuk pengembangan anak usia dini untuk memastikan semua anak menyadari potensi bawaan mereka.

Investasi sosial merupakan tantangan baru dalam pendekatan model ekonomi baru, yang memastikan setiap orang harus memiliki keterampilan untuk memperoleh pekerjaan yang baik dalam sistem produksi yang diubah oleh perkembangan teknologi. Oleh sebab itu

tidak ada lagi prasyarat yang mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik berdasarkan keadaan yang dibawa sejak lahir. Dengan keterampilan yang baik semua manusia memiliki akses yang sama terhadap sumber ekonomi untuk menopang kehidupannya. Investasi sosial tidak hanya memaksa orang untuk bekerja tetapi memperlengkapi mereka dengan pengetahuan untuk menjadi lebih produktif dan terlibat secara sosial.

Menurut Morel, *et. al.* (2011), Pendekatan investasi sosial terletak pada kebijakan yang sama-sama berinvestasi untuk pengembangan sumber daya manusia (pendidikan anak usia dini, perawatan, pendidikan dan pelatihan seumur hidup), dan hal tersebut dapat membantu membuat penggunaan modal manusia secara efisien melalui kebijakan yang bisa mendukung tenaga kerja wanita dan orang tua, melalui kebijakan pasar tenaga kerja aktif. Selain itu juga bisa melalui bentuk-bentuk khusus dari regulasi pasar tenaga kerja dan lembaga-lembaga perlindungan sosial yang mempromosikan keamanan fleksibel, sambil mendorong terwujudnya inklusi sosial yang lebih besar (terutama dengan memfasilitasi akses ke pasar tenaga kerja untuk kelompok yang secara tradisional terkecualikan).

Untuk melakukan investasi sosial pemerintah bisa melakukan beberapa model pendekatan kebijakan, diantaranya:

1. Menggunakan model negara-negara Nordik - yang menggabungkan perlindungan sosial tradisional dengan investasi sosial.
2. Model *Anglo - Saxon* yang cenderung menggantikan pengeluaran kompensasi tradisional dengan investasi baru dalam bentuk investasi sumber daya manusia.
3. Investasi sosial: "dari jaring pengaman ke *sprinboard*".
4. Investasi sosial ala sosial demokrat yang menggabungkan Perlindungan sosial dengan promosi sosial.
5. Negara bisa memilih salah satu pendekatan investasi sosial sesuai dengan kondisi eksisting negara, seperti usaha untuk melindungi sumber daya manusia (kesehatan dan perlindungan sosial lainnya), pemberian insentif positif vs negatif (menurunkan manfaat), kesetaraan, kualitas hidup, serta hak dan kewajiban.

Negara berkembang bisa meniru beberapa cerita sukses penerapan investasi sosial dari negara lain, di mana negara-negara tersebut mampu meningkatkan lapangan pekerjaan tanpa terlalu banyak disibukkan dengan isu kemiskinan. Misalnya, negara-negara Nordik, mereka tidak hanya mampu memadukan kebijakan perlindungan yang baik dan investasi sosial yang kuat tetapi juga mampu mewujudkan kesetaraan sosial seperti kesetaraan gender. Bukan hanya pada persoalan gender semata, bahkan urusan kualitas keluarga warga negara mereka urusi. Negara-negara Nordik bahkan merancang program pengasuhan anak agar generasi negaranya terlindungi dan sejahtera. Swedia dan negara-negara Nordik lainnya, serta Prancis, telah berhasil menangani kesulitan demografis yang disebabkan oleh tingkat kelahiran yang rendah dengan berinvestasi dalam perawatan anak dan instrumen kebijakan keluarga lainnya. Negara-negara tersebut meyakini pencapaian pendidikan yang baik sangat terkait erat dengan kesejahteraan. Mereka melihat ada hubungan positif antara kebijakan investasi sosial, sumber daya manusia, dan kualitas kerja.

Ada beberapa alasan penting bagi pemerintahan negara untuk melakukan investasi sosial. Salah satunya adalah persoalan penuaan warga negara yang terus meningkat (*ageing*). Investasi sosial dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengatasi tantangan penuaan masyarakat. Investasi sosial juga dilihat sebagai salah satu cara untuk mengatasi ketidaksetaraan yang meningkat dalam jangka panjang. Alasan lainnya, adanya kemungkinan untuk menggabungkan tujuan sosial dan ekologis jika pertumbuhan berkelanjutan menjadi pendekatan baru. Terakhir, alasan paling penting dari semua itu adalah kualitas hidup dan kesetaraan harus dikembalikan sesuai dengan hak dasar manusia dan tujuan (*agenda*) negara.

**DEMOKRASI SOSIAL, NEGARA KESEJAHTERAAN,
DAN KEBIJAKAN SOSIAL**

Demokrasi sosial telah berkembang melalui beberapa fase historis dan fase intelektual. Sejak awal kemunculannya pada pertengahan abad ke-19, kebanyakan pendukungnya adalah kaum Marxis yang mendesak gerakan revolusi untuk menggulingkan sistem kapitalisme dan menggantinya dengan sosialisme. Pada saat itu, kelompok kelas pekerja belum diberi hak suara untuk menyuarakan hak politiknya, jadi usaha untuk mengamankan perubahan melalui kotak suara dan politik parlementer tidak memungkinkan. Namun, ketika waralaba diperpanjang dari akhir abad ke-19 dan seterusnya, perpecahan muncul dalam Demokrasi sosial. Sayap Marxis secara luas menekankan bahwa "demokrasi borjuis" yang baru ini adalah kepura-puraan untuk mencegah perubahan radikal, dengan menggabungkan partai-partai sosialis dan kelas-kelas pekerja ke dalam sistem kapitalis, dan menetralkan mereka melalui kompromi politik yang tak ada habisnya serta dilusi prinsip-prinsip yang ditimbulkan oleh politik parlementer. Bahkan jika pemerintah sosialis terpilih melalui kotak suarapun, negara akan tetap dikuasai oleh kelas penguasa, melayani kepentingan material para industrialis, dan pemodal.

Terhadap perspektif Marxis ini, banyak para tokoh sosial demokrat berpendapat bahwa dengan perluasan waralaba kepada massa, revolusi tidak dapat dibenarkan atau diperlukan untuk mencapai sosialisme. Revolusi tidak dapat dibenarkan karena kaum sosialis harus mampu membujuk orang-orang yang bekerja biasa (yang merupakan mayoritas besar penduduk) dari kebajikan sosialisme melalui perdebatan rasional dan diskusi beralasan. Jika massa tidak dapat diyakinkan dari kebajikan sosialisme yang disuarakan melalui persuasi dan contoh, maka sosialis tidak memiliki hak untuk memaksakannya melalui kekerasan. Eksponen terkemuka dari perspektif ini adalah sosialis Jerman *Eduard Bernstein*.

Teori Demokrasi sosial terutama muncul di Eropa Tengah dan khususnya di Jerman selama abad ke-19. Waktu itu, Eropa Tengah terdiri dari masyarakat yang sangat tidak adil, dengan kalangan industrialis dan bangsawan kelas atas yang kaya di satu sisi dan angkatan kerja yang sangat besar, yang bekerja di bawah kondisi yang keras dan brutal, di sisi lain. Pendukung gagasan masyarakat yang lebih setara menggunakan pemikiran para teoretikus politik, seperti Karl Marx (1818-1883), Ferdinand Lassalle (1825-1864), Eduard Bernstein (1850-1932), dan John Stuart Mill (1806-1873). Istilah utama untuk semua pendukung masyarakat yang lebih adil dan setara adalah 'sosialis'. Pembagian yang jelas antara komunis, sosialis demokratis atau sosial demokrat belum dimungkinkan. Selama bertahun-tahun dalam situasi diskusi politik yang memanas, akhirnya perbedaan antara gerakan politik mulai terbentuk. Tidak harus menunggu Perang Dunia I (1914-1918) usai, Demokrasi sosial mulai diakui sebagai ideologi terpisah. Perbedaan utama dengan kelompok-kelompok politik lainnya adalah kepercayaan mereka pada superioritas reformasi politik untuk menciptakan negara demokratis, sebagai lawan revolusi kekerasan untuk mengatasi sistem yang menindas. Sementara pihak 'revolusioner' ingin menggulingkan hubungan antara kepemilikan dengan konstitusi negara untuk mencapai masyarakat baru, kaum sosial demokrat reformis ini ingin mengembangkan masyarakat kontemporer dengan penyusunan konstitusinya melalui reformasi demokratis. Serikat pekerja, perwakilan pekerja yang kuat, dan demokrasi parlementer adalah instrumen Demokrasi sosial untuk mencapai masyarakat yang lebih baik.

Setelah beberapa tahun berada dalam situasi yang menjanjikan (misalnya dengan sistem Presiden Demokrasi sosial di Jerman), benua itu mengalami gelombang pemerintahan anti-demokrasi yang akhirnya berakhir dengan timbulnya Perang Dunia II (1939-1940). Selama periode ini, hanya beberapa negara (AS, Inggris, Perancis, dan sebagian Eropa utara-barat) yang memegang berhasil menggunakan demokrasi, dan sebagai konsekuensinya, Demokrasi sosial kehilangan sebagian besar kehadiran politiknya. Puncaknya, akhir dari Perang Besar adalah kemenangan bagi demokrasi, karena pemenang utama

AS dan Inggris membantu membangun kembali struktur demokrasi di seluruh benua Eropa dan Jepang. Partai-partai demokratik sosial mendominasi langsung tahun-tahun pasca perang di beberapa negara Eropa kontinental, Inggris, Australia, dan Selandia Baru, di mana Partai Buruh berkuasa. Bahkan di negara-negara Eropa Barat dengan pemerintahan konservatif atau liberal, elemen sosial demokratik terintegrasi ke dalam konstitusi baru. Sistem kesejahteraan yang lebih luas dan hak-hak pekerja yang lebih baik adalah contoh tuntutan sosial demokratik tradisional yang menemukan jalan mereka ke dalam sistem politik baru yang lebih populer. Sementara Eropa Barat mengalami perkembangan demokratis, negara-negara Eropa Timur berubah menjadi rezim totaliter. Mereka menyebut dirinya sebagai 'sosial' atau 'sosialis'.

Menurut Meyer (2005), Demokrasi sosial itu bermakna ganda, yaitu sebagai definisi dasar teori demokrasi dan sebutan bagi program sebuah aliran politik. Kendati antara kedua definisi yang lazim dipakai ini terdapat hubungan timbal balik yang beraneka ragam, namun kedua definisi itu adalah dua fakta yang jelas untuk dibedakan. Sebab keduanya memiliki perbedaan tuntutan. Baik landasan normatif maupun peranan yang termaktub di dalamnya. Selain itu, perbedaan dalam cara untuk merealisasikannya, teori Demokrasi sosial tidak bertumpu pada para pelaku politis tertentu. Kendati demikian, tentu saja setiap langkah realisasinya tergantung pada aktor-aktor politis yang memperjuangkan program tindakan praktis yang dijabarkan dari teori tersebut. Para pelaku politis yang beranekaragam dapat memanfaatkan definisi Demokrasi sosial sebagai nama program, jika nama ini dipandang menguntungkan, terlepas dari apakah dan seberapa jauh upaya-upaya politis itu terwadahi atau terkait dengan teori Demokrasi sosial.

A. Nilai-nilai Dasar Demokrasi Sosial

“Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan” adalah slogan yang menjadi nilai-nilai dasar Demokrasi sosial. Slogan tersebut diambil dari peristiwa Revolusi Prancis. Hingga saat ini, beberapa partai politik demokratis selalu mengacu pada nilai-nilai dasar tersebut.

Paham Demokrasi sosial menjadikan slogan tersebut sebagai tuntutan terhadap negara dan masyarakat sebagai “*common sense*”. Hal tersebut juga tercermin dalam hak-hak dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan dua pakta Hak-hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 1966, telah dicapai pengakuan maksimal secara sosial, politik, ekonomi, budaya dan kemasyarakatan karena telah diratifikasi oleh sebagian besar negara. Hingga saat ini slogan tersebut telah menjadi landasan tuntutan global. Tuntutan tersebut meminta agar hak-hak dasar perlu dijaga dengan cara memformalkan dan diterjemahkan dalam sebuah jaminan pemenuhan hak.

1. Kebebasan

Dalam pandangan Demokrasi sosial Kebebasan adalah nilai dasar yang diyakini secara luas oleh semua pelaku politik. Kebebasan dihubungkan dengan cara berpikir mencerahkan dan dimulainya era peradaban warga. Menurut Locke (1977), Kebebasan alami manusia ialah terbebas dari setiap kekuasaan duniawi (yang lebih tinggi), tidak tunduk pada kemauan atau kekuasaan seorang manusia (raja), melainkan sepenuhnya mengikuti aturan alami sebagai landasan hak-haknya. Kebebasan seorang manusia dalam sebuah masyarakat tidak berbasis pada kekuasaan (orang) lain yang dipaksakan berdasarkan keturunan, juga tidak pada kekuasaan dan keinginan atau keterbatasan sebuah undang-undang selain yang diputuskan dalam parlemen yang bisa dipercaya.

Berdasarkan pemikiran Locke, terdapat tiga dimensi kebebasan, yakni: kebebasan diri sendiri, kebebasan terkait pemikiran dan perasaan sendiri serta kebebasan dari barang yang secara legal adalah miliknya. Tiga dimensi kebebasan tersebut banyak sekali mewarnai berbagai konstitusi dan penetapan nilai-nilai hak asasi manusia. Banyak teori – teori pemikiran Demokrasi sosial yang mengacu dan merupakan interpretasi dari definisi kebebasan yang disampaikan oleh John Locke. Menurut Locke, kebebasan alami yang dimiliki setiap manusia, bukan dikembangkan dalam masyarakat, tetapi sudah ada sejak dilahirkan. Namun, “Hak

alami” ini hanya bisa ditransformasikan dan “ditanamkan” menjadi hak setiap individu dalam sebuah masyarakat.

Meskipun demikian, bagi Locke, kebebasan bukanlah sesuatu yang diberikan secara alami, tetapi harus ditetapkan melalui sebuah kontrak sosial dalam masyarakat sebagai sesuatu yang alami. Menurutnyanya dalam sebuah masyarakat, kebebasan dijabarkan lewat kepemilikan seseorang, begitu pula kebebasan pikiran dan perasaan harus dijaga lewat partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kedaulatan politik. Dengan demikian, maka kebebasan alami, tidak begitu saja dengan mudahnya diperoleh, tetapi harus dijamin lewat seperangkat aturan-aturan dalam sistem sosial masyarakat.

Walaupun begitu, pemikiran Locke bukan tanpa kritikan. Kritikan Pertama datang dari Jean-Jacques Rousseau. Ada empat pemikiran utama Locke yang dikritik sekaligus diperkaya oleh Rousseau. Berikut kritikan-kritikan Rousseau terhadap Locke:

- a) Sebuah kontrak sosial yang baik hanya bisa berfungsi ketika semua manusia sewaktu melahirkan (tatanan) masyarakat mengembalikan hak alaminya untuk kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga dari tatanan tersebut.
- b) Kontrak sosial mengacu pada masyarakat warga-monarkis, bukanlah kontrak yang baik.
- c) “Kebebasan” hanya bisa langgeng bila semua keputusan politik terkait hukum berlaku sama untuk semua. Dengan begitu, setiap manusia berada di bawah kemauannya sendiri dan bebas.
- d) Lebih dari itu, bagi Rousseau “Kebebasan” juga terkait dengan perkembangan pemikiran. Pada setiap orang, ia melihat adanya kemampuan untuk mengembangkan berbagai kemampuan (*perfectibilité*). “Kemampuan” bukanlah sesuatu yang terlahir, tetapi dikembangkan lewat kemungkinan-kemungkinan belajar dan hidup dalam masyarakat.

Rousseau, banyak sekali memunculkan pertanyaan terkait gagasan Locke tentang kebebasan. Beberapa pertanyaan tersebut diantaranya:

- a) Mengapa seseorang harus menyerahkan dahulu hak-hak alaminya dan memperolehnya kembali dari masyarakat? Bukankah dengan demikian, terbuka pintu bagi tirani?. Rousseau ingin memperjelas bahwa tidak ada warisan, kepemilikan yang berdampak terjadinya ketidaksetaraan sosial di dalam sebuah masyarakat untuk pencapaian kebebasan bagi semua. Ia mempertanyakan dampak riil dari kebebasan dalam sebuah masyarakat. Ia menganalisa bahwa kebebasan yang diproklamirkan waktu itu, hanya berlaku bagi orang kaya di hadapan orang miskin.
- b) Bagi Rousseau, kebebasan bisa dimanfaatkan sebagai “slogan kosong”. Karena itu, perlu dicermati bahwa kebebasan yang dijamin dalam sebuah masyarakat, juga adalah kebebasan yang berlaku bagi setiap individu.
- c) Kritik Rousseau tentang aspek yang mendasar dari kebebasan, yaitu tentang keterkaitannya dengan kekuasaan. Sebelumnya Locke dan Thomas Hobbes berpendapat bahwa peraturan meskipun dilegitimasi oleh rakyat, tetapi rakyat tidak harus menjadi pelakunya. Bagi Rousseau, seseorang hanya akan bebas, yang berarti hanya tunduk pada kemauan politiknya semata, bila ia terikat pada peraturan/hukum di mana ia sendiri ikut terlibat di dalamnya.
- d) Rousseau memperkaya definisi kebebasan Locke pada salah satu sisi sentralnya. Ia meyakini kebebasan manusia hanya bisa terlaksana bukan karena seseorang memiliki “kemampuan” alami, melainkan memiliki kesempatan/kemampuan untuk mengembangkan berbagai kemampuannya. Dengan demikian, pengembangan diri seorang manusia dan kemungkinan untuk mengembangkan kepribadiannya merupakan tantangan utama masyarakat demokratis.

Batasan-batasan kebebasan hingga kini masih terus menjadi perdebatan, khususnya yang terkait hubungannya dengan negara. Batasan kebebasan, menurut Montesquieu, terletak pada kewajiban menegakkan undang-undang, dan agar semua ikut menjaga undang-

undang. “Dalam praktek, kelihatannya rakyat dalam sebuah demokrasi melakukan apa yang diinginkan. Namun, kebebasan politik tidak berarti melakukan apa saja yang diinginkan. Dalam sebuah negara, artinya di dalam sebuah masyarakat di mana terdapat hukum, kebebasan hanyalah berarti seseorang melakukan apa yang diperbolehkan, dan tidak dipaksa untuk melakukan apa yang tidak diinginkan olehnya. Sebaiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan independensi dan kebebasan. Kebebasan adalah hak untuk melakukan semua yang diperbolehkan secara hukum. Bila seorang warga bisa melakukan apa yang dilarang, maka berarti ia tidak lagi memiliki kebebasan karena yang lain juga memiliki hak/kekuasaan yang sama” (Montesquieu, 1992).

Berbeda dengan Montesquieu, Kant merumuskannya secara lebih luas. Batas kebebasan, menurut Kant bersifat moralis bagi setiap individu dan terkait dengan kemaslahatan umum. “Satu-satunya imperatif adalah bertindaklah menurut kaidah berupa keinginan bahwa tindakanmu itu menuruti aturan umum” (Kant, 1995). Sementara bagi Amartya Sen, kebebasan adalah tentang kesempatan artikulasi/mewujudkan yang mensyaratkan partisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat, lebih dari sekedar kesetaraan secara fisik.

2. Kesetaraan atau Keadilan

Apakah Kesetaraan atau Keadilan?. Untuk menyebut terma tersebut, hingga kini para ahli dan sebagian besar orang masih ragu untuk memilih peristilahannya, apakah Keadilan atau Kesetaraan?. Apakah dua istilah tersebut berbeda?, atau berhubungan?. Sejak 1980an, kaum Demokrasi sosial menjadikan “keadilan” sebagai nilai sentral yang dipakai untuk menggantikan “kesetaraan”.

Berbeda dari istilah “kebebasan” yang bisa dikaitkan pada setiap insan. Istilah “kesetaraan” dan “keadilan” adalah istilah yang relatif, karena ada keterkaitan antara masing-masing individu dan anggota masyarakat lainnya. “Apa itu keadilan?. Bisakah kita mengajukan pertanyaan tersebut?. Keadilan bukanlah “apa”, tetapi sebuah kategori relasi (terkait relasi antar manusia). Relasi tertentu, bisa disebut berkeadilan. Karena itu, pertanyaan selanjutnya bukanlah,

Apa itu keadilan?, melainkan apa yang berlaku pada keadilan?’ (...) topik keadilan adalah kedudukan orang per orang dalam masyarakat, dalam relasi dengan orang lain (...) Manusia memiliki kebutuhan, posisinya dalam relasi dengan yang lain berhubungan dengannya, menentukan, bagaimana dipahami, bagaimana dinilai. (...). Sesuai dengan harga diri perorangan, berkaca pada penilaian sesamanya, ia akan merasa diperlakukan secara adil. Manifestasinya terlihat dalam penilaian terkait penyerahan, penolakan atau penyitaan komoditas material dan ideal.” (Heinrich, 2002).

Keadilan, tampaknya juga adalah istilah yang mensyaratkan banyak hal: secara individual, seseorang bisa merasa diperlakukan secara tidak adil, meski secara objektif telah terjadi pendistribusian (barang, kekayaan dst.) yang “adil”. Dengan demikian, apa yang adil atau tidak adil hanya bisa ditetapkan lewat kesepakatan masyarakat. Artinya, keadilan mensyaratkan adanya distribusi barang (ideal dan material), dan berorientasi pada pendistribusian sesuai ukuran yang terlegitimasi dalam masyarakat. Bila semua persyaratan tersebut terpenuhi, kita bisa menyebutnya sebagai “keadilan”.

Sebaliknya, kesetaraan adalah bentuk khusus dari distribusi barang ideal dan material. “Titik awal dan bukan hasil sebuah tatanan (sosial) (...) adalah kesetaraan. Dalam menentukan ukuran distribusi dibutuhkan sebuah norma dasar sebagai manifestasi keadilan. Norma pendistribusian primer ini adalah kesetaraan numerik, pembagian apa yang mau didistribusikan sesuai jumlah yang harus diperhatikan. Kesetaraan, dibandingkan keadilan, tidak memerlukan kriteria. (...) Ketika untuk kasus konkret tidak terdapat kriteria pendistribusian barang, bila tidak ada alasan bahwa seseorang mendapat lebih dari yang lain, maka bila tidak ingin semaunya, semua harus diberikan bagian yang sama.” (Heinrichs, 2002). Dengan demikian, tuntutan kesetaraan mensyaratkan bahwa tiada satupun alasan sosial yang bisa dipakai untuk melegitimasi perlakuan yang berbeda dalam pendistribusian barang.

3. Persaudaraan

Solidaritas bisa didefinisikan sebagai satu rasa seperti tanggung jawab sebuah masyarakat yang bertopang pada kepentingan bersama dan pada perilaku demi kemaslahatan bersama, termasuk melawan kepentingan jangka pendek pribadi yang melampaui ambisi formal demi keadilan bersama. Maka, solidaritas merupakan sebuah “identitas sosial” bersama, yang tumbuh subur dalam kemiripan pola hidup dan nilai bersama. Menurut Walzer (1997), solidaritas bisa berbahaya bila ia sekedar sebuah perasaan. Sebuah emosi artifisial untuk sebuah kebersamaan, bukanlah cerminan dari sebuah kebersamaan yang nyata dan hidup. Kebersamaan yang nyata itu terkait erat dengan lembaga dan struktur kemasyarakatan di mana solidaritas bisa berkembang dan menjadi pupuk bagi keamanan sosial. Agar memiliki daya dorong, Solidaritas mensyaratkan penyeragaman kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas hanya bisa tumbuh bila memperhatikan perbedaan, tepatnya kesamaan kepentingan dalam argumentasi politik

B. Demokrasi Sosial dan Keadilan Sosial

Demokrasi sosial adalah ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mempromosikan keadilan sosial dalam kerangka pemerintahan demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis. Protokol dan norma yang digunakan untuk mencapai hal ini melibatkan komitmen terhadap demokrasi perwakilan dan partisipatif; langkah-langkah untuk redistribusi pendapatan dan pengaturan ekonomi untuk kepentingan umum; dan ketentuan negara kesejahteraan. Dengan demikian, demokrasi sosial bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kapitalisme untuk mengarah pada hasil-hasil demokrasi, egalitarian, dan solidaritas yang lebih besar.

Demokrasi sosial berawal sebagai ideologi politik yang mengadvokasi transisi evolusioner dan damai dari kapitalisme ke sosialisme menggunakan proses politik yang mapan, berbeda dengan pendekatan revolusioner terhadap transisi yang terkait dengan Marxisme ortodoks. Demokrasi sosial modern dicirikan oleh komitmen terhadap kebijakan yang bertujuan untuk membatasi ketidaksetaraan, penindasan

kelompok kurang mampu dan kemiskinan, termasuk dukungan untuk layanan publik yang dapat diakses secara universal seperti perawatan untuk orang tua, perawatan anak, pendidikan, perawatan kesehatan dan kompensasi bagi kaum pekerja.

Konsep 'keadilan sosial' saat ini sering digunakan oleh kaum sosial demokrat di seluruh Eropa dan di luar Eropa sebagai refleksi atas nilai-nilai gerakan dan penanda untuk politik progresif. Dukungannya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa demokrasi sosial selaras dengan keprihatinan yang populer di zaman yang semakin tidak aman dan berkeinginan untuk menggerakkan paket perundang-undangan yang progresif di berbagai bidang kebijakan publik untuk meningkatkan rasa keadilan di kalangan pemilih.

Keadilan sosial' hanyalah cara tidak langsung bagi demokrasi sosial untuk berbicara tentang 'hal yang nyata', dan itu adalah persamaan. Ini adalah persamaan yang membebaskan orang dari belenggu kemiskinan dan ketidaktahuan dan menawarkan mereka kesempatan untuk mencapai potensi penuh yang dimiliki oleh mereka. Ini adalah persamaan yang membebaskan tubuh dan pikiran dari segudang pembatasan yang dikenakan padanya oleh hak istimewa yang diwarisi, takhayul dan ketimpangan dalam sistem pasar. 'Keadilan sosial' adalah baik, tetapi juga mungkin konsep yang terlalu jinak untuk menandai demokrasi sosial sebagai gerakan sosio-ekonomi dan politik emansipatif yang layak pada masa lalunya dan yakin akan masa depannya. Oleh karena itu, penting untuk secara ekstensif membicarakan penggunaan dan penerapan persamaan, mengakui sebuah keadaan yang merugikan, serta bagaimana cara terbaik untuk mencapainya.

Demokrasi sosial hampir sama dengan sosialisme. Persamaan itu terletak pada nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan (atau solidaritas). Hal tersebut juga sama dengan model demokrasi liberal, yakni berdasarkan hak. Perbedaan antara sosial demokrat dan sosialis cukup kabur, susah untuk dibedakan, karena cita-cita mereka (sosial demokrat) mungkin sama dalam beberapa aspek dan tidak pada yang lain, tetapi keduanya sangat penting. Pertama, kebanyakan kaum sosial demokrat adalah individualis daripada kolektivis; bahkan jika mereka menerima argumen untuk saling membantu atau mengu-

rangkan kerugian, mereka berpikir penting untuk menekankan kebebasan individu terlebih dahulu dan mengembangkan hak-hak individu (seperti yang dilakukan kaum liberal), serta sering untuk membatasi peran negara. Kedua, kaum sosial demokrat pada prakteknya kadang tidak peduli untuk menghilangkan ketidaksetaraan, tetapi hanya untuk mengurangi dampaknya melalui pengaturan sosial yang melindungi orang lain dari konsekuensi-konsekuensi terburuk dalam mekanisme pasar. Bahkan bagi sebagian yang lain, lebih menyukai persamaan kesempatan, yang menyiratkan peluang untuk tidak setara.

Menurut Meyer (2005), kebiasaan saat ini, Demokrasi sosial itu bermakna ganda, yaitu sebagai definisi dasar teori demokrasi dan sebutan bagi program sebuah aliran politik. Kendati antara kedua definisi yang lazim dipakai ini terdapat hubungan timbal balik yang beraneka ragam, namun kedua definisi itu adalah merupakan dua fakta yang jelas untuk dibedakan. Sebab keduanya memiliki perbedaan tuntutan. Baik landasan normatif maupun peranan yang termaktub di dalamnya. Selain itu, perbedaan dalam cara untuk merealisasikannya, teori Demokrasi sosial tidak bertumpu pada para pelaku politik tertentu. Kendati demikian, tentu saja setiap langkah realisasinya tergantung pada aktor-aktor politik yang memperjuangkan program tindakan praktis yang dijabarkan dari teori tersebut. Para pelaku politik yang beranekaragam dapat memanfaatkan definisi Demokrasi sosial sebagai nama program, jika nama ini dipandang menguntungkan, terlepas dari apakah dan seberapa jauh upaya-upaya politik itu terwadahi atau terkait dengan teori Demokrasi sosial.

Meyer beranggapan, bahwa di satu pihak kapitalisme dan demokrasi saling melengkapi. Jadi, kapitalisme pasar merupakan persyaratan pembentukan dan stabilitas demokrasi. Di lain pihak, Meyer menemukan ketegangan yang unik, sebab pasar yang tanpa kendali bertentangan dengan persyaratan yang diperlukan bagi partisipasi publik. Meyer menggambarkan hubungan sistem ekonomi dan demokrasi lewat dua tesis (asumsi) berikut. Di satu pihak, ia menganalisis persyaratan kelahiran demokrasi secara historis. Di lain

pihak, ia meneliti keterkaitan empiris antara demokrasi dan ekonomi pasar untuk masyarakat mutakhir.

C. Demokrasi Sosial dalam Negara Kesejahteraan

Paham Kesejahteraan menghendaki peran pemerintah. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan negara (pemerintahan) yang dikenal sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Kalangan Sosial Demokrat dalam penyelenggaraan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) menggunakan dua Prinsip utama yaitu: *Communitarianism* dan *equality* (kesetaraan). Dalam prakteknya penyelenggaraan Negara tidak hanya bertumpu pada partisipasi masyarakat semata tetapi melibatkan aspek politik. Demokrasi yang diisi dengan paham-paham sosial. Wujudnya adalah demokrasi untuk kesejahteraan sosial (*democratic welfare*). Dalam perjalanannya pemerintahan yang ditujukan untuk kesejahteraan umum bermorfosa dalam bentuk kolektivisme yang dalam istilah Bonger (dalam Martosoewingjo, 1984) disebut sebagai demokrasi materil.

Demokrasi Sosial yang awalnya berkembang di belahan bumi Eropa pada awal abad ke-20 didorong oleh dua hal: Pertama, menghendaki adanya sistem pemerataan dan pembagian pendapatan yang adil untuk seluruh warga negara. Kedua, sebagai usaha relaksasi kapitalisme agar lebih humanis. Harapannya agar ada keseimbangan antara kepentingan pasar dengan kepentingan negara, dan keseimbangan individu dengan masyarakat. Maka bisa dikatakan Demokrasi sosial merupakan sebuah kompromi antar kapitalisme dengan sosialisme. Seperti yang kita pahami kapitalisme dipercaya sebagai salah satu sistem yang mampu mewujudkan kekayaan negara dan masyarakat. Sementara sosialisme mempercayai tentang perlunya distribusi kekayaan yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai moral bukan prinsip-prinsip pasar. Ciri utama dari Demokrasi sosial adalah perhatiannya pada persoalan-persoalan sosial yang menyangkut kelompok masyarakat lemah dan rentan secara sosial, ekonomi, dan politik.

Kebebasan, keadilan, dan solidaritas merupakan nilai-nilai inti dari Demokrasi Sosial. Secara garis besar negara kesejahteraan mengacu kepada ketiga nilai tersebut. Maka negara kesejahteraan merupakan

bagian inti dari Demokrasi sosial. Kedekatan tersebut bukan tanpa alasan, dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa Negara kesejahteraan adalah suatu proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Mereka menyatakan bahwa negara kesejahteraan bukan negara sosialis atau negara kapitalis. Ide bahwa negara kesejahteraan adalah suatu pembentukan sosial yang unik juga dinyatakan dalam pengertian konsensus kesejahteraan atau kompromi demokratis sosial. Walaupun ketiga ciri tersebut sangat dekat (similiar) dengan Sosial Demokrasi pada prosesnya tetap memerlukan keterlibatan mekanisme politik. Tujuannya adalah untuk menemukan sebuah kompromi, adanya posisi tawar, dan inklusifitas. Tiga hal tersebut merupakan karakteristik demokrasi.

D. Demokrasi Sosial dan Kebijakan Sosial

Sosial demokrat juga sangat menyukai negara kesejahteraan sebagai jalan perjuangannya, hal tersebut untuk memastikan bahwa semua warga dijamin mendapatkan pendapatan minimum, terutama ketika mereka tidak bekerja, yang selanjutnya akan berfungsi sebagai cara memberantas kemiskinan. Di Inggris, negara kesejahteraan salah satunya diwujudkan melalui Layanan Kesehatan Nasional. Layanan tersebut memastikan bahwa akses perawatan kesehatan tidak lagi harus bergantung pada penghasilan; warga termiskin dapat menerima perawatan medis ketika mereka membutuhkannya. Negara kesejahteraan terutama didanai melalui sistem perpajakan progresif, di mana orang kaya membayar pajak penghasilan yang lebih tinggi, dengan demikian memfasilitasi redistribusi kekayaan, dan memastikan bahwa kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak menjadi terlalu lebar atau mendalam.

Sementara itu, meskipun demokrasi sosial tidak menganjurkan kesetaraan ekonomi yang lengkap (dalam hal upah dan gaji yang sama untuk semua orang), ia mempromosikan kesetaraan sosial, yang berarti bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama. Dalam hal ini, demokrasi sosial juga sangat mendorong persamaan kesempatan; kemiskinan dan bentuk-bentuk lain dari perampasan sosial-

ekonomi. Demokrasi sosial berusaha mencegah individu dari perampasan akses menuju sumber daya seperti akses untuk menikmati pendidikan, di mana mereka dapat memperoleh kualifikasi atau keterampilan yang kemudian akan memungkinkan mereka untuk mencapai mobilitas sosial. Dengan demikian, demokrasi sosial telah mempromosikan pendidikan gratis (dibiayai oleh pajak umum) untuk memastikan bahwa anak-anak dari latar belakang keluarga miskin tidak ditolak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik dan adil. Negara harus diperlakukan sebagai manusia dengan nilai dan potensi moral yang setara; tidak ada yang harus didiskriminasi, atau ditolak untuk mendapatkan akses ke pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, perumahan, atau kesejahteraan, hanya karena jenis kelamin atau gender, ras atau etnis, atau karena latar belakang sosial ekonomi mereka.

Tuntutan untuk merealisasikan secara nyata hak-hak dasar bagi setiap individu dibebankan kepada negara. Negara, dengan demikian, dibebani peranan aktif berikut kewajiban bertindak, terutama menyangkut:

- Pembukaan akses, terjaminnya peluang terhadap infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan hidup.
- pemberian peluang partisipasi aktif bagi semua lewat pemerataan sosial dan demokrasi.
- Secara formal, memagari ekonomi pasar sedemikian rupa sehingga struktur-struktur demokrasi dan kepentingan-kepentingan kaum buruh dapat terjamin dan secara bebas terwakili.

Perangkat (instrumen) negara yang bisa memenuhi tuntutan-tuntutan warganya itu tidaklah seragam di setiap negara. Lewat sebuah contoh sederhana, hal tersebut bisa dijelaskan: Sejak tahun 1890an, di Jerman berkembang sebuah sistem jaminan sosial. Sistem ini sangat berperan membuat penduduk, secara umum, dapat hidup secara manusiawi. Lewat keterlibatan solidaritas kaum pekerja, pemerintah sebagai organisator memastikan loyalitas warga terhadap negara. Negara-negara lain, seperti negara-negara Skandinavia, memiliki sistem sosial yang berbasis pajak. Dapatlah dikatakan, bahwa terdapat

penyediaan kebutuhan hidup dan pemenuhan tuntutan setiap warga terhadap negara.

Keadilan Sosial dan Kebijakan Sosial

Keadilan Sosial merupakan persamaan hak bagi semua manusia dan jalan untuk memberikan peluang kepada seluruh manusia untuk bermanfaat bagi kemajuan sosial maupun ekonomi tanpa perbedaan (ILO, 2011). Definisi tersebut dengan lugas menggambarkan bagaimana seharusnya manusia diberi peluang yang sama untuk memperoleh akses terhadap semua sumber daya. Dengan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengakses, ada kemungkinan (peluang) bagi manusia untuk bisa memberikan pengaruh berupa kemanfaatan yang bisa mendorong kepada terwujudnya sebuah peradaban yang berkeadilan. Kemajuan dan keamanan sistem sosial bisa dinikmati bersama-sama dan kemajuan ekonomi bisa mengurangi ketimpangan serta ketidakmerataan sumber-sumber kehidupan. Keadilan sosial merupakan konsep tentang perilaku dan tindakan serta bagaimana hubungan antara individu dengan masyarakat. Keadilan Sosial secara eksplisit digambarkan bagaimana kekayaan dan kemakmuran terdistribusi dalam masyarakat. Selain itu bagaimana aktivitas masyarakat memiliki posisi istimewa dalam sosial. Konsep Keadilan sosial juga sering mengacu kepada proses untuk memastikan bahwa individu bisa memenuhi peran kehidupannya dalam sistem sosial masyarakat serta memastikan mereka (individu) telah menerima haknya dari masyarakat.

Dalam konteks global saat ini, Keadilan sosial lebih ditekankan pada bagaimana caranya bisa memecahkan hambatan-hambatan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas sosial, penciptaan jaring pengaman, dan keadilan ekonomi. Jika dalam konteks kekinian, maka masalah keadilan sosial bisa dikategorikan dalam dua kelompok. Pertama, cara penyelesaian Masalah-masalah hubungan sosial, seperti seksisme, rasisme, ageisme, dan Gender. Kedua, kebijakan pemerintah yang tidak setara, seperti kebijakan lingkungan atau pajak yang merugikan orang miskin, segregasi legal (rasisme), hukuman mati, akses

yang tidak setara terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan yang tidak merata, layanan publik yang tidak berkeadilan, dan hak-hak buruh yang terabaikan. Walaupun kedua kelompok tersebut terkesan tumpang tindih, tapi keduanya berhubungan erat dan bisa menjadi pemicu bagi satu dengan yang lainnya dalam konflik sosial. Kedua kelompok tersebut memerlukan adanya jaminan berupa kebijakan-kebijakan yang berkeadilan dari Negara. Adanya jaminan keadilan untuk memperoleh peluang dan kesempatan yang sama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki daya untuk sejahtera. Menurut Toynbee (1976), pengamanan terbaik melawan Fasisme adalah dengan mewujudkan Keadilan Sosial semaksimal mungkin.

Selain definisi yang diberikan oleh ILO, Keadilan biasanya mengacu pada sebuah gagasan untuk menciptakan suatu masyarakat atau institusi yang didasarkan pada prinsip persamaan dan kesetiakawanan yang bisa memahami, menilai, dan mengenali tentang hak dan kebenaran martabat dari tiap manusia. Dalam Kamus Oxford, Keadilan Sosial merupakan Keadilan dalam hal distribusi kekayaan, peluang, dan keistimewaan dalam suatu masyarakat. Sementara Menurut Merriam-Webster Dictionary, Keadilan sosial merupakan sebuah doktrin negara egalitarianism, di mana Egalitarianisme didefinisikan sebagai sebuah kepercayaan terhadap persamaan manusia, terutama berkenaan dengan urusan-urusan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu Egalitarianisme merupakan sebuah filsafat sosial yang menganjurkan adanya penghapusan ketidaksetaraan di antara manusia. Sedangkan dalam *Business Dictionary* Keadilan Sosial didefinisikan sebagai Hukum-Hukum Administrasi yang adil dan tepat sesuai dengan hukum alam bahwa semua orang, terlepas dari asal etnis, jenis kelamin, harta benda, ras, agama, dan lain-lain, diperlakukan sama dan tanpa prasangka. Sederhananya, Keadilan Sosial menurut *National Association of Social Workers* merupakan pandangan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak ekonomi, politik dan sosial yang sama. Demikian juga menurut *Center for Economic and Social Justice* Keadilan Sosial merupakan sebuah kebijakan yang menuntun kita dalam menciptakan interaksi manusia yang terorganisir dan terlembagakan. Pada gilirannya, institusi sosial ketika mengatur dengan adil,

akan memberikan akses terhadap apa yang baik untuk orang lain, baik secara individu maupun dalam hubungan kita dengan orang lain. Keadilan sosial juga memberi kita tanggung jawab pribadi untuk bekerja sama dengan orang lain untuk merancang dan terus menyempurnakan lembaga-lembaga kita sebagai alat untuk pengembangan pribadi dan sosial.

Meskipun definisi di atas berbeda-beda, namun secara umum gagasan dan tema besar yang ditampilkan saling berhubungan dan menjadi isu utama dalam masalah keadilan sosial. Jika ditarik secara keseluruhan, maka garis besarnya adalah bagaimana hak asasi manusia, martabat Manusia, politik, sosial, ekonomi, persamaan hak, pemerataan sumber daya, keadilan, penggunaan kebijakan dan hukum, penghapusan ketidaksetaraan, partisipasi masyarakat dalam perubahan, tanggung jawab pribadi, dan penciptaan akses terhadap kesempatan melalui tindakan-tindakan kebijakan negara. Keadilan sosial menetapkan hak dan kewajiban dalam institusi masyarakat, yang memungkinkan orang menerima tunjangan dasar dan beban kerja bersama-sama.

Dalam prakteknya, institusi terkait (negara) sering memasukkan instrumen pajak, asuransi sosial, kesehatan masyarakat, pendidikan, layanan publik, Undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pasar, untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil, dan kesempatan yang sama. Dari sini kita bisa melihat, bahwa Keadilan sosial merupakan Interpretasi atas hubungan timbal balik yang adil dalam tatanan masyarakat yang dijabatani oleh perbedaan tradisi dan budaya. Titik tekannya adalah berupa tanggung jawab individu terhadap masyarakat dan keseimbangan antara akses terhadap kekuasaan dan penggunaan tanggung jawab yang dimilikinya. Karena itu, keadilan sosial jika merujuk kepada penafsiran seorang tokoh bernama Bartolome de las Casas, dalam perdebatan filosofis tentang perbedaan di antara manusia, maka keadilan sosial berkuat pada upaya untuk mengatasi masalah-masalah (hambatan-hambatan) seputar isu gender, ras dan persamaan sosial, advokasi keadilan bagi kaum migran, narapidana, lingkungan, cacat fisik, dan cacat mental.

Konsep keadilan sosial dapat ditelusuri melalui teologi Agustinus Hippo dan filsafat Thomas Paine, istilah "keadilan sosial" digunakan

secara eksplisit dari tahun 1840an. Konsep-konsep Keadilan tersebut kemudian disebarakan oleh Luigi Taparelli seorang tokoh Jesuit selama melakukan pelayanan-pelayanan keagamaan pada masa revolusi sekitar tahun 1848-an. Dalam perjalanannya konsep Keadilan sosial terus berkembang dan semakin luas penggunaannya sesuai dengan konteks dan kebutuhan sistem sosial masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam pendapat Radhakrishnan yang mengatakan bahwa “Keadilan Sosial adalah satu atribut dari Tuhan. Setiap berbuat sesuatu, dan setiap pemikiran ditimbang dengan sesuatu yang tak terlihat dari keadilan universal. Hari Penghakiman bukanlah masa depan yang bisa diprediksi saat ini juga, dan tidak ada yang dapat meloloskan diri darinya. Hukum ilahi tidak bisa dihindarkan. Mereka tidak bisa memaksakan terlalu banyak dari luar sebagai sesuatu yang ditempatkan ke dalam sifat kita”. Istilah, ‘keadilan’ sudah digunakan sejak dahulu kala dengan bahasa yang berbeda-beda, di dalam agama yang berbeda-beda, serta berbagai macam kawasan. Di dalam syair kepahlawanan dan Puran, ‘Keadilan’ telah ditafsirkan dengan cara yang berbeda dari apa yang telah dipahami oleh para sarjana dan masyarakat pada hari ini (Hantal, 1996). Keadilan adalah evolusi basis dasar sosial dan institusi politik, terutamanya berkenaan dengan persoalan distribusi sebagai akibat pembagian keuntungan dan beban, yang secara baku dinyatakan dan dikaitkan dengan keadilan atau ketidakadilan. Pada pengertian yang paling umum, konsep keadilan mensyaratkan adanya sesuatu yang dibutuhkan masing-masing individu (Outhwaite dan Bottomore, 1993).

Konsep keadilan mempunyai beberapa dimensi, di mana dimensi tersebut merupakan salah satu kebaikan utama individu yang masuk akal dalam berhadapan dengan orang lain, dimensi tersebut merupakan seperangkat sistem aturan yang sah, dan merupakan titik kritis dari keadilan yang dibuat dalam berbagai cara sebagai fungsi masyarakat. Secara umum, dimensi keadilan terkait dengan distribusi sumber daya sebagai hasil dari ekonomi, organisasi budaya, dan masyarakat politik. Dimensi tersebut mendefinisikan keadilan sosial sebagai "memberi sesuai waktu". Keadilan merupakan suatu bentuk distribusi yang cukup bermanfaat dan pembagian beban yang timbul dari kerjasama

sosial. Dari gambaran tersebut, Keadilan sosial bisa dikatakan sebagai bentuk berbagai macam keadilan yang bisa dicapai ketika pengaturan sosial bisa dicapai oleh semua orang pada waktunya.

Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, hampir semua budaya dan tradisi sudah lama bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan, walaupun mereka mungkin menafsirkan konsep keadilan dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di dalam kalangan masyarakat India kuno, Keadilan telah dihubungkan dengan Dharma dan memelihara Dharma merupakan kewajiban keadilan, Dharma dijadikan sebagai tugas utama bagi seorang raja. Sementara, di dalam kepercayaan masyarakat China melalui Konfusius seorang ahli filsafat yang terkenal, berargumentasi bahwa para raja perlu memelihara keadilan dengan memberikan hukuman pada suatu kesalahan dan memberikan penghargaan kepada hal-hal (tindakan dan perbuatan) yang luhur. Sementara, pada abad ke empat, Plato dalam bukunya *The Republic*, membahas isu keadilan dengan menampilkan sebuah dialog antara Socrates dengan dua teman mudanya yakni Glaucon dan Adeimantus. Melalui dialog yang panjang dengan kedua temannya tersebut, Plato mengujinya dengan sebuah pertanyaan, mengapa kita harus memperhatikan keadilan?. Kedua anak muda tersebut bertanya kepada Socrates mengapa kita harus adil. Sementara mereka berdua mendapati fakta melalui pengamatan yang dilakukannya, bahwa orang-orang yang tidak adil tampak lebih baik keadaannya dibanding mereka yang berperilaku adil. Mereka kadang-kadang membuat peraturan untuk kepentingan mereka, menghindarkan mereka dari pajak, dan berperilaku curang. Namun mereka lebih sukses dari pada mereka yang berperilaku penuh kejujuran dan adil sebagai jalan hidupnya. Socrates mengingatkan teman-teman mudanya tersebut, jika semua orang tidak adil, jika semua orang memanipulasi peraturan demi kepentingan dirinya, tidak ada seorang pun yang menjamin keuntungan bisa diperoleh dari ketidakadilan. Tidak Seorang pun yang akan menjamin bahwa perilaku tidak adil tidak merugikan mereka semua. Oleh sebab itu, menurut Socrates keadilan adalah kepentingan jangka panjang untuk taat hukum dan adil. Socrates memperjelas, bahwa kita perlu memahami

dengan jelas keadilan tersebut secara luas, hal tersebut penting agar manusia menjadi adil. Ia menerangkan bahwa keadilan itu tidak hanya berarti membantu orang lain dan merugikan orang lain, atau mengejar kepentingan kita sendiri. Keadilan melibatkan kesejahteraan dari semua orang-orang. Pemahaman kita pada hari ini tentang gagasan keadilan adalah saling memberi dengan melibatkan banyak orang. Pemahaman tersebut terus berlanjut hingga sekarang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pemahaman tentang keadilan. Bagaimanapun, pemahaman kita tersebut tentang keadilan, kaitannya dengan orang lain telah bergeser dari pemikiran Plato.

Hari ini, pemahaman kita tentang keadilan adalah berkaitan dengan masing-masing orang sebagai manusia, hal yang menurut Ahli filsafat Jerman Immanuel Kant, Manusia memiliki martabat. Jika semua orang mewarisi martabat dalam diri mereka, maka mereka mempunyai kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka dan mengejar impian mereka. Keadilan memerlukan pemberian kesempatan dan peluang yang sama serta pertimbangan yang sama kepada semua individu. Keadilan Sosial merupakan suatu gagasan bahwa semua anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan pijakan yang sama dalam hal peluang, hak politik, distribusi kekayaan dan hak-hak istimewa lainnya yang melekat dalam diri manusia, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang memuaskan dan menyadari potensi yang mereka miliki dalam masyarakat. Narasi tersebut diperkuat oleh pendapat Rawls (1971), yang menyatakan bahwa Keadilan adalah kebaikan yang pertama dari institusi sosial, sebab kebenaran dari sistem pikiran. Suatu teori bagaimanapun efisien dan bagusnya harus ditolak atau ditinjau kembali jika tidak benar, demikian juga dengan hukum dan institusi, tidak peduli bagaimana efisien dan baiknya mengatur, harus diperbaiki atau dihapuskan jika mereka (hukum dan institusi) tidak adil.

Persoalan Distributif menjadi isu kunci dalam Keadilan Sosial. Beberapa definisi yang digunakan oleh para ahli seperti Miller (1976, 1999) misalnya, mereka selalu mengaitkan Keadilan Sosial dengan isu-isu distributif, dan bahkan terkadang mereka mengganti Keadilan Sosial menjadi Keadilan Distributif. Sementara Rawls (1971), melihat

keadilan sebagai sesuatu kewajaran dalam persoalan distributif, maknanya pemerataan harus terjadi secara wajar. Sedangkan Harvey (1973), berpendapat bahwa keadilan merupakan hal yang esensial (seperangkat prinsip-prinsip) untuk memecahkan masalah dan persoalan-persoalan sosial. Miller (1999), mendefinisikan keadilan sosial sebagai suatu cara bagaimana hal-hal yang baik dan buruk dalam hidup manusia harus dibagi-bagikan di antara anggota masyarakat. Walaupun Miller (1999), mengakui bahwa dalam konteks yang paling baru, keadilan sosial bukan hanya persoalan distribusi semata, banyak dimensi lain yang bisa digunakan untuk mendefinisikan keadilan sosial.

Meningkatnya ketidakmerataan hari ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dinafikan atau diabaikan. Dengan kondisi dunia yang terbuka, kondisi tersebut adalah sebuah ironi terhadap negara yang menjadikan kesejahteraan sebagai sebuah tujuan atas keberhasilan dirinya menjadi sebuah wilayah yang berdaulat. Kedaulatan politik tidak bisa dinikmati secara menyeluruh karena gagalnya negara memberikan kebijakan-kebijakan politis yang bisa memberikan jaminan bahwa negara akan melayani dan melindunginya secara tulus. Kedaulatan ekonomi hanya ilusi semu di atas tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang dialami warga negara. Distribusi pendapatan yang tidak merata hanya memakmurkan sebagian warga negara. Sementara, kedaulatan pangan yang menjadi salah satu ciri dari negara kesejahteraan tidak pernah mampu mengenyangkan kaum-kaum yang tak berdaya.

Sejak dua dekade yang lalu tren persebaran distribusi pendapatan yang tidak merata cenderung terus meningkat di seluruh dunia. Pasca Perang Dunia II, fenomena itu terekam jelas dan tampak secara nyata. Banyak negara-negara yang juga mengalami fenomena tersebut. Pada awal abad 21, sekitar tahun 80-an, beberapa kasus walaupun berbeda-beda di beberapa negara di dunia menunjukkan adanya jurang angka kemiskinan yang semakin menguat. Kondisi tersebut secara langsung menyerang orang-orang dan keluarga yang rentan secara sosial. Paling umum adalah timbulnya ketidakmerataan terkait dengan masalah pendapatan, khususnya dalam kepemilikan modal dan harta benda, akses untuk menggunakan jasa dan

memperoleh pelayanan, serta daya beli. Kecenderungan tersebut terus meningkat sehingga masyarakat tidak memiliki daya akses terhadap kebutuhannya. Ada juga ketidakmerataan berkaitan dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga masyarakat dihadapkan pada suatu dilema sosial yakni pengangguran. Hal tersebut bermakna bahwa masyarakat berada dalam situasi yang tidak sebanding, di mana angkatan kerja cukup tinggi sementara lapangan pekerjaan sangat rendah. Situasi tersebut tentu saja berdampak secara signifikan terhadap sosio-ekonomi masyarakat.

Keadilan sosial umumnya didefinisikan sebagai distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kewajiban yang adil dan setara dalam masyarakat untuk semua orang, tanpa memandang ras atau etnis, usia, jenis kelamin, status kemampuan, orientasi seksual, dan latar belakang agama atau spiritual (Van den Bos, 2003). Prinsip-prinsip mendasar yang mendasari definisi ini termasuk nilai-nilai inklusi, kolaborasi, kerjasama, akses yang setara, dan kesempatan yang setara. Nilai-nilai semacam itu juga merupakan fondasi dari masyarakat demokratis dan egaliter (Sue, 2001).

Selama dua dekade terakhir, tren kenaikan tingkat ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan di berbagai negara dunia terdokumentasi dengan baik dan trennya terus mengalami kenaikan. Sejumlah besar negara mengalami hal yang sama, dari yang negara paling miskin hingga yang negara yang paling makmur. Hingga awal tahun 1980-an, setidaknya sejak Perang Dunia Kedua berakhir, dan dalam beberapa kasus sejak awal abad ke-20, sudah menjadi pemandangan umum bahwa telah terjadi ketimpangan (disparitas) dalam pendapatan yang tersedia bagi individu dan keluarga. Ketidaksetaraan terkait pendapatan terutama dalam kepemilikan modal, kepemilikan aset, akses ke berbagai layanan dan manfaat, serta perlindungan keamanan pribadi yang dapat dibeli melalui uang, sedang tumbuh. Ketimpangan yang lebih besar juga terjadi dalam distribusi peluang untuk pekerjaan yang dibayar. Dengan membukanya pengangguran, di mana setengah dari pengangguran yang ada di berbagai belahan dunia mempengaruhi jumlah proporsionalitas manusia pada skala sosial ekonomi yang lebih rendah. Kesenjangan

pendapatan per kapita nasional antara negara-negara terkaya dan termiskin juga terus tumbuh.

Anggapan populer bahwa orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin tampaknya sebagian besar didasarkan pada fakta, terutama dalam konteks global saat ini. Terlebih lagi, kemiskinan ekstrem atau absolut, dialami oleh mereka yang penghasilannya hampir tidak mencukupi untuk bertahan hidup, terus meluas. Tingkat kepedulian telah meningkat di negara-negara yang paling makmur, di beberapa negara-negara yang pernah menjadi bagian dari blok Soviet, bahkan di beberapa negara Asia telah mengalami penurunan ketimpangan, dan di beberapa bagian negara-negara benua Afrika walaupun belum ada tanda-tanda penurunan tetapi usaha itu terus tumbuh. Berbeda dengan kawasan-kawasan yang disebutkan di atas, kondisi ini tidak terjadi di beberapa bagian negara Amerika Latin. Keadaan ekstrem dan penderitaan yang ditimbulkannya mempengaruhi sebagian besar umat manusia, dan upaya besar oleh Pemerintah serta berbagai organisasi internasional untuk mengurangi atau memberantas kemiskinan. Sejauh ini usaha-usaha tersebut telah gagal menghasilkan tujuan yang diinginkan.

Apakah fakta dan tren ini menunjukkan kemunduran dalam perkara keadilan sosial?. Jawaban atas pertanyaan ini, jika dipertimbangkan dalam kerangka Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, jelas itu sebuah kegagalan. Kegigihan, kejengkelan, dan eksistensi terhadap kemiskinan ekstrem merupakan ketidakadilan. Mereka yang mengalami kemiskinan yang mengerikan kehilangan sejumlah hak dasar yang disebutkan dalam Piagam dan disebutkan dalam Deklarasi Universal. Orang-orang yang terpengaruh oleh konflik internal dan perang juga dirampok kebebasan dasarnya serta menjadi korban ketidakadilan-orang. Kelaparan hanyalah satu sisi kemiskinan; diskriminasi, kesehatan yang buruk, kerentanan, ketidakamanan, dan kurangnya peluang pengembangan pribadi dan profesional adalah di antara banyak tantangan lain yang dihadapi oleh orang miskin. Kenaikan kemiskinan dalam semua manifestasinya, bersamaan dengan peningkatan jumlah pengungsi, orang-orang terlantar dan korban lain dari keadaan dan penyalahgunaan, mewakili

bukti yang cukup untuk memberikan penilaian yang kuat, jika saat ini ketidakadilan di dunia sedang tumbuh.

Tidak seperti keadilan dalam arti luas, keadilan sosial adalah konsep yang relatif baru, lahir dari perjuangan seputar revolusi industri dan munculnya organisasi masyarakat sosialis (yang kemudian, di beberapa bagian dunia menjadi demokrasi sosial, dan demokrasi Kristen). Di dunia barat keadilan adalah konsep yang sangat mengakar kuat dalam budaya politik Anglo-Saxon. Sebelumnya, konsep atau perilaku keadilan tidak muncul dalam Piagam Deklarasi Universal atau dua Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Namun sering disebut dalam Deklarasi Kopenhagen dan Program Aksi yang diadopsi oleh *World Summit for Social Development* pada tahun 1995. Setelah sekian lama luput dari pembahasan sidang-sidang dunia berkaitan dengan keadilan, barulah istilah dan konsep keadilan sosial dimasukkan dalam deklarasi *MDG's* Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian berubah menjadi *SDG's*.

Dalam perjalanannya keadilan sosial menjadi isu sentral dalam politik negara di berbagai belahan dunia. Walaupun belum banyak negara yang berusaha untuk mengadopsi politik keadilan sosial, impian tentang adanya kesetaraan yang total terhadap distribusi kekayaan dan akses sumber daya terus tumbuh, mengingat fakta hari ini ketimpangan terjadi begitu nyata. Sebagian besar orang berpendapat bahwa ketika orang terlibat dalam sebuah aktivitas ekonomi untuk bertahan hidup, kemudian mencapai pertumbuhan pribadi dan profesional, serta mencapai kesejahteraan kolektif dalam masyarakat, ketidaksetaraan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan tetapi harus tetap dalam batas yang dapat diterima sesuai dengan keadaan tertentu. Dalam konteks modern, mereka yang peduli dengan keadilan sosial melihat peningkatan umum dalam ketidaksetaraan pendapatan sebagai suatu hal yang tidak adil, menyedihkan dan mengkhawatirkan. Karenanya pengurangan tingkat kemiskinan dan perbaikan menyeluruh dalam standar hidup adalah target yang harus dicapai, sehingga ke depan akan membawa dunia lebih dekat dengan keadilan sosial.

Harapan terwujudnya keadilan sosial bukan tanpa tantangan, indikasinya adalah sedikitnya komitmen yang berkelanjutan dari beberapa negara di dunia untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada. Faktanya sekarang, kesenjangan semakin besar dalam persoalan distribusi kekayaan, pendapatan, dan tunjangan publik yang semakin melebar. Kondisi itu mencerminkan kecenderungan umum yang secara moral tidak adil dan secara politik juga tidak bijaksana serta tidak sehat secara ekonomi. Ketidakadilan di tingkat global telah meningkatkan ketidaksetaraan antara negara-negara makmur dan miskin.

A. Keadilan Sosial

Konsep Keadilan Sosial penuh dengan berbagai macam ragam konotasi. Kadang kala Keadilan Sosial dikonotasikan dengan negara kesejahteraan. Kadangkala juga dikaitkan dengan masalah distribusi. Menurut ILO (2011), Keadilan Sosial didasarkan pada persamaan hak manusia, dan kemungkinan mereka untuk menerima manfaat ekonomi serta maju secara sosial tanpa diskriminasi. Sementara Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua komponen utama yakni keadilan mengoreksi dan keadilan distributif. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian keuntungan dalam sistem sosial. Dalam Praktek politik negara Keadilan Distributif berkaitan dengan Kebijakan pajak (penarikan dan penggunaan), asuransi, jaminan sosial dan subsidi. Sementara Keadilan mengoreksi mempunyai kaitan dengan pembetulan ketidakadilan yang memerlukan intervensi kebijakan sosial yang khusus dari negara. Mengikuti pendapat Aristoteles, pemahaman tentang keadilan sosial tampak seperti harus terus menerus diselidiki dan dipertandingkan. Walaupun semuanya setuju bahwa 'keadilan' adalah suatu yang baik, namun persoalan pemaknaan Keadilan Sosial masih terus diperdebatkan, beberapa ahli mungkin berpikir keadilan itu mengacu pada kesetaraan individu, sedangkan ahli yang lain memahami keadilan sosial sebagai pemenuhan (pengakuan) hak dasar manusia. Konsep Keadilan merupakan ide yang sangat umum, tetapi perbedaan teori politik dan teori filosofis telah membuat konsepsi tentang Keadilan berbeda. Keadilan Sosial adalah sebuah konsep revolusioner

yang memberikan makna dan arti penting bagi kehidupan dan membuat aturan hukum menjadi dinamis.

Pendekatan Miller dalam *Principles of Social Justice* (1999) tentang keadilan sosial bertumpu pada gagasan bahwa pasar mampu memberikan apa yang layak dan pantas didapatkan oleh seorang individu. Teori ini memperlakukan individu sebagai seorang yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan secara proporsional memberi penghargaan (atau menghukum) mereka sesuai dengan tindakan dan upaya mereka, sejauh tindakan atau upaya tersebut merupakan hasil dari pilihan individu sendiri. Dalam pandangan Miller, mereka yang lebih berbakat dan pekerja keras layak untuk mendapat lebih dibanding orang yang tidak berbakat dan malas. Pandangan keadilan sosial ini menekankan distribusi yang tidak merata menurut apa yang pantas diterima oleh individu berdasarkan tanggung jawab moral atau perilaku mereka sendiri.

Sementara pendekatan komparatif Sen yang ditulis dalam *'The idea of justice'* (2008), mengatakan bahwa keadilan sosial bertujuan untuk mereduksi dan menyelesaikan masalah ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan komparatif Sen mengeksplorasi alternatif sosial, memberi peringkat berdasarkan nilai dan prioritas komunitas. Fokusnya adalah pada 'apa yang sebenarnya terjadi di dunia', bukan pada kebenaran lembaga yang mendasarinya. Sen menilai efektivitas tindakan dan institusi lebih efektif untuk mengurangi ketidakadilan.

Menurut Sen, efektivitas tindakan pemerintah untuk meningkatkan keadilan sosial dinilai berdasarkan kemampuan individu untuk melakukan hal-hal yang ia hargai dan kebebasan individu untuk memilih di antara berbagai cara untuk memimpin kehidupan mereka. Pendekatan Sen tentang keadilan sosial berfokus pada upaya pemerintah untuk memastikan kapasitas individu dalam mendapatkan kesejahteraan yang optimal sesuai dengan keadaan mereka. Ia mendefinisikan kemiskinan sebagai perampasan 'kemampuan' dasar (seperti melek huruf dan aktif dalam komunitas). Sen mengakui bahwa pengaturan sosial harus memungkinkan individu untuk membangun kemampuan mereka. Misalnya, hak atas pendidikan

tidak hanya menyangkut akses individu terhadap materi pendidikan yang sesuai tetapi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan adanya institusi tertentu yang stabil dan kerangka kerja institusional. Pendekatan Sen konsisten dan sesuai dengan konsep inklusi sosial dalam masyarakat. Ide keadilan sosial ini menekankan adanya pengembangan kemampuan individu.

Dalam diktumnya yang terkenal Rawls (1999), mengatakan bahwa keadilan adalah "kebijakan pertama dari institusi sosial". Keadilan sosial, dalam catatannya, berkenaan dengan keadilan dalam perancangan "struktur dasar masyarakat", frasa yang ia gunakan di sepanjang bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* merujuk pada lembaga-lembaga utama dan pengaturan sosial dalam suatu masyarakat, dipahami sebagai "asosiasi orang yang cukup mandiri" terikat bersama dalam aturan yang "menentukan sistem kerja sama" (1999). Bagi Rawls, masyarakat adalah bentuk interaksi manusia yang unik dan normatif karena pemahaman bersama di antara para anggotanya yang berpartisipasi, di mana masyarakat berusaha kooperatif untuk mencapai keuntungan bersama. Karena kehidupan yang memuaskan bagi siapa pun hanya memungkinkan dicapai melalui proses kerjasama sosial yang rumit dan bertahan lama, dan melalui proses kerja sama sosial memungkinkan adanya manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan hanya dilakukan sendiri, di situlah prinsip-prinsip distributif diperlukan untuk menentukan yang tepat dalam pembagian keuntungan sosial dan ekonomi.

Dalam bukunya yang lain *Justice as Fairness: A Restatement* (2001), Rawls menambahkan penekanan baru terhadap proses kooperatif, menurutnya karakter kooperatif dari organisasi sosial teorinya merupakan "ide paling mendasar" atau "ide pengorganisasian sentral". Lebih tepatnya, di mana prinsip-prinsip keadilan sosial yang berlaku dipahami sebagai sistem kerja sama yang adil dari waktu ke waktu, membentang dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Demikian juga dalam artikelnya *The Law of Peoples* (1999), Rawls menegaskan kembali asumsi empiris, yang secara normatif banyak tersirat dalam sepanjang buku karangannya *A Theory of Justice*. Rawls mengatakan bahwa anggota-anggota masyarakat

tertentu memiliki kedudukan moral untuk menuntut klaim keadilan distributif terhadap satu sama lain. Menurutnya, sistem pengaturan politik dan ekonomi dalam masyarakat merupakan hal unik dalam mempengaruhi prospek kehidupan individu.

Karenanya, Rawls menjadikan Keadilan Sosial sebagai seperangkat persyaratan keadilan distributif. Prinsip-prinsip keadilan sosial dimaksudkan untuk mengatur distribusi berbagai jenis barang sosial utama, termasuk di dalamnya kebebasan, peluang, dan sumber daya serba guna seperti pendapatan dan kekayaan. Dalam argumen lainnya yang sangat terkenal, Rawls mengatakan kebebasan dasar harus sama (Prinsip Kebebasan Dasar yang Sama); ketidaksetaraan dalam peluang yang disebabkan oleh sebab-sebab moral yang kesewenangan harus dikompresi (Prinsip Kesetaraan yang Adil); dan pendapatan serta kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga bisa memaksimalkan kesempatan untuk anggota masyarakat termiskin (Perbedaan Prinsip). Maka, kesimpulannya bahwa totalitas pengaturan sosial harus bermanfaat bagi setiap warga negara yang bekerja sama sepenuhnya, termasuk yang paling tidak diuntungkan. Rawls berharap seperangkat prinsip distributif yang ia gagas dapat menjadi acuan, yang dengannya pengaturan tersebut dapat dinilai sebagai sebuah keadilan.

Rawls dalam karya-karya lainnya menguraikan aspek lebih lanjut tentang perlunya prinsip-prinsip distributif yang memiliki aplikasi domestik murni dalam satu masyarakat. Warga negara berhak untuk menegaskan klaim mereka dalam hal keadilan distributif terhadap satu sama lain, karena dengan adanya komitmen bersama diantara mereka memastikan kerja sama sosial yang adil di antara pihak-pihak yang menganggap diri mereka sebagai warga negara yang bebas dan setara. Asumsinya adalah bahwa kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan tatanan politik yang demokratis memberikan batasan moral yang signifikan pada ketidaksetaraan yang diperbolehkan, karena ketidaksetaraan yang ekstrem dalam peluang atau kekayaan dan pendapatan memiliki efek korosif terhadap kedudukan seseorang sebagai peserta yang setara dalam demokrasi.

Pemikiran Rawls walaupun masih menjadi acuan utama dalam tema Keadilan Sosial bukanlah tanpa kritik. Hingga sekarang masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan-sanggahan kritis yang datang dari para kritikus. Banyak kritikus yang mempertanyakan tentang persyaratan peradilan individual dalam teorinya, seperti kebajikan sekelompok individu dan norma-norma moral yang mengatur perilaku individu dalam asosiasi masyarakat sipil, serta persyaratan keadilan internasional, atau norma-norma moral yang mengatur hubungan antara negara-bangsa. Sementara prinsip-prinsip keadilan sosial Rawls mencerminkan keprihatinan yang mendasari kesejahteraan manusia, mereka memiliki tugas-tugas alami yang berbeda untuk saling membantu. Tugas bantuan kemanusiaan yang dimiliki oleh semua individu terhadap individu lainnya adalah berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, daripada sebab akibat yang timbul dari proses kewarganegaraan atau keanggotaan dalam masyarakat tertentu. Kepedulian terhadap kesejahteraan manusia yang dinyatakan dalam prinsip-prinsip universal kemanusiaan biasanya berbentuk bantuan yang diwujudkan dalam bentuk transfer sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sementara prinsip keadilan sosial memiliki cakrawala temporal dan fokus praktis yang berbeda. Agar tercapai, prinsip keadilan sosial berkaitan erat dengan norma, lembaga, dan pengaturan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Bagi Rawls bantuan sosial merupakan proses individu ke individu. Sementara bagi Rawls, bantuan untuk kemiskinan global tidak dianggap sebagai tugas. Padahal dalam konteks tersebut, bantuan untuk kemiskinan global sangat diperlukan untuk membawa orang miskin mendapatkan kehidupan yang layak (standar hidup minimal). Bagi Rawls bantuan tersebut bukan bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan antara orang kaya dalam lingkup global ke global. Satu-satunya tujuan bantuan adalah untuk "masyarakat terbebani", membantu mereka untuk mengembangkan pengaturan kelembagaan domestik yang adil atau layak sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya sendiri untuk memastikan kesejahteraan anggotanya (Rawls, 1999).

Argumen Rawls tentang keadilan sosial sebagai serangkaian masalah moral yang beragam dan berbeda secara normatif banyak mendapatkan keberatan dari para ahli yang lain. Salah satu argumen Rawls yang menjadi perdebatan adalah konsepsi tentang jenis interdependensi sosial yang cukup untuk memicu beberapa tugas keadilan distributif terlalu restriktif. Para kritikus seperti Samuel Scheffler (1995) dan Dale Jamieson (1992) berpendapat bahwa sifat dan tingkat pengaruh atas prospek kehidupan yang diberikan oleh bentuk-bentuk interdependensi global menjadikan fokus eksklusif pada satu masyarakat sebagai lokus tanggung jawab moral untuk prospek kehidupan di mana orang-orang yang terpengaruh tampak ketinggalan zaman.

Sementara beberapa kritikus lainnya merasa keberatan dengan gagasan Rawls tentang keadilan sosial sebagai kategori moralitas yang berbeda. Robert Nozick, misalnya, dalam tulisannya *Anarchy, State, dan Utopia* (1974), berpendapat bahwa ketidakabsahan dari setiap "konsepsi berpola keadilan" yang memiliki tujuan beberapa hasil distributif (orientasi hasil) telah menimbulkan konsekuensi kumulatif (berpotensi tidak adil). Hal tersebut merupakan akibat dari tindakan banyak agen sebagai moral individu yang terpisah, bahkan ketika tindakan-tindakan tersebut tidak melibatkan kesalahan atau pelanggaran kewajiban moral individu. Menurut Nozick, selama tidak ada ketidakadilan dalam akuisisi atau transfer sumber daya, maka apa pun pola distributif dalam sumber daya atau peluang yang muncul dari transaksi dan perjanjian sukarela tersebut adalah adil.

Robert Nozick (1974) menyatakan bahwa keadilan adalah situasi di mana tidak terjadi pelanggaran hak-hak individu, termasuk hak kepemilikan dan hak untuk menikmati hasil kerja keras diri sendiri. Ini berarti Nozick menentang keras intervensi negara dalam mendistribusikan kemakmuran (misalnya lewat pajak atau subsidi). Bagi Nozick, distribusi kemakmuran demi kesetaraan sosial tidak hanya bermasalah secara moral, tetapi juga mengandung kecacatan konseptual (*conceptual fallacy*) yang cukup parah. Ilustrasi terkenal yang diberikan Nozick adalah contoh mengenai pemain basket Wilt Chamberlain. Di Amerika Serikat, banyak orang rela membayar cukup

mahal untuk dapat melihat atlet primadona Wilt Chamberlain bermain basket. Katakanlah ada satu juta orang yang rela masing-masing membayar 25 sen untuk menonton aksi Chamberlain. Itu berarti, dalam satu pertandingan bola basket, Wilt Chamberlain mendapatkan pemasukan sebesar \$250.000. Jika kita mengikuti pola pikir John Rawls, ini jelas tidak fair, alias tidak adil. Maka, menurut *the difference principle* yang diusung Rawls, Wilt Chamberlain wajib mendistribusikan kembali sebagian uangnya kepada para penonton yang telah membayar secara suka rela. Menurut Nozick, ini absurd. Perbedaan paling utama dari konsep keadilan Rawls dan Nozick memang terletak pada soal disposisi antara proses dan hasil. Konsep keadilan Rawls berfokus pada hasil, sedangkan Nozick lebih mendahulukan proses, khususnya proses kepemilikan. Proses kepemilikan inilah yang menjadi inti dari *entitlement theory* Nozick yang terkenal, di mana setiap orang berhak menikmati semua sumber daya yang mereka miliki jika mereka memang berhak (*entitled*) untuk menikmatinya. Menurut Nozick, kesalahan terbesar teori-teori keadilan pada umumnya terletak pada penekanan terhadap hasil. Padahal, keadilan yang terlalu berfokus pada hasil rentan terhadap bias penampakan dan berpotensi melanggar hak-hak individu. Nozick membagi Teori Kepemilikan (*Entitlement Theory*) ke dalam tiga bagian yaitu:

1. *Original Acquisition of holdings*

Pemberian sesuatu yang tidak dimiliki, bagaimana sesuatu yang tidak dimiliki menjadi dimiliki.

2. *Transfer of Holdings*

Pemindahan dari satu individu ke individu lain dengan proses pertukaran sukarela ataupun hadiah. Prinsip ini juga mengandung tentang prinsip pemerintahan bagaimana individu bisa melepaskan miliknya dan memberikannya pada negara yang tidak memilikinya. Secara garis besarnya adalah individu yang mendapatkan sebuah harta benda sesuai prinsip dalam keadilan dalam akuisisi, ia memiliki harta benda tersebut dan individu yang mendapatkan harta benda sesuai dengan keadilan dalam pemindahan, dari individu yang memiliki harta benda tersebut, ia memiliki harta benda tersebut,

dan tidak ada yang dinyatakan memiliki sesuatu harta benda kecuali dengan kedua prinsip tersebut.

3. *The Rectification of Injustice in Holdings*

Adalah merumuskan kerangka umum untuk mengevaluasi keadilan suatu tata politik, “apapun yang muncul dari sebuah situasi yang adil, melalui langkah yang adil, adalah adil”. Hak kepemilikan ini juga memberikan kebebasan untuk melakukan apa saja dengan miliknya asalkan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain.

Dalam menentang teori keadilan Rawls, Robert Nozick merumuskan gagasan keadilan sosial sebagai hak. Dia menganggap setiap distribusi sumber daya harus sesuai dengan tiga prinsip: Keadilan dalam akuisisi, Keadilan dalam transfer, dan keadilan korektif. Menurut Nozick, individu memiliki hak untuk memiliki properti dan kepemilikan diri, yang memberi mereka kebebasan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan apa yang menjadi milik mereka. Peran negara adalah sebagai penjaga dan melindungi hak milik perorangan. Nozick menganggap setiap upaya Negara untuk (kembali) mendistribusikan sumber daya, misalnya melalui perpajakan, merupakan sesuatu yang tidak adil. Nozick melihat tidak ada peran bagi negara untuk membantu individu yang lahir dengan sedikit sumber daya (mereka yang miskin, lemah, sakit dll). Nozick berpendapat bahwa itu adalah hak individu untuk memutuskan apakah akan membantu orang-orang seperti itu dengan memberikan sumber daya mereka sebagai pemberian. Nozick tidak menerima asumsi Rawls bahwa ada manfaat yang lebih besar yang diperoleh melalui kerja sama sosial, daripada tidak ada kerja sama atau kerja sama terbatas. Pandangan keadilan sosial ini menekankan distribusi menurut sistem kepemilikan properti individu yang ada dan tidak mendukung jenis redistribusi apa pun.

Robert Nozick dalam tulisannya tentang *distributive justice*, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas segala sesuatu dengan syarat sesuatu tersebut diperoleh melalui proses yang adil. *Distributive Justice* menurut Nozick adalah distribusi dengan Netral, yakni

distribusi yang terjadi atau dilakukan tanpa adanya *Central Distributor* yaitu negara. Keadilan didistribusikan bukan dengan sebuah pola yang berpusat pada sesuatu (negara), namun terjadi secara acak dengan siapa pun itu sebagai distributornya. Inilah yang membedakan pemikiran Nozick dengan Rawls, di mana Rawls menjadikan negara sebagai *Central Distributor* keadilan bagi seluruh individu yang berada dalam posisi tidak beruntung. Sebaliknya Nozick, melihat *Distributive Justice* sebagai proses yang bebas dan adil tanpa melanggar hak individu.

Keberatan yang sama juga datang dari Friedrich von Hayek (1976) yang berpendapat kurang lebih sama dengan pendapatnya Nozick. Menurut Hayek, kebajikan yang dipahami dengan benar, hanya dapat dilacak oleh agen moral individu, karena "hanya perilaku manusia yang dapat disebut adil atau tidak adil". "Untuk berbicara tentang keadilan selalu menyiratkan bahwa beberapa orang atau orang seharusnya, atau tidak seharusnya, telah melakukan beberapa tindakan". Namun, faktanya ketidakadilan sosial dengan merujuk pada keadaan yang dicirikan oleh ketidaksetaraan (dalam kesejahteraan, peluang, imbalan ekonomi, dan sebagainya) dalam perjalanannya tidak ada agen yang dapat diidentifikasi untuk dimintai pertanggungjawaban individual atas tindakan yang tidak adil tersebut. Selain itu, teori keadilan sosial tidak dapat diselamatkan dari ketidakjelasan dengan memperlakukan pemerintah sebagai agen moral. Seperti yang Hayek katakan, "tuntutan untuk 'keadilan sosial' tidak ditujukan kepada individu tetapi untuk masyarakat — namun masyarakat, dalam arti sempit di mana ia harus dibedakan dari aparatur pemerintah, tidak mampu bertindak untuk tujuan yang spesifik".

Kritikus lain, Iris Marion Young (1990; 2011), melihat konsepsi yang menyamakan keadilan sosial dengan masalah distributif murni merupakan hal yang terlalu sempit. Baginya keadilan sosial harus peduli dengan proses dunia nyata, di mana hasil distributif dalam keadaan tertentu secara sistematis terlalu tidak seimbang dan secara rutin diproduksi. Berangkat dari hal tersebut maka diperlukan konsepsi yang lebih luas tentang keadilan sosial yang mencerminkan pentingnya mengidentifikasi dan menghilangkan akar penyebab dari

pola kerugian yang mengakar, terutama ketika mereka (agen) cenderung untuk mereproduksi dan memperkuat bentuk dominasi serta kontrol yang dilembagakan atas nasib dari beberapa kelompok dan individu dalam masyarakat. Pada pandangan ini, akar penyebab kerugian tidak selalu dapat dikaitkan dengan masalah pendapatan dan kekayaan distributif yang tidak merata. Pengaturan sosial yang sangat tidak adil dan eksklusif sering memberikan petunjuk atas keberadaan beberapa bentuk ketidaksamaan distributif yang buruk, dan ketidakadilan mereka (agen) karena mencerminkan ketidaksetaraan mendasar dalam status moral, bahkan jika terjadi ketidaksetaraan dalam perkara distributif bukanlah konsekuensi yang terelakkan.

Kritikan juga datang dari Amartya Sen, yang menganggap Rawls hanya menggunakan fairness sebagai acuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ketidakadilan. Dalam salah satu gagasannya Rawls mendambakan sebuah keadilan universal dan satu jurus pamungkas yang bisa digunakan di manapun dan dalam kondisi apapun. Dalam bukunya yang terkenal *A Theory of Justice*, mengatakan bahwa masyarakat berkeadilan (just society) yang di dalamnya keadilan telah dijamin oleh konstitusi atau hukum yang dihasilkan melalui lembaga-lembaga pemerintahan. Sama hal dengan Immanuel Kant dan John Locke, Rawls mempercayai adanya kontrak sosial antara warga negara dengan negara yang dapat berpengaruh pada keadilan global. Tapi tidak bagi Sen, menurutnya kontrak sosial hanyalah perjanjian imajiner yang justru bisa mendeprivasi kepemilikan (hak) individu. Dengan menjadikan lembaga negara sebagai tameng menurut Sen tak ubahnya hanya meratakan kepentingan semata. Hal tersebut tidak akan benar-benar menjamin pemenuhan hak individual. Sebagai solusinya menurut Sen, untuk menghilangkan kondisi ketidakadilan bukan dengan mengejar keadilan ideal secara teoritis, tetapi dengan mengkomparasikan kebijakan sosial satu sama lain untuk dijadikan solusi dalam penanggulangan ketidakadilan. Harus diukur dengan ukuran yang sebanding. Membandingkan praktek keadilan dengan keadilan ideal bukanlah perbandingan yang sesuai, hal tersebut memerlukan proses yang panjang. Bagi Sen, adalah hal konyol jika

melakukan perbandingan dua alternatif tan adanya identifikasi ide absolut di luar keduanya.

Mendapat banyak Kritikan, Rawls tidak tinggal diam. Rawls menjawab berbagai kritikan yang diarahkan kepadanya. Rawls mengatakan bahwa sumber kebingungan seputar teorinya tentang keadilan sosial berasal dari kegagalan untuk menghargai pembagian kerja moral di antara tingkat-tingkat keadilan yang berbeda, yang ia bagi menjadi keadilan lokal, domestik, dan global (2001). Keadilan lokal melibatkan prinsip-prinsip yang berlaku untuk transaksi sukarela di antara individu dan interaksi di antara para anggota asosiasi, seperti keluarga, lembaga agama, serikat pekerja, dan universitas. Prinsip keadilan sosial — seperti Prinsip Perbedaan atau Prinsip Kesetaraan Kesempatan yang Adil — tidak berlaku langsung untuk praktek ini, misalnya, dengan mensyaratkan distribusi sumber daya kepada anggota keluarga sehingga memaksimalkan pangsa distribusi yang paling tidak diuntungkan, atau dengan mendikte bagaimana organisasi keagamaan harus memilih hirarki organisasi agama mereka. Prinsip-prinsip keadilan sosial tetap mengatur secara tidak langsung transaksi-transaksi pribadi dan bentuk-bentuk asosiasi yang jika tidak diatur oleh prinsip-prinsip lokal secara langsung. Prinsip-prinsip keadilan sosialnya digambarkan sebagai prinsip yang mengatur "kerangka latar belakang sosial", di mana transaksi asosiasi dan pasar swasta terjadi (Rawls, 2001).

Menanggapi klaim Nozick yang mengatakan bahwa keadilan seharusnya hanya berkenaan dengan keadilan dalam transaksi sukarela, Rawls berpendapat bahwa hal tersebut tidak mungkin untuk menilai apa yang dianggap sebagai keadilan dalam transaksi tertentu terlepas begitu saja dari teori keadilan sosial. Menurut Rawls (2001), lembaga-lembaga sosial dan transaksi-transaksi yang dilakukan mereka dan terisolasi di antara individu-individu dapat dihitung hanya ketika mereka mampu melestarikan kondisi latar belakang mereka secara berterusan untuk memastikan kesetaraan sebagai kebebasan dasar bagi semua warga negara dan persamaan untuk memperoleh kesempatan yang adil, yang keduanya dapat terkikis oleh adanya proses-proses yang melibatkan konsentrasi sekelompok orang kaya

dan pengaruh politik. Rawls, dalam argumennya tersebut ingin menunjukkan bahwa tujuan mendasar dari kerangka kerja keadilan sebagai latar belakang merupakan bentuk pelestarian kesetaraan atas status sosial dan politik di antara warga negara. Menurutnya hal tersebut sudah cukup sebagai penjelasan yang menyeluruh atas masalah teori distributifnya. Samuel Scheffler (2003) dan Norman Daniels (2003) walaupun tidak secara langsung bersebrangan dengan Rawls, mengatakan bahwa hal yang membuat pola distributif itu tidak adil bukan hanya karena gagal untuk memenuhi beberapa gagasan anteseden dari suatu distribusi akhir yang dipilih. Tetapi faktanya, beberapa pola distribusi secara moral tidak bisa diterima karena alasan yang lebih mendasar, yakni mereka telah merusak kesetaraan status sosial.

B. Mendefinisikan Keadilan

Plato dalam filsafatnya memberikan tempat yang sangat penting bagi gagasan keadilan. Dia menggunakan kata Yunani "Dikaisyne" untuk keadilan yang bersumber dari 'moralitas' atau 'kebenaran', termasuk di dalamnya seluruh tugas manusia. Keadilan bagi Plato mencakup seluruh bidang perilaku individu yang bisa mempengaruhi orang lain. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah kualitas jiwa, dalam arti bahwa manusia mengesampingkan keinginan irasional untuk mencicipi setiap kesenangan dan untuk mendapatkan kepuasan egois dari setiap objek dan mengakomodasi diri mereka sendiri untuk mendorong keluarnya fungsi kemanfaatan bagi masyarakat umum. Plato sangat tidak puas dengan kondisi degenerasi yang terjadi di Athena.

Demokrasi Athena berada di ambang kehancuran dan pada akhirnya bertanggung jawab atas kematian sekte. Plato melihat keadilan sebagai satu-satunya obat untuk menyelamatkan Athena dari kehancuran-kehancuran, karena tidak ada hal yang mengganggu dalam urusan-urusan kontemporer kecuali persoalan keamanan, keegoisan, dan keegoisan politik yang secara khusus merajalela di Athena pada saat itu dan secara umum di seluruh Yunani. Pada masa itu sedang berkembang ajaran sophistik di kalangan masyarakat Athena. Pemahaman tersebut hampir membawa Athena pada kehancuran.

curan. Ajaran Sophistik tentang etika kepuasan diri menghasilkan individualisme yang berlebihan, juga mendorong warga untuk menduduki jabatan Negara demi tujuan egois mereka sendiri dan akhirnya membagi "Athena ke dalam dua bentuk bersejarah antara yang kaya dan miskin, antara *opressor* dan *opressed*." Terbukti, kedua faktor ini, keegoisan dan individualisme yang berlebihan menjadi sasaran utama serangan Plato. Serangan itu datang dalam bentuk pembangunan masyarakat yang ideal, di mana "Keadilan" harus berkuasa. Plato menjadikan keadilan sebagai obat untuk menyembuhkan kejahatan ini. Plato menjadikan keadilan sebagai prinsip dasar dari bentuk masyarakat yang tertata baik.

Sebelum berkembangnya konsep-konsep keadilan yang ditawarkan oleh Plato, jauh sebelum itu di Athena telah berkembang konsep keadilan yang secara keseluruhan ditolak oleh Plato. Kajian tentang keadilan mengalami berbagai model interpretasi, dari model yang paling kaku hingga ke model yang paling lentur. Cephalus merupakan generasi pertama yang mendahului Plato dalam membicarakan masalah keadilan. Cephalus merupakan perwakilan kelompok moralitas tradisional dari kelas perdagangan kuno yang mendirikan teori keadilan tradisional. Menurutnya 'keadilan itu terdiri dari berbicara kebenaran dan membayar utang seseorang. Cephalus mengidentifikasi keadilan dengan perilaku yang benar. Tokoh kedua yang membicarakan keadilan adalah Polemarchus. Pandangannya tentang keadilan hampir sama dengan pandangannya Cephalus tetapi dengan sedikit perubahan. Menurutnya "keadilan adalah memberikan apa yang pantas baginya". Implikasi sederhana dari konsep keadilan Polemarchus adalah "keadilan berlaku baik terhadap teman dan membahayakan musuh." Konsep Polemarchus ini kemudian menjadi pepatah tradisional dari moralitas Yunani.

Pandangan yang dikemukakan oleh Cephalus dan Polemarchus dikritik keras oleh Plato. Bagi Plato apa yang dirumuskan oleh kedua tokoh tersebut kemungkinan akan menyebabkan pelanggaran berat terhadap hak dan tidak adanya pengakuan terhadap prinsip kehidupan universal yang baik. Menurut Plato itu sama tidak benarnya dengan mengembalikan senjata mematikan kepada seorang pria

yang telah gila. Pernyataan Polemarchus dikecam oleh Plato dengan alasan bahwa terlalu mudah untuk berbicara tentang keadilan hanya dengan memberikan kebaikan kepada teman dan kejahatan kepada musuh. Bagaimana jika teman kita hanya sebatas teman dalam penampilan, dan musuh dalam kenyataan, lalu apa yang akan terjadi? Kemudian dalam keadaan seperti itu apakah kita harus secara kaku mengikuti pembelaan dan melakukannya dengan baik atau kita dapat menggunakan kebijaksanaan dan melakukan kejahatan padanya?. Tetapi, untuk melakukan kejahatan kepada siapa pun, bahkan terhadap seorang musuh pun bagi Plato hal tersebut tidak konsisten dengan konsepsi moralitas yang paling dasar. Jika seperti itu, maka konsep yang diajukan oleh kedua tokoh tersebut, hanya menjadikan keadilan sebagai pengatur hubungan antara individu pada tataran prinsip-prinsip individualistik dan mengabaikan masyarakat secara keseluruhan.

Kemudian muncul Seorang tokoh bernama Thrasymachus yang mewakili pandangan-pandangan baru dan kritis tentang keadilan, ia mengemukakan teori keadilan radikal. Dia mendefinisikan keadilan sebagai "kepentingan yang lebih kuat". Menurutnya, setiap orang bertindak untuk dirinya sendiri dan mencoba untuk mendapatkan apa yang dia bisa melalui usahanya, yang terkuat akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, maka seseorang atau negara harus kuat. Intinya, keadilan Thrasymachus itu adalah kepentingan pribadi kelompok yang berkuasa di dalam sebuah negara. Thrasymachus mendefinisikan keadilan sebagai "kebaikan orang lain". Hukum dibuat oleh partai yang berkuasa untuk kepentingannya sendiri. Mereka yang melanggar hukum tersebut dihukum dengan diperlakukan sebagai pelanggaran keadilan.

Socrates mengkritik pembelaan atas keadilan yang diberikan oleh Thrasymachus. Socrates menganggap Thrasymachus seperti seorang dokter yang mempelajari dan melatih kekuatannya bukan demi kepentingannya tetapi demi kepentingan seorang pasien. Socrates berkeyakinan Pemerintah dalam bentuk apapun akan melakukan yang terbaik bagi rakyatnya. Thrasymachus kemudian mengajukan beberapa argumen lagi untuk mendukung konsep keadilan dan

ketidakadilannya. Seorang yang tidak adil menurutnya lebih unggul daripada sebuah karakter dan kecerdasan. Ketidakadilan adalah sumber kekuatan serta ketidakadilan dianggap membawa kebahagiaan.

Bagi Socrates konsep keadilan yang diajukan oleh Thrasymachus merupakan kebrutalan, karena bagi Socrates, keadilan menyiratkan watak dan kecerdasan superior sementara ketidakadilan berarti kekurangan dalam kedua hal. Karena ketidakadilan menyiratkan ketidaktahuan, kebodohan dan keburukan, itu tidak bisa lebih superior dalam karakter dan kecerdasan. Orang yang adil lebih bijaksana, karena dia mengakui prinsip batas-batas kemanusiaan, sebab pernyataan diri yang tidak terbatas bukanlah sumber kekuatan untuk setiap kelompok yang diorganisasikan untuk tujuan yang sama, serta keinginan dan klaim tanpa batas akan mengarah pada konflik.

Socrates menambahkan hidup manusia akan lebih baik dan lebih bahagia jika selalu ada beberapa kebajikan spesifik dalam segala hal, yang memungkinkannya bekerja dengan baik. Maka, jika itu dirampas dari kebajikan, ia akan bekerja dengan buruk. Jiwa memiliki fungsi spesifik untuk dilakukan. Ketika melakukan fungsi spesifiknya, ia memiliki keunggulan atau kebajikan khusus. Jika dirampas, kebajikannya yang aneh itu tidak mungkin bisa melakukan tugasnya dengan baik. Disepakati bahwa kebaikan jiwa adalah keadilan. Jiwa yang lebih berbudi luhur akan lebih berpeluang menjadi jiwa yang lebih bahagia. Karena itu, manusia yang adil hidup bahagia. Jiwa yang adil, dengan kata lain, manusia yang adil, hidup dengan baik; orang yang tidak adil tidak bisa hidup bahagia.

Berbeda dengan Socrates, seorang pemikir lain dari Athena bernama Glaucon memiliki sudut pandang berbeda tentang keadilan. Keadilan merupakan hasil kesepakatan yang disusun dalam peraturan. Teorinya ini kemudian dikenal sebagai teori kontrak sosial, dengan alasan kita bermoral karena membayar secara sukarela atau sebuah keharusan. Glaucon kemudian menggambarkan evolusi historis masyarakat, di mana keadilan sebagai kebutuhan hidup telah menjadi perisai yang lebih lemah. Dalam kondisi yang primitif, masyarakat

tanpa hukum dan pemerintahan, manusia bebas melakukan apapun yang disukainya. Dampaknya, semakin sedikit orang yang bisa menikmati hidup dan semakin menderita. Akhirnya masyarakat menyadari bahwa mereka menderita karena ketidakadilan. Menghadapi situasi ini, mereka membuat kesepakatan, melembagakan hukum, dan pemerintahan melalui kontrak sosial serta mengajarkan filosofi tentang keadilan. Karena itu, keadilan dengan cara ini merupakan sesuatu yang artifisial (buatan) dan tidak alami. Ini adalah "produk konvensi". Melalui aturan-aturan hukum sifat keegoisan manusia dirantai. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi manusia lemah untuk melawan manusia yang lebih superior. Atau sebaliknya menghindarkan kelompok superior dari kebencian orang-orang lemah.

Plato menyadari bahwa semua teori yang dikemukakan oleh Cephalus, Thrasymachus dan Glaucon, mengandung satu elemen yang sama, yakni mereka memperlakukan keadilan sebagai sesuatu yang eksternal "tidak satupun dari mereka membawanya ke dalam jiwa atau meletakkannya di tempat yang semestinya". Plato membuktikan bahwa keadilan tidak bergantung pada kesempatan, konvensi atau kekuatan eksternal. Ini adalah kondisi yang tepat dari jiwa manusia dan oleh sifat manusia berkaitan dengan lingkungannya. Dengan cara inilah Plato mengutuk posisi yang diambil oleh Glaucon bahwa keadilan adalah sesuatu yang bersifat eksternal. Menurut Plato, keadilan bersifat internal karena berada di dalam jiwa manusia. "Sekarang, keadilan dianggap sebagai anugerah batin dan pemahamannya ditunjukkan untuk melibatkan studi tentang alam batiniah manusia". Oleh karena itu, keadilan merupakan hal yang alami dan tidak ada buatan. Karena itu, bukan lahir dari rasa takut akan yang lemah tetapi dari kerinduan jiwa manusia untuk melakukan kewajiban sesuai dengan sifatnya.

Plato meyakini keadilan sebagai kebajikan mendasar, ibu dari kebajikan yang dimiliki oleh masing-masing tiga jiwa. Jiwa yang pertama adalah Kecerdasan yang terdiri dari kebenaran pikiran, kemauan, keberanian untuk sensibilitas, dan kesederhanaan. Jiwa yang kedua adalah Kebijaksanaan yang terdiri dari keadilan pikiran; keberanian, keadilan hati, kesederhanaan, dan keadilan indra. Jiwa

yang ketiga adalah Kesalehan yang terdiri dari keadilan dalam hubungan kita dengan tuhan. Menurut Plato, Manusia harus dididik untuk mencapai keadilan dan melaluinya untuk menjadi seperti Tuhan. Keadilan bisa direalisasikan hanya pada perilaku kolektif atau di dalam sistem negara. Agar manusia bisa kolektif atau negara dapat membentuk kesatuan yang nyata atau individu dalam skala besar, kepentingan tertentu harus digabung demi kepentingan umum, keluarga harus diserap dalam negara, individu harus berhenti menjadi pemilik. Sejak saat itu, anak-anak hanya milik negara, yang membentuk satu keluarga besar. Negara adalah ayah dari anak-anak; negara juga mendidik mereka (Weber, 2000).

Setelah mengkritik gagasan-gagasan keadilan konvensional yang disajikan secara berbeda oleh Cephalus, Polymarchus, Thrasymachus dan Glaucon, Plato sekarang memberi kita teori keadilannya sendiri. Plato mempertanyakan analogi antara organisme manusia di satu sisi dan organisme sosial di sisi lain. Organisme manusia menurut Plato mengandung tiga unsur, yakni Alasan (*reason*), *Spirit* (jiwa) dan *Appetite* (roh). Menurutnya, seorang individu hanya menggunakan sebagian dari jiwanya untuk melakukan fungsinya tanpa mengganggu dari elemen-elemen orang lain. Unsur roh akan mengesampingkan dirinya sendiri ke dalam aturan akal. Kedua elemen tersebut dibawa ke dalam harmoni dengan kombinasi latihan mental dan fisik. Mereka diatur atas keinginan yang membentuk bagian terbesar dari jiwa manusia. Karena itu, alasan (*reason*) dan roh harus mengendalikan nafsu ini yang cenderung mengarahkan pada kesenangan tubuh. Kecenderungan-kecenderungan ini seharusnya tidak diperbolehkan karena akan memperbudak unsur-unsur lain dan merebut kekuasaan yang tidak mereka miliki. Ketika ketiganya sepakat bahwa di antara mereka harus ada yang memerintah, maka akan ada keadilan di dalam individu. Dalam kehidupan individu, bagian-bagian jiwa yang berbeda ditempatkan di tempat yang tepat. Dalam kehidupan sosial, setiap individu dan setiap kelas ditempatkan di tempat yang tepat. Plato percaya bahwa sifat manusia terbuat dari, kebijaksanaan, keberanian, dan nafsu makan. Bagi Plato, setiap kelas sesuai dengan prevalensi salah satu dari kapasitas ini, dan menempatkannya dalam

hierarki sosial dan moral. Keadilan Plato tidak menyatakan konsepsi hak tetapi kewajiban melalui hal yang identik dengan kebebasan sejati. Keadilan adalah kualitas - kualitas moral yang tak tergantikan. Keadilan tentang hubungan antara keadaan individu dengan negara. Negara yang ideal adalah perwujudan keadilan yang terlihat. Negara adalah realitas di mana keadilan adalah gagasannya.

Kemudian, berdasarkan tiga unsur ini, maka dalam sifat manusia ada tiga kelas. Pertama, kelas penguasa yang merupakan wakil dari akal. Kedua, pasukan pembantu, kelas pejuang dan pembela negara adalah wakil dari roh. Ketiga, masyarakat yang terdiri dari petani, pengrajin dan merupakan anak tangga terendah adalah wakil dari *Appetite*. Dengan demikian, jaringan keterkaitan antara organisme manusia dan organisme sosial, menurut Plato memerlukan tuntutan spesialisasi fungsional dari setiap kelas sosial untuk mengkhususkan diri ke dalam urusan kehidupan yang dialokasikan untuk itu. Keadilan bagi Plato ibarat naskah yang ada dalam dua salinan, di mana salah satunya lebih besar dari yang lain. Model seperti itu ada, baik dalam individu maupun masyarakat. Skala yang lebih besar dan dalam bentuk akan lebih terlihat di masyarakat. Secara individu keadilan adalah “kebijaksanaan manusiawi” yang membuat manusia mandiri dan baik. Secara sosial, keadilan adalah kesadaran sosial yang membuat masyarakat secara internal harmonis dan baik.

Keadilan adalah semacam spesialisasi. Keadilan hanyalah kehendak untuk memenuhi tugas-tugas dari fungsi seseorang dan tidak untuk ikut campur dengan tugas-tugas urusan orang lain, oleh karena itu, maka keadilan ada dalam pikiran setiap warga negara yang melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi, status, dan tempatnya. Ini adalah prinsip asli, yang diletakkan di dalam dasar Negara, "bahwa satu orang harus mempraktekkan satu hal saja dan bahwa hal yang sifatnya paling baik harus diadopsi". Keadilan sejati menurut Plato terdiri dari prinsip non-interferensi. Negara telah dianggap sebagai suatu kesatuan yang sempurna, di mana setiap individu yang merupakan unturnya, berfungsi bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk kebaikan keseluruhan. Setiap elemen memenuhi fungsinya sesuai kedudukannya masing-masing. Keadilan dalam negara Platonik

seperti sebuah hubungan yang harmonis, di mana kepentingan-kepentingan dipegang bersama dalam gerakan yang teratur. Plato yakin, bahwa masyarakat yang begitu terorganisir cocok untuk bertahan hidup. Manusia berusaha untuk keluar dari masalahnya dan secara alami manusia tidak mau larut dalam masalahnya, sehingga terjadilah saling bekerja sama. Oleh karena itu, Keadilan adalah sebagai kewajiban warga negara.

Keadilan Plato, memiliki konten moral bukan hukum. Di dalamnya ada aspek individu dan sosialnya. Keadilan adalah prinsip non-interferensi, yang menjaga batasan yang tepat berbagai kelas masyarakat, berbagai individu dari setiap kelas dan berbagai elemen dalam jiwa individu. Keadilan merupakan prinsip spesialisasi fungsional, yang menggerakkan semua orang untuk memberikan kontribusi khusus kepada masyarakat. Spesialisasi mengarah pada efisiensi. Keadilan bersifat arsitektonis dan menjaga kebajikan lainnya dalam hubungan yang harmonis satu sama lain. Keadilan menembus dan mengintegrasikan kebajikan kebijaksanaan lainnya, keberanian dan pengendalian diri, serta membuat mereka dalam batas yang tepat. Dengan demikian, keadilan adalah ikatan yang menyatukan masyarakat (Bhandari, 2002).

Plato melihat Keadilan merupakan bagian dari kebajikan manusia dan ikatan emosional yang bergabung bersama dengan manusia dalam masyarakat. Menurutnya hal tersebut merupakan kualitas identik yang membuat individu menjadi baik dan bersosial. Keadilan adalah tatanan dan tugas dari bagian-bagian jiwa, di mana jiwa sebagai sumber kesehatan bagi tubuh. Plato mengatakan bahwa keadilan bukan hanya kekuatan, tetapi itu adalah kekuatan yang harmonis. Keadilan bukanlah hak yang lebih kuat tetapi bentuk harmoni yang sangat efektif secara keseluruhan. Intinya, seluruh konsepsi moral berputar pada persoalan kebaikan seluruh individu maupun kebaikan sosial.

Dalam pemikiran Plato, setiap jiwa cenderung menuju kebaikan. Ini, bagaimanapun juga berlaku di luar lingkup individu, meluas ke masyarakat, dengan segala yang diimplikasinya. Dalam Konteks ini, Keadilan di satu sisi dapat menandakan tata letak urutan yang benar, dimaksudkan untuk mencerminkan keabsahan dan kegunaannya

dalam hubungan antara ekonomi dengan manusia, dan di sisi yang lain keadilan adalah pencapaian kebahagiaan individu, oleh karena itu "orang yang tidak bahagia dan yang tidak adil itu sengsara" (Plato, 1985). Karena manusia tidak dicapai atau dipenuhi secara terpisah, tetapi hidup bersama dengan orang lain, dalam bentuk organisasi yang memenuhi fungsi kohesi dari kebutuhan individu, konsep keadilan akan lebih mudah dikenali di tingkat Negara Bagian, daripada pada tingkat individu (Plato, 1985).

Landasan teoritis yang menggarisbawahi Negara Ideal yang bersifat platonis, dapat digambarkan mulai dari Keadilan Ideal. Akan tetapi, mengingat fakta dalam masyarakat bahwa sifat manusia begitu beragam, tatanan sosial Negara dirancang sesuai dengan kemampuan manusia yang dibedakan secara alamiah, yang dialokasikan secara tidak sah. Berbicara secara kritis tentang model ini, Hegel (1969) menyebutnya sebagai "sebuah pemikiran-pemikiran abstrak, seperti sesuatu yang ideal tetapi sederhana".

Perlu dicatat di sini, bahwa Plato memberikan nilai ideal sifat ilahi: "tetapi, seperti yang saya katakan, di surga, bagaimanapun, mungkin tersedia model untuk orang yang ingin melihat, dan, setelah melihat, untuk menemukan orientasi" (Plato, 1985). Namun cara Plato memahami proses menegakkan keadilan sebagai nilai tertinggi, hanya dengan menyesuaikan nilai-nilai posisi sosial yang memadai, dianggap sebagai fitur penting untuk mengklasifikasikan orang ke dalam tiga kategori yang tidak setara, yang memungkinkan keadilan untuk mencapai kesempurnaan. Sebagai konsekuensi tersembunyi dari klasifikasi model Plato ini, justru adalah ketidakadilan. Namun, yang jelas dari konsepsi ini, ketidakadilan agak dilihat sebagai pemberontakan komponen tubuh terhadap keseluruhan, alasannya adalah bahwa keadilan, sebagai prinsip sentral Negara, harus menjadi kebajikan yang melekat, diajarkan atau disesuaikan untuk masing-masing anggota masyarakat: "tetapi sekarang kita setuju, keutamaan jiwa adalah keadilan, dan kurangnya moral adalah ketidakadilan" (Plato, 1985). Akan tetapi, ia mengakui bahwa kehidupan sosial pada kenyataannya jauh lebih kompleks, banyak sekali mencakup aspirasi individu.

Dalam bukunya Republik, Plato (1974), memperluas makna keadilan dengan menyamakannya dengan kesejahteraan manusia. Dia mengaitkan konsep keadilan individu dan sosial dengan menegaskan bahwa keadilan berasal dari keselarasan antara akal, semangat, dan nafsu yang hadir dalam semua orang. Dalam formulasi ini, jika masyarakat tidak memiliki keselarasan seperti itu, keadilan tidak dapat dicapai. Namun, pandangan Plato tentang keadilan tidak termasuk keyakinan dalam kesetaraan. Bahkan, karena ia menganggap perbedaan kelas sebagai hal yang penting untuk fungsi masyarakat yang efektif, ia berpendapat bahwa keadilan akan tercapai ketika setiap orang menerima barang-barang yang mereka dambakan berdasarkan posisi yang ditentukan dalam tatanan sosial. Dengan kata lain, bahwa ketidaksetaraan akan diperlakukan tidak setara. Keadilan sosial, oleh karena itu, tidak akan melibatkan upaya untuk mengubah atau melampaui struktur masyarakat yang ada, tetapi akan lebih menjamin bahwa lembaga yang ada akan terus berfungsi sebagaimana dimaksud.

Dengan demikian, diskusi tentang konsep Keadilan, di mana perspektif moral individu merupakan dasar dari kehidupan yang baik - "Jiwa yang adil dan orang yang adil akan hidup baik, tetapi orang yang tidak benar akan hidup buruk" (Plato, 1985) - atau dapat mengarahkan seseorang kepada kebahagiaan. Oleh karena itu, Keabsahan keadilan merupakan hasil dari tingkat metafisik, melalui gagasan yang baik, di mana "apa yang benar dan apa yang masih digunakan, dapat menjadi berguna dan menyembuhkan" (Plato, 1985). Tetapi pandangan ini kemudian menjadi masalah etika individu, karena tanggung jawab untuk implementasi yang ideal yang dicerminkan oleh ide ditugaskan kepada orang tersebut. Menurutnya, pencarian manusia harus bergerak menuju kebaikan yang diinginkan bukan karena kepuasan berikutnya yang mungkin ditawarkan, tetapi karena cinta, karena apa yang diwakilinya sebagai sebuah gagasan. Maka dari konsepsi Platonis ini, kita dapat melihat Keadilan sebagai individu dan sebagai dimensi kolektif. Di satu sisi, kita memiliki individu yang bertindak dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan individu,

dan di sisi lain, masyarakat bertindak dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip kolektif yang berlaku di tingkatan masyarakat.

Mengikuti pemikiran Platonis, Aristoteles membawa kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman konsep Keadilan, dimulai dari model teologis yang menurutnya alam dilihat sebagai suatu tatanan yang penuh makna: "Metafisika Aristoteles sama sekali tidak ada penyangkalan terhadap kehidupan, tetapi pemuliaan agungnya, karena tidak ada yang lebih hidup, lebih energik, lebih aktif daripada pikiran. Intelektualitas ilahi menggerakkan seluruh alam semesta dan menikmati untuk direnungkannya, di mana kecerdasan manusia menirunya. Dia mendominasi, dalam arti, dunia, yang intinya dia tahu - dunia ini mengarah kepada dirinya sendiri, di tempat asalnya" (Vianu, 2005).

Tidak seperti Plato, bagi Aristoteles, keadilan melekat pada moralitas, wawasan ilmiah, dan aturan konstitusional. Ia menemukannya dalam 'keadilan umum', dan 'keadilan khusus'. Pertama, Keadilan Umum. Keadilan ini merupakan keseluruhan masyarakat yang baik; ada perilaku moral, ada barang publik; ada kebajikan. Keadilan dalam bentuk ini meminta manusia untuk berpikir bukan hanya tentang dirinya sendiri tetapi juga dari sudut pandang orang lain. Kedua, Keadilan Khusus. Keadilan ini merupakan bagian dari seluruh keadilan. Aristoteles mencoba membagi keadilan ke dalam area yang terbatas meskipun isi dari kedua jenis keadilan itu tidak berbeda. Kemudian secara lebih jauh Aristoteles membagi keadilan tertentu menjadi 'keadilan distributif' dan 'keadilan penghubung'. Sebagaimana telah dinyatakan di atas, keadilan distributif terkait dengan distribusi anggaran, penghargaan, kehormatan dan keuntungan lain oleh negara kepada individu berdasarkan kapasitas dan kemampuan mereka atas dasar 'kesetaraan proporsional'.

Bagi Aristoteles, negara yang terbaik adalah negara yang didirikan berdasarkan keadilan proporsional, berdasarkan keunggulan individu, dan bukan pada kelahiran, kekayaan, kebebasan, dan kesetaraan. Kesetaraan yang lengkap di antara warga negara tidak mungkin dalam setiap aspek kehidupan manusia (Jatava, 1998). Bahkan jika keadilan telah diamankan dengan aman dalam suatu komunitas ter-

tentu, berbagai keadaan seperti kecelakaan, perampokan, persaingan kelompok dan pelanggaran kontrak mungkin timbul untuk mengganggunya, dan oleh karena itu diperlukan keadilan penghubung yang bukan balas dendam tetapi semacam kompensasi. Dia membuang prinsip “mata ganti mata dan gigi ganti gigi” karena itu bukan kompensasi yang benar, itu adalah balas dendam, yang tidak bisa menjadi tindakan keadilan. Semua yang dapat dilakukan negara adalah mencoba untuk mencegah tindakan semacam itu dengan semacam perlindungan (yaitu, kebijakan), dengan pencegahan melalui prospek berbagai bentuk hukuman, dengan pembatasan khusus dan oleh pendidikan moral.

Dalam konteks ini, untuk konseptualisasi keadilan, dalam berbagai bentuknya, keadilan akan dikaitkan dengan makna yang lebih luas, terkait dengan gagasan keadilan universal sebagai kebajikan yang mencakup semuanya, Aristoteles melihat "Keadilan memiliki banyak arti," di samping keadilan sebagai konsep sentral dari setiap moralitas, masih banyak lagi makna lainnya, baik secara sempit, secara khusus, dan dilihat secara sosio-ekonomi penting untuk dipertimbangkan (Aristoteles, 2013). Menurutnya, bahwa apa yang benar dan tepat dari seluruh etika dan moralitas, bukan hanya dari sisi hukum semata, jika secara moral pantas maka harus dianggap benar sebagai standar kehidupan pribadi: "ikatan yang menyatukan rakyat dalam dirinya sendiri merupakan realitas moral atau apa yang terjadi berdasarkan moral, dengan demikian kondisi tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan manusia" (Aristoteles, 2013). Oleh karena itu keadilan justru merupakan simbiosis antara umum dan khusus, antara hukum dan moral, dan keseimbangan harus diletakkan di sebuah tempat yang berada di tengah. Kenyataan ini lebih baik tercermin dalam bentuk keadilan tertentu. Keadilan di sini mewakili jarak yang benar dan adil antara kelebihan dan kekurangan. Mengingat dalam masyarakat ada golongan orang kaya, golongan orang miskin dan kalangan kelas menengah, maka diasumsikan bahwa ciri-ciri yang benar dan baik terletak di posisi tengah. Aristoteles melihat ide distribusi yang tepat adalah seperti itu. Aristoteles menganggap bahwa apa yang benar sudah sesuai dengan hukum dan kesetaraan, dan apa yang tidak adil

bertentangan dengan prinsip-prinsip ini (Aristoteles, 2013). Aristoteles menekankan alokasi distribusi atas dasar manfaat, kesesuaian, dan kemampuan dengan merujuk kepada kehormatan dan reputasi individu. Dalam hal ini Aristoteles menerima adanya posisi sosial ekonomi yang lebih tinggi dalam masyarakat. Alokasi yang tidak merata, dalam pengertian ini, akan dianggap adil. "Kami melihat pada kenyataannya. Bahwa siapa pun, yang dapat digambarkan dengan menggunakan kebenaran sebagai karakter, secara konsekuen tepat untuk bertindak sesuai dengannya, untuk mempraktekkan keadilan dan berorientasi pada apa yang benar" (Aristoteles, 2013).

Aristoteles banyak sekali memberikan argumen tentang Keadilan sebagai kebajikan moral yang tumbuh dari dalam jiwa. Keadilan akan berlaku di tingkat masyarakat hanya ketika diri menghadapi yang lain: "Keadilan merupakan bentuk moralitas yang memberikan keuntungan bagi orang lain, karena itu keadilan dilakukan dalam kaitannya dengan orang lain, melakukan apa yang baik untuk orang lain, apakah tuan atau warga negara biasa" (Aristoteles, 2013). Kebaikan pribadi dicari melalui kebaikan dari yang lain, sementara kesejahteraan kolektif menghasilkan kebaikan pribadi: "keadilan, oleh karena itu, [...] merupakan hal yang lengkap, sebagai sesuatu yang absolut, bukan hanya moral semata tetapi moral tercermin dalam hubungan dengan manusia lain." (Aristoteles, 2013). Bagi Aristoteles gagasan tentang kebaikan merupakan sesuatu yang bermaksud untuk mendorong orang agar berusaha "apa yang baik dalam dirinya sendiri, akan baik juga bagi kita, dan dalam hal ini, akan diinginkan untuk mencita-citakan apa yang baik bagi kita" (Aristoteles, 2013). Aristoteles membedakan "orang baik, mengarahkan semua kekuatannya ke kanan ... atas kemauannya sendiri, melayani alasan yang hidup dalam dirinya" (Aristoteles, 2013), yang asalnya adalah kodrat ilahi. Tuhan melakukan segalanya dengan baik, karena Dia yang membuat dan mendefinisikannya. Dengan cara yang sama, manusia dapat memberikan manfaat dengan meniru sifat ilahi (Aristoteles, 2013). Aristoteles menganggap bahwa setiap kebajikan berada dalam keadilan. "Keadilan adalah bentuk moralitas yang paling komprehensif, karena itu adalah ekspresi dari orientasi moral yang penuh dengan kehendak;

keadilan itu bagaimanapun merupakan hal yang sempurna, karena siapa yang memiliki itu, pasti berhubungan dengan yang lain, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, dan itu menunjukkan karakter moral".

Keadilan adalah relatif terhadap orang, dan distribusi keadilan adalah satu diantar nilai-nilai relatif dari hal-hal yang diberikan sesuai dengan orang-orang yang menerima. (Aristoteles, 1980). Menurut Aristoteles, keadilan dalam individu adalah harmoni dalam jiwa manusia, dan dalam masyarakat adalah kesetaraan dan proporsi dalam menikmati nilai-nilai. Dalam filsafat politik Aristoteles, kriteria penting keadilan memperlakukan sama dengan sama dan tidak setara dengan tidak setara tetapi sebanding dengan perbedaan yang relevan. Dia mengatakan "Dalam semua ilmu dan seni, akhirnya adalah baik, dan terutama yang paling penting di atas semua - ini adalah ilmu politik yang kebajikannya adalah keadilan. Dengan kata lain, kepentingan bersama. Semua manusia menganggap keadilan sebagai semacam persamaan; dan sampai batas tertentu mereka setuju dalam perbedaan filosofis yang telah kami tetapkan tentang Etika. Karena mereka mengakui bahwa keadilan adalah sesuatu yang berhubungan dengan orang, dan setara itu seharusnya memiliki persamaan. Namun masih ada pertanyaan - kesetaraan atau ketidaksetaraan tentang apa? Inilah kesulitan yang harus diselesaikan oleh filsuf politik." (Aristoteles, 1953). Keadilan, bagi Aristoteles adalah kebajikan dalam tindakan. Keadilan berarti bahwa setiap anggota komunitas harus memenuhi kewajiban moralnya terhadap sesama anggota komunitasnya.

Keadilan dalam arti politik, memiliki dua bagian, yaitu Keadilan Distributif dan Keadilan Korektif. Keadilan korektif berkaitan dengan transaksi komersial sukarela seperti penjualan, penyewaan keamanan, dan hal-hal lain seperti kepemilikan properti, kehidupan, kehormatan dan kebebasan (Bhandari: 2002). Sementara Keadilan distributif terdiri dari alokasi yang tepat untuk setiap orang sesuai dengan nilainya. Keadilan ini walaupun tidak eksklusif, mempunyai hubungan dengan hak-hak politik. Dari sudut pandang ini, setiap jenis organisasi politik memiliki standar nilainya sendiri dan oleh karena itu disebut Keadilan Distributif. Dalam alam demokrasi, standar nilai adalah

kebebasan; dalam sistem oligarki itu adalah kekayaan, dan dalam aristokrasi itu adalah kebajikan. “Keadilan distributif memberikan kepada setiap orang haknya sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat. Ini untuk meminimalisir perselisihan dan kebingungan dengan melawan ketidaksetaraan dari yang setara atau persamaan dari yang tidak setara. Keadilan distributif Aristotelian merupakan nama lain dari kesetaraan proporsional, yaitu berkaitan dengan hak-hak manusia, tugas-tugas manusia, dan penghargaan harus sesuai dengan jasa dan kontribusi sosialnya”.

Merujuk kepada pemikiran dua tokoh di atas tentang keadilan, menurut Hamed (2014), Orang Yunani memandang keadilan sebagai kebajikan dalam tindakan dan oleh karena itu menjadi kebajikan. Konsepsi Yunani tentang keadilan adalah keutamaan jiwa dan ketidakadilannya. Bagi Plato dan Aristoteles, keadilan berarti kebaikan dan kesediaan untuk mematuhi hukum. Ini mengkonotasikan korespondensi hak dan kewajiban. Keadilan adalah cita-cita kesempurnaan dalam hubungan manusia. Dan semangat yang menggerakkan manusia dalam melaksanakan tugasnya dengan tepat. Promosi keseimbangan dan keselarasan dalam pemikiran dan tindakan adalah karakter yang sangat sosial. Alam adalah sumber hukum dan tugas negara biasanya dianggap sebagai aplikasi daripada penciptaan hukum. Aristoteles, dan keadilan Plato, pada kenyataannya keduanya saling melengkapi satu sama lain, tujuan kedua filsuf tersebut adalah menemukan prinsip kapasitas yang melaluinya, persatuan, harmoni, kebajikan dan kebahagiaan dapat diwujudkan dalam masyarakat.

Walaupun saling melengkapi, tetapi mereka berbeda dalam banyak hal mendasar antara satu sama lainnya. Misalnya, keadilan Aristoteles meletakkan penekanan pada sistem hak, sementara keadilan Platonik lebih mementingkan tugas. Keadilan Aristotelian didasarkan pada prinsip bahwa "setiap orang harus memiliki miliknya sendiri". Keadilan Platonis, sebaliknya, didasarkan pada prinsip "setiap orang harus melakukan miliknya sendiri". Oleh karena itu, yang pertama adalah sistem hak, tetapi yang terakhir adalah sistem tugas. Selain itu, keadilan Aristotelian menetapkan kesetaraan antara anggota negara yang berbeda, sementara keadilan Platonik menetapkan hierarki

kelas. Menurut keadilan ini, warga dibagi menjadi tiga kelas, yang masing-masing melakukan satu set fungsi tertentu. Setiap warga negara terikat untuk melakukan tugasnya yang disebutnya sebagai organ negara. Di sisi lain, keadilan Aristotelian didasarkan pada klasifikasi keadilan yang lengkap dan khusus. Plato tidak mencoba klasifikasi semacam itu. Keadilannya terletak pada tiga elemen yang berbeda dari jiwa-jiwa, semangat, dan nafsu hidup manusia. Terlepas dari perbedaan ini, tujuan keduanya adalah untuk memberikan hak setiap warga negara sesuai dengan kapasitas atau sifatnya. Dengan demikian, keadilan dalam kasus keduanya dapat dianggap sebagai sifat distributif. Dalam kedua kasus tersebut, keadilan pada akhirnya fungsional dan teologis, dan bukan hanya hukum, tetapi juga prinsip moral.

Tidak seperti Plato dan Aristoteles, teori-teori keadilan modern berusaha memisahkan isu keadilan dan hak dari perdebatan tentang gagasan kehormatan, kebajikan dan pahala moral, mencari prinsip-prinsip keadilan netral, mengenai finalitas yang memungkinkan orang untuk memilih dan mencapai tujuan mereka sendiri. Bagi Aristoteles, bagaimanapun, keadilan tidak bisa netral dari sudut pandang ini. Dia yakin bahwa perdebatan tentang keadilan adalah perdebatan tak terelakkan tentang kebajikan, kehormatan, dan kesejahteraan, karena peran sosial harus didistribusikan sesuai dengan kriteria kesesuaian.

Di sisi lain, teori politik liberal, berdasarkan pendapat Kant dan Rawls, mengatakan bahwa peran sosial harus dialokasikan berdasarkan pilihan, dan bukan kelayakan. Liberalisme didasarkan pada keyakinan bahwa kebebasan adalah esensi kemanusiaan, menerima tugas untuk mencapai kompatibilitas kebebasan individu. Solusinya adalah penolakan terhadap telos dan etika kesesuaian, yang mendukung pilihan dan etika persetujuan, serta memotivasi individualisme moral yang mengklaim gagasan kebebasan. Untuk penganut Paham individualis moral, maka menjadi bebas berarti hanya tunduk pada kewajiban yang telah diterima secara sukarela; misal, jika Anda berhutang apapun kepada orang lain, Anda berhutang berdasarkan persetujuan (janji atau kesepakatan), baik secara implisit maupun eksplisit. Jika gagasan tentang tanggung jawab merupakan sesuatu

yang terbatas dan berhubungan dengan penerimaan pribadi, maka dalam pengertian ini bisa bermakna membebaskan. Hal tersebut mengasumsikan bahwa manusia, sebagai agen moral, bebas dan independen dari insiden moral serta mampu memilih tujuan mereka sendiri. Dalam hal ini tidak ada tradisi, kebiasaan, dan status warisan sebagai sumber kewajiban moral, tetapi hanya pilihan bebas dari setiap individu yang menjadi sumber kewajiban moral itu. Dampaknya, visi model kebebasan ini hanya meninggalkan sedikit ruang untuk tanggung jawab kolektif atau kewajiban untuk menanggung beban moral ketidakadilan sosial atau politik, dan jika konsep kebebasan ini kurang, maka kita perlu memikirkan kembali beberapa aspek mendasar dari kehidupan publik.

John Rawls mengadaptasi konsep Kantian dalam konsep "Kemauan Otonom" yang dibuatnya. Baginya, sering kali pilihan yang kita buat mencerminkan keadaan moral yang sewenang-wenang dan menghasilkan gagasan "tabir ketidaktahuan". Sebagai contoh, jika berharap masyarakat yang kita hidupi memiliki hubungan sukarela yang kompleks, kita tidak dapat menemukannya dalam sebuah konsensus, tetapi kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, manakah prinsip keadilan yang akan kita setujui. Dengan demikian, Rawls mempromosikan model kontrak sosial sebagai pembenaran terbaik untuk keadilan Negara. "Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, karena kebenaran adalah kebajikan pertama dari sistem pemikiran" (Rawls, 1999). Menurutnya, prinsip dasar dari masyarakat yang adil adalah akses ke institusi politik dan ekonomi untuk setiap anggotanya, kemudian memastikan pelaksanaan kebebasan individu dalam bentuk yang paling komprehensif, tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain, dan menentang ketimpangan sosial melalui kebijakan yang tepat. Bagi Rawls, masyarakat yang adil adalah hasil kerja sama antara warga negara yang bebas dan bertanggung jawab, dengan hak-hak fundamental yang sama, menempatkan keadilan dan kesetaraan pada pijakan yang sama. Dari Gambaran di atas maka Rawls, mendefinisikan keadilan sebagai konsep egalitarianisme liberal.

Bagi Kant dan Rawls, teori-teori keadilan yang mengandalkan cara berpikir tertentu ketika mendefinisikan kehidupan yang baik, entah

itu bersumber dari agama maupun nilai-nilai sekuler, bertentangan dengan kebebasan. Memaksakan nilai-nilai kita kepada orang lain itu artinya kita gagal untuk menunjukkan rasa hormat terhadap status diri yang bebas dan independen serta mampu memilih tujuan dan sasarannya sendiri dalam kehidupan. Jadi, prinsip individu yang bebas menentukan diri sendiri dan Negara yang netral harus berjalan seiring. Karena kita adalah entitas yang bebas dan independen, maka kita memerlukan kerangka yudisial yang netral dan memiliki kedudukan yang sama ketika berbicara tentang moral atau agama, serta memberikan kebebasan kepada warga masyarakat untuk memilih nilai-nilai mereka sendiri. Jika prioritas apa yang benar atas apa yang baik ditegaskan, maka prinsip-prinsip yang mendefinisikan tugas dan hak kita tidak ada hubungannya dengan pemahaman kita tentang kehidupan yang baik. Semuanya harus diatur dalam konsensus negara.

Walaupun begitu, konsep yang ditawarkan oleh Rawls banyak sekali mendapatkan kritikan karena dianggap menegasikan proses pemberdayaan masyarakat oleh negara. Banyak kritikus Malihat Cara Rawls (1999) dalam mengemukakan argumennya tentang hak untuk memilih mengacu pada supremasi tentang apa yang benar dan tentang apa yang baik, di mana hal tersebut menurut Rawls mencerminkan keyakinan bahwa "orang bermoral adalah subjek yang memilih tujuan akhirnya sendiri". Bagi Rawls, sebagai agen moral, kita tidak didefinisikan oleh tujuan akhir kita, tetapi oleh kemampuan kita untuk memilih.

Seperti ditegaskan di atas, Rawls, membungkus konsep keadilannya dalam perspektif politik Liberal. Gagasan tentang keadilan yang netral dan tentang cara-cara di mana kehidupan yang baik dirasakan, bagi Rawls hal tersebut mencerminkan pemahaman individu yang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan bebasnya, dan independen atas komitmen moralnya. Semua gagasan ini, jika dilihat bersama, merupakan karakteristik pemikiran politik liberal modern. Liberal bukan berarti di sini kebalikan dari istilah konservatif, setelah kebijakan kebiasaan saat ini, di mana cita-cita Negara netral, serta orang memilih dengan bebas hampir ditemukan dalam hampir semua spektrum politik demokrasi. Bagian dari perdebatan konsep Rawls ini adalah mempertanyakan peran Pemerintah dan pasar dalam

memberdayakan individu untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, setidaknya pada tingkat teoritis. Solidaritas sosial dan kewajiban masyarakat hanya muncul dalam latar belakang hak individu dan kebebasan memilih. Negara Netral, bagi kaum libertarian, mengandaikan kebebasan sipil dan hak rezim yang ketat atas properti pribadi. Negara yang berorientasi pada perlindungan sosial (dengan orientasi sosialis), menurut kaum Libertarian, tidak memberdayakan individu untuk memilih kepentingan khusus mereka sendiri, tetapi agak membatasi mereka untuk kepentingan orang lain.

Alsadair MacIntyre (1998), menegaskan bahwa manusia adalah makhluk naratif yang didasarkan pada dimensi pencarian narasi, dan setiap narasi yang sedang berlangsung memiliki karakter teleologis. Perspektif naratif bertentangan dengan individualisme modern, di mana individu memilih apa yang mereka inginkan. Perbedaan ini jelas, karena kisah perjalanan hidup seseorang selalu tertanam dalam kisah komunitas dari mana identitasnya berasal. Pemahaman narasi tentang orang ini disajikan dalam oposisi yang jelas terhadap pandangan voluntaristik dari individu yang mandiri dan bebas dari tugas.

Dalam banyak kasus, terkadang manusia sebagai komunitas sosial sangat memerlukan solidaritas sebagai pelengkap tugas-tugas hak asasi manusia. Dalam aspek ini filsuf Liberal mengakuinya: selama kita tidak melanggar hak orang lain, kita dapat dengan bebas dan penuh kedamaian melaksanakan tugas umum untuk membantu orang lain, dimulai dengan orang yang paling dekat, anggota keluarga, teman, dan rekan senegarannya. Semua sama, tidak ada yang salah untuk negara yang lebih kaya untuk membangun warga negaranya sendiri, tingkat layanan publik dan asuransi yang lebih tinggi daripada di negara lain, asalkan itu menghormati hak asasi manusia, di manapun mereka berada. Kewajiban solidaritas ini dapat ditentang hanya jika mereka mengarah pada pelanggaran tugas.

Demi keadilan pada tingkat interpersonal dan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, Margalit (1999) menganggap kesopanan atau moralitas sebagai tugas utama dan vital bagi semua warga negara. Dengan menggunakan pendekatan Hegelian, Margalit (1998), mengatakan bahwa setiap orang jahat dapat membuat

kekejaman, sementara kekejaman ini harus dihindari. Kekejaman adalah ketidakadilan terbesar yang ditunjukkan melalui perilaku tidak terhormat, yaitu "segala jenis perilaku atau kondisi yang dapat mencela harga diri seseorang". Bagi Margalit, ketidakadilan dapat menghancurkan kepercayaan diri manusia. Dengan demikian, membandingkan keadilan sosial yang ideal dengan model Rawls ini, kita mungkin menganggapnya sebagai hal yang masuk akal, setidaknya dari sudut pandang pendekatan etika-politik untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam diri setiap individu. Begitu ancaman penindasan telah dihapus dan kecenderungan destruktif telah dibatasi, maka memungkinkan untuk mencapai model masyarakat yang layak, yang mewakili tahapan paling unggul dalam hierarki cita-cita, di mana tingkat tertinggi diwakili oleh sekelompok masyarakat yang ditandai dengan adanya keadilan dalam setiap semua struktur masyarakatnya.

Diskusi tentang gagasan Keadilan dan kemungkinan pencapaiannya sangat kompleks. Pemahaman tentang baik dan benar, sebagaimana diterapkan dalam sistem sosial, tunduk pada relativisme kontekstual. Teori-teori sistem sosial yang adil, dimaksudkan untuk memastikan otonomi individu sebagai faktor intrinsik kesejahteraan di satu sisi. Sementara di sisi yang lain ukuran ekuitas (kesetaraan) diantara anggota masyarakat dan yang dapat mengimbangi tingkat distribusi, secara konstan terikat pada suatu perubahan yang praktis, dan dinamis serta menolak untuk tunduk pada pernyataan yang bertentangan.

C. Jenis-jenis Keadilan

Keadilan adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan persyaratan beberapa undang-undang yang berlaku. Terlepas apakah aturan-aturan ini didasarkan pada konsensus manusia atau norma-norma kemasyarakatan, negara tetap harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat menerima perlakuan yang adil.

Masalah keadilan muncul dalam beberapa bidang yang berbeda-beda. Keadilan memainkan peranan penting dalam menyebabkan, menyuburkan, dan mengatasi konflik sosial. Hanya lembaga tertentu yang bisa memberikan keadilan, yakni lembaga yang memiliki kecenderungan

derungan menanamkan rasa aman, menjamin stabilitas, mewujudkan kesejahteraan, dan memberikan kepuasan di antara anggota masyarakat. Ketidakadilan yang dirasakan atau diterima masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan, pemberontakan, atau bahkan revolusi. Lembaga-lembaga negara memiliki caranya masing-masing (berbeda-beda) dalam mengekspresikan prinsip keadilan, menghasilkan berbagai jenis keadilan, dan konsep keadilan. Setidaknya, hingga hari ini berdasarkan praktek dan perilaku yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintahan secara umum kita mengenal beberapa jenis keadilan, seperti: keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan retributif, dan keadilan restoratif. Jenis-jenis keadilan tersebut memiliki implikasi penting secara langsung maupun tidak langsung bagi keadilan sosio-ekonomi, politik, perdata, dan pidana, baik di tingkat nasional maupun internasional.

1. Keadilan Distributif

Dikenal sebagai keadilan ekonomi. Keadilan jenis ini berkaitan dengan apa yang di terima oleh orang. Akarnya berasal dari filsafat sosialisme, di mana kesetaraan adalah prinsip fundamental. Keadilan distributif atau keadilan ekonomi, berkaitan dengan pendekatan bagaimana cara memberikan semua anggota masyarakat "bagian yang adil" dari manfaat sumber daya yang tersedia. Kriteria dari keadilan distributif adalah kesetaraan dan kebutuhan.

2. Keadilan Prosedural

Jika orang percaya bahwa proses yang adil digunakan dalam memutuskan apa yang akan didistribusikan, maka mereka mungkin menerima ketidakseimbangan dalam apa yang mereka terima dibandingkan dengan orang lain. Jika mereka melihat ketidakadilan prosedural dan distributif, mereka kemungkinan akan mencari keadilan restoratif dan atau keadilan retributif. Keadilan Prosedural, berkaitan dengan cara membuat dan menerapkan keputusan sesuai dengan proses yang adil dan memastikan adanya "perlakuan yang adil.". Peraturan harus diikuti dengan cara tidak memihak dan diterapkan secara konsisten untuk menghasilkan keputusan yang tidak bias. Mereka yang melaksanakan

prosedur harus netral. Bagi yang akan melaksanakan keputusan harus mendapatkan dukungan suara yang kuat dalam proses pengambilan keputusan.

3. Keadilan Retributif

Keadilan Retributif memandang setiap orang layak untuk diperlakukan dengan cara yang sama seperti memperlakukan orang lain. Ini adalah pendekatan retroaktif yang membenarkan hukuman sebagai respons terhadap ketidakadilan atau kesalahan masa lalu. Ide dasarnya adalah Lex Talionis, yaitu seseorang berhak untuk mendapatkan pengalaman atau imbalan yang setimpal seperti apa yang telah dilakukan terhadap orang lain. Gagasan utamanya adalah bahwa pelaku telah memperoleh keuntungan yang tidak adil melalui tingkah lakunya, dan hukuman itu akan mengatur ketidakseimbangan ini secara langsung. Model ini mirip praktek “balas dendam” yang mengatasnamakan tegaknya keadilan. Meskipun maksudnya bertujuan untuk menghalangi pelaku atau orang lain dari perbuatan salah yang dilakukan di masa depan, nyatanya praktek keadilan ini banyak menuai pro dan kontra. Hukuman dalam praktik ini lebih kepada upaya untuk memenuhi kepuasan para korban dan orang-orang yang peduli terhadap korban. Kenapa model ini disebut Keadilan balas dendam?, karena pihak yang dirugikan berusaha membuat orang lain menderita sebagai balasnya. Dalam kasus-kasus semacam itu, 'keadilan' biasanya didefinisikan secara emosional ketimbang dengan maksud untuk keadilan hakiki atau usaha pencegahan.

4. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif juga dikenal sebagai keadilan korektif. Model ini mencoba untuk melakukan koreksi terhadap keadilan retributif cenderung menjadi tindakan balas dendam. Keadilan model ini dipandang lebih efektif daripada keadilan retributif. Pendekatan keadilan retributif menganggap pelanggaran sebagai kejahatan terhadap negara atau bangsa, sebaliknya keadilan restoratif berfokus pada pelanggaran sebagai kejahatan terhadap individu. Hal ini berkaitan dengan penyembuhan luka korban, mengembalikan pelanggar ke kehidupan yang taat hukum, dan memperbaiki

kerusakan yang telah dilakukan dalam konteks hubungan secara interpersonal maupun masyarakat.

D. Tujuh Aliran Keadilan Sosial

Ada sejumlah teori tentang keadilan sosial yang cukup terkenal, namun hanya ada tujuh saja yang cukup berpengaruh dalam pemikiran para ahli. Tujuh aliran teori Keadilan sosial tersebut telah banyak mempengaruhi kebijakan berbagai negara terkait dengan kebijakan politik negara terhadap kemakmuran warga negaranya.

1. Utilitarianisme

Tokoh Protagonis utilitarianisme, J. Bentham (1748-1832), James Mill (1773-1836), John Austin (1790-1859) JS Mill (1806-1873) meletakkan fungsi kepraktisan dan utilitas untuk dijadikan sebagai ukuran kebajikan dan keadilan. Nilai keadilan melekat pada seberapa banyak orang memperoleh kesenangan darinya, yaitu sejauh mana manfaat utilitas berguna demi kepentingan bersama. Apa yang tidak berguna, atau apapun perbuatan yang tidak mengandung utilitas maka tidak dapat dibenarkan secara etis dan adil.

Menurut paham utilitarianisme, suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya dianggap perbuatan buruk apabila menyebabkan ketidakbahagiaan. Bukan saja kebahagiaan bagi para pelakunya, tapi juga kebahagiaan bagi orang lain. Utilitarianisme merupakan oposisi bagi egoisme yang berpendirian bahwa seseorang harus memenuhi kepentingannya sendiri, meskipun hal tersebut diperoleh dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Utilitarianisme juga berbeda dengan teori etika yang menetapkan bahwa suatu perbuatan dinilai baik atau buruk didasarkan atas motivasi pelakunya, sedangkan utilitarianisme menekankan kepada kemanfaatannya. Bagi utilitarianisme, bukan sesuatu yang mustahil, hal yang baik lahir dari motivasi yang jelek. Paham utilitarianisme menekankan kepada perbuatan bukan kepada individu pelakunya. Singkat kata, ajaran pokok dari utilitarianisme adalah prinsip kemanfaatan (*the principle of utility*).

Dalam Pandangan Bentham tentang utilitarianisme, kriteria baik dan buruk yang harus ada di dalam hukum harusnya berasal dari kebahagiaan itu sendiri. Semua institusi politik dan publik harus dinilai berdasarkan apa yang dikerjakannya, bukan oleh ide-idenya. Sehingga yang dinilai adalah kemampuan mereka dalam memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, bukan karena kesesuaiannya dengan hak-hak alamiahnya atau keadilan yang mutlak. Utilitarianisme didasarkan kepada doktrin hedonisme yang memandang bahwa manusia adalah makhluk yang berkesadaran, makhluk yang memiliki perasaan dan sensitivitas. Prinsip kemanfaatan ditujukan untuk menguji dan mengevaluasi segala kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Fungsi negara menurut utilitarianisme harus merealisasikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan ini merupakan fungsi alat, bukan fungsi tujuan. Bentham tidak mengakui hak asasi individu dan oleh karena itu, Bentham menempatkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan (*a subordinate aspect of utility*). Dalam suatu undang-undang, keadilan merupakan bagian implisit dari kemanfaatan. Oleh karena itu, bagi Bentham, keadilan adalah sesuatu yang ditetapkan di dalam undang-undang. Bentham tidak mengakui keadilan sebagai hak asasi manusia baik secara umum maupun khusus, karena dia tidak mengakui adanya hak-hak alamiah (*natural rights*). Dalam karyanya, *Anarchical Fallacies*, Bentham mengkritik Deklarasi Perancis mengenai hak asasi manusia dan menganggapnya hanya sebagai retorika kosong. Oleh karena itu Bentham menekankan agar undang-undang mencerminkan kebahagiaan masyarakat yang berbentuk keamanan (*security*), nafkah hidup (*subsistence*), kecukupan (*abundance*), dan kesetaraan (*equality*).

Dengan demikian, "Kebaikan maksimal dari sejumlah besar individu" dianggap sebagai dasar keadilan. Bagi mereka, utilitas harus menjadi ukuran baik, benar, moralitas, kemajuan dan keadilan. Bentham menekankan bahwa "keadilan harus ditunjukkan, dan kesejahteraan orang yang membutuhkan serta tertindas harus dilindungi". Jadi, menurut para pemikir ini, apapun yang tidak

berguna, menyakitkan, jahat dan tidak adil, harus direformasi atau diubah demi kepentingan sejumlah besar individu (Jatava, 1998).

Dengan kata lain, menurut konsep keadilan sosial ini, semua pertanyaan tentang distribusi harus diselesaikan dengan mengacu pada konsekuensi yang berlebihan; Alokasi sosial yang adil adalah alokasi tertinggi yang menghasilkan "kebahagiaan terbesar" (Stuart Mill, 1969). Mill, berargumentasi bahwa distribusi barang-barang kemasyarakatan haruslah untuk 'keseimbangan kepuasan terbesar' masyarakat. Mill mengatakan bahwa utilitarianisme sebenarnya adalah 'standar moralitas' yang menggunakan kebahagiaan dari sejumlah besar orang sebagai tujuan akhirnya. Pada prinsipnya, meskipun utilitarianisme mendukung kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang dalam masyarakat, Reamer (1989), menjelaskan bahwa "Proses dan pengambilan keputusan didasarkan pada logika utilitarianisme dapat menghasilkan perlakuan yang tidak adil terhadap populasi yang rentan". Contoh penerapan pandangan ini adalah pelembagaan orang sakit mental untuk kebaikan masyarakat. Dalam prakteknya, pandangan ini mencerminkan distribusi yang tidak merata atas dasar status, karena sering kali mereka yang dirugikan haknya dikorbankan demi kebaikan kelas masyarakat yang istimewa.

Berbeda dengan Bentham, John Stuart Mill berpendapat bahwa meskipun standar keadilan itu harus didasarkan kepada nilai kemanfaatannya, namun esensi keadilan itu harus berasal dari dua perasaan yaitu dorongan mempertahankan diri dan perasaan simpati. Rasa keadilan juga dimaksudkan sebagai imbalan atau bahkan balasan atas tindakan kejahatan. Hasrat membela korban kejahatan, bukan hanya didasarkan kepada alasan personal, tapi juga karena perbuatan tersebut menyakiti anggota masyarakat lainnya dan kita bersimpati kepadanya sekaligus merasakan seandainya hal serupa menimpa diri kita. Keadilan ini, menurut Mill, mencakup semua prasyarat moral yang diperlukan dalam kehidupan yang dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan merupakan sebuah kewajiban.

Selain perbedaan sebagaimana disebutkan di atas, pendirian Bentham mengenai keadilan sebagai subordinat dari kemanfaatan dibuktikan dengan fakta bahwa dia menentang luasnya diskresi yang diberikan kepada hakim untuk menafsirkan hukum. Bentham menyarankan agar interpretasi hakim tidak boleh melebihi dari pemahaman yang ada dalam undang-undang. Aktivitas interpretasi tersebut tidak boleh menyingkirkan makna yang diinginkan oleh undang-undang. Singkat kata, tidak boleh penafsiran hakim menggantikan makna yang dimaksudkan oleh undang-undang. Bentham menganggap hakim yang seperti ini ibarat seorang tukang obat yang memberikan kepada penonton ramuan yang manis dan pahit yang diambil dari gelas yang sama. Selanjutnya Bentham melancarkan kritik pedasnya terhadap *judicial activism* sebagai berikut: *The serpent, it is said can pass his whole body whenever he can introduce his head. As respects legal tyranny, it is this subtle head of which we must take care; least presently we see it followed by all the tortious fields of abuse.*

Gagasan Bentham mengenai kebebasan adalah terkait dengan hal yang sekarang dikenal sebagai kebebasan negatif (*negative liberty*) yaitu kebebasan dari belenggu dan paksaan eksternal. Menurut Bentham, kebebasan adalah keadaan terbebas dari kekangan (*the absence of restraint*). Dengan pengertian ini, maka seseorang yang tidak mendapat gangguan dari pihak lain, maka dia telah mendapatkan kebebasannya. Bentham menolak bahwa kebebasan itu bersifat alamiah atau ada lingkup kebebasan sebelumnya yang membuat seorang individu dianggap berdaulat. Dia mengklaim bahwa manusia senantiasa hidup di antara masyarakat dan oleh itu tidak ada yang disebut sebagai sesuatu yang alamiah (meskipun demikian Bentham membedakan antara *political society* dan *natural society*).

Menurut Bentham teori kontrak sosial pun tidak ada karena gagasan tersebut selain bersifat ahistoris juga merusak. Meskipun demikian, dia mencatat bahwa terdapat perbedaan penting antara ruang publik dengan ruang privat yang secara moral Memiliki konsekuensi penting. Selain itu, Bentham juga berpendapat bahwa

kebebasan itu merupakan sesuatu yang baik meskipun bukan sesuatu yang bernilai fundamental, karena ia merefleksikan prinsip *the greatest happiness*. Atas dasar gagasan kebebasan yang diusungnya, Bentham mengikuti pendapat Hobbes yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Dengan mengacu kepada ide mengenai kebahagiaan (*pleasure*) dan ketidak-senangan (*pain*), maka kebebasan adalah sesuatu yang baik (*pleasant*) dan konsekuensinya maka pembatasan terhadap kebebasan adalah sesuatu yang buruk (*painful*). Hukum memiliki karakteristik utama yang bersifat pembatasan terhadap kebebasan dan menyakitkan bagi mereka yang kebebasannya terenggut, secara prima facie, hukum adalah sesuatu yang buruk (*evil*). Namun, Bentham mengakui bahwa hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban sosial dan juga untuk menghadirkan pemerintahan yang baik. Mendukung pendapat Locke, Bentham juga mengakui peran positif hukum untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Banyak kritikan terhadap teori utilitarianisme Bentham, terutama mengenai konsep *pleasure and pain*. Pemikiran Bentham mengenai *pleasure and pain* dinilai mereduksi manusia hanya sebagai makhluk pengindera semata (*sensing creature*). John Stuart Mill, proponent utilitarianisme, mengakui adanya dilema ini dan dia mencoba menawarkan jalan keluar dengan konsepnya yang ia sebut sebagai *Eudaimonistic Utilitarianism*. Disebut *Eudaimonistic Utilitarianism* karena Mill membedakan kebahagiaan menjadi dua jenis, yaitu: kebahagiaan Tinggi dan kebahagiaan rendah. Kebahagiaan tinggi yang dalam bahasa Yunani disebut dengan *eudaimonistic* mencakup ilmu pengetahuan, hubungan sosial, budaya, dan kapasitas intelektual. Sedangkan kebahagiaan rendah mirip dengan yang dikonsepsikan oleh Bentham yang meliputi antara lain makan, minum, dan sensualitas. Namun, pandangan ini masih tetap kontroversial karena kebahagiaan tinggi itu hanyalah sesuatu yang diinginkan. Mill mencoba membela dengan mengatakan bahwa “lebih baik menjadi manusia yang kurang bahagia daripada menjadi seekor babi yang bahagia”. Lebih baik menjadi seorang

Socrates yang kurang bahagia daripada menjadi seorang bodoh yang bahagia.

Utilitarianisme Bentham berbeda dengan Mill, utilitarianisme Bentham dikenal dengan act-utilitarianism sedangkan utilitarianisme Mill disebut dengan rule utilitarianism. Menurut Bentham, dalam setiap situasi moral, semua tindakan yang dapat menghasilkan sejumlah kebaikan harus tetap dilakukan tanpa memperhatikan sarananya. Act-Utilitarianism membolehkan untuk mengabaikan hak dan aturan umum sepanjang tindakan yang Tidak patut tersebut dapat mengantarkan kepada tujuan yang baik, dalam hal berdusta misalnya. Namun, apabila setiap orang adalah seorang act-utilitarianism, maka sangat mungkin perbuatan bohong akan menjadi sesuatu yang biasa dan nilai-nilai kejujuran pada akhirnya akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan. Sebaliknya menurut aliran rule-utilitarianism, aturan moral dan masyarakat dapat diikuti sepanjang kebahagiaan yang dihasilkannya sama baiknya dengan tindakan yang dilakukan dengan melanggar hukum. Aturan moral pada akhirnya harus berkontribusi bagi tercapainya seluruh kebaikan. David brink menyimpulkan perbedaan keduanya sebagai berikut: *act utilitarianism must condemn following rules when doing so is suboptimal; rule utilitarianism need not.*

Utilitarianisme menjelaskan secara detail mengenai baik dan buruk suatu perbuatan dan juga konsekuensinya, namun melupakan bagian esensial dari moralitas yaitu keadilan. Teori ini mengabaikan bagaimana kebaikan itu didistribusikan secara adil. Secara lebih spesifik, beberapa kelemahan sekaligus kritik terhadap utilitarianisme antara lain cara mengetahui bahwa kebahagiaan dan kepuasan lebih mudah diukur secara kuantitatif daripada sebuah Impian atau cita-cita. Terdapat dua isu yang mungkin muncul. Pertama, mengenai pengukuran segala sesuatu secara kuantitatif. Beberapa hal tidak mudah untuk diukur, misalnya kebahagiaan keluarga, sementara yang lain mudah untuk diukur misalnya produktivitas dan yang bersifat fisik material. Kedua, mengenai kesamaan nilai terhadap setiap barang atau materi yang bisa diukur. Misalnya, nilai

kebahagiaan dari makan malam sepadan dengan kenikmatan tidur nyenyak.

Utilitarianisme mengklaim bahwa setiap individu bertanggung jawab atas semua pilihan masing-masing. Akan menjadi masalah ketika setiap individu harus bertanggung jawab atas pilihan orang lain yang mendatangkan akibat tertentu kepada diri individu tersebut. Bagi utilitarianisme, konsekuensi atau akibat lebih penting daripada motif sebuah perbuatan. Namun, praktik menunjukkan sebaliknya, untuk sebuah hasil atau akibat dari suatu perbuatan ternyata didorong oleh motif yang berbeda. Pertanyaan penting lainnya adalah siapa yang menghitung kepuasan atau kebahagiaan itu sendiri. Dengan pendekatan utilitarianisme, kebahagiaan akhirnya akan tergantung kepada siapa yang menghitung. Seorang pemimpin perusahaan akan menghitung kebahagiaan karyawannya dari perspektif dia, bukan dari perspektif karyawannya. Perhitungan seperti ini akan jauh dari rasa keadilan.

Beberapa kelebihan utilitarianisme antara lain memiliki konsep nilai yang sederhana dan mendasar misalnya; moralitas sekuler, pendekatan akal sehat, egalitarianisme, fokus kepada kesejahteraan, dan penekanannya kepada hasil. Karena lebih menekankan kepada konsekuensi daripada motif suatu perbuatan, utilitarianisme dianggap memberikan kontribusi besar terhadap penggunaan analisis untung rugi (*cost-benefit analysis*) dalam pengambilan keputusan dan juga analisis kebijakan publik. Utilitarianisme juga dianggap memiliki prinsip-prinsip yang mampu menjawab setiap persoalan yang timbul. Teori ini juga dianggap bukan sekedar suatu sistem formal, melainkan substansi moral yang fokus kepada peningkatan kebahagiaan manusia dan pengurangan ketidakbahagiaan.

2. *Self-Perfectionism*

FH Bradley (1846-1924) merupakan pemikir paling awal dan terkemuka dari teori "self-proteksionisme", ia menekankan gagasannya jika setiap individu yang melakukan tugas-tugas di kantornya, tempat yang ditugaskan kepadanya sebagai guru, pekerja, pengacara, dll., pembentukan masyarakat yang adil dan baik akan lebih

mudah. Dia menyebut teorinya sebagai "tempat saya dan tugasnya" untuk menjadi fondasi utama keadilan.

Setiap individu memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda, sehingga tempatnya pun berbeda-beda. Karena itu, setiap individu harus melakukan semua tugasnya, jujur, dan efisien sesuai dengan tempat di mana ia ditugaskan di dalam masyarakat. Namun, dalam skema sosial Bradley, setiap orang berhak memilih tempat tugasnya sendiri. Oleh karena itu, ia dapat mengejar apa saja yang diinginkannya, tetapi begitu ia memilih tempatnya, ia harus melakukan pekerjaannya dengan penuh pengabdian sehingga memungkinkan kemajuan bidang keadilan sosial diperluas untuk kepentingan semua orang.

Dalam pandangan Bradley, ini adalah cara yang tepat untuk mencapai kebaikan individu dan sosial dan tidak ada kontradiksi antara keduanya. Jadi, cita-cita moral Bradley menganut gagasan bahwa kehidupan seseorang bersama dengan kewajiban moralnya harus saling melengkapi dirinya dalam menjalankan profesi-profesi yang telah ditetapkan sebagai tugas. Sebagian bisa dijalankan melalui cara hukum dan institusi, bahkan lebih daripada itu oleh kesadarannya sendiri untuk memberikan kepada manusia kehidupan yang disukainya dan harus hidup (Bradley, 1952).

3. *Marxisme*

Pandangan Marxis tentang keadilan sosial mempercayai bahwa gagasan tentang keadilan telah berkembang selama berabad-abad. Perubahan Keadilan sosial dari masa ke masa atas dasar hubungan ekonomi. Struktur ekonomi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan dan pemeliharaan keadilan sosial.

Marxisme meletakkan keadilan sosial dalam konteks persoalan kelas. Dalam sejarah perjalanan manusia, menurut pandangan kaum Marxis telah terjadi perjuangan berkelanjutan antara yang 'kaya' dan 'tidak' yang tidak pernah usai. Atas nama keadilan sosial, kaum Marxis menolak adanya eksploitasi kelas dalam tatanan sistem sosial masyarakat, khususnya struktur ekonomi. Baginya keadilan tidak akan bisa dicapai dengan cara seperti itu,

yang ada adalah penindasan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar. Menurut kaum Marxis akar masalah eksploitasi berakar pada struktur ekonomi itu sendiri.

Oleh karena itu, etika Marxis yang pertama adalah mengasosiasikan konsep keadilan dengan gagasan membebaskan masyarakat dari mengeksploitasi kelas, dan keadilan sosial mencapai puncaknya dalam masyarakat komunis, di mana semua jejak perbedaan sosial dan ekonomi menghilang (Rosenthal dan Yudin, 1967).

Dengan kata lain, dalam sistem sosial yang masih mendasarkan dominasi kepemilikan pribadi, di mana seseorang adalah pemilik dan yang lainnya adalah tenaga kerja, maka keadilan yang sebenarnya tidak akan mungkin terwujud dan tetap tidak mungkin untuk menghentikan eksploitasi. Oleh karena itu, revolusi proletariat harus dilakukan dengan diikuti penggulingan kapitalisme dan dilanjutkan dengan pembentukan sosialisme atau komunisme, dengan demikian menghapuskan kepemilikan pribadi akan menghapus kelas-kelas dan semua bentuk ketidaksetaraan, hanya dengan cara itulah yang akan membantu mencapai keadilan sosial. Dalam berbagai karyanya, Marx dan Engels telah menekankan tentang teori eksploitasi dan perbaikannya, yaitu komunisme (Marx dan Engels 1952; 1844 dll.) Pada tahap selanjutnya, Lenin, Stalin dan Mao telah memberikan kontribusi signifikan dalam karya masing-masing tentang teori komunisme.

Laski memuji sosialisme Karl Marx, menurutnya, Sosialisme pada dasarnya adalah pendekatan humanis. Laski kemudian menambahkan gagasan baru tentang kebebasan untuk kesetaraan ekonomi. "Kesetaraan harus ada hingga ambang kecukupan dan identitas tanggung jawab untuk kebutuhan primer, dan ini adalah apa yang dimaksud dengan keadilan" (Laski, 1925 dan 1948). Menurut Laski, pentingnya kebebasan merupakan hal yang akan mendorong orang untuk melakukan apapun yang dibutuhkan atas dasar kesetaraan. Laski berpendapat bahwa

sosialisme dan persekutuan adalah hal yang sama, dan baginya, kaum sosialis lebih terlihat bahagia di dunia sosialis yang egaliter.

Teori-teori komunitarian terakhir menyatakan bahwa kriteria keadilan bergantung pada 'lingkungan', di mana masalah distribusi dipertimbangkan. Misalnya, keadilan ekonomi dan politik berbeda, maka standar keadilan selalu relatif sama terhadap pemahaman dan harapan masyarakat tertentu saat ini (Walzer, 1983). Oleh karena itu, gagasan Marxian tentang komunisme atau keadilan telah dimodifikasi dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat dan situasi ke situasi, meskipun intinya tetap sama, yakni kesejahteraan manusia.

4. Eksistensialisme

Para eksistensialis tidak menerima keadilan sebagai 'kebijakan alami' seperti yang dilakukan oleh filsuf Jerman Nietzsche. Para kaum eksistensialis mengatakan bahwa manusia pada dasarnya bebas. Manusia membuat cita-citanya sendiri dengan tujuan untuk mewujudkan sistem sosial tertentu di masa depan.

Kaum eksistensialis berpendapat bahwa kehidupan manusia adalah perjuangan yang terus menerus di tengah-tengah kesatuan proses pilihan. Dalam pandangan Jean Paul Sartre, manusia tidak bisa lepas dari praktek kebebasan karena kebebasan melekat dalam eksistensi umat manusia. Kebebasan akan tetap hidup sepanjang keberadaan manusia terus berlanjut.

Kebebasan manusia tidak terbatas, artinya, kebebasan tidak dapat dihancurkan oleh hukum atau aturan moral apapun; tidak juga dapat diakali oleh paksaan ideal atau sistem kewajiban apapun. Kenyataan ini, bagaimanapun, tidak membebaskan manusia dari tanggung jawab, yang merupakan satu-satunya dasar gagasan eksistensial keadilan.

Manusia bertanggung jawab atas semua cita-citanya, yang ia pilih sebagai makhluk bebas, apakah cita-cita ini terkait dengan keadilan, moralitas, demokrasi atau kesejahteraan ekonomi. Hanya cita-cita manusia atau sistem yang tidak adil yang mengilhami dia untuk mengejar tindakannya sendiri. Singkatnya, Sartre berkata: "Saya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri dan juga untuk

orang lain. Dalam semangat pilihan saya, saya menciptakan citra (konsep) tertentu dari manusia ... ” (Sartre, 1947).

5. Teori Rawls

Menurut Rawls, Prinsip unsur-unsur keadilan yang paling khas adalah ketidaksetaraan dalam alokasi barang diizinkan hanya jika mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat yang paling tidak mampu. Menurut Rawls, setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan. Kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya bisa memberikan manfaat besar bagi kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan, dan kesetaraan serta kesempatan yang adil terbuka untuk semua orang (Rawls, 1972).

Konsep Rawls tentang keadilan sosial mungkin yang paling berpengaruh. Rawls mengkritik utilitarianisme sebagai kemampuan untuk membenarkan konsentrasi barang-barang yang hanya menguntungkan kalangan masyarakat atas dengan dasar bahwa itu demi kebaikan yang lebih besar. Konsep Rawls tentang keadilan distributif menyatakan bahwa "semua nilai sosial ... harus didistribusikan secara merata kecuali distribusi yang tidak merata dari salah satu atau semua nilai ini adalah untuk keuntungan semua orang".

Dua prinsip dasar dari teori Rawls tentang keadilan sosial adalah: Pertama, Setiap orang memiliki hak yang sama terhadap sistem kebebasan personal. Kedua, Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya bisa memberikan keuntungan terbesar bagi masyarakat yang paling tidak diuntungkan dalam sistem sosial, sehingga orang yang paling miskin bisa mendapatkan hak yang cukup. Selain itu pengaturan ketimpangan sosial memberikan peluang yang adil kepada semua orang untuk berada dalam posisi yang setara, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh posisi dalam sistem sosial masyarakat. Rawls memberi perhatian khusus kepada mereka yang kurang beruntung. 'Prinsip-prinsip pemulihannya' asalkan mereka yang memiliki aset lebih sedikit dibanding orang lain pada umumnya harus diberi

kompensasi. Pandangan keadilan sosial ini berkaitan dengan keadilan dalam bentuk sistemik, yang diterapkan kepada masyarakat secara keseluruhan daripada individu. Prinsip ini menekankan distribusi yang tidak merata atas dasar kebutuhan atau persyaratan individu dengan fokus khusus pada kebutuhan yang kurang beruntung, dan persamaan kesempatan.

6. Libertarianisme

Sebuah tantangan yang diajukan oleh para kritikus seperti Hayek dan Nozick yang menolak gagasan keadilan sosial. Mereka meminta untuk kembali ke pemahaman tradisional tentang keadilan sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan hak-hak yang mapan. Argumen mereka dimulai dari titik awal filosofis yang berbeda tetapi mengandung tiga klaim utama (Hayek, 1976; Nozick, 1974).

Pertama, gagasan tentang keadilan sosial mengasumsikan bahwa ada beberapa lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan distribusi manfaat kepada masyarakat, padahal sebenarnya, distribusi ini muncul melalui aktivitas yang tidak terkoordinasi dari banyak agen, dan tanpa tujuan pada hasil secara keseluruhan. Kedua, pencarian keadilan sosial melibatkan cara untuk mengganti ekonomi pasar dengan model birokrasi yang melemahkan. Cara tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melakukan kontrol penuh terhadap aliran sumber daya kepada individu. Ketiga, pencarian keadilan sosial juga melibatkan gangguan mendasar terhadap kebebasan pribadi, sejauh orang harus dihalangi untuk melakukan apa yang mereka sukai dengan sumber daya yang dialokasikan untuk mereka, jika itu pola distribusi yang terbaik maka harus dipertahankan. Hingga saat ini, terkait dengan Keadilan, perdebatan kaum liberal masih hanya berfokus pada proses bukan pada hasil. Sebagian kritikus beranggapan jika prosedur konversi untuk memperoleh dan mentransfer manfaat telah diikuti, maka akan tidak masuk akal untuk menggambarkan distribusi sumber daya yang dihasilkan sebagai sesuatu yang adil atau tidak adil.

7. Ambedkarisme

“Keadilan selalu membangkitkan gagasan kesetaraan dan proporsi 'kompensasi'. Kesetaraan menandakan aturan dan peraturan kesetaraan, hak dan kebenaran berkaitan dengan persamaan nilai. Jika semua manusia setara, maka semua manusia memiliki esensi yang sama dan esensi umum untuk memberi hak kepada mereka atas hak dasar yang sama dan kebebasan yang setara”(Ambedkar, 1987). Ambedkar juga memiliki konsep keadilan yang sangat liberal dalam arti bahwa ia dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan. "Keadilan", bagi Ambedkar "hanyalah nama lain untuk kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan".

Menurut Ambedkar, demokrasi politik tidak akan dapat bertahan kecuali ada dasar demokrasi sosial yang mengakui kesetaraan, kebebasan, dan persaudaraan sebagai prinsip-prinsip kehidupan. Prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan ini tidak diperlakukan sebagai hal yang terpisah dalam trinitas tetapi membentuk kesatuan trinitas dalam arti bahwa menceraikan satu dari yang lain adalah untuk mengalahkan tujuan demokrasi (Ambedkar, 1994). Oleh karena itu, bagi Ambedkar, demokrasi adalah unsur penting untuk mencapai keadilan sosial.

Konsep Ambedkar tentang keadilan sosial berarti cara hidup untuk memberi setiap manusia tempat yang tepat di dalam tatanan masyarakat. Untuk hidup terhormat, maka harus menghormati semua orang, tidak melukai siapa pun, dan memberikan hak setiap orang tanpa diskriminasi. Sila lain dari keadilan sosial adalah: supremasi aturan konstitusional, kesetaraan di depan hukum, pemberian hak-hak dasar, pelaksanaan tugas, kepatuhan pada kewajiban hukum dan sosial, dan akhirnya keyakinan yang teguh pada nilai keadilan, kesetaraan kebebasan, persaudaraan dan martabat kepribadian manusia. Konsep keadilan, dalam pandangan Ambedkar, bukan hanya terletak pada soal mendistribusikan kelimpahan materi di antara orang-orang tetapi pada dasarnya merupakan cara hidup yang didasarkan pada saling menghormati dan menghargai, dan bersatu sebagai anggota masyarakat yang setara. Oleh karena itu, ukuran keadilan sosial bukan kemajuan

material, tetapi kelimpahan dan proliferasi nilai-nilai manusia di antara orang-orang (Jatava, 1998). Oleh karena itu, konsep keadilannya adalah proses yang holistik dan berkesinambungan.

Selain tujuh aliran tentang keadilan sosial seperti disebutkan di atas, banyak juga para sarjana yang melontarkan teorinya terkait keadilan sosial. Brunetto Latini misalnya (dalam Sartori, 1965), mengatakan bahwa “Sama seperti keadilan adalah hal yang sama, jadi ketidakadilan itu tidak setara; dan dengan demikian dia yang ingin menegakkan keadilan mencoba menyamakan hal-hal yang tidak setara”. Dengan demikian, keadilan adalah bermakna menjunjung tinggi nilai-nilai 'kesamaan'.

Sementara Hart (1970), mengkonseptualisasikan keadilan dalam kaitannya dengan hukum dan moralitas. Menurutnya, “keadilan bukan dengan perilaku individu tetapi dengan cara-cara di mana kelas-kelas individu diperlakukan. Inilah yang dimaksud keadilan, di mana ada relevansi khusus terhadap hukum dan lembaga publik atau sosial lainnya. Ini adalah yang paling umum dan paling sah dari kebajikan. Walaupun begitu, prinsip keadilan tidak selalu fokus pada moralitas, dan tidak semua kritik terhadap hukum yang dibuat atas dasar moral dibuat atas nama keadilan. Hukum dapat dilihat buruk secara moral hanya karena mereka mengharuskan seorang manusia untuk melakukan tindakan tertentu yang secara moral melarang individu tersebut untuk melakukannya, atau karena mereka mengharuskan seorang manusia untuk menjauhkan diri dari melakukan hal-hal yang secara moral wajib” (Hart, 1970).

Tentang keadilan, ia menjelaskan lebih lanjut “bahwa individu berhak untuk menghormati satu sama lain dalam posisi relatif tertentu dari kesetaraan atau ketidaksetaraan. Ini adalah sesuatu yang harus dihormati dalam perubahan-perubahan kehidupan sosial ketika beban atau manfaat jatuh untuk didistribusikan. Itu juga merupakan sesuatu yang harus dipulihkan ketika itu terganggu. Oleh karena itu, keadilan secara tradisional dianggap sebagai mempertahankan atau memulihkan keseimbangan atau proporsi, dan itu mengamalkan ajaran yang sering dirumuskan sebagai

'memperlakukan kasus yang serupa', meskipun kita perlu menambahkan, 'memperlakukan kasus yang berbeda secara berbeda'.

E. Kebutuhan akan Keadilan Sosial

Kesenjangan antara cita-cita keadilan sosial yang berkembang pada abad sebelumnya dengan kenyataan saat ini jelas jauh dari kata ideal. Adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang kuat, menjadi sangat jelas pada abad ke-19 dan ke-20. Pada kenyataannya, sulit untuk mendamaikan antara persamaan sosial dengan pelestarian kebebasan individu. Para elit yang mendominasi negara-negara yang sedang berkembang masih saja menahan hak-hak politik dari mayoritas penduduk (terutama dari perempuan dan orang kulit berwarna) dan mengabaikan hak-hak sosial mereka.

Marx (1818-1883) berpendapat bahwa manusia tidak memiliki sifat bawaan yang tetap, tetapi ditentukan oleh hubungan sosial mereka, yang pada gilirannya, tergantung pada struktur ekonomi masyarakat dan kelas-kelas yang dihasilkannya. Dia menolak gagasan Hobbes bahwa ketidakadilan disebabkan oleh persaingan manusia, keegoisan dan agresi. Marx berpendapat bahwa akar ketidakadilan terletak pada struktur politik-ekonomi yang didasarkan pada penaklukan, diskriminasi, eksploitasi dan hak istimewa. Keadilan akan menang ketika individu menerima apa yang mereka butuhkan atas dasar kemanusiaan mereka dan bukan pada apa yang mereka layak karena asal kelas sosial atau produktivitas. Ide keadilan sosial ini menekankan redistribusi atas dasar kebutuhan dan nilai manusia, sebagai lawan dari apa yang layak bagi individu berdasarkan status sosial atau produktivitas.

Gagasan tentang kontrak sosial antara individu dan pemerintah mereka, untuk mematuhi aturan umum dan menerima kewajiban yang terkait, muncul sebagai cara menyeimbangkan hak dan kewajiban bersama. Paham Liberal menekankan pelestarian kebebasan individu (termasuk hak kepemilikan) dan Marxis menekankan pencapaian kesetaraan sosial.

Perekonomian global saat ini telah tumbuh dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dibantu oleh teknologi

baru, orang, modal, barang antar negara yang bergerak dengan mudah, dan kecepatan telah menciptakan jaringan ekonomi global yang saling bergantung satu sama lain dan mempengaruhi hampir setiap orang di planet ini. Sementara globalisasi telah menciptakan peluang dan manfaat bagi banyak orang, pada saat yang sama jutaan pekerja dan pengusaha di seluruh dunia harus menghadapi tantangan baru. Ekonomi global telah mengungsikan para pekerja dan perusahaan ke lokasi-lokasi baru, mengakibatkan akumulasi atau pelarian modal secara tiba-tiba, dan menyebabkan ketidakstabilan keuangan yang pada gilirannya menyebabkan krisis ekonomi global tahun 2008. Meskipun manfaatnya jelas, globalisasi tidak membawa kepada era kemakmuran bagi semua orang. Bahkan, terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang kuat dan telah menghasilkan jutaan pekerjaan baru sejak awal 1990-an hingga krisis 2008, ketimpangan pendapatan juga tumbuh secara dramatis di sebagian besar wilayah di dunia. Distribusi upah pribadi telah menjadi lebih tidak setara, dengan kesenjangan yang terus meningkat hingga mencapai 10 persen. Selain itu, enam tahun setelah krisis ekonomi dan sosial tahun 2008, situasi ketenagakerjaan global tetap tidak merata: jika ekonomi maju tertentu berhasil memulihkan sebagian lapangan kerja yang hilang, ekonomi lain masih dihadapkan dengan tantangan signifikan berkenaan dengan pasar tenaga kerja dan prospek sosial mereka. terus memburuk. Dari sudut pandang ekonomi, indikator menunjukkan bahwa profitabilitas dan pasar saham telah pulih di sebagian besar negara. Gaji eksekutif juga meningkat, menyusul jeda segera setelah krisis. Oleh karena itu, masalah utamanya adalah bagaimana menerjemahkan keuntungan ini menjadi investasi produktif. Lebih dari 30 juta pekerjaan masih diperlukan untuk mengembalikan pekerjaan ke tingkat sebelum krisis. Kenyataannya bahwa krisis global telah memiliki dampak negatif yang signifikan bagi pasar tenaga kerja dan bahwa pemulihan terbukti tidak pasti dan sulit dipahami telah semakin menegaskan perlunya pertumbuhan inklusif.

Ketimpangan tidak hanya menyebabkan penurunan produktivitas tetapi juga melahirkan kemiskinan, ketidakstabilan sosial dan bahkan konflik. Dalam kondisi ini, komunitas internasional telah mengakui

akan kebutuhan untuk menetapkan beberapa aturan dasar dan jaminan untuk memastikan bahwa globalisasi menawarkan kesempatan yang adil dan kemakmuran bagi semua orang. Krisis ekonomi global - dari tahun 2008 dan sekarang - telah mengakibatkan banyak konsekuensi bagi warga negara, seperti kesejahteraan individu yang rentan dan sistem negara yang tidak siap untuk kemungkinan seperti itu. Kondisi tersebut tentu saja memaksa lembaga negara untuk segera menyusun kembali sistem kebijakan sosial yang cepat melalui perubahan – perubahan mendasar kelembagaan.

Sementara globalisasi telah menciptakan peluang dan manfaat bagi banyak orang, pada saat yang bersamaan jutaan pekerja dan pengusaha di seluruh dunia harus menghadapi tantangan baru. Ekonomi global telah memindahkan mereka dan perusahaan ke lokasi-lokasi baru, sehingga mengakibatkan akumulasi atau pelarian modal secara tiba-tiba, dan menyebabkan ketidakstabilan keuangan yang pada gilirannya menyebabkan krisis ekonomi global tahun 2008. Meskipun manfaatnya jelas, globalisasi tidak memberikan kemakmuran bagi semua orang. Walaupun pernah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan telah menghasilkan jutaan pekerjaan baru sejak awal 1990-an hingga krisis tahun 2008, ketimpangan pendapatan juga terus tumbuh secara dramatis di sebagian besar wilayah di dunia. Distribusi upah pribadi menjadi lebih tidak setara, dengan kesenjangan yang terus tumbuh hingga mencapai 10 persen (ILO, 2018). Enam tahun sejak krisis ekonomi dan sosial tahun 2008 berlalu, situasi ketenagakerjaan global tetap tidak merata: jika beberapa bagian negara maju berhasil memulihkan sebagian lapangan kerja yang hilang, ekonomi sebagian negara lain masih sebaliknya, mereka dihadapkan dengan tantangan yang cukup signifikan berkenaan dengan pasar tenaga kerja dan prospek sosial mereka yang terus memburuk. Dari sudut pandang ekonomi, di sebagian negara dunia, beberapa indikator menunjukkan bahwa profitabilitas dan pasar saham telah pulih dari krisis. Gaji eksekutif juga meningkat, menyusul proses pemulihan yang baik setelah krisis. Oleh karena itu, masalah utamanya adalah bagaimana menerjemahkan keuntungan ini menjadi investasi produktif. Lebih dari 30 juta pekerjaan hingga kini masih

diperlukan oleh orang-orang di seluruh dunia untuk mengembalikan pekerjaan mereka, paling tidak seperti sebelum terjadinya krisis global. Ini menunjukkan bahwa krisis global memiliki dampak negatif yang sangat signifikan bagi pasar tenaga kerja. Dampak lainnya terkadang membuat proses pemulihan ekonomi berada dalam ketidakpastian dan sulit dipahami. Kondisi tersebut semakin menegaskan perlunya pertumbuhan inklusif.

Ketimpangan tidak hanya menyebabkan penurunan produktivitas tetapi juga melahirkan kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan bahkan konflik sosial. Dalam pandangan ini, komunitas dunia internasional telah mengakui akan kebutuhan untuk menetapkan beberapa aturan dasar terkait globalisasi, serta memastikan bahwa globalisasi juga menawarkan kesempatan yang adil dan bisa membawa kemakmuran bagi semua orang. Secara keseluruhan keadilan sosial penting untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya keadilan sosial dan tanggung jawab akan membawa pada kepuasan, kesenangan hidup dan rasa hormat serta kesetiaan kepada para pemimpin. Orang yang diperlakukan secara tidak adil akhirnya akan memberontak dan membuat pelakunya membayar mahal (revolusi). Selalu ada harga yang harus dibayar untuk ketidakadilan sosial, semakin lama manusia diperlukan dalam ketidakadilan, maka semakin lama perasaan ini akan bertahan, akibatnya keadaan akan semakin buruk dan membuat banyak orang semakin putus asa. Pada akhirnya ia akan jatuh ke dalam kebencian terhadap orang-orang yang dianggap telah menciptakan ketidakadilan, begitu kita melewati jalan itu, maka tidak ada jalan untuk kembali. Kebencian tidak tahu rasa takut, belas kasihan, ukuran baik atau kesederhanaan lainnya. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menghancurkan, bahkan menghancurkan para penegaknya. Machiavelli memperingatkan semua pemimpin dan para raja untuk menjadi orang yang sangat benci terhadap kebencian. Sebagai seorang pemimpin, idealnya harus ditakuti dan dihormati tetapi tidak pernah dibenci, karena seseorang yang membenci akan menghancurkan kepemimpinan bahkan berakibat kematian. Ada banyak contoh kasus ketidakadilan sosial yang berakhir sangat brutal dan berdarah. Misalnya, Revolusi Perancis tahun 1789, revolusi Oktober 1917, Revolusi Mao di Cina, serta ratusan lainnya

dalam sejarah umat manusia. Semuanya mengakibatkan pemusnahan kepemimpinan dan seluruh garis keturunan mereka. Dari peristiwa-peristiwa terjadinya konflik, kita bisa melihat betapa pentingnya keadilan sosial untuk menjaga dan mewujudkan stabilitas kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial menjadi penting karena mempromosikan keragaman dan kesetaraan masyarakat. Memiliki banyak persamaan dan keragaman dalam masyarakat adalah hal yang baik, karena hal tersebut bisa mempromosikan terwujudnya peluang yang sama, pertumbuhan bersama dan kesejahteraan sosial.

F. Prinsip-prinsip dan Isu Keadilan sosial

Masalah keadilan sosial dapat terjadi dalam kaitannya dengan hampir semua aspek masyarakat di mana ketidaksetaraan dapat muncul sebagai akibat prasangka atau kebijakan yang tidak adil. Masalah-masalah keadilan sosial dapat digolongkan ke dalam dua kategori, meskipun sering kali saling bergantung antar satu dengan yang lain (Perlakuan Antar-Sosial dan Peraturan Pemerintah yang Tidak Sama).

Banyak sekali isu-isu keadilan sosial yang cukup mengkhawatirkan dan tidak seharusnya terjadi dalam era industri modern. Isu-isu keadilan sosial bisanya berbentuk prasangka-prasangka yang melekat terhadap individu. Prasangka-prasangka ini paling sering bermanifestasi dalam kategori sosiologis seperti: ras, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, agama, kebangsaan, pendidikan, dan kemampuan mental atau Fisik. Peraturan Pemerintah yang tidak setara melalui undang-undang dan peraturan yang secara sengaja atau tidak menciptakan kondisi yang menghalangi, membatasi, atau bahkan menolak akses kelompok – kelompok dia atas untuk mendapatkan peluang dan sumber daya yang sama masih sering terjadi. Undang-undang ini dapat secara sengaja (secara eksplisit) atau tidak disengaja (secara implisit) menciptakan kondisi ketidakadilan sosial.

Beberapa bidang kebijakan pemerintah di bawah ini sering menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Bidang-bidang tersebut meliputi: Undang-Undang Pemilu, Hukum Pemolisian (Lalu lintas, penelusuran, dan penyitaan), Hukum Lingkungan (air bersih, udara, dan pembuangan limbah industri), Undang-undang Perawatan

Kesehatan (yaitu asuransi dan jaminan sosial), Undang-undang Pendidikan (segregasi dan integrasi sekolah publik), dan Undang-undang Ketenagakerjaan (hak pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja).

Prinsip-prinsip keadilan sosial berusaha untuk mengenali dan mengatasi masalah status sosial ekonomi, lingkungan, dan faktor budaya. Prinsip-prinsip keadilan sosial mengacu pada nilai-nilai yang mendukung tindakan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan ketidakadilan; mempromosikan inklusivitas keanekaragaman; dan membangun lingkungan yang mendukung semua orang. Prinsip keadilan sosial meliputi: kesetaraan, keragaman dan lingkungan yang mendukung. Kesetaraan berarti bahwa sumber daya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan individu dan populasi dengan tujuan yang diinginkan dari persamaan hasil. Ketimpangan sosial adalah kondisi akses yang tidak merata terhadap manfaat milik masyarakat mana pun. Dalam masyarakat yang sepenuhnya sama, setiap warga negara sama-sama mampu berkontribusi terhadap keseluruhan kesejahteraan masyarakat itu, dan mereka sama-sama dapat memperoleh manfaat dari keanggotaan mereka dalam masyarakat itu. Ketimpangan sosial biasanya merupakan hasil dari perlakuan antar-sosial (bias dan prasangka) yang menginformasikan peraturan pemerintah yang tidak adil. Ketimpangan sosial dapat dibagi menjadi dua mode, yaitu: langsung dan tidak langsung. Ketidaksetaraan Sosial Langsung terjadi ketika perlakuan yang tidak adil terhadap suatu kelompok (atau kelompok) yang disengaja baik dalam kapasitas masyarakat maupun pemerintah. Ketimpangan langsung adalah tindakan yang disengaja dengan mengambil sumber daya, peluang, dan atau sebagian hak masyarakat. Sementara, ketidaksetaraan (ketimpangan) Sosial Tidak Langsung terjadi ketika perlakuan yang tidak adil terhadap suatu kelompok (atau kelompok) bukanlah tujuan eksplisit dari suatu kebijakan atau tindakan, tetapi tetap menghasilkan ketidaksetaraan sosial. Ketimpangan sosial tidak langsung dapat dihindari jika konsekuensinya dijelaskan melalui pendidikan dan transparansi.

Sedangkan Keanekaragaman mengacu pada perbedaan yang ada antara individu dan kelompok orang. Beberapa negara adalah

negara multikultural yang sangat beragam, yang membutuhkan sejumlah langkah untuk memastikan setiap kelompok masyarakat dalam keanekaragaman. Sementara Lingkungan yang mendukung adalah lingkungan di mana orang hidup, bekerja dan bermain yang melindungi orang dari ancaman terhadap kesehatan dan yang meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat pilihan promosi kesehatan.

Sebagai catatan ada dua prinsip dasar keadilan yang berevolusi dari negosiasi antara orang-orang yang mewakili di posisi semula. Prinsip pertama, terutama berkaitan dengan kebebasan individu dalam penugasan hak dan kewajiban. Prinsip ini menetapkan “setiap orang memiliki hak yang sama dengan kebebasan dasar paling luas yang kompatibel dengan kebebasan yang sama untuk orang lain”. Hak dasar bersama ini termasuk, kebebasan politik (hak untuk memilih dan memenuhi syarat untuk jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berkumpul; kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir; kebebasan pribadi bersama dengan hak untuk memiliki properti pribadi; dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan penyitaan sebagaimana didefinisikan oleh konsep aturan hukum (Rawls, 1971). Kewajiban mengikuti kebebasan ini, beberapa di antaranya termasuk saling menghormati dan saling membantu, tugas untuk tidak mencelakakan, dan kewajiban untuk melakukan bagian Anda dalam masyarakat. Rawls (1971) menyatakan bahwa Kita tidak memperoleh keuntungan dari upaya kerja sama orang lain tanpa melakukan pembagian yang adil. Prinsip kedua, atau dikenal sebagai "prinsip perbedaan", berurusan dengan lembaga-lembaga dasar yang menyatakan bahwa "ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua orang dan dan memungkinkan terbuka untuk semua.

Menurut Rawls (1971), kedua prinsip di atas jatuh dalam “urutan serial atau leksikal” dengan prinsip kebebasan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Juga, tidak ada pertukaran antara kebebasan dasar dan keuntungan sosial dan ekonomi. Dalam pernyataan ringkasannya, Rawls (1971) menyatakan bahwa “semua nilai sosial, kebebasan dan

peluang, pendapatan dan kekayaan, serta dasar penghormatan diri harus didistribusikan secara merata kecuali distribusi yang tidak merata dari semua, atau semua, nilai-nilai ini adalah untuk keuntungan semua orang.

Prinsip perbedaan, yang didasarkan pada gagasan persamaan kesempatan, mengarahkan kita untuk memberikan perhatian ekstra kepada mereka yang, bukan karena kesalahan mereka sendiri, menemukan diri mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan. Misalnya, sumber daya dapat dialihkan ke pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung. Memperbaiki ketidakadilan tidak hanya meningkatkan prospek keuangan seseorang, tetapi, mengingat kebaikan utama dari harga diri seseorang, peningkatan kepercayaan diri individu, kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat, berkontribusi pada upaya mencapai kekayaan mereka sendiri, dan pencapaian rencana hidup. Rawls memperingatkan kita bahwa harus ada batasan terhadap ketidaksetaraan ini dan mereka tidak boleh melanggar prinsip-prinsip keadilan sebelumnya termasuk kebebasan dan kesempatan yang adil, "penyebaran pendapatan dan kekayaan tidak boleh berlebihan dalam praktek, mengingat institusi latar belakang yang diperlukan". Keadilan adalah pengaturan sosial melalui Kontrak sosial yang menekankan "harmoni kepentingan".

G. Keadilan Sosial dan Kebijakan Sosial

Keadilan sosial didasarkan pada persamaan hak untuk semua manusia, dan kemungkinan mereka untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ekonomi dan sosial tanpa diskriminasi (ILO, 2011). Tetapi, di manakah keseimbangan antara persamaan dan ketidaksetaraan, antara individu dan kolektif berakhir? Jawaban yang masuk akal adalah bahwa hal itu harus berada pada titik yang adil. Namun, bagaimana kita memutuskan apa yang adil? Pertanyaan ini sesuai untuk semua bidang kebijakan, tetapi sangat penting untuk kebijakan sosial.

Gagasan tentang keadilan dapat diteorikan dalam banyak cara, tetapi teori awal yang sangat berguna adalah pemikiran Aristoteles. Aristoteles membagi gagasan tentang keadilan menjadi dua bagian

utama; keadilan korektif dan keadilan distributif. Peradilan distributif mengacu pada pembagian saham dalam manfaat atau beban sosial, dan dengan demikian terkait dengan kebijakan pajak atau pengeluaran. Sementara Keadilan korektif berkaitan dengan perbaikan ketidakadilan dan dengan demikian memerlukan intervensi kebijakan sosial tertentu. Mengikuti pemikirannya Aristoteles, pemahaman tentang keadilan sosial tampaknya terus mengalami proses eksplorasi dan diperdebatkan. Bahkan jika semua setuju bahwa 'keadilan' adalah hal yang agak baik, beberapa orang mungkin berpikir bahwa keadilan mengacu pada perlakuan individu yang sama (kesetaraan), sementara yang lain memahami keadilan dalam hal pemberian hak asasi manusia. 'Konsep' keadilan adalah gagasan umum, tetapi para teoretisi dan filsuf politik memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang 'konsep' keadilan. Menurut Gallie (1956), konsep-konsep moral tertentu "pada dasarnya masih diperebutkan". Misalnya, baik, benar, dan adil, itu semua adalah konsep-konsep moral, yang tampaknya memiliki makna umum. Semua orang setuju bahwa konsep moral 'baik' cocok untuk mengurangi kemiskinan absolut, tetapi kriteria untuk penerapan istilah 'baik' berbeda. Tidak semua orang percaya bahwa kriteria untuk 'baik' harus mengacu pada konsepsi kehidupan manusia yang berkembang dan atau kesejahteraan sosial yang makmur. Beberapa filsuf tidak mengacu pada konsep yang sama tetapi hanya identik. Arti konsep 'baik' menjadi itu. Pada mulanya, keadilan terdiri dari dua aktor, yakni institusi negara dengan segala penerapan kebijakan sosialnya. Kedua, keadilan yang terletak pada sejumlah ide, proses kerja sama untuk menyediakan kebutuhan hidup manusia yang berharga, dan bagaimana distribusi produk barang diperebutkan karena setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep dan jasa untuk menjamin kehidupan semua orang yang bekerja sama di dalamnya.

Dalam "Teori Keadilan" Rawls yang terkenal (1972), perbedaannya terletak diantara konsep keadilan dan konsepsi tertentu tentang keadilan. Baginya keadilan sebagai '*fairness*' adalah konsepsi yang paling tepat untuk keadilan, dan kesepakatan tentang kriteria keadilan untuk masyarakat yang adil sangat tepat. Dengan kata lain

dalam konsep Rawls, pembedaan konsepsi tidak menyiratkan bahwa konsep keadilan pada dasarnya dipertentangkan dan juga tidak semua konsep yang diperebutkan adalah konsep yang 'secara esensial' dipertentangkan. Perbedaan Konsep (konsepsi) juga ditemukan dalam teori Dworkin (1988). Baginya, 'kesetaraan' bukanlah 'konsep yang pada dasarnya diperebutkan' karena identifikasi dan penerapan merupakan kriteria yang stabil dan layak. Kesetaraan lebih merupakan konsep 'interpretatif'; yaitu konsep yang tunduk pada interpretasi.

Hayek (1960) yang mengkritisi pemikiran Rawls membantah validitas gagasan keadilan sosial. Menurutnya, prinsip keadilan sosial hanyalah sebuah 'anathema' (Hayek 1976). Dia setuju untuk negara yang kuat yang tidak mempromosikan keadilan dan mengesampingkan redistribusi kekayaan, tetapi memberikan peluang kepada pasar bebas untuk mengatur kesejahteraan. Untuk Nozick (1974), besar-besaran ketidaksetaraan menurut distribusi pasar bebas adalah sempurna. Dia menentang setiap gagasan keadilan sosial dan negara kesejahteraan. Sementara dalam teorinya, Rawls (1972) menggabungkan unsur sosial yang kuat yakni antara keadilan dengan redistribusi pendapatan, kekayaan, dan kekuasaan. Menurut Rawls, masalah sosial dan kesenjangan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mereka mendapat keuntungan dari yang terburuk. Rawls berpendapat bahwa orang-orang yang berada di 'posisi asli' akan lebih memilih hal yang aman melalui sistem kesetaraan, bukannya mengambil risiko ketidaksetaraan. Singkatnya, Rawls mungkin dianggap sebagai pendukung kapitalisme negara kesejahteraan (Fitzpatrick, 2001).

Namun, makna keadilan sosial tetap ambivalen dan kontroversial. Dalam istilah-istilah egaliter yang sudah banyak diulas, keadilan dikonseptualisasikan sebagai utilitas, sebagai hak dan sebagai kontrak (misalnya Drake, 2001). Keadilan sosial adalah konsep yang sangat sulit untuk didefinisikan (Blakemore & Drake, 1996). Mungkin ini benar bagi mereka yang tertarik pada dimensi filosofis atau etis keadilan. Tetapi kurang benar, bagi mereka yang diilhami oleh tujuannya atau diyakinkan untuk peran vitalnya untuk kesejahteraan terlepas dari ideologi apapun selain humanisme. Bagi mereka,

keadilan sosial hanyalah situasi yang diinginkan, yang menyeimbangkan ketidaksetaraan dan kesejahteraan, dan ditegakkan melalui kebijakan redistributif yang mencakup implikasi egaliter.

Keadilan sosial mengandaikan negara melakukan intervensi untuk merealokasikan kekayaan dan hasil pasar. Setelah semua, definisi tentang keadilan sosial mengatur bagaimana hal-hal baik dan buruk dalam hidup harus didistribusikan di antara anggota masyarakat (Miller, 1999). Pada saat ini, kita berfokus pada paradigma redistribusi keadilan sosial yang diperluas untuk merangkul dimensi non-materi, 'meluas' di luar perhatian tradisional dengan distribusi pendapatan dan kekayaan (Lister, 2007). Berkaitan hubungan sosial dan kekuasaan, ini dengan sungguh-sungguh menegaskan bahwa masalah dominasi dan penindasan harus menjadi dasar bagi konsepsi keadilan sosial (Young, 1990). Aspek non-materi keadilan sosial melampaui distribusi ekonomi; mengidentifikasi kebutuhan akan keadilan yang berakar pada perjuangan untuk pengakuan (Fraser, 1997). Klaim pengakuan adalah tentang bagaimana orang diwakili (misalnya di media dan dalam debat politik); tentang sejauh mana pandangan orang dihitung; tentang kesucilaan dan martabat - sangat penting bagi orang-orang dari rasa diri mereka sendiri dan tempat mereka di dunia (Lister, 2007).

Paradigma pengakuan mencerminkan ketidakadilan - budaya dan atau simbolik yang tidak diakui dalam interaksi kehidupan sehari-hari (Fraser 1997). Hubungan antara pengakuan budaya dan redistribusi ekonomi sangat penting untuk kebijakan sosial, redistributif adalah salah satu pelengkap keadilan sosial, bukan penghambat atau tantangan keadilan sosial (Fraser & Honneth, 2003; Thomson, 2006). Dalam hubungan ini, dimensi representasi bisa meningkatkan paradigma pengakuan dalam penataan ulang analisis keadilan kontemporer (Fraser, 2005). Singkatnya, redistribusi dan pengakuan - termasuk representasi dan sifat timbal balik dari rasa hormat - mencerminkan elemen-elemen mendasar, yang seharusnya mendorong keadilan melalui kebijakan postmodern dan pluralisme. Keadilan sosial memasukkan pengakuan dan redistribusi untuk mengatasi dimensi ketidakadilan ekonomi, politik dan budaya. Maknanya, hal tersebut menjadi tuntutan kebijakan untuk menghormati, memberikan jaminan

sosial dan memberikan martabat (Lister, 2008). Penerapan paradigma pengakuan keadilan sosial sebagai penjelas, di mana politik kemiskinan juga merupakan 'politik pengakuan dan rasa hormat' (Lister, 2004). Boleh dibilang ini adalah bentuk canggih dari keadilan redistributif, yang memerlukan representasi dan pengakuan.

Keadilan sosial adalah istilah yang kuat tetapi sulit dipahami sebagai analisis kebijakan sosial, dan berkaitan dengan sejauh mana pengaturan sosial dapat dianggap adil (misalnya Alcock et al., 2002, Lister, 2007). Siapa yang harus mendapatkan apa, dan dengan elemen apa kita akan menilai bawa distribusi sosial telah adil?. Kebijakan menghasilkan redistribusi vertikal dan atau horizontal (Culyer, 1980). Se jauh mana redistribusi seperti itu dibenarkan dan bentuk mana yang harus diberi prioritas, tergantung pada cara memahami prinsip kesetaraan. Hal ini secara khusus mencerminkan keyakinan potensial bahwa beberapa komoditas langka tertentu - seperti kesehatan atau pendidikan - harus didistribusikan secara tidak merata daripada kemampuan untuk membayarnya.

Keadilan sosial melegitimasi prinsip 'persamaan redistributif' realokasi pendapatan dan kekayaan (Tobin, 1970). Prinsip ini mengarah pada berbagai kebijakan penyetaraan, yang mengubah distribusi awal dengan penyediaan tunjangan kesejahteraan. Dalam segala hal, distribusi yang adil secara sosial terutama berkaitan dengan penyediaan sumber daya material harus memadai untuk hidup dengan bermartabat, untuk mengatasi kerugian dan berkembang. Prinsip kesetaraan terletak pada akar konflik dalam politik (Brittan, 1968). Makna yang berbeda dari kesetaraan mencerminkan pemahaman yang sama tentang kebijakan sosial (Weale, 1993). Versi kesetaraan yang 'lebih luas' secara beragam telah disebut sebagai kesetaraan sosial, persamaan status, dan persamaan pandangan (Alcock et al, 2002). Hal tersebut mencerminkan pengakuan kesetaraan berdasarkan pandangan masing-masing individu dalam hubungan sosialn (Tawney, 1931). Kebanyakan dari mereka menjadi peletak dasar-dasar negara kesejahteraan – yang menginginkan alternatif untuk *laissez-faire* kapitalisme dan berjuang untuk reformasi kesejahteraan - persamaan sosial dianggap sebagai hal yang sangat penting (Fitzpatrick, 2001;

Offe, 1984). Dalam era yang berbeda, ini disebut 'strategi kesetaraan' (Tawney, 1931; Le Grand, 1982). Itu sama halnya dengan keharusan membentuk lembaga-lembaga sosial untuk memberikan akses yang sama terhadap barang-barang yang dibutuhkan orang-orang yang tidak beruntung (Tawney, 1931) - yaitu kebijakan sosial.

Setelah era negara kesejahteraan klasik, kebijakan sosial yang egaliter bermasalah dalam arti praktis dan dikritik karena hasil kebijakannya (Le Grand, 1982). Apa yang bisa kita lihat adalah bahwa hubungan antara kesetaraan (hasil) dan kebijakan sosial mengambil jeda ketika berproses menuju keadilan sosial (proses) melalui tujuan kebijakan distributif. Saat ini, ada perhatian khusus yang luar biasa terhadap kebijakan sosial untuk kesetaraan peluang (Blakemore & Drake, 1996). Paradigma ini, bagaimanapun, menjauhkan kebutuhan redistribusi untuk memerangi masalah sosial (ketidaksetaraan), dan meninggalkan sedikit ruang untuk bergerak menuju tujuan keadilan sosial. Kesamaan paradigma tentang peluang dapat juga dicirikan sebagai kompromi ideologis antara Kiri dan Kanan. Sebagai tujuan kebijakan, kesetaraan peluang mencakup penyesuaian terhadap kesetaraan kebebasan dan keadilan dalam distribusi ketidaksetaraan (Fitzpatrick, 2001). Namun, menyediakan peluang terbuka dan adil atau menghapus diskriminasi langsung pada hari ini, sama saja dengan mengabaikan ketidakadilan yang terjadi sebelumnya, yang mencegah peluang yang sama besar. Ini menggambarkan proses adil dengan hasil yang tidak setara. Ini yang disebut 'proses adil' cenderung mereproduksi kerugian, dan menyebutnya meritokrasi. Ini bermakna bahwa saat ini terjadi masalah distributif yang ber sifat saat kompleks – kualitas distribusi, pengenalan, dan representasi - memiliki fitur statis dan dinamis. Strategi untuk kesempatan yang sama mungkin sangat gagal untuk menghadapi yang kedua. Masyarakat yang tidak setara mungkin berhasil mengatasi masalah sosial mereka, tetapi mereka tidak menyelesaikannya (Donnison, 2006). Mendorong terwujudnya kesempatan yang sama hanya sebagian kecil dari strategi yang kompeten untuk mewujudkan kesetaraan dan juga harus menerima bentuk ketidakadilan yang lebih intrinsik.

Akhirnya, kebijakan sosial terutama yang berkaitan dengan kesetaraan peluang yang adil dan pengaruhnya terhadap keadilan sosial distributif tampak buruk. Aspek non-material dari masalah distributif - termasuk pengakuan dan representasi - melampaui paradigma persamaan kesempatan. Studi tentang kebijakan sosial mencerminkan strategi bahwa komponen kesetaraan secara berangsur-angsur menjadi prinsip yang kurang mendasar dari tujuan kebijakan sosial (Venieris, 2011). Tetapi seperti yang dikatakan oleh Piachaud (2008), keadilan atau ketidakadilan, distribusi kekuasaan dan sumber daya di dalam masyarakat dan negara di seluruh dunia akan membentuk kehidupan generasi masa depan.

Gagasan postmodernisme memindahkan disiplin kebijakan sosial ke arah baru. Keadilan distributif global, keadilan lingkungan, dan isu keadilan antar-generasi serta persamaan kesempatan merupakan isu-isu distributif yang terus mendapatkan perhatian. Wawasan dari teori postmodernis menembus pemikiran tentang keadilan sosial yang bijaksana untuk dinilai, terutama selama terjadinya krisis sosial. Menurut Beck (1992), modernitas 'kedua' adalah keadaan 'masyarakat yang berisiko'. Giddens (1994), telah menyatakan bahwa dalam dunia global yang berubah dengan cepat, masyarakat yang semakin terbuka, *self reflexive*, sosial-demokratis, tidak tertutup, tidak dogmatis dan otoriter. "Sistem keamanan" sosial merupakan sumber risiko dan ketidakamanan yang merubah model industri sosial melalui penyediaan asuransi yang universal. Perlindungan asuransi ditujukan untuk kejadian-kejadian yang dapat diperkirakan dan kolektif, dan bukan pada kemungkinan-kemungkinan individual dari suatu masyarakat berisiko (Taylor-Gooby, 2000). Singkatnya, tujuan kebijakan sosial untuk redistribusi digantikan oleh perhatian untuk, dan pencegahan melalui manajemen risiko. Penekanan dalam pembuatan kebijakan adalah meminimalkan risiko daripada memaksimalkan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan sosial kini semakin peduli dengan bentuk redistribusi sosial sumber daya non-ekonomi seperti kekuasaan, akses atau peluang terhadap hak non-ekonomi seperti martabat, keragaman, rasa hormat, pluralitas, dan otonomi. Kepedulian tersebut juga mencakup persoalan realokasi status sosial budaya dari

status dominan ke kelompok non-dominan dan perlindungan 'hak kolektif' kelompok minoritas (Fraser, 1997; Kymlicka, 1995).

Kepedulian yang dimaksud di atas mengingatkan kita pada pemikiran 'komunitarian' yang muncul pada tahun 1980-an (Taylor, 1989; Dagger, 1997). Gagasan Komunitarian seakan membuka kembali perdebatan klasik tentang hubungan antara individu dan masyarakat (Macintyre, 1981; 1987; Sandel, 1982; 1996). Sebuah perdebatan di mana ide inti dari komunitarian yang menyatakan bahwa 'individu' tidak dapat dipisahkan, dari budaya, nilai-nilai dan praktik-praktik komunitasnya (Sandel, 1982). Sebuah negara kesejahteraan yang menganut konsep komunitarian diharapkan bisa mewujudkan sistem sosial yang kuat sehingga mampu mempromosikan 'kebaikan bersama' dan tugas-tugas komunal. Kontrol sosial adalah cara yang sah untuk menumbuhkan budaya kebaikan bersama. Kaum komunitarian menyerukan 'politik kebaikan bersama' yang melibatkan semua elemen-elemen masyarakat (publik). Menurut Kymlicka (1990), tidak ada cara apapun untuk memperdebatkan kebebasan atas persamaan atau kesetaraan atas kebebasan, keduanya adalah nilai-nilai dasar. Lebih lanjut, kelompok komunitarian dengan sungguh-sungguh berpendapat bahwa berbagai respons kebijakan harus mengakui dan menghormati heterogenitas kelompok sosial (George dan Wilding, 1985; Young, 1990). Dalam arti luas, hak dan kewajiban kewarganegaraan bergantung pada pencapaian keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial (Drake, 2001).

Krisis ekonomi global telah menghasilkan masyarakat yang tidak aman, atau bahkan putus asa. Implikasi sosial dari krisis global tersebut memaksa negara-negara di dunia membuat kebijakan sosial dengan mempertimbangkan bentuk-bentuk kolektivisme baru dan fokusnya harus kembali kepada upaya untuk meminimalkan ketidakadilan daripada risiko. Memang, salah satu efek kontemporer dari krisis adalah kesejahteraan individu secara kolektif semakin tergantung terhadap lembaga-lembaga publik seperti sistem kesehatan dan pendidikan yang mengalami penurunan kualitas sumber daya karena adanya resesi dan efisiensi ekonomi besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah negara di dunia. Berdasarkan dari kondisi tersebut,

maka jelas sekali bahwa untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan, salah satunya adalah melalui kebijakan sosial. Dalam konteks ini, kebutuhan akan kebijakan sosial sangat jelas dan mendesak sekali untuk segera dilakukan.

Prasad dan Gerecke (2010) berpendapat, bahwa krisis dapat memungkinkan negara-negara untuk mengurangi kebijakan yang tidak efektif demi mendukung kebijakan yang adil yang akan mendorong pertumbuhan dan meningkatkan proses kerangka kerja kebijakan kelembagaan mereka. Dalam konteks ini kebijakan terhadap krisis sosial harus menjamin kebutuhan material dasar melalui mekanisme redistributif yang diperkuat, dengan fokus pada pendapatan dasar yang layak dan layanan kesehatan yang efektif. Ini dapat menghalangi munculnya kembali tingkat ketidaksetaraan yang mengingatkan kita pada periode awal industrialisasi. Selain itu, ke depan, kebijakan sosial harus mempertimbangkan kebutuhan non-material dan mengembangkan bentuk-bentuk baru dari ketentuan yang tidak berwujud dengan mempertimbangkan kompleksitas masyarakat post modern.

Sesungguhnya, pembuatan kebijakan terhadap krisis sosial setidaknya harus mengatasi dua masalah utama. Pertama, kebutuhan sosial seperti pengakuan dan kekuasaan dalam masyarakat sipil dapat diatasi dengan mempromosikan bentuk-bentuk relatif dari sumber daya yang tak berwujud melalui proses jenis pemberdayaan komunitarian. Selain itu, bisa melalui proses penguatan terhadap orang-orang terutama kelompok yang 'tidak berdaya' untuk memperoleh kekuasaan dan otoritas atas urusan mereka sendiri (Alcock, *et al.* 2002). Kedua, penyakit sosial seperti kemiskinan dan pengangguran dapat diatasi dengan mendistribusikan sumber daya ekonomi yang langka, dan dengan meningkatkan layanan sosial dasar yang universal (Baines *et al.*, 2011).

Singkatnya, kebijakan sosial terhadap masalah-masalah sosial mengandaikan dua bentuk perubahan kebijakan. Pertama, perubahan terkait dengan kebijakan sosial redistributif langsung yang dilengkapi dengan layanan sosial dasar universal yang berkelanjutan. Kedua, program jangka panjang atau reformasi untuk membangun institusi sosial yang mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang

keadilan sosial dan kebaikan bersama. Lagi pula, mengejar keadilan sosial telah menjadi kekuatan pendorong di balik banyaknya, atau sebagian besar, perubahan sosial di zaman modern (Piachaud, 2008).

Kebijakan sosial terdiri dari pedoman, prinsip, undang-undang dan kegiatan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia, seperti kualitas hidup seseorang. Departemen Kebijakan Sosial di LSE (*London School of Economics*) mendefinisikan kebijakan sosial sebagai "Subjek interdisipliner dan terapan yang berkaitan dengan analisis tanggapan masyarakat terhadap kebutuhan sosial", yang berusaha untuk menumbuhkan kemampuan para sarjana dalam memahami teori dan bukti yang diambil dari berbagai disiplin ilmu sosial, termasuk ekonomi, sosiologi, psikologi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, dan ilmu politik. *Malcolm Wiener Center* untuk Kebijakan Sosial di Universitas Harvard menjelaskan bahwa kebijakan sosial sebagai "kebijakan dan praktik publik di bidang perawatan kesehatan, layanan manusia, peradilan pidana, ketidaksetaraan, pendidikan, dan tenaga kerja". Kebijakan sosial juga dapat digambarkan sebagai tindakan yang mempengaruhi kesejahteraan anggota masyarakat melalui pembentukan distribusi dan akses ke barang dan sumber daya dalam masyarakat sendiri. Dalam pandangan yang umum Kebijakan sosial merupakan aktivitas yang sering berurusan dengan masalah-masalah sosial.

Kebijakan sosial adalah disiplin akademis yang berfokus pada evaluasi sistematis tentang tanggapan masyarakat terhadap kebutuhan sosial. Kebijakan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pendidikan, kesehatan, perumahan dan keamanan ekonomi. Bidang-bidang penting dari kebijakan sosial adalah kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, jaminan sosial, keadilan sosial, asuransi, masalah pengangguran, kondisi kehidupan, perawatan kesehatan, perumahan, kebijakan keluarga, kepedulian sosial, perlindungan anak, kebijakan pendidikan, kriminalitas dan peradilan pidana, pembangunan perkotaan, dan masalah tenaga kerja.

Dalam konteks pembahasan di atas mengenai keadilan sosial sudah jelas bahwa keadilan sosial merupakan tugas yang juga harus

dilaksanakan pemerintah, dengan kata lain harus ada intervensi sosial dari pemerintah. Intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, Kelompok, komunitas). Apabila kita kembali pada konteks wewenang pemerintah maka hal ini terkait dalam suatu kebijakan publik dengan meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya atau dengan kata lain adalah tercapainya tujuan sosial. Menurut Magill (1986), Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (*public policy*) maka, harus ada sebuah implementasi kebijakan publik oleh pemerintah dalam mewujudkan keadilan Sosial.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk bekerja sama menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart, implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: “memahami apa yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, termasuk di dalamnya mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat dan dampak yang nyata pada masyarakat/ kejadian-kejadian”. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (*developmental*). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.

Dalam sudut pandang Midgley, secara garis besar kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Pendekatan administrasi sosial yang juga dikenal dengan kebijakan sosial atau pelayanan sosial menurut Mildgley berusaha untuk mengangkat kesejahteraan rakyat dengan membentuk program kerja pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai macam pelayanan sosial. Pendekatan administrasi sosial ini, berdasarkan dari pemikiran bahwa pemerintah bertanggung jawab akan kesejahteraan warga negaranya, di mana mereka seharusnya menyediakan berbagai macam layanan sosial untuk mengangkat kesejahteraan sosial. Jadi sebagian besar usaha keadilan sosial memang hanya dapat dibuat oleh negara. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah mempunyai dampak paling besar terhadap perkembangan struktur-struktur yang relevan bagi proses-proses politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologis. Negara wajib untuk

selalu mengusahakan keadilan. Keadilan sosial adalah sesuatu hal mengenai dampak dari kebijakan sosial pemerintah, karena pemerintah punya wewenang menentukan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi struktur-struktur kehidupan sosial masyarakat.

Kebijakan sosial (*social policy*) adalah kebijakan publik (*public policy*) yang penting di negara-negara modern dan demokratis. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespons isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smits (dalam Suharto, 2007), secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

ISU-ISU DAN PROBLEMA KEBIJAKAN SOSIAL

Kajian penting dari kebijakan sosial adalah kesejahteraan dan sistem kesejahteraan, pengurangan kondisi kemiskinan, keamanan sosial, keadilan, asuransi ketenagakerjaan, permasalahan kehidupan manusia, perlindungan binatang, sistem pensiunan, perawatan kesehatan, perumahan, kebijakan keluarga, perawatan sosial, perlindungan anak, eksklusi sosial, kebijakan pendidikan, masalah kejahatan, dan masalah masyarakat urban. Kebijakan sosial berkaitan dengan cara masyarakat di seluruh dunia memenuhi kebutuhan manusia akan keamanan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kebijakan sosial membahas bagaimana negara dan masyarakat merespons tantangan global perubahan sosial, demografi dan ekonomi, dan kemiskinan, migrasi dan globalisasi. Kebijakan sosial menganalisis peran yang berbeda dari: pemerintah nasional, keluarga, masyarakat sipil, pasar, dan organisasi internasional dalam menyediakan layanan dan dukungan di sepanjang kehidupan mulai dari masa kanak-kanak hingga usia tua. Layanan dan dukungan ini termasuk dukungan anak dan keluarga, sekolah dan pendidikan, pembaruan perumahan dan lingkungan, pemeliharaan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dukungan dan pelatihan pengangguran, jaminan pensiunan, kesehatan dan perawatan sosial. Kebijakan sosial bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan cara mengurangi ketidaksetaraan dalam akses ke layanan dan dukungan antara kelompok sosial yang ditentukan oleh status sosial-ekonomi, ras, etnis, status migrasi, jenis kelamin, orientasi seksual, kecacatan dan usia serta hubungan antar negara.

Kebijakan sosial terdiri dari pedoman, prinsip, perundang-undangan, dan kegiatan yang memengaruhi kondisi kehidupan yang kondusif bagi kesejahteraan manusia, seperti kualitas hidup seseorang. Departemen Kebijakan Sosial di *London School of Economics* (LSE) mendefinisikan kebijakan sosial sebagai “subjek interdisipliner dan terapan

yang berkaitan dengan analisis tanggapan masyarakat terhadap kebutuhan sosial”. Kajian tersebut diambil dari teori dan bukti yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu sosial, termasuk ekonomi, sosiologi, psikologi, geografi, sejarah, hukum, filsafat dan ilmu politik. Pusat kajian Malcolm Wiener untuk Kebijakan Sosial di Universitas Harvard menggambarkan kebijakan sosial sebagai “kebijakan publik dan praktik di bidang perawatan kesehatan, layanan manusia, peradilan pidana, ketimpangan, pendidikan, dan tenaga kerja”. Kebijakan sosial juga dapat digambarkan sebagai tindakan yang memengaruhi kesejahteraan anggota masyarakat melalui pembentukan dan penyaluran distribusi serta akses untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dasar manusia dan sumber daya dalam masyarakat tersebut. Secara garis besar Kebijakan sosial sering kali berurusan dengan masalah dan situasi ketidakberuntungan (*disadvantage*).

A. Institusi Keluarga

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil dalam sistem sosial masyarakat. Peranan keluarga dalam masyarakat sangat vital, karena dalam keluarga proses sosialisasi sosial berlangsung. Tumbuh dan berkembangnya individu dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh lembaga keluarga dalam melakukan proses sosialisasi sosial. Tugas keluarga bukan hanya menyediakan kebutuhan primer semata, tetapi lebih dari itu keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial semua anggotanya, di dalamnya tercakup aktivitas pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan anak-anak, membimbing tumbuh kembang pribadi anak, serta mendidik mereka agar hidup sejahtera.

Menurut Zastrow (1999), keluarga memiliki lima fungsi, yaitu:

1. *Replacement of the population;*
Fungsi keluarga untuk melakukan regenerasi atau melanjutkan keturunan.
2. *Care of the young;*
Fungsi pengasuhan dan perawatan terhadap anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

3. *Sozialization of new members;*
Fungsi mensosialisasikan nilai-nilai budaya, norma, bahasa, dan lain-lain kepada seluruh anggota keluarganya.
4. *Regulation of social behavior;*
Fungsi pengaturan perilaku seksual. Kegagalan pengaturan perilaku seksual akan menghasilkan ketidakcocokan dengan harapan yang diinginkan.
5. *Source of affection;*
Fungsi untuk memberikan kasih sayang dan cinta kepada semua anggota keluarga. Jika ini gagal, maka keluarga akan menjadi kurang harmonis.

Jika semua fungsi yang disebutkan oleh Zastrow di atas berjalan dengan baik, maka ada peluang besar lembaga keluarga akan mencetak individu-individu yang sehat secara fisik, memiliki kecerdasan, memiliki budi pekerti, berakhlak mulia dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial. Keluarga merupakan sistem sumber informal yang memberikan perlindungan dan kasih sayang bagi anggota keluarganya. Karenanya, keluarga disebut sebagai lembaga primer dan fundamental sebab mengemban fungsi yang sangat strategis dalam membangun sebuah peradaban bangsa dan negara.

Dalam pesatnya perkembangan era globalisasi isu keluarga menjadi salah satu topik yang cukup sering diperbincangkan. Isu keluarga menjadi isu tematik pembangunan sosial, baik nasional maupun di tingkat global. Isu utamanya adalah pergeseran struktur, fungsi, makna, dan peran keluarga. Perubahan-perubahan tersebut telah menggoyahkan eksistensi tradisional keluarga, sehingga keluarga rentan mengalami masalah, tidak memiliki ketahanan, dan mengalami disorganisasi. Terjadinya perubahan tersebut merupakan dampak dari derasnya arus transformasi sosial yang mengiringi proses perubahan sosial. Perubahan bukan hanya mempengaruhi tatanan sistem sosial masyarakat saja, tetapi juga mempengaruhi hal yang sifatnya sangat privasi seperti lembaga keluarga. Kehidupan materialistis dan individualistis yang merupakan salah satu ciri dari globalisasi telah merasuki kehidupan sebagian keluarga di dunia. Contoh kerentanan

dan ketidakberfungsian keluarga yang cukup mengkhawatirkan adalah fenomena perdagangan perempuan dan anak, tindak kekerasan terhadap perempuan, *bullying*, KDRT, dan tawuran antar pelajar. Permasalahan tersebut terjadi, karena keluarga sudah tidak mampu lagi untuk menampilkan peranan, fungsi, dan pemenuhan kebutuhan keluarganya.

Zastrow (1999), mengelompokkan masalah keluarga ke dalam tiga kategori:

1. Ekonomi, termasuk di dalamnya pencari nafkah yang menganggur, kesulitan mengelola keuangan, kemiskinan; dan pencari nafkah meninggal dunia, cacat, pensiun diri, sakit-sakitan, sakit kronis, korban kejahatan, dan penahanan.
2. Sosial, termasuk di dalamnya kehamilan yang tidak dikehendaki, suami atau istri ditinggalkan, perkawinan yang hambar, perceraian, tindak kekerasan terhadap istri, anak-anak dan lanjut usia, perjudian, alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, masalah penyimpangan perilaku anggota keluarga, anak kabur dari rumah, dan ketidaksetiaan suami istri.
3. Psikis, termasuk di dalamnya masalah-masalah emosional anggota keluarga, dampak pemerkosaan, dan tertularnya HIV/AIDS.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat ditandai dengan semakin menguatnya tuntutan emansipasi dan kesetaraan bagi perempuan. Dampaknya, semakin banyak perempuan yang lebih mengutamakan atau mengejar karir profesi mereka. Pengaruhnya dalam keluarga, perempuan semakin mengurangi kendali dalam pengasuhan anak. Komunikasi, interaksi, dan relasi sosial dengan anak-anaknya menjadi sangat terbatas dan kurang berkualitas. Kondisi ini, akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan mental spiritual sang anak. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang sang anak. Anak-anak tersebut berpeluang bermasalah dalam interaksi sosialnya.

Selain itu, perubahan sosial juga berdampak pada pola ekonomi keluarga. Kadang, tuntutan yang besar dalam pemenuhan unsur-unsur ekonomi menyebabkan terjadinya disorganisasi sosial keluarga.

Penghasilan yang rendah di satu sisi, dan tuntutan kebutuhan yang tinggi melampaui daya beli di sisi lain, dapat menimbulkan gangguan (disharmoni) mental spiritual keluarga. Ada kemungkinan kondisi keluarga berada dalam situasi yang stress dan depresi (mental disorder) karena terlalu beratnya tekanan dan tuntutan yang dihadapi oleh keluarga.

Struktur keluarga yang awalnya berpola “*extended family*” cenderung berubah menjadi pola “*nuclear family*”. Hubungan kekeluargaan yang semula kuat dan erat (*family tight*), menjadi cenderung longgar dan rapuh (*family loose*). Ambisi terhadap karier dan materi yang tidak terkendali dan bersifat “obsesif kompulsif” telah mengganggu hubungan interpersonal (Suradi, 2005). Perubahan sosial karena perkembangan globalisasi telah merubah komposisi struktur keluarga. Saat ini telah muncul model bentuk-bentuk keluarga baru, seperti keluarga tunggal, keluarga yang dikepalai oleh seorang wanita muda, keluarga yang hidup bersama, keluarga kontrak, keluarga bayangan dan keluarga homo seks.

Tidak hanya mempengaruhi struktur keluarga tradisional, perubahan sosial juga membawa perubahan pada pola ekonomi keluarga. Perubahan pada sektor ini terkadang kurang menguntungkan bagi sebuah keluarga, seperti tempat bekerja yang jauh dari rumah, berpisahnya suami dengan istri dan berpisahnya orang tua dengan anak dalam waktu yang lama setiap harinya. Kondisi ini membawa keluarga dalam situasi yang kurang berinteraksi dan kurang berkomunikasi antar sesama anggota keluarga. Dalam situasi ini, jelas yang paling dirugikan adalah anak. Mereka akan mengalami masalah atau gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan emosi, kognisi, afektif, dan kesehatan fisiknya.

Pemakaian teknologi yang masif sedikit banyak telah menghilangkan kewibawaan lembaga keluarga tradisional dan menggantikan peran mereka. Teknologi dalam bentuk apapun tidak akan pernah secara sempurna bisa menggantikan peran keluarga. Industrialisme telah menimbulkan dampak sosial primer maupun dampak sosial sekunder di dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Dampak sosial primer dicirikan dengan terjadinya urbanisasi, peningkatan mobilitas

sosial secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan dampak sosial sekunder dicirikan dengan adanya gejala berubahnya cara hidup dan hubungan dalam keluarga, berkurangnya wibawa lembaga tradisional dan timbulnya kebutuhan rekreasi yang baru.

Implikasi paling nyata dari perubahan struktur keluarga adalah seringnya terjadi peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keluarga secara tidak langsung maupun langsung melakukan eksploitasi ekonomi kepada anak-anaknya, keluarga melakukan perdagangan manusia (*trafficking*) terhadap anggota keluarganya, keluarga menyediakan lingkungan yang tidak nyaman, dan tidak memberikan dukungan secara psiko-sosial bagi tumbuh kembang anak-anaknya.

B. Kesejahteraan Anak

Pengertian tentang anak memiliki beragam pengertian. Keberagaman tersebut disebabkan oleh batasan usia seorang individu disebut (dikategorikan) sebagai anak. *Convention on the Rights of the Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres No. 39 Tahun 1990 menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Indonesia menambahkan dimensi sosial pada definisi anak seperti tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem sosial kemasyarakatan. Mereka memiliki sejumlah potensi dan posisi strategis dalam menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Anak yang tumbuh dan berkembang secara normal dapat memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Sebaliknya jika mereka mengalami berbagai hambatan dalam tumbuh kembangnya akan menjadi beban bagi masyarakat dan Negara. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Keluarga, kerabat, masyarakat, serta pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan

pemenuhan atas hak-hak anak (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Dalam buku *Child Welfare, For Twenty-First Century* (2005), menyebutkan ada tiga variabel kesejahteraan. Pertama, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Kesejahteraan ini mencakup berbagai pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak-anak, orang tua, dan orang tua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah. Kedua, kesejahteraan dalam arti bahwa anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Ketiga, kesejahteraan dalam arti bahwa anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, mengamanatkan bahwa Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Kenyataannya, hingga saat ini masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi hak-haknya, sehingga anak berada dalam situasi yang sulit, telantar, dan mengalami perlakuan tidak menyenangkan yang berujung pada tindak kekerasan terhadap anak. Merujuk pada ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) dan protokol tambahannya (*Option Protocol Convention on the Rights of the Child*) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam beberapa bentuk. Pertama, Kekerasan seksual; eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornography*). Kedua, Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest. Bentuk lainnya, menyentuh alat kelamin korban atau memaksa korban untuk menyentuh alat kelaminnya; melibatkan anak-anak dalam pornografi, misalnya memperlihatkan gambar atau tulisan erotis dengan tujuan membangkitkan

nafsu birahi, termasuk juga memperlihatkan kepada anak-anak alat-alat seperti kondom, gambar orang tanpa busana dan sebagainya.

Pada awal dekade 80 dan 90-an, isu kesejahteraan anak hanya berputar pada persoalan fisik seperti kondisi anak cacat, yatim piatu, dan anak jalanan. Namun, sejak awal tahun 2000, persoalan anak semakin kompleks, salah satunya yang menantang adalah persoalan perdagangan anak (*child trafficking*). Banyak anak yang terjebak dalam kubangan kejahatan ini. Mereka mendapat tawaran-tawaran kerja yang sebenarnya bersifat membohongi dan eksploitatif (Akee, dkk., 2009; Sofyan, 2004).

Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab timbulnya eksploitasi pada anak-anak, sehingga mengakibatkan buruknya kesejahteraan pada mereka. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terkait dengan adanya disfungsi sosial dalam keluarga. Kondisi tersebut mengakibatkan kerentanan pada anak. Pada beberapa kasus, ketidakberfungsian keluarga secara sosial melemahkan fungsi pengawasan dan pendidikan keluarga terhadap anak. Beberapa penelitian di Indonesia menemukan bahwa pada berbagai kasus, orang tua atau keluarga menjadi pelaku *trafficking* baik dengan sengaja atau tidak sengaja “mendorong” atau “membiarkan” anak untuk bekerja di sektor-sektor eksploitatif termasuk pelacuran atau menjadi sasaran perekrutan para pelaku *trafficking* (Puslitbang Gender dan Anak LPPM Unpad, 2012).

Permasalahan yang dihadapi anak adalah merupakan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang lain, baik orang dewasa maupun teman sebaya, orang terdekat dengan anak maupun orang lain. Pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang dekat anak (orang tua, kerabat, dan lain-lain) pada umumnya terkait dengan kondisi rumah tangga atau keluarga yang juga sedang bermasalah. Seperti terjadinya perdagangan anak dikarenakan keterpaksaan orang tua dan kekhawatiran yang sangat mendalam terhadap kondisi hidup mereka dalam membiayai keluarganya. Mereka menyetujui anaknya ditukarkan dengan harga uang, tidak sama sekali tahu menahu mau dikemanakan anak mereka itu, mau diapain nanti anak mereka dirawat oleh orang lain, yang ada di pikiran mereka adalah ingin terhindar dari

kesusahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya (KPAI, 2013). Kerapuhan ekonomi dan kehidupan yang serba kurang, memberikan tekanan bagi keluarga, dan kemudian memunculkan rasa frustrasi. Keadaan frustrasi ini, dengan pemicu yang sering kali sederhana, mampu membangkitkan tingkah laku agresif

C. Kesetaraan Gender

Dalam beberapa dekade terakhir kita telah menyaksikan adanya perkembangan minat baru dalam kajian kebijakan sosial. Perkembangan tersebut juga diiringi oleh tindakan dan sikap beberapa negara untuk melunakkan dampak reformasi ekonomi dengan meningkatkan anggaran negaranya untuk keperluan biaya sosial. Perubahan tindakan dan sikap ini terjadi setelah realisasi ekonomi neoliberal mengalami kegagalan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Pada saat yang sama, proses liberalisasi politik juga telah membuka ruang yang luas bagi tumbuh kembangnya gerakan sosial untuk mengartikulasikan tuntutan kebijakan sosial yang lebih efektif guna mengurangi dampak kegagalan pasar dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

Badan Pangan Dunia (FAO), mendefinisikan gender sebagai hubungan antara pria dan wanita, baik perseptual maupun materi. Gender tidak ditentukan secara biologis sebagai akibat dari karakteristik seksual perempuan atau laki-laki, tetapi dibangun secara sosial. Pengorganisasian ini merupakan prinsip utama dalam masyarakat, dan sering kali digunakan untuk mengatur proses produksi dan reproduksi serta konsumsi dan distribusi (FAO, 1997). Terlepas dari definisi tersebut, pemahaman gender masih sering terjadi kesalahpahaman. Topik dan isu gender hanya dipahami sebagai promosi perempuan saja. Seperti yang disampaikan Bravo-Baumann (2000), masalah gender masih fokus pada masalah perempuan dan hubungannya dengan laki-laki, peran perempuan, akses ke dan kontrol atas sumber daya, pembagian kerja, kepentingan dan kebutuhan. Padahal masalah hubungan gender dapat memengaruhi urusan rumah tangga, kesejahteraan keluarga, perencanaan, produksi, dan banyak aspek kehidupan lainnya.

Untuk menghindari kerancuan tersebut, maka perlu diperjelas fokus utama tentang gender. Fokus Pertama, gender berkaitan dengan peran sosial antara perempuan dengan laki-laki. Gender adalah “definisi sosial” tentang perempuan dan laki-laki. Maknanya, peran tersebut bergantung kepada konteks budaya, kelas, usia, dan periode sejarah, sehingga pemahaman gender akan berbeda-beda, bergantung kepada kontekstualitasnya. Peran dan tanggung jawab spesifik gender sering dikondisikan oleh struktur rumah tangga, akses ke sumber daya, dampak spesifik ekonomi global, serta faktor-faktor lain yang bersifat lokalitas dan relevan seperti kondisi ekologis (FAO, 1997). Fokus kedua, berhubungan dengan masalah interaksi sosial. Hubungan gender adalah cara di mana suatu budaya atau masyarakat mendefinisikan hak, tanggung jawab, dan identitas pria dan wanita dalam hubungannya satu sama lain (Bravo-Baumann, 2000).

Kesetaraan gender bukan hanya masalah keadilan sosial semata tetapi juga menyangkut masalah-masalah ekonomi. Ini sangat penting bagi kesejahteraan dan perkembangan kaum perempuan. Adanya sikap diskriminatif pada kaum perempuan, itu sama halnya dengan menghilangkan produktivitas dan kesejahteraan kaum perempuan. Diskriminasi akan menekan kelompok perempuan pada posisi yang lebih rendah. Adanya diskriminasi akan membawa dampak tidak langsung pada keluarga mereka dan masyarakat pada umumnya. Walaupun pembahasan tentang kesenjangan gender semakin menyempit dalam beberapa bidang seperti politik, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan serta alasan mengapa kesenjangan gender tetap terjadi adalah hal yang sangat kompleks untuk diurai secara terperinci. Kompleksitas tersebut berkaitan dengan masalah norma sosial dan institusional, hubungan dalam rumah tangga, dan bahkan kurangnya informasi tentang manfaat mendidik dan mempekerjakan perempuan.

Terlepas dari faktor sosial dan budaya yang berat, kebijakan publik melalui kebijakan sosialnya dapat memengaruhi status dan kesejahteraan perempuan. Pemerintah memiliki peran utama dalam memperluas peluang yang tersedia bagi perempuan dan memperluas layanan yang sangat penting bagi mereka. Dalam beberapa

laporannya tentang kesetaraan gender, Bank Dunia dengan terperinci menguraikan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan institusi pembangunan untuk bekerja secara kolektif dan kolaboratif untuk membangun kesetaraan Gender. Pemerintah bisa mengambil proporsi yang lebih besar dengan cara melakukan investasi sosial melalui kebijakan sosial dalam masyarakat. Melalui kebijakan sosial pemerintah dapat merancang sebuah investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang pro-gender melalui Undang-undang dan peraturan. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah bisa memberikan peluang yang sama atas kepemilikan aset properti, layanan keuangan, dan akses ke pekerjaan. Paling penting, dengan kebijakan sosial yang terukur, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja ekonomi makro dan menciptakan iklim yang menguntungkan untuk pembangunan ekonomi tanpa ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki (World Bank, 1995).

Kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia. Perempuan berhak untuk hidup dengan bermartabat, bebas berkehendak, dan bebas dari rasa takut. Kesetaraan gender juga merupakan prasyarat untuk memajukan pembangunan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan. Perempuan yang terberdayakan akan berkontribusi pada kualitas kesehatan serta produktivitas keluarga dan masyarakat. Kualitas kesetaraan gender yang baik dapat meningkatkan prospek kehidupan yang lebih baik untuk generasi berikutnya.

Walaupun ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan hak asasi manusia dapat mengurangi kemiskinan, mempromosikan pembangunan, dan mengatasi tantangan yang paling mendesak di dunia, kesetaraan gender tetap menjadi janji yang belum terpenuhi. Menurut perkiraan UNESCO per tahun 2018, sekitar 130 juta anak perempuan di dunia dengan rentang usia antara 6 hingga 17 tahun masih belum bersekolah. Dari jumlah tersebut sekitar 15 juta anak perempuan berada dalam usia sekolah dasar. Perkiraan UNESCO setengah dari mereka berada di daerah sub-Sahara Afrika - tidak akan pernah mampu untuk masuk ruang kelas sekolah.

Dunia kita hari ini masih saja menghadapi kesenjangan yang tak terselesaikan. Perempuan masih mengalami hambatan untuk memperoleh akses, peluang, dan memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam beberapa laporan, secara global, perempuan memiliki lebih sedikit peluang untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi daripada laki-laki, lebih sedikit akses ke pendidikan dasar dan tinggi, risiko kesehatan dan keselamatan yang lebih besar, dan lebih sedikit perwakilan perempuan dalam ranah politik. Menjamin hak-hak perempuan dan memberi mereka kesempatan untuk mencapai potensi penuh yang mereka miliki sangat penting, tidak hanya untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga untuk memenuhi berbagai tujuan pembangunan. Komunitas Perempuan dan anak perempuan yang diberdayakan akan berkontribusi pada kesehatan dan produktivitas keluarga, komunitas masyarakat, dan negara mereka. Terwujudnya kesetaraan gender akan menciptakan efek yang menguntungkan bagi semua orang.

Kata gender di sini adalah menggambarkan peran dan tanggung jawab yang sesuai untuk laki-laki dan perempuan melalui konstruksi sosial masyarakat. Kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan dan kesempatan yang sama untuk kemandirian finansial, pendidikan, dan pengembangan pribadi. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai kesetaraan gender. Penguatan kesetaraan gender akan meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri seorang perempuan, memiliki kekuatan untuk membuat keputusan, memperbesar peluang untuk mengakses sumber daya, mempunyai kekuatan dan mampu mengontrol kehidupannya sendiri, baik itu di dalam dan di luar rumah, serta kemampuannya untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, perlu dicatat, bahwa masalah gender tidak hanya terfokus pada masalah perempuan saja, tetapi pada wujud hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Tindakan dan sikap laki-laki dalam hubungan dapat memainkan peran penting dalam mencapai kesetaraan gender.

Maka tidak salah, jika dalam kebijakannya pemerintah harus mempertimbangkan aspek pemberdayaan. Salah satu usaha yang bisa

dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah melakukan pemberdayaan ekonomi dan politik untuk kaum perempuan. Ada beberapa fakta menarik, sejumlah kajian menunjukkan bahwa jumlah populasi perempuan mencapai lebih dari 50% total populasi dunia, namun mereka hanya memiliki 1% dari kekayaan dunia. Di beberapa bagian negara di dunia, ada banyak kasus di mana perempuan dan anak perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar selama berjam-jam. Bahkan, di beberapa tempat, perempuan masih kekurangan hak untuk memiliki tanah (mewarisi properti), mendapatkan akses kredit, mendapatkan penghasilan, atau naik pangkat di tempat kerja mereka, dan bebas dari diskriminasi pekerjaan.

Ketimpangan gender bahkan terjadi hingga pada urusan domestik. Di dalam keluarga sendiri, kaum perempuan kadang kala masih dihadapkan pada situasi yang sulit, apalagi di arena publik yang lebih luas. Di arena publik misalnya, beberapa keputusan publik masih belum memberikan ruang atau kesempatan bagi perempuan untuk mewakili kepentingan kelompoknya. Ini bermakna, bahwa perempuan secara luas tidak terwakili sebagai bagian dari kelompok yang juga bisa menjadi pengambil keputusan. Dalam lembaga legislatif misalnya, di beberapa bagian dunia, jumlah keterwakilan perempuan masih sedikit (jauh dari kata ideal) untuk mencapai kesetaraan politik, perempuan masih kalah jumlah. Bisa jadi perbandingan komposisi antara kelompok laki-laki dan perempuan sekitar 4 banding 1. Kondisi ini jelas harus menjadi perhatian dalam kebijakan sosial, mengingat partisipasi perempuan dalam politik sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan demokrasi sejati.

Walaupun secara global, tidak ada negara yang sepenuhnya mampu mencapai kesetaraan gender, paling tidak ada usaha untuk menuju ke sana melalui kebijakan sosial. Kita bisa belajar praktek pengarusutamaan gender dari Negara-negara Skandinavia seperti Islandia, Norwegia, Finlandia, dan Swedia. Mereka memimpin dunia dalam usahanya untuk mengurangi kesenjangan gender. Di negara-negara tersebut, ada distribusi yang relatif merata dalam pendapatan, sumber daya, dan peluang yang sama untuk laki-laki dan perempuan

dalam ekonomi dan politik. Hingga saat ini, permasalahan kesenjangan gender terbesar masih terjadi di beberapa kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.

D. Rumah Layak Huni

Perumahan yang layak dan terjangkau penting bagi sebuah keluarga. Layak di sini maksudnya adalah hunian yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk tempat tinggal. Selain itu, kata “layak” juga bermaksud hunian yang bisa memberikan kontribusi bagi kesejahteraan orang tua dan anak-anak. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di perumahan dengan kondisi yang stabil perilaku, sikap, dan tindakannya lebih baik dalam lingkungannya. Selain itu, beberapa studi juga menunjukkan kondisi rumah yang tidak aman menyebabkan tumbuh kembang anak bermasalah dan cenderung kurang berprestasi ketika mengikuti proses pendidikan. Perumahan yang layak dan terjangkau mampu mengurangi tingkat stres individu, mengurangi polusi yang berbahaya, dan mencegah timbulnya wabah penyakit yang mengganggu kesehatan fisik dan mental manusia. Perumahan yang terjangkau juga bisa mengurangi beban anggaran rumah tangga untuk perawatan kesehatan dan makanan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang orang tuanya menerima bantuan perumahan bisa memberikan nutrisi yang lebih baik bagi anak-anaknya. Bagi orang tua, tinggal di perumahan yang layak dan terjangkau juga berarti mengurangi stres karena berkurangnya kekhawatiran bahwa biaya perumahan yang tinggi akan menyebabkan penyitaan dan penggusuran; ini pada gilirannya menyebabkan lebih sedikit masalah kesehatan fisik dan mental dan berkurangnya absensi di tempat kerja.

Perumahan yang terjangkau juga penting untuk vitalitas ekonomi masyarakat. Rumah yang terjangkau juga mendukung tenaga kerja lokal sehingga mereka dapat hidup dekat dengan pekerjaan mereka. Perjalanan yang lebih pendek memungkinkan para pekerja untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga mereka sementara masyarakat mendapat manfaat dari pengurangan kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan pengeluaran di jalan. Dalam menghidupkan

kembali masyarakat, pembangunan rumah yang terjangkau juga dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi. Perpaduan yang sehat antara opsi perumahan, mulai dari harga sewa perumahan yang terjangkau, rumah untuk keluarga tunggal, duplex, serta perumahan untuk kaum manula, memastikan peluang bagi semua individu untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka dan berkontribusi pada komunitas mereka.

Bagaimana dengan kebijakan penyediaan rumah layak huni hari ini?. Ada beberapa asumsi dasar yang menjadi pusat perhatian para pembuat kebijakan untuk memperhatikan masalah isu perumahan ini. Salah satu asumsinya adalah dampak dari kapitalisme. Salah satu masalah sosial yang ditimbulkan oleh kapitalisme, adalah kebutuhan akan perumahan yang layak huni dan terjangkau. Dengan meningkatnya pertumbuhan populasi masyarakat perkotaan dan transformasi hunian yang menjadi komoditas, telah menimbulkan permasalahan bagi sebagian besar masyarakat terutama kelompok buruh yang memiliki pendapatan minimum.

Dari dampak tersebut, ada beberapa masalah yang dihadapi masyarakat terkait perumahan. Pertama, Akses kepemilikan rumah. Meningkatnya harga kepemilikan maupun harga sewa rumah telah membebani kehidupan masyarakat dengan penghasilan rendah. Kondisi tersebut terjadi bukan tanpa sebab, ada perilaku imperialisisme dalam penyediaan perumahan. Proses monopolisasi dan skema pembiayaan bank yang kurang baik untuk pengadaan rumah menyebabkan harga yang tinggi. Kondisi tersebut membuat ketidakterjangkauan kepemilikan rumah bagi sebagian masyarakat, apalagi dengan kondisi pendapatan yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pero, *et. al.* (2016) dari OECD baru-baru ini menunjukkan betapa semakin sulit bagi sebagian masyarakat untuk memiliki rumah. Banyak rumah tangga di negara-negara anggota OECD terbebani oleh tingginya biaya perumahan. Rata-rata hampir 15% dari penyewa dan 10% dari pembayar hipotek menghabiskan hampir 40% dari pendapatan mereka (Pero *et.al*: 2016). Bahkan, menurut penelitian tersebut, sekitar 39% rumah tangga berpenghasilan rendah harus membayar hipotek.

Akses untuk memiliki perumahan yang berkualitas masih memprihatinkan di banyak negara OECD. Sebagian besar negara OECD melaporkan bahwa 1 hingga 8 orang dalam per-seribunya tidak memiliki akses reguler ke perumahan layak huni. Selain itu, banyak keluarga yang masih tinggal di tempat pemukiman yang berkualitas rendah. Sekitar 15% keluarga yang berpenghasilan rendah tinggal di tempat tinggal yang terlalu padat dan sekitar 14% tidak memiliki akses ke MCK yang sehat. Akses ke perumahan yang terjangkau berkualitas baik adalah penting untuk mempromosikan sejumlah tujuan kebijakan sosial, termasuk pengurangan kemiskinan, kesetaraan peluang dan inklusi sosial.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh *World Resources Institute* dan *Ross Center* (2017), menunjukkan bahwa sepertiga penduduk kota di seluruh dunia - 1,2 miliar orang - tidak memiliki akses ke perumahan yang aman dan terjangkau. Kesenjangan terburuk terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana beberapa kota tumbuh begitu cepat sehingga pemerintah tidak dapat membangun layanan dan infrastruktur yang cukup cepat untuk mengakomodasi para pendatang baru. Hasilnya adalah jutaan orang hidup dalam kondisi yang tidak memadai dan merusak kepercayaan publik pada pemerintah.

Jika tren saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2025 sebanyak 1,6 miliar orang di seluruh dunia akan kekurangan akses ke perumahan yang terjangkau, memadai, dan aman. Seiring dengan pertumbuhan populasi perkotaan, kesenjangan perumahan akan melebar, memperburuk ketidaksetaraan dan mengancam pandangan tradisional tentang kota sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang andal. Ini adalah tantangan mendesak yang akan memengaruhi kondisi kota di seluruh dunia. Kondisi ini harus memaksa pemerintah untuk bersusah payah memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Ada sekitar 9 miliar lebih penduduk dunia, sebanyak 60% akan tinggal di daerah perkotaan (*World Resources Institute dan Ross Center, 2017*).

Kedua, masalah kawasan pemukiman dan lingkungan. Sebagian besar pakar kebijakan hari ini sepakat bahwa proyek perumahan dengan lingkungan dan kawasan yang tidak tertata sangat berbahaya bagi para penghuninya. Dampak buruk penataan proyek pembangunan

perumahan yang kurang baik akan menimbulkan disfungsi sosial. Isu lain di beberapa negara maju, bahkan mungkin di sebagian negara berkembang seperti Indonesia yang sedang gencar-gencarnya mengembangkan kawasan perumahan baru adalah terganggunya ekosistem perkotaan. Banyak hasil kajian yang membuktikan pengembangan kawasan baru justru telah membunuh perkembangan kota lama. Keberadaan kawasan baru telah “melukai” kawasan kota lama. Keberadaan kawasan pemukiman baru menghambat atau bahkan mencegah daerah-daerah kumuh yang ada di kawasan kota lama hidup kembali, mereka terpinggirkan karena tergantikan dengan sistem kawasan baru yang diperuntukkan untuk kepentingan komersil dan pariwisata. Kecenderungan ini terus meningkat, sehingga kondisi ini jelas tidak membantu upaya daur ulang properti yang berkelanjutan guna membantu kawasan kota menjadi dinamis dan menghasilkan kekayaan serta peluang baru bagi yang kaya maupun yang miskin. Menurut Stevens (1995), tujuan sosial dari proyek pembangunan kembali perumahan publik telah diartikulasikan sebagai upaya untuk meningkatkan keadilan sosial melalui manfaat ekonomi dan opsi penyediaan perumahan.

Ketiga, kawasan pemukiman yang baik. Kawasan pemukiman yang kurang memiliki dukungan sosial cenderung berpotensi menimbulkan masalah-masalah sosial. Dukungan sosial dimaksud adalah, pendapatan, inklusi sosial, kerja sama sosial, lingkungan, keluarga, dan keamanan. Perumahan erat kaitannya dengan kondisi kesejahteraan seseorang. Kondisi rumah akan menjadi petunjuk seberapa sejahtera sebuah keluarga serta bagaimana keluarga tersebut secara proporsional memiliki ketahanan sosial. Dukungan dan ketahanan sosial yang tidak proporsional dalam kawasan pemukiman akan memunculkan patologi sosial baru seperti berkembangnya pecandu narkoba, pengangguran, anak putus sekolah, polusi lingkungan dan meningkatnya angka kriminalitas.

Keempat, Perumahan yang Terjangkau & Keamanan Ekonomi. Biaya perumahan yang tinggi membuat keluarga yang berpenghasilan rendah tidak memiliki sisa dana yang cukup untuk pengeluaran penting lainnya, sehingga menyulitkan pengaturan keuangan rumah

tangga. Perumahan yang terjangkau akan membantu keluarga menyetor sebagian pendapatannya untuk kebutuhan lain yang tak kalah pentingnya. Paling tidak para keluarga tersebut bisa menabung untuk keperluan masa depannya. Kelima, Stabilitas Perumahan dan Pendidikan. Ketidakstabilan kondisi perumahan dapat membahayakan kinerja dan keberhasilan anak-anak di sekolah. Kondisi tersebut akan berkontribusi pada kesenjangan prestasi yang akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Perumahan yang terjangkau dan berkualitas akan membantu menciptakan lingkungan yang stabil untuk masa depan anak-anak dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Saat ini, isu kebijakan tempat tinggal merupakan salah satu isu yang krusial dalam bidang kajian kebijakan sosial. Kebijakan perumahan biasanya dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekonomi sebagai bentuk pasar. Secara teori, pasar mengarah pada alokasi yang efisien melalui proses pencocokan penawaran dan permintaan yang kompleks. Ini tergantung pada kompetisi (untuk menurunkan harga); informasi yang baik; keberadaan jumlah pemasok; dan keberadaan jumlah pembeli (Spicker, 2006). Barlow dan Duncan (1994) merujuk kebijakan perumahan sebagai:

1. Pendekatan Pasar

Produksi dan pembiayaan perumahan didominasi oleh beberapa pemain besar.

2. Dampak ruang

Lokasi sangat penting untuk pasar perumahan; karena itu, tidak mungkin ada informasi yang sempurna dalam persaingan yang penuh dan bebas.

3. Eksternalitas

Perumahan mempengaruhi lingkungan dan dipengaruhi olehnya.

4. Alokasi kredit.

Pasar perumahan kebanyakan dibayar dengan menggunakan dana pinjaman. Pembiayaan harus didasarkan pada prediksi jangka panjang.

5. Ketidakpastian

Karena masa depan merupakan sesuatu yang tidak pasti. Regulasi dan intervensi penting untuk mengurangi ketidakpastian.

6. Volatilitas pasar

Harga didominasi oleh batasan pasar - mereka bisa membeli dan menjual properti kapan saja.

7. Masalah pemenuhan kebutuhan

Jika profitabilitas adalah satu-satunya pertimbangan, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya akan ditinggalkan.

Masalah perumahan bukan hanya masalah global yang terjadi di belahan negara lain, tetapi juga terjadi di Indonesia. Untuk melihat contohnya, kita bisa melihat kebijakan relokasi dan rumah susun di kota Jakarta. Para perancang tata kota dan pejabat pemerintah telah berulang kali menyatakan bahwa di masa depan Jakarta akan didominasi oleh hunian 'vertikal'. Tekanan peningkatan jumlah penduduk di ibukota megapolitan Indonesia ditambah dengan semakin berkurangnya ketersediaan dan naiknya harga lahan ditambah dengan persoalan berlebihnya pembangunan rumah mewah dan pusat perbelanjaan telah menimbulkan banyak tekanan bagi wilayah-wilayah hunian masyarakat miskin Jakarta. Ketika sebuah kota didefinisikan melalui heterogenitas lingkungan di mana orang dari berbagai latar belakang bekerja, tinggal dan berinteraksi dalam keakraban, ruang urban Jakarta justru semakin terbagi dan tersegregasi berdasarkan tingkat kesejahteraan dan kelas. Pertimbangan atas sistem hunian vertikal dalam bentuk blok rumah susun dalam beberapa hal merupakan jawaban pragmatis atas kemacetan Jakarta. Namun, hal ini membawa beragam dampak terhadap cara hidup penduduk, terlebih bagi masyarakat miskin. Ada kurang lebih-lebih dari 25.000 rumah susun di Jakarta, hampir 80 persen penghuninya adalah korban penggusuran dan relokasi paksa. Dalam waktu sepuluh tahun terakhir, sebagian besar rumah susun ini dibangun di wilayah pinggiran kota (Savirani dan Wilson, 2018).

Hasil studi yang dilakukan oleh Savirani dan Wilson (2018), menunjukkan bahwa mayoritas korban gusuran mengalami penurunan

pendapatan secara drastis pasca relokasi, dalam beberapa kasus selama beberapa tahun. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah penghuni hingga lebih dari 60 persen yang memperoleh pendapatan kurang dari 3 juta rupiah. Jumlah ini jauh di bawah upah minimum Jakarta, yaitu 3.6 juta rupiah. Alasannya banyak keterkaitan dengan persoalan lokasi, desain dan pengelolaan rumah susun.

Model rumah susun bersubsidi di Jakarta didasarkan pada asumsi bahwa para penghuni memiliki pendapatan tetap untuk membayar biaya sewa dan biaya utilitas. Akan tetapi, para penghuni mengandalkan pendapatan dari berbagai sumber tidak tetap, seperti pekerjaan di sektor informal dan bisnis skala kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Lokasi rumah susun yang terisolasi dari lingkungan sekitar atau dari pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya juga berdampak pada terbatasnya jumlah pelanggan yang sebagian besar merupakan penghuni sekitar. Persoalan jarak untuk menjangkau lokasi ini juga membuat akses terhadap pekerjaan menjadi makin sulit. Sebagai contoh, Marunda, tempat kompleks rumah susun terbesar di Jakarta, ditempatkan di wilayah pesisir berawa yang jarang penduduk.

Dampak terbatasnya ketersediaan sumber pendapatan yang dialami penghuni rumah tidak diimbangi dengan berbagai alternatif dari pemerintah untuk mengganti kerugian tersebut. Ada beberapa program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah untuk para penghuni rumah susun, seperti menjahit atau membatik. Namun, upaya ini gagal membawa perubahan untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan semata-mata karena tidak ada permintaan di pasar lokal. Pada saat yang sama, pengeluaran harian untuk kebutuhan dasar seperti beras dan minyak goreng telah meningkat karena minimnya pilihan di pasar lokal yang terjangkau. Jarak menuju pasar penyedia kebutuhan makanan dengan harga terjangkau seringkali terlampau jauh ditambah dengan ketersediaan sarana transportasi umum yang tidak menentu di beberapa lokasi telah menyebabkan tingginya kebutuhan akan kendaraan bermotor pribadi. Situasi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah hutang karena banyak penghuni yang akan mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan ini. Hilangnya akses pada pekerjaan dan pendapatan serta

keterjangkauan kebutuhan dan layanan semakin diperburuk dengan kian melambungnya harga utilitas, seperti biaya air dan listrik, yang terdapat di tiap unit. Berbeda dengan pengaturan di hunian sebelumnya di mana satu sambungan listrik akan ditanggung bersama oleh beberapa keluarga, tagihan di rumah susun dibayarkan secara individu.

E. Akses Pendidikan

Sayangnya, masih ada banyak anak di seluruh dunia yang tidak memiliki akses pendidikan. Ada banyak masalah yang menyebabkan sulitnya mengakses pendidikan bagi mereka, beberapa diantaranya adalah ketersediaan sekolah dasar yang masih minim dan ketidakmampuan untuk menyediakan modal guna mendapatkan pendidikan formal. Masalah ini membuat anak-anak tidak mampu untuk memberdayakan diri mereka sendiri, mencari peluang yang lebih baik, dan mendapatkan upah yang lebih baik dikemudian hari. Mengabaikan kepentingan pendidikan untuk anak-anak akan membuat mereka terpuruk dalam kemiskinan dan mobilitas sosial.

Kebijakan sosial umumnya mengacu pada tindakan intervensi kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan pekerjaan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial. Pendidikan, sebagai bidang utama sistem kesejahteraan, cukup signifikan untuk dijadikan sebagai kerangka kebijakan sosial. Karenanya, negara kesejahteraan harus bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas dan layanan pendidikan bagi seluruh warga negaranya. Pada titik ini, ada kebutuhan kuat untuk kebijakan yang efektif yang dapat menyelesaikan masalah dalam pengaturan pendidikan dan mengoptimalkan proses pendidikan untuk pembelajaran dan pengajaran terbaik (Calis dan Calis, 2016).

Pendidikan pada dasarnya selalu diidentikkan dengan sekolah, meskipun secara teori pengertian tentang pendidikan lebih luas dari itu, pendidikan berkaitan erat dengan perkembangan intelektual dan sosial. Kita mengenal istilah pendidikan “sepanjang hayat”, namun penekanan utama pendidikan adalah pada anak-anak, meskipun ruang lingkup pendidikan juga mencakup untuk kepentingan remaja dan orang dewasa. Pendidikan memberikan dasar yang baik bagi

perancangan kebijakan untuk anak-anak karena cakupannya yang universal, penerimaan tanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak, dan karena mudah untuk membenarkan tindakan kesejahteraan dalam hal pendidikan (Finch, 1984). Dalam pandangannya Finch, secara tidak langsung menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu aktivitas kebijakan sosial lainnya yang sangat penting.

Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan anak-anak dan remaja, dan itu memiliki dampak besar dalam kehidupan mereka. Pendidikan akan membentuk masa depan sebuah bangsa, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam beberapa kajian, pencapaian pendidikan individu telah terbukti berkaitan langsung dengan peluang dan risiko di pasar tenaga kerja, kebahagiaan dan kepuasan hidup, serta perilaku kesehatan dan konsekuensi kesehatan. Pendidikan juga dianggap sebagai pendorong utama mobilitas sosial. Maka, tidak mengherankan betapa pentingnya berinvestasi dalam pendidikan. Melalui pendidikan negara telah berinvestasi untuk kesejahteraan negara.

Pendidikan sangat penting sebagai instrumen kebijakan sosial, dalam arti tidak hanya kebijakan untuk kesejahteraan tetapi juga sebagai kebijakan yang dimaksudkan untuk segala hal yang berurusan dengan struktur masyarakat (Spicker, 2006). Masih menurut Spicker (2006), pendidikan modern memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pendidikan liberal; pengembangan potensi intelektual dan sosial secara penuh setiap individu.
2. Sosialisasi; pendidikan adalah metode transmisi norma dan nilai sosial. Terkadang juga dilihat sebagai bentuk kontrol sosial.
3. Pendidikan sebagai “handmaiden”; sistem pendidikan dibuat untuk melayani kepentingan industri dan ekonomi dengan menghasilkan tenaga kerja terampil dan terlatih, serta dengan menyediakan sistem layanan pengasuhan anak.
4. Pendidikan sebagai sistem perubahan sosial (rekayasa sosial); Sistem pendidikan telah dilihat sebagai sarana untuk membawa perubahan sosial.

Kebijakan sosial sebagai bagian integral dari pendidikan bisa digunakan sebagai solusi untuk mengurangi kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Ada beberapa penjelasan tentang sebab-sebab ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan sehingga berpengaruh pada kapasitas dan kapabilitas individu, diantaranya:

- 1) Pandangan patologis
Penjelasan patologis berhubungan dengan karakteristik atau perilaku individu. Beberapa penulis berpendapat bahwa karena kecerdasan sebagian besar ditentukan secara genetis, sehingga sulit untuk membuat ukuran capaian kinerja pendidikan. Oleh sebab itu perlu dirancang sebuah sistem yang bisa menutup disparitas pendidikan.
- 2) Kekurangan yang ditransmisikan
Prestasi pendidikan yang buruk kadang-kadang disebabkan oleh pola pengasuhan. Oleh karenanya, model pendidikan harus dirancang mulai dari pola pengasuhan keluarga. Harapannya, akan ada pendidikan yang berkelanjutan dan saling berkolaborasi antara sistem pendidikan, lembaga pendidikan, dan pengasuhan keluarga.
- 3) Faktor rumah tangga
Kekurangan materi mempengaruhi kualitas sekolah seseorang. Kondisi kesehatan keluarga yang buruk, kurangnya sumber daya (seperti buku dan mainan), dan kurangnya fasilitas (seperti ruang yang tenang untuk belajar) akan berdampak signifikan pada perkembangan pendidikan seorang anak. Ukuran dan lingkungan keluarga dapat memengaruhi tingkat perkembangan dan stimulasi yang diterima oleh seorang anak
- 4) Faktor sekolah
Kerugian juga bisa timbul dari kegagalan sekolah dalam merespons kebutuhan, seperti sumber daya yang rendah, kurikulum yang terbatas, harapan guru yang rendah, sistem pendidikan yang ketat, sistem ujian yang ketat, dan pergantian guru yang sangat sering. Terlepas dari pentingnya latar belakang rumah tangga siswa, sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu membuat perbedaan.

5) Pandangan struktural

Teori struktural menghubungkan kekurangan pendidikan dengan struktur masyarakat. Adanya kelas dan kemiskinan dalam masyarakat akan berpengaruh langsung dalam pencapaian pendidikan.

F. Kelaparan dan Kemiskinan

Kemiskinan anak, kerentanan, dan perampasan adalah salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi di dunia saat ini, baik itu dari perspektif pembangunan maupun kemanusiaan. Terlepas dari kenyataan bahwa berinvestasi pada penanganan masalah sosial anak-anak secara luas telah diterima sebagai keharusan moral, hak asasi manusia, dan investasi di masa depan, masih terlalu banyak anak-anak yang menderita kelaparan, terpapar penyakit, dan kurangnya ruang partisipasi serta akses ke layanan sosial dasar.

Kemiskinan dalam berbagai bentuknya telah menyita perhatian masyarakat internasional selama beberapa dekade terakhir. Menurut Bank Dunia, lebih dari 750 juta orang hidup dalam kemiskinan. Data ini memperjelas bahwa harus ada sesuatu yang harus dilakukan untuk meringankan krisis kemanusiaan ini. Walaupun tren kelaparan dan kemiskinan cenderung menurun, pembuat kebijakan tetap harus mengambil tindakan dengan menyusun dan menerapkan kebijakan sosial untuk mengakhiri keduanya secara bersamaan. Berbagai KTT dunia telah digelar untuk membuat sebuah komitmen bersama dalam rangka mengurangi kesengsaraan yang telah diderita oleh manusia dalam sepanjang hidup mereka. Perhatian terhadap persoalan tersebut merupakan salah satu langkah maju yang menggembirakan, walaupun secara aktual kemajuannya masih sangat lambat. Kelaparan dan kerawanan pangan – merupakan bentuk masalah sosial yang paling serius dalam kemiskinan yang ekstrem - kini telah menjadi prioritas internasional. KTT Pangan Dunia tahun 1996 telah membuat komitmen serius untuk mengurangi angka kelaparan yang terjadi di dunia.

Menurut FAO (2001), ada bukti bahwa dalam perjalanan 46 juta tahun kehidupan produktif manusia dan bebas dari masalah disabilitas telah hilang pada tahun 1990-an. Hal tersebut terjadi karena hilangnya

produktivitas sosial yang disebabkan oleh empat hal, yaitu: kekurangan gizi, pengerdilan (*stunting*), dan gangguan yang berhubungan dengan kekurangan yodium, zat besi serta vitamin A. Sekitar 156 juta anak balita yang hidup di negara berkembang telah menderita kekurangan energi protein. Sebanyak 90% dari mereka yang merupakan anak pra-sekolah telah menderita anemia. Demikian juga dengan ibu hamil yang tinggal di kawasan negara berkembang juga telah mengalami anemia. Kekurangan vitamin A adalah penyebab utama cacat mata dan kebutaan yang dapat dicegah pada anak-anak.

Masih menurut FAO (2001), sekitar 17% bayi di dunia menderita retardasi pertumbuhan intrauterin akibat adanya indikasi gizi buruk yang dialami oleh para ibu. Akibat gizi buruk yang dialami oleh seorang ibu, berat badan bayi yang baru lahir berada di bawah kondisi normal. Kondisi tersebut tentu saja menyebabkan bayi berada dalam kondisi yang beresiko tinggi terpapar penyakit. Dampak lainnya adalah angka kematian pada bayi akan terus melonjak. Di negara berkembang, ada sekitar 12 juta kematian bayi dan anak-anak yang terjadi dalam setiap tahunnya. Lebih mengejutkan lagi, dari data yang dirilis oleh badan pangan dunia PBB, 55% kematian berkaitan dengan masalah kekurangan gizi. Masalah gizi buruk tidak hanya berdampak pada saat mereka masih balita saja, namun juga akan berpengaruh ketika mereka memasuki usia dewasa. Kapasitas kerja dan kekebalan tubuh mereka akan cenderung bermasalah.

Indonesia, sebuah negara yang terdiri dari sekitar 81,3 juta anak-anak, telah membuat banyak kemajuan dalam menempatkan anak-anak berada dalam salah satu agenda pembangunan negara. Meskipun kemajuannya cukup menggembirakan, namun kesenjangan besar antar provinsi, desa-kota dan kesenjangan kekayaan masih saja terus ada. Wajah kemiskinan di Indonesia sebagian besar adalah anak-anak, dengan hampir 13,8 juta anak hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Di dalam masing-masing provinsi, variasi tingkat kemiskinan anak antar kabupaten sangat menonjol, terutama di provinsi Papua, Papua Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, dan Maluku (SMERU, 2018). Dalam kesenjangan kekayaan, tampak bahwa ada korelasi antara kemiskinan pendapatan pada anak-anak dan aspek-

aspek seperti ukuran rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan lokasi geografis rumah tangga (perkotaan/pedesaan). Dan sementara kekurangan yang diderita anak-anak di daerah pedesaan lebih parah daripada mereka yang tinggal di daerah perkotaan, ada pertumbuhan penduduk miskin perkotaan yang sangat tinggi (SMERU, 2018).

G. Pemenuhan Hak Perempuan

Fakta yang tidak bisa diabaikan, hampir semua perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia menghadapi masalah serius terkait dengan jenis kelamin mereka. Mulai dari masalah akses pendidikan hingga masalah penghasilan. Terdapat diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi mereka. Walaupun masalah ini merupakan warisan dari tradisi masa lalu peradaban manusia, masalah ini harus segera diperbaiki. Masalah ini sudah menjadi penyakit kronis yang menjangkiti hampir seluruh negara yang ada di dunia. Pemenuhan hak asasi manusia bagi kaum perempuan merupakan tanggung jawab warga dunia untuk melakukan advokasi demi terwujudnya kebijakan sosial yang Pro Gender. Masyarakat dunia secara bersama-sama harus melakukan perubahan yang akan memberdayakan kaum perempuan dan anak perempuan. Kita harus terlibat dalam setiap dialog terkait kebijakan yang bisa mempengaruhi kepentingan perempuan di mana pun dan kapan pun.

Melakukan pemberdayaan dan memberikan otonomi kepada kaum perempuan akan meningkatkan status politik, sosial, ekonomi, dan kesehatan mereka. Selain itu, pemberdayaan dan pemberian otonomi merupakan hal yang sangat penting untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan. Adanya partisipasi penuh dan terbangunnya kemitraan antara perempuan dan laki-laki diperlukan dalam kehidupan produktif dan reproduksi, termasuk di dalamnya tanggung jawab bersama untuk perawatan dan pengasuhan anak serta pengaturan rumah tangga.

Di sebagian besar wilayah di dunia, perempuan menerima pendidikan formal yang lebih sedikit daripada laki-laki, dan pada saat yang sama, pengetahuan, kemampuan, dan mekanisme coping perempuan

sering tidak diakui. Hubungan kekuasaan yang menghambat pencapaian perempuan dalam kehidupan yang sehat dan memuaskan terjadi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari yang paling pribadi hingga yang bersifat publik. Untuk mewujudkan perubahan membutuhkan sebuah tindakan berupa kebijakan dan program yang akan meningkatkan akses perempuan terhadap sumber mata pencaharian untuk dan sumber daya ekonomi lainnya.

Pendidikan adalah salah satu cara paling penting untuk memberdayakan perempuan dengan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Lebih dari 40 tahun yang lalu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa "setiap orang memiliki hak atas pendidikan". Pada tahun 1990, dalam Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien, Thailand, berkomitmen untuk mencapai tujuan akses universal ke pendidikan dasar. Tetapi terlepas dari upaya-upaya penting oleh negara-negara di seluruh dunia yang telah memperluas akses ke pendidikan dasar, ada sekitar 960 juta orang dewasa yang buta huruf di dunia, di mana dua pertiganya adalah perempuan. Lebih dari sepertiga orang dewasa di dunia, kebanyakan dari mereka perempuan, tidak memiliki akses ke pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan membantu mereka untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Ada sekitar 130 juta anak-anak yang tidak terdaftar di sekolah dasar dan 70 persen dari mereka adalah anak perempuan.

Melalui kebijakan sosial yang dirancang secara khusus untuk menangani masalah-masalah sosial perempuan, diharapkan mampu menghilangkan hambatan hukum terkait hak partisipatoris mereka dalam kehidupan publik. Selain itu, melalui kebijakan sosial, mereka mampu meningkatkan kesadaran sosialnya melalui program pendidikan dan komunikasi massa yang efektif. Usaha-usaha peningkatan status perempuan melalui kebijakan sosial akan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengambil keputusan di setiap tingkatan bidang kehidupan, terutama dibidang seksualitas dan reproduksi.

Negara-negara harus bertindak untuk memberdayakan perempuan dan harus mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan sesegera mungkin dengan:

1. Membangun mekanisme yang tepat untuk memberi ruang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan kehidupan publik, sehingga memungkinkan kaum perempuan mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka.
2. Mempromosikan pemenuhan potensi perempuan melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pekerjaan. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengeksplorasi potensi mereka sangat penting untuk penghapusan kemiskinan, buta huruf, dan masalah kesehatan yang dihadapi kaum perempuan.
3. Menghilangkan segala bentuk praktik yang mendiskriminasi perempuan; membantu perempuan untuk menetapkan dan merealisasikan hak-hak mereka, termasuk yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksual.
4. Mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam mendapatkan penghasilan di luar pekerjaan tradisional, mencapai kemandirian ekonomi, dan memastikan akses yang setara bagi perempuan dalam tenaga kerja dan sistem jaminan sosial.
5. Menghilangkan kekerasan terhadap perempuan.
6. Menghilangkan praktik diskriminatif oleh pengusaha terhadap perempuan, seperti yang didasarkan pada bukti penggunaan kontrasepsi atau status kehamilan.
7. Memungkinkan semua hal yang berkaitan dengan perempuan, melalui undang-undang, peraturan, dan tindakan lain yang sesuai bagi perempuan untuk menggabungkan peran melahirkan anak, menyusui dan membesarkan anak dengan partisipasi dalam angkatan kerja.
8. Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu cara untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, memerangi wabah penyakit, dan merangsang pembangunan yang berkelanjutan.

H. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat aktual dan dinamis sehingga memerlukan perhatian khusus dari para pembuat kebijakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak serius pada perekonomian negara sehingga banyak memunculkan kasus yang sulit untuk ditangani karena ketertinggalan atau keterbatasan regulasi. Dalam hal ini masalah kebijakan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dicari solusinya terkait berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Ada beragam permasalahan terkait ketenagakerjaan yang muncul secara dinamis di tengah perkembangan masyarakat yang semakin majemuk dan terbuka. Permasalahan-permasalahan tersebut masih belum bisa ditangani secara bijak berdasarkan regulasi yang ada. Perlu pemikiran yang jernih dan perenungan yang memadai untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan.

Peningkatan kualitas hidup bagi tenaga kerja merupakan isu yang berkembang pesat saat ini dalam pasar kerja global. Para pekerja bukan hanya bagian input produksi yang didasarkan pada teori produksi harus dioptimalisasikan dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Di mana optimalisasi dalam model ekonomi konvensional menimbulkan kecenderungan terjadinya eksploitasi terhadap tenaga kerja. Perusahaan cenderung menekan tenaga kerja agar lebih produktif sedangkan hak-hak tenaga kerja selalu diabaikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam tata kelola perusahaan terhadap tenaga kerja. Tapi hal ini mendapatkan perlawanan secara global, para pekerja saat ini memiliki penawaran yang cukup kuat dan munculnya serikat-serikat pekerja juga menjadi basis gerakan dalam menuntut keseimbangan tata kelola tenaga kerja dalam perusahaan.

Tekanan dari gerakan buruh secara global dan perubahan pemahaman perusahaan terhadap kualitas tenaga kerja telah memberikan angin segar dalam kerangka penataan tenaga kerja oleh perusahaan. Perusahaan telah menganggap bahwa tenaga kerja merupakan bagian dari aset yang berharga bagi perusahaan. Maju mundurnya perusahaan ditentukan oleh tenaga kerja. Sehingga perbaikan terhadap

kualitas kehidupan bagi tenaga kerja merupakan bagian dari investasi perusahaan dalam mendapatkan optimalisasi keuntungan.

Kerja layak tidak sebatas penciptaan lapangan pekerjaan semata, tetapi juga penciptaan kualitas pekerjaan yang dapat diterima semua pihak. Kerja layak meliputi kesempatan bekerja secara produktif, menghasilkan pendapatan yang adil, memberikan keselamatan di tempat kerja, jaminan sosial untuk pekerja dan keluarganya, dan memberikan kebebasan untuk mengungkapkan keprihatinan mereka, untuk mengatur dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (ILO, 1999).

Secara substansi, pilar-pilar kerja layak tersebut merupakan satu kesatuan dimensi kerja yang harus ditempatkan dalam satu kerangka kerja. Kerja layak penting untuk dicapai karena sebagian besar hidup manusia dihabiskan dalam lingkungan kerja dan setiap orang memiliki harapan untuk hidup lebih baik. Lanskap lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat kebahagiaan dan kesehatan baik dirinya sendiri maupun keluarganya. Bagaimanapun juga, tidak semua pekerjaan telah memenuhi standar kerja layak, terutama pekerjaan di sektor informal dengan ritme pendapatan yang tak menentu.

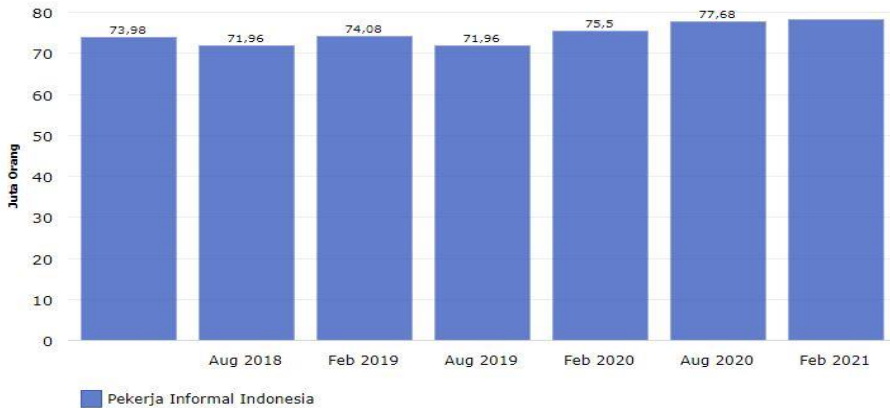
Kerja layak juga merupakan kunci dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai cara untuk mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Apabila orang-orang terhambat dalam mengakses kerja layak maka ketimpangan dan kemiskinan akan terus bertahan. Alhasil, kemajuan pembangunan akan berjalan lambat. Pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Riset *International Labor Organization* (ILO) menyebutkan bahwa negara yang berinvestasi pada pekerjaan yang berkualitas tumbuh lebih cepat. Artinya, tingkat lapangan pekerjaan (kuantitas) tidak bisa dipisahkan dari kualitasnya dalam memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Untuk Indonesia, ada tiga isu utama yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam masalah ketenagakerjaan yaitu kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, kapasitas tenaga kerja, dan sistem pengupahan. Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif rendah dan belum mampu menciptakan pekerjaan yang layak bagi warganya. Pengang-

guran (underemployment) selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya dan jumlah tenaga kerja informal tetap saja melampaui tenaga kerja formal.

Tahun 2013 yang lalu, tenaga kerja informal Indonesia meningkat hampir satu juta orang. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena sejak 4 tahun sebelumnya fenomena ini belum pernah terjadi. Kini jumlah tenaga kerja informal dan pengangguran mencapai 103,2 juta orang lebih atau hampir 2,2 kali lipat lebih besar dari tenaga kerja formal dengan kesejahteraan lebih rendah. Keinginan pemerintah pada waktu itu untuk membuat sebuah kebijakan pembangunan yang pro job ternyata sangat jauh dari realitas karena yang terjadi justru kegagalan transformasi ketenagakerjaan. Jumlah pekerja informal di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sementara, pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja informal mencapai 78,14 juta orang pada Februari 2021, naik 2,64 juta orang dibandingkan Agustus 2020 yang sebanyak 77.68 juta orang. Meski jumlahnya meningkat, proporsi pekerja informal justru menurun dari 60,47% menjadi 59,62%. Kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan proporsi pekerja formal dari 39,53% menjadi 40,38%. Ini terjadi karena jumlah pekerja formal naik 2,15 juta orang menjadi 52,92 juta orang pada Februari 2021 (Jayani, 2021).

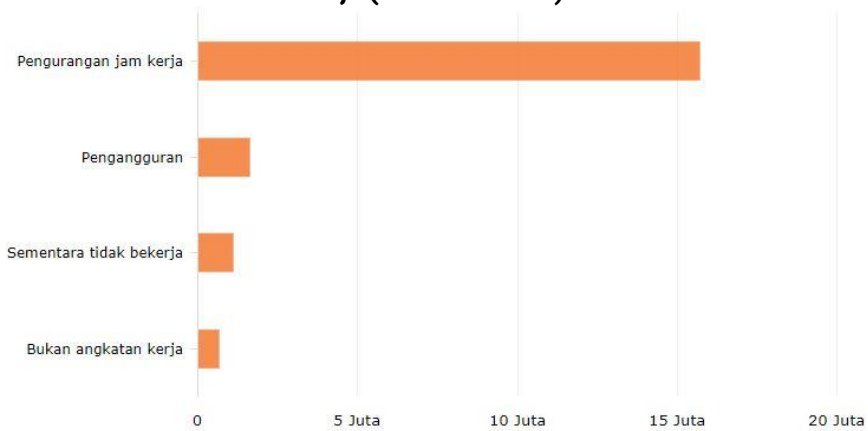
Gambar 5. Diagram Jumlah Pekerja Informal Indonesia (Februari 2018-Februari 2021)



Sumber: Jumlah Pekerja Informal Indonesia (Februari 2018-Februari 2021) (Jayani, 2021).

Pada saat yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 19,1 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19 per Februari 2021. Angka ini menurun 34,41% dibandingkan Agustus 2020 lalu yang sebesar 29,12 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15,72 juta orang mengalami pengurangan jam kerja sebagai dampak pandemi corona. Sebanyak 1,62 juta penduduk angkatan kerja menjadi pengangguran saat pagebluk. Sebanyak 1,11 juta orang sementara tidak bekerja karena pandemi corona. Sedangkan, ada 650 ribu penduduk bukan angkatan kerja (BAK) yang pernah berhenti bekerja karena corona sejak Februari 2020.

Gambar 6. Diagram Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja (Februari 2021)



Sumber : Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja (Annur, 2021)

Kondisi ini diperparah dengan minimnya perlindungan sosial (*social protection*) bagi tenaga kerja informal. Tingkat kepesertaan tenaga kerja informal terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digagas oleh pemerintah belum begitu menggembirakan. Sampai dengan Juli 2021, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 49.065.821 orang, terdiri dari sekitar 58,06 persen termasuk peserta aktif dan sekitar 41,94 persen termasuk peserta non aktif (Satu Data Ketenagakerjaan, 2021).

Bila situasi *underemployment* (ketenagakerjaan yang kurang layak) ini semakin meningkat dengan kerentanan tinggi dan transformasi ketenagakerjaan terus mengalami kegagalan, Indonesia akan sulit untuk menghindari dari jebakan status negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Mimpi untuk menjadi sebuah negara maju dengan pendapatan yang tinggi pun harus ditinjau ulang. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini, diperlukan *road map* dan tindakan segera untuk melakukan transformasi ketenagakerjaan berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Pemerintah melalui kebijakan sosial harus mendesain sebuah kebijakan yang ditujukan khusus untuk meningkatkan kapasitas tenaga

kerja. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja harus dilakukan dengan cara memperbaiki tingkat kesejahteraan tenaga kerja (*labor welfare*), adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja (*workers social security*), peningkatan *skill* tenaga kerja (*increasing workforce skill*), perbaikan sistem pengupahan (*wage system*), dan hubungan industrial (*industrial relationships*). Di beberapa negara industri maju, sistem kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja sudah sangat berkembang, menggembirakan, dan terkelola dengan baik. Sebaliknya, di sebagian negara berkembang seperti Indonesia, persoalan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja masih jauh dari harapan ideal.

Perjuangan para pekerja terhadap kesejahteraan dan jaminan sosial (*social protection*) selalu gagal akibat terlalu dominannya para pemilik modal. Akibatnya, gesekan antara kelompok pekerja dengan kelompok memiliki modal sering terjadi. Usaha pemerintah untuk melindungi para buruh sering kali mendapat intervensi dari para pemilik modal. Bahkan, disadari atau tidak, kadang kala pemerintah juga ikut berpihak pada para pemilik modal. Susahnya mengimplementasikan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) merupakan sebuah implikasi betapa beratnya mewujudkan tatanan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi buruh.

Masalah lain untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja adalah sistem pengupahan yang juga cenderung menjadi domain pengusaha dan pemerintah. Hubungan tripartit yang diamanatkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan justru menempatkan tenaga kerja dalam kondisi yang pasif untuk menentukan tingkat upah minimum. Karena terlalu dominannya dua aktor tersebut, akibatnya kesejahteraan yang diinginkan oleh pekerja hanya menjadi suatu mimpi yang sulit untuk diwujudkan.

Posisi tawar kelompok pekerja semakin lemah ketika dihadapkan pada kapasitas dan kualitas yang mereka miliki. Pasar kerja di Indonesia saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah. Sekitar 54,63 juta dari 114.02 juta tenaga kerja Indonesia hanya memiliki ijazah SD dan tidak tamat SD. Distribusinya sangat besar yaitu mencapai 47,9% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Kondisi ini tentu saja menjadi problem utama sekaligus tantangan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Jika dipetakan secara detail, maka akan terlihat gambaran tenaga kerja Indonesia sangat mengkhawatirkan, sekitar 92,68 juta tenaga kerja Indonesia merupakan tenaga kerja *unskill*. Artinya ada sekitar 81,2 % tenaga kerja di Indonesia merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki *skill*.

Rendahnya pendidikan pekerja di Indonesia akan menimbulkan implikasi yang luar biasa terhadap rendahnya kualitas tenaga kerja. Pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja akan mendorong kemampuan pekerja terhadap penguasaan aspek pekerjaan di lapangan. Pekerja yang terdidik dan memiliki *skill* akan cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja tidak berpendidikan dan *unskill*. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas tenaga kerja di Indonesia jauh dibandingkan dengan Negara lainnya di kawasan ASEAN. Kapasitas dan kualitas tenaga kerja selalu dijadikan alasan oleh para pemilik modal untuk menekan upah buruh karena secara produktivitas sangat rendah. Para pengusaha berdalih bahwa mereka dihadapkan pada situasi *comperative advantages* dalam produksi dan persaingan dalam industri, karenanya penekanan terhadap upah merupakan hal yang sangat rasional untuk dilakukan agar bisa bersaing.

Ketika pasar kerja dibanjiri oleh tenaga kerja yang tidak berpendidikan dan *unskill* maka dunia usaha akan sulit memberikan nilai kompensasi tinggi karena harus ada keseimbangan antara kualitas, produktivitas dan kompensasi. Situasi inilah yang selalu menimbulkan masalah dalam sistem pengupahan ketenagakerjaan di Indonesia. Pelaku usaha melakukan konversi pendidikan dan kualitas dengan produktivitas tenaga kerja. Maka, akan sangat sulit bagi pelaku usaha untuk memberikan kompensasi yang lebih besar sedangkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sangat rendah. Di sisi lain, para pekerja dihadapkan pada kondisi ekonomi yang semakin berat. Benturan kepentingan inilah yang sering menimbulkan konflik dan polemik antara kelompok buruh dengan kelompok memiliki modal.

Masalah lain akibat rendahnya kapasitas dan kualitas tenaga kerja Indonesia adalah daya saing tenaga kerja. Dalam konteks ekonomi industri dan globalisasi, penentuan upah dan daya saing

tenaga kerja merupakan indikator penting dalam penentuan pilihan daerah untuk investasi. Para pelaku usaha akan cenderung melihat sistem dan besaran upah buruh serta daya saing tenaga kerja untuk menentukan lokasi dan besaran investasi selain faktor lain seperti infrastruktur, logistik, perizinan, pajak dan lainnya. Bila dilihat kondisi saat ini, rata-rata besaran upah tenaga kerja di Indonesia dibanding dengan beberapa Negara lain di kawasan ASEAN, upah di Indonesia masih relatif baik bila dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja dan Myanmar. Tapi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan upah tenaga kerja di Thailand, Malaysia dan Philipina. Sementara data yang ditampilkan oleh *World Economic Forum* (WEF) dalam *The Global Competitiveness Report 2012-2013*. Daya saing tenaga kerja Indonesia sangat rendah. Indonesia berada pada posisi 120 dari 144 negara yang dianalisis oleh WEF. Bila kita bandingkan dengan kawasan ASEAN, indeks daya saing tenaga kerja Indonesia jauh di bawah Singapura (2), Brunai Darussalam (13), Malaysia (23), Vietnam (51) dan Philipina (103). Ini menunjukkan ada permasalahan dalam sektor tenaga kerja di Indonesia. Indeks daya saing ini merupakan komponen dari beberapa indikator seperti hubungan antara tenaga kerja dengan perusahaan (*cooperation in labor-employer relations*), fleksibilitas dalam sistem pengupahan (*flexibility of wage determination*), praktek rekrutmen dan pemecatan tenaga kerja (*hiring and firing practices*), biaya redundansi (*redundancy cost*), pembayaran kompensasi dan produktivitas (*pay and productivity*), ketergantungan terhadap manajemen profesional (*reliance of professional management*), kecerdasan (*brain drain*), dan partisipasi wanita dalam pekerjaan (*female participation of labor force*).

Perlindungan bagi dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan serta jaminan sosial tenaga kerja merupakan dua aspek yang harus diperjuangkan dalam kerangka hubungan industrial yang lebih baik. Para pelaku usaha berharap usahanya dapat terus eksis, berkembang, dan meningkat. Sedangkan para pekerja berharap kesejahteraan dan perlindungan sosialnya terjamin. Tidak akan ada gesekan kepentingan jika pemerintah mampu melakukan tata kelola yang baik bagi dunia usaha dan tenaga kerja. Reformasi ketenagakerjaan melalui perbaikan

sistem pengupahan, peningkatan kualitas dan pendidikan tenaga kerja serta program jaminan sosial bagi tenaga kerja harus segera di dorong agar kehidupan tenaga kerja bisa lebih baik dan mampu mendorong perbaikan kualitas perekonomian nasional. Kebijakan sosial harus diintegrasikan dengan pekerjaan kebijakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja sehingga individu dapat memanfaatkan peluang dan potensinya, melindungi individu dari asimetri kekuatan pasar yang menempatkan kualitas pekerjaan sebagai indikator untuk menekan kelompok buruh, dan melindungi nilai riil upah pekerja melalui penyusunan undang-undang tentang upah minimum.

I. Akses Perawatan Kesehatan

Perawatan kesehatan merupakan salah kebutuhan penting dalam hidup manusia. Namun sayangnya tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap perawatan kesehatan. Terlalu banyak orang yang sakit dan terluka tanpa kemampuan untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Ada beberapa akar masalah yang menjadi penyebab masalah ini, salah satunya adalah kurang profesional tenaga medis yang terlatih dan memiliki jam kerja tinggi. Kadang kala kondisi tersebut semakin parah dengan kurangnya dana yang dimiliki oleh individu untuk membayar perawatan medis. Akibatnya, banyak penderita dibiarkan tanpa perawatan medis yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, hal ini menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Akses layanan kesehatan merupakan faktor penting dalam mencegah penyakit dan kecacatan, mendeteksi dan mengobati penyakit, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemungkinan terjadinya kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup manusia.

Akses pelayanan perawatan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas penting untuk mempromosikan dan menjaga kesehatan, mencegah dan mengawal penyakit, mengurangi kecacatan yang tidak perlu, mengurangi kematian dini akibat penyakit, dan mencapai kesetaraan kesehatan. Akses ke layanan kesehatan berarti “penggunaan tepat waktu dari layanan kesehatan pribadi untuk mencapai hasil kesehatan yang terbaik” (Millman, 1993).

Ada beberapa penghambat akses layanan kesehatan, di antaranya:

- 1) Biaya perawatan kesehatan yang tinggi.
- 2) Asuransi kesehatan yang tidak memadai atau tidak ada skema pertanggungjawaban yang baik.
- 3) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan.
- 4) Kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten.

Hambatan-hambatan tersebut akan menyebabkan kebutuhan kesehatan yang tidak terpenuhi, keterlambatan dalam menerima rawatan yang tepat, ketidakmampuan untuk mendapatkan layanan pencegahan penyakit, beban keuangan yang memberatkan untuk biaya perawatan, dan keharusan untuk menjalani rawat inap akibat ketidakmampuan untuk mencegah penyakit.

Ada tiga komponen yang menjadi perhatian khusus dalam masalah akses kesehatan oleh masyarakat, yakni cakupan, layanan, dan ketepatan waktu. Cakupan di sini adalah asuransi kesehatan yang bisa digunakan oleh pasien untuk mengakses sistem perawatan kesehatan secara mudah dan terjangkau. Kurangnya cakupan yang memadai akan membuat kesulitan orang-orang untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Penyebab sulitnya mengakses layanan kesehatan bervariasi, salah satunya adalah beban biaya yang harus ditanggung oleh penderita ketika mengakses sistem kesehatan, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk itu. Dalam beberapa kajian menunjukkan, bahwa orang yang tidak memiliki asuransi lebih besar kemungkinannya untuk memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik (buruk) dalam hidup mereka serta lebih kecil kemungkinannya untuk menerima perawatan medis yang cukup. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kesejahteraan umur mereka. Sebagian besar kejadian seperti itu terjadi karena lambatnya diagnosa kesehatan seorang pesakit. Dampaknya pasien tidak bisa membuat keputusan atau tindakan terhadap kondisi mereka.

Menurut Spicker (2019), ada banyak definisi tentang 'kesehatan', tergantung pada perspektifnya. Dalam perspektif budaya kesehatan adalah standar kesejahteraan fisik dan mental yang sesuai untuk masyarakat tertentu. Sedangkan dalam definisi normatif, kesehatan

dilihat sebagai tahapan yang tetap, atau keadaan fisik dan mental yang ideal. Sementara, menurut definisi fungsional, kesehatan dilihat sebagai sebuah keadaan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas fisik dan mental tertentu.

Spicker (2019), membagi perawatan kesehatan menjadi dua bagian. Pertama, secara konvensional perawatan terbagi dua, yaitu perawatan rumah sakit dan perawatan primer. Perawatan rumah sakit dapat dibedakan ke dalam tujuannya, yaitu untuk perawatan akut dan perawatan jangka panjang. Perawatan akut mencakup berbagai bidang spesialisasi medis. Sementara perawatan jangka panjang pada prinsipnya digunakan untuk perawatan yang sifatnya terus menerus seperti bidang psikiatri, penyakit mental, dan perawatan lain yang berkelanjutan. Sedangkan perawatan primer mengacu pada perawatan medis dasar dan perawatan non-rumah sakit, termasuk praktisi umum atau keluarga, profesi tambahan untuk kedokteran (mis. kedokteran gigi, optik, dan farmasi), dan perawatan kesehatan domisiliaris (perawatan di rumah, terapi okupasi, dll.). Di Indonesia kita menyebutnya sebagai “Rawat jalan”. Kedua, kesehatan masyarakat. Bidang ini tidak hanya mencakup masalah obat-obatan medis tetapi ada juga kegiatan pencegahan (mis. Penyaringan, inokulasi atau pendidikan kesehatan). Kesehatan masyarakat berkaitan dengan beberapa bidang yang tidak harus dikaitkan dengan layanan kesehatan konvensional, seperti perumahan, persediaan air, sanitasi, dan kebersihan makanan. Kesehatan masyarakat merupakan masalah paling penting bagi kesehatan suatu populasi.

Kesehatan masyarakat bergantung pada sejumlah faktor, seperti faktor biologis, faktor lingkungan, faktor nutrisi, dan faktor standar hidup. Dengan kata lain, kesehatan dapat dilihat sebagai fungsi kesejahteraan. Dahulu, bahkan hingga sekarang, beberapa ‘Negara Kesejahteraan’ ketika melihat beberapa hal (sesuatu) yang dianggap sebagai penyebab terganggunya kondisi kesehatan penduduk, maka akan ditangani secara langsung dengan pendekatan “layanan kesehatan”. Namun, saat memasuki abad ke-19, seorang peneliti bernama Chadwick (dalam Hamlin, 1998), mengidentifikasi kondisi kesehatan yang buruk sebagai penyebab utama kemiskinan, maka

respons yang diberikan tidak lagi melalui pendekatan 'Layanan Kesehatan' semata, tetapi melalui pendekatan pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar (PSD), seperti meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dan keluarga, penyediaan pasokan air bersih yang berkualitas, dan pemenuhan asupan gizi yang baik bagi masyarakat, terutama balita. Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa 'Layanan Kesehatan' mengalami pergeseran makna menjadi layanan medis yang sifatnya penanggulangan dan pemulihan.

Kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang terletak di luar sistem pemberian layanan kesehatan. Sistem perawatan kesehatan umumnya hanya berfungsi untuk memberikan perawatan kepada mereka yang sakit. Namun, yang paling penting, melalui kebijakan sosial orang hidup lebih sejahtera, belajar, bekerja, bermain, dan beribadah dengan nyaman sehingga bisa saling memengaruhi untuk menciptakan peluang bagi mereka untuk menjadi sehat. Telah lama diakui, bahwa intervensi kesehatan tingkat individu dapat dilengkapi dengan melakukan perubahan pada lingkungan sosial, fisik, dan ekonomi yang menjadi faktor penentu kualitas kesehatan dan risiko kesehatan masyarakat. Model ini disebut sebagai "*intervensi shulu*". Katz (2009), mengatakan bahwa model "intervensi hulu" dapat menghasilkan peningkatan kesehatan tanpa melalui proses peningkatan kesadaran atau partisipasi oleh individu. Masyarakat secara tidak langsung, tanpa mereka sadari bisa menerima manfaat dari model ini. Contohnya, peningkatan kualitas sanitasi, pengaturan standar keselamatan kerja, regulasi tentang sabuk pengaman mobil, undang-undang keselamatan jalan, pengendalian alkohol, pengendalian nikotin dan obat-obat terlarang, kebijakan pengurangan (pelarangan) penggunaan timbal dalam cat dan bensin, dan fluoridasi air.

Tidak diragukan lagi, beberapa masalah lama terkait kesehatan masyarakat seperti kolera, demam tifoid, dan malaria sebagian besar dapat diselesaikan dengan rekayasa lingkungan. Namun, persoalannya hari ini tidak sesederhana seperti di masa lalu. Masyarakat industri maju secara tidak langsung maupun langsung telah menciptakan jenis-jenis bahaya baru yang mengancam kesehatan lingkungan manusia. Bahkan, jenis bahaya tersebut lebih berbahaya dibanding

bahaya masalah kesehatan di masa lalu, seperti radiasi, polusi udara, mobil, bahan kimia industri, dan obat-obatan jenis baru.

Berkenaan dengan timbulnya berbagai macam penyakit kronis yang menjadi masalah kesehatan utama kita saat ini, adalah terlalu dini untuk menyatakan bahwa ini akan dengan mudah dikendalikan melalui program-program yang berfokus pada perubahan sikap dan perilaku individu (rekayasa lingkungan) semata seperti yang pernah dilakukan di masa lalu. Harus ada kebijakan sosial yang dirancang khusus untuk mampu memperkuat sistem jaring pengaman kesehatan masyarakat. Masalah kesehatan masyarakat, baik baru atau lama, pada dasarnya bersifat sosial dan hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan sosial.

Kebijakan sosial bidang kesehatan mengacu pada keputusan, rencana, dan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan perawatan kesehatan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan kesehatan yang tergambar secara eksplisit maupun implisit dapat digunakan untuk menerangkan beberapa hal:

- 1) Kebijakan mendefinisikan visi yang hendak diwujudkan di masa depan.
- 2) Kebijakan pada gilirannya membantu menetapkan target dan titik referensi jangka pendek dan menengah.
- 3) Kebijakan menguraikan prioritas dan peran yang diharapkan dari berbagai kelompok, baik itu agensi pemerintah maupun swasta. Harapannya akan terbangun sebuah konsensus bersama dan jejaring informasi dalam masyarakat yang menjadi target kebijakan kesehatan.

Ke depan, penting untuk menjadi perhatian pemerintah agar terus melakukan berbagai inovasi kebijakan sosial guna meningkatkan akses layanan perawatan kesehatan. Pemerintah harus menjamin masyarakat, bahwa mereka memiliki sumber perawatan yang bisa diakses dengan murah dan mudah serta berkelanjutan. Dengan kebijakan yang berkelanjutan, ada peluang besar bagi warga negara untuk hidup lebih sehat, tidak ada lagi kesenjangan, dan masyarakat bisa berhemat. Tugas pemerintah melalui petugas kesehatan adalah meyakinkan masyarakat untuk melakukan tindakan sosial tertentu.

Pemerintah atau lembaga lainnya yang memiliki kepentingan dengan masalah kesehatan masyarakat didorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Ada tiga langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pertama, masyarakat harus diberikan peluang untuk mengakses kesehatan dengan mudah dan murah (biasanya bersamaan dengan sistem asuransi yang dirancang oleh pemerintah atau bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan asuransi kesehatan). Kedua, masyarakat harus mampu mengakses lokasi layanan perawatan kesehatan yang diperlukan dengan mudah dan cepat. Ini bermakna bahwa pemerintah harus mampu menyediakan (ketersediaan secara geografis) sejumlah sarana prasarana penunjang kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan, pusat konsultasi, pusat informasi kesehatan, dan klinik dalam jumlah yang cukup. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan pelayanan kesehatan khusus untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dari masyarakat, seperti masalah-masalah psikologis manusia. Pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan yang dapat dipercaya dan dapat berkomunikasi (berkonsultasi) dengan pasien secara nyaman. Ketiga, pemerintah harus merancang suatu sistem jaminan dan perlindungan kesehatan yang bisa mempengaruhi status kesehatan fisik, sosial, mental, dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan.

Terkait perlindungan kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendorong pelaksanaan *implementasi Universal Healthcare Coverage* (UHC). Pada tahun 2017 *Universal Healthcare Coverage* (UHC) Indonesia baru mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah peserta 183 juta jiwa (BPJS Kesehatan, 2018). Target kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 100% di tahun 2019 sepertinya akan sulit untuk dicapai, karena masih ada sekitar 27,1% jumlah penduduk Indonesia yang masih belum menjadi peserta JKN. Bahkan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada tahun 2019 memprediksikan capaian kepesertaan JKN sebesar 82,4%.

Jika tidak ada upaya yang luar biasa maka penduduk akan kehilangan hak-hak kesehatan yang semestinya diterima. Organisasi

Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan pentingnya implementasi UHC di mana semua orang akan dapat menerima pelayanan kesehatan berkualitas sesuai kebutuhan tanpa menyebabkan kesulitan keuangan akibat kewajiban untuk membayar pelayanan kesehatan tersebut. UHC juga mencakup inisiatif kesehatan yang dirancang untuk mempromosikan kesehatan yang lebih baik, misalnya kebijakan upaya pencegahan penyakit melalui vaksinasi, pemberian pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif yang berkualitas dan efektif (WHO, 2014).

Whitehead (1992) menegaskan bahwa UHC harus mengedepankan prinsip ekuitas kesehatan. Prinsip ini akan menciptakan persamaan dalam mengakses kesehatan. Artinya, ekuitas kesehatan berkelindan dengan gagasan keadilan dan kesetaraan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

J. Isolasi Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sistem biologis, psikologis, dan sosial. Manusia berevolusi untuk berkembang dalam jaringan kolaboratif. Manusia merupakan spesies sosial. Jaringan sosial manusia (keluarga, suku, komunitas, dll.), memungkinkan manusia untuk bertahan hidup dan berkembang. Kelangsungan hidup kita dilayani oleh perkembangan perilaku dan mekanisme fisiologis (neural, hormonal, seluler, genetik) yang mendukung interaksi sosial (Cacioppo, *et al.*, 2011). Tetapi seperti halnya semua sifat manusia, ada variasi dalam perilaku dan kebutuhan sosial kita. Faktanya adalah, sebagian besar dari kita “diprogram” secara psikologis dan biologis untuk membutuhkan jejaring sosial. Adalah logis bahwa isolasi sosial dapat memberikan tekanan pada pikiran dan tubuh kita yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan (Singer: 2018). Isolasi sosial adalah masalah kesehatan utama bagi orang dewasa yang tinggal di komunitas, yang menyebabkan berbagai kondisi kesehatan yang merugikan. Isolasi sosial didefinisikan sebagai "keadaan di mana individu tidak memiliki rasa memiliki secara sosial, tidak memiliki

keterlibatan dengan orang lain, memiliki jumlah kontak sosial yang minimal dan mereka kurang dalam memenuhi kualitas hubungan" (Nicholson, 2009).

Globalisasi telah membawa sebagian manusia ke dalam situasi terisolasi. Jutaan orang saat ini berada dalam kondisi terisolasi secara sosial. Kondisi terisolasi terjadi saat individu merasa dirinya terisolasi dari orang lain. Mereka merasa terisolasi dari segi tempat tinggal atau dari segi aktivitas mereka. Beberapa orang tinggal di daerah pedesaan yang tidak menawarkan kesempatan kepada mereka untuk mengenal tetangga mereka atau mencari teman baru. Ada sebagian orang yang menghabiskan begitu banyak waktu yang mereka miliki dengan hanya tinggal di rumah sehingga mereka merasa terasing dari orang lain. Masalah ini mempengaruhi mereka untuk mengembangkan kondisi mental mereka ke taraf yang lebih baik. Mereka cenderung mengalami depresi dan kecemasan yang dapat menyebabkan mereka membutuhkan bantuan dan dukungan dari lingkungan sosialnya.

Isolasi sosial adalah suatu keadaan di mana individu merasa kurang memiliki kontak atau tidak memiliki kontak sama sekali dengan individu lainnya atau masyarakat sekitarnya. Dalam berbagai tingkatan usia, isolasi sosial dapat menjadi masalah, meskipun gejalanya mungkin berbeda berdasarkan kelompok umur. Isolasi sosial berbeda dari situasi kesepian, yang hanya merupakan keadaan seorang diri. Isolasi sosial dapat terjadi dalam kesendirian atau saat berada di sekitar orang lain. Kesepian dapat dipilih atau dipaksakan, sehat atau tidak sehat. Isolasi sosial menggambarkan pengalaman yang tidak diinginkan seseorang dan sering kali berbahaya.

Ciri-ciri individu yang sedang berada dalam kondisi terasing (terisolasi) secara sosial digambarkan dengan ciri sebagai berikut:

1. Menghindari interaksi sosial karena merasa malu atau depresi.
2. Menghabiskan waktu yang lama seorang diri.
3. Mengalami kecemasan sosial atau ketakutan yang berlebihan akan pengabaian pada gagasan interaksi sosial.
4. Hanya memiliki kontak sosial yang terbatas atau sempit.
5. Kurangnya hubungan sosial atau profesional yang penting bagi mereka.

6. Terlalu larut dalam kesusahan dan rasa kesepian yang parah.

Isolasi sosial adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian dengan kesepian, walaupun keduanya berkaitan erat, tidak berarti keduanya sama, dua hal tersebut adalah kondisi yang berbeda. Lebih mudahnya, isolasi sosial adalah situasi yang menggambarkan tidak adanya kontak (hubungan) sosial dan dapat menyebabkan kesepian. Isolasi sosial adalah keadaan terputus seseorang dari jaringan sosial yang normal. Kondisi tersebut dapat dipicu oleh faktor-faktor seperti kehilangan mobilitas, pengangguran, atau masalah kesehatan. Orang yang mengalami isolasi sosial ada kecenderungan untuk diam dia dalam rumah untuk jangka waktu yang lama, tidak memiliki akses ke layanan sosial atau akses untuk berpartisipasi dalam masyarakat, serta memiliki sedikit atau tidak ada komunikasi sekali dengan teman, keluarga, dan kenalan.

Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya isolasi sosial. Banyak hal yang dapat mencegah orang untuk meninggalkan rumah dan melakukan kontak dengan anggota masyarakat lainnya, seperti penyakit yang tak kunjung sembuh, disabilitas, masalah transportasi, pengangguran, kondisi ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa orang mungkin secara fisik bisa pergi keluar rumah dan bertemu dengan orang-orang, tetapi terhalang untuk melakukan kontak sosial karena kondisi sosial tertentu seperti dalam keadaan depresi, kesulitan sosial, menjadi penjaga bagi orang yang dicintai, atau berkabung. Salah satu dari faktor-faktor ini dapat menjadi penghalang untuk membentuk dan memelihara jejaring sosial dan dapat menyebabkan kesepian serta isolasi.

Sebuah tim peneliti dari Universitas McGill menemukan bahwa setelah hanya beberapa jam saja, isolasi dapat menyebabkan persepsi waktu yang menyimpang, tingkat kecemasan yang tinggi, dan bahkan halusinasi. Studi kasus tahanan yang ditahan di sel isolasi juga menunjukkan bahwa kurangnya kontak dengan manusia dapat menyebabkan kerusakan kognitif. Narapidana yang tinggal di sel isolasi adalah contoh ekstrem isolasi sosial, tetapi banyak dari kita mengalami kesepian dalam bentuk lain ketika kita menjalani kehidupan sehari-

hari kita. Hidup sendiri, memiliki jaringan sosial yang tidak cukup, dan partisipasi masyarakat yang jarang dalam kegiatan sosial seperti sukarelawan atau layanan keagamaan semuanya telah terbukti mengarah pada terwujudnya isolasi sosial. Narapidana yang ditahan di sel isolasi dalam jangka waktu yang lama, dapat mengalami halusinasi, insomnia, stres pasca trauma, dan kesulitan menentukan waktu.

Bukan rahasia lagi bahwa isolasi dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik. Studi menunjukkan bahwa kurangnya koneksi sosial dapat meningkatkan risiko kematian setidaknya 50%, sementara dalam beberapa kasus, isolasi dapat meningkatkan risiko kematian lebih dari 90%. Selain itu, isolasi sosial telah dikaitkan dengan tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular, kerentanan terhadap infeksi, dan respons imun yang terlalu aktif. Kesepian dapat memengaruhi kesehatan mental, emosional, dan kesehatan fisik seseorang. Tanpa interaksi sosial yang cukup, seseorang mungkin berisiko mengalami penurunan kognitif, terjadinya penyakit Alzheimer atau Demensia, depresi, neurotisme, kecemasan sosial, kurang percaya diri, dan halusinasi. Isolasi dan masalah kesehatan mental juga dapat berinteraksi satu sama lain dalam lingkaran umpan balik. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengalami depresi karena kesepian yang intens, kemudian merasa lebih terisolasi karena depresi mereka. Keterasingan sosial juga bisa menghalangi fungsi aktivitas harian manusia, seperti pola tidur yang bermasalah, fokus kinerja otak yang terganggu, dan mempengaruhi sistem kerja penalaran logis dan verbal manusia.

Sejumlah penelitian telah mendokumentasikan hubungan antara isolasi, kesepian, dan masalah kesehatan fisik. Kesepian mungkin sama buruknya bagi kesehatan bagi seseorang seperti merokok 15 batang per-hari. Beberapa dampak kesehatan yang disebabkan adanya isolasi sosial adalah tingginya kadar hormon stres dan peradangan, penyakit jantung, termasuk tekanan darah tinggi dan penyakit arteri koroner, berisiko tinggi terjadinya disabilitas, meningkatnya kerentanan terhadap penyakit kronis seperti diabetes tipe 2. Isolasi sosial bahkan dapat meningkatkan risiko kematian dini seseorang. Sebuah studi pada tahun 2015 menunjukkan bahwa isolasi sosial meningkatkan

resiko kematian seseorang hingga 30%. Isolasi ekstrem dapat memiliki efek bencana yang luar biasa pada kesehatan mental. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kontak manusia untuk berkembang — dan terkadang bahkan untuk bertahan hidup. Bayi yang tidak mendapatkan kontak fisik yang cukup mungkin akan gagal untuk berkembang dan tumbuh dengan baik, bahkan akan mengalami kematian mati.

K. Lingkungan dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah mempengaruhi semua proses dan bentuk kehidupan organik dan anorganik di muka bumi. Pengaruh-pengaruh tersebut secara tidak langsung telah mengancam berbagai bentuk kehidupan planet bumi. Terlepas dari status ekonomi, status sosial, status budaya, dan status politik yang melekat pada manusia, dampak yang paling signifikan di antara dampak-dampak tersebut adalah segala hal yang berkaitan dengan hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupan mereka dengan bermartabat dan memiliki rasa hormat. Hak asasi manusia dan mata pencaharian sebagai sumber kehidupan manusia terpengaruh karena adanya dampak iklim yang sangat kritis. Perubahan iklim yang semakin ekstrem telah mengancam dunia pertanian sebagai sumber pangan dan ekonomi. Perubahan iklim juga mempengaruhi sumber daya alam lainnya yang menawarkan berbagai pilihan mata pencaharian kepada masyarakat.

Mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak perubahan iklim akan terhambat aksesnya atas pendapatan serta bisa merubah status sumber daya kepemilikan pribadi mereka. Efek pada pertanian dan sumber daya alam telah menyebabkan hilangnya pekerjaan, sistem produksi, kesehatan, dan kematian pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir. Akibat perubahan iklim, pada masa-masa mendatang diperkirakan jutaan orang akan semakin menderita.

Ada beberapa isu yang perlu dikaji dan dibuat kebijakannya terkait Hak asasi manusia dengan dampak perubahan iklim, yaitu:

1. Hak untuk hidup

Manusia harus dihindarkan dari kematian, wabah penyakit, cedera akibat terjadinya gelombang panas, bencana banjir, badai, kebakaran dan kekeringan. Selain itu, manusia juga harus dihindarkan dari risiko kematian dan cedera akibat tenggelam karena adanya perubahan pada ekosistem sungai dan kenaikan permukaan air laut. Manusia juga harus dihindarkan dari meningkatnya angka kematian di kalangan orang tua atau orang muda karena sakit kronis.

2. Hak untuk memperoleh makanan

Meningkatnya kejadian gagal panen akibat perubahan iklim telah membuat hampir 50 juta orang lebih berisiko mengalami kelaparan pada tahun 2020, dan diperkirakan akan semakin meningkat hingga mencapai sekitar 132 juta orang pada tahun 2050. Perubahan iklim yang semakin tak terkontrol telah membuat lahan-lahan pertanian subur terus menyusut, musim tanam yang lebih pendek, dan hasil panen yang lebih sedikit. Dampaknya tidak hanya akan menambah kelaparan tetapi juga meningkatkan kekurangan gizi. Perubahan iklim juga telah menyebabkan meningkatnya suhu udara dan menyebabkan jutaan orang di dunia mengalami kekurangan air serta penurunan hasil panen hingga 30% di beberapa bagian Asia. Diperkirakan pada tahun 2050, kondisi tersebut akan menyebabkan ketahanan pangan terancam dan rapuh.

3. Hak subsistensi

Manusia memiliki tiga hak subsestensi, diantaranya:

a) Air

Pada tahun 2020, diperkirakan sekitar 75 juta hingga 250 juta orang di Afrika akan menghadapi masalah sumber air bersih akibat terjadinya perubahan iklim. Selain itu, pada tahun 2050, aliran air yang bersumber dari gletser gunung diperkirakan akan semakin berkurang sehingga dapat mempengaruhi kehidupan satu miliar orang yang tinggal di kawasan Asia.

b) Sumber daya alam

Sekitar 20-30% spesies tumbuhan dan hewan telah berada dalam risiko kepunahan yang tinggi akibat kenaikan suhu global yang telah mencapai 1,5-2,5 ° C. Indikasi lainnya yaitu

terjadinya pemutihan pada ekosistem karang dan erosi kawasan pesisir. Kondisi tersebut akan mempengaruhi stok ikan - saat ini, ikan merupakan sumber utama protein hewani bagi sekitar satu miliar lebih manusia.

c) Properti dan tempat tinggal

Diperkirakan pada tahun 2080, jutaan orang di dunia berisiko menghadapi banjir tahunan karena kenaikan permukaan air laut. Bencana banjir kebanyakan akan melanda kawasan mega-delta Asia dan Afrika. Permukaan air Laut yang naik akan mengakibatkan pada timbulnya genangan dan erosi, mengancam infrastruktur vital, permukiman, dan fasilitas yang mendukung mata pencaharian.

4. Hak atas Kesehatan

Terjadinya malnutrisi pada anak diperkirakan akan semakin meningkat, sehingga merusak prospek pertumbuhan dan perkembangan jutaan anak di dunia. Meningkatnya banjir dan kekeringan akan menyebabkan lebih banyak terjadinya kasus wabah diare dan kolera. Saat ini, diperkirakan dalam per-tahunnya sekitar 150.000 orang mati akibat malaria dan gizi buruk yang disebabkan oleh perubahan iklim. Bahkan, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), diperkirakan 220-400 juta orang lagi akan menghadapi risiko malaria. Sementara, risiko demam berdarah diperkirakan mencapai 3,5 miliar orang pada tahun 2085 karena perubahan iklim.

Pengalaman beberapa negara di dunia terkait dengan kebijakan yang menangani perubahan iklim sejauh ini telah menekankan pada upaya mitigasi dan adaptasi strategi. Mitigasi akan memastikan pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai hal yang penting untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Sedangkan strategi adaptasi akan membantu negara membangun ketahanan terhadap dampak yang tak terhindarkan sebagai obat penting karena gagal menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Pendekatan semacam itu paling baik dibangun berdasarkan premis:

- a) Jaminan pokok minimum - standar dasar kehidupan;
- b) Penanganan tingkat kerentanan masyarakat;
- c) Memastikan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan intervensi lokal;
- d) Akuntabilitas dan tata kelola sosial; dan
- e) Pendekatan yang memungkinkan realisasi hak oleh masyarakat.

Tanpa adaptasi dan langkah-langkah mitigasi yang kuat, perubahan iklim akan semakin memperburuk kerentanan, menempatkan kesehatan dan keamanan manusia dalam bahaya, serta menghambat pembangunan berkelanjutan. Integrasi dimensi sosial ke dalam tahapan ini sangat penting karena menyangkut kerangka kerja pembangunan dan hak asasi manusia.

Manusia tidak hanya menjadi korban dampak negatif dari perubahan iklim, mereka juga menjadi pendorong perubahan iklim dan agen penting untuk mengarahkan kembali lintasan pembangunan. Pemahaman ini - tentang peran sentral masyarakat, dimensi sosial dan lembaga - harus secara mendalam membentuk kembali cara berpikir pembuat kebijakan dalam menyusun dan menerapkan kebijakan perubahan iklim. Para pembuat kebijakan harus mampu membuat mitigasi dan menyusun strategi adaptasi.

Dampak perubahan iklim akan semakin mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia dalam hal pekerjaan dan mata pencaharian, kesehatan, perumahan, air, keamanan pangan dan gizi, dan realisasi kesetaraan gender dan hak asasi manusia lainnya. Dampak ini diperkirakan akan menimpa masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam seperti pertanian dan perikanan. Para petani dan nelayan terkadang hanya memiliki sedikit kapasitas sehingga memiliki kesulitan untuk melindungi dirinya dari kerentanan sosial akibat pengaruh perubahan iklim. Mereka akan kesulitan mengadaptasi dirinya atau memulihkan kerugian yang menimpa dirinya. Maka perlu bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dan langkah-langkah yang efektif guna mengatasi dampak ini. Selain itu kebijakan juga harus diintegrasikan dengan kebijakan pengendalian (pengurangan) emisi

gas rumah kaca. Sukses atau tidaknya integrasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada transformasi hubungan sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada kerentanan mereka.

Berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut akan berpengaruh langsung pada perilaku dan tindakan sehari-hari individu dalam masyarakat, rumah tangga, komunitas, dan negara. Negara harus memberdayakan masyarakat yang rentan dengan cara meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Kebijakan terhadap perubahan iklim juga harus memastikan tingkat ketahanan dan keberlanjutan ekonomi di masa depan. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mampu mengukur pengaruh perubahan iklim dan terhubung dengan berbagai dimensi sosial masyarakat. Kebijakan juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih adil dan merata. Maka menjadi sangat penting dan krusial bagi pemerintah untuk merancang sebuah kebijakan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi yang benar-benar berkelanjutan.

Dimasukkannya dimensi sosial dalam pembuatan kebijakan sosial atas dampak perubahan iklim memiliki beberapa alasan yang sangat penting. Pertama, dimensi sosial sudah disepakati bersama sebagai bagian dari upaya penanggulangan perubahan iklim, walaupun pada prakteknya masih sering diabaikan. Kedua, dimasukkannya dimensi sosial dalam kebijakan iklim adalah prasyarat untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati; kebijakan ini harus dilihat sebagai respons dan tindakan atas dampak. Hak-hak yang harus dilindungi meliputi keamanan, kehidupan, kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat, terutama masyarakat yang paling rentan. Efektivitas kebijakan perubahan iklim akan sangat mungkin ditingkatkan jika dimensi sosial terintegrasi secara penuh. Dari berbagai kasus sejarah perkembangan manusia, dimasukkannya dimensi sosial sangat penting jika masyarakat yang paling kuat dan memiliki sumber daya mampu mengubah kebiasaan dan pola konsumsi. Akhirnya, ada sinergi penting antara agenda perubahan iklim, agenda pembangunan berkelanjutan, dan agenda HAM yang saling melengkapi, baik dalam hal tujuan dan sarana pencapaiannya. Dengan mengintegrasikan dimensi sosial dalam

kebijakan iklim, sinergi ini memiliki potensi signifikan untuk memperkuat hasil yang nyata.

L. Pembangunan Berkelanjutan

Agenda pembangunan 2030 adalah Pembangunan Berkelanjutan. Kita mengenalnya dengan agenda yang memiliki 17 tujuan dan 169 Sasaran. Tujuan dan sasaran yang dimiliki bukanlah sedikit, lalu bagaimana cara mencapainya?. Satu hal yang pasti: memenuhi setiap tujuan dan sasaran akan melibatkan banyak ide, lembaga, kebijakan, dan aktor yang beragam dan berbeda-beda. Sebuah strategi yang disusun untuk mengidentifikasi adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara tujuan dengan kebijakan untuk mencapai dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan perlu dijadikan sebagai pusat perhatian dalam kegiatan pembangunan selama 10 tahun ke depan.

Kebijakan sosial dan intervensi kolektif dalam ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke mata pencaharian yang memadai dan aman, serta pendapatan dan layanan sosial dapat menjadi acuan penting untuk menciptakan strategi terpadu dalam pembangunan berkelanjutan, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan bentuk uji coba yang baik bagaimana cara menggabungkan kepentingan lintas sektoral. Kebijakan sosial dan intervensi kolektif dengan segala fungsinya bisa menyatukan kepentingan ekonomi dan sosial: produksi barang dan jasa, perlindungan dari rasa takut dan keinginan, kepedulian terhadap orang-orang yang rentan dan memiliki ketergantungan, redistribusi kekayaan dan pendapatan, dan kohesi sosial, yang semuanya sangat penting untuk mencapai dunia yang kita inginkan.

Secara historis, kebijakan sosial merupakan hasil dari nilai, prinsip, kepentingan politik, dan ekonomi yang saling bersaing. Baik itu negara maju maupun negara berkembang, kebijakan akan berubah ketika kepentingan ini saling bersaing, berkonfrontasi, dan berkompromi satu sama lain mengenai sifat dan bentuk produksi, perlindungan, perawatan, redistribusi, dan kohesi sosial. Inovasi, baik itu dalam konsep, pengetahuan, kebijakan, proses maupun teknologi, merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mempercepat perubahan dan menciptakan

tren baru dalam kebijakan sosial. Terlepas dari beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa tidak semua inovasi akan menghasilkan perubahan transformatif yang mendasar dalam hubungan sosial dan institusi untuk menjadikannya lebih inklusif dan adil, serta redistribusi dan penyeimbangan kembali kekuatan sumber daya ekonomi. Mungkin pada awalnya beberapa inovasi mampu menciptakan perubahan transformatif, tetapi kemudian menjadi hambatan dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, atau sebaliknya.

Agenda 2030 berbicara tentang perlunya perubahan transformatif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Agar pembangunan bisa membawa perubahan secara terpadu, ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan oleh para penyusun kebijakan sosial: Kebijakan sosial apa yang saat ini kita miliki?. Inovasi apa yang dapat diidentifikasi?. Bagaimana mereka membentuk hubungan antara berbagai fungsi kebijakan sosial?. Kontribusi apa yang dapat mereka berikan ketika membuat strategi terpadu dalam pembangunan berkelanjutan guna mencapai tujuan? Kebijakan sosial mana yang dapat mengubah dunia ini menjadi dunia yang lebih inklusif, demokratis, dan berkelanjutan?.

MASALAH SOSIAL DAN KEBIJAKAN SOSIAL

Perubahan sosial menciptakan begitu banyak masalah sosial. Dalam masyarakat fungsional (norma, nilai, adat istiadat, tradisi, dan hukum masyarakat), ketika terjadi perubahan maka sistem tatanan sosial kemasyarakatan akan terpengaruh, baik itu langsung maupun tidak langsung. Sebagian masyarakat akan terganggu oleh kekuatan perubahan sosial yang terjadi di eksternal atau internal mereka. Situasi masyarakat yang berubah sedikit banyak akan membawa sejumlah konsekuensi logis, baik itu kondisinya sendiri yang berubah dan tidak dapat diterima atau terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam kondisi yang ekstrem, perubahan sosial bisa melebihi batas toleransi kewajaran yang berlaku dalam masyarakat. Misal, pekerja anak, kemiskinan, rasisme, atau ketidaksetaraan gender.

Kondisi sosial diidentifikasi sebagai masalah sosial ketika terjadi fenomena atau kondisi sosial tertentu yang mengganggu tatanan sosial dan menghambat kelancaran kinerja lembaga sosial yang wujud dalam masyarakat. Pada fase awal, kondisi seperti itu kadang diabaikan karena tidak memiliki efek buruk yang serius pada sistem sosial. Namun lambat laun, kondisi itu kemudian terakumulasi dan mulai mempengaruhi kehidupan sosial. Maka, kondisi seperti itu akan diakui sebagai masalah sosial. Begitu masalah sosial berakar dan berkembang di luar batas toleransi, timbul kebencian terhadapnya dan ada tuntutan untuk melakukan pemulihan demi kepentingan tatanan sosial yang harmoni.

Masalahnya, adalah kondisi ketidakpuasan yang dibenci oleh seseorang. Tetapi, ketika itu dibenci oleh banyak orang, itu menjadi masalah sosial. Agar suatu masalah dikatakan menjadi masalah sosial, harus melibatkan sejumlah besar orang, kadang-kadang kelompok dan lembaga, yang menganggap kondisi tertentu sebagai sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak dapat ditoleransi serta ingin segera diperbaiki melalui tindakan kolektif. Dengan demikian, tidak semua

masalah bersifat sosial, kecuali orang-orang yang tidak puas tersebut kemudian bersentuhan dan menyuarakan ketidakpuasan mereka dan secara bersama-sama melakukan sesuatu untuk mencari solusinya. Sebuah masalah akan menjadi masalah sosial ketika dikomunikasikan kepada orang lain dan aktivitas satu orang mengarah ke aktivitas serupa orang lain.

Dari gambaran di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah sosial berbeda dari masalah individu. Masalah individu adalah masalah yang hanya dirasakan oleh satu orang atau sekelompok kecil orang dan tidak berpengaruh terhadap masyarakat lainnya. Resolusi-resolusi sosial terletak pada kekuatan individu dan lingkungan sosial dari individu atau kelompok tersebut. Namun, masalah publik membutuhkan pendekatan yang kolektif untuk menemukan solusinya. Tidak ada satu individu atau satu kelompok pun yang harus bertanggung jawab atas munculnya situasi yang menjadi masalah sosial ini. Karena kendali atas situasi ini juga di luar kemampuan satu orang atau beberapa orang.

A. Masalah Sosial

Secara umum, masalah sosial dipahami sebagai suatu kondisi yang merusak kesejahteraan sebagian atau semua anggota masyarakat dan biasanya merupakan masalah kontroversi publik. Masalah sosial adalah istilah umum yang diterapkan pada berbagai kondisi dan perilaku menyimpang yang merupakan manifestasi dari disorganisasi sosial. Ini adalah kondisi yang oleh kebanyakan orang dalam masyarakat dianggap tidak diinginkan dan ingin dikoreksi dengan mengubahnya melalui beberapa cara rekayasa sosial atau perencanaan sosial (*Oxford Dictionary of Sociology*, 1994).

Istilah "masalah sosial" biasanya digunakan untuk merujuk pada kondisi sosial yang mengganggu atau merusak masyarakat — kejahatan, rasisme, dan sejenisnya. Sosiologi mendefinisikan masalah sosial secara berbeda dan mengadopsi pendekatan analitis yang berbeda. Pendekatan ini - kadang-kadang disebut konstruksionis - mendefinisikan masalah sosial dalam hal proses, bukan jenis kondisi. Pandangan ini fokus pada bagaimana dan mengapa orang memahami

bahwa suatu kondisi harus dipandang sebagai masalah sosial, yaitu, bagaimana mereka secara sosial membangun masalah sosial.

Konsep masalah sosial pertama kali dikembangkan oleh sosiolog bernama Fuller dan Mayer (1941), mereka mendefinisikannya sebagai 'kondisi atau situasi yang dianggap oleh anggota masyarakat sebagai ancaman terhadap nilai-nilai mereka. Bagi Fuller dan Mayer (1941), masalah sosial dimulai dengan kebangkitan orang di wilayah tertentu, dengan realisasi nilai-nilai berharga tertentu yang terancam oleh kondisi yang telah menjadi akut. Reinhardt (1952) mendefinisikannya sebagai situasi yang berhadapan dengan kelompok atau bagian masyarakat yang menimbulkan konsekuensi merugikan yang hanya dapat ditangani secara kolektif. Sementara, Raab dan Selznick (1959) berpendapat bahwa masalah sosial adalah masalah hubungan manusia yang serius yang mengancam masyarakat atau menghambat aspirasi penting banyak orang. Merton dan Nisbet (1961) mendefinisikan sebagai cara perilaku yang dianggap oleh sebagian besar tatanan sosial sebagai pelanggaran terhadap satu atau lebih norma yang diterima secara umum atau disetujui. Sementara Walsh dan Furfey (1958), mendefinisikan masalah sosial sebagai penyimpangan dari cita-cita sosial yang dapat diatasi dengan upaya kelompok. Sedangkan Horton dan Leslie (1970), menyatakan masalah sosial sebagai suatu kondisi di mana sebagian besar orang tidak menginginkannya dan ingin memperbaikinya. Masalah sosial dilihat sebagai perilaku menyimpang yang tidak disetujui dan melebihi batas toleransi komunitas. L.K. Frank (1925), melihat masalah sosial sebagai kesulitan untuk menghilangkan atau mengkoreksi kelakuan buruk sebagian besar orang. Terakhir, Rose (1957), mendefinisikan masalah sosial sebagai situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar orang, mereka percaya bahwa situasi tersebut bertanggung jawab atas kesulitan atau ketidaknyamanan yang mereka alami sehingga harus dihilangkan.

Masalah sosial adalah faktor umum yang mempengaruhi dan merusak masyarakat. Masalah sosial biasanya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan masalah dengan area atau kelompok orang tertentu di dunia. Masalah sosial sering kali melibatkan masalah yang mempengaruhi dunia nyata. Masalah sosial juga

mempengaruhi reaksi orang terhadap situasi tertentu. Contohnya Perilaku Anti-sosial, Kemiskinan, Penyalahgunaan obat-obatan, Prostitusi, Diskriminasi ras, Penyalahgunaan alkohol, Perampasan hak-hak ekonomi, Pengangguran, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, kehamilan di luar nikah, putus sekolah, dan kurangnya infrastruktur.

Masalah sosial adalah setiap kondisi atau perilaku yang memiliki konsekuensi negatif bagi sejumlah besar orang dan yang secara umum diakui sebagai kondisi atau perilaku yang perlu ditangani. Definisi ini memiliki komponen obyektif dan subyektif. Komponen obyektif melibatkan bukti empiris tentang konsekuensi negatif dari suatu kondisi atau perilaku sosial, sedangkan komponen subyektif melibatkan persepsi bahwa kondisi atau perilaku memang merupakan masalah yang perlu ditangani. Kondisi obyektif, seperti kejahatan, kemiskinan, konflik komunal dan sebagainya, keberadaan dan besarnya dapat diamati, diverifikasi dan diukur oleh pengamat sosial yang tidak memihak. Sementara, definisi subyektif adalah pandangan beberapa anggota masyarakat yang melihat kondisi obyektif adalah 'masalah' dan harus ditindaklanjuti. Di sinilah nilai berperan. Orang-orang mulai merasakan bahwa beberapa nilai sedang terancam.

B. Konstruksi Sosial Masalah-masalah Sosial

Pada akhir abad kedua puluh, daftar masalah sosial semakin banyak dan terus bertambah, misal kemiskinan, tunawisma, pelecehan terhadap anak, masalah pendidikan, Putus sekolah, perlakuan terhadap orang yang rentan secara sosial, vandalisme, perilaku lalu lintas, pengasuhan oleh orang tua tunggal, dan masalah perceraian. Daftar tersebut, mungkin saja saat ini sedang berlangsung (sering terjadi) atau mungkin sudah berkurang, bahkan hilang sama sekali. Masalah-masalah tersebut saat ini mungkin sudah menjadi masalah (Perhatian) publik atau hanya menjadi masalah yang bersifat privat. Maka, konstruksi sosial ini harus dibagi dalam dua kelompok, menjadi masalah publik dan masalah privat. Fakta-fakta tersebut - menangkap kepentingan publik, kegelisahan, atau kekhawatiran publik. Fakta-fakta tersebut memerlukan perhatian dan jawaban (solusi) untuk didiskusikan.

Penting bagi kita untuk menekankan kata “khusus” di sini. Masalah-masalah yang dihadapi masing-masing negara berbeda. Masalah yang dihadapi Indonesia mungkin saja berbeda dengan negara-negara sekitarnya seperti negara-negara di kawasan ASEAN. Masyarakat negara lain mungkin disibukkan oleh masalah lain: apa yang menarik perhatian publik Indonesia, bisa saja berbeda dengan kondisi negara-negara berkembang lainnya. Pada akhir abad ke-19, misalnya, kita akan mengatakan bahwa kemiskinan, penganiayaan terhadap anak-anak, dan perceraian adalah masalah sosial, tetapi bisa saja tidak semua negara akan menganggap hal tersebut sebagai masalah sosial yang serius. Ada dua penjelasan yang bisa dijadikan sebagai pisau analisa terkait perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satunya adalah bahwa masalah sosial berubah. Jika pada akhir abad kesembilan belas tidak ada tunawisma, maka kita tidak akan mengharapkan kasus tunawisma dibahas sebagai masalah sosial. Alasan kedua adalah bahwa apa yang dianggap sebagai masalah sosial dapat berubah. Dengan demikian mungkin memang ada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal pada akhir abad ke-19, tetapi situasi mereka dianggap bukan sebagai masalah sosial, melainkan sebagai 'fakta kehidupan' atau sebagai konsekuensi dari ketidakberuntungan individu belaka – di mana keduanya tidak akan membuat itu sebagai masalah sosial.

Tahun 1950-an, seorang sosiolog Amerika bernama C. Wright Mills (1959) menguraikan tentang perbedaan antara 'masalah pribadi' dan 'masalah publik'. Dia menyarankan bahwa meskipun ada banyak 'kesulitan' atau 'masalah' yang dialami oleh individu dalam kehidupan mereka, tidak semuanya akan menjadi 'masalah publik', yang mendorong adanya ketertarikan dan perhatian publik atau yang dipandang membutuhkan tanggapan publik. Penggunaan istilah 'pribadi' oleh Mills mungkin sedikit menyesatkan, karena menyiratkan bahwa perbedaan antara pengalaman individu dan kolektiflah yang penting. Namun, perbedaan yang penting bagi penulis, adalah perbedaan antara isu-isu yang bersifat 'pribadi' (yang harus ditangani dalam rumah tangga, keluarga atau bahkan masyarakat) dan yang bersifat 'publik' (yang harus ditangani melalui bentuk intervensi sosial atau regulasi). Salah satu faktor yang dapat membuat perbedaan adalah

skala (volume) hal-hal yang dianggap sebagai masalah pribadi atau masalah publik. Jika hanya beberapa orang yang mengalami beberapa bentuk masalah, maka kemungkinannya hal tersebut akan tetap menjadi masalah pribadi dan tidak menarik perhatian publik. Namun, jika sejumlah besar orang mulai mengalami masalah yang sama, hal tersebut bisa menjadi masalah publik.

C. Perspektif Sosiologis tentang Masalah Sosial

Pemahaman sosiologis tentang masalah sosial sangat bergantung pada konsep imajinasi sosiologis (*The Sociological Imagination*). Maksud imajinasi Sosiologis adalah banyak orang yang mengalami satu atau lebih masalah sosial secara pribadi. Misalnya, banyak orang miskin dan menganggur, banyak yang kesehatannya buruk, dan banyak yang memiliki masalah keluarga, kecanduan alkohol, atau melakukan kejahatan. Ketika kita mendengar tentang orang-orang ini mudah berpikir bahwa masalah mereka adalah masalah mereka sendiri, terlepas mereka dan orang lain mengalami masalah yang sama, maka yang harus disalahkan adalah mereka sendiri.

Sosiologi mengambil pendekatan yang berbeda. Sosiologi menekankan pada masalah individu yang sering kali berakar pada masalah yang muncul dari aspek masyarakat itu sendiri. Masalah pribadi mengacu pada masalah yang memengaruhi individu serta anggota masyarakat lainnya, biasanya kegagalan muncul karena kegagalan pribadi dan moral individu yang bersangkutan. Sedangkan masalah publik sumbernya terletak pada struktur sosial dan budaya masyarakat. Masalah publik merujuk pada masalah sosial yang memengaruhi banyak orang. Maka, masalah yang terjadi dalam masyarakat dengan demikian dapat membantu menjelaskan masalah yang dialami oleh individu. Mills (1959), merasa bahwa banyak masalah yang biasanya dianggap sebagai masalah pribadi paling baik jika dipahami sebagai masalah publik, dan ia menciptakan istilah imajinasi sosiologis untuk merujuk pada kemampuan menghargai dasar struktural masalah individu.

Untuk mengilustrasikan sudut pandang Mills, mari kita gunakan imajinasi sosiologis kita untuk memahami beberapa masalah sosial

kontemporer. Kita akan mulai dengan pengangguran yang sering didiskusikan oleh Mills sendiri. Jika hanya beberapa orang yang menganggur, tulis Mills, kita dapat menjelaskan pengangguran mereka dengan mengatakan bahwa mereka malas, kurang memiliki kebiasaan kerja yang baik, dan sebagainya. Jika demikian, pengangguran mereka akan menjadi masalah pribadi mereka sendiri. Tetapi ketika jutaan orang yang kehilangan pekerjaan, maka pengangguran bisa dipahami sebagai masalah publik karena itu terjadi pada hampir semua orang.

D. Masalah Sosial, Perspektif Teoritis

Tiga perspektif teoritis sosiologis akan memandu pemahaman kita untuk memahami tentang masalah sosial: teori fungsionalis, teori konflik, dan teori interaksionis simbolik. Perspektif ini melihat masalah sosial yang sama, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Rangkuman dalam tabel berikut akan menjelaskan gambaran tiga teori di atas:

Tabel 04. Rangkuman Tiga Perspektif Teoritis Masalah Sosial

Perspektif Teoretis	Asumsi Utama	Pandangan Masalah Sosial
Fungsionalisme (<i>Fungsionalism</i>)	Stabilitas sosial diperlukan untuk masyarakat yang kuat, sosialisasi dan integrasi sosial yang memadai diperlukan untuk stabilitas sosial. Lembaga sosial masyarakat melakukan fungsi penting untuk membantu memastikan stabilitas sosial. Perubahan sosial yang lambat lebih diinginkan, dibanding perubahan	Masalah sosial melemahkan stabilitas masyarakat tetapi tidak mencerminkan kesalahan mendasar tentang bagaimana masyarakat terstruktur. Solusi untuk masalah sosial harus dilakukan melalui reformasi sosial yang dilakukan secara bertahap dari pada perubahan yang tiba-tiba dan berjangkauan jauh. Terlepas dari dampak negatifnya,

	sosial yang cepat tetapi mengancam tatanan sosial.	masalah sosial sering kali juga memiliki fungsi penting bagi masyarakat.
Teori Konflik (<i>Conflict theory</i>)	Masyarakat dicirikan oleh ketidaksetaraan yang meluas berdasarkan kelas sosial, ras, jenis kelamin, dan faktor-faktor lainnya. Diperlukan perubahan sosial yang jangkauannya sangat jauh untuk mengurangi atau menghilangkan ketimpangan sosial dan untuk menciptakan masyarakat yang egaliter.	Masalah sosial muncul dari kesalahan mendasar dalam struktur masyarakat dan keduanya mencerminkan serta memperkuat ketidaksetaraan berdasarkan kelas sosial, ras, jenis kelamin, dan dimensi lainnya. Solusi yang berhasil untuk masalah sosial harus melibatkan perubahan yang luas dalam struktur masyarakat.
Interaksionisme simbolik (<i>Symbolic interactionism</i>)	Orang membangun peran mereka saat mereka berinteraksi; mereka tidak hanya mempelajari peran yang telah ditetapkan masyarakat untuk mereka. Ketika interaksi ini terjadi, individu-individu menegosiasikan definisi mereka mengenai situasi-situasi di mana mereka menemukan diri mereka dan secara sosial membangun	Masalah sosial timbul dari interaksi individu. Orang-orang yang terlibat dalam perilaku sosial bermasalah sering mempelajari perilaku ini dari orang lain. Individu-individu yang berinteraksi juga belajar mempersepsikan masalah-masalah sosial dari orang lain.

	<p>realitas situasi ini. Dalam melakukan hal itu, mereka sangat bergantung pada simbol-simbol seperti kata-kata dan gerakan untuk mencapai pemahaman bersama tentang interaksi mereka.</p>	
--	--	--

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

1. Fungsionalisme

Fungsionalisme, juga dikenal sebagai teori atau perspektif fungsionalis, muncul dari dua revolusi besar abad kedelapan belas dan kesembilan belas. Revolusi pertama adalah Revolusi Prancis tahun 1789, revolusi yang berdarah-darah, penuh kekerasan, teror, dan mengguncang Eropa. Para aristokrasi di seluruh Eropa saat itu merasa takut bahwa revolusi akan menyebar ke tanah mereka sendiri, dan para intelektual khawatir bahwa tatanan sosial sedang runtuh.

Revolusi Industri abad ke-19 memperkuat kekhawatiran ini. Dimulai dari Eropa dan kemudian di Amerika Serikat, Revolusi Industri menyebabkan banyak perubahan, termasuk kebangkitan dan pertumbuhan kota. Akibatnya, banyak orang yang meninggalkan pertanian mereka untuk tinggal di dekat pabrik. Ketika kota-kota mulai tumbuh, orang-orang hidup dalam kondisi yang semakin miskin, penuh sesak, tunawisma, dan kejahatan merajalela.

Sebagai tanggapan atas kondisi tersebut, para intelektual kemudian menulis bahwa masyarakat yang kuat, sebagaimana dicontohkan oleh ikatan dan aturan sosial yang kuat dan sosialisasi yang efektif, diperlukan untuk mencegah tatanan sosial mengalami disintegrasi. Tanpa masyarakat yang kuat dan sosialisasi yang efektif, tatanan sosial akan rusak, dan kekerasan serta tanda-tanda lain dari gangguan sosial akan terjadi.

Émile Durkheim (1858-1917), seorang sarjana Prancis yang sebagian besar bertanggung jawab atas perspektif sosiologis, seperti yang kita

kenal sekarang, mengadopsi pandangan kaum intelektual konservatif tentang perlunya masyarakat yang kuat, Durkheim merasa bahwa manusia memiliki keinginan menghasilkan kekacauan kecuali masyarakat membatasi mereka (Durkheim, 1952). Ia menulis tentang dua mekanisme sosial: sosialisasi dan integrasi sosial. Sosialisasi membantu kita mempelajari aturan masyarakat dan kebutuhan untuk bekerja sama, karena orang pada akhirnya menyetujui norma dan nilai-nilai penting, sementara integrasi sosial, atau ikatan kita dengan orang lain dan dengan lembaga sosial seperti agama dan keluarga, membantu menyosialisasikan kita dan mengintegrasikan kita ke dalam masyarakat dan memperkuat rasa hormat terhadap aturan-aturannya.

Durkheim dan intelektual konservatif lainnya pada abad ke-19 menggunakan tubuh manusia sebagai model untuk memahami masyarakat. Di dalam tubuh manusia, berbagai organ dan bagian tubuh kita melayani fungsi penting untuk kesehatan dan stabilitas tubuh kita yang berkelanjutan. Mata kita membantu kita melihat, telinga membantu kita mendengar, jantung kita mengedarkan darah kita, dan sebagainya. Sama seperti kita dapat memahami tubuh kita dengan menggambarkan dan memahami fungsi-fungsi layanan untuk kesehatan dan stabilitasnya, demikian pula kita dapat memahami masyarakat dengan menggambarkan dan memahami fungsi-fungsi dan bagian-bagiannya — atau, lebih tepatnya, lembaga sosialnya — melayani untuk kesehatan yang berkelanjutan dan stabilitas masyarakat. Jadi fungsionalisme menekankan pentingnya institusi sosial seperti keluarga, agama, dan pendidikan untuk menghasilkan masyarakat yang stabil.

Mirip dengan pandangan para intelektual konservatif dari mana ia tumbuh, fungsionalisme skeptis terhadap perubahan sosial yang cepat dan pergolakan sosial yang terjadi secara besar-besaran. Analogi terhadap tubuh manusia membantu kita memahami skeptisisme ini. Dalam tubuh kita, perubahan yang tiba-tiba dan cepat adalah tanda bahaya bagi kesehatan kita. Jika kita mematahkan tulang di salah satu kaki kita, kita mengalami kesulitan berjalan; jika kita kehilangan pandangan di kedua mata kita, kita tidak bisa lagi melihat. Perubahan lambat, seperti pertumbuhan rambut dan kuku kita, tidak mengganggu kinerja organ tubuh secara keseluruhan, tetapi perubahan mendadak

seperti yang baru saja dijelaskan jelas menyusahkan. Dengan analogi seperti, menurut perspektif fungsionalis perubahan mendadak dan cepat dalam masyarakat dan lembaga sosialnya akan merepotkan. Bagi perspektif fungsionalis, setiap perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dalam masyarakat akan mengancam stabilitas dan masa depannya.

Fungsionalisme memandang masalah sosial sebagai akibat dari evolusi alami masyarakat. Ketika masalah sosial terjadi, itu mungkin mengancam stabilitas masyarakat, tetapi itu tidak berarti bahwa kelemahan mendasar dalam masyarakat tetap ada. Dengan demikian untuk mengatasi masalah sosial, reformasi sosial harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Secara tidak langsung Fungsionalisme mengatakan bahwa masalah sosial harus fungsional dalam beberapa cara bagi masyarakat, karena kalau tidak, masalah ini tidak akan berlanjut. Ini tentu merupakan saran yang kontroversial, tetapi memang benar bahwa banyak masalah sosial melayani fungsi penting bagi masyarakat kita. Sebagai contoh, kejahatan adalah masalah sosial utama, tetapi juga baik untuk ekonomi karena menciptakan ratusan ribu pekerjaan dalam penegakan hukum, pengadilan dan koreksi, keamanan rumah, dan sektor-sektor ekonomi lainnya yang peran utamanya adalah menangani kejahatan. Jika kejahatan menghilang, banyak orang akan kehilangan pekerjaan! Demikian pula, kemiskinan juga merupakan masalah sosial utama, tetapi satu fungsi yang dilayani kemiskinan adalah bahwa orang miskin melakukan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan orang lain (Gans, 1972). Seperti halnya kejahatan, kemiskinan juga menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang di seluruh negara, seperti mereka yang bekerja di agen layanan sosial yang membantu orang miskin.

2. Teori Konflik

Dalam banyak hal, teori konflik adalah kebalikan dari fungsionalisme tetapi ironisnya juga tumbuh dari Revolusi Industri, sebagian besar berkat Karl Marx (1818–1883) dan kolaboratornya, Friedrich Engels (1820–1895). Saat sebagian dari para intelektual konservatif takut akan kekerasan massa yang disebabkan oleh industrialisasi, Marx dan Engels menyesalkan kondisi yang mereka rasa bertanggung jawab

atas terjadinya kekerasan massa. Marx dan Engels menuding masyarakat kapitalislah yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini. Alih-alih takut akan terjadinya kehancuran tatanan sosial yang diwakili oleh kekerasan massa, Marx dan Engels merasa bahwa kekerasan revolusioner diperlukan untuk menghilangkan kapitalisme dan kemiskinan serta kesengsaraan yang mereka lihat sebagai hasil yang tak terhindarkan (Marx, 1906; Marx & Engels, 1962).

Menurut Marx dan Engels, setiap masyarakat dibagi menjadi dua kelas berdasarkan kepemilikan alat produksi (alat, pabrik, dan sejenisnya). Dalam masyarakat kapitalis, kelas borjuis, atau kelas yang berkuasa, memiliki alat-alat produksi, sedangkan kaum proletar, atau kelas pekerja, tidak memiliki alat-alat produksi dan sebaliknya ditindas dan dieksploitasi oleh kaum borjuis. Perbedaan ini otomatis menciptakan konflik kepentingan antara kedua kelompok. Sederhananya, borjuasi tertarik untuk mempertahankan posisinya agar tetap berada di puncak dalam struktur masyarakat, sementara kepentingan proletariat terletak pada keinginannya untuk menggulingkan kaum borjuasi untuk menciptakan masyarakat yang egaliter.

Dalam masyarakat kapitalis, Marx dan Engels menulis, revolusi tidak dapat dihindari karena kontradiksi struktural yang timbul dari sifat kapitalisme. Karena laba adalah tujuan utama kapitalisme, kepentingan borjuasi terletak pada memaksimalkan keuntungan. Untuk melakukannya, para kapitalis berusaha menjaga upah kaum buruh serendah mungkin dan menghabiskan uang sesedikit. Fakta sentral kapitalisme ini, kata Marx dan Engels, pada akhirnya mendorong munculnya kesadaran kelas, atau kesadaran akan alasan penindasan terhadap para pekerja. Kesadaran kelas mereka pada gilirannya membuat mereka memberontak melawan kaum borjuis untuk menghilangkan penindasan dan eksploitasi yang mereka derita.

Pandangan Marx dan Engels tentang konflik yang timbul dari posisi yang tidak setara yang dipegang oleh anggota masyarakat merupakan inti dari teori konflik saat ini. Teori ini menekankan bahwa kelompok yang berbeda dalam masyarakat memiliki minat yang berbeda yang berasal dari posisi sosial mereka yang berbeda. Kepentingan yang berbeda ini pada gilirannya menyebabkan pandangan

yang berbeda tentang masalah sosial yang sangat penting. Beberapa versi teori ini mengakar pada konflik berkenaan dengan perpecahan yang terjadi pada kasus ras dan etnis, jenis kelamin, dan perbedaan-perbedaan lainnya, sementara versi-versi lain mengikuti Marx dan Engels yang melihat konflik sebagai akibat dari timbulnya berbagai posisi dalam struktur ekonomi. Namun, secara umum, teori konflik menekankan bahwa berbagai bagian masyarakat berkontribusi terhadap ketidaksetaraan yang sedang berlangsung, sedangkan teori fungsionalis, seperti telah kita lihat, menekankan bahwa mereka berkontribusi pada stabilitas masyarakat yang berkelanjutan. Sementara, teori fungsionalis menekankan manfaat dari berbagai bagian masyarakat untuk stabilitas sosial yang sedang berlangsung, teori konflik lebih menyukai perubahan sosial untuk mengurangi ketidaksetaraan.

Dalam teori konflik kemudian berkembang lagi menjadi teori feminis. Teori ini telah berkembang dalam sosiologi dan disiplin ilmu lain sejak 1970-an dan kemudian membentuk cabang tersendiri. Kita menganggapnya sebagai aplikasi spesifik dari teori konflik. Dalam kasus ini, konflik tersebut menyangkut ketimpangan gender daripada ketimpangan kelas yang ditekankan oleh Marx dan Engels. Meskipun ada banyak variasi tentang teori feminis, para teoritis feminis sepakat untuk menekankan pada pandangan bahwa masyarakat dipenuhi dengan ketidaksetaraan gender sehingga perempuan adalah jenis kelamin yang lebih rendah dalam banyak dimensi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi (Lorber, 2010). Feminis liberal melihat ketidaksetaraan gender sebagai akibat dari perbedaan gender dalam sosialisasi, sementara feminis Marxis mengatakan bahwa wujudnya ketidaksetaraan merupakan hasil dari kebangkitan kapitalisme, yang membuat perempuan bergantung pada laki-laki untuk mendapatkan dukungan ekonomi. Di sisi lain, feminis radikal memandang ketidaksetaraan gender sebagai hal yang ada di semua masyarakat, bukan hanya masyarakat kapitalis.

Teori konflik dalam berbagai bentuknya memandang masalah sosial sebagai sesuatu yang timbul dari ketidaksetaraan yang melekat dalam masyarakat. Tergantung pada versi mana dari teori konflik yang hendak digunakan. Apakah teori konflik tentang ketidaksetaraan yang

berkontribusi pada masalah sosial yang didasarkan pada kelas sosial, ras dan etnis, jenis kelamin, atau dimensi lain dari hierarki masyarakat. Karena salah satu dari ketidaksetaraan ini merupakan kelemahan mendasar dalam masyarakat. Teori konflik mengasumsikan bahwa perubahan sosial mendasar diperlukan untuk mengatasi banyak masalah sosial masyarakat.

3. Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme simbolik berfokus pada interaksi individu dan bagaimana mereka menginterpretasikan interaksi mereka. Akarnya terletak pada karya awal tahun 1900-an oleh seorang sosiolog Amerika, sekaligus psikolog sosial dan filsuf yang tertarik pada kesadaran dan tindakan manusia. Herbert Blumer (1969) membuat tulisan-tulisan untuk mengembangkan model interaksionisme simbolik. Menurutnya, dalam interaksionis simbolik, orang tidak hanya merasa mempelajari peran yang telah ditetapkan masyarakat untuk mereka; alih-alih mereka membangun peran-peran ini ketika mereka berinteraksi. Ketika mereka berinteraksi, mereka menegosiasikan definisi mereka tentang situasi di mana mereka menemukan diri mereka sendiri dan secara sosial membangun realitas situasi ini. Dalam melakukannya, mereka sangat bergantung pada simbol-simbol seperti kata-kata dan gerak tubuh untuk mencapai pemahaman bersama tentang interaksi mereka.

Interaksionisme simbolik memandang masalah sosial sebagai akibat dari interaksi individu. Interaksi ini penting dalam dua hal. Pertama, perilaku bermasalah secara sosial seperti kejahatan dan penggunaan narkoba sering dipelajari dari interaksi kita dengan orang-orang yang terlibat dalam perilaku ini; kami mengadopsi sikap mereka yang membenarkan melakukan perilaku ini, dan kami mempelajari teknik khusus yang mungkin diperlukan untuk melakukan perilaku ini. Kedua, kita juga mempelajari persepsi kita tentang masalah sosial dari interaksi kita dengan orang lain, yang persepsi dan keyakinannya memengaruhi persepsi dan keyakinan kita sendiri.

Karena interaksionisme simbolik menekankan pada persepsi masalah-masalah sosial, maka ini sangat selaras dengan pandangan konstruksionis sosial yang dibahas sebelumnya. Kedua perspektif

tersebut menekankan sifat subyektif dari masalah sosial. Dengan melakukan itu, mereka mengingatkan kita bahwa persepsi sering kali penting setidaknya sebanyak realitas objektif dalam menentukan apakah suatu kondisi atau perilaku tertentu naik ke tingkat masalah sosial dan dalam jenis solusi yang mungkin didukung oleh berbagai pihak untuk konteks sosial tertentu.

E. Tahap Perkembangan Masalah Sosial

Sebagian besar masalah sosial telah melewati sejarah panjang yang terdiri dari beberapa tahap perkembangan (Spector & Kitsuse, 2001). Dalam bukunya *Constructing social problems*, Spector & Kitsuse (2001), menyebutkan beberapa tahapan perkembangan masalah sosial. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

1. Kemunculan dan Pengajuan Klaim

Masalah sosial muncul ketika entitas sosial (seperti kelompok perubahan sosial, media, atau politisi berpengaruh) mulai meminta perhatian terhadap suatu kondisi atau perilaku yang dianggapnya tidak diinginkan dan membutuhkan perbaikan. Sebagai bagian dari proses, ia mencoba untuk mempengaruhi persepsi publik tentang masalah, alasannya, dan kemungkinan solusi untuk itu. Karena entitas sosial membuat klaim tentang semua masalah, maka aspek Tahap 1 ini disebut proses pembuatan klaim. Tidak semua upaya untuk mengubah kondisi atau perilaku menjadi masalah sosial akan berhasil, dan jika tidak berhasil, masalah sosial tidak akan muncul. Karena sumber daya yang terbatas bahkan tidak dimiliki, entitas-entitas perubahan sosial harus berkolaborasi untuk melakukan perubahan.

2. Legitimasi

Begitu suatu kelompok sosial berhasil mengubah suatu kondisi atau perilaku menjadi masalah sosial, biasanya kelompok itu mencoba membujuk pemerintah (lokal, negara bagian, dan / atau federal) untuk mengambil tindakan — menyusun anggaran dan pembuatan kebijakan — untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai bagian dari upaya ini, ia mencoba meyakinkan pemerintah bahwa klaimnya tentang masalah itu sah — bahwa itu masuk akal

dan didukung oleh bukti empiris (berdasarkan penelitian). Jika kelompok-kelompok tersebut berhasil meyakinkan pemerintah tentang keabsahan klaimnya, kemungkinan besar pemerintah akan melakukan (mengambil) tindakan.

3. Klaim yang Diperbarui

Bahkan, jika tindakan pemerintah benar-benar dilakukan, kadang-kadang kelompok-kelompok perubahan sosial tersebut sering menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah masih terbatas dalam hal tujuan, jangkauan atau ruang lingkup untuk dapat berhasil mengatasi masalah sosial. Kelompok-kelompok ini akan kembali mendesak para pemangku kebijakan untuk menuntaskan tuntutan mereka. Mereka melakukannya dengan menegaskan kembali klaim mereka. Tahap ini mungkin akan menimbulkan cukup banyak ketegangan antara kelompok perubahan sosial dan target klaim mereka.

4. Pengembangan Strategi Alternatif

Meskipun ada klaim baru, kelompok perubahan sosial sering menyimpulkan bahwa pemerintah tidak menanggapi klaim mereka secara memadai. Meskipun kelompok ini dapat terus menyuarakan klaim mereka, mereka tetap menyadari bahwa klaim ini akan mengalami kegagalan dan tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari pemangku kepentingan. Kesadaran ini menuntun mereka untuk mengembangkan sendiri strategi mereka guna mengatasi masalah sosial.

F. Sifat Masalah Sosial

Masalah sosial terhubung dengan mayoritas anggota masyarakat. Menurut Bernad (1958), kondisi represif dan tegang akibat masalah sosial mungkin melibatkan tiga jenis elemen:

- a) Faktor ketegangan yang menghambat beberapa nilai masyarakat.
- b) Nilai sosial yang ditantang, dan
- c) Reaksi keras individu dan kelompok yang menantang.

Karakteristik berikut ini akan menunjukkan sifat dari masalah sosial:

1. Disintegratif

Masalah sosial, secara langsung atau tidak langsung menghancurkan sistem sosial. Masalah sosial menyebabkan ketidakpuasan, penderitaan, kesengsaraan. Bersifat patologis, dan berbahaya bagi masyarakat.

2. Berbagai Penyebab:

Masalah sosial tidak memiliki penyebab tunggal atau sederhana. Setiap masalah memiliki sejarah yang kompleks dan biasanya bukan karena satu tetapi karena banyak sebab. Perang, kemiskinan, pengangguran, atau kejahatan tidak memiliki penyebab tunggal. Kadang-kadang satu masalah ketika terjalin dengan masalah lain akan membuat masalah baru, sehingga tidak dapat diselesaikan secara terpisah-pisah.

3. Inter-Connected

Masalah sosial saling terkait dan menjadi masalah serius. Misalnya, pengangguran, kemiskinan, putus sekolah, dan kejahatan saling terkait.

4. Banyak Solusi

Oleh karena itu solusi dari masalah sosial yang kompleks membutuhkan berbagai macam solusi dan multi-sisi.

5. Konsep Relatif

Masalah sosial adalah konsep relatif. Apa yang kita sebut sebagai masalah sosial di masyarakat belum tentu itu merupakan masalah sosial di tempat lain. Demikian pula, masalah sosial yang terjadi hari ini, belum tentu akan menjadi masalah sosial di masa depan.

6. Nilai Fungsional

Masalah sosial, walaupun bersifat disintegrasi, memiliki nilai fungsional. Mengapa demikian? Karena penyembuhannya mengarah pada masalah sosial dan perkembangan sosial. Masalah sosial yang terjadi akan memperkuat sistem sosial. Masalah-masalah tersebut akan membentuk sistem imun dalam tatanan sosial masyarakat.

Berdasarkan gambaran sifat dan karakteristik dia atas, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa masalah sosial memiliki ciri-ciri seperti di bawah:

1. Semua masalah sosial adalah penyimpangan dari situasi "ideal".
2. Semua masalah sosial adalah situasi yang menimbulkan ancaman dan memiliki konsekuensi merugikan bagi masyarakat
3. Semua masalah sosial memiliki dasar asal-usul yang sama - sosial dan sering kali berasal dari politik
4. Semua masalah sosial adalah hasil sosial - mereka mempengaruhi semua bagian masyarakat.
5. Semua masalah sosial disebabkan oleh kondisi sosial patologis.
6. Semua masalah sosial saling terkait dan menular.
7. Tanggung jawab untuk masalah sosial adalah sosial - mereka memerlukan pendekatan kolektif untuk mengatasinya.
8. Masalah sosial terjadi pada lapisan semua masyarakat - mereka ada di mana-mana dan tidak bisa dihindari

G. Elemen-elemen Masalah Sosial

Meskipun definisi yang dikutip di atas berbeda dalam cara menjelaskannya, tetapi semua teori di atas sepakat bahwa masalah sosial secara umum memiliki hal yang sama dan penting. Berikut beberapa elemen tersebut:

1. Masalah sosial merupakan suatu kondisi atau situasi yang tidak disukai oleh banyak orang.
2. Masalah sosial dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan karena konsekuensinya yang merugikan.
3. Semua masalah sosial menginginkan adanya koreksi melalui aksi kolektif. Mereka menuntut perubahan kondisi melalui beberapa cara rekayasa sosial.
4. Semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial disebut sebagai masalah sosial seperti kejahatan, kenakalan remaja, pelacuran, pemerkosaan, kecanduan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, ketegangan antar etnis atau komunal.
5. Masalah sosial tidak statis tetapi berubah seiring berjalannya waktu dan ruang.

6. Perubahan hukum dan adat istiadat dapat mengubah konsep masalah sosial.

Mengenali kondisi yang tidak diinginkan dan mendefinisikannya sebagai masalah sosial adalah dua hal yang berbeda. Mungkin ada ketidaksepakatan jika beberapa orang percaya bahwa beberapa kondisi atau situasi tidak diinginkan tetapi juga berpikir itu tidak dapat dihindari karena itu adalah bagian dari kondisi manusia atau harga yang kita bayar untuk sebuah 'kemajuan' seperti yang kita lihat dalam kasus ketidakseimbangan lingkungan yang disebabkan oleh pemotongan pohon untuk membangun jalan, mencabut hak orang untuk membangun bendungan dan kanal, polusi udara dan kebisingan karena meningkatnya kendaraan bermotor, meningkatnya angka kematian karena kecelakaan yang melibatkan mobil, dll.

Meningkatnya angka kematian karena kecelakaan yang melibatkan mobil sejak lama dianggap tidak dapat dihindari tetapi setelah dikritik oleh banyak orang, keselamatan mobil menjadi masalah sosial. Pada tahap awal industrialisasi, pengembangan daerah kumuh dan padat juga dianggap tidak dapat dihindari dan bukan masalah sosial.

Orang mungkin tidak dapat mendefinisikan suatu kondisi sebagai masalah karena itu diinginkan dan alami, dan bukan ancaman terhadap nilai-nilai mereka. Diskriminasi kasta/gender bukanlah masalah bagi mereka yang percaya bahwa kasta/jenis kelamin secara alami tidak setara. Mereka akan menyangkal bahwa perlakuan berbeda adalah 'diskriminasi' (bagi mereka, integrasi adalah ancaman terhadap nilai-nilai mereka, dan dengan demikian merupakan masalah sosial).

Pada kenyataannya, ini membutuhkan kepercayaan akan kesetaraan untuk mendefinisikan diskriminasi sebagai masalah. Ada orang yang masih tidak percaya bahwa kemiskinan adalah masalah sosial. Mereka menganggapnya sebagai nasib massa yang tak terhindarkan. Orang miskin harus disalahkan atas kondisi kemiskinan mereka sendiri. Orang-orang seperti itu mendefinisikan kemiskinan sebagai kegagalan pribadi mereka yang miskin, bukan konsekuensi dari pengaturan struktur sosial.

Tetapi gagasan lama seperti itu telah berubah dalam masyarakat modern dan orang-orang mulai percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan dengan kondisi seperti itu dan masyarakat (pemerintah) harus mengambil langkah untuk melakukan sesuatu.

H. Dampak Masalah Sosial

Masalah sosial akan sangat mempengaruhi kondisi masyarakat. Salah satu efek utamanya adalah harmoni masyarakat yang terganggu dan sebagai gantinya akan timbul gejolak dan kecurigaan dalam masyarakat. Masalah sosial akan menghasilkan ketidakpuasan sosial dalam skala besar dan menciptakan penderitaan serta kesengsaraan. Secara keseluruhan, masalah sosial sama sekali tidak akan bisa membantu dalam memecahkan masalah apapun, sebaliknya bisa menciptakan masalah yang sangat serius, yang tidak menguntungkan bagi siapa pun dalam sistem sosial masyarakat. Tetapi dalam konteks ini, 'masalah' bukanlah istilah yang absolut, ini hanya istilah relatif. Apa yang menjadi masalah bagi sebagian masyarakat, belum tentu itu menjadi masalah bagi sebagian yang lain. Masalah bukanlah suatu yang permanen dan universal. Apa yang menjadi masalah hari ini, belum tentu besok akan tetap menjadi masalah.

Masalah akan menjadi relatif ketika hanya melibatkan satu individu dan bersifat privasi. Dampaknya hanya dirasakan oleh individu-individu yang bermasalah. Sebaliknya, masalah relatif akan menjadi masalah universal ketika melibatkan banyak pihak dan tatanan sosial. Contoh masalah universal adalah kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan.

I. Penyebab Terjadinya Masalah Sosial

Masalah sosial tidak akan diterima di dalam sistem sosial masyarakat mana pun. Masalah menciptakan ketidakharmonisan, terjadinya penyimpangan, dan membawa masalah. Apa penyebab utamanya?, hingga saat ini belum ditemukan jawaban pasti, mengingat banyaknya jawaban yang beragam. Namun, yang pasti, alasan utamanya adalah para sosiolog hingga kini masih belum bisa menentukan penyebab tunggal yang bertanggung jawab atas terjadinya berbagai masalah sosial. Penyebab terjadinya masalah sosial dalam masyarakat tertentu,

belum tentu menjadi penyebab yang sama dalam masyarakat lainnya. Demikian pula apa yang terjadi dalam waktu tertentu bisa juga dialami oleh masyarakat lainnya. Dalam praktek sebenarnya sangat sulit menemukan penyebab tunggal yang bertanggung jawab atas terciptanya masalah sosial.

Secara umum, perspektif berarti cara memandang sesuatu. Sekarang mari kita lihat secara singkat berbagai penyebab masalah sosial dari berbagai macam perspektif. Pertama-tama kita lihat dari perspektif individu. Beberapa komentator berpendapat bahwa penjahat secara tidak normal dikondisikan oleh faktor biologis dan lingkungan (Rubington dan Weinberg, 1989). Namun yang lain, berpendapat bahwa penyebab masalah sosial terutama disebabkan oleh masyarakat/lingkungan dan bukan karena pembentukan fisiologis individu. Namun, tindakan tertentu dari individu atau kelompok sangat mencolok sehingga menyebabkan masalah sosial yang secara langsung dikaitkan dengan mereka. Alasan lain mengapa masalah sosial terjadi adalah karena tekanan kelompok sebaya atau keluarga. Ketidaksepakatan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat juga dapat menyebabkan masalah sosial. Model ini disebut perspektif interaksi.

Perselisihan antara budaya dan agama yang berbeda dalam masyarakat adalah alasan lain mengapa masalah sosial sering terjadi. Orang biasanya dipengaruhi oleh budaya dan agama mereka. Beberapa orang sangat fanatik dalam pandangan agama dan nilai-nilai budaya mereka. Mereka percaya dan melihat orang lain di luar dirinya secara berbeda sesuai dengan nilai agama yang dianut dan nilai budaya yang dipraktikkannya. Kondisi ini bisa mengarah pada munculnya masalah-masalah sosial yang sangat ekstrem atau radikal.

Struktur sosial adalah hal yang sangat mendasar dari sistem sosial masyarakat mana pun, dan itu adalah alasan utama mengapa masalah sosial terjadi. Beberapa individu atau kelompok mungkin merasa dikucilkan dari struktur sosial, ekonomi atau politik masyarakat. Struktur sosial masyarakat dapat dirancang sedemikian rupa sehingga struktur sosial secara khusus bisa mematikan atau meminggirkan segmen tertentu dari komponen masyarakat, biasanya kelompok minoritas.

Ditambah lagi dengan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah kadang kala juga dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial, karena tidak menutup kemungkinan kebijakan dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah malah mendukung atau memperkuat segmen masyarakat tertentu sambil mengesampingkan yang lainnya.

Dalam mengidentifikasi penyebab masalah sosial, Landis (1969) mengidentifikasi tiga proses terkait yang menjadi penyebab masalah sosial:

1. Perubahan Sosial Utama - Faktor Struktural

Perubahan bisa bertahap (evolusioner) atau cepat (revolusioner). Tingkat laju, kecepatan dan besarnya perubahan sosial berbeda di antara masyarakat, sehingga tidak semua perubahan akan menimbulkan masalah sosial. Namun, perubahan revolusioner yang cepat dan besar mempengaruhi hampir seluruh sistem sosial sehingga kadang-kadang menghasilkan masalah sosial.

2. Konflik Nilai - Faktor Budaya

Nilai-nilai menurut Landis (1969 dalam cfAnele 1999) adalah estimasi nilai individu atau masyarakat, dan preferensi atau penolakan mereka di lembaga sosial. Nilai-nilai individu sebagian besar dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan dalam konteks inilah individu melakukan penilaian terhadap mereka sendiri. Namun, dalam masyarakat majemuk dengan beberapa kelompok kepentingan, kelompok etnis atau ras yang semuanya mengejar nilai-nilai kelompok tertentu menimbulkan persaingan nilai dan memperjuangkan keunggulan masing-masing. Kondisi ini menghadirkan situasi atau serangkaian nilai yang bertentangan untuk individu dan masyarakat pada umumnya. Maka merupakan tugas masyarakat melalui lembaga politik untuk menengahi dan menguatkan nilai-nilai yang saling bertentangan ini. Kegagalan untuk mengatasinya akan menimbulkan kekacauan, karena berbagai kelompok dalam masyarakat akan mengejar berbagai tujuan dan bukan tujuan yang diterima secara umum.

3. Kepedulian Individu atau Kelompok

Tidak cukup hanya menjadikan nilai sebagai satu-satunya penyebab timbulnya konflik dan masalah sosial. Kehadiran individu atau kelompok pada sisi yang lain kadang-kadang menjadi penyebab dominan dibanding nilai. Ketidakpedulian terhadap masalah sosial akan memperumit keadaan. Jika masyarakat hanya melihat masalah sosial dari individu ke individu, maka ini akan mempersulit penemuan solusi yang dibutuhkan masyarakat. Akhirnya, masalah dilihat dalam kerangka individu bukan kerangka kolektif. Situasi ini akan menghadapkan masyarakat dalam situasi untuk saling berkompetisi bukan bekerja sama menyelesaikan masalah sosial.

J. Reaksi Terhadap Masalah Sosial

Orang yang beda dalam suatu masyarakat atau kelompok akan bereaksi secara berbeda terhadap masalah sosial. Perbedaan dapat dijelaskan melalui faktor-faktor berikut ini:

a) Sikap Peduli

Masalah sosial seperti yang disebutkan sebelumnya harus menjadi kondisi yang dianggap oleh mayoritas sistem sosial sebagai masalah yang membutuhkan pemulihan kolektif. Dalam kondisi ini, masyarakat secara bersama-sama akan bereaksi dengan cara mencari solusi secara kolektif. Masalah tidak lagi dipandang sebagai masalah individu ke individu, tetapi masalah kolektif.

b) Sikap Tidak Peduli

Banyak orang dan negara terkadang acuh tak acuh terhadap masalah yang sedang terjadi. Mereka berpikir bahwa hal tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa. Bahkan, kadang-kadang mereka ini tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah pribadinya, mereka memilih untuk menyibukkan diri dibanding harus menyelesaikan masalah yang dialaminya.

c) Fatalisme

Beberapa orang sangat fatalistik sehingga mereka menganggap segalanya sebagai takdir. Masalah-masalah seperti kemiskinan dan pengangguran dilihat sebagai sebuah takdir, sehingga penyelesaiannya harus menunggu keajaiban dan takdir berikutnya. Tidak

ada usaha apapun untuk menyelesaikannya, semuanya terjadi karena kehendak takdir.

d) Minat Tertentu

Beberapa orang tidak tertarik pada masalah yang ada karena mereka hanya tertarik pada masalah yang disukainya. Termotivasi oleh kepentingan pribadi, mereka kadang menggambarkan masalah itu sebagai sesuatu hal di luar kewenangan mereka. Ikut campur, bagi mereka adalah sebuah kesia-siaan, kecuali hal tersebut menguntungkan baginya.

e) Ketiadaan Pengetahuan

Beberapa orang, meskipun sangat prihatin terhadap masalah sosial, tidak bisa berbuat banyak, mengingat mereka tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. Karenanya perubahan harus diprakarsai oleh orang-orang yang ahli.

K. Kategori Masalah Sosial

Eitzen, *et al.* (2009) mengidentifikasi dua kategori masalah sosial, yaitu:

1) Pelanggaran Norma

Pelanggaran norma mengasumsikan bahwa standar perilaku itu ada. Eitzen *et al.* (2009) berpendapat, bahwa pelanggaran norma adalah gejala dari masalah sosial yang timbul dari masalah itu sendiri. Terjadinya penyimpangan, misalnya, individu yang memiliki ketergantungan pada obat-obat terlarang. Individu ini tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Terkadang, sistem sosial masyarakat dan tempat tinggal merekalah yang harus disalahkan.

2) Kondisi Sosial

Eitzen, *et al.* (2009) mengatakan bahwa jenis masalah sosial yang kedua melibatkan kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan material bagi orang-orang tertentu. Fokusnya adalah pada bagaimana masyarakat beroperasi dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak mendapat manfaat di bawah pengaturan sosial yang ada.

Maslow (1981), dalam tulisannya menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan tempat berteduh, rezeki, keamanan, dukungan kelompok, penghargaan, rasa hormat, dan aktualisasi. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka individu akan memusuhi masyarakat dan norma-normanya. Rasa frustrasi akan diekspresikan dalam "bentuk lain". Raab dan Selznick (1959) berpendapat bahwa masalah sosial cenderung ada ketika tujuan pribadi yang sangat penting dari sejumlah individu dihalangi (frustrasi). Ketika orang menarik diri dari sistem yang gagal memenuhi kebutuhannya, maka orang tersebut akan didefinisikan oleh masyarakat lainnya sebagai "orang jahat", padahal ini terjadi karena mereka hidup dalam masyarakat yang buruk" (Eitzen et al. 2009). Misalnya, ketika seseorang mencoba untuk memahami penyimpangan institusional, mereka akan melihat karakteristik individu untuk menjelaskan penyimpangan. Eitzen et al. (2009) mengatakan bahwa sumber penyimpangan dapat ditemukan dalam struktur sosial. Masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan penyimpangan, dengan cara memberi label buruk. Penyimpangan kelembagaan adalah istilah yang digunakan Eitzen, dkk. untuk menggambarkan situasi ketika lembaga-lembaga masyarakat hanya melayani orang-orang tertentu. Penyimpangan kelembagaan terjadi ketika masyarakat dan organisasi formal tidak bisa memenuhi kebutuhan individu.

L. Masalah Sosial Dan Kebijakan Sosial

Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak boleh dibiarkan berlanjut karena itu dianggap sebagai masalah bagi sebagian besar masyarakat, sehingga mengharuskan masyarakat untuk bereaksi terhadap masalah dan menemukan solusinya. Jika masalah pribadi adalah masalah yang harus diselesaikan oleh individu yang terlibat, maka masalah publik atau masalah sosial menuntut adanya respons publik. Timbulnya beragam tanggapan publik, tentu saja sangat luas dan bervariasi, tergantung pada tuntutan keadaan. Pada kondisi yang ekstrem, masalah sosial memerlukan adanya intervensi. Tujuannya adalah untuk menekan atau mengendalikan masalah-masalah sosial. Intervensi semacam itu dimaksudkan untuk menghentikan

masalah sosial dengan cara mengendalikan orang-orang yang dianggap sebagai sumber masalah (kenakalan remaja, pencuri, narkoba, dan terorisme). Mereka biasanya melihat pengendalian masalah sosial “tidak selalu” berkaitan dengan pandangan bahwa masalah sosial merupakan tantangan atau ancaman terhadap tatanan sosial. Poin tentang 'tidak selalu' merujuk pada kondisi di mana kadang-kadang jenis intervensi yang dilakukan dirancang bukan dalam rangka melindungi masyarakat atau tatanan sosial, tetapi sebagai 'kepentingan terbaik' bagi orang yang dihukum atau 'diperlakukan' secara khusus: mereka yang bermasalah kadang hanya membutuhkan 'sedikit disiplin' dan sikap yang 'tangguh' untuk menyelesaikan masalahnya.

Kebijakan Sosial pada hakikatnya merupakan tanggapan terhadap masalah sosial yang dilakukan melalui intervensi. Menurut Huttman (1981) kebijakan sosial adalah strategi, rencana, dan tindakan dalam rangka mengatasi masalah sosial serta memenuhi kebutuhan sosial. Sementara, Marshall (1965) melihat kebijakan sosial sebagai kebijakan dan tindakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan atau bantuan keuangan. Pemenuhan kebutuhan dan layanan sosial menjadi dasar pemikiran bagi pemerintah untuk melakukan intervensi (keterlibatan) melalui peraturan atau program. Menetapkan suatu kebijakan sosial haruslah menunjukkan tata cara bagaimana proses penerapannya dalam menghadapi suatu fenomena sosial dan hubungan sosial pemerintah dalam mendistribusikan penghasilan dalam suatu masyarakat.

Dalam konteks ini kebijakan sosial akan mendefinisikan masalah pribadi individu menjadi masalah sosial. Proses pendefinisian akan melalui proses konstruksi sosial yang kompleks, karena hal ini menyangkut periode dan ruang waktu masalah sosial terjadi. Konstruksi sosial menyiratkan proses aktif untuk mendefinisikan atau redefinisi terhadap beberapa masalah yang dipahami secara luas sebagai masalah sosial. kebijakan sosial diperlukan sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Orang-orang yang bermasalah secara sosial harus diberikan akses berupa kemudahan layanan sosial. Masyarakat yang bermasalah secara sosial harus ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya agar

memiliki kemampuan dalam menanggapi perubahan sosial. Kebijakan sosial bisa menjadi alat yang tepat dalam menangani berbagai permasalahan sosial. Melalui kebijakan sosial pemerintah bisa merencanakan tindakan intervensi yang terarah melalui mekanisme peraturan yang dibuat oleh otoritas pemerintah. Kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program tunjangan-tunjangan sosial lainnya (Bessant dan Watts dalam Edi Suharto, 2007).

Melalui tiga fungsi kebijakan sosial: Pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*) dan pengembangan (*developmental*), diharapkan kebijakan sosial bisa menjawab kebutuhan penanganan masalah-masalah sosial yang diderita atau dialami masyarakat. Dalam penanganan masalah sosial melalui kebijakan sosial, Spicker (2003) meminta para pembuat kebijakan untuk memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Praktek kebijakan dalam pelayanan sosial, termasuk pendidikan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, layanan ketenagakerjaan, perawatan masyarakat dan manajemen perumahan.
2. Masalah sosial termasuk kejahatan, kecacatan, pengangguran, kesehatan mental, ketidakmampuan dalam belajar, dan masyarakat usia tua.
3. Masalah yang berkaitan dengan kerugian sosial, termasuk ras, jenis kelamin, dan kemiskinan
4. Tanggapan terhadap masalah sosial kolektif.

Dengan keempat prinsip di atas kebijakan sosial harus mampu mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Kebijakan sosial juga harus mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi secara mandiri oleh individu, keluarga, komunitas atau masyarakat. Melalui kebijakan sosial, masyarakat harus didorong untuk memenuhi kebutuhannya secara kolektif.

Tugas lainnya, kebijakan sosial harus bisa meningkatkan hubungan intra-sosial dengan mengurangi ketidakberfungsian sosial individu atau kelompok yang diakibatkan adanya faktor-faktor internal-personal

maupun eksternal-personal. Kebijakan sosial harus bisa menciptakan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya-upaya pelaksanaan peran sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat dengan memenuhi hak manusia dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Terakhir, kebijakan sosial harus mampu menggali, mengalokasikan, dan mengembangkan semua sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Selain prinsip-prinsip di atas, kebijakan sosial memiliki beberapa dimensi dasar untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Pertama, redistribusi kekayaan; pengaturan pemerintah dalam pemerataan pendapatan ada berbagai mekanisme yang dilakukan antara lain pajak progresif, *land reform*, transmigrasi, dan lain-lain. Kedua, Kebebasan, yaitu kebebasan masyarakat dari ketakutan, teror, eksploitasi, dll. Ketiga, perlindungan risiko; harus cepat tanggap terhadap risiko, bencana alam, risiko sosial politik, risiko kerja, pemanasan global dan lain-lain. Keempat keselamatan publik, yaitu penyediaan sarana umum yang aman dan berkualitas. Kelima, pelayanan sosial; seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bagian 6

**PERUBAHAN SOSIAL
MELALUI KEBIJAKAN SOSIAL**

Masyarakat modern saat ini menghadapi berbagai macam masalah. Tingginya tingkat kriminalitas, rasa tidak aman, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Ada juga masalah-masalah lain yang tampaknya lebih mudah untuk diatasi seperti kemacetan lalu lintas di jalan. Karenanya, negara harus membuat kebijakan sosial. Kebijakan tersebut mengandung berbagai macam langkah-langkah strategis untuk digunakan menangani berbagai macam masalah secara efektif dan efisien. Pemerintah secara terus menerus harus aktif mempromosikan kesejahteraan sosial untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Pemerintah melalui politik anggaran harus mampu melahirkan kebijakan-kebijakan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dikonversi ke dalam berbagai bentuk tindakan (intervensi) sosial, misalnya pelayanan sosial dan perlindungan sosial. Selanjutnya, proses pelaksanaan kebijakan boleh dilakukan oleh siapa pun dan dalam bentuk (model) apapun, baik itu secara kelembagaan maupun individu masyarakat.

Bahkan, pada zaman kuno orang-orang yang tinggal di komunitas membentuk aturan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan komunitas. Aturan-aturan ini mengatur kehidupan komunitas atau menetapkan sejumlah layanan untuk kelancaran fungsi sistem sosial masyarakat. Misalnya, dilakukan dengan cara memastikan keamanan jalanan kota atau tingkat kesehatan masyarakat. Model-model ini bisa diamati dalam praktek kehidupan masyarakat Athena kuno, di mana orang yang dipekerjakan oleh negara bertanggung jawab membersihkan taman-taman kota dan tempat-tempat perdagangan di sekitar kota Byzantium. Athena Kuno melalui kebijakannya, menyediakan orang-orang khusus yang tergabung dalam korps kepolisian untuk melakukan patroli pada malam hari di sepanjang jalanan Konstantinopel. Kegiatan patroli dilakukan untuk memastikan

keamanan warga atau para wisatawan yang sedang berkunjung ke kota tersebut.

Seperti yang dapat kita lihat, kebijakan sosial adalah ukuran yang digunakan oleh pemerintah selama ribuan tahun untuk menangani masalah-masalah sosial. Kebijakan sosial telah banyak memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia dan membantu manusia membangun peradaban yang hebat di planet ini. Kebijakan sosial selalu berubah dan berkembang (dinamis), hal tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Masalah yang harus dihadapi pemerintah saat ini tentu sedikit banyak berbeda dengan masalah yang mereka hadapi di masa lalu. Kebijakan sosial adalah disiplin yang inklusif, yang berarti memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sosial manusia. Masalah sosial berubah berdasarkan faktor ekonomi dan lingkungan. Perubahan-perubahan ini juga berbeda berdasarkan struktur sosial dan kebijakan negara.

A. Perubahan sosial

Ketika terjadi perubahan dalam struktur sosial, tatanan sosial, nilai-nilai sosial, adat dan tradisi tertentu, norma sosial-budaya, cara berperilaku, cara bertingkah laku dalam masyarakat, standar, sikap, kebiasaan, dan tradisi masyarakat yang terkait kehidupan manusia, maka bisa disebut telah terjadi perubahan sosial. Ketika perubahan sosial terjadi, maka proses interaksi dan sistem sosial manusia juga turut berubah. Masyarakat modern pada dasarnya berorientasi pada perubahan. Setiap pergantian atau modifikasi yang terjadi dari waktu ke waktu dalam suatu situasi disebut sebagai perubahan sosial. Perubahan yang dimaksud adalah dalam konteks interaksi antara manusia dengan manusia dan lingkungannya. Perubahan bisa terjadi karena adanya kehendak atau terjadi secara alami. Namun, yang pasti, setiap perubahan pasti ada sumber yang harus bertanggung jawab atas terjadinya perubahan. Sumber pertama adalah faktor unik dan sistematis, sementara sumber kedua adalah faktor-faktor yang sistematis.

Perubahan sosial menunjukkan adanya perbedaan yang diamati dari keadaan sebelumnya dari struktur sosial, institusi, kebiasaan atau

peralatan masyarakat. Sedangkan menurut M. Ginsberg (1958), perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial, misalnya dalam ukuran komposisi masyarakat atau keseimbangan bagian-bagiannya, atau jenis organisasi. Mojumder (1957) mendefinisikannya sebagai mode mode yang dimodifikasi atau diganti dari keadaan sebelumnya dalam kehidupan individu atau dalam masyarakat. Horton dan Hunt (1991), mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan dalam keseluruhan struktur sosial dan hubungan suatu masyarakat. Perubahan Sosial adalah perubahan signifikan dari struktur sosial (yaitu pola aksi dan interaksi sosial) termasuk konsekuensi dan manifestasi dari struktur tersebut yang diwujudkan dalam aturan (aturan perilaku), produk budaya dan simbol.

Arti istilah "Perubahan Sosial" lebih bisa dipahami jika kita membahas beberapa definisi yang telah dirumuskan oleh para sosiolog terkemuka. Merrill dan Eldredge (1952), mengatakan bahwa Perubahan sosial berarti keterlibatan sejumlah besar orang dalam kegiatan yang berbeda. Kingsley Davis (1949) mengatakan bahwa perubahan sosial hanya berarti perubahan yang terjadi dalam organisasi sosial, yaitu struktur dan fungsi masyarakat. Bagi Maclver dan Page (1949), Perhatian langsung kami sebagai sosiolog adalah pada hubungan sosial. Perubahan dalam hubungan-hubungan inilah yang kita anggap sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial mengacu pada suatu proses yang responsif terhadap banyak jenis perubahan. Perubahan dalam kondisi kehidupan buatan manusia, perubahan dalam sikap dan kepercayaan manusia terhadap perubahan yang melampaui kontrol biologis dan psikis manusia. Perubahan sosial mengacu pada modifikasi apapun dalam pola hubungan antar manusia dan standar perilaku yang sudah mapan (Lunberg, 1979). Perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai mode atau mode baru, baik memodifikasi atau mengganti yang lama, dalam kehidupan orang-orang atau dalam kebiasaan masyarakat. Perubahan sosial merupakan modifikasi dalam cara melakukan dan berpikir manusia. Perubahan sosial mengacu pada modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan masyarakat. Perubahan sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan

variasi modifikasi dari setiap aspek proses sosial, pola sosial, interaksi sosial atau organisasi sosial.

Dengan perubahan sosial saya memahami perubahan dalam struktur sosial, yaitu ukuran masyarakat, komposisi atau keseimbangan bagian-bagiannya atau jenis organisasinya (Morris Ginsberg, 1949). Perubahan sosial melibatkan perubahan dalam struktur atau fungsinya bentuk atau proses sosial itu sendiri. Perubahan sosial adalah variasi dari gaya hidup yang diterima; apakah karena perubahan dalam kondisi geografis, kondisi budaya, komposisi populasi atau ideologi dan apakah disebabkan oleh adanya difusi atau penemuan dalam kelompok (Gillin dan Gillin, 1950). Sedangkan bagi Alvin Toffler (1980), perubahan adalah proses yang melaluinya masa depan menginvasi kehidupan kita. Sementara M. E. Jones (1962), mengatakan bahwa perubahan sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan variasi atau modifikasi setiap aspek proses sosial, pola sosial, interaksi sosial atau organisasi sosial. Perubahan sosial dalam terminologi sosiologi adalah perubahan mekanisme dalam struktur sosial yang ditandai dengan perubahan simbol budaya, aturan perilaku, organisasi sosial, atau sistem nilai.

Sepanjang perkembangan historis dari disiplin sosiologi, dalam perkembangannya, sosiologi telah meminjam berbagai macam model perubahan sosial dari berbagai bidang akademik lainnya. Pada akhir abad ke-19, ketika evolusi menjadi model utama untuk memahami perubahan biologis, ide-ide perubahan sosial banyak menggunakan pendekatan evolusioner, dan, meskipun model-model lainnya telah menyempurnakan gagasannya dengan pendekatan yang lebih modern tentang perubahan sosial, evolusi tetap menjadi prinsip dasar kajian perubahan sosial.

Model sosiologis lainnya menciptakan analogi antara perubahan sosial dan kemajuan teknologi Barat. Pada pertengahan abad ke-20, para antropolog meminjam teori linguistik strukturalisme untuk menguraikan pendekatan perubahan sosial yang disebut fungsionalisme struktural. Teori ini mendalilkan keberadaan lembaga-lembaga dasar tertentu (termasuk hubungan kekerabatan dan pembagian kerja)

yang menentukan perilaku sosial. Karena sifatnya yang saling terkait, perubahan dalam satu institusi akan mempengaruhi institusi lain.

Berbagai aliran teori menekankan berbagai aspek perubahan. Teori Marxis menunjukkan bahwa perubahan dalam mode produksi dapat menyebabkan perubahan dalam sistem kelas, yang dapat mendorong bentuk-bentuk perubahan baru lainnya atau memicu konflik kelas. Pandangan yang berbeda adalah teori konflik, yang mencakup semua institusi. Fokusnya tidak hanya pada aspek konflik yang murni memecah-belah, karena konflik, walaupun tidak terhindarkan, juga membawa perubahan yang mendorong integrasi sosial. Mengambil pendekatan lain, teori struktural-fungsional menekankan kekuatan-kekuatan yang berintegrasi dalam masyarakat yang pada akhirnya akan meminimalkan ketidakstabilan.

Perubahan sosial dapat berkembang dari sejumlah sumber yang berbeda, termasuk kontak dengan masyarakat lain (difusi), perubahan ekosistem (yang dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam atau penyakit yang meluas), perubahan teknologi (dilambangkan dengan Revolusi Industri, yang menciptakan kelompok sosial baru, proletariat perkotaan), dan pertumbuhan populasi dan variabel demografis lainnya. Perubahan sosial juga didorong oleh gerakan ideologis, ekonomi, dan politik.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial merupakan:

1. Suatu proses.
2. Perubahan dalam organisasi sosial, yaitu struktur dan fungsi masyarakat.
3. Perubahan sosial berarti perubahan manusia yang terjadi dalam pola hubungan kehidupan masyarakat.
4. Perubahan sosial merujuk pada semua variasi historis dalam masyarakat manusia. Ini bermakna ada perubahan hubungan yang fundamental antar sesama manusia. Termasuk di dalamnya perubahan institusi politik, struktur kelas, sistem ekonomi, adat istiadat dan gaya hidup.

Dari analisis definisi di atas, kita menjadi tahu bahwa fenomena perubahan sosial tidak sederhana tetapi kompleks. Pemaknaannya sangat luas dan prosesnya yang rumit dan panjang. Kesimpulannya, perubahan sosial mengacu pada modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Perubahan sosial berkaitan erat dengan hubungan sosial. Jika dilihat dari definisi-definisi di atas maka hubungan sosial adalah proses sosial, pola sosial dan interaksi sosial. Dengan demikian, perubahan sosial berarti semua variasi dari setiap aspek proses sosial, pola sosial, interaksi sosial atau organisasi sosial - perubahan dalam struktur kelembagaan dan normatif masyarakat.

B. Mengubah Tataan Sosial

Perubahan sosial dalam arti luas adalah setiap perubahan dalam hubungan sosial. Jika dilihat dengan cara ini, maka perubahan sosial adalah fenomena yang selalu ada di dalam masyarakat mana pun. Perubahan kadang-kadang memang sengaja dibuat melalui proses perubahan dalam struktur sosial. Tujuannya bisa saja untuk mempertahankan sebagian atau keseluruhan fungsi struktur sosial. Ada proses modifikasi struktur dalam rangka mencapai tujuan perubahan sosial.

Arti spesifik dari perubahan sosial bergantung pada entitas sosial yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Perubahan dalam kelompok kecil mungkin penting bagi kelompok itu sendiri, tetapi dapat diabaikan pada tingkat masyarakat yang lebih besar. Demikian pula, pengamatan terhadap perubahan sosial tergantung pada rentang waktu yang akan diamati; sebagian besar perubahan jangka pendek dapat diabaikan ketika dikaji dalam rentang waktu perubahan jangka panjang. Perubahan skala kecil dan jangka pendek adalah karakteristik masyarakat manusia, karena kebiasaan dan norma yang sering berubah, teknik dan teknologi baru diciptakan, perubahan lingkungan menuntut adanya adaptasi baru, dan konflik mengakibatkan redistribusi kekuasaan.

Potensi universal manusia untuk melakukan perubahan sosial memiliki dasar biologis. Potensi-potensi tersebut berakar pada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dari spesies manusia — hampir tidak ada pola tindakan yang bersifat biologis (insting) di satu sisi dan

kapasitas yang sangat besar untuk belajar, melambangkan, dan menciptakan di sisi yang lain. Konstitusi yang dibuat manusia memungkinkan perubahan yang tidak ditentukan secara biologis (genetik) bisa dilakukan oleh manusia. Perubahan sosial, dengan kata lain, hanya dimungkinkan berdasarkan karakteristik biologis dari spesies manusia, tetapi sifat dari perubahan aktual tidak dapat direduksi menjadi ciri-ciri spesies ini.

C. Latar Belakang Sejarah

Beberapa ide perubahan sosial yang telah dikembangkan dalam berbagai budaya dan periode sejarah. Ada tiga teori besar yang sangat berpengaruh tentang perubahan sosial:

1. Gagasan tentang kemunduran atau kemajuan.
2. Gagasan perubahan siklik dan
3. Gagasan kemajuan yang berkelanjutan.

Ketiga ide tersebut sudah menonjol pada zaman Yunani dan Romawi dan telah menjadi ciri pemikiran sosial Barat sejak saat itu. Konsep kemajuan, bagaimanapun, telah menjadi ide yang paling berpengaruh, terutama sejak gerakan Pencerahan abad ke-17 dan ke-18. Para pemikir sosial seperti Anne-Robert-Jacques Turgot dan marquis de Condorcet di Prancis dan Adam Smith dan John Millar di Skotlandia, mereka semua menganalisis perubahan sosial dengan menggunakan teori perkembangan pengetahuan dan teknologi manusia.

Kemajuan juga merupakan ide kunci dalam teori evolusi sosial abad ke-19. Evolucionisme adalah teori sosial paling berpengaruh pada abad itu. Evolucionisme menyiratkan bahwa manusia maju dalam satu jalur pembangunan. Tahapan perkembangan telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat dihindari, karena berhubungan dengan hukum pasti.

Mengikuti pendekatan yang berbeda, filsuf Perancis Auguste Comte mengajukan "hukum tiga tahap". Menurutnya masyarakat manusia berkembang dari tahap teologis, yang didominasi oleh agama, kemudian melalui tahap metafisik, di mana pemikiran spekulatif dan

abstrak adalah hal yang paling menonjol, dan terakhir menuju tahap positif, di mana teori-teori ilmiah berbasis empiris berkembang dan mendominasi.

Teori evolusi sosial yang paling luas dikembangkan oleh Herbert Spencer. Tidak seperti Comte, Spencer menghubungkan evolusi sosial dengan evolusi biologis. Menurutnya, organisme biologis dan masyarakat manusia mengikuti hukum evolusi alam yang universal dan berlaku sama: "perubahan dari keadaan homogenitas yang relatif tidak pasti, tidak koheren, menunjuk ke kondisi yang relatif pasti, koheren, dan heterogen." Dengan kata lain, ketika masyarakat tumbuh dalam ukurannya, mereka akan menjadi lebih kompleks; bagian-bagiannya berdiferensiasi, berspesialisasi dalam fungsi-fungsi yang berbeda, dan terbentuk, akibatnya terjadi saling tergantung.

Pemikiran evolusioner juga mendominasi bidang baru antropologi sosial dan budaya pada paruh kedua abad ke-19. Antropolog seperti Sir Edward Burnett Tylor dan Lewis Henry Morgan mengklasifikasikan masyarakat kontemporer dalam skala evolusi. Tylor mempostulatkan evolusi ide-ide keagamaan dari animisme melalui politeisme ke monoteisme. Morgan memberi peringkat perkembangan masyarakat dari "buas" hingga "biadab" kemudian "beradab" dan mengklasifikasikannya menurut tingkat teknologi atau sumber penghidupan mereka, yang ia hubungkan dengan sistem kekerabatan. Dia berasumsi bahwa monogami didahului oleh poligami dan keturunan patrilineal oleh keturunan matrilineal.

Karl Marx dan Friedrich Engels dalam pemikirannya juga sangat dipengaruhi oleh ide-ide evolusi. Keaslian teori pembangunan sosial Marxian terletak pada kombinasi dialektika dan gradualisme. Dalam pandangan Marx, perkembangan sosial adalah proses dialektis: transisi dari satu tahap ke tahap lainnya dan terjadi melalui proses transformasi yang revolusioner, yang didahului oleh tingginya tingkat kemerosotan dalam masyarakat dan meningkatnya perjuangan kelas.

Marx juga dipengaruhi oleh arus berlawanan dari Romantisisme, yang menentang gagasan kemajuan. Pengaruh ini terbukti dalam gagasan Marx tentang keterasingan, konsekuensi dari perkembangan sosial yang menyebabkan orang menjadi menjauhkan diri dari kekuatan

sosial yang mereka hasilkan dari kegiatan mereka sendiri. Akan tetapi, kontra-progresivisme yang romantis jauh lebih kuat dalam karya para ahli teori sosial abad ke-19, seperti yang tampak pada pemikiran sosiolog Jerman Ferdinand Tönnies. Dia membedakan antara komunitas (*Gemeinschaft*), di mana orang terikat oleh tradisi dan ikatan kasih sayang dan solidaritas yang sama, dan masyarakat (*Gesellschaft*), di mana hubungan sosial telah menjadi kontraktual, rasional, dan tidak emosional.

Emile Durkheim dan Max Weber, sosiolog yang memulai karir mereka pada akhir abad ke-19, menunjukkan ambivalensi terhadap ide-ide kemajuan. Durkheim menganggap peningkatan pembagian kerja sebagai proses dasar, yang berakar pada individualisme modern, yang dapat mengarah pada "anomie," atau kurangnya norma moral. Weber menolak evolusionisme dengan berpendapat bahwa perkembangan masyarakat Barat sangat berbeda dengan peradaban lain dan karena itu unik secara historis. Menurut Weber, Barat dicirikan oleh tipe rasionalitas aneh yang telah membawa kapitalisme modern, sains modern, dan hukum rasional, sekaligus menciptakan sisi negatifnya, suatu "kekecewaan dunia" dan meningkatnya birokratisasi.

Karya Durkheim, Weber, dan ahli teori sosial lainnya menandai proses transisi dari evolusionisme ke teori yang lebih statis. Teori-teori evolusi dikritik atas dasar empiris — teori tersebut dapat disangkal oleh semakin banyak temuan penelitian — dan karena determinisme dan optimisme yang berpusat pada Barat. Teori perubahan siklik yang menyangkal kemajuan jangka panjang menjadi populer pada paruh pertama abad ke-20. Termasuk di dalamnya teori yang dilontarkan oleh ekonom dan sosiolog asal Italia Vilfredo Pareto tentang "sirkulasi elit" serta gagasan yang disampaikan oleh Oswald Spengler dan Arnold Toynbee tentang siklus hidup peradaban. Pada tahun 1930-an dan 40-an, profesor Pitirim Sorokin dari Harvard mengembangkan teori siklus perubahan budaya di Barat, menggambarkan pengulangan perubahan dari ideasional ke idealistik.

Meskipun minat terhadap perubahan sosial jangka panjang tidak pernah hilang, minat itu semakin memudar, terutama dari tahun 1920-an hingga 1950-an, pendekatan fungsionalisme, yang menekankan

saling tergantungnya sistem sosial, menjadi paradigma dominan baik dalam antropologi dan sosiologi. "Evolusi sosial" diganti dengan konsep "perubahan sosial" yang lebih umum dan netral.

Studi tentang perubahan sosial jangka panjang dihidupkan kembali pada 1950-an dan terus berkembang hingga 1960-an dan 70-an. Teori Neo-evolutionis diproklamasikan oleh beberapa antropolog, termasuk Ralph Linton, Leslie A. White, Julian H. Steward, Marshall D. Sahlins, dan Elman Rogers. Para penulis ini berpegang pada gagasan evolusi sosial sebagai perkembangan jangka panjang yang berpola dan kumulatif. Tidak seperti evolusionisme abad ke-19, *neo-evolutionisme* tidak berasumsi bahwa semua masyarakat melewati tahap perkembangan yang sama. Sebaliknya, banyak perhatian diberikan pada variasi antara masyarakat dan juga hubungan pengaruh di antara mereka. Konsep terakhir dikenal dengan istilah akulturasi. Selain itu, evolusi sosial tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang telah ditentukan atau tidak dapat dihindari tetapi dipahami dalam hal probabilitas. Akhirnya, perkembangan evolusi tidak disamakan dengan kemajuan.

Minat untuk menghidupkan kembali pendekatan perubahan sosial jangka panjang dipicu oleh upaya untuk menjelaskan kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin. Pada 1950-an dan 60-an, sosiolog dan ekonom Barat mengembangkan teori modernisasi untuk membantu memahami masalah yang disebut negara-negara terbelakang. Namun, beberapa teori modernisasi telah dikritik karena menyiratkan bahwa negara-negara miskin dapat dan harus mengembangkan - atau memodernisasi - dengan cara masyarakat Barat. Teori-teori modernisasi juga telah dikritik karena kurangnya perhatian mereka pada hubungan kekuasaan internasional, di mana negara-negara kaya mendominasi negara-negara miskin. Hubungan-hubungan ini telah menjadi pusat perhatian dalam teori-teori baru tentang ketergantungan internasional, yang dilambangkan dengan "sistem kapitalis dunia" seperti yang dijelaskan oleh sosiolog Amerika Immanuel Wallerstein. Teori sistem dunianya, bagaimanapun, telah diserang karena alasan empiris dan karena kegagalannya untuk menjelaskan runtuhnya rezim Soviet dan kecenderungannya untuk menjadi kapitalis dan demokratis. Teori Wallerstein juga menuai kritik karena gagal

menjelaskan perkembangan ekonomi Dunia Ketiga yang signifikan seperti yang terlihat di Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong.

D. Penjelasan Tentang Perubahan Sosial

Salah satu cara untuk menjelaskan perubahan sosial adalah dengan menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua proses atau lebih. Bisa menggunakan pendekatan determinisme atau reduksionisme. Keduanya cenderung menjelaskan perubahan sosial dengan mereduksinya menjadi satu proses kausal yang dianggap otonom dan menentukan semuanya. Asumsinya, suatu proses memiliki prioritas sebab akibat yang relatif, tanpa menyiratkan bahwa proses ini sepenuhnya otonom dan menentukan segalanya. Berikut ini adalah beberapa proses yang dianggap berkontribusi terhadap perubahan sosial.

1) Kondisi Lingkungan

Perubahan lingkungan alami dapat terjadi akibat variasi iklim, bencana alam, atau penyebaran penyakit. Sebagai contoh, memburuknya kondisi iklim dan epidemi penyakit yang diperkirakan telah berkontribusi pada krisis feodalisme di Eropa abad ke-14. Perubahan dalam lingkungan alam bisa independen dari aktivitas sosial manusia atau disebabkan oleh mereka sendiri. Deforestasi, erosi, dan polusi udara termasuk dalam kategori yang terakhir, dan mereka mungkin memiliki konsekuensi sosial yang luas.

2) Proses demografis

Pertumbuhan populasi dan peningkatan kepadatan populasi merupakan bentuk demografis dari perubahan sosial. Pertumbuhan populasi dapat menyebabkan ekspansi geografis masyarakat, konflik militer, dan percampuran budaya. Peningkatan kepadatan penduduk dapat merangsang inovasi teknologi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembagian kerja, diferensiasi sosial, komersialisasi, dan urbanisasi. Proses semacam ini terjadi di Eropa barat dari abad ke-11 hingga ke-13 dan di Inggris pada abad ke-18, di mana pertumbuhan penduduk mendorong Revolusi Industri. Di sisi lain, pertumbuhan populasi dapat berkontribusi pada stagnasi

ekonomi dan peningkatan kemiskinan, seperti yang dapat disaksikan di beberapa negara Dunia Ketiga saat ini.

3) Inovasi teknologi

Beberapa teori evolusi sosial mengidentifikasi inovasi teknologi sebagai penentu terpenting perubahan masyarakat. Terobosan teknologi seperti peleburan besi, pengenalan bajak di bidang pertanian, penemuan mesin uap, dan pengembangan komputer memiliki konsekuensi sosial yang bertahan lama.

4) Proses ekonomi

Perubahan teknologi sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hubungannya dengan proses ekonomi. Termasuk di dalamnya pembentukan dan perluasan pasar, modifikasi hubungan properti (seperti perubahan dari hubungan tuan tanah-petani feodal ke hubungan pemilik-kontrak yang disewa), dan perubahan dalam organisasi tenaga kerja (seperti perubahan dari pengrajin independen ke pabrik). Materialisme historis, sebagaimana dikembangkan oleh Marx dan Engels, adalah salah satu teori yang lebih menonjol yang memberikan prioritas pada proses ekonomi, tetapi itu bukan satu-satunya. Bahkan, teori-teori materialis telah dikembangkan untuk menentang Marxisme. Salah satu teori penentangannya adalah teori "logika industrialisasi" yang dikembangkan oleh sarjana Amerika bernama Clark Kerr dan rekan-rekannya. Dalam pandangannya Kerr menyatakan bahwa industrialisasi di mana-mana memiliki konsekuensi yang sama, apakah nantinya hubungan properti akan disebut kapitalis atau komunis.

5) Gagasan

Teori lain mengatakan gagasan (ide) sebagai penyebab perubahan sosial. Hukum tiga tahap Comte adalah teori semacam itu. Weber menganggap ide-ide keagamaan sebagai kontributor penting bagi perkembangan atau stagnasi ekonomi; menurut tesisnya yang kontroversial, etika individualistis dari agama Kristen, dan khususnya Calvinisme, secara parsial menjelaskan kebangkitan semangat kapitalis, yang mengarah pada dinamisme ekonomi di Barat.

6) Gerakan sosial

Perubahan dalam gagasan kolektif bukan hanya proses intelektual. Perubahan sosial sering dihubungkan dengan pembentukan gerakan sosial baru. Gerakan sosial dapat dianggap sebagai penyebab potensial perubahan sosial. Weber menekankan konsep ini. Dalam konsepnya Weber mengatakan pentingnya "kepemimpinan karismatik." Pemimpin karismatik, berdasarkan sifat-sifat pribadi yang luar biasa yang dikaitkan dengannya, mampu menciptakan sekelompok pengikut yang bersedia melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya termasuk Yesus, Napoleon, dan Hitler.

7) Proses politik

Perubahan regulasi dalam organisasi negara, dan dalam konteks hubungan internasional juga dapat berkontribusi pada perubahan sosial. Sebagai contoh, sosiolog Jerman Norbert Elias menafsirkan pembentukan negara-negara di Eropa Barat sebagai proses yang relatif otonom yang mengarah pada peningkatan kontrol kekerasan dan, pada akhirnya, pada peningkatan standar pengendalian diri. Menurut teori-teori lain dari revolusi politik, seperti yang diusulkan oleh sosiolog sejarah Amerika Charles Tilly, berfungsinya aparatur negara itu sendiri dan sifat hubungan antarnegara adalah faktor penentu penting dalam pecahnya sebuah revolusi: hanya ketika negara itu tidak mampu memenuhi fungsi dasarnya yaitu memelihara hukum dan ketertiban dalam masyarakat serta mempertahankan integritas teritorial mereka, maka kelompok-kelompok revolusioner akan punya peluang untuk berhasil.

8) Faktor Psikologi

Gillin dan Gillin (1950), menganggap faktor psikologis sebagai elemen penting dalam perubahan sosial. Penyebab perubahan sosial adalah psikologi manusia itu sendiri. Manusia pada dasarnya adalah pecinta perubahan. Dia selalu mencoba untuk menemukan hal-hal baru di setiap bidang hidupnya dan selalu ingin pengalaman baru. Sebagai akibat dari kecenderungan ini, adat-istiadat, tradisi, dll., dari setiap masyarakat terus-menerus mengalami perubahan. Ini tidak berarti bahwa manusia selalu menganggap yang baru lebih unggul dari yang lama. Sementara manusia

selalu memperhatikan nilai-nilai baru dan unik, manusia juga ingin melestarikan nilai-nilai lama. Bentuk hubungan sosial terus berubah dalam proses interaksi antara dua kecenderungan ini. Adat dan metode baru yang menggantikan kebiasaan tradisional lama sedang dibentuk. Tradisi lama masih terus dihormati, tetapi waktu menuntut adanya perubahan dan adaptasi terhadap kondisi yang semakin dinamis.

9) Faktor Biologis

Faktor ini memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perubahan sosial. Di antara faktor biologis adalah aspek kualitatif populasi yang berkaitan dengan keturunan. Aspek kualitatif populasi didasarkan pada orang-orang yang kuat dan hebat dari proses kelahiran mereka. Manusia sebagian besar bergantung pada keturunan dan mutasi mereka untuk merancang peradaban. Oleh karena itu, faktor biologis berperan dalam perubahan sosial, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip biologis seperti seleksi alam dan perjuangan untuk bertahan hidup yang berlangsung secara terus-menerus sehingga menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

10) Faktor Budaya

Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa perubahan dan variasi budaya sangat berpengaruh terhadap hubungan sosial manusia. Dawson dan Gettys (1948), menyatakan bahwa budaya memberikan kecepatan dan arah pada perubahan sosial serta menentukan batas-batas mana perubahan sosial tidak bisa terjadi. Tetapi ini tidak menjamin kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara perubahan sosial dan budaya. Sebenarnya bidang perubahan sosial terbatas dibandingkan dengan bidang perubahan budaya. Oleh karena itu, perubahan sosial adalah hal yang berbeda dari perubahan budaya atau peradaban. Budaya memberikan kecepatan dan arah pada perubahan sosial dan menentukan batas di mana perubahan sosial tidak dapat terjadi (MacIver dan Page, 1996). Jika kita memilih untuk bepergian dengan kapal, arah perjalanan kita tidak ditentukan oleh desain kapal, tetapi budayalah yang menentukan arah dan tujuan keduanya. Pelabuhan yang kita tuju

tetap menjadi pilihan budaya. Faktor budaya tidak hanya responsif terhadap perubahan teknologi tetapi juga bertindak kembali padanya sehingga mempengaruhi arah dan karakternya.

Masing-masing dari proses ini dapat berkontribusi untuk perubahan sosial; tidak ada satu-satunya yang menjadi penentu perubahan sosial. Salah satu alasan mengapa teori deterministik atau reduksionis sering dibantah adalah bahwa metode untuk menjelaskan proses ini tidak otonom tetapi harus dengan sendirinya dijelaskan. Selain itu, proses sosial sering kali saling terkait sehingga akan menyesatkan untuk dipetakan secara terpisah. Misalnya, tidak ada batas tetap antara proses ekonomi dan politik, juga tidak ada batas tetap antara proses ekonomi dan teknologi. Perubahan teknologi itu sendiri dapat dianggap sebagai tipe spesifik dari perubahan organisasi atau konseptual. Hubungan sebab akibat dalam proses sosial hanya dapat dibedakan melalui derajat dan variasinya yang selalu berbeda dari waktu ke waktu.

E. Sumber Perubahan Sosial

Sosiolog telah memperdebatkan dan mendiskusikan pertanyaan tentang sumber-sumber perubahan sosial. Antropolog budaya telah tertarik pada dua topik ini, yaitu *Diffusionists* dan *Inventionists*.

Menurut *Diffusionists*, perubahan sosial atau budaya terjadi karena difusi budaya. Difusi mengacu pada pengenalan modifikasi perilaku dari budaya lain. Proses ini menunjukkan adanya penyebaran unsur-unsur budaya, baik secara tunggal atau kompleks, dari satu kelompok lokal ke kelompok lokal lainnya. Penggunaan istilah Difusi jarang digunakan untuk penyebaran unsur-unsur budaya yang terjadi dalam suatu kelompok. Istilah Difusi lebih sering digunakan untuk penyebaran unsur budaya yang terjadi antar kelompok. Mengapa demikian?. Bagi kaum difusionis, penemuan-penemuan budaya baru tidak berlangsung sepanjang waktu. Selain itu, penemuan-penemuan budaya baru tidak terjadi di semua lapisan masyarakat dengan cara yang sama. Setiap masyarakat meminjam unsur-unsur budaya masyarakat lain untuk menciptakan kemajuannya, baik itu secara langsung maupun tidak

langsung. Mereka mencontohkan beberapa suku yang bisa mencapai kemajuan dengan meminjam unsur budaya dari kelompok lain. Dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi suatu masyarakat untuk mencapai kemajuan jika gagal mendapatkan keuntungan dari pencapaian orang lain. Misalnya, orang Maori di Selandia Baru menjadi beradab dalam waktu seratus tahun dengan meminjam banyak elemen budaya dari orang lain. Jadi, menurut kaum *difusionis*, sumber perubahan sosial dapat ditemukan dalam difusi budaya.

Sedangkan menurut kelompok *Inventionists*, sumber perubahan sosial terletak pada kemampuan inheren masyarakat untuk membuat penemuan. Mereka mengatakan bahwa penemuan merupakan sumber utama perubahan sosial. Penemuan, baik itu di bidang organisasi sosial maupun kerangka budaya, semuanya mengacu pada penataan ulang sifat-sifat yang telah diketahui ke dalam pola atau konfigurasi baru. Penemuan-penemuan ini, baik material maupun non-material, telah membawa perubahan sosial yang mendalam. Penemuan listrik, misalnya, telah membawa perubahan yang mencecangkan di bidang industri, pertanian, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Para *Inventionists* berpendapat bahwa anggapan perubahan sosial selalu terjadi karena difusi budaya adalah salah. Mereka telah berulang kali dan selalu mengkritik argumen kelompok *difusionis* yang menyatakan perubahan terjadi karena adanya modifikasi perilaku dari budaya lain. Bagi kaum *Inventionists* setiap orang memiliki kemampuan untuk memulai perubahan bagi mereka sendiri.

Argumen kelompok *Diffusionists* dan *Inventionists* melibatkan sejumlah kebenaran dalam diri mereka sendiri. Keduanya tidak dapat sepenuhnya diterima atau ditolak. Sumber perubahan sosial dapat ditemukan baik dalam difusi maupun dalam *Inventionists*. Terkadang, menjadi sulit bagi kita untuk mengatakan dengan pasti kapan, di mana, bagaimana, dan dari siapa penemuan itu terjadi. Bahkan tak jarang, beberapa penemuan terjadi di dua atau tiga tempat secara bersamaan. Bisa jadi hal yang ditemukan dapat mengalami perubahan ketika disebarkan ke tempat lain secara bersamaan. Bisa juga hal yang ditemukan tersebut dapat mengalami perubahan saat disebarkan

ke tempat lain. Tak jarang, sebuah penemuan tunggal dapat menyebabkan terjadinya beberapa penemuan lain.

F. Teori-teori Perubahan Sosial

Teori-teori perubahan sosial, baik yang lama maupun yang baru, umumnya mengasumsikan bahwa arah perubahan sosial tidak sewenang-wenang, tetapi, pada tingkat tertentu, perubahan sosial terjadi secara teratur atau terpola. Tiga gagasan tradisional tentang perubahan sosial — kemunduran, perubahan siklik, dan kemajuan — tidak diragukan lagi telah memengaruhi teori-teori modern. Namun karena teori-teori ini tidak dapat ditentukan secara ilmiah, mereka gagal membuat perbedaan eksplisit antara penurunan dan kemajuan. Pada kenyataannya, kualitas kemunduran dan kemajuan tidak dapat diturunkan secara ilmiah (hasil pengamatan empiris) sendirian, tetapi sebaliknya diidentifikasi oleh evaluasi normatif dan penilaian nilai. Jika studi perubahan sosial akan dilakukan pada istilah ilmiah dan non-normatif, maka, hanya ada dua pola dasar perubahan sosial yang dapat dipertimbangkan: pertama, siklus, seperti yang diidentifikasi di atas, dan kedua, perubahan sosial satu arah. Sering kali rentang waktu perubahan menentukan pola mana yang bisa diamati.

Teori-teori perubahan sosial dapat dibagi menjadi dua kelompok: Pertama, Teori-teori yang berkaitan dengan arah perubahan sosial, dalam kelompok ini ada teori evolusi, dan teori siklus. Kedua, teori yang berkaitan dengan penyebab perubahan. Dalam kelompok ini sebagian teoritikus menjelaskan perubahan dalam hal faktor atau proses endogami dan sebagian lagi menekankan faktor eksogami seperti ekonomi, budaya, dan sejarah.

Ada beberapa teori perubahan sosial yang cukup berpengaruh, diantaranya:

1. Teori Evolusi.

Gagasan evolusi muncul dalam ilmu sosial berawal dari teori evolusi biologis. Dengan munculnya Teori Darwin tentang evolusi biologis, masyarakat dan budaya mulai dianggap mengalami perubahan yang sama dan menunjukkan tren yang sama. Masyarakat dan budaya dianggap tunduk pada hukum umum yang sama

tentang pertumbuhan biologis dan organisme. Beberapa pemikir bahkan mengidentifikasi evolusi dengan arah kemajuan yang diproyeksikan ke arah masa depan dalam bentuk sosial dan budaya yang lebih sempurna dan lebih baik.

Charles Darwin (1859), ahli biologi Inggris, yang mengemukakan teori evolusi biologis, menunjukkan bahwa spesies organisme telah berevolusi dari organisme yang lebih sederhana menjadi organisme yang lebih rumit melalui proses yang bervariasi dan seleksi alam. Herbert Spencer (1890), yang dikenal sebagai tokoh pemikir evolusioner ini dalam bidang sosiologi, mengatakan bahwa sosiologi adalah "studi evolusi dalam bentuknya yang paling kompleks". Baginya, evolusi adalah proses diferensiasi dan integrasi. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa perubahan merupakan ciri khas manusia. Kondisi masyarakat yang diamati saat ini dianggap merupakan hasil dari perubahan di masa lalu. Asumsi lain adalah bahwa perubahan tidak dapat dihindarkan dan terjadi secara 'alami'. Bagi Spencer, perubahan pada dasarnya adalah hasil dari operasi kekuatan dalam masyarakat atau budaya. Pandangan ini berkeyakinan bahwa dalam evolusi akan ada peningkatan tanpa batas pada tahap selanjutnya dibanding tahap sebelumnya. Artinya perubahan akan semakin meningkat dan semakin baik. Ada delapan keyakinan utama dalam teori ini, yakni :

1. Perubahan itu tidak bisa dihindari dan alami;
2. Perubahan itu bertahap dan berkelanjutan;
3. Perubahan itu berurutan dan dalam tahapan tertentu;
4. Semua tahap perubahan akan semakin tinggi daripada tahap sebelumnya;
5. Tahapan-tahapan perubahan tidak dapat dibalikkan;
6. Kekuatan perubahan melekat pada objek;
7. Perubahan dimulai dari yang sederhana ke tahapan yang lebih kompleks, dari homogenitas ke heterogenitas, dan dari tidak berdiferensiasi menjadi terdiferensiasi dalam bentuk dan fungsinya; dan
8. Semua masyarakat akan melewati tahap perkembangan yang sama.

Pada awal abad ke-19 hampir semua pemikiran evolusi dalam sosiologi dan antropologi didominasi oleh konsepsi tentang kompleksitas tahapan evolusi manusia dan masyarakat yang mengalami kemajuan ke tahap akhir kesempurnaan. Gagasan prinsip-prinsip evolusi ini sangat populer di kalangan antropolog dan sosiolog Inggris pada abad kesembilan belas. Misalnya Morgan (1877), Tyler (1889), Spencer (1890) dan Hobhouse (1906). Meskipun teori evolusi dalam sosiologi dikaitkan dengan Herbert Spencer, jelas sekali pemikiran itu diteruskan dan diadopsi oleh Emile Durkheim, Karl Marx, Friedrich Engels dan V. Gordon Childe. Fakta bahwa teori ini digunakan oleh para ahli teori radikal dan konservatif merupakan indikasi betapa pentingnya budaya evolusionisme dalam pemikiran abad ke-19. Konsepsi evolusi diterapkan tidak hanya pada perkembangan masyarakat tetapi juga pada seni, sastra, musik, filsafat, ilmu pengetahuan, agama, kehidupan ekonomi dan politik (negara) serta hampir setiap pencapaian lain dari pikiran manusia. Baik Spencer maupun Durkheim menggunakan konsep diferensiasi struktural untuk menunjukkan bahwa ketika masyarakat mengembangkan lebih banyak fungsi, ia menjadi lebih kompleks secara struktural. Perspektif ini kemudian dielaborasi dengan sedikit pembaharuan oleh Talcott Parsons.

Model umum evolusi masyarakat diwakili oleh sejumlah besar teori spesifik. C.H. Saint-Simon, salah satu pendiri sosiologi paling awal. Bersama dengan Auguste Comte, misalnya, ia menempatkan gagasan evolusi pembangunan sosial sebagai perkembangan berurutan dari masyarakat organik yang mewakili tahapan tingkat kemajuan masyarakat. Tiga tahapan tersebut, kemudian dielaborasi dalam skema evolusi Comte. Comte mengaitkan berbagai perkembangan masyarakat dalam pengetahuan manusia, budaya, dan masyarakat. Menurutnya ada tiga tahap besar yang harus dilalui semua masyarakat — yakni penaklukan, pertahanan, dan industri. Masyarakat melewati tiga tahap - primitif, perantara, dan ilmiah, yang sesuai dengan bentuk pengetahuan manusia (pemikiran). Comte memahami tahap-tahap ini sebagai kemajuan dari teologis

melalui metafisik untuk mencapai kesempurnaan penalaran positif. Dia berargumen bahwa semua umat manusia pasti melewati tahap-tahap ini saat berkembang. Sama dengan Comte, Spencer juga menampilkan konsep linier tahapan evolusi. Spencer berargumen bahwa tren masyarakat manusia berasal dari keutuhan yang sederhana dan tidak berbeda hingga yang kompleks dan heterogen, di mana bagian-bagian dari keseluruhan menjadi lebih terspesialisasi tetapi tetap terintegrasi.

William Graham Sumner (1934), yang dicap sebagai 'Darwinis Sosial' juga menggunakan gagasan evolusi, seperti Spencer, untuk menghalangi upaya reformasi dan perubahan sosial, dengan alasan bahwa evolusi sosial harus mengikuti jalannya sendiri, didiktekan oleh alam. Dia berkata: "Ini adalah kebodohan terbesar di mana seseorang dapat mampu, untuk duduk dengan batu tulis dan pensil untuk merencanakan dunia sosial baru". Pendekatan evolusi terhadap perkembangan sosial juga diikuti oleh para pemikir radikal, seperti Marx dan Engels, yang sangat dipengaruhi oleh karya antropolog LH Morgan, yang berusaha membuktikan bahwa semua masyarakat melewati tahap-tahap pembangunan yang tetap. Berawal dari kebiadaban melalui barbarisme hingga kemudian terbentuk peradaban. Marx dan Engels menyatakan bahwa setiap tahap peradaban, seperti feodalisme, menyiapkan landasan untuk peradaban selanjutnya.

Pandangan Durkheim tentang pembagian kerja yang progresif dalam masyarakat dan pandangan sosiolog Jerman Ferdinand Tonnies tentang tipe-tipe masyarakat *gemeinschaft* dan *gesellschaft* sampai batas tertentu juga mewakili perspektif evolusioner, tetapi skema mereka dalam mengklasifikasikan masyarakat kurang luas dan kurang eksplisit, dan karenanya disebut sebagai teori evolusi semu. Bagi Durkheim, dimensi masyarakat yang paling penting adalah tingkat spesialisasi, demikian ia menyebutnya, "pembagian kerja". Dia percaya bahwa ada tren sejarah, atau evolusi, dari spesialisasi tingkat rendah ke tingkat tinggi. Durkheim membedakan dua jenis utama masyarakat berdasarkan pembagian kerja ini — yang pertama berdasarkan solidaritas mekanis dan yang kedua

pada solidaritas organik. Durkheim percaya bahwa tipe kedua ini selalu berevolusi dan menggantikan yang pertama ketika tingkat spesialisasi dan pembagian kerja meningkat.

Tipe masyarakat ala Tonnies, 'gemeinschaft' sangat sesuai dengan solidaritas mekanisnya Durkheim, sedangkan 'gesellschaft' sangat sesuai dengan tipe kedua yakni solidaritas organik. Banyak sarjana lain mengemukakan ide serupa. Skema antropolog Amerika Robert Redfield, yang menguraikan perbedaan antara masyarakat 'rakyat' dan 'perkotaan', mengulangi dikotomi dasar yang sama dari tipe sosial yang disarankan oleh Durkheim dan Tonnies. Ahli teori modern Talcott Parsons juga melihat perubahan sosial sebagai proses 'evolusi sosial' dari bentuk masyarakat yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Dia menganggap perubahan dalam adaptasi sebagai kekuatan pendorong utama evolusi sosial. Sejarah masyarakat manusia dari era perburuan hingga terbentuknya negara-bangsa merupakan tahapan yang kompleks yang mewakili peningkatan 'kapasitas adaptif masyarakat secara umum'.

Ada tiga jenis utama teori evolusi: Pertama, Teori Evolusi Unilinear; Menurut teori ini, perubahan selalu berlanjut ke arah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara yang tidak sejalan. Tidak ada tempat untuk pengulangan dari tahap yang sama dalam teori ini. Para pengikut pola perubahan ini berpendapat bahwa masyarakat perlahan-lahan bergerak menuju peradaban yang lebih tinggi, yang maju secara linear dan ke arah perbaikan. Laju perubahan ini mungkin cepat atau lambat. Singkatnya, hipotesis linear menyatakan bahwa semua aspek masyarakat berubah secara terus-menerus dalam arah tertentu, tidak pernah goyah, tidak pernah terulang. Teori-teori yang digagas Saint-Simon, Comte, Morgan, Marx dan Engels serta para antropolog dan sosiolog lainnya masuk dalam kategori teori evolusi sosial yang tidak linier sebab didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat memang harus melewati suatu yang tetap dan jumlah tahap yang terbatas dalam urutan yang diberikan. Teori-teori semacam itu sudah lama mendominasi dunia sosiologis. Kedua, Teori Evolusi Universal; teori ini merupakan varian dari teori evolusi unilinear yang menyatakan

bahwa setiap masyarakat tidak harus melalui tahap-tahap perkembangan yang sama. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa budaya umat manusia, secara keseluruhan, telah mengikuti garis evolusi yang pasti. Pandangan Spencer dapat dikategorikan dalam sebuah perspektif. Spencer mengatakan bahwa umat manusia telah berkembang dari kelompok kecil menjadi besar dan dari sederhana menjadi majemuk dan dalam istilah yang lebih umum, dari homogen ke heterogen. Eksponen utama dari teori ini adalah seorang Antropolog bernama Leslie White. Gagasan serupa juga dijabarkan oleh William Ogburn, yang menekankan peran penemuan dalam perubahan sosial. Atas dasar inilah ia kemudian melahirkan konsep yang sangat terkenal yaitu 'lag budaya' yang menyatakan bahwa perubahan ada dalam budaya non-material kita, yaitu dalam ide dan pengaturan sosial kita dan selalu tertinggal dari perubahan dalam budaya material, yaitu dalam teknologi dan penemuan kita. Ketiga, Teori Evolusi Multilinear; Teori ini lebih realistis daripada teori perubahan evolusioner yang unilinear dan universal. Evolusi multilinear adalah konsep yang berupaya menjelaskan keragaman. Mencoba untuk mengidentifikasi pola sekuensial yang berbeda dalam setiap jenis budaya. Teori ini berpendapat bahwa perubahan dapat terjadi dalam beberapa cara dan bahwa hal itu tidak mengarah pada arah yang sama. Para ahli teori persuasi ini mengakui bahwa budaya manusia telah berevolusi mengikuti sejumlah garis. Julian Steward (1960) misalnya, salah satu tokoh dari teori ini berusaha menjelaskan evolusi garis lurus dari setiap masyarakat, maupun kemajuan umat manusia secara keseluruhan, tetapi lebih berkonsentrasi pada urutan perkembangan yang jauh lebih terbatas. Steward mengidentifikasi beberapa tren perubahan sosial sebagai evolusi universal; perkembangan dari yang lebih kecil ke yang lebih besar, dari yang lebih sederhana ke yang lebih kompleks, dari desa ke kota, dan dari teknologi rendah ke teknologi yang lebih tinggi tetapi. Walaupun begitu, mereka juga mengakui bahwa hal tersebut bisa terjadi dengan berbagai cara dan dengan konsekuensi yang berbeda-beda. Teori ini berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai pendekatan episodik. Teori yang menekankan

pentingnya insiden, keadaan historis, sosial, dan lingkungan yang unik yang membantu menjelaskan arah perubahan sosial tertentu. Belakangan, pandangan Leslie White dan Julian Steward dinamai sebagai neo-evolutionisme.

Walaupun teori Evolusi di atas cukup populer, teori tersebut bukan tanpa kritik. Banyak tokoh yang mengatakan bahwa skema evolusi terlalu banyak alasan, terutama generalisasi yang berlebihan tentang urutan sejarah, tahap-tahap perkembangan yang seragam, dan tingkat perubahan evolusioner. Evolusi biologis misalnya, tempat para teoritis evolusi meminjam ide-ide utama evolusi sosial, dianggap memberikan jawaban yang agak kikuk dan tidak memuaskan. Penjelasan tersebut diserang karena kurangnya bukti. Asumsi sederhana yang dilontarkan oleh tokoh evolusionis bahwa masyarakat berevolusi dari bentuk sederhana ke kompleks, terutama yang didasarkan pada skala teknologi produktif yang dominan ternyata tidak beralasan. Skema evolusi juga gagal untuk menentukan karakteristik sistematis dari masyarakat atau lembaga yang berkembang dan juga mekanisme serta proses transisi perubahan yang melaluinya dari satu tahap ke tahap lain yang dipengaruhi. Sebagian besar aliran evolusi klasik cenderung menunjukkan penyebab umum perubahan (ekonomi, teknologi, atau spiritual, dll.) Atau kecenderungan umum terhadap kompleksitas yang melekat dalam perkembangan masyarakat. Sangat sering teori ini mengacaukan kecenderungan umum seperti itu dengan sebab-sebab perubahan atau berasumsi bahwa kecenderungan umum menjelaskan contoh-contoh perubahan yang konkret.

Karena kekurangan di atas, teori evolusi kurang populer saat ini. Seorang ahli teori modern terkemuka Anthony Giddens (1979) secara konsisten menyerang evolusionisme dan fungsionalisme merk apapun. Dia menolak mereka sebagai pendekatan yang tepat untuk memahami perubahan sosial dan masyarakat. Teori optimis Spencer dianggap menyerupai skeptisisme. Dikatakan bahwa pertumbuhan dapat menciptakan masalah sosial daripada kemajuan sosial. Bahkan, para sosiologi modern cenderung mengabaikan atau bahkan menolak teori ini, terutama karena terlalu tidak kritis

untuk diterapkan oleh generasi sosiolog sebelumnya. Terlepas dari semua kelemahannya, ia memiliki tempat yang sangat signifikan dalam interpretasi perubahan sosial.

2. Teori Siklus

Perubahan siklus adalah variasi dari teori unilinear yang dikembangkan oleh Oswald Spengler (*Decline of the West*, 1918) dan Arnold J. Toynbee (*A Study of History*, 1956). Mereka berargumen bahwa masyarakat dan peradaban berubah sesuai dengan siklus naik, turun, dan jatuh tepat saat orang dilahirkan, dewasa, menjadi tua, dan mati. Menurut pemikir Jerman Spengler, setiap masyarakat memiliki siklus hidup yang telah ditentukan — kelahiran, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Masyarakat, setelah melewati semua tahapan siklus kehidupan ini, kembali ke tahap awal dan dengan demikian siklus itu dimulai lagi. Berdasarkan analisisnya terhadap peradaban Mesir, Romawi Yunani, dan banyak peradaban lainnya, ia menyimpulkan bahwa peradaban Barat saat ini sedang mengalami penurunan. Sejarawan Inggris yang terkenal di dunia, Toynbee, juga mendukung teori ini. Dia telah mempelajari hampir semua sejarah peradaban berbagai bangsa dan telah menemukan bahwa setiap peradaban memiliki kebangkitan, perkembangan dan kejatuhannya seperti peradaban Mesir. Mereka semua datang dan pergi, mengulangi siklus kelahiran, pertumbuhan, kerusakan dan pembusukan yang berulang. Dia mengemukakan teori "tantangan dan respons" yang berarti bahwa mereka dapat mengatasi lingkungan yang berubah, bertahan hidup, dan mereka yang tidak bisa mati. Dengan demikian, masyarakat dapat tumbuh dan bertahan jika dapat secara konstruktif merespons tantangan. Teori perubahan siklus atau kadang-kadang disebut teori '*rise and fall*' menganggap bahwa fenomena sosial dalam bentuk apapun muncul berulang-ulang, persis seperti yang pernah terjadi sebelumnya dengan cara siklus.

Varian dari proses siklus adalah teori seorang sosiolog terkenal Amerika P.A. Sorokin (*Dinamika Sosial dan Budaya*, 1941), yang dikenal sebagai "teori perubahan sosial". Dia menganggap perjalanan sejarah terus menerus, meskipun tidak teratur, berfluktuasi antara

dua jenis budaya dasar: 'sensasi' dan 'ideasional' melalui 'idealis'. Menurutnya, budaya terombang-ambing seperti pendulum jam di antara dua titik. Pendulum jam berayun dengan berlalunya waktu, tetapi pada akhirnya tiba pada posisi semula dan melanjutkan kembali ke perjalanan sebelumnya. Jadi, ini seperti proses siklus tetapi beresilasi dalam karakter. Budaya yang penuh sensasi adalah budaya yang menarik bagi indera dan keinginan indra. Ia hedonistik dalam etika dan menekankan sains dan empirisme. Di sisi lain, budaya ideasional adalah budaya di mana ekspresi seni, sastra, agama, dan etika tidak menarik bagi indra, tetapi pada pikiran atau jiwa. Itu lebih abstrak dan simbolis daripada budaya yang penuh sensasi. Pendulum budaya berayun dari kutub sensasi dan mengarah ke kutub ideasional melalui kutub tengah yang disebut budaya 'idealis', yang merupakan bentuk campuran dari budaya-budaya sensasional dan ideasional — perpaduan yang agak stabil antara iman, akal, dan indra sebagai sumber dari kebenaran. Sorokin menempatkan budaya Eropa dan Amerika kontemporer dalam tahap terakhir disintegrasi budaya yang penuh sensasi, dan berpendapat bahwa satu-satunya jalan keluar dari 'krisis' kita adalah sintesis baru iman dan sensasi. Tidak ada kemungkinan lain.

Dalam analisis budaya Sorokin, kami menemukan benih dari kedua teori itu — perubahan siklus dan linear. Dalam pandangannya, budaya dapat bergerak dalam arah tertentu untuk sementara waktu dan dengan demikian tampak sesuai dengan formula linier. Tetapi, pada akhirnya, sebagai akibat dari kekuatan yang melekat dalam budaya itu sendiri, akan ada pergeseran arah dan periode perkembangan baru akan diantar masuk. Tren baru ini mungkin linear, mungkin beresilasi atau mungkin sesuai dengan beberapa jenis kurva tertentu.

Teori Vilfredo Pareto (1963) tentang 'Sirkulasi Elit' pada dasarnya juga berasal dari variasi ini. Menurut teori ini, perubahan sosial utama dalam masyarakat terjadi ketika satu elit menggantikan yang lain, sebuah proses yang oleh Pareto disebutnya sebagai 'sirkulasi elit'. Semua elit cenderung menjadi dekaden dalam perjalanan waktu. Mereka 'membusuk dalam kualitas' dan kehilangan

'kekuatan' mereka. Menurut Marx, sejarah pada akhirnya mengarah ke dan berakhir dengan Utopia komunis, sedangkan sejarah ke Pareto adalah sirkulasi elit yang tidak pernah berakhir. Dia mengatakan bahwa masyarakat melewati periode kekuatan politik dan kemunduran yang berulang dalam siklus.

3. Teori Fungsionalisme

Fungsionalisme, sebagai pendekatan baru tentang studi masyarakat, berkembang terutama sebagai reaksi terhadap evolusionisme, pada tahun-tahun awal abad kedua puluh. Kritik evolusionisme menganjurkan bahwa tidak ada gunanya mengetahui penampilan pertama dari setiap item budaya dan perilaku sosial. Mereka menyebutnya "pencarian asal tanpa hasil". Salah satu asumsi paling penting dari fungsionalis adalah bahwa masyarakat (atau budaya) terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung secara fungsional atau sistem secara keseluruhan. Para ahli teori ini percaya bahwa masyarakat, seperti halnya tubuh manusia, adalah sistem lembaga yang seimbang, yang masing-masing berfungsi untuk mempertahankan masyarakat. Ketika peristiwa di luar atau di dalam masyarakat mengganggu keseimbangan, lembaga sosial melakukan penyesuaian untuk memulihkan stabilitas.

Asumsi mendasar ini menjadi dasar utama para kritikus fungsionalisme untuk menyatakan bahwa jika sistem berada dalam keseimbangan dengan berbagai bagiannya maka akan berkontribusi pada keteraturan dan stabilitas serta sulit untuk melihat bagaimana perubahannya. Kritikus (sebagian besar ahli teori konflik) berpendapat bahwa fungsionalis tidak memiliki penjelasan yang memadai tentang perubahan. Mereka tidak dapat menjelaskan perubahan, karena tampaknya tidak ada mekanisme yang akan mengganggu hubungan fungsional yang ada. Dengan demikian, fungsionalis tidak memiliki atau sedikit sekali yang dapat ditawarkan untuk mempelajari perubahan sosial karena pendekatan ini hanya memusatkan perhatian pada pemeliharaan sistem, yaitu, bagaimana tatanan sosial dipertahankan dalam masyarakat. G. Homans (1964), dalam salah satu artikelnya menekankan bahwa karakteristik dominan dalam model fungsionalis adalah kecenderungan inheren terhadap stabilitas.

Masyarakat mungkin berubah, tetapi ia tetap stabil melalui bentuk integrasi baru.

Fungsionalis menanggapi tuduhan ini dengan menggunakan konsep-konsep seperti keseimbangan dan diferensiasi. Talcott Parsons misalnya, seorang pendukung utama pendekatan fungsionalis, berpendapat, bahwa tidak ada sistem yang berada dalam kondisi keseimbangan sempurna meskipun tingkat keseimbangan tertentu sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian masyarakat, harus ada penyesuaian di bagian lain. Jika ini tidak terjadi, maka keseimbangan masyarakat akan terganggu dan ketegangan akan terjadi. Oleh karena itu proses perubahan sosial dapat dianggap sebagai 'keseimbangan yang bergerak'. Parsons memandang perubahan sosial sebagai proses 'evolusi sosial' dari bentuk masyarakat yang sederhana ke yang lebih kompleks. Evolusi sosial melibatkan proses diferensiasi sosial. Lembaga dan peran yang membentuk sistem sosial menjadi semakin berbeda dan terspesialisasi dalam hal fungsi mereka. Ketika bagian-bagian masyarakat menjadi semakin khusus dan berbeda, hal itu meningkatkan masalah integrasi bagian-bagian yang pada gilirannya menguraikan proses perubahan sosial dan keseimbangan sosial.

Beberapa pengikut fungsionalisme berpendapat bahwa itu merupakan teori kegigihan sosial (stabilitas), maka itu juga harus menjadi teori perubahan. Dalam proses adaptasi lembaga sosial suatu masyarakat, perubahan adalah kondisi yang diperlukan atau lebih tepatnya itu sudah dekat di dalamnya. Dengan demikian, seseorang dapat menjelaskan perubahan dalam ekonomi sebagai adaptasi terhadap ekonomi lain atau pada pemerintahan, atau perubahan dalam struktur keluarga dalam hal adaptasi terhadap institusi lain, dan seterusnya. Dalam sebuah artikel 'Dialektika dan Fungsionalisme' (ASR, 1963), P. Van den Berghe menyatakan bahwa perubahan teori fungsional dapat berasal dari tiga sumber utama: 1) Penyesuaian terhadap gangguan eksternal seperti resesi dalam perdagangan dunia; 2) Diferensiasi struktural dalam menanggapi masalah dalam sistem, misal: Reformasi pemilihan dalam menanggapi

kerusakan politik; 3) Inovasi kreatif dalam sistem, misal: Penemuan ilmiah atau kemajuan teknologi.

4. Teori Ekonomi

Karena pengaruh Marx dan Marxisme, teori perubahan ekonomi juga dikenal sebagai teori perubahan Marxis. Tentu saja, interpretasi ekonomi dari perubahan sosial tidak harus selalu Marxis, tetapi tidak ada versi lain (seperti Veblen yang juga menekankan pada material dan faktor ekonomi) dari doktrin yang sama pentingnya dengan Marxisme. Teori Marxian bertumpu pada asumsi mendasar bahwa perubahan dalam 'infra-struktur' ekonomi masyarakat adalah penggerak utama perubahan sosial. Bagi Marx, masyarakat terdiri dari dua struktur — 'struktur informasi' dan 'super struktur'. 'Infrastruktur' terdiri dari 'kekuatan produksi' dan 'hubungan produksi'.

'Super-struktur' terdiri dari fitur-fitur sistem sosial, seperti lembaga hukum, ideologi, politik dan agama, yang berfungsi untuk menjaga 'infra-struktur', dan yang dibentuk olehnya. Agar lebih jelas, menurut Marx, kekuatan produktif merupakan 'alat produksi' (sumber daya alam, tanah, tenaga kerja, bahan baku, mesin, alat dan instrumen produksi lainnya) dan 'mode produksi' (teknik produksi, mental dan kebiasaan moral manusia) baik dan tingkat perkembangannya menentukan hubungan sosial produksi, yaitu, hubungan produksi. Hubungan produksi ini (hubungan kelas) merupakan struktur ekonomi masyarakat — totalitas hubungan produksi. Dengan demikian, struktur sosial-ekonomi masyarakat pada dasarnya ditentukan oleh keadaan kekuatan produktif. Bagi Marx, kontradiksi antara 'kekuatan produktif' yang terus berubah dan berkembang 'dan' hubungan produksi 'yang stabil adalah kepentingan semua perkembangan sosial atau perubahan sosial.

Postulat Dasar: Perubahan adalah tatanan alam dan masyarakat. Itu melekat dalam masalah melalui kontradiksi kekuatan. Marx menulis: “Materi adalah realitas objektif, ada di luar dan tidak tergantung pada pikiran. Aktivitas pikiran tidak muncul terlepas dari materi. Segala sesuatu mental atau spiritual adalah produk dari proses material”. Dunia, pada dasarnya adalah material. Segala

sesuatu yang ada muncul atas dasar perjalanan material, muncul dan berkembang sesuai dengan hukum gerak materi. Semua hal menjadi ada, ada dan tidak ada lagi, masing-masing tidak independen dari lainnya, masing-masing ada hubungannya dengan orang lain. Segala sesuatu tidak dapat dipahami masing-masing secara terpisah dan dengan sendirinya tetapi hanya dalam hubungan dan interkoneksi mereka. Dunia tidak terdiri dari benda-benda stabil yang permanen dengan sifat-sifat tertentu tetapi dari proses-proses alam yang tak berkesudahan di mana benda-benda mengalami perubahan wujud menjadi ada dan berlalu. Bagi Marx, sistem produksi adalah pengungkit dari semua perubahan sosial, dan sistem ini dinamis. *Need system* menentukan produksi dan urutan teknologi, misal: Mode produksi, adalah kebutuhan material manusia yang merupakan akar dari upaya produktifnya, yang pada gilirannya adalah dasar dari semua bentuk lain dari kehidupannya. Marx percaya bahwa perubahan terjadi melalui kontradiksi kekuatan dan ini hadir sepanjang sejarah dalam beberapa bentuk atau lainnya.

Dalam 'Pendahuluan' karyanya yang monumental, *Capital: A Critique of Political Economy*, seluruh filosofi perubahan sosial Marx dirangkum: “Pada tahap tertentu dari perkembangan mereka, kekuatan material produksi dalam masyarakat mengalami konflik dengan hubungan produksi yang ada atau dengan hubungan properti tempat mereka pernah bekerja sebelumnya. Dari bentuk pengembangan kekuatan produksi, hubungan ini berubah menjadi belenggu mereka. Kemudian tibalah masa revolusi sosial dengan perubahan fondasi ekonomi, seluruh superstruktur besar ini kurang lebih cepat berubah.” Dengan demikian, tujuan utama Pendahuluan adalah penekanan pada perubahan basis ekonomi (mode produksi), dan ini pada gilirannya menghasilkan ideologi yang mendorong orang untuk berjuang melawan melalui perjuangan perubahan sosial. Sebagaimana adanya, konsepsi materialis tentang sejarah ini tentu saja mendorong kita untuk menganggap 'evolusi' basis ekonomi sebagai kunci perubahan sosial — apa yang disebut Engels 'hukum perkembangan sejarah manusia'.

Marx memandang jalannya sejarah (perubahan sosial) dalam hal filosofi 'dialektika'. (Sebuah ide yang dipinjam dari Hegel tetapi Marx menyebutnya sebagai materialistis. Menurut Hegel, evolusi berlangsung sesuai dengan sistem tiga tahap — tesis, antitesis, dan sintesis). Dengan demikian, perubahan, pengembangan, dan kemajuan terjadi melalui kontradiksi dan konflik dan bahwa perubahan yang dihasilkan mengarah pada persatuan yang lebih tinggi.

Secara khusus, Marx memandang perjuangan kelas dan transisi dari satu sistem sosial ke sistem sosial lainnya sebagai proses dialektis di mana kelas yang berkuasa dipandang sebagai 'tesis' membangkitkan 'negasi' ('antitesis') di kelas penantang dan dengan demikian ke 'sintesis' melalui transformasi revolusioner yang menghasilkan organisasi unsur-unsur yang lebih tinggi dari orde lama. Dalam sudut pandang dialektis perubahan, tahapan dan kekuatan yang tajam disarikan keluar dari kontinuitas dan gradasi dalam proses sosial dan kemudian dibuat penjelasan tentang proses berdasarkan pada tahapan-tahapan ini dan kekuatan dalam konflik dialektik. Marx percaya bahwa perjuangan kelas adalah kekuatan pendorong perubahan sosial. Baginya itu adalah 'motor sejarah'. Dia menyatakan bahwa "sejarah semua masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas" (Communist Manifesto, 1848).

Masyarakat berevolusi dari satu tahap ke tahap lainnya melalui perjuangan antara dua kelas — yang satu mewakili sistem produksi yang sudah usang dan orde lain yang baru lahir. Kelas yang muncul pada akhirnya menang dalam perjuangan ini dan membangun tatanan produksi baru; dalam tatanan ini, pada gilirannya, terkandung benih kehancurannya sendiri — proses dialektika sekali lagi. Perubahan hanya akan terjadi sebagai kemenangan kelas yang dieksploitasi. Marx percaya bahwa kontradiksi dasar yang terkandung dalam sistem ekonomi kapitalis akan mengarah pada kesadaran kelas. Kesadaran kelas melibatkan kesadaran penuh oleh anggota kelas pekerja tentang realitas eksploitasi, pengakuan atas kepentingan bersama, identifikasi bersama dari kelompok lawan yang memiliki kepentingan dengan mereka dalam konflik. Kesadaran ini akan mempersatukan mereka untuk revolusi proletar. Proletariat

akan menggulingkan borjuasi dan merebut kekuatan produksi — sumber kekuatan. Properti akan dimiliki bersama. Sekarang, semua anggota masyarakat akan berbagi hubungan yang sama dengan kekuatan produksi. Masyarakat tanpa kelas akan menghasilkan barang dan jasa. Karena sejarah adalah sejarah perjuangan kelas, sejarah sekarang akan berakhir.

Hampir sama dengan teori lainnya, teori Marx juga sering dikritik. Marx sering dituntut atas sikap deterministiknya terhadap masyarakat dan perubahannya. Ada beberapa kontroversi mengenai apakah Marx benar-benar bermaksud untuk menegaskan bahwa fenomena sosial dan budaya sepenuhnya atau hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi atau 'material'. Berbagai pernyataannya tidak sepenuhnya direkonsiliasi dan rentan terhadap berbagai macam interpretasi apapun. Dalam tulisan-tulisannya kemudian, dia keberatan dengan interpretasi gagasannya yang tidak dikaitkan dengan selain faktor ekonomi murni beserta turunannya dan non-kausal. Tetapi dia tetap berpegang teguh pada posisi bahwa situasi ekonomi adalah dasar dari tatanan sosial dan ini adalah inti dari teori Marxian.

Beberapa orang menyangkal bahwa faktor ekonomilah yang mempengaruhi kondisi sosial kehidupan. Pengaruhnya tentu saja kuat dan menembus. Tapi, itu tidak bisa dianggap sebagai faktor tunggal yang mempengaruhi perubahan sosial. Ada penyebab lain yang sama pentingnya dengan faktor ekonomi. Untuk mengatakan bahwa super-struktur masyarakat ditentukan oleh infra-struktur, yaitu, sistem produksi (sistem ekonomi) suatu masyarakat berjalan terlalu jauh. Kaitan antara perubahan sosial dan proses ekonomi terjadi secara tidak langsung. Selain itu, Marx terlalu menyederhanakan struktur kelas masyarakat dan dinamika perubahan sosial dalam bentuk perjuangan kelas. Dorothy S. Thomas (1925) berko-mentar bahwa "tidak sulit untuk membangun korelasi antara perubahan sosial dan perubahan ekonomi, meskipun lebih sulit untuk menafsirkannya". Dengan demikian, determinisme ekonomi tidak menyelesaikan masalah utama penyebab sosial.

5. Teori Konflik:

Teori konflik umumnya diterapkan para sosiolog yang menentang dominasi struktural-fungsionalisme. Para ahli teori ini berpendapat bahwa dalam fungsionalisme tidak ada tempat perubahan dan karena itu tidak dapat menjelaskan perubahan. Mereka telah mengabaikan konflik demi konsep kesatuan masyarakat yang menekankan integrasi sosial. Berbeda dengan pendekatan fungsionalis, ahli teori konflik berpendapat bahwa institusi dan praktik terus berlanjut karena kelompok-kelompok kuat memiliki kemampuan untuk mempertahankan status quo. Perubahan memiliki arti penting, karena diperlukan untuk memperbaiki ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial.

Ahli teori konflik tidak percaya bahwa masyarakat berkembang dengan baik ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kelompok-kelompok yang saling bertentangan berjuang untuk memastikan kemajuan (Coser, 1956). Ahli teori konflik menyatakan bahwa konflik adalah syarat yang diperlukan untuk perubahan. Baginya konflik harus menjadi penyebab perubahan. Tidak ada masyarakat yang berubah atau tidak berubah yang tidak memiliki konflik dalam bentuk apapun. Dengan demikian, konflik dikaitkan dengan semua jenis perubahan sosial dengan berbagai cara.

Teori konflik modern sangat dipengaruhi oleh ide-ide Karl Marx. Ini dapat dianggap sebagai bagian dari teori ekonominya tentang perubahan sosial yang menyatakan bahwa perubahan ekonomi hanya terjadi dan menghasilkan perubahan lain melalui mekanisme konflik intensif antara kelompok-kelompok sosial dan antara berbagai bagian dari sistem sosial. Konflik pada akhirnya akan mengubah masyarakat. Sementara Marx menekankan pada konflik ekonomi, Max Weber mendasarkan argumennya pada konflik tentang kekuasaan. Ralf Dahrendorf (1959), meskipun kritis terhadap gagasan kelas Marxis, mencoba untuk mendamaikan kontradiksi antara pendekatan fungsionalis dan konflik masyarakat. Dahrendorf berpendapat bahwa pendekatan ini pada akhirnya cocok meskipun banyak daerah yang tidak setuju. Dia tidak setuju dengan Marx

tidak hanya pada pengertian kelas tetapi pada banyak poin lain juga. Marx memandang perubahan sosial sebagai resolusi konflik atas sumber daya ekonomi yang langka, sedangkan Dahrendorf memandang perubahan sosial sebagai resolusi konflik atas kekuasaan. Marx percaya konflik besar akan terjadi antara mereka yang memiliki sumber daya ekonomi dan mereka yang tidak, sedangkan Dahrendorf percaya bahwa ada konflik simultan yang konstan di antara banyak segmen masyarakat.

Mengomentari teori ini, Percy S. Cohen (1968) menulis: “Teori ini masuk akal, tetapi itu tidak selalu benar. Pendapat bahwa konflik kelompok adalah syarat yang memadai untuk perubahan sosial jelas salah. Dapat diperdebatkan bahwa konflik terstruktur, ketika melibatkan keseimbangan kekuatan yang cukup setara, sebenarnya menghambat perubahan yang mungkin terjadi. Misalnya, dalam masyarakat di mana terdapat perpecahan yang mendalam antara kelompok-kelompok regional, etnis atau ras, mungkin ada sedikit kemungkinan untuk mempromosikan pengembangan ekonomi atau kebijakan kesejahteraan; perubahan 'amelioratif' semacam itu membutuhkan beberapa tingkat konsensus. Poin sederhananya adalah bahwa konflik dapat menyebabkan kebuntuan untuk tidak berubah. Harus ditekankan bahwa konflik sosial sering kali merupakan produk dari perubahan sosial sebagai penyebabnya, dan itu umumnya merupakan penghalang besar bagi jenis perubahan tertentu”.

6. Teori Teknologi

Perubahan sosial terjadi karena kerja banyak faktor. Teknologi merupakan salah satu yang menjadi faktor penting dari perubahan sosial. Bisa dikatakan hampir seluruh peradaban manusia adalah produk dari perkembangan teknologi. Hal tersebut bermakna bahwa setiap perkembangan dalam teknologi akan berdampak pada perubahan hubungan sosial. Marx dalam beberapa pandangannya menekankan pentingnya teknologi dalam skema moda produksi. Teknologi dilihat sebagai bentuk dasar utama bagi perubahan dalam masyarakat. Bagi Marx, tahap perkembangan teknologi menentukan cara produksi dan hubungan serta institusi yang

membentuk sistem ekonomi. Set hubungan ini pada gilirannya merupakan penentu utama dari keseluruhan tatanan sosial.

Perkembangan teknologi menciptakan kondisi kehidupan baru yang memaksa kondisi baru dalam adaptasi sosial. W.F. Ogburn, dalam artikelnya, *'How Technology Changes Society'* (1947), menulis: “Teknologi berubah dengan mengubah lingkungan kita yang pada gilirannya kita beradaptasi. Perubahan ini biasanya dalam lingkungan material, dan penyesuaian yang kita buat terhadap perubahan sering memodifikasi kebiasaan dan lembaga sosial.” Antropolog Leslie White (*Sains dan Budaya*, 1949) berpendapat bahwa “teknologi, khususnya jumlah energi yang dimanfaatkan dan cara menggunakannya, menentukan bentuk, isi budaya, dan masyarakat”. Teknologi telah mempengaruhi keduanya secara langsung maupun tidak langsung. Akibat langsung dari teknologi adalah adanya mekanisasi, organisasi tenaga kerja baru, penghancuran sistem produksi dalam negeri, perluasan jangkauan kontak sosial, spesialisasi fungsi, dll. Konsekuensi tidak langsungnya adalah peningkatan pengangguran, peningkatan persaingan dll.

Penemuan roda, kompas, bubuk mesiu, mesin uap, mesin cetak, telepon (sekarang telepon seluler), radio, TV, internet, pesawat terbang, mobil bermotor dan begitu banyak penemuan lain dalam bidang medis dan lainnya telah merevolusi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi pertanian, mulai dari bajak besi hingga teknologi traktor dan sistem rotasi tanaman memungkinkan terciptanya surplus. Salah satu buku paling awal tentang perubahan sosial yang ditulis oleh Ogburn (1922) telah menganalisis perubahan tersebut secara rinci. Ogburn menganalisis sekitar 150 perubahan semacam itu (baik efek sosial langsung maupun jauh) dalam kehidupan sosial yang disebabkan oleh penemuan radio saja. Dalam hubungan ini, Ogburn dan Nimkoff (1958) berpendapat: “Sebuah penemuan penting tidak perlu dibatasi hanya pada satu efek sosial saja. Kadang-kadang itu memberikan banyak pengaruh yang menyebar ke arah yang berbeda seperti jari-jari roda”. Perkembangan teknologi telah memengaruhi banyak perubahan dalam sikap, kepercayaan, dan bahkan dalam tradisi. Ini mempengaruhi hampir

semua aspek kehidupan dan budaya kita. Ini termasuk kebiasaan sosial dan teknik praktis untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi.

Setiap perubahan teknologi yang cukup hebat akan menghasilkan beberapa perubahan sosial lainnya sebagai konsekuensinya (Cohen, 1968). Itulah *summum bonum* (inti) dari teori tersebut. Sebagai contoh, teknik-teknik manufaktur yang telah ditemukan telah banyak mempengaruhi hubungan sosial. Satu penemuan roda telah menghasilkan ribuan penemuan yang pada gilirannya sangat mempengaruhi hubungan sosial. Mobil telah membawa sejumlah perubahan sosial yang telah mengubah gaya hidup individu. Komputer dan Internet adalah yang terbaru dari garis panjang perkembangan untuk mendorong visi utopis dan anti-utopis tentang dunia yang diubah oleh teknologi. Komputer telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita mulai dari reservasi tiket kereta api, pendaftaran rumah sakit atau perguruan tinggi hingga membuka rekening di bank. Teknologi modern juga telah merevolusi konsep dan kualitas sistem produksi, komunikasi, organisasi sosial dan berbagai proses akulturasi dan simbolisasi dalam masyarakat. Teknologi membantu mewujudkan tujuan manusia hanya dengan mengeluarkan sedikit usaha, lebih sedikit biaya, dan dengan efisiensi yang lebih besar. Teknologi menciptakan keinginan akan hal-hal baru dan inovasi. Antropolog Peter Worsly (1984), mengatakan "sampai hari ini, masyarakat manusia tidak pernah ada", yang berarti bahwa hanya dalam waktu yang sangat baru kita dapat berbicara tentang bentuk asosiasi sosial. Dunia dalam hal-hal penting telah menjadi sistem sosial tunggal sebagai ikatan saling ketergantungan yang berkembang yang kini memengaruhi setiap orang. Gagasan 'desa global' yang dikembangkan oleh Marshall McLuhan (1960) mencerminkan bahwa dunia menjadi lebih terintegrasi dalam hal ekonomi, politik dan budaya.

Sama dengan teori sebelumnya, teori ini juga banyak mendapat kritik. Beberapa kritik yang muncul terkait dengan tujuan dan konsekuensi dari teknologi serta produksi barang material. Ada sejumlah pertanyaan besar, apakah teknologi tingkat tinggi bisa

meningkatkan kebahagiaan dan meningkatkan kehidupan keluarga kita?. Apakah teknologi yang kompleks bisa menyediakan udara yang bersih, air murni, dan membantu kita melestarikan sumber daya alam?. Tidakkah kita berpikir bahwa teknologi yang berubah dengan cepat adalah penyebab semua jenis degradasi lingkungan, polusi, kesehatan, dan masalah sosial kita?. Orang tidak ragu mengatakan bahwa teknologi modern (sains) bertanggung jawab atas terjadinya degradasi moral masyarakat kita.

Setiap faktor baru, apakah itu kredo atau mesin, telah mengganggu tatanan lama. Gangguan yang diciptakan oleh mekanisme itu begitu besar sehingga tampak sebagai musuh budaya. Teknologi yang membawa kekayaan juga membawa keburukan, kerendahan hati, dan standardisasi yang tergesa-gesa. Perkembangan teknologi telah membawa bahaya baru, penyakit baru dan kelelahan. Itu bukan kesalahan teknologi (mesin). Itu karena kekejaman dan keserakahan dari mereka yang mengendalikan penemuan-penemuan besar ini. Nilai-nilai kemanusiaan mulai mempertanyakan kembali terkait ancaman teknologi. Perkembangan teknologi telah memunculkan budaya eksploitasi yang tak terkendali terhadap ekonomi, ekologi, dan sosial. Meskipun teknologi merupakan faktor penting dari perubahan, hal tersebut tidak berarti bahwa perubahan teknologi bisa menghasilkan perubahan sosial. Perubahan teknologi juga tidak selalu merupakan kondisi yang diperlukan untuk perubahan sosial lainnya. Mungkin saja kondisi teknologi tertentu diperlukan sebelum faktor-faktor lain dapat menghasilkan perubahan tertentu, tetapi ini tidak perlu memicu perubahan sosial.

Perubahan sosial memiliki beberapa karakteristik sebagai cirinya. Karakteristik utama dari perubahan sosial adalah perubahan di berbagai bidang sistem sosial di mana manusia dilahirkan, tumbuh dan mati. Perubahan seperti itu mempengaruhi sikapnya terhadap berbagai rangsangan, nilai-nilai, kepercayaan dan keyakinan, emosi, standar moral dan agamanya, serta hati nuraninya. Karakteristik dan sifat perubahan sosial bisa memengaruhi seluruh sistem fisik psiko-sosial, karakteristik mental dan fisik, keseluruhan sifat, perilaku, respons dan perilaku lingkungan sosial manusia.

Dari beberapa karakteristik di atas, perubahan sosial dibagi ke dalam beberapa tipe. Pertama, Perubahan komplit; merupakan perubahan yang dilakukan (terjadi) secara total, baik itu dalam status dan praktik. Kedua, Perubahan parsial; perubahan yang terjadi pada sebagian sistem. Ketiga, Perubahan Revolusioner: perubahan yang dilakukan secara mendadak dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Ini adalah kebalikan dari perubahan evolusioner. Ketika perubahan di berbagai sektor sistem sosial kita terjadi secara tiba-tiba dan terjadi perubahan yang sangat drastis, maka itu adalah revolusi. Dengan kata lain, revolusi menyebabkan perubahan yang sangat besar dan luar biasa. Perubahannya sedemikian rupa sehingga gerakan ini mengubah seluruh tatanan sosial. Keempat, Perubahan Evolusioner: perubahan yang lambat, terus menerus, dan terjadi secara permanen. Perubahan evolusioner terjadi dalam kurun waktu yang lama, terjadi secara perlahan, dan bertahap serta melalui proses evolusi. Perubahan seperti itu tidak terlalu drastis atau luar biasa. Mereka berjalan secara bertahap seperti proses pengkondisian dan orang belajar menyesuaikan diri.

Seperti diterangkan di atas perubahan sosial terjadi karena beberapa sebab, baik itu berubah secara alami maupun karena sebab akibat lain yang disengaja. Ada beberapa faktor yang sangat kuat pengaruhnya dalam perubahan sosial. Berikut beberapa faktor yang cukup dominan mempengaruhi perubahan sosial, diantaranya:

a) Gerakan Sosial dan Revolusi Sosial

Sejarah dunia mencatat beberapa gerakan sosial dan revolusi penting seperti revolusi Perancis, Amerika revolusi, revolusi Rusia, revolusi Cina dan sebagainya. Sebuah gerakan sosial berasal dari perasaan tidak puas dan tidak bahagia dengan sistem sosial atau tatanan sosial yang ada, ketika orang mencoba untuk membangun tatanan kehidupan baru atau gaya hidup baru atau ketika sistem sosial didirikan dalam suatu kondisi keresahan.

Menurut Blumer (1946), gerakan sosial mendapatkan motif mereka dari ketidakpuasan atas bentuk kehidupan saat ini dan juga dari harapan adanya sebuah skema atau sistem kehidupan

yang baru. Gerakan sosial adalah aksi kolektif dengan beberapa tindakan yang berkesinambungan untuk mempromosikan perubahan atau menolak perubahan dalam masyarakat atau kelompok yang merupakan bagiannya (Turner dan Killian, 1957). Gerakan sosial mengacu pada upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan baru yang pada akhirnya akan membawa perubahan dalam sistem sosial yang ada dari masyarakat, negara atau negara itu sendiri. Gerakan yang diselenggarakan oleh kelompok minoritas pada awalnya dapat diterima dan dipraktikkan oleh orang secara kolektif. Heberice (1951) berpendapat bahwa suatu gerakan sosial pada dasarnya berusaha untuk membawa perubahan mendasar dalam tatanan sosial.

b) Motivasi Bersama

Untuk membuat sebuah gerakan sosial yang sukses, maka diperlukan adanya tuntutan untuk mengoordinasikan usaha-usaha yang bersifat lokalistik dan membuatnya menjadi komprehensif, seperti menyusun perumusan penyebab ketidakpuasan, tujuan dan bentuk tindakan untuk mencapai tujuan. Sebuah gerakan sosial ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dan perencanaan. Keberhasilannya akan bergantung pada proses koordinasi dan kerja sama antara anggota masyarakat yang melakukan gerakan. Sebuah gerakan sosial harus didorong oleh adanya motivasi bersama untuk berubah. Misalnya gerakan keperempuanan, bisa jadi motivasi bersamanya karena ada masalah dengan hak-hak kaum perempuan sehingga perlu melakukan perubahan dalam rangka memenuhi hak asasinya.

c) Kebutuhan Umum

Motivasi bersama berasal dari adanya kebutuhan kolektif. Kebutuhan bisa berfungsi sebagai pemantik terjadinya perubahan sosial. Kebutuhan bisa bersumber dari ekonomi, politik, agama, sosial, psikologis, dan biologis. Gerakan sosial bisa mencakup beberapa bidang kehidupan seperti perubahan untuk sistem ketenagakerjaan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan sesuatu, hak untuk mendapatkan informasi, dll. Kondisi-kondisi tersebut bisa menjadi kebutuhan bersama.

Metode gerakan yang dilakukan bisa berbentuk evolusi maupun revolusi. Peserta gerakan sosial yang tertarik biasanya adalah mereka yang secara langsung dipengaruhi oleh sistem tatanan sosialnya. Tetapi, yang paling dominan dalam gerakan sosial adalah masalah yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Kebutuhan muncul atas dasar ketidakpuasan terhadap sistem sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kebutuhan yang kuat dengan berorientasi pada realisasi yang tepat, perencanaan yang tepat, dan organisasi yang tepat, bisa membawa dampak yang besar pada gerakan perubahan sosial. Karenanya kebutuhan akan perubahan sosial adalah salah satu faktor kuat yang mendorong gerakan menuju arah pencapaian tujuan atau ideologi. Kebutuhan bersama akan membantu gerakan dalam mendorong timbulnya motivasi bersama yang bisa digunakan sebagai modal untuk melakukan gerakan evolusi maupun revolusi.

d) Penderitaan dan Penindasan yang Berkepanjangan

Faktor ini sangat mempengaruhi setiap gerakan sosial yang ditujukan untuk perubahan sosial berdasarkan satu atau sejumlah masalah. Misal, penindasan oleh kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi terhadap kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah akan menghasilkan dorongan untuk perubahan sosial.

e) Dampak Komunikasi

Banyak perubahan sosial dipengaruhi oleh informasi yang bertebaran di jagat media elektronik dan massa seperti TV, Radio, surat kabar dll. Tampilan informasi terkait isu-isu sosial akan mengubah pola pikir masyarakat. Masyarakat akan terdorong untuk segera mencari solusi. Media-media ini membuat orang awam sadar akan masalah mereka, hak dan tuntutan mereka. Informasi-informasi tersebut akan memprovokasi mereka untuk bergabung dalam sebuah gerakan atau berjuang bersama untuk tujuan mereka dengan sepenuh hati.

f) Pendidikan

Terlepas dari kenyataan bahwa pendidikan adalah sarana komunikasi, pendidikan juga merupakan bagian dari perubahan sosial. Pendidikan memberikan pengetahuan dan pengetahuan me-

tingkatkan pandangan manusia serta rasionalitas dan penilaian. Pendidikan bertindak sebagai kekuatan perubahan sosial yang sangat kuat. Dengan peningkatan kesadaran melalui pendidikan orang semakin sadar dengan potensi kerusakan atau ancaman lingkungan sosialnya. Dengan meningkatnya kesadaran, maka orang akan berjuang untuk melakukan perubahan. Karenanya, pendidikan bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan perubahan sosial.

g) Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi termasuk munculnya berbagai penemuan juga mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Misal timbulnya urbanisasi dan budaya kerja. Dua peristiwa tersebut dipengaruhi oleh wujudnya masyarakat yang melek teknologi. Ketika manusia memasuki ruang besar teknologi yang terus berkembang, tatanan sosial negara pasti akan ikut berubah. Kemajuan teknologi benar-benar memengaruhi pandangan hidup, gaya hidup, cara hidup, perilaku, dan perilaku sehari-hari seseorang. Perkembangan teknologi menjadikan kebutuhan manusia semakin kompleks dan beragam. Kebutuhan, keinginan, dan gaya hidupnya tiba-tiba berubah. Dalam keadaan seperti itu manusia akan mengalami kebutuhan yang sangat mendesak untuk perubahan sosial. Di beberapa negara maju yang pertumbuhan teknologinya melampaui batas, perubahan teknologi telah membawa transformasi besar dan drastis dalam kehidupan sosial mereka. Kemajuan teknologi membuat hidup lebih mudah dengan penggunaan gadget modern dan karenanya orang bisa memiliki cukup waktu untuk melibatkan dirinya dalam berbagai aktivitas sosial.

7. Teori Kehancuran (*Theory of Deterioration*)

Beberapa pemikir telah mengidentifikasi perubahan sosial dengan kemunduran. Menurut mereka, manusia pada awalnya hidup dalam kondisi kebahagiaan yang sempurna di zaman keemasan. Namun selanjutnya, kemunduran mulai terjadi, akibatnya manusia mencapai usia degenerasi komparatif. Teori ini berasal dari gagasan dunia Timur kuno. Beberapa gagasan tersebut terlontar dalam puisi epik India, Persia dan Sumeria. Menurut mitologi India manusia telah melewati empat zaman — Satyug, Treta, Dwapar,

dan Kaliyug. Satyug adalah usia terbaik di mana manusia jujur, baik, dan sangat bahagia. Setelah itu kemunduran mulai terjadi. Zaman modern adalah zaman Kaliyug di mana manusia adalah penipu, pengkhianat, palsu, tidak jujur, egois dan akibatnya tidak bahagia.

8. Teori Linier

Beberapa pemikir menganut teori linear perubahan sosial. Menurut mereka, masyarakat berangsur-angsur bergerak ke tingkat peradaban yang bahkan lebih tinggi dan maju secara linear dan menuju perbaikan. fenomena alam dan sosial.

Herbert Spencer (dalam Offer, 2010), yang menyamakan masyarakat dengan suatu organisme, menyatakan bahwa masyarakat manusia secara bertahap telah berkembang menuju negara yang lebih baik. Dalam negara primitifnya, yakni negara militerisme, masyarakat dicirikan oleh kelompok-kelompok yang bertikai dan penuh perjuangan tanpa ampun untuk kepentingan eksistensi. Dari militerisme, masyarakat bergerak ke arah industrialisme. Masyarakat pada tahap industrialisme ditandai oleh diferensiasi dan integrasi pada bagian-bagiannya yang lebih besar. Pembentukan sistem terpadu memungkinkan kelompok-kelompok yang berbeda — sosial, ekonomi dan ras, untuk hidup dalam damai.

Beberapa sosiolog Rusia juga menganut teori ini seperti Nikolai K. Mikhailovsky (dalam Grinin, 2010) misalnya, berpendapat bahwa masyarakat manusia melewati tiga tahap; (1) antroposentris objektif, (2) eksentrik, dan (3) antroposentris subjektif. Pada tahap pertama, manusia menganggap dirinya pusat alam semesta dan disibukkan dengan kepercayaan mistis pada hal-hal gaib. Pada tahap kedua, manusia sibuk dengan abstraksi; abstrak lebih “nyata” baginya daripada yang sebenarnya. Pada tahap ketiga, manusia datang untuk mengandalkan pengetahuan empiris yang dengannya ia semakin banyak mengendalikan alam demi keuntungannya sendiri. Sementara Pitirim Sorokin (Jehanih, 2007) dalam konsepnya tentang variabel perulangan telah berupaya memasukkan perubahan siklus dan linear. Dalam pandangannya budaya dapat melanjutkan ke arah tertentu untuk suatu waktu dan dengan

demikian tampak sesuai dengan formula linier. Tetapi pada akhirnya, sebagai akibat dari kekuatan yang ada di dalam budaya itu sendiri, akan ada pergeseran arah dan periode perkembangan baru akan lahir.

Deskripsi yang diberikan oleh Sorokin memberi ruang bagi hampir semua kemungkinan, kemunduran, kemajuan atau perubahan siklus dan, oleh karena itu, sosiolog menemukan sedikit pertentangan dalam deskripsinya. Tetapi bagaimanapun juga, konsep variabel Sorokin merupakan pengakuan bahwa keadaan pengetahuan sosiologis saat ini tidak menjamin konstruksi teori mengenai tren jangka panjang atau karakter perubahan sosial.

9. Teori Perubahan Sosial Deterministik

Teori perubahan sosial deterministik adalah teori perubahan sosial yang diterima secara luas di kalangan sosiolog kontemporer. Menurut teori ini ada kekuatan tertentu, sosial atau alam atau keduanya, yang membawa perubahan sosial. Bukan alasan atau kecerdasan tetapi kehadiran kekuatan dan keadaan tertentu yang menentukan arah perubahan sosial.

Sumner dan Keller (dalam Smith, 1979) bersikeras bahwa perubahan sosial secara otomatis ditentukan oleh faktor ekonomi. Keller menyatakan bahwa upaya sadar dan perencanaan rasional memiliki sedikit peluang untuk melakukan perubahan kecuali adat dan budaya masyarakat sudah siap untuk itu.

Perubahan sosial pada dasarnya adalah proses yang tidak rasional dan tidak disadari. Variasi dalam cerita rakyat yang terjadi dalam menanggapi suatu kebutuhan tidak direncanakan. Manusia paling banyak hanya dapat membantu atau memperlambat perubahan yang sedang berlangsung. Adalah Karl Marx yang sangat terkesan dengan idealisme metafisik filsuf Jerman Hegel. Marx (1962), berpendapat bahwa kondisi-kondisi material kehidupan adalah faktor-faktor penentu perubahan sosial. Teorinya dikenal sebagai teori determinisme ekonomi atau "penafsiran materialis tentang sejarah". Secara singkat Marx berpendapat bahwa masyarakat manusia melewati berbagai tahapan, masing-masing dengan sistem organisasinya yang terdefinisi dengan baik. Setiap tahap

berturut-turut muncul sebagai akibat dari konflik dengan yang sebelumnya. Perubahan dari satu tahap ke tahap lainnya disebabkan oleh perubahan faktor ekonomi, yaitu, metode produksi dan distribusi. Kekuatan material produksi dapat berubah, dan dengan demikian timbul keretakan antara faktor-faktor yang mendasarinya dan hubungan yang dibangun di atasnya. Perubahan kondisi materi kehidupan membawa perubahan di semua lembaga sosial, seperti negara, agama, dan keluarga. Ini akan mengubah hubungan sosial-ekonomi utama. Dengan kata-katanya sendiri Karl Marx mengatakan bahwa “Hubungan hukum serta bentuk-bentuk negara tidak dapat dipahami dengan sendirinya, atau dijelaskan oleh apa yang disebut kemajuan umum dari pikiran manusia, tetapi mereka berakar dalam kondisi material kehidupan Cara produksi dalam kehidupan material menentukan karakter umum dari proses kehidupan sosial, politik dan spiritual”. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, tetapi sebaliknya, keberadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. ”Dengan demikian faktor ekonomi adalah yang utama dalam masyarakat, karena semua fase sosial kehidupan bergantung padanya dan hampir seluruhnya ditentukan olehnya.

Menurut Engels (1962), penyebab utama dari semua perubahan sosial dan revolusi politik harus dicari bukan dalam pikiran manusia, dalam peningkatan wawasan mereka tentang kebenaran dan keadilan abadi, tetapi dalam perubahan dalam mode produksi dan pertukaran. Menurut Marx, tatanan sosial telah melewati lima fase yang disebut oriental, kuno, feodal, kapitalistik, dan komunis. Sistem kapitalistik modern telah bergerak menuju kehancurannya karena kondisi-kondisi yang dihasilkannya dan kekuatan-kekuatan yang tidak dicapainya membuat kehancurannya tidak terhindarkan. Di dalamnya perjuangan kelas disederhanakan, mengungkap dirinya dalam konflik dua kelas besar, borjuis dan proletariat.

Seperti yang dikatakan Marx, ‘Senjata-senjata yang dengannya kaum borjuis menjatuhkan feodalisme ke tanah sekarang berbalik melawan kaum borjuis itu sendiri. Tetapi kaum borjuis tidak hanya telah memalsukan, senjata-senjata yang membawa kematian bagi

dirinya sendiri, itu juga telah mewujudkan bagi orang-orang yang akan menggunakan senjata-senjata itu — kelas pekerja modern, proletar. “Dengan demikian sistem kapitalis memperbesar jumlah pekerja, atau menyatukan mereka menjadi kelompok-kelompok yang kompak, membuat mereka sadar kelas, memasok mereka dengan sarana komunikasi dan kerja sama dalam skala dunia, mengurangi daya beli mereka, dan dengan semakin mengeksploitasi mereka maka akan membangkitkan mereka untuk melakukan perlawanan secara terorganisir. Kapitalis bertindak terus-menerus dalam mengejar kebutuhan alami mereka dan dalam membenaran sistem yang bergantung pada pemeliharaan laba, selalu menciptakan kondisi yang merangsang dan memperkuat upaya alami pekerja dalam mempersiapkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pekerja.

Tatanan sosial yang dihasilkan tidak akan mencapai perkembangan penuhnya secara bersamaan tetapi akan melalui dua tahap. Pada tahap pertama, akan ada kediktatoran proletariat, di mana proletariat akan memerintah secara sewenang-wenang dan menghancurkan semua sisa-sisa kapitalisme. Pada tahap yang kedua, akan ada komunisme yang nyata, di mana di sana tidak akan ada negara, tidak ada kelas, tidak ada konflik, dan tidak ada eksploitasi. Marx memvisualisasikan masyarakat di mana tatanan sosial akan mencapai keadaan sempurna. Dalam masyarakat itu prinsip yang berlaku adalah "dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhannya".

Gagasan yang dibangun Karl Marx bersama teman-temannya tentang Teori determinisme sedikit banyak mengandung unsur kebenaran, tetapi tidak bisa dikatakan cocok sepenuhnya. Hanya sedikit yang menyangkal bahwa faktor ekonomi mempengaruhi kondisi sosial kehidupan, tetapi hanya sedikit pula yang berpendapat bahwa faktor ekonomi adalah satu-satunya kekuatan penggerak dalam sejarah manusia. Ada penyebab lain yang jelas juga sedang bekerja. Tidak ada bukti ilmiah bahwa masyarakat manusia sedang melalui tahapan-tahapan yang divisualisasikan oleh Marx.

Klaimnya bahwa manusia ditakdirkan untuk mencapai tahap eksistensi yang ideal tidak lebih dari visioner. Teorinya tentang nilai dan akibatnya dari nilai lebih, teorinya tentang satu-satunya produktivitas tenaga kerja, dan hukum tentang akumulasi modal berasal, serta tentang ekivalensi harga dan biaya sekarang telah ditolak oleh para ekonom modern.

Selain itu, tesis Marx tentang hubungan antara perubahan sosial dan proses ekonomi didasarkan pada psikologi juga dianggap kurang memadai. Fakta tentang psikologi yang tidak memadai mungkin merupakan kelemahan fatal dari semua teori determinisme. Dia tidak memberi tahu kita bagaimana perubahan direproduksi dalam mode produksi. Dia berbicara seolah-olah teknik perubahan produksi menjelaskan dirinya sendiri dan merupakan penyebab pertama. Dia memberikan penjelasan sederhana tentang perubahan sosial dan mengabaikan kompleksitas habituasi di satu sisi dan kejijikan di sisi lain. Dia menyederhanakan sikap yang berkumpul di sekitar institusi; solidaritas dan kesetiaan keluarga, pekerjaan dan bangsa tunduk pada kelas ekonomi. Faktanya, dia tidak secara langsung menghadapi pertanyaan rumit tentang sebab-akibat sosial. Bahwa perubahan ekonomi dan perubahan sosial berkorelasi, tidak ada yang dapat menyangkal. Tetapi mengatakan bahwa superstruktur hubungan sosial ditentukan oleh struktur ekonomi yang berjalan terlalu jauh.

Russell (1986) menulis, “Pria menginginkan kekuatan, mereka menginginkan kepuasan untuk kebanggaan dan harga diri mereka. Mereka sangat menginginkan kemenangan atas saingan mereka sehingga mereka akan menciptakan persaingan untuk tujuan yang tidak disadari untuk membuat kemenangan menjadi mungkin. Semua motif ini memotong motif ekonomi murni dengan cara-cara yang secara praktis penting”. Interpretasi deterministik dari perubahan sosial menjadi terlalu sederhana.

Sejumlah pemikir sosial yang menentang teori determinisme ekonomi menganggap unsur-unsur budaya non-material sebagai sumber dasar perubahan sosial. Mereka menganggap ide sebagai penggerak utama dalam kehidupan sosial. Fenomena ekonomi

atau material dianggap lebih rendah dari yang bukan material. Gustave Le Bon, George Sorel, James G. Frazer dan Max Weber berpendapat bahwa agama adalah sumber (induk) pemrakarsa terjadinya perubahan sosial. Jadi Hinduisme, Budhisme, Yudaisme, Kristianisme, dan Islamisme telah memiliki pengaruh yang menentukan terhadap ekonomi.

Teori determinisme agama telah dikritik oleh Sorokin dalam Teori Sosiologis Kontemporer. Dia mengajukan pertanyaan; “Jika semua lembaga sosial berubah di bawah pengaruh perubahan dalam agama, bagaimana, kapan dan mengapa agama berubah dengan sendirinya?”. Menurut Sorokin perubahan disebabkan oleh interaksi berbagai bagian budaya, tidak ada yang dapat dianggap utama. Ini berarti bahwa perubahan itu bersifat pluralistik dan bukan monistik. Tetapi teori perubahan sosial pluralistik ini dimulai dalam budaya material dan kemudian menyebar ke bidang lain. Perubahan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi tetapi juga bersifat otomatis.

Sejumlah sosiolog berpendapat bahwa perubahan sosial dapat terjadi melalui upaya yang sadar dan sistematis. Dengan demikian, Lester F. Ward (1905) menegaskan bahwa kemajuan dapat dicapai melalui upaya sengaja yang direncanakan dengan sadar. Melalui pendidikan dan pengetahuan, kelompok intelektual dapat memperkuat dirinya sendiri sehingga bisa menyusun perencanaan yang efektif memungkinkan. Evolusi alami, menurut Ward, adalah proses yang lambat, sedangkan perencanaan yang cerdas mempercepat proses alam. Charles A Ellwood (1901) setuju dengan Ward bahwa kemajuan dipromosikan oleh pendidikan dan pengetahuan. Ludwig Stein (1923), seorang sosiolog dan filsuf Jerman, dan L.T. Hobhouse (1994), seorang sosiolog Inggris, juga menguraikan teori yang sangat mirip dengan teori Ward. Mereka menyatakan pandangan bahwa kemajuan dapat dicapai melalui kontrol material yang dilakukan oleh pikiran. Urusan manusia dapat dikontrol oleh akal dan, oleh karena itu, elemen rasional dalam sifat kita harus dikembangkan sehingga dapat digunakan sebagai faktor dalam proses evolusi.

10. Teori Difusi

Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan hasil dari difusi pola budaya dan praktik masyarakat lain yang merupakan fungsi dari penyebaran praktik budaya dari masyarakat ke masyarakat. Menurut Linton (1955), kami adalah peminjam budaya yang hebat. Murdock (1934) memperkirakan sekitar 90 persen dari setiap budaya yang tercatat dalam sejarah, memperoleh unsur budayanya dari budaya orang lain. Hal tersebut bermakna bahwa perubahan sosial diinduksi secara eksternal dan tidak dihasilkan secara internal seperti yang dinyatakan oleh para evolusionis. Horton dan Hunt (1980) mendefinisikan difusi sebagai penyebaran budaya dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Menurut Kroeber (1973), difusi adalah proses, biasanya tidak selalu bertahap, di mana unsur-unsur atau sistem budaya tersebar; di mana suatu penemuan atau institusi baru diadopsi daerah tertentu kemudian diadopsi juga oleh daerah lain, dan dalam beberapa kasus, diadopsi di tempat yang berdekatan, sampai menyebar ke seluruh bumi. Para ahli teori difusi khususnya yang berasal dari Amerika Serikat dan Inggris mengusulkan bahwa ada beberapa pusat kebudayaan yang darinya penemuan-penemuan dipancarkan ke daerah-daerah non-inventif melalui proses peminjaman budaya, misalnya proses Alih Teknologi dari Barat ke negara-negara berkembang. Sebagai contoh, Perry dan Smith mengidentifikasi Mesir sebagai sumber peradaban kuno yang menjadi sumber munculnya filsafat, matematika dan seni kuno yang kemudian menyebar ke seluruh dunia (Afonja dan Pearce, 1984). Dalam masyarakat modern saat ini, masyarakat Barat di Eropa dan Amerika dipandang sebagai lingkaran budaya dari mana sifat-sifat budaya modern berkembang dan bagi negara-negara dunia ketiga di Afrika, Asia dan Amerika Latin untuk berubah dan berkembang mereka harus mengadopsi pola dan sifat budaya masyarakat Barat. Kebutuhan akan pergeseran dari tradisionalisme dan difusi modernisme di negara-negara dunia ketiga melahirkan teori modernisasi pembangunan dan perubahan sosial.

Namun, teori difusi sama-sama dikritik karena kegagalannya untuk menjelaskan penemuan independen di beberapa masyarakat dan perbedaan budaya. Pertanyaan yang diajukan adalah: pertama, jika lingkaran atau pusat budaya tersebut ada, lalu apa yang menyebabkan terjadinya inovasi budaya tertentu dalam masyarakat tertentu?. Kedua, apa yang menyebabkan adanya perbedaan budaya di seluruh dunia?. Intinya, teori ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip evolusi yang cenderung bereaksi terhadapnya.

Tabel 05. Penyebab Perubahan Sosial dan Dampaknya

PENYEBAB PERUBAHAN SOSIAL		Dampak Perubahan Sosial	
		<i>Positif</i>	<i>Negatif</i>
1	Alami dan Geografis	Partisipasi	Kompleksitas
2	Politis dan Budaya	Keberagaman Profesional	Kompetisi yang Akut
3	Sosio-Ekonomis	Masyarakat Logis	Degradasi Moral
4	Individu	Pengembangan Budaya	Peniruan Budaya
5	Penggunaan Pengetahuan Modern dan Teknologi	Kewaspadaan	Aktivitas Kriminal
6	Urbanisasi dan Globalisasi	Interaksi Global	Konflik
7	Modernisasi	Status Identitas	Disorganisasi Sosial

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

G. Pola Perubahan Sosial

Teori-teori perubahan sosial, baik yang lama maupun yang baru, umumnya mengasumsikan bahwa arah perubahan sosial tidak sewenang-wenang, tetapi, pada tingkat tertentu, teratur atau terpola. Tiga gagasan tradisional tentang perubahan sosial — kemunduran, perubahan siklus, dan kemajuan — tidak diragukan lagi telah memengaruhi teori-teori modern. Namun karena teori-teori ini tidak ditentukan secara ilmiah, mereka gagal membuat perbedaan eksplisit antara

penurunan dan kemajuan. Pada kenyataannya, kualitas kemunduran dan kemajuan tidak dapat diturunkan secara ilmiah (yaitu, dari pengamatan empiris) sendirian tetapi sebaliknya diidentifikasi oleh evaluasi normatif dan penilaian dari seperangkat nilai. Jika studi perubahan sosial akan dilakukan pada istilah ilmiah dan non-normatif, maka, hanya dua pola dasar perubahan sosial yang dapat dipertimbangkan yaitu pola siklus, seperti yang diidentifikasi di atas, dan pola satu arah. Sering kali rentang waktu perubahan menentukan pola mana yang akan diamati.

a) Siklus Perubahan

Sebagian besar kehidupan sosial biasa diatur dalam perubahan siklus: kehidupan sehari, minggu, bulan dan tahun. Perubahan siklik jangka pendek ini dapat dianggap sebagai kondisi yang diperlukan untuk stabilitas struktural. Walaupun begitu, ada beberapa perubahan siklus yang tidak dapat diprediksi dengan akurat. Salah satu contohnya adalah siklus bisnis, sebuah fenomena kapitalisme yang berulang, yang tampaknya agak berpola namun sulit diprediksi. Sebuah teori yang menonjol dari siklus bisnis adalah teori ekonomi Soviet, yang di lontarkan oleh Nikolay D. Kondratyev, yang mencoba menunjukkan pengulangan gelombang panjang ledakan ekonomi dan resesi dalam skala internasional. Dia memetakan gelombang dari akhir abad ke-18, dengan masing-masing gelombang lengkap terdiri dari periode 50 tahunan. Namun, penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pola-pola di berbagai negara jauh dari identik.

Perubahan siklus jangka panjang dibahas dalam teori tentang kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, penurunan, dan kematian peradaban. Toynbee (1934-1961), menyusun studi sejarah dunia dengan cara ini. Hal yang sama dilakukan oleh Spengler dalam *Decline of the West* (1918-1922). Teori-teori ini telah dikritik karena menganggap peradaban sebagai entitas alami dengan batas-batas yang tajam dan mengabaikan keterkaitan antar peradaban.

b) Perubahan Satu Arah

Jenis perubahan ini berlangsung kurang lebih dalam arah yang sama. Perubahan seperti itu biasanya bersifat kumulatif dan menyiratkan adanya pertumbuhan atau peningkatan, seperti kepadatan populasi, ukuran organisasi, atau tingkat produksi. Namun, arah perubahan bisa berupa penurunan atau kombinasi antara pertumbuhan dan penurunan. Contoh dari proses terakhir ini adalah apa yang oleh antropolog budaya Amerika Clifford Geertz disebut “involusi”, contohnya fenomena yang terjadi dalam beberapa masyarakat agraris, ketika pertumbuhan populasi digabungkan dengan penurunan kekayaan per kapita. Namun perubahan lain mungkin merupakan pergeseran dari satu kutub ke kutub lain dari suatu kontinum — dari cara berpikir keagamaan ke sekuler, misalnya. Perubahan semacam itu dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan (pengetahuan ilmiah) atau penurunan (agama).

Jenis paling sederhana dari perubahan satu arah adalah linier, terjadi ketika tingkat perubahan sosial konstan dari waktu ke waktu. Tipe lain dari perubahan sosial adalah pertumbuhan eksponensial, di mana persentase pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu dan perubahannya semakin cepat. Dalam kerangka waktu tertentu, pertumbuhan populasi dan pertumbuhan produksi diketahui mengikuti pola ini.

Pola pertumbuhan jangka panjang mungkin juga sesuai dengan kurva S tiga tahap. Pada fase pertama perubahannya cukup lambat sehingga hampir tidak terlihat. Selanjutnya perubahan dipercepat. Pada fase ketiga laju perubahan mengendur sampai mendekati batas atas yang seharusnya. Model transisi demografis di negara-negara industri menunjukkan pola ini. Pada tahap pertama (pramodern atau praindustri) tingkat kelahiran dan angka kematian tinggi, dan, akibatnya, populasi tumbuh sangat lambat; kemudian angka kematian menurun, dan populasi tumbuh lebih cepat; pada tahap ketiga baik tingkat kelahiran dan tingkat kematian menjadi rendah, dan pertumbuhan populasi mendekati nol.

c) Pola Perubahan kombinasi

Siklus dan perubahan satu arah dapat diamati secara bersamaan. Ini terjadi sebagian karena perubahan jangka pendek cenderung bersifat siklus sedangkan perubahan jangka panjang cenderung mengikuti satu arah. Sebagai contoh, tingkat produksi negara-negara industri menunjukkan pola siklus bisnis jangka pendek yang terjadi dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.

Pola-pola ini tidak dapat diterapkan secara sederhana dan mudah pada realitas sosial. Paling mungkin adalah memperkirakan realitas sosial yang terjadi. Membandingkan model dengan kenyataan tidak selalu memungkinkan, karena data yang dapat diandalkan tidak selalu tersedia. Selain itu, yang lebih penting, banyak proses sosial yang tidak cocok dan kurang tepat pengukurannya dengan menggunakan pendekatan pengukuran kuantitatif. Proses seperti birokratisasi atau sekularisasi, misalnya, dapat didefinisikan melalui perubahan dalam arah tertentu, tetapi sulit untuk mencapai kesepakatan tentang dimensi yang akan diukur.

Masih harus dilihat apakah perubahan sosial jangka panjang dalam arah tertentu akan dipertahankan. Transformasi masyarakat abad pertengahan menjadi negara-negara Barat abad ke-20 dapat dipahami dalam hal beberapa perubahan satu arah jangka panjang yang saling berhubungan. Beberapa hal yang lebih penting dari perubahan ini termasuk di dalamnya komersialisasi, peningkatan pembagian kerja, pertumbuhan produksi, pembentukan negara-bangsa, birokratisasi, pertumbuhan teknologi dan sains, sekularisasi, urbanisasi, penyebaran keaksaraan, peningkatan mobilitas geografis dan sosial, dan pertumbuhan organisasi. Banyak dari perubahan ini juga terjadi di masyarakat non-Barat. Sebagian besar perubahan tidak berasal dari Barat, tetapi beberapa perubahan penting terjadi, seperti Revolusi Industri dan kebangkitan kapitalisme. Perubahan-perubahan ini selanjutnya memiliki dampak yang kuat pada masyarakat non-Barat. Selain itu, kelompok orang di luar Eropa barat telah ditarik ke dalam pembagian kerja global, dengan negara-bangsa Barat mendapatkan dominasi baik secara politik maupun ekonomi.

Sejauh mana perubahan-perubahan ini merupakan bagian dari perkembangan sosial jangka panjang global adalah pertanyaan penting dari evolusi sosial. Meskipun pengetahuan tentang pertanyaan ini masih jauh dari lengkap, beberapa tren umum dapat dihipotesiskan. Salah satu tren tersebut bisa dilihat dalam perkembangan inovasi teknologi dan kemajuan dalam pengetahuan ilmiah yang telah memanfaatkan kekuatan alam untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Di antara inovasi-inovasi ini adalah penggunaan api, penanaman tanaman, domestikasi hewan (berasal dari sekitar 8000 SM), penggunaan logam, dan proses industrialisasi. Perkembangan jangka panjang ini, dikombinasikan dengan akumulasi modal jangka panjang, menyebabkan peningkatan produksi dan membuka jalan bagi pertumbuhan populasi dan peningkatan kepadatan penduduk. Produksi dan konsumsi energi tumbuh, jika bukan per kapita, maka setidaknya per mil persegi.

Tren lain berasal dari metode produksi berdasarkan pembagian kerja dan diferensiasi sosial. Kontrol kekuatan alam, dan kemajuan sosial berikutnya, dicapai hanya dengan memanfaatkan pembagian kerja — dan spesialisasi pengetahuan yang terkait — untuk meningkatkan produktivitas di luar batas alam. Namun, satu konsekuensi dari pertumbuhan produktivitas dan inovasi teknologi ini adalah diferensiasi sosial. Dengan kata lain, lebih banyak lagi orang yang bisa mengkhususkan diri dalam kegiatan yang tidak segera diperlukan untuk bertahan hidup. Pertumbuhan dalam ukuran dan kepadatan populasi serta peningkatan diferensiasi sosial meningkatkan saling ketergantungan dalam jumlah yang besar. Dalam masyarakat berburu dan meramu, orang-orang sangat saling bergantung dalam kelompok kecil mereka, jarang mereka bergantung di luar kelompok mereka. Di zaman modern sebagian besar orang di dunia dihubungkan oleh jaringan saling ketergantungan yang menjangkau seluruh dunia.

Proses-proses ini tidak terhindarkan dalam arti bahwa mereka sesuai dengan “hukum” perubahan sosial apapun. Namun, mereka memiliki kecenderungan untuk menyebar kapan pun dan bisa

terjadi kapan pun. Misalnya, begitu serangkaian transformasi yang dikenal sebagai revolusi agraria telah terjadi di mana saja di dunia, perluasannya di dunia dapat diprediksi. Masyarakat yang mengadopsi inovasi ini tumbuh dalam ukuran yang besar dan menjadi lebih kuat. Sebagai akibatnya, masyarakat lain hanya memiliki tiga pilihan: untuk ditaklukkan dan dimasukkan oleh masyarakat agraris yang lebih kuat, untuk mengadopsi inovasi, atau didorong ke tempat-tempat marginal di dunia.

H. Sifat Perubahan Sosial

Karakteristik utama dari sifat perubahan sosial adalah sebagai berikut:

1) Perubahan sosial adalah fenomena universal

Perubahan sosial terjadi di semua masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepenuhnya statis. Ini berlaku untuk semua masyarakat, primitif maupun beradab. Masyarakat di dunia hidup dengan kondisi yang dinamis.

Perubahan populasi, perkembangan teknologi, perubahan peralatan material, ideologi, dan nilai berkontribusi terhadap tumbuhnya komponen baru dan struktur serta fungsi kelembagaan yang mengalami pembentukan kembali. Kecepatan dan tingkat perubahan mungkin berbeda dari setiap struktur masyarakat. Beberapa struktur masyarakat berubah dengan cepat, yang lain berubah dengan lambat.

2) Perubahan sosial adalah perubahan komunitas

Perubahan sosial tidak merujuk pada perubahan dalam kehidupan seseorang atau pola hidup beberapa individu. Ini adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan seluruh komunitas. Dengan kata lain, hanya perubahan itu yang bisa disebut perubahan sosial yang pengaruhnya dapat dirasakan dalam bentuk komunitas. Perubahan sosial adalah sosial kemasyarakatan dan bukan individu.

3) Kecepatan perubahan sosial tidak seragam

Sementara perubahan sosial terjadi di semua masyarakat, kecepatannya tidak seragam di setiap masyarakat, bergantung

pada kondisi pendorongnya. Dalam sebagian besar masyarakat, hal itu terjadi sangat lambat sehingga sering tidak diperhatikan oleh mereka yang tinggal di dalamnya. Bahkan, dalam masyarakat modern tampaknya ada sedikit atau tidak ada perubahan sama sekali.

- 4) Sifat dan kecepatan perubahan sosial dipengaruhi oleh dan terkait dengan faktor waktu.

Kecepatan perubahan sosial tidak seragam di setiap usia atau periode dalam masyarakat yang sama. Di zaman modern seperti sekarang, kecepatan perubahan sosial mungkin lebih cepat dibanding pada tahun 40-an. Dengan demikian, kecepatan perubahan sosial berbeda dari zaman ke zaman. Alasannya adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial tidak seragam dengan perubahan zaman.

- 5) Perubahan sosial sebagai hukum esensial.

Perubahan adalah hukum alam. Perubahan sosial juga merupakan hal yang alami. Tidak juga bisa dipungkiri bahwa perubahan sosial tidak hanya bisa terjadi baik dalam perjalanan alami, bisa juga sebagai hasil dari upaya yang direncanakan. Secara alami kita menginginkan perubahan. Kebutuhan kita terus berubah. Untuk memuaskan hasrat kita untuk berubah dan kebutuhan kita yang berubah, perubahan sosial menjadi kebutuhan. Menurut Green (2001) respons yang antusias terhadap perubahan hampir menjadi gaya hidup.

- 6) Ketidakpastian Prediksi tentang perubahan sosial.

Sulit untuk membuat prediksi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang pasti. Tidak ada hukum inheren tentang perubahan sosial yang dengannya ia akan mengambil bentuk yang pasti. Demikian juga, tidak dapat memprediksi dengan tepat seperti apa sikap, ide, norma dan nilai kita di masa depan.

Kita bisa melihat beberapa elemen sebagai prediksi dalam perubahan sosial. Tetapi, prediksi-prediksi tersebut belum tentu akurat karena beberapa alasan seperti:

- a) Tidak ada hukum inheren dalam perubahan sosial.

- b) Dalam perjalanannya (perkembangannya), kekuatan perubahan sosial tidak selalu tetap, baik itu dalam peristiwa kejadian dan waktunya.
- c) Proses perubahan sosial tidak seragam satu sama lainnya.

Terlepas dari ciri-ciri karakteristik di atas, dapat dikatakan bahwa perubahan sosial dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Ini adalah istilah bebas nilai karena tidak menyiratkan rasa baik atau buruk, diinginkan atau tidak diinginkan. Ini adalah konsep yang berbeda dari evolusi, proses dan pengembangan yang dianggap sebagai konsep kunci dalam literatur perubahan sosial.

- 7) Perubahan sosial menunjukkan urutan reaksi berantai:

Pola kehidupan masyarakat adalah sistem dinamis dari bagian-bagian yang saling terkait. Oleh karena itu, perubahan dalam salah satu bagian masyarakat biasanya bereaksi pada perubahan. Perubahan sosial tidak menghasilkan reaksi tunggal, tetapi reaksi berantai, karena semua bagian masyarakat saling terkait dan saling bergantung. Misalnya, kemandirian ekonomi wanita telah membawa perubahan tidak hanya dalam status mereka tetapi juga serangkaian perubahan di dalam rumah, hubungan keluarga dan pernikahan dll.

- 8) Perubahan sosial dihasilkan dari interaksi sejumlah faktor:

Faktor tertentu seperti perubahan teknologi, perkembangan ekonomi, atau kondisi iklim telah menyebabkan perubahan sosial. Ini disebut teori monistik yang berupaya menginterpretasikan perubahan sosial dalam satu faktor tunggal. Tetapi, teori monistik tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang fenomena kompleks dari perubahan sosial. Faktanya, perubahan sosial adalah konsekuensi dari sejumlah faktor. Faktor khusus dapat memicu perubahan tetapi selalu dikaitkan dengan faktor lain yang memungkinkan menjadi pemicu. Alasannya, bahwa fenomena sosial saling bergantung satu sama lain. Tidak ada yang menonjol sebagai kekuatan terisolasi yang membawa perubahan pada diri mereka sendiri. Sebaliknya masing-masing adalah elemen dalam suatu sistem. Modifikasi pada bagian nilai akan mempengaruhi

bagian yang lain dan ini mempengaruhi sisanya, sampai keseluruhan terlibat.

9) Perubahan sosial adalah perubahan atau penggantian:

Perubahan sosial dapat dikategorikan secara luas sebagai modifikasi atau penggantian. Mungkin modifikasi hal-hal yang bersifat atau hubungan sosial. Sebagai contoh, bentuk makanan sarapan kami telah berubah. Meskipun kita makan bahan dasar yang sama dengan yang kita makan sebelumnya, gandum, telur, jagung, tetapi bentuknya berubah. Contoh roti dan telur dadar disubstitusi dengan bentuk di mana bahan-bahan yang sama dikonsumsi pada tahun-tahun yang lalu. Mungkin juga ada modifikasi hubungan sosial. Contoh, keluarga tradisional yang cenderung otoriter telah berubah dengan menganut prinsip-prinsip kesetaraan. Perubahan juga berarti mengganti bentuk. Contoh, demokrasi telah menggantikan model aristokrasi.

10) Perubahan Sosial dapat direncanakan atau tidak direncanakan

Perubahan sosial terkadang terjadi dengan perencanaan dan terkadang tanpa perencanaan. Perubahan sosial yang terjadi dalam perjalanan alamiah disebut perubahan yang tidak terencana. Perubahan yang tidak direncanakan adalah sesuatu yang spontan, tidak sengaja, atau produk dari keputusan tiba-tiba. Biasanya, perubahan yang diakibatkan oleh adanya bencana alam seperti banjir; kekeringan, kelaparan, letusan gunung berapi, dll. Dalam perubahan yang tidak direncanakan, tidak ada kontrol pada derajat dan arah perubahan sosial.

Disisi yang lain, manusia memiliki kecenderungan untuk berubah. Maka, manusia membuat rencana untuk melakukan perubahan. Misal, rencana pembangunan dibuat se-efektif mungkin agar bisa menciptakan perubahan sosial. Model-model seperti itu disebut sebagai perubahan yang terencana. Perubahan dibuat secara sadar dan di sengaja. Dalam posisi ini, manusia mengontrol penuh proses terjadinya perubahan sosial.

11) Tak terhindarkan

Perubahan tidak bisa dihindari. Adalah sifat manusia yang menginginkan perubahan dan juga kecenderungannya untuk

membawa perubahan serta menentang atau menerima perubahan. Keinginan manusia tidak terbatas, sehingga perubahan menjadi sebuah keharusan. Untuk memuaskan keinginannya, manusia menjadikan perubahan sosial sebagai sebuah kebutuhan, tidak hanya baginya tetapi juga bagi masyarakat lainnya.

12) Sementara

Perubahan sosial bersifat temporal. Perubahan dalam sesuatu atau objek apapun atau dalam situasi apapun terjadi melalui proses waktu. Waktu adalah faktor terpenting dan perubahan sosial menunjukkan urutan waktu. Menurut Maclver (1996), “Ini adalah makhluk, sebuah proses, bukan produk”. Inovasi hal-hal baru, modifikasi dan renovasi perilaku dalam kehidupan sosial manusia membutuhkan waktu.

Jadi perubahan sosial bersifat sementara atau permanen berdasarkan waktu. Terkadang beberapa perubahan sosial dapat membawa hasil yang segera. Sementara yang lain mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Demikian pula, beberapa perubahan sosial menyebar dengan cepat dan juga menghilang dengan cepat. Gerakan, gaya, mode, dan aliran adalah contoh dari jenis ini.

13) Kontinuitas

Perubahan sosial adalah proses yang berkelanjutan tetapi bukan proses yang intermiten. Karena perubahan tidak bisa dihentikan atau masyarakat disimpan dalam suatu tempat untuk menyelamatkan mereka dari perubahan. Ini adalah proses yang sedang berlangsung tanpa istirahat. Dalam proses perubahan, setiap masyarakat tumbuh dan meluruh, di mana ia menemukan pembaruan dan mengakomodasi dirinya sendiri dengan berbagai kondisi yang berubah. Sumber, arah, laju dan bentuk perubahan dapat bervariasi dari waktu ke waktu tetapi selalu berkelanjutan.

14) Perubahan itu Sosial:

Perubahan sosial berarti perubahan dalam sistem hubungan sosial. Hubungan sosial dipahami dalam hal proses sosial, interaksi sosial dan organisasi sosial. Jadi, dalam setiap variasi proses

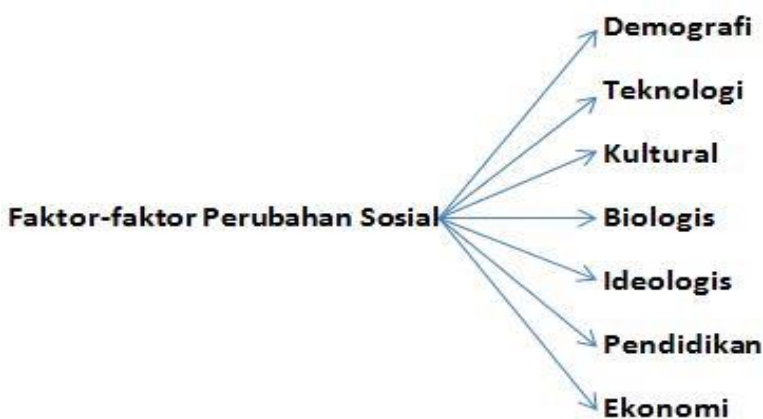
sosial, interaksi sosial dan organisasi sosial, perubahan sosial selalu terjadi.

Dalam contoh yang lain, ditemukan adanya peradaban dan masyarakat baru yang muncul dan menggantikan masyarakat lama dan dengan demikian mempertahankan beberapa elemennya dalam perubahannya. Jadi perubahan sosial berbeda dari perubahan individu. Penyebab dan konsekuensinya selalu konteks sosial yang membuatnya selalu melibatkan proses-proses sosial.

I. Faktor-faktor Perubahan Sosial

Perubahan sosial terjadi di semua lapisan dan dimensi masyarakat serta di dalam rentang perjalanan waktu. Tetapi di sini muncul pertanyaan mengapa perubahan sosial terjadi? Kata 'Mengapa' mewakili alasan, penyebab atau faktor yang bertanggung jawab atas perubahan sosial. Dari diskusi tentang sifat perubahan sosial kita tahu bahwa ada beberapa faktor potensial yang bertanggung jawab untuk membawa perubahan sosial. Karenanya, ini bersifat multi-kausal. Penyebab mengacu pada serangkaian faktor terkait yang secara bersama-sama menghasilkan efek tertentu. Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Beberapa faktor ini ditunjukkan pada diagram berikut.

Gambar 7. Diagram Faktor-Faktor Perubahan Sosial



a) Faktor Demografi

Demografi memainkan peran penting dalam proses perubahan sosial. Istilah "demografi" berasal dari dua kata Yunani, 'Demo' dan 'Grafik' yang berarti "orang-orang", "menggambar" atau "menulis". Demografi adalah studi ilmiah tentang populasi manusia, terutama yang berkaitan dengan ukuran, struktur, dan perkembangannya.

Dalam studi perubahan sosial, faktor-faktor demografis dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, demografi mengacu pada potensi fisik, kemampuan mental, dll, yang ditentukan oleh tatanan genetika, meskipun kualitas turun-temurun generasi yang terjadi secara berturut-turut memainkan beberapa peran dalam penentuan terciptanya budaya, tidak dapat dianggap sebagai tempat penyebab deterministik perubahan sosial. Tetapi faktor demografis dalam aspek kuantitatifnya telah memainkan peran yang paling menentukan dalam menyebabkan terjadinya perubahan sosial.

Pandangan kuantitatif demografi memperhitungkan, ukuran, komposisi dan kepadatan populasi manusia yang ditentukan oleh reproduksi alami, migrasi dan mobilitas sosial. Aspek ini telah diakui oleh banyak pemikir masa lalu maupun modern. Ada tiga faktor penting yang menentukan naik turunnya (kepadatan) penduduk, diantaranya:

- a) Kesuburan Tinggi (Angka Kelahiran Tinggi)
- b) Mortalitas Rendah (Tingkat Kematian Rendah)
- c) Migrasi.

Ketika ada tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yang rendah, kami menemukan pertumbuhan dalam populasi. Mari kita petakan beberapa poin tentang penyebab tingkat kelahiran yang tinggi. Untuk memudahkan bisa kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 06. Penyebab Tingkat Kelahiran



Dari tabel di atas ditemukan bahwa populasi meningkat karena buta huruf, popularitas terjadinya pernikahan Dini, para janda yang menikah kembali, poligami, kegemaran untuk memiliki anak laki-laki, kemiskinan dan juga karena kurangnya implementasi yang tepat dari program keluarga berencana. Turunnya angka kematian juga mempengaruhi pertumbuhan populasi.

Ada banyak penyebab terjadinya tingkat kematian yang rendah. penyebabnya adalah pendidikan modern dan pengetahuan ilmiah untuk bidang kebersihan, sanitasi yang lebih baik dan obat-obatan untuk terapi dan pencegahan, peningkatan produktivitas yang meningkatkan standar hidup, pengendalian bencana alam, kontrol nutrisi ibu, fasilitas bersalin, dll.

Pertumbuhan populasi yang berlebihan mempercepat proses migrasi. Migrasi mengacu pada proses perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk periode waktu yang cukup lama. Migrasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan populasi dalam kurun waktu 100 tahun terakhir atau lebih sejarah pertumbuhan manusia. Ada empat bentuk migrasi, diantaranya:

1. Imigrasi: merujuk pada migrasi ke suatu negara tertentu.
2. Emigrasi: merujuk pada migrasi suatu negara.
3. Migrasi, migrasi ke area tertentu.
4. Migrasi keluar mengacu pada perpindahan dari area tertentu.

Ada banyak faktor yang berkontribusi pada proses migrasi. Mereka:

1. Pengembangan transportasi dan komunikasi.

2. Bencana alam seperti gempa bumi, kelaparan banjir dll.
3. Tidak adanya batasan pada mobilitas sosial.
4. Tidak tersedianya lahan dan peluang kejuruan, dll.

Jadi, perubahan populasi memiliki pengaruh yang luas pada masyarakat. Pengaruhnya, bisa berefek positif dan berefek negatif. Efek positif dari perubahan populasi, diantaranya: i) Pertumbuhan populasi memiliki pengaruh langsung terhadap ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. ii) Semakin banyak populasi membawa lebih banyak inovasi dan penemuan. iii) Perubahan populasi mendorong pertumbuhan yang cepat dalam industrialisasi dan urbanisasi. iv) Tingkat kelahiran yang tinggi dan pertumbuhan populasi yang mengkhawatirkan juga merangsang sikap terhadap kelahiran, kematian, dan kehidupan keluarga. v) Karena pertumbuhan populasi, pemerintah memiliki alasan untuk membuat kebijakan pengendalian populasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Sementara, efek negatif dari perubahan populasi diantaranya:

1. Pertumbuhan populasi telah menurunkan standar hidup orang-orang di masyarakat.
2. Pertumbuhan populasi telah melahirkan berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, pekerja anak, kejahatan, kenakalan remaja dan pengemis.
3. Peningkatan populasi menyebabkan peningkatan diferensiasi sosial dan pembagian kerja.
4. Perubahan populasi membawa konflik sosial yang merusak dan disorganisasi.
5. Dalam masyarakat di mana populasi perempuan melebihi populasi laki-laki, poligami dapat berkembang. Di sisi lain, jika jumlah laki-laki melebihi perempuan, poliandri kemungkinan akan terjadi.

Dari diskusi di atas kami menemukan bahwa demografi memainkan peran penting dalam transformasi sosial-ekonomi dan politik masyarakat. Ini tentu saja membawa perubahan drastis tidak hanya pada struktur mikro tetapi juga pada struktur makro.

b) Faktor Teknologi

Faktor teknologi juga memainkan peran penting dalam menyebabkan perubahan sosial. Lalu apa itu teknologi? Bagaimana hal tersebut membawa perubahan sosial?. Dalam studi sosiologi, teknologi memiliki konotasi yang lebih luas. Teknologi merujuk pada proses pengorganisasian yang tepat dan aplikasi pengetahuan ilmiah yang sistematis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi adalah pemanfaatan produk dari kedua aktivitas di atas, yaitu pengorganisasian dan pengaplikasian. Ketika pengetahuan ilmiah diterapkan dalam masalah-masalah kehidupan, hal tersebut menjadi teknologi. Teknologi berkembang pesat. Zaman modern adalah "Zaman Teknologi".

Menurut Ogburn (1937), Teknologi telah mengubah masyarakat dengan cara mengubah lingkungan kita melalui proses adopsi. Perubahan ini biasanya terjadi di lingkungan material sehingga memaksa manusia melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan dengan cara memodifikasi kebiasaan dan memodifikasi lembaga sosial.

Ada beberapa sumber yang menjadi penyebab perubahan Teknologi, yaitu Penciptaan dan Penemuan. Penciptaan menunjukkan penciptaan cara-cara baru menggunakan pengetahuan yang ada atau cara-cara baru untuk menggabungkan artefak yang ada. Sebuah penemuan tunggal dalam teknologi dapat menghasilkan perubahan skala besar di masyarakat. Salah satu contoh penting dari penemuan adalah penemuan mobil. Penemuan berarti cara baru dalam memandang lingkungan. Inovasi teknologi juga berasal dari sumber lain yang disebut penemuan. Contoh penemuan adalah obat-obatan modern yang merupakan hasil dari penemuan dalam bidang biologi. Penciptaan dan penemuan adalah karakteristik penting dari zaman kita. Terlepas dari kedua hal ini, ada tiga faktor teknologi yang terutama bertanggung jawab atas perubahan sosial, diantaranya: Inovasi Teknologi, Perubahan dalam teknologi produksi, Perubahan dalam transportasi dan komunikasi, dan Inovasi Teknologi.

Inovasi teknologi telah membawa perubahan revolusioner dalam gagasan manusia tentang dunia dan alam semesta. Dunia

tidak lagi merupakan ciptaan yang misterius bagi manusia karena dalam beberapa kasus bencana alam seperti banjir, topan, gempa bumi dan kekeringan, dll. Tidak lagi dipandang sebagai hukuman ilahi terhadap perbuatan buruk manusia. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui penyebabnya. Sebagai hasilnya, tingkat kendali mereka yang semakin meningkat.

Penemuan alat pertanian baru dan penggunaan bahan kimia telah mengarah pada pengembangan secara bertahap sistem agraria. Industrialisasi telah menyebabkan sejumlah perubahan dalam keluarga, status perempuan, cara hidup orang, agama dan ideologi orang, dll. Hal ini juga menyebabkan tumbuhnya pusat-pusat kota baru dengan jenis-jenis organisasi sosial baru.

Demikian juga dengan perkembangan pesat dalam transportasi dan komunikasi sangat mempengaruhi kehidupan sosial-budaya. Perkembangan tersebut telah meruntuhkan hambatan regional. Karena transportasi, perdagangan dan transaksi di seluruh dunia menjadi sangat mudah. Teknologi komunikasi telah meningkatkan kebangkitan nasional.

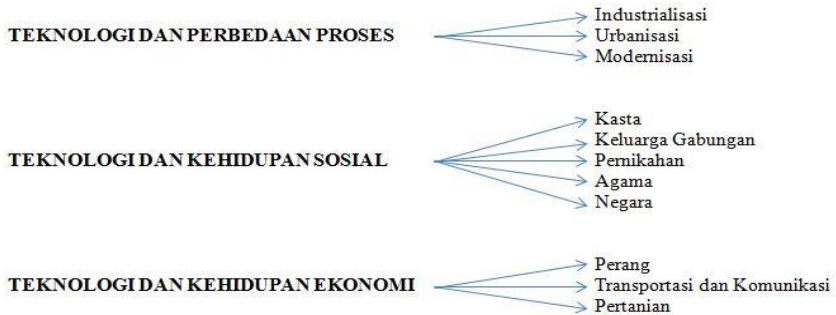
Terlepas dari faktor-faktor di atas, faktor budaya memainkan peran penting dalam membawa perubahan teknologi. Adat istiadat, tradisi, cerita rakyat, kebiasaan adat istiadat, konservatisme dll. Telah menolak penemuan teknologi dan berkontribusi padanya.

Efek Teknologi:

Tidak ada nilai atau lainnya, baik yang berasal dari suatu masyarakat atau yang dipinjam dari luar, yang bisa membentuk jaringan efek jangka panjang dan luas, kecuali teknologi. Status individu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari bawaan hidup melainkan sesuatu yang bisa dicapai melalui prestasi. Manusia dinilai dari apa yang dimilikinya, bukan dari apa statusnya.

Hubungan sosial secara bertahap menjadi dangkal, bersifat sementara, dan timbul sikap egois. Perubahan teknologi telah menghasilkan beberapa perubahan mendasar dalam struktur sosial. Dampak perubahan teknologi dapat petakan melalui diagram di bawah:

Gambar 08. Diagram Dampak Teknologi



1. Teknologi dan Proses yang Berbeda:

Teknologi dalam banyak hal juga memberikan pengaruh dalam peningkatan maupun pengurangan populasi manusia. Akibatnya, manusia harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pekerjaan manusia. Di satu sisi efek teknologi juga menyebabkan efek turunan seperti masalah pekerjaan, pola hubungan sosial, dan terganggunya sistem sosial. Contohnya, masalah industrialisasi, urbanisasi, dan modernisasi.

Industrialisasi mengacu pada proses di mana industri telah didirikan. Proses ini melahirkan sistem pabrik dan menggantikan sistem domestik. Penemuan mesin telah mengarah pada penciptaan pabrik besar yang mempekerjakan ribuan orang dan di mana sebagian besar pekerjaan dilakukan secara otomatis. Industrialisasi telah menciptakan kelas sosial baru dan telah meningkatkan kondisi sosial kaum perempuan. industrialisasi telah mempengaruhi sifat, karakter, dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, industrialisasi telah menyebabkan urbanisasi. Sebagai hasil dari industrialisasi, orang-orang mulai bergerak menuju kawasan industri, wilayah yang tidak terlalu jauh dari kota atau dari desa dengan harapan mendapatkan pekerjaan di sana. Karenanya, ketika sebagian besar penduduk di suatu daerah datang ke kota, maka di situlah urbanisasi telah terjadi.

Efek yang paling penting dari perkembangan teknologi adalah Modernisasi pembangunan. Modernisasi adalah proses di mana adopsi cara hidup dan nilai-nilai modern terjadi. Modernisasi telah membawa perubahan luar biasa dalam hubungan sosial dan telah mengubah nilai-nilai tradisional. Modernisasi telah mengubah struktur sosial, yang menambah daya dorong pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya laju perubahan meningkat dengan cepat.

2. Teknologi dan Kehidupan Sosial

Perubahan dalam teknologi telah mengubah keseluruhan kehidupan sosial. Secara fungsional teknologi telah mengubah mode kehidupan dan pemikiran. Perubahan yang mencolok adalah perubahan status dalam masyarakat. Status yang telah ditentukan sebelumnya dalam sistem masyarakat telah berubah, diganti dengan status yang diperoleh melalui prestasi dirinya. Perubahan lainnya adalah hilangnya sekat-sekat hubungan sosial.

Proses pembentukan keluarga melalui pernikahan di beberapa negara modern tidak dipandang lagi sebagai sesuatu yang sakral. Menariknya, tingkat perceraian dari hari ke hari semakin meningkat. Struktur keluarga terancam makin tidak stabil. Struktur pekerjaan hereditas di beberapa negara tradisional telah digantikan oleh pekerjaan berdasarkan pilihan sendiri, tergantung pada kapasitas, kemampuan, dan bakat seseorang. Bahkan perubahan-perubahan tersebut juga menyentuh nilai-nilai agama. Kepercayaan pada mistisisme semakin berkurang. Orang menjadi semakin sekuler, rasional, dan ilmiah dalam pandangan mereka. Kegiatan keagamaan konservatif atau ortodoks telah digantikan oleh kegiatan-kegiatan yang lebih sederhana. Dampaknya, toleransi beragama di dalam masyarakat semakin rentan.

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi sikap manusia dalam bernegara. Dalam beberapa kasus, ada kecenderungan sekularisme semakin meningkat. Dalam perilaku kepentingan negara, ada pergeseran fungsi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Menariknya, penemuan modern juga telah

memperkuat nasionalisme serta meningkatkan ukuran dan kekuatan birokrasi.

3. Teknologi dan Kehidupan Sosial

Teknologi juga telah mengubah kehidupan ekonomi manusia dalam banyak hal. Perang misalnya. Efek teknologi yang sangat berbahaya adalah perang. Penemuan paling spektakuler dari zaman kita adalah energi atom. Penemuan tersebut telah memengaruhi kehidupan manusia. Sebagai agen perang, hal tersebut telah menyebabkan kemusnahan paling mengerikan dalam sejarah peradaban manusia, contoh penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Dalam bidang Transportasi dan Komunikasi juga mengalami hal yang sama. Kemajuan teknologi yang luar biasa telah memberikan kontribusi signifikan pada bidang transportasi dan komunikasi. Sarana transportasi telah berkembang pada tingkat yang mengejutkan. Pencampuran orang-orang yang berasal dari berbagai negara menyebabkan banyak kesalahpahaman, kebencian, dan kecemburuan. Hal tersebut telah mendorong rasa persaudaraan universal. Pengenalan mesin ke dalam dunia industri, surat kabar, radio, televisi, telepon, telegraf, internet, media sosial, dll. telah memfasilitasi penyebaran prinsip-prinsip baru.

Perubahan teknologi juga mempengaruhi sistem dan pola agraria. Perubahan teknologi telah menyebabkan pengembangan teknik baru di bidang pertanian. Produksi pertanian meningkat karena penggunaan peralatan modern, peningkatan kuantitas dan kualitas benih. Karena itu sangat mempengaruhi masyarakat pedesaan.

c) **Faktor Kultural**

Dalam sosiologi kata 'Budaya' menunjukkan perilaku yang didapat, yang dibagikan dan ditransmisikan di antara anggota masyarakat. Manusia mempelajari perilaku dan nilai, di mana keduanya disebut budaya. Bernyanyi, menari, makan, bermain termasuk dalam kategori budaya.

Budaya mencakup semua hal yang diperoleh oleh manusia dalam ranah mental dan intelektual kehidupan individu dan sosialnya. Budaya adalah ekspresi dari sifat manusia, baik itu dalam cara hidup dan cara berpikir manusia, dalam hubungan sehari-hari manusia, dalam seni, dalam sastra, dalam rekreasi dan dalam hal kesenangan. Untuk pemahaman yang lebih jelas tentang istilah 'Budaya' di sini, maka perlu untuk membahas beberapa definisi penting budaya.

Menurut White (1975), budaya adalah proses simbolik, berkelanjutan, kumulatif dan progresif. Malinowski (dalam Stocking, 1987)) mendefinisikan budaya sebagai hasil karya manusia dan sebagai media yang melaluinya ia mencapai tujuannya. MacIver dan Page (dalam Cahnman, 1962) mendefinisikan budaya sebagai ranah gaya, nilai, keterikatan emosional, petualangan intelektual. Budaya adalah sistem yang ditransmisikan secara sosial dari cara-cara ideal dalam pengetahuan, praktik dan kepercayaan, bersama dengan artefak yang dihasilkan oleh pengetahuan dan praktik saat mereka berubah dalam waktu. Budaya mengacu pada keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Tylor, 1871)

Dari definisi budaya di atas, maka ciri-ciri budaya dapat diringkas seperti di bawah ini.

- 1) Budaya adalah sosial, tetapi bukan individu.
- 2) Budaya itu idealistis.
- 3) Budaya adalah sesuatu yang komunikatif.
- 4) Budaya adalah kualitas yang diperoleh melalui transfer nilai.
- 5) Budaya memenuhi permintaan berulang umat manusia.
- 6) Budaya memiliki karakteristik adaptasi.
- 7) Budaya memiliki kualitas yang terintegrasi.

Budaya memainkan peran yang sangat signifikan dalam perubahan sosial. Tidak ada budaya yang tetap konstan. Budaya selalu terus berubah. Jadi, budaya diperlakukan sebagai sumber penting atau instrumen penting dalam perubahan sosial. Sifat budaya

membuatnya dinamis. Istilah-istilah seperti itu terjadi terus menerus, proses adopsi yang kumulatif, transmisi, dll. Menandakan adanya unsur-unsur dinamika dalam budaya. Selain itu, ada sejumlah variabel internal dan variabel eksternal lainnya yang saling berinteraksi dalam budaya dan menyebabkan perubahan di dalamnya.

Perubahan budaya terjadi karena tiga faktor penting. Faktor tersebut terdiri dari penemuan, penciptaan dan difusi. Penemuan dapat berupa item material atau item non material. Tetapi, setiap penemuan akan membawa perubahan sosial hanya jika digunakan secara luas. Penemuan menghasilkan tekanan untuk perubahan di berbagai lini kehidupan sosial. Difusi adalah proses di mana sifat-sifat budaya menyebar dari satu budaya ke budaya lain atau dari satu bagian budaya ke budaya lainnya. Ini merupakan proses dua arah. Karena dalam proses ini, salah satu budaya akan memberikan sesuatu kepada yang lainnya dan pada saat yang sama mengambil sesuatu dari yang lainnya.

Beberapa sosiolog telah menyoroiti peran yang sangat menentukan dari budaya dalam mempengaruhi perubahan sosial. Beberapa efek penting yang disebabkan oleh budaya dalam perubahan sosial diantaranya:

- 1) Budaya memberi kecepatan dan arah perubahan sosial
Jika budaya terlalu konservatif, maka laju perubahannya menjadi terlalu rendah dan sebaliknya. Orang-orang apakah menerima perubahan atau tidak tergantung pada sikap dan nilai-nilai budaya yang mereka anut.
- 2) Budaya mempengaruhi arah dan karakter perubahan teknologi
Kepercayaan dan lembaga sosial manusia tidak hanya sesuai dengan perubahan teknologi tetapi juga menentukan tujuan benda-benda yang akan digunakan dari penemuan teknologi tersebut. Budaya inilah yang akan memutuskan tujuan penemuan teknis tersebut.
- 3) Budaya membentuk perilaku ekonomi dan efektif terhadap pertumbuhan ekonomi. Budaya tidak hanya memberi arah pada teknologi, tetapi juga membentuk sistem dan perilaku ekonomi yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi.

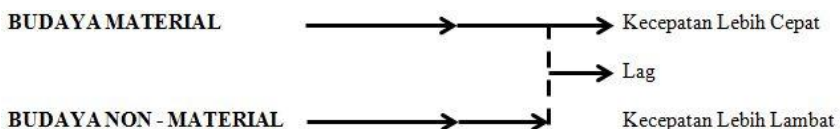
4) Menjaga hubungan sosial tetap utuh

Budaya membuat orang berpikir bahwa nilai bukan hanya miliknya sendiri tetapi juga milik orang lain. Dengan mengatur perilaku orang-orang dan memuaskan keinginan utama mereka terkait kelaparan, tempat tinggal dan seks, telah mampu mempertahankan kehidupan kelompok.

Untuk menguji peran faktor budaya dalam perubahan sosial, maka perlu untuk membahas konsep "*Cultural Lag*" milik W.F. Ogburn. Dalam bukunya "perubahan sosial" yang diterbitkan pada tahun 1920. Ogburn, mengatakan bahwa *cultural Lag* berkonotasi negatif, yaitu suatu gerakan yang cacat. Oleh karena itu lag budaya berarti pelebaran salah satu aspek budaya di belakang yang lain. Menurut Ogburn (1920) ada dua aspek budaya. Satu adalah budaya material dan lainnya adalah non-material. Budaya Material, di dalamnya termasuk elemen-elemen atau hal-hal yang berwujud, terlihat dan dapat disentuh seperti barang, alat, mesin dan perabotan dll. Sedangkan Budaya Non-material, di dalamnya termasuk elemen-elemen yang tidak berwujud atau dapat disentuh melainkan dialami oleh orang-orang seperti kebiasaan, nilai-nilai, ideologi, agama dan pola perilaku dll.

Ditemukan bahwa inovasi dan penemuan teknologi mensitimulasi budaya material sampai batas tertentu. Sebagai hasilnya, perubahannya adalah budaya materi 4N yang cepat. Tetapi budaya non-material merespons dengan sangat lambat terhadap perubahan budaya materi tersebut. Jadi budaya material berjalan meninggalkan budaya non-material. Ini disebut "lag budaya". Misalnya-Pengembangan di bidang industri membutuhkan perubahan yang sesuai dalam sistem pendidikan. Kegagalan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan industri modern menyebabkan jurang budaya.

Gambar 8. Diagram Cultural Lag



Ada beberapa penyebab terjadinya *Lag Culture*. Berdasarkan kajian dari beberapa sumber ditemukan banyak faktor terjadinya *Lag Culture*, diantaranya :

- 1) Perbedaan tingkat perubahan-perubahan elemen budaya.
- 2) Perubahan hukum.
- 3) Dogmatisme psikologis manusia.

Teori '*Cultural Lag*' yang disampaikan oleh Ogburn bukan tanpa kritik. Ada beberapa sosiolog yang menganggap teori tersebut terlalu bias. Teori tersebut dianggap tidak bisa menjelaskan secara tegas karena:

- a) Tidak ada perbedaan yang jelas antara budaya material dan non-material. Sekali lagi, tidak perlu bahwa budaya non-material harus selalu tertinggal dari budaya material.
- b) Kelemahan utama dalam teori Ogburn adalah bahwa ia menggunakan "*Cultural Lag*" bertujuan untuk memperluas semua kesenjangan dalam proses perubahan sosial. Maclver telah menyarankan penggunaan istilah yang berbeda untuk berbagai jenis disequilibrium dan konflik, seperti jeda teknologi, pengekangan teknologi, dan benturan budaya, dll.
- c) Menurut teori "*Cultural Lag*", yang satu mengalami kemajuan, yang satunya lagi mengalami ketertinggalan. Oleh karena itu, kata ini tidak boleh digunakan dalam konteks objek-objek yang memberi semangat dan juga menahan dan serupa serta memiliki standar evaluasi yang sama.
- d) Akhirnya, Ogburn belum memberikan standar atau skala untuk mengukur unit budaya material dan non-material. Jadi sulit untuk mengetahui apakah satu aspek budaya berubah lebih cepat dari pada aspek budaya yang lain atau tidak sama sekali.

Terlepas dari kehadiran singkat teori di atas, teori "*Cultural Lag*" yang digagas oleh Ogburn telah terbukti bermanfaat untuk memahami faktor-faktor budaya dalam membawa perubahan sosial.

d) Faktor Biologis

Perubahan sosial adalah proses yang kompleks. Ini disebabkan oleh banyak faktor. Semua faktor perubahan sosial saling terkait erat satu sama lain. Tetapi pada saat yang sama, setiap faktor yang dimiliki individu membawa perubahan dalam masyarakat dengan caranya sendiri. Dengan demikian, faktor biologis memainkan peran penting yang menjadi penyebab perubahan sosial. Faktor biologis biasanya mengacu pada faktor-faktor yang berkaitan dengan konstitusi genetik manusia.

Faktor biologis mencakup makhluk non-manusia seperti hewan, burung, tumbuhan, serangga, tanaman dll. Manusia menggunakan hewan, burung, dan tumbuhan serta spesies lainnya sesuai dengan arah budayanya sendiri. Pada saat yang sama manusia melindungi diri mereka dari berbagai unsur-unsur berbahaya. Jika ada peningkatan atau penurunan hewan, burung, tanaman dll. ini akan membawa sejumlah perubahan dalam masyarakat manusia.

Penurunan populasi yang cepat pada hewan, burung, dan tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia juga akan menciptakan sejumlah masalah dalam masyarakat manusia dan memengaruhi perubahan sosial. Demikian pula peningkatan atau penurunan populasi yang cepat juga membawa sejumlah perubahan dalam masyarakat. Proses biologis yang berbeda seperti prokreasi manusia, kesuburan dan kematian juga mempengaruhi laju perubahan dalam masyarakat. Ukuran, kepadatan, migrasi, imigrasi dll. membawa sejumlah perubahan di masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang cepat mempengaruhi lingkungan kita. Kadang kala pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan terjadinya kemiskinan, kekurangan pangan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya sehingga membawa perubahan dalam masyarakat. Migrasi mempercepat proses urbanisasi. Urbanisasi menciptakan banyak masalah seperti daerah kumuh, kualitas kesehatan dan

gaya hidup. Meningkatnya urbanisasi dan menurunnya jumlah hewan dan burung yang berguna akan memengaruhi lingkungan kita.

Demikian pula sifat dan kualitas manusia dalam suatu masyarakat juga mempengaruhi laju perubahan sosial. Beberapa Sosiolog berpendapat bahwa evolusi biologis umat manusia membawa perubahan sosial. Elit dalam masyarakat ditentukan oleh naluri biologis yang diwariskan. Selain itu komposisi penduduk juga mempengaruhi perubahan sosial.

Komposisi usia dan komposisi jenis kelamin sangat erat kaitannya dengan perubahan sosial. Jumlah populasi dalam kelompok usia produktif sangat memengaruhi laju dan kecepatan perubahan sosial. Jika jumlah anak dan populasi yang tidak produktif bertambah, suatu negara akan menghadapi sejumlah masalah ekonomi. Jika jumlah populasi yang menua berkurang, para pemuda mungkin kehilangan kebijaksanaan dan pengalaman yang mengakibatkan perubahan yang lambat.

Selain proses seleksi alam, seleksi sosial juga memengaruhi laju dan kecepatan perubahan sosial. Proses seleksi alam bekerja melalui proses alternatif kembar seperti adaptasi dan pemusnahan. Di sini manusia dituntut beradaptasi dengan lingkungan alam. Tetapi dalam seleksi sosial kekuatan yang diciptakan dalam masyarakat manusia dan beroperasi melalui hubungan manusia menciptakan situasi yang sangat mempengaruhi proses reproduksi dan tingkat kelangsungan hidup populasi.

J. Mekanisme Perubahan Sosial

Penjelasan sebab akibat dari perubahan sosial sangat terbatas dalam ruang lingkupnya, terutama ketika subjek penelitian melibatkan kondisi awal atau proses dasar. Cara yang lebih umum dan teoretis untuk menjelaskan perubahan sosial adalah dengan membangun model mekanisme perubahan sosial yang berulang. Melalui pemahaman model mekanisme seperti itu, maka akan membantu kita untuk memahami mekanisme-mekanisme perubahan dalam sosial.

1) Mekanisme perubahan satu arah

Akumulasi, seleksi, dan diferensiasi. Beberapa teori evolusi menekankan hakikat kumulatif dari pengetahuan manusia. Karena manusia inovatif, mereka menambah pengetahuan yang ada, menggantikan gagasan dan praktik yang kurang memadai dengan yang lebih baik. Ketika mereka belajar dari kesalahan, mereka memilih ide dan praktik baru melalui proses coba-coba (kadang-kadang dibandingkan dengan proses seleksi alam). Menurut teori ini, perluasan pengetahuan dan kemampuan kolektif di luar batas tertentu hanya dimungkinkan oleh spesialisasi dan diferensiasi. Pertumbuhan pengetahuan teknis merangsang akumulasi modal, yang mengarah pada peningkatan tingkat produksi. Pertumbuhan populasi juga dapat dimasukkan dalam model evolusi kumulatif ini: dengan akumulasi pengetahuan teknis kolektif dan alat-alat produksi, manusia dapat meningkatkan jumlahnya; pertumbuhan ini kemudian mengarah pada masalah baru, yang akan diselesaikan melalui inovasi-inovasi baru.

2) Mekanisme perubahan lengkung dan siklus: saturasi dan kepenatan

Model perubahan satu arah mengasumsikan bahwa perubahan dalam arah tertentu menginduksi perubahan lebih lanjut dalam arah yang sama; model perubahan lengkung atau siklus, di sisi lain, menganggap bahwa perubahan dalam arah tertentu menciptakan kondisi untuk perubahan di arah yang lain (bahkan mungkin sebaliknya). Lebih khusus, sering diasumsikan bahwa pertumbuhan memiliki batas-batas dan dalam mendekati batasan-batasan tersebut kurva perubahan pasti akan membengkok. Kondisi ekologis seperti ketersediaan sumber daya alam, misalnya, dapat membatasi pertumbuhan populasi, ekonomi, dan organisasi.

Perubahan siklus jangka pendek dijelaskan oleh mekanisme yang sebanding. Beberapa teori dari siklus bisnis, misalnya, mengasumsikan bahwa ekonomi akan mengalami kejenuhan secara berkala terhadap barang modal; investasi menjadi kurang perlu dan kurang menguntungkan, laju investasi berkurang, dan tren penurunan ini menghasilkan resesi. Namun, setelah periode waktu

tertentu, barang modal penting harus diganti; investasi didorong kembali, dan fase ekspansi ekonomi dimulai.

3) Konflik, persaingan, dan kerja sama

Konflik kepentingan antar kelompok sering dipandang sebagai mekanisme dasar perubahan sosial, terutama transformasi radikal dan mendadak yang diidentifikasi sebagai revolusi. Khususnya Marxis yang cenderung menggambarkan kehidupan sosial dalam masyarakat kapitalis sebagai perjuangan antara kelas yang berkuasa, yang ingin mempertahankan sistem, dan kelas yang didominasi, yang berjuang untuk perubahan radikal. Maka perubahan sosial adalah hasil dari perjuangan itu. Ide-ide ini adalah dasar dari apa yang disebut oleh sosiolog Ralf Dahrendorf sebagai model konflik masyarakat.

Gagasan konflik menjadi lebih relevan dengan penjelasan perubahan sosial jika diperluas dengan memasukkan persaingan antara kelompok-kelompok saingan. Bangsa, perusahaan, universitas, asosiasi olahraga, dan sekolah seni adalah kelompok-kelompok di mana persaingan semacam itu sering kali terjadi. Persaingan merangsang pengenalan dan difusi inovasi, terutama ketika mereka memiliki potensi sebagai cara (alat) untuk meningkatkan kekuatan. Dengan demikian, para pemimpin negara-negara non-Barat merasakan perlunya mengadopsi sains dan teknologi Barat, meskipun ideologinya mungkin anti-Barat, karena hanya dengan cara inilah mereka dapat mempertahankan atau meningkatkan otonomi dan kekuasaan nasional.

Selain itu, persaingan dapat menyebabkan pertumbuhan dalam ukuran dan kompleksitas entitas yang terlibat. Contoh klasik dari proses ini, seperti yang pertama kali disarankan oleh Adam Smith, adalah kecenderungan kapitalisme menuju kolusi dan pembentukan monopoli ketika perusahaan kecil diusir dari pasar yang kompetitif. Contoh lain datang dari Norbert Elias, yang menyatakan bahwa negara-bangsa Eropa barat lahir dari pergulatan kompetitif antara penguasa feodal. Persaingan juga mendominasi teori individualisme, di mana perubahan sosial dilihat sebagai hasil dari individu yang mengejar kepentingan diri mereka sendiri. Teori permainan

dan perangkat matematika lainnya, bagaimanapun, telah menunjukkan bahwa individu yang bertindak demi kepentingan diri mereka sendiri akan berada dalam kondisi tertentu yang bekerja sama satu sama lain dan dengan demikian memperluas jaringan sosial yang ada.

4) Ketegangan dan adaptasi

Dalam fungsionalisme struktural, perubahan sosial dianggap sebagai respons adaptif terhadap beberapa ketegangan dalam sistem sosial. Ketika beberapa bagian dari sistem sosial terpadu berubah, ketegangan antara satu dengan bagian lain dari sistem yang dibuat akan diselesaikan melalui skema perubahan adaptif dari bagian-bagian lain. Contohnya adalah apa yang disebut oleh sosiolog Amerika, William Fielding Ogburn '*Cultural Lag*', yang secara khusus merujuk pada kesenjangan yang berkembang dalam teknologi yang berubah dengan cepat dan sifat-sifat sosiokultural yang berjalan lebih lambat.

5) Difusi inovasi

Beberapa perubahan sosial dihasilkan dari inovasi yang diadopsi oleh masyarakat. Difusi sosial dapat mencakup penemuan teknologi, pengetahuan ilmiah baru, kepercayaan baru, atau mode baru di bidang keamanan. Difusi tidak otomatis tetapi selektif; sebuah inovasi hanya diadopsi oleh orang-orang yang termotivasi untuk melakukannya. Selain itu, inovasi harus sesuai dengan aspek penting dari budaya. Salah satu alasan untuk mengadopsi inovasi oleh sebagian besar kelompok masyarakat adalah contoh yang ditetapkan oleh kelompok status yang lebih tinggi, yang bertindak sebagai kelompok referensi untuk orang lain. Banyak inovasi cenderung mengikuti pola difusi dari kelompok yang lebih tinggi ke status yang lebih rendah. Lebih khusus lagi, sebagian besar pengadopsi inovasi awal dalam masyarakat Barat modern, menurut beberapa penelitian, adalah anak muda, masyarakat perkotaan, kaya, dan berpendidikan tinggi, dan status pekerjaan yang tinggi. Sering kali mereka termotivasi oleh keinginan untuk membedakan diri dari orang banyak. Namun, setelah difusi, inovasi tidak lagi menjadi simbol pembeda. Ini memotivasi kelompok yang sama

untuk mencari sesuatu yang baru lagi. Mekanisme ini dapat menjelaskan suksesi mode, model, dan gerakan sosial.

6) Perencanaan dan Institusionalisasi perubahan

Perubahan sosial dapat dihasilkan dari perencanaan sosial dalam skala besar yang diarahkan pada tujuan tertentu. Keinginan untuk membuat perencanaan dalam skala besar telah meningkat di dalam masyarakat modern. Sebelumnya, kebanyakan perencanaan sosial bersifat jangka pendek; tujuan perencanaan sering kali tidak tercapai, dan, bahkan jika perencanaan berhasil dalam hal tujuan yang dinyatakan, sering kali terdapat konsekuensi yang tidak terduga. Semakin luas ruang lingkup dan semakin lama rentang waktu perencanaan, semakin sulit untuk mencapai tujuan, dan bahkan sering kali sulit untuk menghindari konsekuensi-konsekuensi yang tidak terduga atau tidak diinginkan. Sebagian besar perkembangan sosial skala besar dan jangka panjang di masyarakat mana pun sebagian besar masih tidak direncanakan, namun perubahan skala besar yang dihasilkan dari undang-undang untuk membentuk lembaga pemerintah yang besar, seperti asuransi bagi kelompok pengangguran, sistem pensiunan untuk hari tua, atau jaminan perawatan medis, telah menghasilkan perubahan kelembagaan yang signifikan di sebagian besar masyarakat industri.

Perencanaan menyiratkan pelembagaan perubahan, tetapi pelembagaan tidak menyiratkan perencanaan. Banyak perubahan sosial yang tidak direncanakan dalam masyarakat modern dilembagakan; mereka berasal dari organisasi yang secara permanen berorientasi pada inovasi, seperti universitas dan departemen penelitian pemerintah dan perusahaan swasta, tetapi reaksi sosial mereka tidak terkontrol. Di bidang sains dan teknologi, perubahan terutama dilembagakan, yang menghasilkan perubahan sosial yang sebagian diinginkan dan sebagian tidak diinginkan.

K. Proses Perubahan Sosial

Agar perubahan sosial dapat terjadi dalam masyarakat mana pun, ia harus terwujud dalam salah satu mekanisme atau proses yang diuraikan di bawah ini:

1) Evolusi Sosial

Ini melibatkan pertumbuhan inheren alami atau perkembangan masyarakat dari bentuk yang lebih sederhana ke yang lebih maju dan modern. Oleh karenanya perubahan adalah sebuah proses alami.

2) Peminjaman dan Difusi

Ini adalah proses perubahan sosial terjadi ketika masyarakat meminjam dan menanamkan unsur-unsur budaya dari masyarakat lain secara sadar atau tidak sadar.

3) Penciptaan dan Penemuan

Melibatkan proses memperoleh persepsi baru tentang aspek-aspek atau basis budaya keseluruhan masyarakat dan menciptakan materi yang sampai saat ini tidak ada atau budaya non-material dari basis budaya yang ada yaitu aplikasi baru atau kombinasi pengetahuan budaya .

4) Asimilasi

Proses ini melibatkan situasi ketika dua masyarakat atau kelompok budaya melakukan kontak, kelompok yang lebih lemah dilebur ke dalam kelompok yang lebih kuat dan dengan demikian membuat kelompok yang lebih lemah kehilangan otonomi budayanya, mis. hilangnya ke-Afrika-an Francophone di Afrika Barat.

5) Akulturasi

Proses ini melibatkan dua masyarakat yang memiliki kontak dengan budaya mereka yang konvergen dan seiring waktu mengarah ke homogenitas budaya. Misalnya. Konvergensi budaya Jawa dan Madura di daerah Tapal Kuda Jawa Timur yang membentuk identitas baru yang disebut sebagai budaya Pendalungan.

6) Kehancuran Budaya

Proses ini melibatkan hilangnya pengetahuan budaya lama yang diganti dengan budaya baru sebagai akibat kepunahan budaya yang disebabkan oleh difusi, asimilasi, dll.

7) Perubahan yang Direncanakan dan Diarahkan

Di sini, pemerintah di semua tingkatan, asosiasi pengembangan masyarakat, kelompok terorganisir, dll. Dapat memulai perubahan sosial-budaya dan mengontrol tahapan, kecepatan, dan arahnya

dengan setara, mis. kebijakan pemerintah tentang pengendalian pertumbuhan penduduk seperti keluarga berencana, batasan jumlah anak per keluarga, legalisasi aborsi, dll.

L. Agen Perubahan Sosial

Masyarakat, seperti yang disebutkan sebelumnya terdiri dari bagian-bagian penyusun yang dikenal sebagai lembaga sosial yang semuanya menjalankan fungsi khusus untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat. Ekpenyong (1993) mengemukakan bahwa semua lembaga masyarakat adalah sumber atau agen perubahan sosial. Selain masyarakat, agen perubahan sosial juga terdiri dari:

- 1) Ekonomi - Melalui sistem ekonomi, manusia dan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya akan makanan, tempat tinggal dan pakaian; masyarakat bersama-sama menyediakan sarana teknologi yang kemudian mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian menimbulkan perubahan besar melalui eksploitasi sumber daya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan pengembangan masyarakat.
- 2) Pemerintah - Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemerintah memulai perubahan yang dipandu dan direncanakan karena menetapkan agenda dan tujuan bagi masyarakat. Perencanaan tersebut akan membantu masyarakat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mencapai perubahan sosial melalui penyebaran undang-undang, kebijakan, proyek pembangunan, penyediaan fasilitas sosial, dll.
- 3) Agama - Peran agama sebagai alat perubahan sosial tidak perlu dipertentangkan lagi. Agama bisa membawa perubahan positif. Doktrin agama menimbulkan perubahan sosial dalam banyak hal, misalnya untuk menciptakan perdamaian diperlukan penyebaran ajaran-ajaran kemanusiaan yang bersumber dari nilai agama. Karya Max Weber tentang Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme adalah contoh klasik dari peran agama dalam perubahan sosial.
- 4) Pendidikan – Pendidikan adalah agen perubahan sosial yang sesungguhnya karena membantu membebaskan massa yang tidak tahu apa-apa dari kemiskinan, takhayul, dogmatisme, tradisionalisme dll. Pendidikan akan membuka pikiran mereka, mengubah sikap

mereka, mengubah nilai-nilai dan kepercayaan mereka dan memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan mereka dan masyarakat mereka. Pendidikan bisa menciptakan kondisi dan sikap yang tepat untuk terjadinya perubahan sosial.

- 5) Media Massa – Media elektronik maupun cetak merupakan katalisator perubahan sosial. Media adalah alat untuk pendidikan massa, mobilisasi massa dan membantu penyebaran ideologi perubahan. Ketika dunia semakin kecil sebagai akibat dari globalisasi, media menghadirkan ciri-ciri budaya baru, teknologi, selera, makanan, gaya hidup, dll. yang bisa melampaui batasan-batasan negara.

M. Faktor-faktor yang Mempromosikan Perubahan Sosial

Ada beberapa faktor yang telah berhasil diidentifikasi oleh para ilmuwan sosial untuk menghasilkan dan merangsang perubahan sosial dan budaya yang melibatkan proses interaksi yang sangat kompleks dari lingkungan, teknologi, budaya, kepribadian, politik, ekonomi, agama, ideologi, perubahan populasi, dll. Oleh karena itu tidak ada faktor tunggal (variabel) yang jelas yang dapat menjelaskan perubahan dalam masyarakat manusia. Parsons (1966) menegaskan bahwa, tidak ada klaim yang menyatakan bahwa perubahan sosial hanya "ditentukan" oleh kepentingan ekonomi, gagasan, kepribadian individu tertentu, kondisi geografis dan lain-lain sebagai sesuatu yang dapat diterima. Karena setiap faktor tunggal selalu saling bergantung dengan beberapa faktor lain'.

Hal tersebut menyiratkan bahwa perubahan sosial dapat berasal dari bidang dan kelembagaan mana pun, yang membawa perubahan di bidang lain, yang pada gilirannya membuat adaptasi lebih lanjut dalam bidang awal perubahan. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti teknologi, ekonomi, politik, agama, ideologi, demografi, dan stratifikasi semuanya dipandang sebagai variabel independen yang memiliki potensi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam berkembangnya masyarakat. Berikut ini beberapa faktor-faktor yang diduga menyebabkan perubahan sosial dan budaya di dalam masyarakat:

- 1) Sumber Daya Lingkungan - Eksploitasi sumber daya alam dari lingkungan fisik, misalnya eksplorasi minyak mentah dan perubahan sosial budaya di sekitar lokasi tambang.
- 2) Teknologi - Teknologi yang digunakan dalam eksploitasi lingkungan alam membentuk budaya dan masyarakat, misalnya teknologi internet telah menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat modern.
- 3) Populasi - Perubahan dalam populasi sebagai akibat dari jumlah angka kelahiran, kematian dan kekuatan migrasi menimbulkan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat, misalnya program keluarga berencana untuk tujuan mensejahterakan masyarakat.
- 4) Isolasi dan Kontak - Masyarakat yang terisolasi dari masyarakat lain mungkin memiliki tingkat perubahan yang lambat, tidak seperti yang lain yang memiliki kontak dengan dunia luar yang dapat menyaksikan perubahan yang cepat.
- 5) Kebutuhan Rakyat - Kurangnya kebutuhan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya tuntutan massa kepada pemerintah untuk penyediaan kebutuhan tersebut, misalnya, kebutuhan fasilitas sosial, kesetaraan, keadilan sosial, dll.
- 6) Gerakan Sosial, Kepemimpinan dan Ideologi - Gerakan Sosial dengan Ideologi yang kuat dan kepemimpinan yang layak dapat memobilisasi massa untuk melakukan perubahan yang diharapkan dalam masyarakat, misalnya beberapa kelompok masyarakat sipil dan kelompok penekan.
- 7) Sikap dan Nilai - Sikap dan nilai yang dimiliki anggota masyarakat mengenai perubahan dapat memfasilitasi atau menghambat perubahan tersebut. Sikap yang terikat dengan tradisi akan selalu menghambat perubahan sosial.
- 8) Basis Budaya - Sebuah masyarakat dengan basis budaya yang layak sebagaimana tercermin dalam tingkat penemuan dan inovasi teknologi akan menghasilkan beberapa perubahan sosial-budaya dalam masyarakat.

N. Penerimaan dan Penolakan Terhadap Perubahan Sosial

Sangat menarik untuk dicatat di sini, bahwa tidak semua perubahan dalam masyarakat bisa diterima, tidak jarang perubahan menghadapi perlawanan atau yang lainnya. Ada beberapa alasan penyebab terjadinya penolakan, seperti yang disampaikan oleh Anele (1999), penyebabnya diantaranya:

- 1) Biaya Perubahan – Jika biaya perubahan yang diusulkan dalam hal anggaran negara, lingkungan, moral, dll. Sangat tinggi dibandingkan dengan manfaat langsungnya, maka dapat ditentang oleh massa. Jika manfaatnya lebih besar dari biaya yang harus dianggarkan peluang untuk diterima sangat besar.
- 2) Utilitas dan Kompatibilitas dengan Budaya yang Ada - Agar perubahan budaya baru dapat diterima dalam masyarakat, ia harus membuktikan bahwa utilitasnya lebih unggul dari pola budaya yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan praktik budaya yang ada, jika tidak maka akan terjadi penolakan.
- 3) Sikap dan Nilai - Jika suatu masyarakat memiliki struktur sosial tertutup dan terikat dengan tradisi, ia akan menolak segala bentuk perubahan untuk mempertahankan nilai-nilai budayanya; di sisi lain sistem budaya yang lebih terbuka akan ramah untuk berubah dan dengan mudah menerima perubahan.
- 4) Kepentingan dan Pemeliharaan Status Quo - Masyarakat terdiri dari beberapa kelompok yang mengejar beragam kepentingan, perubahan dalam struktur sosial akan mempengaruhi beberapa kelompok secara berbeda. Mereka yang melihat perubahan itu bermanfaat akan mendukungnya dan mereka yang merasa terancam oleh perubahan akan menolaknya dan mengadvokasi untuk mempertahankan status quo.
- 5) Demonstrabilitas Inovasi - Agar suatu inovasi baru dapat diterima, ia harus menunjukkan keunggulannya terhadap sistem yang lama. Jika tidak maka akan terjadi penolakan.
- 6) Kesulitan dalam Penerapan Praktik - Jika inovasi budaya atau teknologi baru memiliki beberapa kesulitan dalam penerapan praktisnya, maka akan ditentang oleh masyarakat.

O. Problem Sosial dan Perubahan Sosial

Perubahan adalah bagian integral dari kehidupan dan keberadaan kita. Manusia telah melalui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan sejak masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Demikian juga dengan tahapan-tahapan kehidupan manusia, kita memperoleh pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dll. Dengan nada yang sama, beberapa perubahan terjadi dalam masyarakat yang kita tinggali. Sejarah telah menyaksikan transformasi masyarakat manusia dari preliterate ke organisasi sosial modern. Masyarakat manusia telah berevolusi dari tahap perburuan dan pengumpulan primitif menjadi hortikultura, agraria, industri modern dan masyarakat post-modern kontemporer. Tidak ada masyarakat manusia yang statis dalam waktu lama, karena perubahan sosial adalah fenomena yang terjadi di mana-mana dan tak terhindarkan. Perubahan dapat terjadi di semua segi kehidupan masyarakat atau bagian tertentu dari struktur sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat mungkin sebagai akibat dari kebijaksanaan yang diperlukan dalam memberikan solusi untuk masalah sosial tertentu yang dihadapi dalam masyarakat; atau di sisi lain, perubahan sosial dalam masyarakat dapat memunculkan masalah sosial baru yang menyertai masyarakat tersebut, sehingga memerlukan proses adaptasi yang lebih kuat untuk mengatasi masalah sosial dan perubahan sosial.

Masalah sosial adalah istilah umum yang diterapkan pada berbagai kondisi dan perilaku menyimpang yang dianggap sebagai manifestasi dari dis-organisasi sosial. Ini adalah situasi di mana orang tidak menginginkan dan ingin segera memperbaikinya dengan cara melakukan rekayasa sosial yang terencana, terukur, dan terarah. Banyak masalah sosial dihasilkan dari proses perubahan sosial. Dengan demikian, masyarakat yang berubah pasti memiliki potensi masalah.

Dalam masyarakat yang terintegrasi sempurna, dikatakan, tidak akan ada masalah sosial karena dalam masyarakat seperti itu semua lembaga dan perilaku akan diselaraskan dengan rapi dan didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh nilai-nilai masyarakat. Masyarakat yang berubah berada dalam proses konstan dis-organisasi dan re-organisasi. Masalah sosial adalah bagian dari harga

perubahan sosial. Periode-periode perubahan yang cepat dapat menyebabkan dis-ekuilibrium dan dis-organisasi fungsi formal masyarakat.

Masalah sosial sama tuanya dengan masyarakat manusia, seperti halnya aspek keberadaan manusia yang sama-sama ada dan tak terhindarkan. Suatu kondisi bukanlah masalah sosial kecuali dianggap melanggar nilai-nilai dan keyakinan dasar tertentu tentang bagaimana masyarakat seharusnya beroperasi. Untuk mencapai konsensus yang lebih luas tentang apakah suatu kondisi bertentangan dengan nilai-nilai dan kepercayaan sangat sulit untuk diperoleh. Semua masalah manusia belum tentu menjadi masalah publik. Masalah sosial adalah cara yang dibangun secara sosial untuk melihat kondisi tertentu yang menyediakan informasi terkait perubahan tindakan publik. Dengan demikian, masalah sosial tidak terpisah dari interaksi sehari-hari warga negara dalam suatu masyarakat. masalah sosial tidak bisa dipisahkan dari cara manusia beroperasi, menentukan sasaran, dan membuat tujuan lembaga sosial.

Masalah sosial adalah situasi yang perlu diperbaiki dengan tindakan kolektif. Ini bermakna bahwa situasi tersebut mempengaruhi generalitas anggota masyarakat. Nisbet (2014) mendefinisikan masalah sosial sebagai cara perilaku yang dianggap oleh sebagian besar tatanan sosial sebagai pelanggaran terhadap satu atau lebih norma yang diterima atau disetujui secara umum. Selanjutnya, Scott dan Marshall (2005) mendefinisikan masalah sosial sebagai istilah generik yang diterapkan dalam berbagai kondisi dan perilaku menyimpang yang dianggap sebagai manifestasi dari disorganisasi sosial serta untuk menjamin perubahan melalui beberapa cara rekayasa sosial. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa masalah sosial adalah pola perilaku yang mengancam bagi masyarakat, kelompok, dan lembaga-lembaga yang membentuk tatanan masyarakat.

Perubahan sosial dan budaya kaitannya dengan masalah sosial bisa dilihat dalam dua cara. Pertama, perubahan dapat disebabkan oleh adanya masalah sosial. Kedua, masalah sosial dapat diciptakan oleh perubahan. Ini hanyalah dua aspek dari proses yang dinamis dan

mandiri, yaitu, perubahan membawa masalah dan masalah membawa perubahan. Perubahan diikuti oleh masalah dan sebagainya.

Durkheim, menganggap masyarakat sebagai tatanan moral yang dibentuk oleh norma dan nilai yang dilembagakan. Tetapi tatanan moral ini terganggu oleh kondisi anomik — pembagian kerja anomik, perubahan sosial yang cepat, penurunan otoritas moral (misalnya, agama), meningkatnya kompleksitas dalam peran dan aturan sosial, fragmentasi pekerjaan, sistem pasar yang tidak terkendali, persaingan pasar yang tidak diatur, dan ketidaksetaraan kesempatan untuk bakat-bakat alami. Kondisi ini menyebabkan timbulnya banyak jenis masalah sosial, timbulnya banyak perilaku yang menyimpang, seperti bunuh diri, kejahatan, kenakalan remaja, pelacuran, kecanduan narkoba, pengangguran, dan sejenisnya.

Untuk menghapus atau meningkatkan kondisi anomik, Durkheim menyarankan beberapa solusi ilmiah seperti kesatuan moral yang didasarkan pada rasa saling ketergantungan sosial yang saling menguntungkan, tatanan moral sipil non-religius yang baru untuk dipromosikan melalui negara, undang-undang dan pendidikan, regulasi pasar dan kondisi kerja, persamaan kesempatan dan ketidaksetaraan yang adil atau imbalan dll. Singkatnya, Durkheim ingin menerapkan pengetahuan sosiologis pada intervensi sosial yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan kembali keharmonisan sosial.

P. Subjek Kebijakan Sosial

Walaupun di beberapa negara eropa kebijakan pemerintah terkait masalah-masalah sosial disebut sebagai “Kebijakan sosial”, namun di sebagian besar negara Amerika Utara kebijakan sosial disebut sebagai "kebijakan kesejahteraan sosial". Beberapa penulis berpendapat bahwa kedua konsep ini memiliki makna yang sama, namun sebagian penulis lainnya mengatakan bahwa kebijakan sosial adalah kerangka konsep yang mencakup berbagai kebijakan, termasuk kebijakan kesejahteraan sosial (Ersöz, 2011).

Perbedaan mengenai definisi kebijakan sosial muncul dari kondisi yang dinamis dan timbul secara berkala sesuai keadaan sosialnya. Bagi Wagner (2007), kebijakan sosial berarti ukuran yang harus diambil

oleh negara untuk melindungi para pekerja, sementara bagi Kessler (2005), kebijakan sosial berarti sebuah gerakan dan perjuangan kelas sosial serta sikap negara terhadap perjuangan kelas sosial. Sedangkan bagi Mulroy dan Lauber (2004), kebijakan sosial adalah serangkaian pengukuran yang dilakukan secara nasional untuk mengubah dan mengatur kondisi kehidupan finansial dan budaya dalam periode waktu tertentu. Kebijakan sosial sebagai keseluruhan tindakan dan institusi yang diambil untuk melindungi sebagian masyarakat yang membutuhkan perlindungan ekonomi serta untuk memastikan keamanan sosial dan perdamaian (Albrecht dalam Altan, 2009). Marshall (1950), mendefinisikan kebijakan sosial sebagai seperangkat kebijakan yang dikembangkan oleh negara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat agar memperoleh pendapatan dan layanan. Hagenbuch (1958), menegaskan bahwa kebijakan sosial adalah upaya untuk memastikan setiap individu memiliki standar dan peluang minimum.

Dalam arti yang sempit, Kebijakan Sosial adalah sikap yang diambil (dilakukan) oleh pemerintah untuk mengatasi perselisihan, ketidakseimbangan, dan konflik kepentingan antara pengusaha dan karyawan serta untuk memastikan harmoni antara kelas dalam sistem kapitalis (Erdal, 2014; Talas, 1992; Selçuk, 2009). Begitu juga dengan tujuannya, dalam konteks yang sempit, maka tujuan kebijakan sosial adalah untuk menemukan solusi terhadap masalah yang muncul dalam masyarakat industri. Berangkat dari perspektif ini, maka kebijakan sosial berfungsi untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial untuk mengakhiri terjadinya ketidaksetaraan sosial yang disebabkan oleh revolusi industri. Kebijakan sosial dibuat untuk menyeimbangkan antara tenaga kerja dan modal, karena hanya mencakup masalah kelas pekerja dan pekerja (Özaydin, 2008). Kebijakan-kebijakan tersebut juga mencakup ketentuan keadilan sosial, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan upah, kondisi para pekerja, serikat pekerja, dan mekanisme mediasi antara pekerja dengan pemilik modal.

Berdasarkan sejarahnya, kebijakan sosial muncul bersamaan dengan munculnya konsep negara kesejahteraan setelah Perang Dunia II. Pasca berakhirnya Perang Dunia II yang menewaskan jutaan

manusia dan berdampak pada kehancuran negara-negara di dunia, negara-negara yang terlibat dalam konflik Perang Dunia II berlomba-lomba untuk memulihkan kembali negaranya dari kehancuran. Pengaruhnya terhadap Kebijakan sosial sangat luas, sehingga mencakup banyak hal, terutama yang berkaitan dengan kepentingan manusia terhadap kesejahteraan. Jika merujuk pada kondisi tersebut, dalam arti yang luas, konsep kebijakan sosial berarti praktik-praktik komprehensif yang berusaha menangani banyak masalah dan kebutuhan kelas pekerja serta kebutuhan segmen lainnya dari masyarakat. Berangkat dari definisi perspektif ini, maka sangat dimungkinkan untuk mengatakan bahwa disiplin kebijakan sosial juga membahas masalah yang berkaitan dengan urbanisasi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan dan semua segmen masyarakat seperti pekerja, orang cacat, orang tua, anak-anak, dan imigran. Karena itu, kebijakan sosial mencakup layanan kesehatan, jaminan sosial, pembangunan perkotaan, masalah lingkungan, pengangguran, dan kemiskinan yang memengaruhi kesejahteraan sosial. Dalam arti luas, target akhir dari semua praktik ini adalah untuk memastikan perdamaian sosial, keadilan sosial, dan kesetaraan antara berbagai kelompok (Kennett, 2009). Kebijakan sosial ditentukan atas dasar redistribusi. Peraturan dan distribusi kebijakan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap orang yang hidup dalam masyarakat memiliki kebebasan sosial dan kesempatan yang sama (Midgley, et.al, 2009). Memastikan kesejahteraan setiap individu adalah tujuan utama negara kesejahteraan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kesehariannya anggota masyarakat memiliki kebutuhan khusus yang yang tidak bisa dikesampingkan karena menjadi kebutuhan (hak) dasar, seperti pendidikan, jaminan sosial, layanan kesehatan, dan perumahan. Kebijakan sosial melalui peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memastikan kesejahteraan individu. Karena kebijakan sosial dipengaruhi oleh perkembangan sosial, maka hal tersebut bisa berubah berdasarkan kebutuhan individu. Negara membuat peraturan baru berdasarkan kebutuhan. Negara bisa membuat peraturan secara terpisah bagi mereka yang membutuhkan perlindungan khusus, misalnya anak-anak, remaja,

penyandang cacat, keluarga dengan pendapatan rendah, dan untuk para warga lanjut usia (lansia).

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan kebijakan sosial tidak hanya kebutuhan masyarakat dan individu tetapi juga gerakan ideologis, tingkat kejahatan, pengangguran, media, politik, kelompok industri, dan kekerasan, seperti faktor ekonomi, resesi, dan sifat kesejahteraan negara (sosial demokrat, liberal, dll.) (Blakemore, *et.al*, 2013).

Maka secara khusus, Kebijakan sosial dapat didefinisikan sebagai ranah keputusan yang diambil dengan partisipasi banyak individu dan partai, yang diberlakukan setelah negara menentukan basisnya (Daly, 2003). Ada interaksi timbal balik antara kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi (Erdal, 2014). Dengan demikian, pembangunan suatu negara tidak hanya dimungkinkan melalui pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga bisa dicapai melalui pertumbuhan yang adil dan seimbang untuk menyelesaikan masalah sosial. Dari perspektif ini, masalah-masalah dalam ekonomi dan masalah-masalah dalam kebijakan sosial perlu ditangani bersama.

Peran kebijakan sosial berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, sosial dan politik. Merumuskan kebijakan sosial secara komprehensif sangatlah sulit karena berkaitan dengan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Kebijakan sosial harus mempertimbangkan fakta bahwa ide tentang kebijakan sosial dan perannya dalam pembangunan selalu berubah dari waktu ke waktu, yang menunjukkan sulitnya menemukan kejelasan yang tepat tentang pendekatan investasi sosial yang baik, pengentasan kemiskinan yang menyeluruh, dan pemerataan keadilan sosial. Hasil dari implementasi kebijakan sosial yang telah melalui berbagai perubahan besar dalam desainnya menjadi tantangan tersendiri dalam menuntaskan isu kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan individu dalam masyarakat.

Kebijakan sosial terutama mengacu pada pedoman dan intervensi untuk perubahan, pemeliharaan atau penciptaan kondisi kehidupan yang kondusif bagi kesejahteraan manusia. Kebijakan sosial adalah masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan dan suplai

makanan untuk semua orang. Kebijakan sosial adalah bagian dari kebijakan publik tetapi kebijakan publik lebih dari itu, itu adalah kebijakan ekonomi, kebijakan industri, dan juga kebijakan sosial, dll. Jawaban pasti terhadap masalah pasokan kebutuhan manusia, persoalan kemiskinan, dan ketidaksetaraan cenderung tetap sulit dipahami, dan oleh karena itu, kebijakan sosial memerlukan ruang diskusi, eksperimen, inovasi, dan pembelajaran dalam pendekatan pembangunan sosial. Melalui usaha penciptaan ruang dialektika yang luas dan terbuka maka akan menjadi sebuah kontribusi yang berdampak signifikan terhadap pengembangan model-model kebijakan sosial.

Kesimpulannya, kebijakan sosial adalah bagian dari kebijakan publik yang berkaitan dengan masalah sosial. Pusat Kebijakan Sosial Malcolm Wiener di Universitas Harvard menggambarkannya sebagai "kebijakan publik dan praktik di bidang perawatan kesehatan, layanan manusia, peradilan pidana, ketimpangan, pendidikan, dan tenaga kerja." (Rittel & Webber, 1973). Kebijakan sosial sering kali berurusan dengan masalah yang disebut Rittel & Webber (1973) sebagai masalah-masalah buruk.

Kebijakan adalah tindakan yang berasal dari keputusan yang dibuat oleh pemangku kepentingan sebagai usaha untuk memilih dan menetapkan tujuan serta bagaimana cara tujuan tersebut bisa dicapai. Kebijakan dibuat oleh kelompok-kelompok yang memiliki kewenangan (kekuasaan) untuk melaksanakan setiap keputusan yang dibuatnya. Kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kebijakan sejumlah rencana yang telah dipilih dapat diusahakan untuk mewujudkan harapan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai "*what government do, why they do it, and what difference it makes*" (Dye, 1995). Sedangkan Laswell dan Kaplan (1970) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*a projected program of goals, values, and practices*". Manakala, Easton (1965) melihat kebijakan publik sebagai "*the impact of government activity*". Demikian juga dengan Anderson (2004), yang mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai "*a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*". B.G. Peters (1993)

mendefinisikan sebagai *‘the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens’*. Peterson (2003) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“government action to address some problem”*. Lester dan Robert Steward (2000) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problems, either real or imagined”*. Terakhir Ranney (dalam Lester & Steward, 2000) melihat kebijakan publik sebagai *“a selected line of action or declaration of intens”*. Menurut Parsons (1997), kebijakan dapat dimaknai sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh negara dengan rakyat. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat dalam lingkup publik, yang merupakan lingkup bersama. Hal tersebut menggambarkan bahwa lingkup publik memerlukan interaksi antara negara dengan warganya dalam pengambilan keputusan terkait masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

Karena proses pembuatan kebijakan tidak terlepas dari kepentingan politik para pemegang kepentingan, maka aktivitas tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn, 2000). Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual (Subarsono, 2013).

Q. Prinsip dan Konsep Kebijakan Sosial

Guna mencapai tujuannya, kebijakan sosial perlu memiliki beberapa prinsip mengenai kebijakan yang akan diambil. Kebijakan sosial, yang diberlakukan oleh negara dan lembaga-lembaga lain, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung. Peraturan negara tentang kesejahteraan perlu ditentukan dengan cara melakukan analisa kebijakan sosial. Subyek dan prinsip dasar yang terkait dengan kebijakan sosial adalah kebutuhan sosial dan masalah sosial, persamaan hak dan keadilan sosial, efisiensi, kesetaraan dan pilihan, altruisme, timbal

balik dan kewajiban, pembagian, perbedaan, dan pengucilan (Deacon, 2007).

Negara kesejahteraan harus memberikan beberapa hak kepada rakyatnya. Hak-hak tersebut diantaranya:

1. Kesetaraan

Mencapai kesetaraan adalah salah satu dasar kebijakan sosial. Setiap Sumber daya perlu didistribusikan secara adil untuk mencapai kesetaraan. Kesetaraan memiliki tipe yang berbeda-beda: hasil yang sama, kesempatan yang sama, atau perlakuan yang sama.

2. Kesempatan yang sama

Setiap kelompok dalam masyarakat harus diperlakukan sama. Kesempatan yang sama perlu diberikan kepada setiap orang tanpa harus memandang jenis kelamin atau kelompok mereka. Selain itu, semua orang harus memiliki peluang yang sama dalam sistem pendidikan atau peluang kerja.

3. Kebutuhan

Kebutuhan dasar utama manusia adalah makanan, perawatan, dan perumahan. Walaupun pada dasarnya kebutuhan tidak terbatas dan tidak pasti, namun kebutuhan mana yang harus dipenuhi oleh negara, negara harus membuat pilihan dan prioritas, sehingga paling tidak kebutuhan minimum manusia terpenuhi.

4. Kebebasan dan hak

Ada berbagai macam jenis hak. Salah satunya adalah hak sipil warga negara. Hak sipil adalah bebas (aman) dari tindakan kesewenang-wenangan (represif) pemerintah, tidak adanya penangkapan atas nama politik, dan masyarakat memiliki kebebasan untuk mendiskusikan (menyampaikan) pendapat. Hak yang lainnya adalah hak sosial, itu bermakna hak atas kesejahteraan sosial, hak atas jaminan sosial, dan hak atas pendidikan. Terakhir adalah hak politik. Hak-hak politik termasuk di dalamnya proses memberikan suara politik dalam pemilihan umum dan bergabung dengan partai politik serta kebebasan untuk menjelaskan pendapat secara demokratis.

Semua hak tersebut harus diberikan oleh negara kesejahteraan. Individu yang hidup dalam masyarakat terikat dengan negara melalui

ikatan kewarganegaraan. Ia memiliki hak untuk meminta negara tempat ia menjadi warga negara untuk membuat kebijakan yang membuka jalan untuk memberinya hak-hak yang ia miliki. Dari perspektif ini, konsep kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menentukan kewajiban negara dan hak-hak individu sebagai bagian dari kebijakan sosial.

Tujuan utama dari kebijakan sosial adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat hidup dalam harmoni dan jauh dari konflik. Dengan demikian, maka target kebijakan sosial adalah untuk memastikan keadilan sosial, pembangunan sosial, keseimbangan sosial, integrasi sosial, dan perdamaian sosial. Maka dari itu dengan adanya kebijakan sosial diharapkan akan terwujud sebuah perubahan sosial dalam masyarakat.

Adanya keadilan sosial, membuat setiap orang di dalam struktur sosial masyarakat akan memiliki hak yang sama dalam menghadapi risiko yang sama. Dengan cara ini, terjadinya ketidaksetaraan dan perbedaan yang disebabkan oleh hilangnya peluang ekonomi akan hilang (berkurang). Semua kebijakan akan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang adil terhadap pendapatan, pajak, upah, pendidikan, jaminan, dan usaha sosial untuk berkontribusi pada pengembangan keadilan sosial dalam masyarakat.

Melalui kebijakan sosial kita bisa mewujudkan keseimbangan sosial. Hal tersebut akan memungkinkan setiap orang yang ada di dalam sistem sosial masyarakat hidup dalam harmoni dan seimbang. Karena itu, perbedaan sosial perlu dikurangi. Terutama perbedaan dan ketidaksetaraan yang berkaitan dengan peluang untuk mengakses berbagai sumber daya, baik itu sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Maka jelas keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan merupakan salah satu tujuan utama kebijakan sosial. Melalui kebijakan sosial, negara berusaha untuk menghilangkan perbedaan (ketimpangan) dalam berbagai level kebijakan pembangunan. Melalui kebijakan sosial juga, pemerintah berkewajiban untuk memastikan setiap orang telah mendapat manfaat dari layanan sosial yang disediakan oleh negara.

Melalui kebijakan sosial pemerintah mengusahakan terwujudnya perdamaian sosial. Dengan melalui kebijakan pemerintah harus mampu

menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan ketidakseimbangan dalam struktur sosial. Khususnya dalam sistem kapitalis, perbedaan sosial yang diciptakan oleh pasar bebas dapat menghambat terciptanya solidaritas yang kuat dalam seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan rekonsiliasi demi terciptanya harmonisasi dalam masyarakat, kebijakan harus diterapkan sebaik dan setepat mungkin untuk menghilangkan efek negatif psikologis dalam masyarakat.

R. Mempromosikan Perubahan Sosial Melalui Kebijakan Sosial

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Terkait dengan hal tersebut, pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas hidup manusia dapat tercapai. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat pula disebut sebagai kebijakan. Lebih lanjut, kebijakan yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat tersebut didefinisikan sebagai kebijakan sosial (Midgley and Livermore, 2009).

Menurut Johnson *et al.* (2001) perubahan sosial mengacu pada tindakan advokasi untuk penyebab perubahan masyarakat secara positif. Perubahan sosial adalah perubahan dalam cara orang berperilaku dan menjalani kehidupan mereka, termasuk perubahan sifat keputusan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian dan pengurusan anak-anak. Setiap perubahan dalam hubungan sosial yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat atau transformasi struktur sosialnya dapat dianggap sebagai perubahan sosial. Biasanya, perubahan sosial diarahkan oleh kebijakan sosial dan pekerjaan sosial yang direncanakan dengan cermat (Malim dan Birch, 1998). Muncie (2004) menyatakan bahwa pemerintah melalui kebijakan sosialnya dapat menetapkan kerangka hukuman dan ganjaran dalam mengatur tata perilaku sosial.

Kebijakan sosial harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (Spicker, 2000). 'Kebijakan sosial' pemerintah adalah serang-

kaian tindakan dan pendekatan yang diadopsi terkait dengan perlindungan sosial dan penyediaan kesejahteraan (Spicker, 2000). Pada umumnya, secara prinsip negara memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan yang telah diterima dan dipraktikkannya sejak berabad-abad lalu. Argumen utamanya, kesejahteraan merupakan hal yang baik, dan bahwa pemerintah ada untuk melakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat; sedangkan argumen lainnya didasarkan pada kewajiban negara untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dalam rangka memenuhi hak warga negara. Kebijakan sosial akan membantu masyarakat jauh lebih baik dalam berbagai aspek, misalnya yang berkaitan dengan masalah kualitas hidup, pendidikan, masalah kewarganegaraan (misal: masalah pengungsi, imigran, suaka politik, dll.), budaya, penghasilan, ekonomi, dan masyarakat di daerah pedesaan.

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial. Kebijakan sosial dalam prakteknya di banyak negara mencakup hal-hal yang sifatnya strategis serta usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, biasanya dalam bentuk perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun asuransi sosial, bahkan bisa jadi dalam bentuk jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Dalam konteks ini Spicker (2002) membaginya ke dalam lima bidang kegiatan kesejahteraan,, yaitu: kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial.

Negara kesejahteraan tidak hanya tentang deskripsi dari sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*) semata, tetapi juga sebagai sebuah perilaku normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Melalui kebijakan publik dengan kebijaksanaan sosialnya negara mampu memecahkan masalah kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan sosialnya. Sehingga alur. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus memenuhi beberapa dimensi, yaitu:

- a) mengidentifikasi dan menentukan tujuan kesejahteraan rakyat;
- b) Memecahkan masalah kesejahteraan rakyat;
- c) Merumuskan kebijakan sosial untuk kesejahteraan rakyat; dan

d) Memenuhi kebutuhan sosial secara keseluruhan.

Pemerintah harus mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Melalui pemenuhan kebutuhan, pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah. Melalui kebijakan sosial pula, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pencegahan. Mencegah terjadinya masalah, mencegah tidak terulang atau timbul lagi masalah, atau mencegah meluasnya masalah. Selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan pengembangan dengan meningkatkan kualitas suatu kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Menurut Malim dan Birch (1998) kebijakan sosial adalah faktor yang mengatur perilaku manusia di bidang-bidang seperti seksualitas dan moralitas umum. Kebijakan sosial dianggap sebagai tindakan pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kesejahteraan warganya dengan menangani masalah sosial. Beberapa contoh masalah yang bisa ditangani pemerintah adalah kriminalitas, polusi, tunawisma, kemiskinan, dan kesehatan masyarakat. Pembentukan kebijakan sosial adalah untuk membantu masyarakat bertahan hidup dalam gejolak masalah yang dihadapinya. Kebijakan sosial suatu negara adalah faktor utama yang membuat masyarakat manusia tetap hidup dan aktif hingga saat ini (Grinnell dan Unrau, 2004). Tanpa kebijakan sosial, perasaan komunitas akan hilang di dalam masyarakat. Akhirnya, kebijakan sosial adalah kebutuhan penting bagi masyarakat modern. Kebijakan sosial akan membawa keseimbangan bagi negara dan juga menyediakan sarana bagi warga negara untuk aktif membantu mereka yang tidak dapat bertahan hidup dalam masyarakat modern tanpa dukungan yang layak (Hudson, 2000).

Pemerintah melalui kebijakan sosial bisa membuat sistem kontrol sosial. Menurut Polkinghorne (2004), kontrol sosial mengacu pada mekanisme sosial yang mengatur perilaku individu dan kelompok, dalam hal sanksi dan penghargaan yang lebih besar. Cohen (2000),

menyatakan bahwa kontrol sosial hadir dalam semua lapisan masyarakat dan dapat diamati dalam mekanisme kontrol yang digunakan untuk mencegah masyarakat jatuh ke dalam situasi anarkis atau bahkan oligarkis (Hudson, 2000). Pemerintah melalui kebijakan sosialnya menetapkan kerangka imbalan dan sanksi yang menyalurkan perilaku (Muncie : 2004). Ini bermakna bahwa pemerintah melalui kebijakan sosial bisa menyusun seperangkat aturan, kebiasaan, dan adat istiadat yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk menjaga ketertiban.

S. Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial muncul bersamaan dengan konsep negara kesejahteraan setelah Perang Dunia Konsep negara kesejahteraan muncul pada 1930-an dan 1940-an. Berbeda dengan konsep negara yang diadopsi selama Perang Dunia II. PADA MASA itu negara bertujuan menyediakan sejumlah dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan militer. Sementara, negara kesejahteraan bertujuan untuk membuat kebijakan sosial, layanan kesehatan, dan dengan demikian menyediakan kebutuhan sosial (Greve: 2014). Karena itu, dalam prakteknya kebijakan sosial mencakup layanan kesehatan, jaminan sosial, kota, lingkungan, dan perjuangan melawan pengangguran dan kemiskinan yang memengaruhi kesejahteraan sosial.

Konsep negara sejahtera dalam berbagai prakteknya di dunia berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh kearifan lokal seperti warisan budaya, sosial, politik, dan ekonomi serta perkembangan sejarah negara tersebut. Walaupun begitu, secara tujuan mereka sama, yakni negara kesejahteraan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan individu warga negara.

Meskipun ada banyak definisi tentang negara kesejahteraan, Briggs (1961) melihat negara kesejahteraan semacam negara di mana kekuatan publik yang terorganisir secara sadar digunakan untuk mengurangi peran kekuatan pasar. Diterima dalam lingkup peran negara kesejahteraan untuk memberikan jaminan penghasilan minimum kepada individu dan keluarga, untuk memfasilitasi pencegahan risiko sosial tertentu, dan untuk menawarkan kondisi kehidupan yang baik untuk individu dalam masyarakat melalui kesejahteraan sosial (Briggs,

1961). Definisi lain dari negara kesejahteraan adalah pemahaman negara kontemporer yang melakukan tugas untuk memastikan distribusi pendapatan yang adil, melindungi kelompok dan kelas yang membutuhkan perlindungan, mengarahkan praktik jaminan sosial dan kebijakan ketenagakerjaan, mempraktikkan politisasi untuk memenuhi persyaratan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan serta mengambil langkah-langkah untuk mengatur kehidupan ketenagakerjaan, kebijakan pajak, dan upah yang diperlukan (Devlet, 1994).

Dari pemaparan di atas, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial memberi peran lebih besar kepada negara melalui pemerintahan sebuah negara untuk mengalokasikan sejumlah (sebagian) dana publik demi menjamin (terpenuhinya) kebutuhan dasar warga negaranya. Dalam prakteknya negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan sejumlah pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh warga negara sebaik mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan setiap sistem sumber yang dimilikinya dengan cara menyelenggarakan jaringan pelayanan sosial yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil, makmur, dan berkelanjutan. Hal tersebut bermakna, bahwa negara kesejahteraan meminta kepada pemerintahan negara untuk bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Dalam rangka menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya, negara membuat seperangkat kebijakan sosial. Maka, dalam penerjemahannya kebijakan sosial dilihat sebagai seperangkat langkah yang dikembangkan untuk melindungi tenaga kerja terhadap bahaya yang timbul akibat industrialisasi pasca revolusi industri. Namun, pemahaman ini dianggap terlalu sempit, sehingga pemaknaan kebijakan sosial terus diperluas. Dalam kenyataannya, langkah-langkah untuk melindungi kepentingan kelas pekerja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sosial. Oleh karena itu, kebijakan sosial harus diperluas untuk mencakup semua kepentingan masyarakat. Akibat tuntutan tersebut, makna kebijakan sosial berubah menjadi seperangkat tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa

semua segmen masyarakat hidup dalam damai dan harmoni untuk mencegah pengangguran, untuk meningkatkan kondisi kerja, untuk memberikan upah minimum, untuk memberikan jaminan sosial dan tunjangan, untuk menghilangkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, dan untuk memastikan keadilan sosial. Seperti yang diutarakan oleh Aravacik (2018), bahwa kebijakan sosial mengacu pada semua kebijakan yang menjamin kesejahteraan negara dan individu serta praktik dinamis yang terus berubah.

Tujuan utama dari kebijakan sosial adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat hidup damai, harmonis, dan jauh dari konflik. Dengan kebijakan sosial, negara memastikan adanya keadilan sosial, adanya pembangunan sosial, adanya keseimbangan sosial, adanya integrasi sosial, dan adanya perdamaian sosial. Dengan adanya keadilan sosial negara berpeluang untuk menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi setiap individu tanpa harus menghilangkan kebebasan yang dimilikinya. Dengan keadilan sosial negara bisa memastikan distribusi pendapatan yang adil. Secara khusus, tujuan keadilan adalah untuk menyediakan layanan seperti pendidikan, pajak, jaminan sosial, peluang yang setara, dan upah yang adil dan memadai.

Melalui kebijakan sosial, negara bisa mewujudkan keseimbangan sosial, dengannya negara mempunyai peluang untuk menghilangkan perbedaan sosial dan ketimpangan antar kawasan. Melalui kebijakan sosial pemerintah bisa mewujudkan perdamaian sosial. Dengannya pemerintah bisa menghilangkan faktor-faktor penghambat rekonsiliasi sosial. Melalui kebijakan sosial, negara bisa menyusun peta integrasi sosial, dengannya pemerintah bisa mencegah disintegrasi sosial. Kebijakan sosial yang baik akan menciptakan demokrasi sosial. Alam demokrasi sosial yang baik akan menjamin adanya keseimbangan dan kesetaraan, sehingga iklim kebebasan demokratis warga negara terjaga dengan baik.

“Negara kesejahteraan” dan “kebijakan sosial” adalah generalisasi konsep yang melegitimasi intervensi politik dalam rangka melindungi anggota masyarakat yang lebih lemah, mengurangi kesenjangan sosial, dan mempromosikan kapasitas manusia untuk bertindak dan

mandiri. Negara kesejahteraan kontemporer adalah ekspresi institusional dari sistem politik yang berkomitmen pada hak asasi manusia, termasuk hak sosial. Kebijakan sosial adalah nama umum untuk strategi pemecahan masalah sosial dengan intervensi politik, serta untuk disiplin akademik yang berurusan dengan masalah seperti itu (Kaufmann dan Leisering: 2015). Definisi sosiologis ini lebih digeneralisasi daripada definisi deskriptif umum negara kesejahteraan dan kebijakan sosial atau pendekatan ekonomi politik yang berpusat pada masalah pasar tenaga kerja dan "dekomodifikasi" (Esping - Andersen, 1990).

T. Tantangan Masa Depan Kebijakan Sosial

Kebijakan Sosial di masa depan akan berhadapan dengan dinamika sosial yang luar biasa. Perubahan pola komunikasi, perkembangan teknologi, model sistem politik pemerintahan, masalah Kesehatan, perilaku budaya yang berubah, dan perubahan iklim menjadi tantangan yang sangat serius dalam merancang kebijakan sosial. Berikut beberapa hal yang menjadi tantangan kebijakan sosial di masa mendatang.

1. Ketidaksetaraan sosial

Ketidaksetaraan sosial mengacu pada proses relasional dalam masyarakat yang memiliki efek membatasi atau membahayakan status sosial, kelas sosial, dan lingkaran kelompok sosial. Penyebab terjadinya ketidaksetaraan sangat bervariasi dan luas. Namun, umumnya ketidaksetaraan terjadi karena adanya perbedaan dalam distribusi aset ekonomi dan pendapatan serta jumlah perbedaan kepemilikan barang dalam suatu masyarakat. Ketidaksetaraan sosial ada karena kurangnya kekayaan di daerah-daerah tertentu sehingga menghalangi anggota masyarakat untuk mendapatkan ke perumahan yang berkualitas, perawatan kesehatan, dll. Selain itu, ketidaksetaraan juga terjadi akibat kultur atau stereotip sosial yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri, seperti persoalan gender misalnya, dalam masyarakat yang tradisional dan patriarki perempuan ditempatkan sebagai kelompok masyarakat kedua (*second sex*) dan diasosiasikan dengan makhluk yang lemah. Isu tersebut menjadi kendala tersendiri bagi kelompok perempuan

untuk melakukan akselerasi sosial. Terakhir, ketidaksetaraan juga bisa terjadi akibat kebijakan pemerintahan negara yang diskriminatif. Dampak dari kebijakan tersebut bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.

Sering kali ketidaksetaraan sosial erat kaitannya dengan masalah-masalah rasialisme, ketidakadilan gender, dan ketimpangan kekayaan. Mereka yang bermasalah dan rentan secara sosial tidak memiliki hak penuh seperti kelompok masyarakat kaya untuk mengakses hak dasarnya. Perilaku-perilaku seperti itu cenderung menjadi hambatan atau mempengaruhi bagi sebagian kelompok masyarakat untuk melakukan akselerasi (mobilitas) sosial. Ketidaksetaraan bukan hanya itu saja, tetapi bisa mencakup pada persoalan akses pekerjaan, akses hak suara, kebebasan berbicara dan berkumpul, hak kepemilikan properti, akses ke pendidikan, transportasi, rekreasi, barang dan jasa serta layanan sosial lainnya.

Berdasarkan laporan *World Inequality Report* (WIR) tahun 2018, bahwa ketimpangan pendapatan sangat bervariasi di masing-masing negara di dunia. Ketimpangan terendah terjadi di sebagian besar negara-negara Eropa, sementara ketimpangan tertinggi terjadi di wilayah negara-negara timur tengah. Menurutnya, dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan pendapatan telah meningkat di hampir semua negara, tetapi dalam kecepatan yang berbeda-beda, hal tersebut menunjukkan bahwa institusi dan kebijakan memiliki peran penting dalam membentuk ketimpangan. Di tingkat global, ketimpangan telah meningkat tajam sejak 1980, meski beberapa negara seperti Cina mengalami pertumbuhan yang kuat.

Walaupun ketimpangan bukanlah fenomena baru, tetapi peningkatannya cukup mengkhawatirkan. Dari beberapa hasil penelitian, tingkat ketimpangan telah mencatat sejarah baru. Pertumbuhan ketimpangan di negara berkembang rata-rata mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan bahkan melampaui negara-negara maju. Tren tersebut terus meningkat sejak pertengahan tahun 1990-an dan telah berkontribusi signifikan terhadap usaha-usaha pengurangan kemiskinan. Walaupun menurut (Fosu, 2011),

dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan ditentukan oleh cara kekayaan dan pendapatan didistribusikan. Salah satu fakta penting yang tidak boleh ditutupi adalah adanya tingkat konsentrasi keayaannya yang substansial di beberapa negara. Sementara di negara berkembang, meskipun tingkat konsentrasi keayaannya tidak setinggi negara maju, ketimpangan kekayaan terkait erat dengan ketimpangan pendapatan (Shaxson, Christensen *et al.*, 2012).

2. Finansialisasi

Tabungan dan investasi produktif telah dihapus oleh pendalaman finansialisasi, yaitu meningkatnya peran motif keuangan, pasar keuangan, pelaku keuangan, dan lembaga keuangan dalam pengoperasian ekonomi domestik dan internasional (Epstein, 2006). Transaksi ekonomi antar negara telah meningkat secara substansial bersamaan dengan perkembangan globalisasi. Transaksi domestik dan transaksi keuangan internasional telah tumbuh secara drastis. Salah satu konsekuensi dari ini adalah pengurangan investasi di perusahaan non-finansial, yang merupakan sumber utama pekerjaan di sebagian besar negara. Transaksi keuangan, profitabilitas perusahaan keuangan, dan saham pendapatan nasional yang diperoleh pemegang aset keuangan meningkat sementara investasi dalam sektor non-keuangan yang digunakan untuk menghasilkan sebagian besar pekerjaan dan pendapatan telah jatuh selama tiga dekade terakhir (Epstein, 2006; Eatwell, 1997).

Dalam proses finansialisasi ini, perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur dan jasa non-keuangan pada dasarnya telah menjadi “kumpulan aset yang dikerahkan atau ditugaskan kembali dengan tergantung pada tingkat pengembalian jangka pendek yang dapat diperoleh” (Fligstein dan Markowitz, 1990). Pasar keuangan secara langsung menghargai perusahaan karena mengurangi biaya upah melalui berbagai langkah pasar tenaga kerja yang fleksibel seperti penutupan, restrukturisasi, dan *outsourcing*. Ini adalah perubahan mendasar dalam peran lembaga keuangan yang merupakan alokasi sumber daya yang efisien untuk pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dalam proses finansialisasi, investasi keuangan bisnis non finansial telah meningkat walaupun akumulasi barang modal

telah menurun, dan ketidakamanan dalam pekerjaan telah meningkat (Stockhammer: 2004). Perilaku finansialisasi berpotensi mengganggu dunia kerja, misal adanya PHK, sistem tenaga kerja kontrak, bahkan tingkat pengangguran yang tinggi. Kondisi-kondisi tersebut akan mengarahkan masyarakat dalam kondisi yang rawan dan rentan.

3. Kurangnya pekerjaan yang layak

Tantangan ketiga adalah penurunan jumlah pekerjaan yang layak. Kurangnya pekerjaan yang layak terjadi erat kaitannya dengan kemajuan teknologi dan intensitas kompetisi lintas nasional. Kemajuan teknologi telah mencapai tingkat puncak kejayaannya, di mana industri manufaktur tidak lagi memerlukan tenaga kerja manusia dalam jumlah yang banyak. Industri manufaktur hari ini memerlukan tenaga terampil dengan kualifikasi yang tinggi, sementara ketersediaan tenaga yang memenuhi syarat yang dibutuhkan dunia industri hari ini sangat rendah.

Demikian juga dengan sektor kerja tersier, jauh tertinggal dari sektor manufaktur dalam hal produktivitas dan memiliki kesulitan dalam menyerap angkatan kerja sampai taraf yang mengkompensasi hilangnya pekerjaan manufaktur (Taylor-Gooby, 2004). Negara-negara berkembang dengan tingkat upah yang lebih rendah semakin menggunakan keunggulan komparatifnya, yaitu biaya tenaga kerja yang rendah, baik langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan efisiensi secara ketat.

4. Divergensi produktivitas dan upah

Ini ada kaitannya dengan tantangan nomor tiga di atas, yaitu terjadinya disosiasi produktivitas dan tingkat upah. Salah satu fitur paling signifikan dari seperempat abad terakhir adalah adanya hubungan yang mapan antara upah dan produktivitas (Pessoa dan Reenen, 2012). Produktivitas terus tumbuh di beberapa sektor, tetapi upah, khususnya yang tenaga kerja yang berketerampilan rendah dan dibayar rendah, tidak lagi mendapatkan keuntungan dan produktivitas yang seimbang. Tentu saja, hal ini menjadi sebuah fenomena baru. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam hal produksi barang dan jasa di tingkat global,

namun persoalan upah terus menjadi masalah yang mengancam. Untuk membuktikan ketidakkonsistenan tersebut bisa dilihat pada tingkat urbanisasi yang terjadi pada negara.

5. Pasar tenaga kerja

Adanya potensi pasar tenaga kerja yang merusak potensi sumber daya manusia. Selama terjadinya periode pertumbuhan ekonomi yang dinamis pasca Perang Dunia telah mengubah cara-cara kerja tradisional. Cara tersebut digantikan oleh model kerja meritokratis. Pekerjaan yang berbasis profesional dan teknis. Dari sini ada tuntutan besar untuk kebijakan sosial agar fokus pada investasi sumber daya manusia. Layak untuk diperhatikan apa yang dilakukan oleh negara-negara Asia Timur yang berinvestasi pada dunia pendidikannya. Hasilnya, mereka mampu menghasilkan lapangan pekerjaan yang cukup dan produktivitas yang tinggi. Peran kebijakan sosial, khususnya dalam layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan akan memberikan berkontribusi penting terhadap akumulasi sumber daya manusia. Harapannya, kebijakan sosial akan membangun lingkaran pertumbuhan dan perkembangan sosial yang baik. Dengan cara seperti, generasi muda yang beresiko dalam kondisi ini akan terlindungi.

6. Masyarakat lanjut usia

Ada sebuah tren menarik, di mana akan ada banyak negara berkembang dan negara maju memiliki banyak penduduk lansia. Diperkirakan pada 2050, penduduk lansia di seluruh dunia mencapai 2 miliar lebih. Dari jumlah tersebut mayoritas akan berada di negara-negara berkembang. Dari beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa satu dari empat orang Asia akan berusia lebih dari 60 tahun pada tahun 2050.

Kondisi tersebut meningkatkan beban pada sistem transfer antar generasi. Di negara-negara di mana sistem jaminan sosial berat sebelah, sistem penguatan kesejahteraan anak-anak bermasalah, khususnya pada rumah tangga miskin, tentu ini akan mempengaruhi proses pergantian antar generasi. Kebijakan sosial di satu sisi harus mampu mendesain program kesejahteraan untuk warga lanjut

usia, disisi lain kebijakan sosial juga harus mendukung proses peralihan antara generasi agar tidak bermasalah.

7. Perubahan struktur keluarga

Keluarga dianggap sebagai institusi awal yang berhubungan dengan sosial. Keluarga merupakan roda yang paling fundamental bagi semua kegiatan ekonomi. Sayangnya institusi keluarga hari ini di beberapa negara maju dan berkembang menghadapi tantangan yang cukup berat meskipun sifat dan alasan kerapuhannya berbeda-beda. Keluarga adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh dua orang yang terdiri dari pria dan wanita, dari satu generasi atau dari beberapa generasi.

Keluarga bersama atau keluarga tradisional, seperti dimaksudkan di atas, biasanya dibangun oleh setidaknya dari generasi aktif (bekerja) dan satu generasi pasif (pensiunan/lanjut usia) yang hidup bersama. Seiring berkembangnya industrialisasi struktur keluarga tradisional mengalami pergeseran bentuk. Hampir semua keluarga modern hari ini dibangun oleh generasi aktif. Dalam bentuk keluarga bersama, menurut Becker (1981) memiliki keyakinan altruistik yang berarti 'fungsi utilitas satu generasi bergantung secara positif pada kesejahteraan generasi lain'. Hal yang sama disampaikan oleh Hamoudi A. *et. al.* (2006), menyatakan bahwa dukungan kooperatif yang menyiratkan tidak adanya kontrak kerja sama formal, masing-masing generasi percaya bahwa generasi lain selalu menjaga seseorang dari masalah tanpa mencari imbalan apapun. Dalam model keluarga inti tradisional ada sebuah pertukaran sumber daya antar generasi yang menunjukkan kesanggupan suatu generasi dalam menghadapi segala bentuk rintangan (finansial, moral, atau fisik), generasi tersebut akan membantu generasi yang rentan dengan memberikan semua bentuk bantuan dan dukungan (keuangan, moral, fisik) dengan harapan akan ditukar kembali oleh generasi berikutnya ketika generasi tersebut sedang menghadapi krisis yang sama (Herskovits, 1965; Posner, 1980).

Dalam dunia modern, pergeseran fungsi keluarga menarik untuk dicermati. Perubahan dan perkembangan struktur dalam keluarga juga menjadi tantangan tersendiri bagi kebijakan sosial.

Sebelum periode industrialisasi, perilaku ekonomi masyarakat berorientasi pada pemenuhan ekonomi keluarga. Keluarga membagi perannya masing-masing. Saat tenaga kerja semakin menjadi komoditas di negara maju, struktur ekonomi keluarga juga turut berubah. Pada era keluarga tradisional, kaum laki-laki lah sebagai tulang punggung keluarga. Namun, saat ini peran tersebut bias, tidak ada dominasi lagi bagi kaum laki-laki, jika perempuan mampu mereka juga bisa mengambil peran dan peluang yang sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki kesempatan yang sama.

Evolusi kebijakan sosial juga mencerminkan perubahan ekonomi keluarga dalam banyak hal. Secara khusus, banyak negara-negara kesejahteraan modern yang dikategorikan sebagai rezim kesejahteraan liberal dan konservatif, mempraktekkan model keluarga ini, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama. Salah satu tantangan paling mendasar yang dihasilkan dari globalisasi dan kemajuan teknologi adalah ketidakstabilan model ini. Upah rendah, rasa tidak aman dalam bekerja, dan meningkatnya partisipasi kaum perempuan dalam pasar dunia kerja telah memberikan tantangan tambahan bagi kebijakan sosial.

Tingginya keterlibatan perempuan dalam bidang industri membawa dampak yang signifikan terhadap pola asuh anak dalam keluarga dan tingkat kesuburan keluarga yang terus menurun, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Sejak kebijakan sosial dirancang untuk mengatasi tantangan dan risiko ekonomi politik yang menampilkan produksi industri dan permintaan untuk pekerja berketerampilan rendah secara relatif homogen dan tidak terdiferensiasi, sebagian besar tenaga kerja laki-laki memiliki keluarga yang stabil, tingkat kesuburan wanita, dan populasi wanita yang dikhususkan untuk itu juga tinggi (Esping-Andersen, 1999).

Hasil riset baru –baru ini dengan tegas menyatakan bahwa struktur keluarga dalam banyak hal telah berubah (OECD, 2011). Selama tiga dekade terakhir, di sebagian besar negara-negara maju telah terjadi penurunan tingkat kesuburan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan OECD pada tahun 2011, menunjukkan bahwa saat ini hampir tidak ada negara anggota OECD yang memiliki tingkat

kesuburan tinggi di atas angka penggantian populasi dua anak per wanita. Akibatnya ukuran rata-rata rumah tangga juga menurun selama periode ini. Pada saat yang sama, ada peningkatan yang tajam jumlah proporsi perempuan yang memasuki angkatan kerja. Dampak perubahan struktur dalam keluarga berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya anak. Bukti tentang tren kesejahteraan anak beragam, dan tantangan penting tetap ada. Masih ada kesenjangan gender yang besar dalam pekerjaan dan penghasilan dan satu dari delapan anak, rata-rata di seluruh OECD, masih hidup dalam kemiskinan relatif.

Pola pembentukan keluarga juga berubah. Semakin lama, baik pria maupun wanita ingin lebih dulu memantapkan dirinya di dunia kerja sebelum mendirikan sebuah keluarga. Oleh karena itu, usia ibu saat melahirkan untuk pertama kalinya telah meningkat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kehadiran jumlah anak dalam sebuah keluarga. Kondisi ini kontras dengan kondisi generasi sebelumnya, di mana tingkat kelahiran dalam keluarga cukup stabil. Bahkan di beberapa negara maju, wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak terus. Artinya, dibanding tahun 80-an jumlah kelahiran di sejumlah negara maju terus mengalami penurunan dan harapan hidup telah meningkat, sehingga jumlah anak dan orang tua lebih sedikit daripada sebelumnya.

Pencapaian pendidikan perempuan dan partisipasi kerja perempuan telah meningkat selama 30 tahun terakhir (OECD, 2011). Perempuan memiliki peluang yang lebih baik untuk memenuhi aspirasi pasar tenaga kerja mereka dan sangat dibutuhkan sebagian tambahan pasokan tenaga kerja. Sementara, peningkatan pekerjaan ibu berkontribusi pada kekayaan materi di antara keluarga dengan anak-anak, hampir sama dengan kelompok masyarakat yang tidak memiliki anak.

8. Kebangkitan politik dan keterbatasan sistem politik

Meningkatnya kesadaran politik di beberapa negara berkembang harus mendapat perhatian khusus. Pada abad ke-21, sebagian besar populasi di negara berkembang secara politis sangat mengejutkan. Ini adalah populasi yang sangat sadar akan adanya

ketidakadilan sosial hingga pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka adalah kelompok yang sering kecewa dengan tidak adanya martabat politik” (Brezinski, 2005).

Di beberapa negara berkembang, partai-partai oposisi telah berhasil merebut kekuasaan melalui pemilihan yang demokratis seperti yang terjadi di negara-negara Amerika Latin dan Asia. Rezim otoriter yang telah lama berdiri kini mulai digantikan oleh rezim politik baru. Meskipun masih banyak negara berkembang yang masih tetap dalam tahap "pra-pencerahan" atau melakukan konsolidasi "pasca-kebangkitan".

Tekanan bagi penguasa baru akan semakin besar. Penguasa baru dituntut untuk memperkuat tatanan demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial. Jika tidak mampu dijawab, maka akan ada tindakan aksi kolektif, demonstratif dan sporadis yang dilakukan oleh masyarakat hingga perubahan kekuasaan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perubahan kekuasaan. Dalam catatan sejarah, masih banyak catatan kegagalan peralihan kekuasaan yang berakhir dengan tindakan kejahatan baru. Kebangkitan politik tersebut belum tentu sejalan dengan konsolidasi demokrasi yang diinginkan. Dampaknya adalah kegagalan dalam membangun kelembagaan yang demokratis. Harapan yang tinggi terhadap kesejahteraan, tingginya tingkat kebangkitan politik yang substansial, dan kurangnya perwakilan serta partisipasi dalam institusi politik dapat menimbulkan tantangan serius bagi kebijakan sosial.

9. Perubahan iklim

Perubahan iklim diakui secara luas merupakan salah satu tantangan kebijakan sosial. Realitas tersebut tidak bisa dihindari pada abad ini. Meningkatnya frekuensi bencana alam merupakan salah satu bukti dari sekian banyak contoh dampak perubahan iklim. Lingkungan yang berubah akan membawa ketidakpastian dan ketidakamanan. Tingkat kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya bencana alam dilaporkan terus meningkat. Bahkan antara tahun 1950-an hingga tahun 1990-an kerugian meningkat hingga lima belas kali lipat. Berdasarkan beberapa laporan dunia, beberapa bencana besar telah menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi

dengan kerugian rata-rata mencapai 66 milyar USD per tahun (hingga tahun 2002).

Rekor kerugian terbesar bencana alam tercatat tahun 1995 ketika terjadi bencana gempa bumi di daerah Kobe Jepang. Kerugian mencapai sekitar 178 miliar USD - setara dengan 0,7% dari PDB global. Jumlah orang yang terkena dampak juga kian meningkat tajam, dengan peningkatan tiga kali lipat antara tahun 1970-an hingga 1990-an (Benson dan Clay 2003). Rata-rata dalam dua dekade terakhir, per tahunnya hampir lebih dari 200 juta orang terkena dampak bencana alam (UN ISDR: 2005).

Perubahan iklim telah menimbulkan tantangan mendasar terhadap kebijakan sosial atau negara kesejahteraan, karena lingkungan tidak diperhitungkan dengan baik dalam desain kebijakan sosial. Bencana alam yang semakin sering dan lebih besar telah membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Walaupun peristiwa yang terjadi tidak konstan, namun peristiwa bencana akan selalu memberikan kejutan yang tidak terduga, sehingga berimplikasi langsung pada masalah-masalah sosial.

10. Krisis berkepanjangan

Kondisi sosial yang rapuh, kronis, dan rentan serta krisis yang terus berulang akibat adanya krisis ekonomi, konflik politik, konflik sosial, konflik bersenjata, ancaman bencana alam, dan wabah penyakit telah menghambat proses pembangunan suatu negara. Dalam banyak kasus kegagalan pembangunan terhambat karena adanya krisis kemanusiaan yang berkepanjangan dan penuh ketidakpastian.

Tantangan bagi kebijakan sosial untuk menemukan resolusi atas krisis tersebut. Kebijakan sosial diharapkan mampu mengurai akar permasalahan yang terjadi dalam krisis tersebut. Selain mengurai, kebijakan sosial harus mampu memberikan solusi sekaligus melakukan pencegahan terhadap krisis tersebut. Kebijakan sosial harus menemukan jawaban bagaimana cara membangun ketahanan masyarakat. Melalui kebijakan sosial pemerintah bisa membangun

pemahaman bersama dengan melakukan kolaborasi untuk bersama-sama menuntaskan persoalan-persoalan sosial.

**KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
KEBIJAKAN SOSIAL**

Kesejahteraan sosial umumnya mengacu pada layanan negara yang dirancang untuk melindungi warga negara dari resiko ekonomi dan ketidakamanan hidup. Penyediaan kesejahteraan terutama melayani kepentingan fisik dan material penerima (Spicker, 2000). Karena Kesejahteraan sosial menyangkut masalah hak dasar manusia daripada kebutuhan. Program kesejahteraan sosial dirancang sebagai respons terhadap dampak industrialisasi. Dalam beberapa dekade, telah dicapai kesepakatan bahwa negara harus bertanggung jawab untuk melindungi semua warga negara yang tidak mampu untuk merawat mereka sendiri dengan alasan apapun.

Secara tradisional kesejahteraan sosial berarti beberapa tindakan yang menggunakan metode untuk melatih seseorang (meningkatkan kapasitas) agar mampu melindungi lingkungannya secara efektif. Dalam makna yang lebih modern, Kesejahteraan Sosial dilihat sebagai sebuah perencanaan yang dibuat untuk individu agar mampu mengurangi masalah sosial yang dihadapinya secara mandiri. Kesejahteraan Sosial sebagai Konsep memiliki aspek subjektif dan deskriptif serta dapat didefinisikan baik dalam bentuk tindakan maupun secara empiris. Kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan kondisi kesehatan fisik kelompok masyarakat, kenyamanan emosional dan keamanan ekonomi serta upaya masyarakat untuk membantu komunitasnya agar mampu mencapai kondisi yang ideal sesuai dengan standar sosialnya. Kesejahteraan Sosial bisa didefinisikan sebagai upaya pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk membantu anggotanya berfungsi secara lebih efektif sebagai individu dan sebagai peserta dalam struktur sosial yang terorganisir.

Dictionary of Social worker menuliskan bahwa, kesejahteraan sosial merupakan sistem program nasional suatu negara, yang memberikan pelayanan dan manfaat untuk membantu individu dalam memenuhi

kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang mendasar bagi pemeliharaan masyarakat. Kesejahteraan sosial tidak sama dengan standar hidup tetapi lebih mementingkan kualitas hidup yang mencakup faktor-faktor seperti kualitas lingkungan (udara, tanah, air), tingkat kejahatan yang rendah, tingkat penyalahgunaan narkoba, ketersediaan layanan sosial yang dibutuhkan, serta aspek kehidupan agama dan spiritual. Bisa dikatakan, kesejahteraan sosial merupakan berbagai bentuk tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Oleh sebab itu kesejahteraan sosial, secara sederhana bisa dikatakan sebagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial ekonomi, maupun kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial di beberapa negara dalam parakteknanya biasanya berbentuk sistem pembayaran melalui mekanisme transfer untuk menjembatani kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga swasta bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat miskin, orang sakit, memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah, keluarga bermasalah, remaja bermasalah, dan kelompok lanjut usia (Lansia).

Kesejahteraan sosial merupakan bentuk intervensi sosial, berupa mekanisme hukum (regulasi), program, dan manfaat yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan individu, untuk memastikan penyediaan kebutuhan sosial dasar yang diperlukan untuk kesejahteraan populasi, dan untuk berfungsinya tatanan sosial. Menurut Wickenden (1976), kesejahteraan sosial, termasuk undang-undang, program, manfaat dan jasa yang menjamin atau memperkuat layanan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar rakyat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sementara dalam *Pre-conference working committee for the XVth International Conference of Social Welfare*, disebutkan bahwa Kesejahteraan sosial adalah usaha sosial secara keseluruhan yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kehidupan orang berdasarkan konteks sosial. Ini termasuk kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan berbagai

kehidupan di masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, tradisi budaya, dan lain-lain.

Kesejahteraan sosial adalah sistem layanan dan lembaga sosial yang terorganisir, yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok, untuk mencapai standar yang memuaskan dalam kehidupan dan kesehatan. Kesejahteraan sosial merupakan berbagai bentuk kegiatan dan program sosial yang disponsori untuk diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat dan individu. Menurut Suharto (2009), kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Bagi Friedlander (1972), kesejahteraan Sosial adalah sistem layanan dan institusi sosial yang terorganisir, yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas penuh mereka dan untuk mempromosikan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga dan komunitas mereka”. Sedangkan Arthur Dunham (1958), mengatakan Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam berbagai bidang seperti kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberikan perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Sementara Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux (1965), mengatakan bahwa Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi daripada usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok-

kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraannya sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyebut kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui teknik-teknik dan metode-metode dengan maksud agar supaya memungkinkan individu-individu, kelompok (komunitas) masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mampu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

Dalam *Encyclopedia of Social Work*, kesejahteraan sosial pada umumnya menunjukkan pada serangkaian kegiatan sukarela yang terorganisir dan lembaga pemerintah yang berusaha untuk mencegah, meringankan, dan berkontribusi pada pemberian solusi masalah-masalah sosial, atau untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau komunitas. Wayne Johnson (1998), mengatakan, Kesejahteraan Sosial mengacu pada kegiatan yang diselenggarakan secara sosial yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam kamus Britannica, kesejahteraan sosial merupakan sebuah program yang dirancang untuk melindungi warga dari risiko ekonomi dan ketidakamanan hidup. Sementara Encarta, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai program yang bertujuan untuk membantu orang yang tidak mampu agar bisa dan mampu menghidupi diri (mencari nafkah).

Dalam UU No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 Ayat 1, kesejahteraan sosial disebut sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga

negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Sementara dalam UU No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materi, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani secara sepihak dan tidak terorganisir. Penanganan masalah sosial harus bisa dilihat dengan jelas kondisi sosial apa yang sedang dialami oleh masyarakat. Perubahan sosial yang secara terus menerus terjadi secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada. Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan di mana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari aspek lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual.

A. Apa itu Kesejahteraan?

Kata 'kesejahteraan' memiliki banyak pengertian, bergantung kepada orang yang akan menafsirkannya. Perbedaan tersebut akibat latar belakang penafsir. Seorang ahli ekonomi, tentu akan berbeda pandangan dengan para politisi, ahli filsafat, analis kebijakan, dan pengamat sosial. Karena lanskap kesejahteraan yang multidimensional para ahli melakukan pemetaan dan membuat peta sendiri tentang kaitan fitur kesejahteraan dengan dimensi lain. Hingga hari ini para ahli menyepakati bahwa fitur utama kesejahteraan terdiri dari hak, kebutuhan, kesetaraan, dan keadilan. Dalam perkembangannya ada

kesepakatan tidak tertulis bahwa sejahtera (*well-being*), merujuk kepada suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan material dan non material manusia. Karenanya, kesejahteraan dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materiil, spiritual, dan sosial sehingga akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya.

Kata kesejahteraan secara historis dikaitkan dengan kebahagiaan dan kemakmuran, sedangkan pengertiannya pertama kali muncul pada abad ke-20 (Williams, 1976). Konsep kesejahteraan harus dipahami dalam konteks historis dan budaya yang melekat padanya. Pemerhati Negara Kesejahteraan memiliki cara pandang tersendiri tentang pendekatan kesejahteraan dan banyak referensi yang mereka gunakan untuk memahami kesejahteraan, tetapi ini hanya berhubungan dengan kata lain, yaitu asimetri, institusi, reformasi, rezim, dan negara (Pierson & Castles, 2006). "Kesejahteraan" juga memiliki konotasi yang berbeda, tergantung kepada orang akan menggunakan pendekatan apa untuk memahaminya, apakah dari perspektif ekonomi atau sosiologis atau kebijakan sosial untuk mendefinisikan kesejahteraan.

Kesejahteraan dapat dikaitkan dengan dua hal, baik dengan individu maupun dengan tindakan kolektif yang melibatkan kebutuhan material dan immaterial. Selain itu, juga sering dihubungkan dengan berbagai interpretasi keadilan sosial (George dan Page, 1995). "Kesejahteraan" termasuk tindakan altruisme, saluran untuk mengejar kepentingan diri sendiri, pelaksanaan otoritas, transisi ke pekerjaan, dan regenerasi moral (Deacon, 1992). Kesejahteraan juga telah ditafsirkan secara terbatas dengan melihatnya hanya secara biologis, misalnya, berapa banyak kalori yang dibutuhkan untuk bertahan hidup (Spicker: 1995). Kesejahteraan, bagi orang lain, adalah "fitur utama dari moralitas akal sehat kita" (Sumner, 1996).

Dalam pendekatan internasional, kesejahteraan dikaitkan dengan kesejahteraan dalam hal investasi sosial yang dilakukan oleh negara, transisi pasar tenaga kerja, skema tabungan untuk hari tua, divisi kesejahteraan ala Titmuss, kepentingan diri ala Murray, dan penguatan Manajemen Publik Baru (*New Public Management*) dalam hal kompetisi dan individualisme. Bahkan dalam kajian terbaru yang dilakukan oleh

para ahli, masalah kebahagiaan juga telah dimasukkan ke dalam perdebatan tentang kesejahteraan (Easterlin, 2001). George & Page (1995), mencoba membuat daftar baru dalam tulisannya tentang pemikiran Kesejahteraan modern dengan memasukkan item hak asasi, ideologi jalan tengah, sosialisme demokratis, marxisme, Feminisme, lingkungan yang berkelanjutan pasca industri, dan Ras/Anti Rasisme.

Dalam pandangan ekonomi, secara historis, konsep kesejahteraan sulit untuk diurai. "Cukup memadai untuk meletakkan dua proposisi dogmatis; pertama, bahwa unsur-unsur kesejahteraan adalah keadaan kesadaran dan, mungkin hubungannya; kedua, kesejahteraan itu dapat dimasukkan ke dalam kategori yang lebih besar maupun yang lebih kecil" (Pigou, 1950). Dalam teori ekonomi umum, kesejahteraan tampaknya hanyalah kata lain dari utilitas. Seperti yang ditulis oleh Van Praag dalam kritiknya terhadap konsep utilitas, menurutnya beberapa konsep tidak jelas atau setidaknya susah untuk dipahami dengan baik: "contoh utama adalah konsep kesejahteraan atau utilitas" (Van Praag, 1993). Atau, sederhananya "kesejahteraan itu merupakan evaluasi yang diberikan oleh individu terhadap pendapatan atau, secara umum, kontribusi terhadap kesejahteraan kita dari barang dan jasa yang dapat kita beli dengan uang" (Van Praag dan Frijerts, 1999). Sementara dalam pandangan Tinbergen (1991), kesejahteraan (dianggap identik dengan utilitas atau kepuasan) yang dapat diukur.

Dalam bidang ekonomi, kesejahteraan terkait dengan persepsi dan utilitas dari penggunaan pendapatan individu. Ini juga membuatnya sangat sulit untuk mengukur kesejahteraan di tingkatan makro, karena evaluasi individu terhadap utilitas yang diperoleh dari pendapatan akan berbeda, tetapi sering kali pilihan konsumen seperti tercermin oleh pasar sebagaimana digunakan sebagai *proxy* dan ini menjelaskan mengapa pendapatan per-kapita dipandang sebagai indikator yang bagus. Pendekatan menggunakan utilitas individu juga dapat menjadi bagian dari penjelasan mengapa sejauh ini belum memungkinkan untuk membentuk satu jenis fungsi kesejahteraan masyarakat yang jelas dan tunggal. Kesejahteraan individu mengacu pada tingkat mikro dan bagaimana utilitas dapat dinilai dengan pilihan yang dibuat oleh individu. Kesejahteraan sosial mengacu

pada jumlah semua kesejahteraan yang dimiliki individu dalam suatu masyarakat (Walker, 2005).

Kaitannya dengan ekonomi, Panich (2007), merujuk pendapatnya Ricardo (1817), aspek penting kesejahteraan adalah "jalan di mana keuntungan dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan". Jadi uang bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai kesejahteraan. Hal tersebutlah yang kemudian digunakan untuk memperdebatkan interpretasi kesejahteraan secara lebih luas, seperti pendapatan perkapita, rasio pendapatan, indeks pendapatan Gini, garis kemiskinan, probabilitas kematian sebelum usia 60 tahun, obesitas, kurangnya keterampilan baca tulis, indeks keamanan ekonomi, indeks persepsi korupsi, dan kepercayaan sosial.

Dalam pandangan sosiologi istilah kesejahteraan digunakan untuk merujuk pada tujuan sistem jaminan sosial dan untuk mengukur kinerja sistem, skema atau program. Perbedaan dibuat antara, kesejahteraan individu dan keluarga, serta perbedaan antara kesejahteraan individu dan masyarakat sebagai keseluruhan (Walker, 2005). Kadang-kadang, konsep tersebut digunakan dengan merujuk pada seperangkat instrumen, dengan demikian "Istilah kesejahteraan digunakan untuk merujuk pada tujuan sistem jaminan sosial dan untuk mengukur kinerja sistem, skema atau program. Perbedaan dibuat antara, pertama, kesejahteraan atau kesejahteraan individu dan keluarga, serta kedua, antara kesejahteraan individu dan masyarakat sebagai keseluruhan" (Walker, 2005). Dalam teori sosiologis, "bentuk kesejahteraan yang paling dasar berarti kesejahteraan" (Walker, 1997). Dalam waktu yang lama, telah ada tujuan untuk memberikan nilai pada pengalaman individu sedemikian rupa sehingga "kesejahteraan adalah sejumlah kesejahteraan yang dimiliki individu" (Fleming, 1952).

Terlepas dari kenyataan bahwa Fleming (1952) melihat "kesejahteraan sebagai konsep yang etis" dan, oleh karena itu, juga berakhir dengan definisi yang agak kabur: bahwa "kesejahteraan berhubungan dengan berbagai situasi, sejahtera berhubungan dengan berbagai momen individu" (Fleming, 1952). Akibatnya, interpretasi kesejahteraan pun meluas. Bahkan kesejahteraan dijadikan sebagai cara untuk bahagia. "Saya menggunakan istilah kebahagiaan, kesejahteraan subjektif,

kepuasan, utilitas, sejahtera dan kesejahteraan secara bergantian” (Easterlin, 2001). Dengan demikian, dalam pemahaman ini, sejahtera adalah konsep yang lebih sempit daripada kesejahteraan yang juga mencakup aspek yang lebih luas seperti kepuasan, kualitas pekerjaan, kesehatan, kepemilikan, dan lain-lain. Di beberapa negara Nordik, aspek-aspek ini sering dimasukkan dalam penelitian sebagai indikator sosial.

Sementara dalam perspektif kebijakan sosial, Titmuss (1986), mendefinisikan kesejahteraan sebagai semua layanan publik yang disediakan, disubsidi, bersifat wajib, berkaitan dengan pekerjaan dan fiskal. Masih menurut Titmuss (1987), kesejahteraan berkaitan dengan pekerjaan individu. Kesejahteraan yang berkaitan dengan kerja menurut Titmuss meliputi urusan tunjangan pensiunan untuk karyawan, tanggungan untuk istri, tunjangan untuk anak, tunjangan kematian, layanan kesehatan, pengeluaran pribadi untuk biaya perjalanan, hiburan, akomodasi tempat tinggal, biaya sekolah anak-anak, makanan murah, tunjangan pengangguran, tagihan biaya kesehatan dan beragam jenis manfaat yang tak terhitung.

Dari gambaran di atas maka kita bisa menarik kesimpulan, bahwa untuk membuat definisi yang utuh tentang kesejahteraan sangatlah sulit. Mengingat kesejahteraan sangat variatif, bergantung kepada konteks dan setting sosialnya. Seperti yang diutarakan oleh Greve (2008), bahwa Konsep Kesejahteraan belum jelas. Konsep kesejahteraan memiliki banyak elemen, berhubungan dengan berbagai ide yang muncul dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan metodologis ilmu pengetahuan, seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, dan filsafat. Cara memahami tentang kesejahteraan harus melalui kemampuan dan kemauan untuk terbuka dengan berbagai variabel yang mempengaruhi individu untuk sejahtera. Karenanya jarang sekali terminologi kesejahteraan digunakan sendirian. Terutama ketika seseorang menghubungkan konsep kesejahteraan dengan konsep negara. Hari ini kita sepakat bahwa peran negara salah satunya membantu anggota masyarakat untuk memiliki kehidupan yang baik melalui pengambilan keputusan politis (kebijakan), misalnya, pembiayaan, pemberian layanan sosial dan transfer pendapatan untuk kepentingan sosial.

Maka, secara garis besar, kesejahteraan atau sejahtera dapat mempunyai beberapa makna, yakni:

- 1) Pandangan umum; Sejahtera menunjuk pada sebuah keadaan (kondisi) manusia yang baik, berada dalam kondisi makmur, sehat, dan damai.
- 2) Pandangan Ekonomi; sejahtera berhubungan dengan keuntungan finansial atau manfaat kebendaan (materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (secara formatif dan substantif bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi).
- 3) Pandangan kebijakan sosial; kesejahteraan sosial merujuk kepada keterjangkauan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*welfare state*).
- 4) Pandangan lain (misal: fenomena kebijakan di negara maju seperti Amerika), sejahtera merujuk pada aspek keuangan (finansial) yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau orang yang berada dalam kondisi memiliki pendapatan namun pendapatannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Merujuk pendapat Poerwadarminta (1990), sejahtera diartikan sebagai keadaan (kondisi) yang aman, sentosa, dan makmur. Maka syarat seseorang untuk menjadi makmur harus aman, selamat dan makmur. Namun, dalam ruang lingkup sosial, kesejahteraan berkaitan dengan sektor pembangunan sosial atau pembangunan kesejahteraan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan. Kebijakan pembangunan kesejahteraan pada umumnya menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, keterlantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila, dan kenakalan remaja. Sebagai konsekuensinya, pengertian kebijakan kesejahteraan acapkali dimaknai sebagai aktivitas amal atau bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah bagi yang membutuhkan. Bantuan diberikan kepada mereka yang memiliki tingkat harapan hidup (*expectation of*

life) rendah, tingkat pendidikan (*literacy, education* rendah), dan tingkat pendapatan (*income*) rendah.

B. Sejarah Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan (tindakan) pertolongan sosial telah ada sejak masa masyarakat primitif. Dalam banyak literatur, disebutkan bahwa kesejahteraan sosial telah mengakar lama dalam tradisi China, India, Mesir Kuno, Yunani, dan Yahudi. Kesejahteraan sosial kemudian populer dalam tradisi Eropa. Inggris misalnya, mengembangkan kesejahteraan sosial sejak awal pada Abad Pertengahan dalam berbagai kegiatan gereja. Kemudian, lahirlah Magna Charta (1215) yang menjadi dasar jaminan perlindungan rakyat Inggris. Beberapa tahun kemudian pasca Magna Charta, pada tahun 1601, muncul akta *Elizabethan Poor Laws* yang merupakan undang-undang bantuan kepada orang miskin.

Setelah terjadinya revolusi industri yang berlangsung antara tahun 1750-1840, muncul kebijakan *The Poor Law Reform* (1834) dan pembentukan *The Poor Law Commission* (1905). Selanjutnya muncul gerakan-gerakan amal dan diikuti kesadaran untuk memberikan bantuan secara profesional sehingga latihan dan pendidikan untuk kesejahteraan sosial didirikan. Di Amerika Serikat, usaha kesejahteraan sosial pertama kali diwujudkan saat *Almshouses* (1662) didirikan untuk menyantuni orang miskin di Massachusetts. Kemudian muncul *National Labour Relation Act* atau Undang-Undang Kesejahteraan Buruh pada 1935.

Secara akademik, pendidikan kesejahteraan sosial pertama kali berdiri pada 1898 dengan nama *New York School of Social Work*, yang kemudian pada 1940 menjadi *Columbia University School of Social Work*. Sementara di Indonesia, menurut Praptokoesoemo, kesejahteraan sosial sebagai kegiatan pelayanan telah dimulai pada zaman kolonial Belanda. Pada *Statsblad* 1934 No. 26 jo. *Statsblad* 1939 No. 255, ditentukan bahwa pengaturan santunan kepada fakir miskin termasuk urusan rumah tangga pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa, Madura, dan beberapa daerah di luar Jawa. Pada masa penja-

jahan Jepang, Departemen Dalam Negerinya mempunyai bagian Koseika atau bagian sosial dalam Kantor Perburuhan atau Komukyoku.

Setelah Indonesia merdeka, kesejahteraan sosial bermula ketika pendirian Departemen Sosial pada 19 Agustus 1945 dengan urusan fakir-miskin dan anak terlantar sesuai pasal 34 UUD 1945. Kesejahteraan sosial semakin berkembang ketika dikeluarkan UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang kemudian diperbaiki dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

C. Kesejahteraan Sosial dan Negara Kesejahteraan

Kehidupan sejahtera adalah kehidupan yang didambakan oleh semua manusia, tanpa memandang perbedaan agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Namun, tidak selalu kehidupan sejahtera yang didambakan itu, dapat diraih oleh semua orang. Untuk itulah diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari setiap individu untuk menggapai kehidupan sejahtera yang diidamkannya. Negara berperan memfasilitasi dan menjamin setiap warga secara adil untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.

Seperti yang kita ketahui bahwa Negara kesejahteraan adalah bentuk pemerintahan di mana negara melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara, berdasarkan pada prinsip-prinsip kesempatan yang sama, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab publik untuk warga negara yang tidak dapat memanfaatkan diri mereka sendiri dari ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik.

Di era modern, kesejahteraan sosial sering diartikan dengan makna yang sangat luas, termasuk di dalamnya tentang penyediaan pendidikan, kesehatan, perumahan dan bantuan untuk publik (Kwok, 2003). Maka ini sangat erat kaitannya dengan konsepsi negara kesejahteraan. Dalam negara kesejahteraan yang ideal, pemerintah memainkan peranan penting dalam memberikan perlindungan dan promosi ekonomi serta kesejahteraan sosial bagi warganya berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, kesempatan yang adil, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab publik bagi mereka yang

tidak mampu untuk di dorong agar mencapai standar kehidupan minimal (wajar).

D. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan utama kesejahteraan adalah dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera, dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesejahteraan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Tujuan lainnya adalah untuk mencapai taraf penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk menyediakan layanan kepada kelompok-kelompok lemah dari populasi. Seperti individu yang mengalami kondisi cacat fisik, mental, ekonomi dan sosial serta masyarakat yang secara tradisional telah kehilangan layanan ini (tidak dapat untuk memanfaatkan layanan sosial yang disediakan oleh masyarakat atau negara).

Schneiderman (1972), mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial, diantaranya:

1) Pemeliharaan sistem.

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, dan peranan pria dan wanita; norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan lain-lain.

Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dari kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui

pemberian informasi, nasihat, dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Kegiatan lain adalah kompensasi terhadap kekurangan sistem, berupa melengkapi atau mengganti tatanan sosial lain seperti keluarga, pasar, sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan sebagainya, sementara tatanan sosial pokok pada dasarnya tidak berubah. Termasuk juga dalam kegiatan ini, bantuan keuangan dan pembayaran jaminan sosial untuk meningkatkan daya beli, guna terpeliharanya ekonomi secara keseluruhan. Kompensasi ini sifatnya temporal.

2) Pengawasan sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok remaja dan kelompok lain dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan diri sendiri (*self-control*) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab masalah yang sesungguhnya. Di samping itu, dapat pula dipergunakan saluran-saluran dan batasan-batasan hukum guna meningkatkan pengawasan eksternal (*external-control*) terhadap penyimpangan tingkah laku misalnya orang tua yang menelantarkan anaknya, kejahatan, kenakalan remaja, dan sebagainya.

3) Perubahan sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

Zastrow (1986), mengemukakan bahwa tujuan dari Kesejahteraan Sosial antara lain:

- a) Menampung anak-anak yatim piatu.
- b) Merehabilitasi orang-orang yang ketergantungan terhadap alkohol dan psikotropika.
- c) Merawat mereka yang mengalami kesulitan dalam emosional (gangguan jiwa).
- d) Membuat hidup lebih bermakna bagi para lansia.
- e) Menyediakan layanan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik dan mental.
- f) Memenuhi kebutuhan keuangan yang buruk.
- g) Merahabilitasi anak-anak dan orang dewasa yang melakukan kejahatan kriminal.
- h) Mengakhiri berbagai macam bentuk diskriminasi dan penganiayaan.
- i) Memberikan layanan bagi veteran, termasuk orang-orang yang menderita cedera traumatis otak atau gangguan stress.
- j) Menyediakan pelayanan tempat penitipan anak bagi orang tua yang bekerja di luar rumah.
- k) Menghilangkan kekerasan dalam keluarga termasuk kekerasan anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- l) Menyediakan pelayanan bagi penderita AIDS dan bagi keluarga serta kerabatnya.
- m) Mendidik dan menyediakan pengalaman-pengalaman dan bersosialisasi bagi anak-anak penyandang disabilitas kognitif (keterbatasan mental).
- n) Menyediakan pelayanan-pelayanan rekreasi serta waktu luang bagi segala usia.

Sementara Mendoza (dalam Rukminto, 1994), menyebutkan ada tiga tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial (yang pada umumnya berhubungan dengan upaya memperoleh sumber daya yang terbatas). Pertama, Tujuan yang bersifat kemanusiaan dan keadilan sosial (*humanitarian and social justice goals*). Tujuan kesejah-

teraan sosial ini berakar dari gagasan ideal demokratis mengenai keadilan sosial. Hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Meskipun potensi tersebut kadang kala tertutup karena adanya hambatan fisik, sosial, ekonomi, psikis, dan berbagai faktor lainnya yang menghambat dirinya untuk mengenali potensi yang ia miliki. Berdasarkan tujuan ini, usaha kesejahteraan sosial banyak diarahkan pada upaya mengidentifikasi kelompok yang paling mempunyai ketergantungan; kelompok yang paling terlantar; ataupun kelompok yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, dan menjadikan mereka kelompok sasaran dalam kaitannya dengan upaya menjembatani sumber daya yang langka.

Kedua, tujuan yang berkaitan dengan pengendalian sosial (*social control goal*). Tujuan ini berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan; kekurangan; ataupun tidak terpenuhi kebutuhannya dapat melakukan “serangan” (baik secara individu atau kelompok) terhadap masyarakat (terutama yang sudah mapan). Oleh karena itu masyarakat tersebut harus berupaya untuk “mengamankan” diri dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan; pemilikan; maupun stabilitas politik yang sudah berjalan. “Ancaman” seperti ini biasanya dimunculkan oleh kelompok yang kurang mempunyai kesempatan dan sumber daya untuk mendapatkan taraf hidup yang memadai. Usaha kesejahteraan sosial yang diberikan pada pelaku “kejahatan” baik remaja maupun dewasa merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pengendalian sosial dari kesejahteraan sosial.

Ketiga, tujuan yang terkait dengan tujuan pembangunan ekonomi (*Economic Development Goal*). Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan pelayanan yang diberikan, ataupun berbagai sumber daya lain yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi. Penerima manfaat langsung dari program semacam itu mungkin adalah anggota masyarakat yang berbadan sehat dan relatif lebih baik. Contoh layanan sosial yang mengejar tujuan pembangunan ekonomi adalah:

1. Layanan sosial yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas di antara individu, kelompok, dan masyarakat, seperti layanan konseling untuk kaum muda dan untuk penyesuaian pekerja ke lingkungan industri; layanan dan fasilitas kesejahteraan buruh; layanan untuk rehabilitasi pekerja cacat; pelatihan keterampilan bagi para penganggur dan layanan sosial terpadu yang menganggur bagi para petani.
2. Layanan sosial yang mencegah atau meringankan beban ketergantungan pada pekerja dewasa dari tanggungan seperti sangat muda maupun sangat tua, sakit, cacat, dll. Yang dapat menghambat produktivitas mereka. Contohnya adalah pusat penitipan anak, rumah jompo, klinik kesehatan dan pusat rehabilitasi.
3. Layanan sosial yang mencegah atau menangkal dampak gangguan urbanisasi dan industrialisasi pada kehidupan keluarga dan masyarakat, dan membantu mengidentifikasi dan mengembangkan kepemimpinan lokal di masyarakat. Contohnya adalah layanan pendidikan kehidupan keluarga, program pelatihan kepemimpinan, dan berbagai jenis layanan masyarakat yang meningkatkan atau mengembangkan kemandirian dan karena itu mempromosikan kapasitas masyarakat sendiri untuk menyelesaikan masalah.

Jika dilihat dari pemaparan di atas maka tujuan kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan untuk semua, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh manusia, membantu memenuhi hak-hak dasar manusia, membantu manusia agar bisa berperan dalam masyarakat, memberikan bantuan untuk orang miskin dan rentan, pengembangan lingkungan yang mendukung, mitigasi masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan Perubahan sosial. Selain itu, kesejahteraan sosial juga berkaitan dengan usaha untuk mengembangkan hubungan sosial, melakukan kontrol sosial, melakukan pemberdayaan terhadap kelas bawah dalam masyarakat, sebagai bantuan untuk melakukan sosialisasi, distribusi sumber daya dan fasilitas, dan memperbaiki pola serta peran orang-orang di dalam masyarakat.

E. Pentingnya Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan kesejahteraan sosial menjadi penting karena dua alasan utama. Pertama, kebijakan ini penting bagi semua orang yang bisa mengambil manfaat darinya. Selain itu, kebijakan ini dapat membantu negara untuk membantu mereka yang membutuhkan kesejahteraan. Dalam banyak hal, negara kadang kala memiliki jumlah orang miskin yang tidak sedikit. Dengan adanya kebijakan ini, mereka dapat mengambil manfaat dari program kesejahteraan sosial yang tersedia dan dikelola dengan baik. Kebijakan ini bisa membantu mereka yang membutuhkan untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapinya. Pada saat yang sama, ini juga dapat bermanfaat bagi seluruh sistem sosial masyarakat. Lebih sedikit jumlah orang miskin maka akan berdampak pada pengurangan masalah-masalah sosial, seperti kejahatan kriminal dan penyalahgunaan obat-obat terlarang (*drugs*). Semakin banyak orang yang berada dalam kalangan kelas menengah maka akan semakin mendorong laju pertumbuhan perekonomian negara.

Kedua, kebijakan kesejahteraan sosial penting karena pemerintah kita sering kali kekurangan uang (defisit). Sering kali dalam kondisi tertentu negara mengalami masalah fiskal yang serius dan akut. Bahkan tak jarang pemerintahan sebuah negara hampir setiap tahun harus mengalami defisit besar. Harapannya dengan ada kebijakan tersebut, warga negara bisa memastikan bahwa mereka (negara) benar-benar berfungsi sehingga mereka tidak bekerja hanya untuk membuang-buang uang negara (pemborosan). Kebijakan kesejahteraan sosial bisa menjadi pengaman yang efektif jika negara dalam kondisi kritis.

F. Sistem Kesejahteraan Sosial

Sistem kesejahteraan sosial adalah usaha untuk memberikan bantuan kepada individu dan keluarga yang membutuhkan. Jenis dan jumlah bantuan kesejahteraan yang tersedia untuk individu dan keluarga bervariasi tergantung kepada kebijakan atau wilayah. Bantuan sistem kesejahteraan sosial untuk individu dan keluarga bisa melalui program-program seperti perawatan kesehatan, kupon

makanan, kompensasi untuk pengangguran, bantuan perumahan dan bantuan perawatan anak.

Manfaat yang tersedia untuk individu mungkin saja berbeda-beda di setiap negara. Kelayakan ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang melingkupi status keuangan individu tersebut dan bagaimana hubungannya dengan tingkat pendapatan minimum yang dapat diterima di sebuah negara. Bisa jadi faktor-faktor yang terlibat dapat mencakup ukuran unit keluarga, tingkat pendapatan saat ini atau kondisi cacat yang sedang dialaminya.

Di masing-masing negara, sistem kesejahteraan sosial mungkin menggunakan nama yang berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya mereka melakukan praktek dan menjalankan fungsi yang sama. Persyaratan untuk memenuhi syarat juga bervariasi, tergantung pada kondisi garis kemiskinan di negara yang bersangkutan. Sehingga bisa memungkinkan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan hal-hal yang berlaku di negara bersangkutan, seperti biaya hidup standarnya berbeda-beda di setiap negara.

G. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial adalah mengorganisasi dari adanya disorganisasi. Sistem kesejahteraan sosial merupakan subsistem dari masyarakat yang lebih besar yang memberikan sanksi-sanksi dan dukungan terhadapnya. Sebagai sub-sistem, kesejahteraan sosial mempunyai fungsi khusus yakni mengatasi masalah yang ada kaitannya dengan penyesuaian-penyesuaian sosial dan relasi-relasi sosial.

Penerapan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Di negara-negara maju fungsi kesejahteraan sosial berhubungan dengan perubahan-perubahan yang dialami perorangan. Sedangkan di beberapa negara berkembang atau sedang membangun, fungsi kesejahteraan sosial lebih ditujukan kepada penanggulangan masalah-masalah sosial yang mendesak dan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, dan memenuhi kebutuhan langsung yang dapat dinikmati masyarakat.

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi-fungsi tertentu sebagai alat aplikatif untuk mewujudkan kesejahteraan. Menurut Friedlander dan Apte, (1982) ada empat fungsi kesejahteraan sosial, diantaranya:

1. Berfungsi sebagai pencegahan (*Preventive*); yaitu memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru. Dalam hal ini meliputi langkah-langkah untuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial yang baru, juga langkah-langkah untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.
2. Berfungsi sebagai penyembuhan dan pemulihan (*Curative/Remedial/Rehabilitative*); yaitu menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi). Fungsi ini bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada. Di samping fungsi penyembuhan ada fungsi pemulihan (rehabilitatif) terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali dari dalam diri orang maupun anggota masyarakat. Fungsi penyembuhan dapat bersifat repressif (menekan) agar masalah sosial yang timbul tidak makin parah dan tidak menjalar.
3. Berfungsi sebagai pengembangan (*Development, Promotive*); yaitu memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. Bertujuan untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat lebih meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup secara konkret.
4. Berfungsi sebagai penunjang (*Supportive*); yaitu kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Fungsi ini menopang usaha lain agar dapat lebih berkembang meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan, program-program lainnya seperti

bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa fungsi-fungsi kesejahteraan sosial sejatinya bertujuan untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat, serta berfungsi untuk menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif terhadap pembangunan serta sebagai cara untuk menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat

H. Komponen Kesejahteraan Sosial

Semua usaha kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan lain, yaitu:

- 1) Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi yang formal pula.
- 2) Mobilisasi dana dan sumber bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Kesejahteraan sosial memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, tidak hanya dari satu aspek saja. Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metode pekerjaan sosial.
- 4) Pelayanan kesejahteraan sosial ditunjang oleh Undang-undang.
- 5) Usaha kesejahteraan sosial melibatkan peran serta masyarakat.
- 6) Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat.

I. Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Menurut Midgley (1997), terdapat beberapa pendekatan dalam mengupayakan kesejahteraan sosial:

1. *Filantropi sosial*

Filantropi berkaitan erat dengan upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pendeta dan relawan, kegiatan amal (*charity*), di mana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan energi untuk membantu orang lain. Pelakunya dikenal sebagai filantropis. Filantropi sosial bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan mendorong penyediaan barang pribadi dan jasa kepada orang yang membutuhkan.

Ada beberapa karakteristik dari pendekatan filantropi sosial, di antaranya:

- a) Amal, di mana pendekatan ini tidak memiliki kesinambungan. Artinya, tidak ada interaksi dengan penerima manfaat ketika bantuan selesai diberikan.
 - b) Penerima pasif, menggunakan pandangan bahwa orang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, sehingga pelaksanaannya tidak melibatkan partisipasi penerima.
 - c) Acak, tidak memiliki metode atau fase tertentu dalam pelaksanaannya.
 - d) Kemauan, ketergantungan bisnis pada niat baik dari donor dan kemauan pemerintah untuk menggunakan uang pembayar pajak untuk mendukung badan amal.
- ### 2. *Pekerja Sosial*

Berbeda dengan pendekatan filantropi, pekerjaan sosial adalah pendekatan yang terorganisasi untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan profesional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah-masalah sosial. Namun, perkembangan pekerjaan sosial tidak dapat dipisahkan dari perkembangan filantropi. Sejak abad ke-19, telah mengalami pengembangan profesional dan pekerjaan sosial akademik cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

3. *Administrasi Sosial*

Pendekatan administrasi sosial berusaha untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan program-program sosial pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan warganya melalui penyediaan layanan sosial. Pendekatan ini diadakan lang-

sung oleh pemerintah. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah hukum kemiskinan dikeluarkan oleh Ratu Elizabeth I.

J. Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan kesejahteraan Sosial adalah cara masyarakat merespons atau tidak merespons kebutuhan sosialnya. Kamus Webster mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip, rencana, atau tindakan apapun yang memandu dan mengatur pilihan dan kegiatan berbagai lembaga masyarakat. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah salah satu jenis kebijakan publik. Kebijakan publik terdiri dari prinsip, rencana, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atas nama masyarakat luas. Secara khusus, kebijakan kesejahteraan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan sosial, khususnya program atau peraturan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarga secara memadai melalui sistem pasar. Bidang-bidang penting dari kebijakan sosial adalah kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, jaminan sosial, keadilan, asuransi untuk pengangguran, kemiskinan, urusan pensiunan, perawatan kesehatan, perumahan sosial, kebijakan perlindungan untuk keluarga, perawatan sosial, perlindungan untuk anak, masalah keterasingan sosial, kebijakan pendidikan, masalah kejahatan dan peradilan pidana, serta masalah sosial perkotaan. Maknanya, kebijakan sosial merupakan proses terencana dan terstruktur yang dijalankan oleh pihak yang memiliki otoritas tertentu untuk mencapai tujuan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan sosial.

Sebagai bagian dari kebijakan sosial yang mengatur pemberian manfaat kepada orang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dasar. Kebijakan kesejahteraan sosial mengacu pada prinsip, kegiatan, atau kerangka kerja terkait tindakan yang akan diadopsi oleh pemerintah untuk memastikan tingkat kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat yang ditentukan secara sosial. Karena itu, kesejahteraan sosial, bisa juga dikatakan sebagai intervensi kolektif yang dibuat untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umum dengan menetapkan satu set ukuran tingkat penghasilan masyarakat. Dari

ukuran tersebut, kesejahteraan sosial bisa diarahkan secara khusus untuk individu yang membutuhkan.

Selain sebagai bagian dari kebijakan sosial, kebijakan kesejahteraan juga sebagai sistem hukum, program, dan manfaat yang terorganisir serta layanan yang membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar kehidupan yang memuaskan, kesehatan, dan hubungan yang diperlukan untuk mengembangkan kapasitas penuh mereka. Di tingkatan dasar, kebijakan kesejahteraan sosial muncul dalam berbagai bentuk program kesejahteraan sosial — manfaat dan layanan — yang digunakan setiap hari oleh individu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan-kebutuhan ini termasuk keamanan pendapatan, kesehatan, pendidikan, nutrisi, pekerjaan, perumahan, rasa memiliki, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Gambar 9. Hubungan Antara Kebijakan Publik, Kebijakan Sosial, dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial



DiNitto dan Johnson (2016), mendefinisikan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindakan, hukum, dan aturan yang membantu meningkatkan kehidupan orang-orang di masyarakat. Kebijakan sosial merupakan pilihan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi kualitas hidup. Di dalamnya terdapat tindakan pemerintah, kelambanan pemerintah, bantuan publik, asuransi sosial, dan layanan sosial. Singkatnya, kebijakan kesejahteraan sosial dapat dianggap sebagai respons publik

terhadap masalah yang mau ditangani oleh masyarakat atau oleh lembaga sosial yang terdiri dari program dan layanan yang didanai oleh pemerintah. Dalam program tersebut ada target dan panduan intervensi yang akan dilakukan dalam penyediaan program kesejahteraan sosial.

Menurut Colby (2014), dalam bentuknya yang paling mendasar, kebijakan sosial menggabungkan lima karakteristik utama. Pertama, kebijakan adalah ekspresi formal dari nilai, prinsip, dan kepercayaan komunitas. Kedua, nilai-nilai, prinsip, dan keyakinan ini menjadi kenyataan melalui program dan layanan yang dihasilkannya. Ketiga, kebijakan memberikan legitimasi dan sanksi bagi organisasi untuk menyediakan program atau layanan tertentu. Keempat, kebijakan menawarkan peta jalan bagi organisasi untuk mewujudkan misinya. Kelima, kebijakan menciptakan kerangka struktural yang luas untuk memandu praktisi dalam peran profesionalnya.

Meskipun tentang kebijakan kesejahteraan sosial tidak didefinisikan secara khusus, dalam *The Social Work Dictionary* (Barker, 2003), secara konseptual lebih baik dianggap sebagai bagian dari arena kebijakan sosial yang lebih besar. Kebijakan telah secara resmi didefinisikan sebagai "rencana yang secara eksplisit maupun implisit digunakan oleh organisasi atau pemerintah sebagai panduan untuk melakukan tindakan" (Barker, 2003). Kebijakan menetapkan seperangkat prosedur program khusus (Baumheier & Schorr, 1977), termasuk semua kegiatan publik (Zimmerman, 1979), dan mempertimbangkan distribusi sumber daya dan pengaruhnya terhadap "kesejahteraan sosial masyarakat" (Dear, 1995). Fungsi utama kebijakan adalah untuk membuat rencana aksi, juga, seperti yang ditulis Titmuss (1966), mengarahkan perhatian pada "masalah yang pasti".

Kebijakan mencerminkan pilihan pemerintah atau lembaga non-pemerintah (misalnya, lembaga layanan sosial nirlaba). Seperti pilihan yang terkait dengan cara membangun nilai, kepercayaan, dan prinsip; programnya bervariasi, baik dalam bentuk maupun fungsi layanannya. Mulai dari yang minimal, terbatas, komprehensif dan luas. Wilensky dan Lebeaux (1965), dalam karya klasik mereka *Industrial Society and Social Welfare*, merinci secara mendetail kerangka kerja kebijakan

sosial dan menangkap adanya perbedaan-perbedaan dalam kebijakan sosial. Menurutnya, model ini mencakup dua perspektif, yaitu residual dan institusional. Kerangka kerja residual mengkonseptualisasikan kesejahteraan sosial dalam istilah yang sempit, biasanya terbatas pada bantuan publik atau kebijakan yang berkaitan dengan orang miskin. Layanan residual membawa stigma; waktu yang terbatas, uji coba, dan berbasis kedaruratan. Pada umumnya layanan residual diberikan ketika semua bentuk bantuan lainnya tidak tersedia. Layanan kesejahteraan mulai berlaku hanya ketika semua sistem lain rusak atau terbukti tidak cukup memadai.

Sementara Kesejahteraan institusional, menurut model Wilensky dan Lebeaux (1965), adalah fungsi normal masyarakat yang mendukung kepentingan masyarakat luas dengan cara yang tidak menstigma. Layanan tersedia untuk semua orang dan bersifat universal serta komprehensif. Kesejahteraan model ini dirancang untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah sosial. Misalnya, program asuransi sosial, program untuk para veteran, pendidikan publik, peraturan tentang makanan (gizi), obat-obatan, dan perawatan kesehatan.

Dalam prakteknya kebijakan kesejahteraan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, bisa lembaga federal, negara, dan pemerintah lokal. Bahkan, tak jarang, kebijakan kesejahteraan sosial juga bisa dilakukan oleh lembaga swasta yang bekerja sama atau tidak bekerjasama dengan pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut bisa agensi kesukarelawanan yang tidak berorientasi profit atau agensi swasta yang berorientasi profit.

K. Keadilan dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Secara prinsip Kebijakan kesejahteraan sosial berakar pada teori-teori keadilan. Dalam praktiknya kebijakan yang efektif memerlukan adanya identifikasi, pemahaman, dan penilaian berbagai teori keadilan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi perkembangan posisi kebijakan. Teori keadilan sangat beragam dan banyak memunculkan berbagai perspektif tentang kondisi manusia. Seperti Rawls (1971) yang percaya bahwa kelahiran, status, dan keluarga adalah masalah kebetulan, yang seharusnya tidak memengaruhi atau

membiasakan manfaat yang diperoleh seseorang, dan keadilan sejati memungkinkan masyarakat memperbaiki ketidakadilannya dengan hasil akhirnya menghasilkan keadilan bagi semua pihak. Sebaliknya, Nozick (1974) dengan model libertarian pasar bebasnya mencoba mengadvokasi individu untuk dapat mempertahankan apa saja yang telah mereka hasilkan. Bagi Nozick (1974) "pendekatan peran pemerintah yang sedikit "adalah model terbaik, dan dia bertanya," Jika negara tidak ada akankah perlu untuk menemukannya? Apakah seseorang dibutuhkan, dan apakah itu harus diciptakan?". Sementara, Dworkin (2001) menyajikan prinsip-prinsip keadilan berbasis sumber daya. Miller (1976) membawa prinsip-prinsip keadilan melalui pendekatan *desert-based*. Begitu juga dengan Pateman (1988) dan Tong (1993) yang mengemukakan prinsip-prinsip feminis sebagai sumber keadilan dalam pelaksanaan keadilan dan kebijakan.

Menurut (Maiese, 2003) teori keadilan mempengaruhi kebijakan melalui salah satu dari empat model pendekatan keadilan, yakni distributif, prosedural, retributif, dan restoratif. Keadilan distributif mengacu pada model berbagi yang adil yang mengungkapkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan anggota masyarakat; ide-ide kesetaraan, kesetaraan, dan kebutuhan adalah pusat diskusi dalam distributif (Maiese, 2003). Sementara keadilan prosedural mempertimbangkan proses, di mana keputusan dibuat dan mengakui bahwa orang merasa dibenarkan jika proses menghasilkan perlakuan yang adil tidak peduli hasilnya (Deutsch, 2000). Sedangkan keadilan retributif, biasa disebut sebagai pendekatan "hidangan penutup". Dalam model ini, semua orang harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan orang lain dengan respon yang sebanding dengan tindakan asal (Maiese, 2004). Berbeda dengan tiga pendekatan di atas, keadilan restoratif memiliki fokus yang beragam, dengan fokus pada korban, pelaku, dan masyarakat, meskipun penekanannya ada pada korban (Maiese, 2003). Teori keadilan menawarkan berbagai perspektif tentang bagaimana cara orang atau masalah sosial dipandang. Teori keadilan mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan individu, kelompok, atau organisasi. Teori keadilan juga menciptakan alasan untuk mendukung inisiatif kebijakan tertentu (Colby, 2016). Oleh

sebab itu penting untuk memahami dengan seksama ke empat model pendekatan tersebut. Pemilihan pendekatan akan menentukan dan mempengaruhi model kebijakan kesejahteraan sosial.

L. Analisa Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Analisa kebijakan merupakan disiplin pengetahuan yang digunakan untuk membuat pemecahan masalah yang didasarkan pada teori-teori, metode, hal-hal yang substantif dari perilaku sosial, profesi sosial, dan filsafat ilmu sosial politik. Analisa kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks, sehingga cara mendefinisikannya juga beragam. Analisis kebijakan adalah proses penyelidikan multidisiplin yang disusun untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikan informasi yang berguna dalam memahami dan meningkatkan kebijakan. Analisa kebijakan sangat bergantung pada pengetahuan sosial dan metode penelitian sosial. Tidak menutup kemungkinan analisa sosial juga bisa memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan sosial itu sendiri.

Metodologi analisa kebijakan dapat dilihat sebagai proses penyelidikan yang dirancang untuk menemukan solusi bagi masalah-masalah praktis. Analisa kebijakan menggunakan berbagai macam kombinasi metodologi, yang pasti, metodologi analisa kebijakan didasarkan pada metode ilmiah. Analisis kebijakan juga bersandar pada seni, etos, dan persuasi. Analisa kebijakan didasarkan pada kombinasi dari pengetahuan biasa, akal sehat, dan bentuk pengetahuan khusus yang terkait dengan sains, profesi, dan humaniora. Namun, dalam semua kasus, analisis kebijakan adalah usaha pragmatis, karena melibatkan operasi pemahaman manusia dalam menyelesaikan masalah praktis. Karena orientasinya yang seperti itu, maka analisa kebijakan memiliki fitur tersendiri, sehingga berbeda dari disiplin ilmu lainnya yang hanya menghargai pengetahuan untuk kepentingannya sendiri.

Analisa kebijakan merupakan pengetahuan multidisiplin, di dalamnya ada metodologi, standar, aturan, dan prinsip yang memandu penggunaannya. Analisa kebijakan bisa mengacu secara bebas terhadap berbagai jenis disiplin ilmu pengetahuan. Prinsipnya, apapun ilmu

pengetahuan yang bisa digunakan sebagai rujukan, sejauh itu bisa menjadi cara untuk memecahkan masalah praktis (pengetahuan praktis), maka hal tersebut dapat menjadi kerangka analisa kebijakan. Pengetahuan yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu dan profesi biasanya lebih efektif dalam merespons masalah dunia nyata. Masalah dunia nyata tidak datang sendirian. Masalah dunia datang dalam bentuk yang sangat kompleks, bersifat politis, sosial, ekonomi, administratif, hukum, etis, dan banyak lagi. Masalah-masalah tersebut datang dalam paket yang terpisah-pisah namun berkaitan erat. Karena masalahnya yang kompleks, untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif maka diperlukan analisa kebijakan. Se jauh ini, analisis kebijakan multidisiplin tampaknya memberikan yang paling cocok dengan dunia pembuatan kebijakan publik yang kompleks dan banyak sisi.

Menurut Dunn (2004), Analisa kebijakan membahas lima jenis pertanyaan:

1. Apa sifat masalah yang hendak dicari solusinya?
2. Manakah dari dua atau lebih tindakan yang harus dipilih untuk menyelesaikan masalah?
3. Apa hasil dari memilih tindakan itu?
4. Jika mencapai hasil, apakah akan berkontribusi terhadap pemecahan masalah?
5. Apa hasil di masa depan yang bisa diharapkan jika tindakan lain dipilih?

Komponen-komponen di atas mewakili informasi tentang masalah kebijakan, kinerja kebijakan, hasil kebijakan yang diharapkan, kebijakan yang disukai, dan hasil kebijakan yang diamati (Dunn, 2004).

1. Masalah kebijakan

Merupakan hasil identifikasi nilai atau peluang yang belum direalisasikan untuk melakukan perbaikan melalui tindakan publik. Pengetahuan tentang masalah apa yang harus dipecahkan memerlukan informasi tentang kondisi pendahulunya. Informasi tentang masalah kebijakan memainkan peran penting dalam analisis kebijakan, karena cara mendefinisikan masalah mempengaruhi

pembuatan solusi yang tepat. Informasi yang tidak memadai atau salah dapat menyebabkan kesalahan fatal, karena hal tersebut tidak akan menghasilkan solusi yang baik, tepat, dan benar.

2. Hasil kebijakan yang diharapkan

Merupakan konsekuensi logis yang mungkin terjadi dari kebijakan yang telah dirancang sebelumnya untuk menyelesaikan masalah. Informasi tentang keadaan yang bisa menimbulkan masalah sangat penting untuk menghasilkan informasi tentang hasil kebijakan yang diharapkan. Namun, informasi semacam itu sering kali tidak memadai karena dinamika masalah yang sering berubah mengikuti waktunya. Untuk menghasilkan informasi seperti itu dibutuhkan kreativitas, wawasan, dan penggunaan pengetahuan.

3. Kebijakan yang disukai

Merupakan solusi potensial yang bisa digunakan untuk suatu masalah. Untuk memilih kebijakan yang disukai, perlu memiliki informasi tentang hasil kebijakan yang diharapkan. Informasi tentang kebijakan mana yang akan dipilih juga tergantung pada penilaian tentang nilai atau kegunaan dari hasil yang diharapkan. Sebutan lainnya adalah kebijakan yang direkomendasikan dengan didasarkan pada tempat, fakta, dan nilai.

4. Hasil kebijakan yang diamati

Merupakan konsekuensi dari penerapan kebijakan yang lebih disukai di masa lalu atau sekarang. Pentingnya mengamati hasil kebijakan merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh para analis, mengingat banyaknya konsekuensi yang tidak terduga yang timbul akibat pilihan kebijakan. Guna menangani pertanyaan semacam itu, informasi tentang konsekuensi tindakan dihasilkan melalui proses *ex ante* serta *ex post*.

5. Kinerja kebijakan

Sejauh mana hasil kebijakan yang diamati berkontribusi pada pencapaian nilai, sasaran, dan tujuan. Pengukuran kinerja kebijakan adalah untuk mengetahui apakah suatu masalah telah dipecahkan, diselesaikan, atau tidak terpecahkan sama sekali. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui apakah kebijakan telah berkontribusi pada pencapaian nilai-nilai, sasaran, atau sasaran yang semula

memunculkan masalah. Informasi tentang kinerja kebijakan memberikan dasar untuk memperkirakan hasil kebijakan yang diharapkan.

Analisa kebijakan memiliki elemen-elemen penting. Elemen tersebut diantaranya: 1) Mengidentifikasi, memahami, atau mengklarifikasi masalah. 2) Mengidentifikasi lokasi untuk mengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan. 3) Menentukan berbagai macam kemungkinan solusi (alternatif), dan 4) Memperkirakan atau memprediksi dampak yang dihasilkan dari solusi terhadap berbagai macam populasi yang berbeda-beda.

1. Identifikasi masalah.

Kebijakan memiliki sejumlah tujuan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita mengetahui adanya sebuah masalah, namun sulit untuk memetakan atau menempatkan beberapa batasan masalah. Cara mendefinisikan masalah biasanya akan menentukan bagaimana caranya masalah tersebut akan diselesaikan. Proses identifikasi akan melahirkan beberapa definisi, di mana salah satunya mungkin sangat sesuai dengan konteks masalah, sehingga mudah untuk dipahami dan bisa menyelesaikan masalah.

Proses identifikasi masalah memerlukan beberapa proses, di antaranya:

a) Menentukan asal masalah.

Mempelajari sejarah masalah, termasuk upaya yang dilakukan sebelumnya untuk mengatasinya. Menentukan asal usul suatu masalah, memisahkan, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah.

b) Menentukan ruang lingkup masalah.

Mengklarifikasi siapa yang terkena dampak masalah. Menentukan ruang lingkup masalah. Mengklarifikasi kelompok yang berinteraksi (saling berkaitan) dengan masalah. Menghitung seberapa besar dampak kerugiannya, dan seberapa besar manfaatnya.

c) Membuat sketsa titik jenuh masalah

Menentukan implikasi-implikasi bagi sektor masyarakat lainnya. Membuat sketsa tentang luasnya masalah, serta mengidentifikasi lembaga-lembaga sosial yang saat itu mungkin terkait langsung dengan masalah.

Membingkai masalah dengan cara di atas akan memberikan gambaran kepada analisis sosial tentang batasan-batasan masalah yang hendak dianalisis. Paling tidak, analisis sosial akan paham terkait batasan dan ruang lingkup masalah yang hendak dianalisis. Selain itu, pembingkai masalah juga dapat mengatur kondisi masalah yang akan dianalisis.

2. Menemukan fokus pengambilan keputusan untuk pembuatan kebijakan.

Analisis kebijakan terjadi di berbagai tempat selama berlangsungnya proses pembuatan kebijakan, dan karakter analisis itu berbeda tergantung di mana ia berada. Selain itu, setiap elemen analisis kebijakan dapat berbeda, tergantung pada lokasi tujuan keputusan kebijakan dibuat. Identifikasi masalah mungkin sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, walaupun subjeknya sama. Lingkungan politik akan selalu menyertai tempat beroperasinya rangkaian proses tindakan kebijakan.

3. Menentukan alternatif.

Menentukan alternatif yang tersedia untuk pilihan adalah bagian penting dari proses analisis kebijakan. Umumnya, alternatif dianggap sebagai cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama; dalam analisis kebijakan, bagaimanapun, alternatif itu sendiri sering memiliki implikasi kebijakan yang berbeda-beda. Tugas para analisis sosial adalah mengeksplorasi berbagai alternatif dan memperjelas konsekuensi-konsekuensi yang menyertainya. Tujuannya adalah untuk dipilih sebagai sebuah kebijakan.

4. Memperkirakan atau memprediksi dampak kebijakan publik.

Elemen proses analisis kebijakan ini berkaitan erat dengan kebutuhan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut Dunn (2004), lima jenis informasi di atas dihasilkan dan ditransformasikan melalui metode analisa kebijakan. Metode-metode tersebut sudah umum digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan, kepentingan profesi, dan kepentingan untuk pemecahan masalah manusia. Metode-metode tersebut meliputi deskripsi, prediksi, penilaian (*appraisal*), preskripsi, dan definisi. Semua metode tersebut melibatkan berbagai jenis penilaian: penilaian untuk menerima atau menolak penjelasan, penilaian untuk menegaskan atau membantah kebenaran tindakan, penilaian untuk memilih atau tidak memilih kebijakan, penilaian untuk menerima atau menolak prediksi, dan penilaian untuk mendefinisikan masalah dengan salah satu cara. Dalam analisis kebijakan, prosedur ini telah diberi nama khusus: Monitoring, perkiraan (prediksi), evaluasi, rekomendasi, dan penataan masalah (Dunn, 2004).

- a) monitoring (deskripsi) menghasilkan informasi tentang hasil kebijakan yang diamati.
- b) Peramalan (prediksi) menghasilkan informasi tentang hasil kebijakan yang diharapkan.
- c) Evaluasi (penilaian) menghasilkan informasi tentang nilai atau nilai hasil yang diamati dan diharapkan.
- d) Rekomendasi (preskripsi) menghasilkan informasi tentang kebijakan yang disukai atau dipilih.
- e) Penataan masalah (definisi) menghasilkan informasi tentang masalah apa yang harus dipecahkan. Metode ini disebut sebagai *meta method* (metodenya metode).

Metode analisa kebijakan saling bergantung. Tidak mungkin menggunakan satu metode tanpa terlebih dahulu menggunakan yang lain. Dengan demikian, meskipun dimungkinkan untuk memantau kebijakan di masa lalu tanpa memperkirakan konsekuensi kebijakan di masa depan, tidak mungkin untuk memperkirakan kebijakan tanpa terlebih dahulu memantau keadaannya. Demikian pula, analisis dapat memantau hasil kebijakan tanpa mengevaluasinya, tetapi tidak mungkin untuk mengevaluasi suatu hasil tanpa terlebih dahulu menetapkan bahwa itu adalah hasil di tempat pertama. Akhirnya, untuk memilih kebijakan

yang disukai mengharuskan analisis terlibat dalam proses monitoring, evaluasi, dan pembuatan prediksi. Oleh karena itu, semua pilihan kebijakan harus didasarkan pada tempat, fakta, dan nilai.

Analisis Kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Hampir semua penelitian ilmu sosial memiliki "implikasi kebijakan". Kebijakan dibuat memiliki berbagai macam tujuan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap berdirinya berbagai lembaga pembuat kebijakan. Pusat-pusat kebijakan tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuannya. Kondisi tersebut memaksa kegiatan analisis kebijakan harus memiliki jangkauan yang sangat luas, mencakup berbagai aspek lingkungan sosial.

Ada tiga catatan penting yang harus menjadi perhatian bagi para analis kebijakan. Catatan tersebut dapat membantu para analis untuk menerapkan metode analisis yang tepat. Pertama, hanya masalah dan alternatif kebijakan yang menjadi domain publik yang harus diperiksa. Analisa kebijakan, sebijaksana mungkin digunakan untuk memeriksa masalah-masalah publik, isu-isu publik, dan penggunaan sumber daya publik. Analisa kebijakan akan kurang bermanfaat jika ditujukan untuk memeriksa masalah yang bersifat pribadi dan tidak berkaitan langsung dengan kepentingan (perhatian) publik. Kedua, berbagai pusat pembuatan kebijakan memerlukan berbagai jenis analisis kebijakan. Tugas analis berkaitan erat dengan kebutuhan jenis informasi para pembuat keputusan. Setiap organisasi memiliki misi, dan karenanya analisa kebijakan dilakukan dalam konteks organisasi yang bersangkutan. Ruang lingkup analisa, khususnya pengidentifikasian alternatif, harus menyesuaikan dengan misi organisasi. Ketiga, pembuatan kebijakan merupakan usaha yang sarat nilai, dan analisisnya selalu terjadi dalam konteks nilai yang sudah mapan. Nilai sosial, nilai organisasi, nilai profesional, dan nilai pribadi semuanya membatasi analisa kebijakan. Mengurai nilai-nilai yang telah ada di balik definisi masalah, atau berbagai solusi alternatif, merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan jenis informasi apa yang paling berguna untuk memeriksa masalah itu sendiri. Analis harus berhati-hati tentang nilai, tetapi nilailah yang akan memandu analisis kebijakan. Kemungkinan besar nilai-nilai ini bukan

nilai-nilai pribadi analis, tetapi nilai-nilai yang mencerminkan orientasi publik terhadap preferensi atau nilai-nilai yang memandu operasi organisasi. Analisis kebijakan bukanlah proses politik, tetapi karena nilai-nilai tersebut diperjelas oleh proses analis. Hal tersebut merupakan bagian dari proses politik yang memaksimalkan posisi nilai.

Dalam Tulisannya Dobelstein (1990), menyebutkan ada tiga model analisa kebijakan yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan analisa. Ketiga model tersebut, diantaranya: Model Pendekatan Perilaku (*Behavioral Approach*), model inkremental (*incremental Model*), dan model berdasarkan kriteria (*criteria-based Model*). Pendekatan Perilaku (*Behavioral Approach*). Analisa kebijakan model pendekatan perilaku merupakan analisa yang memerlukan informasi dalam jumlah yang banyak. Informasi-informasi tersebut bisa dihasilkan melalui metode penelitian sosial dan teori-teori ilmu sosial. Model ini berawal dari Herbert Simon, seorang pelopor dalam penerapan prinsip-prinsip ilmiah untuk manajemen, administrasi, dan pembuatan keputusan. simon adalah seorang konsultan di Rand Corporation, sebuah "*think Tank*" yang pada awal 1950-an yang memiliki perhatian dalam mengembangkan teknologi baru sebagai sarana untuk membuat keputusan. Dengan demikian pendekatan perilaku untuk analisis kebijakan dikembangkan dari konteks seberapa efektif keputusan harus dibuat. Dalam perkembangan selanjutnya model ini dikenal sebagai model "rasional".

Tabel 07. Model Pendekatan Perilaku atau Rasional

1	Mendefinisikan masalah ke dalam istilah-istilah obyektif (perilaku).
2	Mengusulkan serangkaian alternatif yang spesifik guna menyelesaikan masalah dalam keadaan yang telah ditentukan
3	Memproyeksikan kemungkinan pencapaian setiap set alternatif.
4	Memeriksa data yang sesuai untuk setiap alternatif dan menentukan mana yang memberikan manfaat terbesar per unit biaya
5	Menghitung manfaat dari setiap alternatif dalam kaitannya dengan kelayakan implementasi
6	Menyajikan alternatif bagi pembuat kebijakan

Sumber : Herbert Simon (1955) "*A Behavioral Model of Rational Choice*"

Model Inkremental (incremental model). Model inkremental menekankan pada pertimbangan marjinal antara masalah kebijakan dan alternatifnya. Model ini merupakan kebalikan dari analisa kebijakan model perilaku (behavioral). Model ini disebut model inkremental karena ia bisa mengidentifikasi dan mengimplementasikan peningkatan kecil dari pilihan kebijakan hingga ditemukan kombinasi yang tepat, masalahnya terpenuhi, dan hasilnya menjadi kebijakan.

Model Inkremental Memiliki beberapa Karakteristik. Karakteristik tersebut diantaranya:

- a) Hanya beberapa opsi dan sarana yang dipertimbangkan.
- b) Keputusan adalah produk dari penyelesaian yang dinegosiasikan.
- c) Perubahan terjadi secara bertahap seiring waktu.
- d) Keputusan cenderung dibuat secara reaktif.
- e) Pertimbangan politik penting dalam menentukan hasil.

Pendekatan inkremental terhadap pembuatan keputusan mencerminkan Program, Perencanaan, Penganggaran, dan Eksekusi. Model ini bisa digunakan ketika:

- a) Persyaratan dari kebijakan telah lengkap didefinisikan dengan jelas dan dipahami.
- b) Persyaratan utama harus ditentukan; Namun, seberapa detail persyaratan tersebut dapat menyesuaikan dengan keadaan.
- c) Sumber daya dengan keahlian yang dibutuhkan tidak tersedia.

Tabel o8. Model Pendekatan Inkremental

Model Pendekatan Inkremental	
1	Hitung manfaat marginal dari pilihan (saat ini) yang berurusan dengan masalah
2	Menyusun pilihan-pilihan kecil untuk membuat solusi yang akan digunakan guna mencapai manfaat marjinal yang terukur
3	Mempercepat pilihan yang menghasilkan dampak positif; perlambat pilihan yang menghasilkan dampak negatif
4	Kombinasikan pilihan yang berfungsi untuk membentuk kebijakan

Model Berdasarkan Kriteria (Criteria-based). Model ini menawarkan analisa yang baik dengan mempertimbangkan banyak alternatif yang memungkinkan untuk digunakan. Hal-hal yang dilakukan oleh model ini adalah: Pertama, mendefinisikan masalah sehubungan dengan alternatif kebijakan yang tersedia untuk direkomendasikan sebagai kebijakan. Kedua, menetapkan kriteria universal dan selektif untuk memberikan berbagai alternatif. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, menimbang biaya dan manfaat dari setiap alternatif terhadap kriteria. Kelima, merekomendasikan alternatif yang bisa memaksimalkan kriteria.

M. Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Pembuatan kebijakan melibatkan berbagai kombinasi proses. Dalam dunia yang kompleks proses pembuatan kebijakan tidak selalu jelas dan dapat dibedakan. Tetapi kita dapat mengidentifikasi mereka melalui tujuan analisis.

Beberapa hal yang dilakukan dalam proses perumusan kebijakan kesejahteraan sosial, diantaranya:

1. Mengidentifikasi masalah kebijakan.
Tuntutan publik atas tindakan pemerintah dapat mengarah pada identifikasi masalah kebijakan.
2. Merumuskan alternatif Kebijakan.
Proposal kebijakan dapat dirumuskan melalui saluran politik yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga perencana kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan kongres.
3. Melegitimasi kebijakan publik.
Pelegitimasi kebijakan merupakan hasil dari pernyataan publik atau tindakan presiden, kongres, atau pengadilan. Tindakan pelegitimasi mencakup anggaran untuk eksekutif, hukum, alokasi, aturan, dan regulasi, serta keputusan dan interpretasi yang memiliki efek menetapkan arah kebijakan.
4. Menerapkan kebijakan publik.
Kebijakan publik diimplementasikan melalui kegiatan birokrasi publik dan pengeluaran dana publik.

5. Mengevaluasi kebijakan.

Kebijakan dievaluasi secara formal dan informal bisa dilakukan oleh lembaga pemerintah, oleh konsultan eksternal (ditunjuk atau tidak ditunjuk), oleh kelompok kepentingan, oleh media massa, dan oleh publik.

Dalam prakteknya perumusan kebijakan publik akan berhasil jika mendapatkan bantuan publikasi melalui media massa. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian publik atas definisi masalah yang sedang dibuat. Ketika sudah mendapatkan perhatian, maka akan muncul berbagai respons politik. Respons tersebut kemudian bisa digunakan untuk merubah, memperkuat, memperbaiki, dan mempertajam rumusan kebijakan. Berbagai lembaga birokrasi pemerintah, organisasi swasta, dan individu yang berpengaruh, kemudian mengusulkan solusi untuk dituangkan dalam bentuk undang-undang atau program baru. Hasilnya lembaga pemerintah akan mengeluarkan kebijakan.

Dalam siklusnya, proses perumusan kebijakan akan dimulai dari respons terhadap kondisi sosial masyarakat. Selanjutnya akan melahirkan ide atau gagasan dari lembaga pemerintah. Gagasan tersebut kemudian dilempar kepada publik dalam bentuk wacana atau opini guna mendapatkan umpan balik dari publik. Dari respons publik, pemerintah kemudian akan menyusun proposal dan akhirnya muncul (umumnya setelah banyak perubahan dan amandemen) dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program dan alokasi kebijakan.

Ketika merumuskan sebuah kebijakan, dalam prosesnya pemerintah akan memperhatikan berbagai pertimbangan, baik itu pertimbangan rasional maupun pertimbangan politis. Pada prinsipnya, pada saat melakukan usaha pemecahan masalah dalam perumusan kebijakan, maka akan melibatkan rasionalitas, konflik, dan perilaku politis. Hal tersebut bisa terjadi karena menyangkut pilihan-pilihan yang akan diambil oleh pembuat kebijakan. Misal, apakah program kebijakan sosial yang akan dihasilkan dalam bentuk jaminan sosial atau program kupon makanan, pelatihan kerja atau perawatan kesehatan mental, layanan perlindungan anak atau layanan hukum.

Memutuskan apa yang harus diputuskan adalah tahap paling penting dari proses pembuatan kebijakan. Kita bisa menyebut tahap ini sebagai Agenda Setting (DiNitto, 1991).

Hal paling penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan, adalah kemampuan perumus kebijakan untuk mendefinisikan kondisi sosial. Kondisi sosial yang tidak terdefiniskan sebagai masalah, maka tidak akan pernah menjadi masalah kebijakan. Kondisi tersebut tidak akan pernah masuk dalam agenda pembuat kebijakan. Maka pemerintah akan membuat pilihan, bisa jadi pemerintah tidak akan melakukan apapun, atau sebaliknya pemerintah akan mengambil tindakan. Di sisi lain, jika kondisi dalam masyarakat didefinisikan sebagai masalah, kemudian mereka menjadi masalah kebijakan, maka akan memaksa pemerintah untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.

Penting untuk diperhatikan, masalah kebijakan tidak terjadi begitu saja. Perlu tindakan politik untuk menciptakan masalah, mendramatisirnya, meminta perhatian padanya, dan mendesak pemerintah untuk melakukan sesuatu. Taktik ini digunakan oleh orang-orang yang berpengaruh, kelompok kepentingan yang terorganisir, organisasi perencanaan kebijakan, bahan kampanye para calon politisi, pemegang jabatan publik, dan mungkin yang paling penting, media massa. Semua itu merupakan taktik penetapan agenda.

Mengapa media?. Kekuatan media massa adalah kemampuannya untuk mengatur agenda pengambilan keputusan - untuk memutuskan masalah apa yang akan diperhatikan dan masalah apa yang akan diabaikan. Tanpa liputan media, masyarakat umum tidak akan tahu tentang berbagai kondisi sosial masyarakat, program pemerintah untuk orang miskin, tentang kebijakan atau program alternatif bagi publik. Tanpa liputan media, topik-topik ini tidak akan menjadi objek diskusi politik, mereka juga tidak akan dianggap penting oleh pejabat pemerintah sekalipun pemerintah tahu tentang mereka. Perhatian media dapat menciptakan masalah dan kepribadian. Kurangnya perhatian media dapat menyebabkan masalah dan kepribadian menjadi kabur.

Terakhir, anggaran adalah satu-satunya kebijakan yang paling penting dari pemerintah (DiNitto, 1991). Sisi pengeluaran dari anggaran

memberi tahu kita siapa yang mendapatkannya dan untuk apa peruntukannya. Dari sisi pendapatan anggaran, sumber anggaran akan memberi tahu kita siapa yang membayar biayanya. Proses penganggaran menyediakan mekanisme untuk peninjauan program pemerintah, menilai biayanya, menghubungkannya dengan sumber daya keuangan, dan membuat pilihan di antara berbagai pengeluaran alternatif. Anggaran menentukan kebijakan dan program mana yang akan ditingkatkan, dikurangi, dibiarkan berlalu, dimulai atau diperbarui. Anggaran menjadi jantung bagi semua kebijakan publik.

Implementasi kebijakan mencakup semua kegiatan yang dihasilkan dari proses adopsi secara resmi terhadap suatu kebijakan. Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang disahkan (DiNitto:1991). Kita tidak boleh berasumsi bahwa pengesahan undang-undang adalah akhir dari proses pembuatan kebijakan. Proses implementasi bukanlah akhir dari pembuatan kebijakan, tetapi merupakan kelanjutan dari pembuatan kebijakan dengan cara lain (DiNitto, 1991).

N. Proses Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan biasanya diuraikan sebagai asas atau aturan untuk memandu jalannya keputusan agar mencapai hasil yang rasional. Kebijakan bisa dianggap sebagai “Pernyataan Keinginan” atau “Komitmen” terhadap orang-orang. Kebijakan dapat dipahami sebagai mekanisme politik, pengelolaan, keuangan, dan administrasi yang di atur untuk mencapai tujuan eksplisit.

Dalam prosesnya kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yang berkaitan dengan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteksnya kebijakan sosial tidak bisa dipisahkan dari ide-ide negara kesejahteraan dan hubungannya dengan politik dan masyarakat. Sehingga, dalam prakteknya kebijakan sosial mengacu pada pedoman, prinsip, undang-undang, dan kegiatan lainnya yang sifatnya bisa mempengaruhi kondisi kehidupan manusia. Maka bukan hal yang baru, jika kemudian muncul isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan menjadi bahan pertimbangan khusus dalam administrasi dan kebijakan sosial. Misalnya masalah perawatan kesehatan, peru-

mahan, pendidikan, kemiskinan, kelompok lansia, dan kerentanan sosial lainnya.

Secara garis besar proses perumusan kebijakan sosial minimal melalui tiga tahapan. Pertama, tahap proses identifikasi. Kedua, tahap proses implementasi. Ketiga, tahap proses evaluasi. Dalam kegiatan identifikasi ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan dalam tahap ini dimulai dari pengidentifikasian masalah dan kebutuhan, penginformasian rencana kebijakan, perumusan tujuan kebijakan, pemilihan model kebijakan, penentuan indikator sosial, dan membangun dukungan publik (legitimasi publik). Sementara dalam tahap implementasi kegiatan yang dilakukan adalah perumusan kebijakan, perancangan program, dan implementasi program. Sedangkan dalam tahap evaluasi kegiatan yang dilakukan adalah evaluasi dan tindak lanjut.

Untuk proses yang lebih kompleks dan detail tentang proses perumusan Kebijakan Sosial akan dibahas secara khusus pada bab berikutnya.

Gambar 10. Proses Perumusan Kebijakan Sosial



O. Administrasi Kesejahteraan Sosial

Administrasi adalah upaya manusia yang kooperatif untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Dengan demikian setiap kegiatan kelompok melibatkan aktivitas administrasi, baik dalam keluarga, pabrik, rumah sakit, universitas, atau departemen pemerintahan. Menurut Herbert A. Simon (1960), dalam arti luas, administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kapan saja, jika ada dua orang atau lebih melakukan kerja sama untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri, maka konsep administrasi telah berlaku. Kata administrasi merupakan turunan dari bahasa Latin "ad" dan "ministrare" yang berarti melayani. Dalam bahasa yang sederhana, ini bermakna

"urusan manajemen" atau "mengatur manusia". Jadi, makna peng-administrasian adalah mengatur, mengarahkan, dan melayani.

White (1948) memandang bahwa "Administrasi adalah seni mengarahkan, koordinasi, dan mengontrol sejumlah orang untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Sementara, E.A. Nigro (1951) mendefinisikan administrasi sebagai organisasi dan menggunakan manusia serta materi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Herbert A. Simon (1960) Administrasi secara luas dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Begitu juga dengan Pfiffner (1985) yang mendefinisikan administrasi sebagai organisasi dan panduan sumber daya manusia serta material untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, berdasarkan dari definisi di atas sudah jelas bahwa administrasi berkaitan dengan organisasi manusia dan material untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan kesejahteraan sosial, pemerintah merumuskan kebijakan sosial dan program. Dalam pelaksanaannya pemerintah menyusun (memberlakukan) sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sosial. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan sejumlah bantuan keuangan dan menunjuk (membentuk) lembaga-lembaga pelaksana untuk mengelola administrasi dan organisasinya, biasanya dalam bentuk kementerian atau departemen. Selain menunjuk (membentuk) lembaga terkait dalam usahanya mencapai tujuan program kesejahteraan sosial, pemerintah juga menjalin kemitraan dengan organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) untuk proses pengimplementasian berbagai program kesejahteraan sosial yang efektif. Semua bentuk kegiatan aktivitas administrasi yang dilakukan dalam bidang layanan kesejahteraan sosial disebut sebagai administrasi kesejahteraan sosial. Maka, Administrasi kesejahteraan sosial bisa dikatakan sebagai proses merubah kebijakan sosial menjadi layanan sosial. Proses tersebut melibatkan administrasi lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Menurut Titmus (1994), administrasi Sosial secara luas dapat didefinisikan sebagai studi layanan sosial yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan individu dalam *setting* hubungan

keluarga dan kelompok. Sementara D.V. Donnison (1961), mendefinisikan administrasi sosial Sebagai studi pengembangan, struktur dan praktik layanan sosial. Sedangkan Forder (1974), melihat adanya keterkaitan administrasi sosial dengan studi tentang sistem kesejahteraan, khususnya dalam layanan sosial yang disponsori oleh pemerintah.

Penyediaan kesejahteraan sosial termasuk pemberian layanan untuk anak-anak, remaja, wanita, usia, kelompok minoritas, cacat, pecandu narkoba, dan individu yang kurang mampu secara ekonomi seperti orang miskin dan pengangguran. Karena program kesejahteraan sosial diarahkan untuk memperbaiki kondisi mereka, maka diperlukan administrasi yang tepat. Administrasi Kesejahteraan Sosial adalah proses penyediaan sumber daya dan layanan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk memfasilitasi hubungan sosial dan penyesuaian yang diperlukan untuk fungsi sosial dan pencegahan disfungsi sosial. Administrasi kesejahteraan sosial juga merupakan proses mengubah kebijakan sosial menjadi layanan sosial. Proses tersebut melibatkan kegiatan administrasi publik dan agensi swasta.

John C. Kidneigh (1950) mendefinisikan administrasi kesejahteraan sosial sebagai proses transformasi kebijakan sosial menjadi layanan sosial dan penggunaan pengalaman dalam mengevaluasi dan memodifikasi kebijakan ... sebuah proses dua arah: (i) ... mengubah kebijakan menjadi layanan sosial yang konkret dan (ii) penggunaan pengalaman dalam merekomendasikan modifikasi kebijakan. Definisi ini, tentu saja, meliputi gagasan bahwa administrasi adalah proses mengubah kebijakan menjadi program aksi. Sedangkan menurut Friedlander (1958), administrasi agensi sosial diterjemahkan sebagai ketentuan Undang-undang agensi sosial dan tujuan filantropi pribadi serta kegiatan amal keagamaan ke dalam dinamika layanan dan manfaat untuk kemanusiaan.

Bagi Arthur Dunham (1962), administrasi adalah proses mendukung atau memfasilitasi kegiatan yang diperlukan dan terkait dengan layanan oleh agensi sosial. Kegiatan administrasi berkisar pada penentuan fungsi, kebijakan, dan pimpinan organisasi untuk menjalankan roda kegiatan. kegiatan administrasi sosial merupakan kegiatan yang

memastikan aktivitas layanan sosial mencapai tujuan. Harleigh Tracker (1971), mengartikan administrasi kesejahteraan sosial sebagai proses bekerja dengan orang-orang melalui cara yang disepakati dan menggabungkan energi mereka serta menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan tujuan penyediaan layanan masyarakat yang dibutuhkan oleh program. Sementara menurut *American Council of Social Work Education* Amerika Serikat dalam kurikulum studinya, telah memberikan definisi administrasi kesejahteraan sosial yang cukup komprehensif. Menurutnya Administrasi adalah proses transformasi sumber daya komunitas menjadi program layanan komunitas, sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan standar yang telah disepakati oleh mereka yang terlibat dalam organisasi. Hal tersebut bergantung pada kreatifitas, karena struktur, peran, dan hubungan yang sedemikian rupa bertujuan untuk mengubah atau meningkatkan produk secara total. Semuanya itu melibatkan proses penyelesaian masalah studi, diagnosis dan solusi perawatan atau tindakan dan evaluasi hasil. Terakhir, menurut *Social Work Dictionary* (2003), administrasi kesejahteraan sosial adalah sistem program, manfaat, dan layanan suatu negara yang membantu orang untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang merupakan hal mendasar bagi pemeliharaan masyarakat.

Rosemary Sarri (1971) menguraikan kegiatan administrasi kesejahteraan sosial ke dalam 5 kegiatan:

1. Penerjemahan mandat sosial ke dalam kebijakan operasional dan tujuan untuk memandu perilaku organisasi.
2. Desain struktur dan proses organisasi melalui tujuan mana dapat dicapai
3. Mengamankan sumber daya dalam bentuk bahan, staf yang diperlukan, klien, dan legitimasi sosial untuk pencapaian tujuan dan keberlangsungan hidup organisasi
4. Seleksi dan rekayasa teknologi yang diperlukan
5. Mengoptimalkan perilaku organisasi yang diarahkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi; dan vi) Evaluasi kinerja organisasi untuk mencari solusi terhadap masalah secara sistematis dan berkesinambungan.

Dari gambaran di atas, konsep administrasi berlaku umum dan memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk di dalamnya administrasi menyangkut kesejahteraan sosial, bisnis, dan pemerintahan. Namun, ada beberapa fitur khas dari administrasi kesejahteraan sosial. Pertama, administrasi kesejahteraan sosial berkaitan dengan agensi sosial dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan untuk mencapai tujuan hidup dalam masyarakat. Administrasi kesejahteraan sosial secara khusus berkaitan dengan kegiatan identifikasi tujuan dan formulasi sosial/implementasi program. Kedua, dari sudut pandang fungsional, ia mencakup tiga aspek masalah sosial: (i) Pemulihan fungsi sosial yang terganggu; (ii) penyediaan sumber daya, sosial dan individu, untuk fungsi sosial yang lebih efektif; (iii) Pencegahan penyelewengan fungsi sosial. Ketiga, Meskipun ada variasi dalam ukuran, ruang lingkup, struktur dan jenis program, setiap lembaga memiliki kebijakan tersendiri untuk pengambilan keputusan akhir. Pengambil kebijakan umumnya mewakili/diwakili komunitas yang ingin dilayaninya. Keempat, Administrasi kesejahteraan sosial untuk mencapai pemanfaatan yang optimal membutuhkan sumber daya yang tersedia bersamaan dengan partisipasi aktif masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan utama program dapat tercapai dengan baik. Kelima, agensi kesejahteraan sosial harus mencadangkan sebagian dari sumber daya yang dimilikinya untuk bertahan hidup. Walaupun dalam pandangan yang ideal, untuk mencapai kapasitas kualitatif dan kuantitatif tidak boleh dibatasi. Keenam, agensi kesejahteraan sosial pada umumnya bisa berfungsi jika ada kerja sama. Sehingga ada tuntutan bagi agensi pemerintah maupun swasta untuk memastikan partisipasi semua anggota dalam kegiatan administrasi berjalan dengan baik. Ketujuh, Adanya kecenderungan (tren) pada lembaga-lembaga yang dimaksud untuk merekrut (menggunakan) jasa tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.

Adapun ruang lingkup dari administrasi Kesejahteraan sosial meliputi perencanaan, organisasi, tenaga pegawai, pengaturan, fungsi koordinasi, pelaporan, dan pendanaan. Henry Fayol (2016) membagi kegiatan administrasi ke dalam beberapa kategori diantaranya

organisasi, perintah (arahan), pengawalan (pengawasan), dan koordinasi. Dalam administrasi ada manusia, material, dan metodologi. L. Gullick (1937) kemudian merumuskannya ke dalam POSDCoRB (*Planning, Organising, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*).

Perencanaan berarti menyusun garis besar hal-hal yang perlu dilakukan dan memilih metode untuk diadopsi guna mencapai tujuan yang ditetapkan oleh agensi. Manakala organisasi merupakan bentuk formal struktur dan kewenangan. Melaluinya pekerjaan dan tugas kemudian dibagi, diatur, didefinisikan, dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sementara, pemilihan pegawai (*staffing*) adalah proses pengisian semua posisi dalam organisasi dengan personil yang memadai dan berkualitas. Sedangkan mengarahkan (*directing*) adalah tugas yang berkesinambungan dalam pengambilan keputusan dan mewujudkannya dalam aturan-aturan. Pengarahan kurang lebih sama dengan instruksi yang bertujuan untuk membimbing (mengarahkan) organisasi.

Koordinasi adalah fungsi integrasi beberapa bagian organisasi yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, koordinasi berarti semua tugas penting yang saling terkait pekerjaan berbagai divisi dan bagian dalam organisasi. Dalam organisasi juga ada kegiatan pelaporan. Dengan adanya pelaporan yang dilakukan secara berkala maupun insidental, maka akan membuat semua personil organisasi mendapatkan informasi yang memadai. Pelaporan bisa diperoleh dengan melakukan pengumpulan informasi melalui kegiatan inspeksi, penelitian dan catatan-catatan penting lainnya. Selain kegiatan tersebut di atas, organisasi juga perlu melakukan penganggaran. Penganggaran di sini bisa meliputi perencanaan fiskal, akuntansi, dan pengawasan.

Dalam sifat dasarnya ruang lingkup administrasi kesejahteraan sosial cukup beragam. Dengan munculnya masalah sosial baru yang sifatnya sama sekali berbeda, maka strategi baru perlu dikembangkan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Dalam suatu konteks perubahan, mungkin saja dalam perjalanannya memerlukan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, misal

manusia, kelembagaan, keuangan, teknologi, dan lain-lain. Dalam proses pemecahan masalah sosial, administrasi kesejahteraan sosial menggabungkan sejumlah faktor, di mana secara keseluruhan hal tersebut sangat signifikan keberhasilannya dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial.

Administrasi kesejahteraan sosial memiliki perhatian terhadap empat hal berikut ini:

1. Pelayanan Sosial.

Layanan sosial ditujukan untuk masyarakat umum melalui penyediaan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Pelayanan sosial diberikan untuk meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan secara efektif.

2. Jaminan Sosial.

Program tersebut dibuat untuk mengimplementasikan bantuan sosial dan asuransi sosial secara efektif. Jaminan sosial dirancang untuk memberikan kompensasi atas hilangnya penghasilan akibat pengangguran, cacat atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan, dan usia lanjut melalui asuransi sosial dan bantuan sosial.

3. Masalah-masalah Sosial.

Melakukan penilaian terhadap penyebab terjadinya masalah sosial. Melakukan pencegahan dan pengobatan melalui partisipasi publik serta mengimplementasi undang-undang sosial dengan efektif.

4. Kebijakan Sosial.

Merancang sebuah kebijakan yang efektif untuk melindungi warga negara yang rentan, dan lemah demi tercapainya tujuan atau cita-cita negara kesejahteraan melalui aksi sosial.

P. Proses Administratif dalam Lembaga Kesejahteraan sosial

Seerti dijelaskan di atas kegiatan administrasi kesejahteraan sosial salah satunya meliputi *POSDCoRB (Planning, Organising, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting)*. *POSDCoRB* adalah akronim yang dipinjam oleh administrasi kesejahteraan sosial dari teori manajemen. Teori ini digagas oleh Luther Gullick. Akronim di atas bertujuan untuk menggambarkan fungsi seorang manajer dalam suatu organisasi.

1. Perencanaan

Menurut Terry dan Franklin (2000), perencanaan merupakan cara untuk memilih informasi dan membuat asumsi mengenai masa depan untuk merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap organisasi melakukan beberapa bentuk perencanaan, karena mereka harus mempersiapkan masa depan. Pada organisasi besar, perencanaan dilakukan oleh divisi atau departemen terpisah yang umumnya melaporkan kepada Kepala eksekutif. Perencanaan, di sini, adalah bidang yang sangat khusus, karena sejumlah faktor-faktor harus dipertimbangkan. Ketika organisasi beroperasi lebih dari satu wilayah atau negara, kompleksitas proses perencanaan meningkat. Dalam konteks organisasi yang lebih kecil, tugas keorganisasian dipercayakan kepada anggota staf yang menangani pekerjaan tertentu dengan kompetensi dan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan.

Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan dalam menyusun Perencanaan.

a) Definisikan Masalah Utama dengan Benar

Memahami masalah dan berbagai dimensinya adalah langkah pertama yang perlu dilakukan dalam proses perencanaan. Banyak ahli yang mengatakan, jika masalah telah didefinisikan dengan memadai maka setengah dari masalah telah terpecahkan.

b) Kumpulkan data (informasi)

Kumpulkan semua data dan informasi yang relevan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Sumber-sumber informasi berharga dan penting dapat berasal dari berbagai sumber yang relevan. Organisasi dapat menggunakan sumber informasi dari luar seperti laporan pemerintah, kebijakan, peraturan perundang-undangan, dokumen komisi perencanaan, dan lain-lain. Sementara Sumber informasi dari dalam organisasi bisa berasal dari keputusan internal organisasi, laporan organisasi, hasil evaluasi, catatan rapat, dan dokumentasi lainnya yang relevan.

- c) Lakukan Analisa Terhadap Informasi-informasi Penting
Kita bisa saja mengumpulkan informasi dalam jumlah besar, namun jika tidak bisa dianalisis maka tidak ada gunanya. Setiap komponen harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Hubungan sebab akibat harus dibentuk direkonstruksi, sehingga bisa menyumbangkan informasi yang berguna.
- d) Tetapkan Kriteria dan standar perencanaan
Kriteria perencanaan adalah asumsi di mana rencana itu harus dirumuskan. Kriteria yang ditetapkan akan berbeda beda. Kriteria dan standar bisa diambil dari ideologi organisasi, faktor sosial ekonomi organisasi, informasi yang dikumpulkan oleh organisasi, dan prioritas para pembuat keputusan. Kriteria-kriteria tersebut akan membentuk dasar yang berbeda-beda sebagai rencana aksi yang akan dinilai.
- e) Persiapan berbagai rencana aksi untuk mencapai tujuan
Organisasi bisa merumuskan rencana sementara. Hal tersebut memungkinkan para pembuat keputusan untuk memilih di antara alternatif yang tersedia berdasarkan kelebihan dan kekurangannya.
- f) Tentukan Satu rencana dari berbagai rencana Alternatif
Rencana harus bisa bekerja dengan baik dan efektif. Dalam proses implementasi, rencana harus dibuat serealistis mungkin. Sering kali rencana telah disusun dengan baik tetapi implementasinya kurang baik. Oleh karena itu, perencana yang baik akan mempertimbangkan berbagai macam yang bisa menghambat proses implementasi. Seorang perencana yang baik juga harus mampu memperhitungkan kekuatan dan kelemahan ketika rencana akan dilaksanakan.
- g) Atur urutan dan waktu pelaksanaan rencana secara terperinci
Putuskan secara cermat kegiatan apa yang harus dilakukan dan kapan pelaksanaannya. Waktu sangat penting dalam pelaksanaan rencana. Pengaturan waktu yang tepat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan rencana. Oleh karena itu sumber daya berupa pengaturan jadwal sangat penting, karena hal tersebut berkaitan dengan momentum. Sebagai catatan, mo-

mentum bisa terjadi dengan sendirinya, tetapi juga bisa diciptakan melalui serangkaian-serangkaian aktivitas.

h) Berikan Saluran Umpan Balik

Umpan balik dan pemantauan yang konstan sangat diperlukan. Ini akan membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam perencanaan dan implementasinya. Beberapa bagian dari rencana mungkin perlu dimodifikasi atau diperkuat. Karena tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor yang tidak terduga yang mempengaruhi proses implementasi.

i) Terlibat Dalam Penerapan Rencana

Keberhasilan setiap rencana akan ditentukan oleh seberapa efektif penerapannya. Oleh sebab itu diperlukan keterlibatan secara aktif para pembuat dan pelaksana rencana.

j) Evaluasi Terhadap Kinerja Rencana

Langkah terakhir dalam proses perencanaan adalah evaluasi kinerja implementasi. Melalui evaluasi kita bisa mengukur keberhasilan maupun kegagalan suatu rencana.

Tahapan-tahapan perencanaan tersebut berlaku untuk semua model perencanaan. Adapun model perencanaan ada dua. Pertama, Perencanaan Strategis. Perencanaan strategis (juga disebut sebagai perencanaan jangka panjang) memiliki dua elemen penting. Elemen pertama, mencakup periode waktu yang panjang yang dapat berlangsung dari lima hingga dua puluh tahun atau lebih. Elemen kedua, mencakup semua kegiatan dalam organisasi. Dengan kata lain, ini adalah perencanaan jangka panjang dan komprehensif. Kedua, Perencanaan Operasional. Perencanaan Operasional juga disebut perencanaan taktis. Perencanaan model ini adalah rencana untuk kegiatan yang bersifat spesifik yang harus diambil sehingga tujuan spesifik harus tercapai. Dibandingkan dengan perencanaan strategis, perencanaan operasional relatif berjangka pendek dan berurusan dengan bidang tertentu. Kedua jenis perencanaan ini tidak inklusif. Perencanaan Strategis bergantung pada perencanaan yang dioperasionalkan untuk mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian berarti membangun hubungan perilaku yang efektif di antara anggota organisasi atau bukan anggota organisasi sehingga mereka dapat bekerja bersama secara efisien dan mendapatkan kepuasan pribadi dalam melakukan tugas yang dipilih sesuai dengan kondisi lingkungan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan atau sasaran.

Kebutuhan akan sebuah organisasi muncul ketika satu individu tidak dapat melakukan semua tugas yang diperlukan. Ketika jumlah individu bertambah, mereka dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing individu diberi serangkaian tugas tertentu untuk dilakukan. Bagaimana dan atas dasar apa tugas-tugas ini dibagi di antara individu dan kelompok adalah peran 'pengorganisasian' dalam manajemen.

3. Kepegawaian (*Staffing*)

Penetapan staf adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan perekrutan, penempatan, pelatihan dan pengembangan anggota organisasi. Staf organisasi harus dipilih, dipertahankan, dan dipromosikan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kinerjanya.

Dalam Proses Penetapan pegawai, Perencanaan Sumber Daya Manusia harus mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan organisasi terkait keterampilan, lowongan, bidang prioritas organisasi dan kondisi keuangan. Sementara faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan salah satunya adalah kebijakan pemerintah, kebijakan agensi, atau kebijakan terkait organisasi dan pasar tenaga kerja.

Kegiatan kepegawaian meliputi proses rekrutmen, Seleksi, induksi dan Orientasi, pelatihan dan pengembangan, serta melakukan penilaian kinerja. Orang yang bergabung dengan organisasi bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial semata. Mereka juga mencari kepuasan untuk pemenuhan kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan emosional mereka. Andai kata pegawai yang dimaksud telah mencapai kepuasan finansial, kemungkinan besar pegawai tersebut juga akan mencari

pemenuhan kebutuhan lainnya, misal kebanggaan dalam pekerjaan, prestasi, dan hubungan yang memuaskan di tempat kerja.

4. Pengarahan (*Directing*)

Mengarahkan adalah fungsi manajerial untuk membimbing, mengawasi, dan memimpin orang lain. Pengarahan adalah upaya untuk mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Terkadang tindakan mengarahkan dan memimpin dipandang sebagai satu fungsi yang sama. Sering kali, keberhasilan atau kegagalan fungsi dan tujuan organisasi akan ditentukan oleh proses pengarahan ini.

Memimpin juga bisa menentukan tingkat kepuasan karyawan dalam mendapatkan pengalaman berorganisasi. Beberapa persyaratan untuk kepemimpinan yang sukses dalam berorganisasi adalah: tujuan organisasi harus jelas, harus diketahui oleh semua manajer dan karyawan, pengawasan oleh atasan terhadap bawahan, gaya manajerial yang partisipatif, kesatuan arah, dan tindak lanjut yang berorientasi pada tujuan dan efektif.

Kepemimpinan didefinisikan sebagai hubungan di mana seseorang mempengaruhi orang lain untuk bekerja melaksanakan tugas bersama-sama secara sukarela untuk mencapai tujuan yang telah dirancang oleh pemimpin dan organisasi. Pemimpin bisa bersifat formal atau informal. Pemimpin formal bisa ditemukan di lembaga-lembaga formal seperti birokrasi, partai politik, dan militer. Di sini fungsi organisasi diatur melalui aturan tertulis dan formal. Aturan tersebut menentukan bagaimana caranya pemimpin dipilih serta apa saja tanggung jawab dan kewenangannya. Sementara, kepemimpinan informal bergantung pada kualitas pribadi pemimpin seperti pesona (kharisma), kecerdasan, keterampilan, dan lain-lain.

Ada beberapa macam kepemimpinan. Pertama, Pemimpin Otokratis. Pemimpin otokratis adalah mereka yang memikul semua kewenangan untuk kepentingan mereka sendiri. Pemimpin model ini, tidak memberikan peluang kepada bawahannya untuk ikut berpartisipasi, seperti memberikan saran, usulan, dan masukan. Walaupun banyak kelemahan, kepemimpinan Otokratis juga

memiliki beberapa kelebihan dan berguna dalam situasi tertentu. Keuntungan pertama, proses pengambilan keputusan sangat cepat. Jika dalam keadaan darurat, model kepemimpinan ini sangat bermanfaat. Kedua, keputusan yang diambil mencerminkan prioritas pemimpin dan tidak akan terdilusi. Ketiga, jika para staf organisasi kurang berpengalaman atau tidak memenuhi syarat, maka kepemimpinan otokratis lebih baik digunakan dalam model kepemimpinan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Dalam kepemimpinan otokratis, kekurangannya adalah pemimpin tidak menghargai pendapat orang lain. Kedua, kurangnya saluran konsultasi dapat mempengaruhi motivasi bawahan. Bahkan tidak jarang, akibat model kepemimpinan ini, para pegawai merasa terasing. Itu akan meningkatkan kebencian terhadap pemimpin dan organisasi secara keseluruhan.

Kedua, Kepemimpinan Partisipatif (Demokratis). Dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis atau partisipatif, para bawahan diberi saluran untuk melakukan konsultasi. Pendapat bawahan diberi ruang, bahkan secara khusus diminta untuk memberikan review, saran, dan kritikan guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Keputusan yang diambil bisa jadi memang mencerminkan atau tidak mencerminkan pendapat pemimpin. Keuntungan utama dari jenis pengambilan keputusan ini adalah pengumpulan informasi yang maksimal. Informasi bisa muncul dari berbagai sudut pandang yang berbeda (beragam), sehingga bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan lebih fleksibel dan terukur. Alhasil, keputusan yang diambil memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima semua anggota organisasi. Hasilnya, kepercayaan diri dan kesetiaan di antara para pekerja akan meningkat. Namun begitu, keberhasilan pembuatan keputusan yang demokratis bergantung pada kondisi tertentu. Prasyarat yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang demokratis, individu harus termotivasi untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Jika prasyarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan menurunkan kualitas keputusan yang dibuat. Prasyarat lainnya harus ada sikap

saling percaya antara pemimpin dan anggota. Prasyarat terakhir, harus ada semangat untuk saling memberi dan menerima. Karena tidak ada keputusan yang benar-benar bisa memuaskan kepentingan semua pihak.

Ketiga, Kepemimpinan *Laissez-faire* atau *Free-rein*. Pemimpin memberi kebebasan maksimum kepada organisasi untuk mengambil keputusan. Pemimpin memberikan otonomi maksimum kepada anggota untuk mengeksplorasi kreativitas dan kebebasan berekspresi. Kelemahannya, komponen atau elemen-elemen organisasi kurang termotivasi. Tipe kepemimpinan ini akan menghasilkan banyak kekacauan dalam organisasi. Kepemimpinan model ini sangat tepat untuk organisasi yang memerlukan kebebasan berkreasi dan berpendapat.

5. Koordinasi

Koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan dan kegiatan dua unit atau lebih suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Untuk mencapai efisiensi diperlukan adanya pembagian kerja di antara berbagai unit organisasi. Efisiensi dapat meningkat dengan adanya spesialisasi kegiatan dan pengelompokan pekerjaan.

Ada beberapa cara untuk melakukan koordinasi. Pertama, metode Hierarki. Metode ini sangat penting untuk melakukan koordinasi. Hierarki dibuat untuk mengatur pelaksanaan wewenang, alokasi kerja, dan alur komunikasi. Staf dengan pangkat lebih tinggi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Jika ada masalah antar departemen atau divisi dapat diselesaikan melalui pegawai yang memiliki jabatan lebih tinggi. Kedua, menggunakan aturan atau regulasi. Metode ini digunakan agar pekerjaan organisasi dapat diprediksi. Ketiga, melalui identifikasi tujuan dan perumusan rencana. Metode ini bisa menjaga pola koordinasi lebih terarah. Dengan adanya identifikasi, maka akan memberi organisasi suatu kesatuan tujuan dan kesatuan arah. Pola ini akan membantu berbagai unit dalam organisasi yang mempunyai tanggung jawab berbeda untuk mengarahkan upaya mereka menuju pencapaian target mereka. Keempat, Organisasi besar dianjurkan menggunakan

komite untuk meningkatkan pola koordinasi. Rapat komite akan membantu mereka untuk bertukar informasi, saling memahami sudut pandang yang berbeda, dan menyelesaikan masalah (konflik). Kelima, menggabungkan metode komunikasi vertikal dan horizontal. Untuk berbagi informasi yang baik penggabungan pola komunikasi sangat dianjurkan. Dengan adanya pola seperti itu maka akan ada interkoneksi atau interrelasi. Keenam, memanfaatkan Teknologi Informasi. Pemanfaatan memungkinkan Manajemen melakukan koordinasi secara efektif dan efisien. Sistem ini memungkinkan pelaporan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat ketika diperlukan. Ketujuh, hubungan personal. Paling baik dari semua cara di atas pola koordinasi yang menggunakan pendekatan pola personal. Kepercayaan, penghormatan, dan penghargaan adalah segala-galanya.

6. Pelaporan (*Reporting*)

Pelaporan berarti memberi tahu atasan tentang berbagai aspek pekerjaan termasuk kemajuan berbagai program, masalah yang timbul dalam proses implementasi, dan masalah terkait hubungan, tanggung jawab, dan wewenang staf. Pelaporan dilakukan di setiap level. Pelaporan bisa dibuat secara berkala, seperti laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan akhir tahun.

Dengan adanya pelaporan yang dibuat secara berkala, akan membantu manajemen mendapat informasi tentang kinerja organisasi. Pelaporan memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan korektif ketika terjadi kesalahan. Pelaporan menanamkan rasa tanggung jawab di antara karyawan karena mereka harus melaporkan kegiatan program kepada otoritas yang lebih tinggi.

7. Penganggaran (*Budgeting*)

Anggaran adalah pernyataan lengkap tentang pendapatan dan pengeluaran organisasi per periode. Penganggaran juga bermakna memperkirakan pengeluaran dan pemasukan organisasi untuk tahun berikutnya. Dalam prakteknya Anggaran organisasi biasanya disetujui oleh badan pengendali tertinggi, Dewan Manajemen atau Dewan Pengatur. Setelah anggaran disetujui, alokasi

dana untuk berbagai bagian/departemen organisasi terjadi. Kepala departemen yang bersangkutan harus menjalankan fungsi sesuai dengan alokasi yang telah diterimanya.

Penganggaran adalah kegiatan khusus, di mana orang yang terlibat harus memiliki pengetahuan dalam bidang kebijakan, akuntansi, ekonomi, pembiayaan, dan lain-lain. Anggaran berisi pengeluaran, pendapatan, dan hasil yang direncanakan untuk periode waktu tertentu. Biasanya anggaran dibuat selama setahun, yaitu setiap tahun. Melalui anggaran, manajer mengendalikan kegiatan organisasi. Oleh karena itu penganggaran mengacu pada pengendalian organisasi berdasarkan anggaran.

Penganggaran perlu dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya:

- a) Keuangan merupakan bahan bakar bagi organisasi. Salah satu cara yang paling efektif mengendalikan organisasi adalah dengan cara mengarahkan atau mengendalikan bagian keuangan organisasi.
- b) Penganggaran membantu mengendalikan pengeluaran yang berlebihan. Terkadang manajer cenderung belanja berlebihan dengan justifikasi atau tanpa justifikasi.
- c) Penganggaran membantu dalam mencegah malpraktek administrasi dan keuangan.
- d) Penganggaran meningkatkan koordinasi dalam organisasi. Hal tersebut untuk membantu dan mencegah terjadinya konflik atau adanya ketumpang tindihan.
- e) Penganggaran juga membantu dalam mengukur kinerja organisasi. Kinerja organisasi dapat dilihat dalam kaitannya dengan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran.
- f) Anggaran juga merupakan sumber informasi. Alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan organisasi mengungkap prioritas organisasi. Hal tersebut akan berguna bagi orang-orang di luar organisasi serta karyawan dan pendukungnya.
- g) Proses persiapan penganggaran merupakan pelatihan secara tidak langsung. Para Manajer harus paham situasi yang ada, mendiskusikan kebutuhan organisasi di masa mendatang, dan

dengan tetap memperhatikan prioritas organisasi, menyiapkan anggaran berikutnya. Proses penganggaran membuat para manajer sadar akan tujuan organisasi, sumber daya yang tersedia, dan lingkungan internal maupun eksternalnya.

Q. Fitur Administrasi Kesejahteraan Sosial

Beberapa ciri khas dari administrasi kesejahteraan sosial adalah:

1. Administrasi kesejahteraan sosial berurusan dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan membantu mereka untuk mencapai tujuan dan sasaran lembaganya. Kegiatannya, secara khusus berkaitan dengan proses identifikasi tujuan sosial, perumusan, dan implementasi program yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Dari sudut pandang fungsional, administrasi kesejahteraan sosial mencakup tiga perspektif masalah sosial. Pertama, pemulihan fungsi sosial yang terganggu. Kedua, penyediaan sumber daya sosial dan individu, untuk fungsi sosial yang lebih efektif. Ketiga, pencegahan disfungsi sosial.
3. Terlepas dari beragamnya variasi ukuran, ruang lingkup, struktur, dan jenis program, setiap lembaga memiliki dewan pengurus sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pengambilan keputusan akhir. Kepengurusan biasanya diwakili oleh komunitas yang ingin dilayani.
4. Administrasi kesejahteraan sosial membutuhkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal dan digunakan secara bersama-sama melalui peran partisipasi aktif masyarakat, sehingga tujuan akhir dari program dapat tercapai dengan baik.
5. Badan kesejahteraan sosial harus mengalokasikan bagian tertentu dari sumber daya yang mereka miliki untuk bertahan hidup agar organisasi yang dikelola dapat terus eksis. Tetapi, ini seharusnya tidak membatasi kapasitas mereka untuk mencapai pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif.
6. Lembaga kesejahteraan sosial biasanya berfungsi secara kooperatif dan memastikan partisipasi semua anggota dalam administrasi kegiatan mereka.

7. Ada tren menarik yang berkembang hari ini di lembaga-lembaga sosial untuk mempekerjakan para pakar (tenaga ahli) yang berkualitas dan profesional. Tujuannya adalah untuk membantu agensi kesejahteraan sosial dalam mendapatkan pendekatan yang memadai dan profesional ketika menjalankan fungsi lembaga kesejahteraan sosial.

R. Fungsi Administrasi Kesejahteraan Sosial

Fungsi administrasi kesejahteraan sosial dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga mencakup beberapa hal:

1. Merumuskan tujuan dan program lembaga yang tepat. Hal tersebut sangat penting untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna memahami situasi sebenarnya. Umumnya agensi kesejahteraan sosial akan fokus pada masalah tertentu di wilayah geografis tertentu.
2. Menganalisis informasi yang dikumpulkan sehingga bisa merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah sosial. Salah satu pekerjaan lembaga kesejahteraan sosial adalah untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat di daerah tersebut.
3. Mengenali, menyaring, dan memilih rencana tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah dan melaksanakan inisiatif lembaga kesejahteraan sosial.
4. Merumuskan kebijakan, program, dan rencana secara terarah untuk melaksanakan tujuan lembaga kesejahteraan sosial secara efektif.
5. Mengidentifikasi kebutuhan personil yang sesuai dengan tepat untuk keperluan agensi kesejahteraan sosial, orientasi agensi, dan pengawasan agensi, sehingga mereka mampu memahami tujuan dan cara melakukan serta mengimplementasikan program agensi.
6. Menginspirasi para relawan agensi agar mereka bisa melibatkan diri dalam tujuan dan sasaran agensi kesejahteraan sosial.

7. Tugas administrasi harus mampu mendelegasikan pekerjaan ke berbagai departemen di bawah pengawas yang akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang ditugaskan. Selain itu, tugas administrasi adalah mengkoordinasikan setiap kegiatan dan tugas sehingga bisa diperoleh hasil yang maksimal.
8. Peran, peraturan, praktik, dan prosedur harus diatur sedemikian rupa sehingga ada keseragaman dan akuntabilitas di antara semua staf lembaga sehingga tujuan agensi mudah dicapai.
9. Agensi harus menyimpan catatan dan laporan secara rapi, terukur, dan sistematis. Catatan dan laporan ini harus dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan pekerjaan agensi.
10. Pengelolaan keuangan harus dikelola secara modern, ekonomis, dan ketat sehingga bisa meminimalisir adanya potensi penyelewengan. Keuangan harus dimanfaatkan dengan baik dan dicatat secara akurat, karena keuangan adalah tulang punggung organisasi.
11. Setiap agensi harus menetapkan standar kerja agar kegiatan agensi bisa terukur. Personil dari level tertinggi hingga level terendah harus mampu memahami dan mempertahankan standar kerja yang telah dibuat. Pembuatan dan penetapan standar kerja bertujuan untuk memberikan garis panduan dan hala tuju organisasi agar staf dan personel bekerja dengan sangat hati-hati.
12. Penting diperhatikan, salah satu kunci utama yang bisa menjaga kinerja seluruh personel agensi adalah komunikasi. Komunikasi vertikal maupun horizontal harus jelas dan lancar antar lini dalam agensi kesejahteraan sosial. Agensi juga harus memiliki saluran komunikasi yang terbuka dengan komunitasnya.
13. Administrasi kesejahteraan sosial juga harus memastikan bahwa agensi telah melakukan koordinasi dengan benar dalam berbagai departemen lembaga dan di berbagai tingkatan dalam agensi. Agensi kesejahteraan sosial juga harus mampu melakukan koordinasi yang tepat dengan personel lainnya yang bekerja di bidang yang sama. Harus ada jejaring yang terhubung dengan baik

antara personel, baik itu dalam tema yang sama maupun wilayah geografis yang sama.

14. Administrasi kesejahteraan sosial memiliki peranan penting dalam proses pemantauan dan evaluasi program lembaga. Administrasi bisa digunakan untuk mengukur dan menilai hasil keseluruhan pekerjaan agensi.

S. Agensi Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial dalam prakteknya melibatkan agensi, baik itu agensi negara maupun agensi swasta. Agensi adalah organisasi atau institusi (lembaga) yang menyediakan layanan sosial seperti pengobatan dan usaha-usaha pencegahan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Lembaga-lembaga tersebut dalam tindakannya mempraktikkan pekerjaan sosial, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh agensi.

Secara umum, badan kesejahteraan sosial ada tiga macam:

1. Instansi pemerintah yang berfungsi sesuai dengan peraturan pemerintah (dikendalikan oleh pemerintah). Lembaga ini menjalankan kegiatan dengan menggunakan sumber dana dari hasil pengumpulan pajak negara.
2. Lembaga-lembaga kesukarelawanan. Lembaga ini biasanya berbentuk komunitas, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan yayasan. Lembaga-lembaga tersebut biasanya memiliki perhatian dan gerakan (advokasi) pada pengembangan kapasitas masyarakat yang bermasalah secara sosial. Model pendanaannya bisa dari hasil penggalangan sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat, kegiatan amal, dan dari anggota lembaga sendiri. Bahkan tak jarang lembaga model ini pendanaannya mendapatkan bantuan (sponsor) dari lembaga pemerintahan.
3. Lembaga non-pemerintah (semi pemerintah) dan otonom yang dipromosikan dan didanai oleh pemerintah.

T. Tipe-tipe Agensi Kesejahteraan Sosial

Jika melihat bentuknya, maka ada dua tipe utama lembaga kesejahteraan sosial:

1. Badan publik atau pemerintah. Lembaga ini dibentuk dengan merujuk pada undang-undang atau kebijakan pemerintah. Lembaga ini dibuat dan diatur dalam kerangka mendukung kerja pemerintahan dalam menyediakan layanan sosial. Dalam melaksanakan kerjanya, lembaga ini dibiayai sendiri oleh Pemerintah.
2. Instansi Swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Sukarela yang didirikan oleh individu atau kelompok filantropis, organisasi agama, perkumpulan persaudaraan atau organisasi-organisasi kemanusiaan. Menurut Lord Beveridge (2015), organisasi sukarela adalah organisasi yang entah dibayar atau tidak dibayar, diprakarsai dan dikelola oleh anggota sendiri tanpa ada kontrol dari eksternal. Manajemen organisasi biasanya berbentuk dewan direksi. Pendanaan organisasi-organisasi ini didukung dari kontribusi atau sumbangan anggota atau masyarakat yang tidak terikat secara langsung dengan organisasi. Selain itu, pendanaan juga berasal dari dana abadi atau dana perwalian.

Ada tipe lain dari agensi sosial. Tipe ini berhubungan dengan relasi antar negara (konteks diplomasi). Tipe model ini, tidak hanya melakukan kegiatan penyediaan sosial dalam satu kawasan tertentu saja, tapi melintasi batasan-batasan negara. Contoh dari model ini adalah Agensi Bilateral, Agensi Internasional, Lembaga Donor, lembaga-lembaga PBB, organisasi amal dunia, komunitas masyarakat dunia, dan lembaga-lembaga amal.

a) Agensi Bilateral.

Kata bilateral berarti, "Perjanjian yang dibuat antara dua negara". Dalam hal ini, perjanjian dua negara yang dimaksud adalah menyusun kesepakatan-kesepakatan terkait urusan biaya masuk barang sumbangan dari salah satu negara ke negara tertentu yang dituju, termasuk di dalamnya urusan pembebasan biaya masuk barang sumbangan. Agensi bilateral biasanya menangani masalah-masalah khusus yang dikerjakan samakan antar dua negara. Misal, bantuan dan rehabilitasi untuk orang miskin dan yang membutuhkan serta program penghapusan diskriminasi. Di bawah perjanjian ini, komoditas yang diperlukan seperti biji-bijian

untuk bahan pangan, susu bubuk untuk penanganan gizi, makanan olahan untuk penanggulangan kelaparan, obat-obatan untuk penanggulangan masalah kesehatan (misal: adanya wabah penyakit), peralatan rumah sakit, dan lain sebagainya kemudian diserahkan oleh organisasi yang disetujui oleh kedua negara kepada organisasi yang telah disetujui oleh kedua negara.

b) Agensi internasional

Meskipun urusan kesejahteraan rakyat menjadi urusan negara, namun tidak serta merta negara mampu memenuhinya secara keseluruhan. Penyebabnya karena terbatasnya sumber daya keuangan negara, jumlah tenaga kerja, dan sumber daya lain yang dimiliki negara. Karena itu, dalam mewujudkan kesejahteraan sosial warganya, negara juga tergantung kepada bantuan dan dukungan negara lain untuk memperbaiki nasib orang miskin. Atas dasar pengakuan inilah kerja sama internasional dalam kesejahteraan sosial mutlak diperlukan untuk mengamankan kesejahteraan sosial dan ekonomi manusia di manapun mereka hidup dan berada.

Organisasi kesejahteraan sosial internasional dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelompok. Pertama, instansi Pemerintah yang berkarakter Internasional, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dll. Kedua, Organisasi Swasta Internasional, misalnya *The Inteternationall Confrence of Social Work*, Federasi Kesehatan Mental Dunia (*World Federation of Mental Health*), Serikat Internasional untuk Kesejahteraan Anak (*The International Union for the Child Welfare*). Ketiga, Organisasi Swasta Internasional yang memiliki organisasi yang otonom di masing-masing negara, misalnya Palang Merah Internasional. Empat, Instansi Pemerintah Nasional memperluas bantuan mereka ke negara lain, misalnya USAID, AUSAID, dan JICA. Kelima, Instansi Swasta Nasional memperluas layanan sosial mereka ke negara lain, misalnya *Ford Foundation*.

c) Lembaga Donor

Salah satu kegiatan utama dari Organisasi Non Pemerintah adalah memobilisasi keuangan dan teknik untuk mendukung kegiatannya. Sejumlah organisasi Nasional dan Internasional menyediakan dana dan dukungan teknis ke organisasi layanan sosial lainnya. Agensi semacam ini dikenal sebagai agensi donor. Lembaga donor ini memberikan dukungan keuangan dan teknis berdasarkan proposal proyek yang diajukan oleh organisasi lain. Umumnya lembaga donor menyediakan dana dan layanan kepada organisasi yang telah terdaftar dalam organisasi mereka. Jumlah dan dukungan yang diberikan oleh lembaga donor dalam setiap proyek bervariasi tergantung persyaratan atau beratnya masalah yang hendak ditangani. Lembaga donor biasanya mengumpulkan dana dari masyarakat dan Pemerintah. Contoh dari lembaga donor ini yang masih aktif hingga hari ini adalah World Vision.

d) Lembaga-lembaga dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB telah membentuk berbagai organisasi untuk kelompok yang membutuhkan bantuan khusus. Lembaga-lembaga tersebut ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap usaha kesejahteraan internasional. Ada beberapa lembaga yang sangat terkenal dalam PBB. Pertama, *United Nations Children's Fund* (UNICEF). Lembaga tersebut didirikan dalam Majelis Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1946. Tujuannya adalah untuk membantu negara anggota dalam mengembangkan dan meningkatkan kondisi anak-anak serta remaja. UNICEF memberikan bantuan dalam bidang-bidang khusus seperti kesehatan, nutrisi, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pelatihan kejuruan. Sebagian besar bantuan UNICEF dalam bentuk penyediaan peralatan, obat-obatan, pengeboran air bersih, perlengkapan taman sekolah, dan produksi buku pelajaran. Kedua, lembaga yang menangani masalah pengungsi (UNHCR). Lembaga UNHCR didirikan pada 1 Januari 1951. Atas permintaan Pemerintah, lembaga tersebut memberikan bantuan perlindungan hukum kepada para pengungsi dan memberikan bantuan untuk para pengungsi.

Masih ada lagi lembaga PBB lainnya yang juga bekerja untuk kesejahteraan sosial manusia. Lembaga tersebut diantaranya :

- *United Nations Center for Regional Development.*
- *United Nations Development Programme.*
- *United National Education, Scientific and Cultural Organisation.*
- *United Nations Environment Programme.*
- *United Nations Institute for Training and Research.*
- *United Nations Research Institute for Social Development.*

e) Organisasi Amal

Organisasi Amal adalah organisasi yang didirikan untuk membantu orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Organisasi-organisasi ini terutama dibentuk untuk melayani orang-orang yang membutuhkan melalui pendekatan kegiatan amal. Lembaga-lembaga ini memberikan perawatan kepada orang miskin dan terabaikan. Mereka juga menyediakan makanan, pakaian, dan perawatan medis untuk orang-orang yang membutuhkan

f) Perwalian Karikatif (Trust).

Program kesejahteraan sosial juga bisa dijalankan oleh perwalian karikatif. Trust adalah kewajiban yang dilampirkan pada kepemilikan properti dan timbul dari kepercayaan yang direpresentasikan dan diterima oleh wali amanat untuk kepentingan orang lain dan pemiliknnya.

U. Layanan Kesejahteraan Sosial

Layanan-layanan kesejahteraan sosial mencakup program apa pun yang dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Layanan sosial bertujuan untuk memberikan dukungan (solusi) terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sementara kesejahteraan ekonomi umumnya mengacu pada dukungan finansial. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan ekonomi adalah untuk membantu warga negara yang tidak mampu untuk menghidupi diri sendiri atau keluarga mereka karena status pengangguran, setengah pengangguran, kesulitan hidup, kapasitas kemampuan kerja yang kurang terampil, kecacatan, atau alasan serupa lainnya. Dalam banyak kasus, orang tua (manula) dan orang tua tunggal mungkin

juga berhak mendapatkan bantuan. Untuk menerima manfaat, sebagian besar program memerlukan bukti kebutuhan nominal keuangan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh negara atau individu. Karena dalam prakteknya, banyak terjadi kasus penyalahgunaan program kesejahteraan yang mengancam kredibilitas sistem kesejahteraan. Alat umum yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program layanan kesejahteraan adalah menguji sarana prasarana yang digunakan memperkirakan pendapatan dan mengukurnya terhadap standar hidup layak. Ketika pendapatan berada di bawah rata-rata, maka individu dianggap berada di bawah tingkat kemiskinan. Dalam kondisi tersebut, maka pelayanan sosial yang terbaik adalah memberikan bantuan ekonomi kepada individu yang membutuhkan. Bahkan, tidak jarang dalam beberapa kasus, seseorang mungkin diminta untuk menunjukkan pengalamannya dalam usaha yang telah dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan guna menerima tunjangan kesejahteraan.

Dengan demikian layanan sosial adalah layanan yang dimaksudkan untuk populasi normal. Sedangkan, layanan kesejahteraan sosial dirancang khusus untuk kelompok masyarakat yang rentan (lemah). Tujuan layanan sosial di sisi lain adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara umum. Layanan kesejahteraan sosial juga memungkinkan layanan yang disediakan dapat membantu mereka mencapai kemakmuran dalam masyarakat. Demikianlah tujuan kedua layanan tersebut seharusnya dilakukan.

Administrasi program kesejahteraan sosial yang efektif membutuhkan integrasi pengetahuan kebijakan sosial dengan pemahaman teori dan praktik manajemen serta pengambilan keputusan administratif. Integrasi pengetahuan substantif kebijakan sosial dengan praktik administrasi diperlukan untuk menghindari penekanan yang berlebihan terhadap aktivitas yang merugikan tujuan program sosial (Neugeboren, 1979). Administrasi yang efektif dari program kesejahteraan sosial membutuhkan integrasi pengetahuan kebijakan sosial dengan pemahaman teori dan praktik manajemen dan pengambilan keputusan administratif. Kebutuhan untuk mengintegrasikan konten kebijakan kesejahteraan sosial dan masalah administrasi dan organisasi menjadi semakin jelas

ketika industri kesejahteraan sosial memberikan perhatian yang lebih besar pada efisiensi dan efektivitas organisasi kesejahteraan sosial (Neugeboren, 1979). Titmus (dalam Neugeboren, 1979) mendefinisikan administrasi sosial sebagai "studi tentang layanan sosial yang tujuannya adalah untuk perbaikan kondisi kehidupan individu. Titmus, kemudian menyatakan bahwa administrasi sosial berkaitan dengan "mesin administrasi yang mengatur dan mengeluarkan berbagai bentuk bantuan sosial".

Menurut Neugeboren (1979), upaya yang lebih terarah untuk mengintegrasikan kebijakan dan administrasi telah dilakukan oleh David Donnison dalam bukunya, *Social Policy and Administration*. Apa yang dilakukan oleh Donnison merupakan upaya yang sangat penting untuk mengintegrasikan pengetahuan tentang tugas-tugas organisasi, struktur dan proses analisis kebijakan pemberian layanan di bidang-bidang substantif tertentu seperti perumahan, kesejahteraan anak, kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Donnison, menggambarkan dengan baik tentang pengaruh perubahan kebijakan di tingkatan bawah dan menengah dalam organisasi serta kemungkinan untuk perubahan tambahan yang tidak direncanakan. Perbedaan antara pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan yang dibuat oleh Donnison sangat berguna dalam memahami proses di balik perubahan besar dalam tujuan organisasi.

V. Program Kesejahteraan Sosial

Salah satu dari berbagai program pemerintah yang dirancang untuk melindungi warga dari resiko ekonomi dan ketidakamanan hidup. Jenis-jenis program yang paling umum memberikan adalah dengan memberikan manfaat kepada individu yang telah memasuki usia lanjut atau pensiunan, orang sakit atau tidak, kelompok penyintas yang mempunyai tanggungan, para ibu yang membutuhkan program kesejahteraan sosial, pengangguran, para pekerja yang menderita sakit, dan keluarga yang bermasalah secara sosial. Metode pembiayaan, model administrasi kesejahteraan, ruang lingkup cakupan, dan manfaat layanan sangat bervariasi di tiap-tiap negara-negara.

Undang-undang kesejahteraan sosial modern paling awal diberlakukan di Jerman pada tahun 1880-an. Karena program serupa telah diadopsi di negara-negara lain, maka tren layanan mengarah ke cakupan yang lebih komprehensif, baik dari segi persyaratan kelayakan maupun sifat risiko yang dipertanggungjawabkan. Tingkat perlindungan minimum telah dipandang sebagai salah satu tanggung jawab umum pemerintah berkenaan dengan risiko spesifik, dan konsensus di banyak negara telah menyatakan bahwa tanggung jawab publik mencakup semua hal yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk merawat diri mereka sendiri dengan alasan apapun. Dalam pandangan ini kesejahteraan sosial diperluas dan diterima sebagai masalah hak daripada masalah kebutuhan.

Karakteristik utama dari program kesejahteraan atau keamanan adalah risiko yang harus dilindungi terhadap populasi yang dicakup, kriteria kelayakan, tingkat manfaat, cara pembiayaan, dan prosedur administrasi. Dalam praktiknya, semua kriteria tersebut tunduk pada berbagai variasi yang sangat luas di masing-masing negara. Secara khusus, kriteria kelayakan sering kali mencakup “pengaturan waktu”, yang mengharuskan adanya partisipasi atau cakupan oleh suatu program untuk waktu tertentu. Pendanaan umumnya dilakukan dengan meminta kontribusi dari orang-orang yang dilindungi, pengusaha, atau keduanya. Bisa juga pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan pemerintah, atau dengan kombinasi ketiga-tiganya.

Jenis-jenis program yang paling umum dalam program kesejahteraan sosial salah satunya adalah Program untuk usia tua. Program ini memberikan manfaat bagi mereka yang hidup di luar kemampuan atau kelayakan mereka untuk terlibat dalam pekerjaan yang menguntungkan. Program ini akan sangat berguna bagi mereka yang mengalami cacat permanen selain dari cedera akibat kerja, warga masyarakat yang tidak tercakup dalam beberapa program perlindungan medis lainnya, dan bagi mereka yang hanya bergantung pada dana pensiun atau tunjangan akibat kematian. Program jenis ini biasanya menyediakan cakupan universal; mereka umumnya dilindungi melalui program iuran asuransi.

W. Karakteristik Kesejahteraan Sosial

Sistem Kesejahteraan Sosial adalah sistem di mana Pemerintah Nasional dan organisasi pemerintah daerah memberikan bantuan yang diperlukan kepada kaum miskin, anak-anak yang membutuhkan perlindungan, keluarga yatim, orang-orang cacat, dan untuk mendukung kehidupan mereka serta mempromosikan kehidupan mereka agar mandiri.

Menurut Wayne Vasey (1958), definisi kesejahteraan sosial mencakup dua karakteristik utama. Pertama, Pemanfaatan langkah-langkah kesejahteraan untuk mendukung atau memperkuat keluarga sebagai lembaga sosial dasar di mana kebutuhan terpenuhi. Langkah-langkah kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan dan kepentingan sejumlah besar orang yang terdiri dari kebutuhan fisik, mental, emosional, spiritual, dan ekonomi anggota keluarga. Kedua, langkah-langkah kesejahteraan bertujuan memperkuat kapasitas individu untuk mengatasi situasi hidupnya. Sistem kesejahteraan sosial memiliki tujuan menciptakan kondisi dasar yang memungkinkan semua anggota masyarakat mewujudkan potensi mereka untuk mencapai pertumbuhan dan pemenuhan diri. Terlepas dari adanya cacat psikologis, cacat sosial, dan cacat fisik, orang harus dimungkinkan untuk hidup, bekerja dan berkembang dalam lingkungan yang normal.

X. Metode Pengukuran Kesejahteraan

Jika kita tarik benang merahnya, maka tujuan kesejahteraan sosial adalah membangun manusia untuk berdaya dan mandiri. Melalui serangkaian kebijakan manusia diberi peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya kehidupan yang bisa membawa manusia pada kondisi sejahtera. Dreher (2006), Kumlin & Rothstein (2005) dan Midgley (2006), dalam tulisan-tulisannya dengan tegas menyatakan bahwa tujuan pembangunan adalah membawa umat manusia menuju kepada kesejahteraan. Hal tersebut selaras dengan aspek-aspek tentang penegakan hak-hak asasi manusia. Menurut ADB (2003) dan Ife (200), pembangunan manusia haruslah dalam rangka pemenuhan unsur-unsur kesejahteraannya.

Dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan sosial tentu saja harus terukur dan proporsional, mengingat target dan dimensi kesejahteraan yang begitu luas dan saling berkaitan dengan dimensi-dimensi lain, seperti spritualitas, psikologi, perundang-undangan, politik, dan ekonomi. Dalam mengukur kesejahteraan dan pemenuhan sosial, kebijakan diharapkan mampu menjadi alat yang bisa menerapkan keadilan seluas-luasnya dalam masyarakat. Karenanya, menurut Gilbert (1993), diperlukan adanya peran institusi-institusi sosial seperti keluarga (peran dalam sosialisasi dan produksi), politik (peran dalam kontrol sosial), Ekonomi (peran dalam produksi, distribusi dan konsumsi), Agama (peran untuk integrasi sosial) dan Kesejahteraan (peran atas solidaritas sosial) untuk menjamin tercapainya kondisi sosial yang harmonis dan sejahtera.

Karena rumitnya pengukuran kesejahteraan sosial, dalam perkembangannya hanya sekali pendekatan dan metode yang digunakan, tergantung pada dimensi dan kaitan-kaitan apa saja yang mau dihubungkan. Maknanya, kesejahteraan sosial tidak bisa diukur hanya dengan satu dimensi. Pengukuran harus bersesuaian dengan *setting* (agenda) sosial yang hendak diukur. Konsep dan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang selama ini berkembang dan digunakan oleh beberapa negara senantiasa mempergunakan ukuran yang bersifat multi-dimensional. Hal ini dapat dipahami karena isu kesejahteraan masyarakat memiliki kompleksitas persoalan yang sangat sangat beragam, yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui satu dimensi/ variabel (*single dimension*) pendekatan saja.

Berikut beberapa konsep pengukuran kesejahteraan yang sering digunakan oleh agensi-agensi negara maupun swasta untuk mengukur kesejahteraan sosial:

1. *Human Development Index (HDI)*

HDI di Indonesia populer dengan sebutan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode ini dikembangkan oleh UNDP dengan tujuan untuk mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pengukuran kesejahteraan ini adalah melakukan “*social invesment*” guna menghasilkan SDM yang berkualitas sebagai motor penggerak (*Trigger*) utama pembangunan berkelanjutan.

Indeks ini berfungsi untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia di suatu negara.

Dalam konsep IPM, kesejahteraan dilihat secara parsial, yaitu dari sudut pandang pendidikan, kesehatan, dan tingkat pengeluaran riil untuk memenuhi kebutuhan per-individu (Osberg & Sharpe, 2003; Setiawan & Hakim, 2013).

Ada 4 (empat) indikator utama dalam HDI/IPM, yaitu: 1) Angka melek huruf. 2) Angka partisipasi pendidikan. 3) Angka harapan hidup. 4) Angka PDB Per Kapita (daya beli).

2. *Gross National Happiness*.

Metode pengukuran kesejahteraan masyarakat ini diterapkan di sebuah negara kecil di Asia Tengah, Bhutan. Penggunaan konsep pengukuran “kebahagiaan” (*happiness*) menarik perhatian para ilmuwan sosial, ekonomi, maupun statistik. Indikator yang digunakan sangat “*local specific*” disesuaikan dengan kondisi masyarakat Bhutan, seperti penguasaan bahasa Ibu, partisipasi budaya, ketersediaan terhadap akses kebutuhan dasar, tingkat partisipasi dalam kegiatan di level komunal (*community vitality*) atau kegotongroyongan, serta keberlanjutan lingkungan.

3. *Index Quality of Life (IQL)*.

Model ini dikenalkan sejak tahun 2005 dengan memfokuskan pada 9 variabel, yakni;

- a) Kesehatan;
- b) Kehidupan keluarga;
- c) Kehidupan masyarakat;
- d) Kesejahteraan materi;
- e) Keamanan dan stabilitas politik;
- f) Iklim dan geografi;
- g) Keamanan kerja;
- h) Kebebasan politik; dan
- i) Kesenjangan gender.

Sumber data yang digunakan untuk pengukuran indeks ini beragam, mulai dari survei, sensus, dan laporan-laporan dari Biro Sensus Amerika Serikat atau data dari PBB (Veenhoven, 2004).

4. Prosperity Index

Konsep kesejahteraan ini memiliki 8 indikator, yakni:

- a) Ekonomi;
- b) Kesehatan;
- c) Kewirausahaan;
- d) Keamanan dan keselamatan;
- e) Tata pemerintahan (*good governance*);
- f) Kebebasan individu;
- g) Pendidikan; dan
- h) Modal sosial (*social capital*).

Dalam perhitungannya, kedelapan indikator tersebut dihubungkan dengan peningkatan *income* per-kapita, selanjutnya pendapatan per-kapita ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan (*wellbeing*).

5. The Better Life Index.

Konsep pengukuran kesejahteraan ini banyak digunakan oleh negara-negara maju (OECD), di mana model pengukuran ini memiliki 11 indikator yakni; (1) Perumahan; (2) Pendapatan; (3) Pekerjaan; (4) Kemasyarakatan; (5) Pendidikan; (6) Lingkungan; (7) Keterlibatan publik (*civic engagement*); (8) Kesehatan; (9) Kepuasan hidup (*life satisfaction*); (10) Keamanan/keselamatan; dan (11) Keseimbangan hidup (*work-life balance*).

6. The Economic Well-being Index (EWI).

Konsep pengukuran kesejahteraan ini memiliki 15 indikator dengan 4 dimensi, yakni; (1) Dimensi konsumsi; (2) Dimensi ketersediaan modal; (3) Dimensi kesetaraan dari sisi pendapatan; dan (4) Dimensi keamanan ekonomi.

Adapun 15 indikatornya meliputi; (1) Konsumsi per-kapita; (2) Angka harapan hidup; (3) Pekerjaan yang tidak dinilai dengan upah (*unpaid work*); (4) Tingkat kesenangan; (5) Pengeluaran per kapita; (6) Pengeluaran tidak terduga; (7) *Capital stock* per-kapita; (8) Sumber daya alam per-kapita; (9) Sumber daya manusia; (10) Tingkat investasi; (11) Tingkat pemerataan pendapatan; (12) tingkat

kesenjangan; (13) Tingkat pengangguran; (14) Risiko sakit; (15) Tingkat kerawanan miskin (Sumner, 2004).

7. *Index of Happiness (Indeks Kebahagiaan)*

Indeks kebahagiaan merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu. Di Indonesia pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan sebesar 68,28 pada skala 0 - 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia.

Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) Kesehatan, 2) Pendidikan, 3) Pekerjaan, 4) Pendapatan rumah tangga, 5) Keharmonisan keluarga, 6) Ketersediaan waktu luang, 7) Hubungan sosial, 8) Kondisi rumah dan aset, 9) Keadaan lingkungan, dan 10) Kondisi keamanan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2018 kembali merilis data sosial ekonomi penduduk Indonesia. Salah satu yang dipublikasikan adalah terkait indeks kebahagiaan rakyat Indonesia selama 2017. Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0–100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin tidak bahagia.

Ada perubahan metode pengukuran indeks kebahagiaan dari yang dirilis 2014 dan 2017. Tahun 2014 metode pengukuran indeks kebahagiaan hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup. Di tahun 2017 Indeks Kebahagiaan ditambahkan Dimensi Perasaan (*affect*) dan Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*).

Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan data hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2017 yang dilaksanakan di 487 kabupaten dan kota yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sampel yang digunakan sebanyak 75.000 rumah tangga

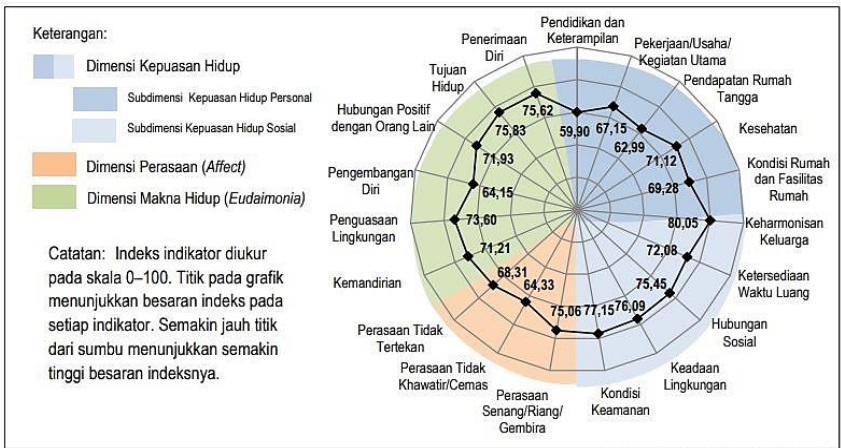
dengan respons sebesar 96,42 persen (72.317 rumah tangga) untuk estimasi level nasional dan provinsi.

Responden pada survei ini adalah kepala rumah tangga atau pasangan kepala rumah tangga. Dibandingkan 2014, indeks kebahagiaan 2017 mengalami peningkatan. Dengan metode yang sama seperti di tahun 2014, indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia ditemukan sebesar 69,51. Sementara pada 2014, indeks kebahagiaan sebesar 68,28. "Terjadi peningkatan indeks sebesar 1,23 poin (BPS, 2018).

Setelah diukur dengan metode tahun 2017 yakni memasukkan Dimensi Kepuasan Hidup, Dimensi Perasaan (*affect*) dan Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*), Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun ini sebesar 70,69 pada skala 0–100. Angka ini diukur berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK). BPS juga menemukan bahwa Indeks Kebahagiaan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan mencapai 71,64. Angka ini cenderung lebih tinggi dibanding penduduk yang tinggal di perdesaan dengan Indeks Kebahagiaan 69,57.

Indeks Kebahagiaan penduduk laki-laki sebesar 71,12 lebih tinggi dibandingkan nilai indeks penduduk perempuan 70,30. Warga yang belum menikah cenderung lebih bahagia dibanding penduduk yang sudah menikah. Hal ini terlihat dari Indeks Kebahagiaan penduduk yang belum menikah 71,53 atau cenderung lebih tinggi dibanding penduduk dengan status perkawinan yang lain. BPS menemukan bahwa Indeks Kebahagiaan penduduk cenderung mengalami penurunan dengan semakin bertambahnya umur. Penduduk dengan umur 24 tahun ke bawah memiliki Indeks Kebahagiaan tertinggi sebesar 71,29.

Gambar 11. Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2017



Sementara Peringkat kebahagiaan Indonesia di tingkat dunia mengalami penurunan. Pada tahun 2018, tingkat kebahagiaan Indonesia turun dari semula di rangking 88 menjadi 96 atau turun sebanyak 8 peringkat. Penurunan tingkat kebahagiaan ini tercatat dalam *World Happiness Report 2018* seperti dikutip detikFinance, Rabu (26/12/2018).

World Happiness Report 2018 merupakan survei kebahagiaan global. Survei mendata 156 negara berdasarkan tingkat kebahagiaannya, dan 117 negara berdasarkan kebahagiaan para imigrannya. Peringkat kebahagiaan dalam laporan ini merupakan survei yang dilakukan *Gallup World Poll* dari tahun 2015-2017 yang menunjukkan perubahan dan stabilitas.

Dalam survei tersebut lima peringkat teratas yakni Finlandia, Norwegia, Denmark, Islandia, dan Swiss. Peringkat tersebut berdasarkan 6 variabel kunci yang mendukung kesejahteraan yakni pendapatan, harapan hidup sehat, dukungan sosial, kebebasan, kepercayaan, dan kemurahan hati. Dari laporan itu, Indonesia berada pada rangking 96 berdasarkan survei 2015-2017. Padahal, Indonesia sebelumnya berada pada rangking 88 pada survei 2008-2010.

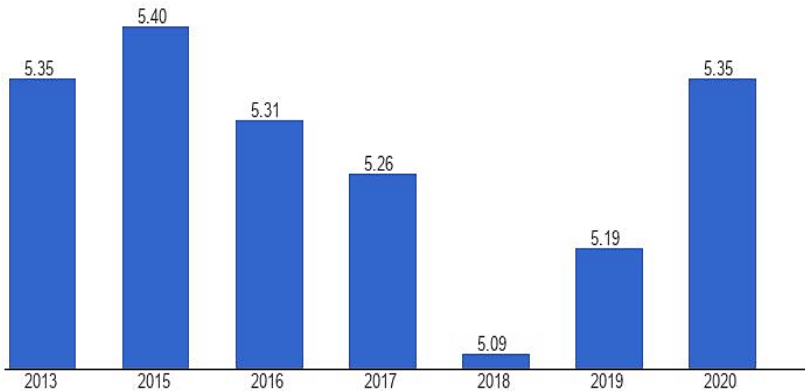
Laporan *World Happiness Report 2018* terdiri dari 7 bab. Bab pertama berisi mengenai kebahagiaan dan migrasi, kedua migrasi

internasional dan kebahagiaan global, ketiga kebahagiaan kelompok migran dan keluarganya meningkat dengan proses migrasi. Bab empat migrasi lokal dan kebahagiaan di China, kelima kebahagiaan dan migrasi internasional di Amerika Latin, keenam laporan kebahagiaan di Amerika Latin, dan terakhir krisis kesehatan di Amerika dan *Easterlin Paradox*.

Pada Tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 82 dari daftar negara paling bahagia. Sementara itu, Afghanistan berada pada peringkat paling bawah dan dinobatkan sebagai negara paling tidak bahagia di dunia. Para peneliti juga membandingkan data tahun ini dengan rata-rata tahun sebelumnya untuk mengukur dampak pandemi Covid-19. Hasilnya, mereka menemukan frekuensi emosi negatif yang lebih tinggi secara signifikan di lebih dari sepertiga negara. Kendati demikian, emosi positif tetap meningkat di 22 negara meski dunia sedang dilanda pandemi Covid-19. Salah satu penyusun laporan tersebut, John Helliwell, mengatakan bahwa secara rata-rata, tidak ada penurunan kesejahteraan ketika diukur dengan evaluasi setiap individu terhadap kehidupan mereka. "Satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa orang melihat Covid-19 sebagai ancaman umum dari luar yang memengaruhi semua orang dan ini telah menghasilkan rasa solidaritas yang lebih besar," (Helliwell dalam Pristiandaru, 2021).

Dikutip dari www.theglobaleconomy.com, Nilai rata-rata Indonesia selama periode 2013-2020 adalah 5,28 poin dengan minimal 5,09 poin pada tahun 2018 dan maksimum 5,4 poin pada tahun 2015. Nilai terakhir dari tahun 2020 adalah 5,35 poin. Sebagai perbandingan, rata-rata dunia pada tahun 2020 berdasarkan 150 negara adalah 5,51 poin.

Gambar 12. Diagram Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Indonesia dari Tahun 2013 – 2020



Sumber:

<https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/happiness/>

Gambar 13. Perbandingan Skor dari 2013 -2020 dan Grafik Kenaikan Kebahagiaan Indonesia Periode 2013-2020



Sumber: <https://countryeconomy.com/demography/world-happiness-index/indonesia>

8. Human Wellbeing Index (HWI)

Prescott-Allen (2001), mengatakan bahwa ekosistem dan kesejahteraan memiliki keterkaitan lebih dari hanya sekedar konsumsi sumber daya yang rendah (sehingga tidak dapat diukur secara memadai oleh *The Ecological Footprint*) serta lebih dari jumlah

kebijakan dan praktik lingkungan suatu negara (yang diukur dengan Indeks Kelestarian Lingkungan).

Ekosistem kesejahteraan, menurut Prescott-Allen, memiliki lima dimensi:

- a) Menjaga keragaman dan kualitas ekosistem lahan alami;
- b) Menjaga keragaman dan kualitas ekosistem air;
- c) Mengembalikan keseimbangan kimia atmosfer global dan kualitas udara setempat;
- d) Menjaga spesies liar dan gen dalam spesies domestikasi;
- e) Penggunaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan daya dukung ekosistem.

Prescott-Allen telah menghasilkan empat indeks: 1) Indeks Kesejahteraan Manusia (*Human Wellbeing Index*). 2) *Ekosistem Wellbeing Index* (EWI). 3) Indeks Kesejahteraan (menggabungkan HWI dan EWI, kemudian mengukur “sustainability”). dan 4) Kesejahteraan/Stress Index (seberapa banyak rasio kerugian pembangunan suatu negara yang tidak berada pada ekosistem global).

9. *Social Progress Index* (SPI)

Awal mulanya indeks ini berangkat dari pemikiran Simon Smith Kuznets, yang terkenal atas studinya tentang pendapatan nasional dan komponen-komponennya. Kuznets adalah guru besar ilmu ekonomi di Universitas Pennsylvania (1930–54), Johns Hopkins (1954–60), dan Harvard (1960–71). Ia adalah presiden *American Economic Association* pada 1954.

Melalui karyanya yang muncul pada tahun 1930-an dan secara terus-menerus dikembangkannya selama beberapa dasawarsa, pendekatan ini terus berkembang. Dalam perjalanannya Kuznets, terhitung telah melakukan penghitungan pendapatan nasional dengan metode ini sejak tahun 1869. Meskipun bukan ekonom pertama yang mencobanya, karya Kuznets terbilang sempurna dan teliti yang mengatur standar bidang ini.

Karyanya yang didanai oleh lembaga nirlaba *National Bureau of Economic Research* ini telah bermula sejak tahun 1920. Kuznets kemudian membantu Departemen Perdagangan Amerika Serikat

untuk menstandarisasi pengukuran Produk Nasional Bruto. Namun di akhir 1940-an, kongsi itu terpecah. Perpecahan terjadi akibat departemen perdagangan menolak menggunakan PDB untuk mengukur pekerjaan rumah tangga karena ini merupakan komponen produksi yang penting.

Berdasar pemikiran Kuznets ini, Michael Green kemudian mengembangkan model SPI ini. Indeks Kemajuan Sosial meneliti indikator sosial dan lingkungan dengan tiga dimensi berbeda kemajuan sosial: 1) Kebutuhan Dasar Manusia, 2) Dasar-dasar kebutuhan akan kesejahteraan manusia, dan 3) Peluang. Green menjelaskan bahwa kesejahteraan manusia di abad 21 ini harus diukur dengan Indeks Kemajuan Sosial (*Social Progress index*).

Berdasarkan polanya, indeks ini merupakan rangkuman dari keseluruhan indeks kesejahteraan yang telah ada sebelumnya. Penulis meyakini bahwa SPI ini cukup komprehensif dalam menilai tingkat kesejahteraan manusia saat ini, oleh karena itu indeks ini mencakup seluruh aspek dimensi kehidupan sosial manusia (Porter, Stern, & Green, 2016) dengan 12 (dua belas) komponen perhitungan meliputi:

1. Kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*); kebutuhan nutrisi, pelayanan dasar kesehatan, Air dan sanitasi, tempat tinggal/perumahan, keamanan warga
 2. Dasar Kesejahteraan (*Foundation of wellbeing*); Akses terhadap pengetahuan, akses terhadap informasi dan teknologi, kesehatan dan pelayanan kesehatan, keberlanjutan ekosistem/lingkungan.
 3. Kesempatan (*Opportunity*): Hak dasar individu; kebebasan individu dan kebebasan memilih, kebebasan diskriminasi (*personal freedom and choice*); toleransi dan partisipasi (*tolerance and inclusion*); akses terhadap pengembangan pendidikan
10. *Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW)*

Indeks Berkelanjutan Kesejahteraan Ekonomi (ISEW), indeks ini juga merupakan indikator ekonomi di mana dimaksudkan untuk menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB), pada indikator makro ekonomi utama Sistem Neraca Nasional (SNA). Pada indikator ini ditambahkan seperti produk domestik bruto, pengeluaran konsumen

dengan faktor-faktor seperti distribusi pendapatan dan biaya yang terkait dengan polusi dan biaya yang tidak berkelanjutan lainnya. Hal ini mirip dengan GPI (*Genuine Progress Indicator*).

11. *Genuine Progress Indicator (GPI)*

Indeks ini mirip dengan ISEW dan juga digunakan oleh beberapa pembuat kebijakan dalam mengukur variabel kesejahteraan terutama dari sisi kesehatan masyarakat, keselamatan, lingkungan yang bersih, dan indikator kesejahteraan ekonomi ke arah keberlanjutan (*sustainable development*).

Indeks ini mulai didefinisikan tahun 1995 sebagai alternatif untuk produk domestik bruto (PDB). GPI memungkinkan para pembuat kebijakan di tingkat nasional, negara, regional, atau tingkat lokal untuk mengukur seberapa baik warga negara mereka dalam perencanaan pembangunan sektor ekonomi (*economic development*) dan sosial (*social welfare*). GPI pernah digunakan mendokumentasikan gambaran terhadap kemajuan ekonomi dan sosial tahun 1950-2004, di mana menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah stagnan sejak 1970-an (Kubiszewski et al., 2013, 2015).

12. *Indeks Kesejahteraan di Indonesia*

Sementara di Indonesia, Indeks kesejahteraan menggunakan 18 variabel. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, sebagai lembaga pemerintah, ditugaskan untuk mengadministrasi data dan informasi di Indonesia, dan memperkenalkan 18 indikator tentang kesejahteraan masyarakat berikut ini:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Kepadatan Penduduk per-KM(KPP)
3. Angka Melek Huruf (AMH)
4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
5. Angka Harapan Hidup (AHH)
6. Pengeluaran per Kapita (PPK)
7. Persentase Rata-rata Pengeluaran untuk Konsumsi Makanan (PKM)
8. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Minum Sendiri (FMS)
9. Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Bukan Tanah (LBT)

10. Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai < 20 M² (LLK)
11. Persentase Rumah Tangga dengan Dinding Tembok (RDT)
12. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari PLN
13. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri (BAB)
14. Persentase Penduduk Miskin (RTM)
15. Jumlah Pengangguran Terbuka (JPT)
16. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan yang Lalu (PKK)
17. Persentase Penduduk Mengalami Keluhan Kesehatan dan Kegiatannya Terganggu (PPB)
18. Jumlah Penduduk Bekerja (JPB)

Y. Kesejahteraan Sosial Hari ini

Kesejahteraan sosial, pada dasarnya, adalah konsep yang sangat dinamis, bergantung sepenuhnya kepada ide-ide yang berkembang terkait dengan tanggung jawab masyarakat dan Negara dalam mempromosikan kesejahteraan warga negaranya. Ketika rasa tanggung jawab masyarakat berkembang, maka konsep kesejahteraan sosial pasti akan berubah. Selama ini, konsep kesejahteraan sosial secara sederhana dipahami sebagai metode pemberian bantuan dan pelayanan yang eksklusif bagi mereka yang kurang mampu dan kurang beruntung. Fokus perhatian kesejahteraan sosial selama ini hanya bertumpu pada kehadiran lembaga-lembaga negara dalam pemenuhan kebutuhan tertentu individu, di mana kehadiran lembaga-lembaga dimaksud berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan individu. Bahkan, sebagian besar menganggap Kesejahteraan sosial sebagai cara untuk menyesuaikan individu dengan lingkungannya daripada membawa seperangkat kekuatan lingkungan untuk membantu individu.

Istilah "kesejahteraan sosial" tidak memiliki definisi yang tepat. Saat ini, kesejahteraan sosial mengacu pada berbagai kegiatan dan layanan yang dilakukan oleh sukarelawan, organisasi nirlaba, dan lembaga pemerintah yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan yang tidak mampu merawat diri mereka sendiri. Kesejahteraan sosial lebih sering dimaknai sebagai kegiatan yang dirancang

untuk mengelola sumber daya dalam rangka meningkatkan atau mempromosikan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat secara komprehensif. Selain itu kesejahteraan sosial dilihat sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi timbulnya masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Bagian 8

**KEBIJAKAN SOSIAL
SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK**

Kebijakan Sosial adalah studi tentang layanan sosial dan negara kesejahteraan. Secara umum, kebijakan sosial ingin mewujudkan gagasan kesejahteraan sosial, dan hubungannya dengan politik serta masyarakat. Kebijakan sosial berkaitan dengan cara masyarakat di seluruh dunia memenuhi kebutuhannya akan keamanan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kebijakan sosial membahas bagaimana negara dan masyarakat merespons tantangan global perubahan sosial, demografi dan ekonomi, kemiskinan, migrasi dan globalisasi.

Peran kebijakan sosial sangat erat kaitannya dengan masalah ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan sosial mengkaji peran pemerintah nasional, keluarga, masyarakat sipil, pasar, organisasi kemasyarakatan, organisasi non-pemerintah, dan organisasi internasional dalam menyediakan layanan dan dukungan kebijakan terhadap kehidupan manusia mulai dari masa kanak-kanak hingga usia tua. Layanan dan dukungan kebijakan ini diberikan untuk mendukung kehidupan anak dan keluarga, akses sekolah dan pendidikan, masalah perumahan dan lingkungan, pemeliharaan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dukungan dan pelatihan bagi pengangguran, masalah warga yang telah pensiun, kesehatan dan perawatan sosial. Kebijakan sosial bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan cara mengurangi ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat ketika mengakses layanan dan dukungan sosial. Kebijakan sosial banyak berfokus untuk mencari cara bagaimana cara mengurangi terjadinya ketidaksetaraan, ketimpangan, kerentanan, dan ketidakadilan yang disebabkan oleh status sosial-ekonomi, ras, etnis, keyakinan, status kependudukan, jenis kelamin, orientasi seksual, kondisi cacat (mental/fisik), usia, dan hubungan antar negara.

Istilah "kebijakan sosial" biasanya digunakan untuk merujuk pada kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Kebijakan sosial terutama mengacu pada pedoman dan intervensi untuk perubahan, pemeliharaan atau penciptaan kondisi kehidupan yang kondusif bagi kesejahteraan manusia. Kebijakan sosial meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan dan makanan untuk semua orang. Kebijakan sosial adalah bagian dari kebijakan publik. Tetapi, kebijakan publik lebih dari itu, dalam kebijakan publik ada kebijakan ekonomi, kebijakan industri, kebijakan sosial, dll. Kebijakan publik dapat merujuk pada kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan sosial mengacu pada pedoman dan kegiatan intervensi untuk melakukan perubahan, pemeliharaan atau penciptaan kondisi kehidupan yang kondusif bagi kesejahteraan manusia. Kebijakan sosial sangat erat kaitannya dengan masalah publik yang bersifat khusus seperti masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan dan makanan untuk semua orang.

Bisa dikatakan bahwa kebijakan sosial adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup manusia melalui pemberian tunjangan, layanan-layanan untuk komunitas, dan dukungan program (Bessant, Watts, Dalton, dan Smith, 2006). Dengan demikian, kebijakan sosial adalah bagian dari kebijakan publik yang berkaitan dengan masalah sosial. Maka, secara hakikat, Kebijakan sosial merupakan kebijakan publik dalam bidang kesejahteraan sosial. Malcolm Wiener Center untuk Kebijakan Sosial Universitas Harvard menggambarkannya sebagai "kebijakan publik dan praktik di bidang perawatan kesehatan, layanan manusia, peradilan pidana, ketimpangan, pendidikan, dan tenaga kerja." (Rittel & Webber, 1973). Kebijakan sosial sering berurusan dengan masalah yang disebut Rittel & Webber (1973) sebagai masalah-masalah yang buruk.

Sifat dari isu kebijakan dengan demikian tidak hanya relevan bagi para ilmuwan dan cendekiawan politik, sosiologi, kebijakan publik, ekonomi, dan administrasi publik tetapi juga relevan bagi para cendekiawan dan praktisi yang berada di lembaga-lembaga (organisasi) pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sipil yang memiliki perhatian pada masalah-masalah sosial. Dampak dari kebijakan sosial

terhadap masyarakat telah banyak menjadi objek perdebatan. Bahkan, tak jarang, perdebatan tersebut sangat kritis. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa perumusan, desain, dan implementasi kebijakan sosial yang memadai memiliki dampak positif pada pembangunan sosial. Kebijakan sosial secara khusus memiliki perhatian pada isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan dan administrasi layanan sosial, termasuk kebijakan untuk kesehatan, perumahan, pendapatan, pendidikan dan pekerjaan sosial. Selain itu, kebijakan sosial juga memiliki perhatian terhadap kebutuhan dan masalah yang memengaruhi pengguna layanan, seperti kemiskinan, usia lanjut, kesehatan, kecacatan, dan kebijakan keluarga. Terakhir, bagaimana caranya kebijakan sosial mewujudkan kesejahteraan (Spicker, 2014: Irani & Noruzi, 2011).

Untuk lebih memahaminya, maka kita harus paham sifat kebijakan, proses formal kebijakan, pemerintah dan kebijakan serta layanan sosial.

A. Sifat Kebijakan

Gagasan 'kebijakan' bersifat ambigu, dan sering kali sulit dipahami. Para politisi, ketika menggunakan kata tersebut, sering memahaminya sebagai serangkaian pendekatan yang disengaja - hal-hal yang telah mereka pilih untuk dilakukan. Namun, ketika hal itu dilihat secara lebih terperinci lagi, ia terpecah menjadi berbagai masalah yang berbeda (Hogwood dan Gunn dalam Spicker, 2014). Kebijakan bisa dilihat dalam berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, seperti:

1. Label untuk bidang aktivitas tertentu dan keterlibatan pemerintah
- seperti kebijakan tentang keluarga atau kebijakan transportasi
2. Ekspresi dari keadaan yang diinginkan atau tujuan umum
3. Serangkaian proposal yang spesifik
4. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah
5. Proses otorisasi formal (seperti kebijakan otoritas lokal)
6. Strategi, program, atau agenda aksi - ruang lingkup kegiatan tertentu yang melibatkan tindakan khusus yang saling terkait
7. Teori atau model, di mana tindakan bisa diasumsikan sebagai suatu aktivitas yang menghasilkan. Townsend (1976), berargumen bahwa

kebijakan sosial dapat didefinisikan sebagai dasar dan alasan yang bisa diakui, di mana lembaga dan kelompok sosial bisa digunakan atau dibentuk untuk tujuan pembangunan sosial dan melestarikannya. Dengan kata lain, kebijakan sosial adalah kontrol kelembagaan dan organisasi yang dilembagakan untuk mempertahankan atau mengubah struktur dan nilai sosial.

8. Produk dari proses pengambilan keputusan. Stone (2002), menggambarkan pembentukan kebijakan sebagai proses negosiasi atau tawar-menawar dalam komunitas politik.
9. Niat yang disengaja. Menurut Spicker (2014), Ketika kesejahteraan dikaitkan dengan istilah 'kebijakan', hasilnya sering kali dikaitkan dengan beberapa cara (desain) - yaitu, dengan niat yang disengaja dari para pembuat kebijakan.

B. Proses Formal: Hukum Dan Negara

Banyak kebijakan sosial dibuat dan dikembangkan melalui negara (Spicker, 2014). Menurut Berki (dalam Spicker, 2014), batas-batas 'negara' tidak selalu mudah untuk didefinisikan, karena istilah tersebut digunakan dengan sangat longgar; tergantung pada konteksnya, dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan, seperangkat institusi formal, dan sektor publik. Berki (1979), mendefinisikan negara sebagai 'struktur kelembagaan yang fungsi utamanya khusus mempertahankan otoritas dalam unit teritorial tertentu. Menurut Weber (1948), negara adalah otoritas, bukan kekuatan.

Penafsiran sempit dari struktur ini adalah bahwa negara berkaitan dengan institusi politik formal suatu masyarakat. Pandangan yang lebih luas tentang negara akan menggambarkannya sebagai cara melalui mana kekuasaan pemerintah dilaksanakan (yang dapat mencakup, misalnya, sekolah atau rumah sakit) atau seluruh rangkaian kegiatan pemerintah (yang mungkin termasuk mensponsori kegiatan seni). Lembaga-lembaga politik formal suatu masyarakat secara konvensional diklasifikasikan dalam tiga kategori: legislatif (atau pembuatan hukum), yudikatif, dan eksekutif (berkaitan dengan pemerintah dan pegawai negeri).

Pembuatan hukum merupakan pusat kegiatan pemerintah: hukum adalah bagian penting dari cara negara modern menjalankan kekuasaan. Orang awam sering berpikir tentang hukum dalam istilah hukum 'pidana', yang terutama berkaitan dengan larangan dan hukuman; misalnya melalui hukum pidana, orang dikirim ke penjara, orang tua dapat dihukum karena mengabaikan atau melecehkan anak-anak, atau orang dilindungi dari penipuan dan korupsi. Tetapi ini hanya sebagian kecil dari peran hukum dalam masyarakat. Hukum, secara umum, adalah sistem aturan dan prosedur yang melaluinya tindakan individu dan orang secara kolektif dapat diatur dan dijaga. Hart (1961), berpendapat bahwa hukum dapat diklasifikasikan sebagai aturan primer atau sekunder. Aturan primer adalah aturan yang menetapkan ketentuan yang dapat menentukan hukum lainnya. Contohnya: 1) Aturan pengakuan - sistem untuk mengakui otoritas formal, dan hukum itu sendiri. 2) Aturan perubahan, yang memungkinkan dilakukannya perubahan aturan, dan 3) Ajudikasi, adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk penerapan dan penegakan aturan. Sedangkan Hukum sekunder adalah semua hal selain hukum primer.

Pembuatan hukum penting dalam kebijakan sosial dalam empat hal.

1. Hukum Konstitusi

Hukum membentuk kerangka kerja melalui apa kebijakan akan dilaksanakan. Kekuasaan institusi harus didefinisikan oleh hukum; kekuasaan harus diberi kewenangan untuk bertindak.

2. Landasan hukum

Hukum menjadi acuan pembuatan aturan yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan aturan yang dengannya suatu kebijakan dijalankan. Hukum merupakan sistem 'norma', yaitu harapan yang digabungkan dengan sanksi untuk menghasilkan efek tertentu (Benn dan Peters, 1959).

3. Hukum Administratif

Hukum digunakan untuk mendefinisikan proses eksekutif - yaitu, sarana yang dengannya layanan harus disampaikan.

4. Penegakan

Sering kali ada sanksi negatif yang melekat pada undang-undang, sehingga orang atau organisasi yang mengabaikannya akan menderita karena mengalami hukuman.

Kebijakan sosial tidak hanya dilakukan melalui proses legislasi semata. Hal itu bisa dilakukan, sejauh undang-undang yang telah disahkan telah menetapkan kebijakan yang memungkinkan bagi kebijakan untuk dikembangkan di tingkat lain, misalnya oleh badan eksekutif pemerintah. Pada prinsipnya proses-proses ini tidak jauh berbeda, karena dalam pemerintahan yang dibentuk dengan tepat, lembaga eksekutif harus diberdayakan oleh otoritas legislatif sebelum keputusan dapat diambil.

C. Pemerintah dan Kebijakan Sosial

Bidang kebijakan sosial berkaitan dengan konstelasi kebijakan, lembaga, dan tindakan yang kompleks (Spicker, 2014). Pemerintah mengoperasikan dan mengelola berbagai kegiatan praktis. Area kebijakan yang luas biasanya dibagi menjadi kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, dan kebijakan 'domestik'. 'Kebijakan' di sini harus dipahami dalam pengertian yang umum; kebijakan pemerintah dalam pengertian ini adalah apapun yang dilakukan pemerintah, atau tidak dilakukan. Dalam istilah-istilah itu, kebijakan sosial dapat dilihat sebagai sub-kategori kebijakan dalam negeri, bersama dengan bidang-bidang lainnya seperti hukum sipil, budaya dan kebijakan lingkungan. Namun, perbedaan konvensional ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan; dalam beberapa aspek kajian dan praktek, jelas sekali bahwa aspek kebijakan sosial melintasi semua bidang tersebut (termasuk kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri). Walaupun pemerintah memainkan peran penting melalui kebijakannya, faktanya kebijakan sosial bukan hanya tentang pekerjaan yang dibuat oleh negara semata. Tetap ada aspek lain yang juga menjadi fokus dan lokus kebijakan sosial, dan itu sangat luas dan variatif.

Area kegiatan yang dijalankan langsung oleh pemerintah disebut sebagai 'sektor publik'. Di dalamnya mencakup berbagai kegiatan,

seperti kegiatan ekonomi yang bisa terlibat langsung dalam industri milik publik, layanan sipil, dan penyediaan layanan kepada lembaga lain, seperti laboratorium milik pemerintah atau pengadaan alat-alat pertahanan. Bagian dari peran sektor publik adalah menyediakan layanan, tetapi itu hanya sebagian.

D. Pelayanan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2001, 646), pengertian pelayanan adalah 1) Perihal atau cara melayani. 2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan mengharapkan imbalan (uang atau jasa) 3) Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan barang dan jasa. Dari pengertian tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan itu merupakan suatu kegiatan yang diberikan seseorang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

Layanan sosial adalah serangkaian layanan publik yang disediakan oleh pemerintah, swasta, organisasi nirlaba dan nun nirlaba. Layanan publik ini bertujuan untuk menciptakan organisasi yang lebih efektif, membangun komunitas yang lebih kuat, dan mempromosikan kesetaraan serta peluang. Layanan sosial meliputi manfaat dan fasilitas seperti pendidikan, subsidi makanan, perawatan kesehatan, polisi, pemadam kebakaran, pelatihan kerja dan perumahan bersubsidi, adopsi, manajemen masyarakat, penelitian kebijakan, dan lobi.

Penyediaan layanan sosial merupakan salah satu cara di mana kebijakan sosial dapat dilakukan (Spicker, 2014). Pelayanan yang ditujukan untuk membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial (*Social Service*) merupakan istilah yang tidak mudah untuk di jelaskan (Romanyshyn, 1971; Wickenden, 1976). Pertama-tama, kesulitannya karena kata *service* mempunyai berbagai arti seperti pekerjaan atau kewajiban yang dilakukan untuk pemerintah, perusahaan, atau militer. Kata ini juga berarti bagian dari suatu organisasi pemerintah seperti *Civil Service* dan *Diplomatic Service*. Kata *service* juga dapat diartikan perawatan dan perbaikan kendaraan dan mesin secara reguler; dan juga digunakan sebagai pukulan awal dalam olah raga

tenis atau badminton. Kata ini juga sering diartikan sebagai jasa seperti dalam *goods and services*, yaitu barang dan jasa dan sebagainya.

Selain itu, pengertian pelayanan sosial tidak sama untuk setiap negaranya. Di Inggris, misalnya, istilah itu digunakan untuk semua pelayanan (*services*) dan manfaat (*benefits*) yang berorientasi pada orang (wickenden, 1976). Spicker (1995), seorang penulis inggris, menyatakan bahwa pelayanan sosial meliputi jaminan sosial, perumahan, kesehatan, pekerjaan sosial, dan pendidikan. Hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Kahn dan Kamerman (1976), yang menyatakan bahwa lima pelayanan sosial dasar adalah pendidikan, transfer penghasilan (yang sering disebut sebagai jaminan sosial), kesehatan, perumahan, dan pelatihan kerja. Kahn dan Kamerman selanjutnya menyatakan bahwa sistem keenam yang baru muncul adalah pelayanan sosial personal (*personal social services*) atau disebut juga sebagai pelayanan sosial umum (*general social services*). Spicker, juga menyatakan bahwa dari lima layanan tersebut kadang-kadang diperluas menjadi layanan pekerjaan, pelayanan konsultasi dan penjagaan ketertiban. Sehingga menurut Spicker (1995), penggunaan istilah pelayanan sosial tidak konsisten dan berada dari satu negara dengan negara lainnya.

Romanyshyn (1971) memberikan arti pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui sumber-sumber pendukung sosial, dan atau melalui proses peningkatan kemampuan individu dan keluarga untuk mengatasi stres dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial. Pelayanan sosial meliputi kegiatan atau intervensi terhadap kasus yang muncul dan dilaksanakan secara individu atau melalui kelompok masyarakat dengan tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai kesejahteraan dan derajat keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa kepada klien untuk membantu mereka mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Tujuan akhir dari pelayanan, setiap klien mampu memenuhi kebutuhannya dan dapat memecahkan setiap permasalahan yang ada melalui proses kerja sama di antara mereka.

Pemberian pelayanan bisa dilakukan melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Menurut Alfred J. Kahn (1976), Pelayanan Sosial dibedakan ke dalam dua golongan. Pertama, Pelayanan–pelayanan sosial yang sangat rumit dan komprehensif sehingga sulit ditentukan identitasnya. Pelayanan yang masuk dalam kategori diantaranya adalah pendidikan, bantuan sosial dalam bentuk uang oleh pemerintah, perawatan medis dan perumahan untuk masyarakat miskin. Kedua, Pelayanan sosial yang jelas ruang lingkup dan jenis pelayanannya, walaupun selalu mengalami perubahan. Pelayanan ini dapat berdiri sendiri, misalnya kesejahteraan anak dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga dapat merupakan suatu bagian dari lembaga-lembaga lainnya, misalnya pekerjaan sosial di sekolah, pekerjaan sosial untuk kepentingan medis, pekerjaan sosial untuk pengadaan rumah layak huni dan pekerjaan sosial dalam dunia industri.

Kebijakan adalah rencana yang disengaja untuk memandu keputusan dan mencapai hasil yang rasional. Istilah "Kebijakan", oleh karena itu, dapat berlaku untuk pemerintah, sektor swasta, organisasi nirlaba, kelompok, dan individu. Kebijakan juga dapat merujuk pada proses pengambilan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti program atau prioritas pengeluaran, dan memilih di antara mereka berdasarkan dampak yang akan mereka miliki. Kebijakan dapat dipahami sebagai pernyataan politik, manajemen, keuangan, dan administrasi tentang mekanisme yang diatur untuk mencapai tujuan eksplisit.

Istilah kebijakan dapat merujuk pada kebijakan resmi pemerintah (undang-undang atau pedoman yang mengatur bagaimana undang-undang harus diterapkan); ide dan tujuan luas dalam manifesto dan pamflet politik; kebijakan perusahaan atau organisasi tentang topik tertentu.

Kebijakan berbeda dari aturan (hukum). Aturan atau hukum bertujuan untuk mendorong atau melarang perilaku (seperti undang-undang perpajakan yang meliputi pajak pendapatan atau pajak penjualan, undang-undang lingkungan, dll.), Kebijakan hanya memandu tindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang paling memungkinkan untuk dicapai.

Meskipun beberapa definisi dan karakteristik utama kebijakan telah diidentifikasi sebagai kerangka kebijakan pemerintah, definisi komprehensif tentang kebijakan menyatakan bahwa hal tersebut adalah "Seperangkat keputusan yang saling berkaitan dan dibuat oleh aktor (sekelompok aktor) politik mengenai pemilihan tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu, di mana keputusan-keputusan tersebut pada prinsipnya harus berada dalam kekuatan para aktor untuk mencapainya".

Secara sederhana, kebijakan melibatkan banyak keputusan yang saling terkait yang dikelompokkan bersama untuk mengatasi situasi tertentu yang mungkin terjadi atau tidak terjadi lebih dari satu kali, dan orang yang membuat kebijakan tersebut juga bertindak berdasarkan mandat yang dimilikinya. Karena itu, badan yang membuat kebijakan biasanya adalah lembaga-lembaga pemerintah.

Walaupun semua definisi-definisi tersebut sudah benar, paling penting untuk dipahami adalah proses pembuatan kebijakan. Proses dalam kebijakan memiliki peran yang sama pentingnya dengan hasil. Desain kebijakan dan tindakan untuk merumuskan kebijakan paling baik dilakukan ketika melibatkan semua pemangku kepentingan atau perwakilan mereka untuk membuat kebijakan yang relevan dan efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat kebijakan ketika mengevaluasi sebuah kebijakan untuk selalu meninjau langkah-langkah dan proses yang telah dilakukan ketika merumuskan kebijakan. Kebijakan tidak boleh dimulai sebagai tujuan itu sendiri, tetapi juga sebagai proses yang membahas siapa, kapan, dan bagaimana pemangku kepentingan dilibatkan. Jika tidak, kebijakan yang muncul tanpa keterlibatan pemangku kepentingan sering dinegasikan, diperebutkan, dan kadang-kadang dilumpuhkan melalui perlawanan yang dilakukan oleh kelompok yang sama yang terlibat dalam kebijakan yang ingin ditangani.

A. Jenis-jenis Kebijakan

Terkait dengan tipe-tipe kebijakan, Lowi (1972) mengatakan bahwa “kebijakan menentukan politik”. Dalam inovasinya Lowi memandang kebijakan publik sebagai arena kekuasaan, dan bukan hanya sekadar *output* dari sistem politik. Gagasan utamanya adalah bahwa tujuan utama kebijakan untuk mempengaruhi politik dengan mengkondisikan fokus dan perilaku aktor. Dengan kata lain, karakteristik kebijakan publik adalah memformat logika tindakan politik. Tetapi kemudian, bagaimana perbedaan kebijakan? Menurut Lowi, kebijakan dapat dibedakan secara jelas sesuai dengan kemungkinan dan penerapan pelaksanaan di ruang publik. Kriteria itu menghasilkan empat jenis kebijakan: re-distributif, distributif, peraturan, dan konstitutif.

Tabel 09. Empat Jenis Kebijakan Lowi

- 1 Kebijakan Redistributif (mis. Pajak, Kesejahteraan, Pasar Tenaga Kerja)
 - Tujuan : Pengalokasian Kembali Kekayaan
 - Mekanisme : Paksaan
 - Karakteristik : Hubungan yang jelas antara biaya dan manfaat
 - Politik : Konflik, terpolarisasi, ideologis

- 2 Kebijakan Distributif (mis. Pendidikan, Penelitian, pengurangan pajak)
 - Tujuan : Mendanai kegiatan yang bernilai sosial
 - Mekanisme : Insentif
 - Karakteristik : Ketentuan umum kolektif
 - Politik : Konsensual

- 3 Kebijakan Pengaturan (Regulatory)(mis. kompetisi, keamanan pangan, lingkungan)
 - Tujuan : Kegagalan pasar yang dipersepsikan (potensial) dengan benar
 - Mekanisme : Bukti, argumen, dan paksaan
 - Karakteristik : Norma hukum
 - Politik : Mengubah koalisi, karena biaya dan manfaat didefinisikan kembali

- 4 Kebijakan Konstitusional (mis. Kebijakan konstitusional, meta-kebijakan)
 - Tujuan : Membuat peraturan tentang peraturan
 - Mekanisme : Koordinasi, tata kelola
 - Karakteristik : Institusi dan norma
 - Politik : Bervariasi (sesuai dengan tingkat identifikasi masalah)

Selain model Lowi, ada juga bentuk lain dari kebijakan, seperti ditunjukkan pada daftar berikut:

1. Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif dimaksudkan untuk segmen masyarakat tertentu. Kebijakan semacam ini bertujuan untuk memperluas

pelayanan barang dan jasa dan/atau biaya barang/jasa kepada anggota masyarakat atau pemerintah. Contohnya kebijakan yang berdampak pada pengeluaran untuk program kesejahteraan, bantuan publik, kesehatan, pendidikan publik, jalan raya, dan keselamatan publik.

2. Kebijakan Re-Distributif

Kebijakan ini berkaitan dengan penataan ulang kebijakan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk membawa perubahan sosial dan ekonomi dasar.

3. Kebijakan Peraturan atau mandat:

Kebijakan ini membatasi keleluasaan individu dan lembaga, atau kebijakan yang memaksakan jenis perilaku tertentu kepada individu dan lembaga. Kebijakan umumnya dianggap paling baik jika diterapkan dalam situasi di mana perilaku yang baik dapat dengan mudah ditentukan dan perilaku yang buruk dapat dengan mudah diatur dan diberikan denda atau sanksi. Kebijakan peraturan berkaitan dengan regulasi perdagangan, bisnis, tindakan keselamatan, utilitas publik, dll. Jenis regulasi ini digunakan oleh organisasi independen yang bekerja atas nama pemerintah.

4. Kebijakan Substantif

Kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan kesejahteraan umum dan pembangunan masyarakat, misal penyediaan pendidikan dan kesempatan kerja, program stabilisasi ekonomi, penegakan hukum dan ketertiban, undang-undang anti-polusi, dll.

5. Kebijakan Kapitalisasi

Kebijakan model ini biasanya berlaku pada negara-negara federal. Di bawah kebijakan kapitalisasi, subsidi keuangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan negara bagian atau pemerintahan daerah.

6. Kebijakan Konstituen

Kebijakan semacam ini dalam rangka menciptakan entitas kekuasaan eksekutif, atau hal-hal yang berurusan dengan hukum. Misalnya, kebijakan pemerintah menetapkan siapa yang melakukan apa dalam hal perdagangan, keuangan publik, dll. Kebijakan ini bisa disebut sebagai kebijakan yang menggambarkan kekuasaan warga negara

dan peran mereka dalam masyarakat juga dianggap sebagai bagian dari kategori ini.

7. Kebijakan Politik

Kebijakan politik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas politik tertinggi pada berbagai tingkat pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah pada umumnya dipandu melalui kondisi-kondisi politik. Di dunia modern, sistem kebijakan politik berasal dari partai politik. Ketika sebuah partai politik memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemilihan, ia harus memahami kondisi kehidupan masyarakat dan berdasarkan temuannya di lapangan, partai politik menyatakan pendiriannya tentang berbagai masalah kebijakan. Menurut Morgenthau (1985), semua politik domestik dan internasional, mengungkapkan tiga pola dasar; yaitu, semua fenomena politik dapat direduksi menjadi satu dari tiga tipe dasar. Kebijakan politik berupaya untuk mempertahankan kekuasaan, meningkatkan kekuasaan, atau menunjukkan kekuasaan.

8. Kebijakan Eksekutif

Dalam masyarakat yang paling bertanggung jawab dan demokratis, baik maju maupun berkembang, kapitalis atau sosialis, kebijakan eksekutif adalah bentuk di mana badan eksekutif dapat berupa kabinet, komite eksekutif, atau komite manajemen, dengan hati-hati menyusun fitur-fitur dari kebijakan politik agar dapat dipraktikkan. Perumusan kebijakan eksekutif sebagian besar dilakukan oleh kantor-kantor politik atau lembaga yang membentuk struktur lembaga eksekutif, misalnya komite, kabinet, dan menteri dibantu oleh pejabat tinggi. Namun, eksposisi paling penting dari kebijakan eksekutif selalu berkaitan dengan anggaran, di mana partai politik yang berkuasa menyusun program kerja tahunan (Gladden, 1972).

9. Kebijakan Administratif

Merupakan bentuk di mana para pejabat pembuat kebijakan melaksanakan kehendak pemerintah dalam bentuk kegiatan praktis dan juga memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kebijakan eksekutif. Sederhananya, ketika kebijakan politik dan kebijakan eksekutif telah diketahui, proses selanjutnya adalah penyusunan kebijakan

administratif. Kebijakan ini terutama berkaitan dengan langkah-langkah praktis untuk memberi dampak pada kebijakan eksekutif yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan administratif dibuat secara terus menerus dan dapat menangani masalah-masalah serius. Kadang-kadang kebijakan administratif berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum, seperti langkah-langkah, program, sistem, metode, dan prosedur yang layak dan praktis untuk menghasilkan kebijakan politik dan eksekutif.

10. Kebijakan Teknis/Operasional

Kebijakan teknis atau operasional adalah kebijakan sehari-hari yang diadopsi oleh pejabat publik, tenaga teknis, dan pakar dalam pelaksanaan kebijakan administratif yang telah diputuskan.

B. Memahami Proses Pembuatan Kebijakan, Politik Dan Keputusan

Proses kebijakan biasanya memiliki serangkaian proses atau tahapan yang berurutan. Tahapan-tahapan tersebut dari identifikasi masalah, penetapan agenda (*agenda setting*), pertimbangan berbagai opsi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam prakteknya, tugas pertama yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan adalah mengidentifikasi masalah tertentu dalam agenda diskusi dan, tidak menutup kemungkinan akan menjadi bahan pertimbangan para pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan kemudian memilih tindakan terbaik berdasarkan saran para spesialis atau ahli untuk membuat kebijakan, kemudian memberikannya kepada administrator untuk diimplementasikan. Pandangan berbasis tahapan ini menekankan bahwa kebijakan adalah proses yang melibatkan banyak aktor dan organisasi dari sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Proses ini sederhana dan menarik secara intuitif. Namun dalam praktiknya, masalah kebijakan saling terkait, pembuat kebijakan mencari solusi dalam konteks ketidakpastian dan banyak kendala internal serta eksternal yang harus dihadapi. Sering kali apa yang dilakukan di masa lalu memiliki efek yang menentukan terhadap bagaimana masalah-masalah baru diproses.

Ketika melakukan advokasi, aktor pembuat kebijakan harus memahami bahwa akan ada prioritas yang saling bersaing, kebijakan dan

undang-undang yang ada yang akan menjadi penghalang, persaingan dalam keterbatasan sumber daya yang langka, posisi yang bertentangan dengan subjek, dan kekuasaan yang diberikan kepada orang lain perlu dipengaruhi. Dalam proses penyusunan kebijakan kita berada dalam "pemikiran sistem", kaitannya dengan pengembangan kebijakan dan proses analisis, serta proses politik dan legislatif.

a. Pemikiran dan dampak sistem

Sistem adalah seperangkat bagian yang saling terkait dan saling tergantung satu sama lain yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan keseluruhan yang utuh. Ada dua tipe dasar dari sistem, yaitu tertutup dan terbuka. Sistem tertutup tidak dipengaruhi oleh lingkungannya dan tidak berinteraksi secara langsung dengannya. Sebaliknya, sistem terbuka mengenali adanya proses interaksi yang dinamis dalam sistem dengan lingkungannya.

Ketika menyebut 'sistem' organisasi, maka yang dimaksud di sini adalah sistem terbuka. Suatu organisasi harus terus dan tetap berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem kebijakan sosial adalah sistem yang sangat 'terbuka' dengan lingkungannya. Pemahaman ini sangat penting bagi para aktor kebijakan. Pemahaman tersebut merupakan cara untuk memahami bagaimana sistem kebijakan sosial berjalan. Ketika kita ingin mempengaruhi para pembuat keputusan, kita perlu memahami bahwa mereka beroperasi dalam 'sistem terbuka' dan mereka dipengaruhi oleh banyak faktor dan pemain. Kita harus menyadari adanya persaingan diantara para pembuat keputusan yang ingin kita pengaruhi. Tugas advokat adalah memastikan segala sesuatu yang mempengaruhi para pembuat keputusan dipahami dan dipertimbangkan ketika mengembangkan rencana aksi untuk memengaruhi mereka dalam pembuatan kebijakan.

b. Kategorisasi kebijakan

Kebijakan dipandang sebagai pekerjaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh kelompok aktor kebijakan yang menggunakan lembaga publik yang tersedia untuk mengartikulasikan dan mengekspresikan hal-hal yang mereka hargai (Considine, 1994). Ada

tumpang tindih kepentingan antara kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan, dan kebijakan publik. Kebijakan sosial terutama berkaitan dengan pemeliharaan dan distribusi pendapatan, serta penyediaan layanan kesejahteraan seperti perumahan dan transportasi untuk kelompok sasaran tertentu seperti orang miskin. Sementara, pada prinsipnya, kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi memiliki fokus yang lebih sempit. Misalnya dalam kebijakan kesehatan, kebijakan dirancang dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan populasi tertentu. Kebijakan tentang asuransi kesehatan misalnya dirancang untuk memenuhi kelompok sasaran yang sama dengan yang dipenuhi oleh sektor kesejahteraan sosial. Kebijakan kesehatan dan kebijakan-kebijakan yang lainnya mungkin saja memiliki implikasi anggaran yang sangat signifikan bagi pemerintah.

c. *Proses pembuatan kebijakan.*

Penting untuk memahami proses pengembangan kebijakan sehingga sebagai advokat kita dapat merencanakan jenis input yang kita butuhkan agar berdampak pada kebijakan akhir. Mungkin saja kita telah mengidentifikasi kebutuhan akan suatu kebijakan dan ingin mengadvokasinya agar kebijakan tersebut dapat dimasukkan dalam agenda. Pendekatan kita akan berbeda dengan yang dibutuhkan jika kita ingin terlibat dalam fase perumusan, adopsi, implementasi, atau evaluasi dari proses tersebut. Secara sederhana, ada lima tahap utama dalam proses pembuatan kebijakan sosial:

1. Identifikasi masalah dan penetapan agenda.

Proses di mana masalah kebijakan didefinisikan dan agenda kebijakan ditetapkan. Dalam fase ini masalah publik akan ditetapkan sebagai agenda politik jika masalah-masalah tersebut dikonversi menjadi 'masalah' politik. Hal ini biasanya terjadi ketika suatu kelompok kepentingan menuntut tindakan pemerintah atas suatu masalah, atau ketika ada ketidaksepakatan publik mengenai cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

2. Pembentukan kebijakan

Merupakan tahap di mana kebijakan dibuat atau diubah. Kebijakan adalah produk dari konteks politik di mana mereka dikembangkan. Penting untuk memahami pembentukan kebijakan sebagai proses sosial dan politik untuk membuat konsep bagaimana kebijakan dirumuskan.

3. Adopsi

Merupakan tahap ketika kebijakan diberlakukan, atau diimplementasikan, misalnya undang-undang negara atau peraturan daerah. Kebijakan yang baru atau yang telah diubah sering diadopsi melalui keputusan kabinet, pemerintah, dan menteri tanpa melalui perubahan legislatif.

4. Implementasi kebijakan

Mencakup tindakan dan mekanisme di mana kebijakan dipraktikkan, yaitu, apa yang tertulis dalam undang-undang atau dokumen kebijakan diubah menjadi kenyataan. Pada tahap ini, isi kebijakan, dan dampaknya terhadap mereka yang terkena dampak, dapat dimodifikasi secara substansial, atau bahkan dinegasikan. Dalam tahap menganalisis proses pembuatan kebijakan, kita perlu memeriksa bagaimana, kapan, dan di mana kebijakan tertentu telah dilaksanakan.

5. Evaluasi kebijakan

Merupakan tahap akhir dalam proses pembuatan kebijakan, di dalamnya termasuk kegiatan monitoring, analisis, kritik, dan penilaian terhadap kebijakan yang ada atau yang telah diusulkan. Tahap ini mencakup penilaian terhadap konten kebijakan, implementasi kebijakan, dan efek kebijakan. Selain itu, evaluasi dirancang untuk membantu pemerintah menerapkan kebijakan secara efektif dan efisien.

d. Identifikasi Kebijakan.

Dalam analisis kebijakan sosial, penting untuk mengetahui bahwa ada tiga tingkat analisis yang sangat luas, atau penekanan, di mana studi dapat dilakukan (Ham dan Hill, 1984):

1. Analisis tingkat mikro
Analisis ini berkaitan dengan cara mengidentifikasi siapa yang membuat keputusan dan bagaimana pilihan tersebut dibuat dalam organisasi.
2. Analisis tingkat menengah
Analisis ini memfokuskan diri pada 'proses pembuatan kebijakan' sosial dan tindakan serta mekanisme yang menentukan agenda dan kebijakan yang dipraktekkan.
3. Analisis tingkat makro
Analisis, kritik, dan evaluasi terhadap sistem kesejahteraan sosial yang ada dalam konteks ekonomi, politik dan budayanya merupakan tujuan utama.

Walaupun ada tiga tingkat analisis seperti dijelaskan di atas, kita dapat melakukan analisis dengan menambahkan atau mengembangkan spektrum pertanyaan yang lebih luas terhadap kebijakan yang hendak dianalisis.

e. *Intervensi kebijakan.*

Intervensi adalah kombinasi elemen atau strategi program yang dirancang untuk menghasilkan perubahan perilaku atau meningkatkan status kesejahteraan sosial di antara individu atau seluruh populasi. Intervensi dapat mencakup program kesejahteraan sosial, pendidikan, kebijakan baru yang lebih kuat, perbaikan lingkungan, atau kampanye promosi kesehatan.

Ketika mempertimbangkan beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi melalui intervensi, biasa kita akan dihadapkan pada dua opsi, yaitu opsi regulasi (*Regulatory options*) dan non-regulasi (*Non-regulatory options*). Pilihan harus didasarkan pada penilaian-penilaian risiko yang mungkin timbul. Melakukan analisis risiko dapat mengidentifikasi bahaya dan keadaan yang menyebabkannya. Analisa risiko dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan konsekuensinya. Oleh karena itu, analisis risiko adalah alat yang berharga dalam mengatasi masalah ambang batas, apakah pemerintah harus melakukan intervensi atau tidak. Ketika peraturan pemerintah telah ditetapkan, maka peraturan tersebut harus mampu

memenuhi beberapa kriteria seperti efektivitas, proporsionalitas, fleksibilitas, transparansi, konsistensi, akuntabilitas, dan dapat terbuka untuk dilakukan perubahan.

Opsi regulasi (*Regulatory options*) dan non-regulasi (*Non-regulatory options*) memiliki banyak ragam untuk dipilih. Opsi-opsi tersebut sebagai *bahan pertimbangan dalam merespon masalah yang telah teridentifikasi*.

1. Opsi regulasi (*Regulatory options*)

Opsi ini memiliki berbagai macam bentuk, model, dan pendekatan masing-masing. Beberapa diantaranya yang cukup terkenal adalah:

a. *Regulasi Diri*

Kelompok yang terorganisir yang dapat mengatur perilaku anggotanya. Pengaturan diri ini biasanya digunakan untuk memperkuat kerja sama antar aktor organisasi. Model regulasi ini berlaku baik untuk lembaga swasta maupun pemerintahan. Model ini biasa membagi peran para anggotanya, terutama peran untuk saling mengawasi. Karakteristik utama dari pengaturan ini meliputi:

- Kesepakatan sukarela tentang perilaku atau praktek tertentu dalam suatu kelompok, lembaga, dan bisnis.
- Kode etik atau standar sukarela.
- Pemerintah tidak melakukan penegakan kode etik atau aturan secara langsung.

b. *Regulasi Kuasi*

Aturan dan pengaturan di mana ada ekspektasi kepatuhan yang wajar, dan untuk itu dalam prakteknya ada sedikit keterlibatan pemerintah seperti dukungan dan pendanaan. Kode etik atau praktek merupakan bentuk umum dari peraturan kuasi. Regulasi kuasi umumnya diadopsi dan dikelola oleh lembaga terkait. Karakteristik utama dari regulasi ini meliputi:

- Pemerintah mempengaruhi lembaga-lembaga untuk patuh terhadap aturan dan kode etik.
- Pemerintah membantu mengembangkan kode etik, akreditasi dan/atau skema penilaian.
- Pemerintah menyusun kode etik dan aturan melalui proses dialog.

- Pemerintah tidak melakukan penegakan kode etik atau aturan secara langsung.

c. *Regulasi Bersama*

Model ini merupakan bentuk pengaturan yang dirancang secara bersama-sama antara pemerintah dengan pihak swasta. Model ini memiliki ciri sebagai berikut:

- Mengutamakan kemitraan yang kuat antara swasta dan pemerintah.
- swasta mengembangkan kode dan perilaku etik atau skema akreditasi dengan dukungan peraturan dari pemerintah.

d. *Regulasi Eksplisit*

Peraturan ini biasanya dalam bentuk UU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan ini bersifat tegas dan jelas. Pemerintah melakukan penegakan secara langsung. Regulasi ini memiliki ciri sebagai berikut :

- Peran swasta industri dalam merumuskan undang-undang hanya terbatas pada proses konsultasi.
- Kepatuhan terhadap regulasi adalah wajib. Ada sanksi jika terjadi ketiaktepatuhan.
- Fleksibilitas yang sedikit dalam persyaratan interpretasi dan kepatuhan.
- Pemerintah melakukan penegakan langsung.

2. Opsi non-regulasi (*Non-regulatory options*)

Selain opsi pengaturan diri (*self regulatory*) kita juga mengenal opsi *non-self regulatory*. Opsi biasanya bersifat lentur dan akomodatif. Proses *non-self regulatory* adalah proses di mana prosesnya tidak memiliki kecenderungan yang mengarah pada *self-regulatory*. Proses-proses ini tidak memiliki karakteristik umpan balik seperti yang dimiliki oleh *self-regulatory* dan cenderung tidak stabil jika tidak dikendalikan secara eksternal. Organisasi membuat mekanisme sendiri sesuai kepentingan sektoral dan parsialnya. Beberapa contoh berikut akan mempermudah kita memahami mekanisme ini. Contoh pertama, pengungkapan informasi; adanya pelaporan publik tentang hasil layanan barang dan jasa tertentu dapat memberikan masukan baru untuk penetapan harga yang lebih kompetitif atau pening-

katan pelayanan. Kedua, peningkatan penegakan aturan yang sudah ada; tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan meningkatkan mekanisme penegakan hukum. Namun, melalui pengamatan terhadap peraturan-peraturan lama, pembaruan teknologi, dan pengamatan perilaku dapat secara efektif meningkatkan kemampuan peraturan tersebut. Ketiga, Memperluas cakupan legislasi yang ada; daripada menduplikasi peraturan yang sudah ada, tidak ada salahnya bagi kita untuk pertimbangkan cara memperluas cakupannya. Keempat, Subsidi; melalui pemberian subsidi pemerintah bisa mendorong perilaku tertentu.

f. *Politik, hukum, dan anggaran.*

Politik berarti berjuang untuk berbagi kekuasaan atau berjuang untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik di antara negara bagian maupun di antara kelompok-kelompok di dalam negara (Max Weber). Jika kebijakan adalah hasil dari pilihan yang diambil oleh otoritas untuk mencapai tujuan mereka, maka politik adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Produk dari keduanya (kebijakan dan politik) biasanya adalah undang-undang dan proses anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi. Politik adalah kegiatan di mana orang mencapai apa yang mereka inginkan dengan mengerahkan kekuasaan dan pengaruh. Bisa jadi dalam prosesnya melibatkan konflik atas distribusi sumber daya yang langka. Schattschneider (1960) menyatakan bahwa "setiap konflik terdiri dari dua bagian: individu yang terlibat dan audien tertarik pada konflik".

Meskipun kebijakan dan politik biasanya terkait dengan pemerintah, ada empat bidang di mana advokat mungkin diperlukan untuk melakukan advokasi dan karena itu terlibat dalam aksi politik (Leavitt dan Mason, 1998):

1. Tempat kerja: memengaruhi kebijakan tempat kerja, prosedur, keputusan alokasi dana, dan model latihan.
2. Pemerintah: memengaruhi kebijakan dan legislasi lokal, pemerintahan daerah, dan nasional.

3. Organisasi Profesional: memengaruhi pengaturan standar operasional prosedur, lisensi, dan kredensial.
4. Komunitas: mempengaruhi melalui keterlibatan dalam kegiatan masyarakat seperti komunitas masyarakat, dll.

Hubungan pemerintah yang efektif membutuhkan pemahaman tentang cara kerja pemerintah dan apa yang mendorong pengambilan keputusan pemerintah. Wilayah Pasifik Barat beragam dan berisi berbagai bentuk pemerintahan, dengan proses dan struktur legislatif yang berbeda. Seperti disebutkan di atas, advokat yang efektif akan meneliti sistem di negara mereka dan mengetahui bagaimana proses bekerja dan di mana poin dan orang-orang yang berpengaruh berada.

Proses pembuatan undang-undang dan anggaran adalah dua kegiatan politik utama bagi para advokat untuk melibatkan diri. Mekanisme setiap proses dapat bervariasi tergantung pada struktur pemerintah suatu negara. Penting untuk menyelidiki bagaimana sistem beroperasi, di berbagai tingkatan, di mana pun dan kapan pun upaya advokasi dilakukan. Tidak semua kebijakan diberlakukan melalui proses pembuatan undang-undang, tetapi ini adalah ekspresi akhir dari niat pemerintah.

g. Proses politik

Setiap analisis proses politik harus mengidentifikasi realitas dan hubungan kelembagaan yang tercermin dalam peristiwa sehari-hari. Mereka perlu diidentifikasi untuk membantu memahami di mana, siapa dan bagaimana melobi mereka untuk mencapai tujuan dalam rangka mengembangkan atau melakukan reformasi kebijakan.

Ketika kita telah melihat jenis sistem politik yang menjadi ciri khas negara atau daerah maka lima elemen ini perlu dipertimbangkan:

1. Konsensus

Apakah ada kesepakatan dasar tentang aturan paling mendasar dalam kehidupan politik?. Apakah proses politik dimainkan oleh peraturan-peraturan tersebut?. Apakah ada kesepakatan tentang siapa warga negara, dan apa aturan untuk mencapai kekuasaan?.

2. Aturan hukum

Apakah ada struktur hukum dasar untuk kegiatan dan interaksi antara publik dan swasta? Apakah hak asasi manusia sudah terjamin? Apakah aturan hukum telah diterapkan secara adil? Apakah keamanan pribadi dijamin oleh negara? Apakah peradilan memiliki integritas dan apakah itu independen? Apakah kasus serupa memiliki hasil yang serupa?

3. Persaingan

Apakah ada persaingan dalam sistem yang berjalan? Apakah ada persaingan melalui pemilihan, opini media, ide, dan gagasan? Bisakah orang berorganisasi secara legal untuk mengejar minat dan gagasan mereka? Apakah ada persaingan dalam pemerintahan, termasuk *checks and balances* antar bidang-bidang pemerintahan?

4. Inklusi

Apakah ada masalah terkait inklusi atau eksklusivitas? Apakah ada elemen populasi yang dikecualikan (secara formal atau informal) dari partisipasi politik, sosial, dan ekonomi karena perbedaan agama, etnis, jenis kelamin, geografi, atau kondisi pendapatan?

5. Tata pemerintahan yang baik

Apakah ada tata kelola yang memadai yang dilakukan oleh negara, lembaga sektor publik, dan swasta? Apakah lembaga-lembaga ini akuntabel, transparan, dan efisien? Apakah institusi politik berfungsi dengan baik? Apakah mereka telah memenuhi apa yang mereka telah janjikan?

h. Arena politik

Setelah kita menilai jenis sistem politik yang sedang kita hadapi, apakah itu di tempat kerja, pemerintahan, asosiasi profesional atau masyarakat, dan entitas tertentu yang bertanggung jawab atas masalah dan solusi yang diusulkan perlu untuk diidentifikasi.

Kesalahan umum yang dilakukan oleh advokat adalah memulai proses dengan menargetkan orang atau orang yang salah. Jika Anda ingin mengubah standar keselamatan pekerja, Anda perlu menargetkan tidak hanya majikan Anda tetapi juga mereka yang menetapkan standar keselamatan kerja. Jika Anda ingin mendorong

penggunaan alokasi sumber daya untuk program pengembangan masyarakat, maka kita perlu untuk menentukan di mana keputusan alokasi sumber daya tersebut dibuat.

Setelah Anda mengidentifikasi arena politik yang sesuai, fungsi formal dan informal dari arena tersebut harus dianalisis. Pertanyaan yang harus dijawab dalam analisis arena politik ini meliputi:

1. Bagaimana struktur entitas politik?
2. Apa misi dan tujuan entitas politik?
3. Subkelompok atau komite apa yang bertanggung jawab atas masalah ini?
4. Apa metode komunikasi formal dan informal yang telah dikembangkan atau dilakukan oleh entitas?
5. Bagaimana proses anggarannya? Bagaimana cara mempengaruhinya?

i. Pembuat keputusan dan kerangka waktu

Tahap selanjutnya adalah tahap pengidentifikasian pemain kunci dalam proses politik, termasuk para pendukung dan penentang pengembangan kebijakan atau perubahan yang ingin kita capai. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi siapa yang akan mendukung reformasi, dan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial mana yang menentang arah kebijakan.

j. Proses pengambilan keputusan.

Keputusan adalah pilihan yang dibuat dari dua atau lebih alternatif. Sedangkan proses pembuatan keputusan adalah seperangkat langkah yang meliputi aktivitas mengidentifikasi masalah, memilih alternatif, dan mengevaluasi efektivitas keputusan. Meskipun pengambilan keputusan digambarkan sebagai 'memilih salah satu alternatif', pandangan tersebut terlalu sederhana. Jika kita melihat penjelasan di atas tentang sistem, para pembuat keputusan akan beroperasi dalam sebuah sistem. Jika kita menerapkan pemikiran dalam proses pengambilan keputusan, kita harus memahami bahwa akan ada banyak faktor yang saling berkaitan seperti ekonomi, politik, sosial dan lingkungan, baik itu

formal maupun informal yang dapat berdampak pada proses pengambilan keputusan.

Keputusan memiliki beberapa jenis. Keputusan dapat ditemukan di sepanjang titik rangkaian sistem, baik itu yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terstruktur memerlukan pertimbangan manajerial dan pertimbangan faktor-faktor yang tidak dapat dikenali. Keputusan yang tidak terstruktur juga memerlukan pertimbangan faktor kualitatif, penilaian etis atau hanya selera pribadi; dan bahkan mungkin merupakan hasil dari ketidakmampuan pembuat keputusan untuk sepenuhnya memahami struktur dalam situasi yang kompleks. Keputusan yang tidak terstruktur bisa jadi merupakan hasil keputusan yang belum diperiksa secara mendalam, sehingga bagi organisasi dapat dilihat sebagai keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terstruktur dapat dicirikan dengan model pendekatan coba-coba, tidak menggunakan intuisi dan akal sehat, cenderung bersifat *ad-hoc*, dan biasanya dibuat oleh manajemen level menengah dan atas. Ciri lainnya, pengambilan keputusan cenderung tidak rasional dan kadang kala sering kali melibatkan agenda serta tujuan tersembunyi pengambil keputusan.

Sementara, keputusan terstruktur sering kali merupakan keputusan yang dapat diotomatisasi, bisa menjadi solusi 'terbaik', keputusan tunggal, dan dapat diidentifikasi. Dalam posisi ini para pengambil keputusan menyadari bahwa banyak masalah yang sulit untuk disusun secara sistematis dan terperinci. Namun para pembuat keputusan berani untuk menggunakan fitur kualitatif yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan keputusan.

Level keputusan juga dapat dilihat ada melalui spektrum yang luas, misalnya, apakah keputusan tersebut bersifat strategis dan dapat dioperasionalkan?. Keputusan strategis dapat didefinisikan sebagai keputusan yang berkaitan dengan cara menentukan tujuan organisasi, sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, kebijakan yang mengatur tindakan untuk memperoleh hasil, penggunaan, dan disposisi sumber daya organisasi. Sementara, keputusan

operasional, berkaitan erat dengan usaha untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif dalam pemenuhan tujuan organisasi. Misalnya, dalam pemberian layanan kesehatan, keputusan strategis dapat mencakup: pengalokasian dana untuk program, menilai kinerja program yang berhubungan dengan tujuan strategis (evaluasi), dan menetapkan standar untuk operasi program. Keputusan pengendalian operasional memastikan bahwa tugas tertentu dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien: memantau aktivitas operasional dan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan standar, tindakan korektif, dan penjadwalan.

C. Tahapan Proses Kebijakan

Model tahapan kebijakan memberikan ilustrasi yang baik tentang kegunaan kerangka analitis untuk memeriksa kebijakan sosial. Model ini memungkinkan untuk mempresentasikan proses yang kompleks dalam kerangka pengembangan kebijakan dengan cara yang relatif sederhana. Sebagai alat analitis dalam proses kebijakan, model ini relatif mudah untuk dipahami oleh akademisi, praktisi, profesional, dan pelajar. Model tahapan memiliki berbagai macam penyebutan, seperti "model linier," "model sekuensial," "model tahap heuristik", dan "siklus kebijakan publik".

Dalam catatan ini, kami menyajikan model lima tahap, yang mewakili sintesis dari pendekatan ini (Howlett & Ramesh, 2003). Menurut model ini, proses menghasilkan kebijakan publik dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Meskipun versi awal dari model ini menciptakan kesan bahwa tahap-tahap ini terjadi secara berturut-turut dan bahwa pengembangan kebijakan adalah proses linier. Namun, tahap-tahap ini kadang-kadang terjadi secara bersamaan, kadang-kadang muncul dalam urutan terbalik dan kadang-kadang dengan cepat dilewati. Faktanya, masing-masing tahapan ini berhubungan dengan beberapa "momen" dalam kehidupan suatu kebijakan dan berkaitan langsung dengan kegiatan spesifik dalam kebijakan. Tetapi tahapan-tahapan tersebut sangat jarang saling mengikuti satu sama lain dalam proses yang linier.

Beberapa ahli telah mengembangkan model tahapan ini dengan jumlah tahapan yang bervariasi, ada yang dibuat lima tahapan dan ada yang dibuat tujuh tahapan. Model Howlett dan Ramesh mengidentifikasi proses kebijakan menjadi lima tahap: penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi (atau pengambilan keputusan), implementasi, dan evaluasi.

a) *Pengaturan agenda (agenda Setting)*

“Masalah sosial” adalah topik diskusi yang berkembang karena adanya masalah atau perselisihan di antara orang dan/atau kelompok masyarakat. Isu sosial menjadi "masalah sosial" ketika diskusi publik tentang hal tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan atau mengungkapkan adanya sejumlah kesulitan yang harus segera diselesaikan demi kebaikan masyarakat. Istilah umum "agenda" berarti daftar, garis besar, atau rencana yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan atau hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti.

Tujuan dari fase penetapan agenda adalah untuk menentukan apa masalah negara dan mengapa hal itu harus diintervensi. Tahap ini mengacu pada proses melalui mana kebijakan dan masalah yang dimaksudkan untuk ditangani dan diakui sebagai kepentingan umum. Kingdon (2003) mendefinisikan agenda sebagai daftar subyek atau masalah yang berhubungan erat dengan pejabat pemerintah, dan orang-orang di luar pemerintahan yang terkait dengan para pejabat tersebut. Dalam waktu tertentu pemerintah harus memberikan perhatian serius pada masalah tertentu. Agenda adalah kumpulan masalah, pemahaman tentang penyebab, simbol, solusi, dan elemen lain dari masalah publik yang menjadi perhatian anggota masyarakat dan pejabat pemerintah. Agenda ada di semua tingkat pemerintahan. Setiap komunitas dan setiap badan pemerintahan memiliki sejumlah masalah yang berbeda-beda untuk didiskusikan dan disposisi.

Agenda adalah serangkaian masalah yang ingin diselesaikan pemerintah. Biasanya ada begitu banyak dari masalah-masalah tersebut yang harus diprioritaskan. Beberapa masalah mungkin mendapatkan prioritas utama sedangkan masalah lainnya berada

di prioritas berikutnya. Agenda *Setting* dapat menanggapi tekanan kelompok kepentingan, seperti partai politik, media, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Agenda biasanya dibentuk kembali ketika presiden baru berkuasa atau ketika partai mayoritas di Kongres berubah setelah pemilihan.

Penetapan agenda adalah proses atau perilaku untuk mengadopsi masalah atau masalah sosial sebagai masalah kebijakan. Dalam prosesnya, masalah sosial atau masalah dipilih sebagai masalah pemerintah. Agenda *Setting* adalah proses di mana masalah dan solusi alternatif mendapatkan atau kehilangan perhatian publik dan elit. Persaingan kelompok untuk menetapkan agenda sangat ketat karena tidak ada masyarakat atau sistem politik yang memiliki kapasitas kelembagaan untuk menangani semua alternatif yang mungkin saja semua masalah terjadi atau muncul bersamaan dalam satu waktu. Karena itu, kelompok-kelompok tersebut harus terus berjuang agar isu-isu yang diperjuangkan mendapatkan perhatian. Karena ruang agendanya terbatas, kepentingan-kepentingan tersebut harus saling bersaing untuk menempatkan masalah dan pilihan kebijakan alternatif mereka dalam agenda. Dengan menggunakan kekuatan sumber daya yang mereka miliki, mereka juga harus bersaing satu sama lain untuk menjaga masalah mereka tetap menjadi agenda.

Birkland dan Schwaebler (2019), mengatakan Agenda *Setting* adalah aspek penting dari proses kebijakan publik. Peristiwa mendadak, langka, dan berbahaya, yang dikenal sebagai peristiwa yang membutuhkan fokus, dapat memiliki pengaruh penting dalam proses penyusunan kebijakan. Beberapa ahli telah membedakan beberapa jenis agenda, termasuk agenda diskusi dan agenda keputusan. Agenda diskusi atau agenda publik merupakan isu-isu yang nampak dengan jelas, dan dengan demikian menjadi subjek diskusi. Sedangkan agenda keputusan atau agenda formal merupakan sejumlah daftar masalah yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk ditangani (Cobb & Elder, 1972).

Agar suatu kebijakan ditempatkan dalam agenda, maka diperlukan beberapa prasyarat tertentu. Syaratnya, individu atau kelompok

harus mengakui situasi yang sedang bermasalah, mengidentifikasi aspek-aspek yang bermasalah dari situasi, mengusulkan solusi, dan terlibat dalam kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dan menekannya untuk melakukan intervensi terhadap masalah, termasuk mengidentifikasi kelompok yang dapat memainkan peran secara aktif dalam mengatasi masalah tersebut (Ripley dalam McCool, 1995). Sementara Model Kingdon mengatakan bahwa masalah akan masuk dalam agenda politik melalui tiga aliran. Kingdon (1984) mengemukakan bahwa perubahan kebijakan terjadi ketika tiga aliran — aliran masalah (*problems*), aliran politik (*politics*), dan aliran kebijakan (*policies*) — saling terhubung. Model Kingdon menunjukkan bahwa saat ini ketiga aliran tersebut beroperasi secara independen dan saling terpisah satu sama lainnya, sehingga ketiganya perlu disatukan agar kebijakan dapat muncul. Aliran masalah, ditandai dengan indikator masalah yang sistematis karena adanya krisis yang tiba-tiba, atau adanya umpan balik yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dari situ kemudian masalah masuk dalam agenda kebijakan. Sementara, Aliran kebijakan, berhubungan dengan para aktor kebijakan dan komunitas masyarakat yang memunculkan solusi (kebijakan) terhadap masalah yang muncul. Konsep ini juga berkaitan dengan kebijakan aktual yang hendak atau sedang dipromosikan. Sedangkan aliran politik terdiri dari suara publik, kampanye kelompok kepentingan, hasil pemilihan umum, faktor ideologis, dll.

Dalam prakteknya agenda *setting* memiliki beberapa tahapan agenda, di antaranya:

1. Agenda Universal - semua ide yang mungkin dapat diangkat dan dibahas dalam masyarakat atau sistem politik.
2. Agenda sistemik - semua masalah yang biasanya dianggap oleh anggota komunitas politik sebagai sesuatu yang pantas untuk mendapatkan perhatian publik. Agenda ini melibatkan proses yurisdiksi yang sah dari otoritas pemerintah.
3. Agenda kelembagaan – Sejumlah daftar item yang secara eksplisit digunakan sebagai bahan pertimbangan yang penting dan serius dalam pembuat keputusan otoritatif.

4. Agenda keputusan - Sejumlah item yang akan ditindaklanjuti oleh badan pemerintah.

Sementara, Cobb and Elder (1972), membagi agenda kebijakan menjadi dua kategori. Pertama, Agenda resmi (Formal Agenda), juga disebut sebagai agenda kelembagaan atau agenda pemerintah, terdiri dari item yang telah ditetapkan untuk dipertimbangkan dalam agenda kebijakan oleh parlemen atau pihak eksekutif. Kedua, Agenda Sistematis (*Systematic Agenda*) atau agenda kontroversi (*Agenda of Controversy*) terdiri dari isu-isu yang telah cukup mendapat perhatian untuk memastikan kesadaran publik, yang mencerminkan adanya keprihatinan bersama oleh beberapa anggota masyarakat bahwa tindakan pemerintah sangat diperlukan, yang dipandang perlu untuk diganti oleh pemerintah, atau mengikuti resolusi yang bersumber dari inisiatif warga.

Sama dengan tahapan di atas, agenda setting juga memiliki berbagai macam tipe-tipe agenda. Rogers dan Dearing (1988) mengidentifikasi tiga jenis Agenda Setting:

- 1) Pengaturan agenda publik, di mana agenda publik adalah variabel dependen (hipotesis tradisional).
- 2) Pengaturan agenda media, di mana agenda media diperlakukan sebagai variabel dependen (*agenda building*).
- 3) Penetapan agenda kebijakan, di mana agenda kelompok elit pembuat kebijakan diperlakukan sebagai variabel dependen. Ada beberapa ahli menyebutnya sebagai pengaturan agenda politik.

b) *Formulasi Kebijakan*

Pada tahap ini, administrasi publik sangat erat kaitannya dengan proses memeriksa berbagai opsi kebijakan yang dianggap sebagai solusi yang memungkinkan. Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Dunn (2000), perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Formulasi

mengacu pada masalah yang dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan dalam mengembangkan posisi legislasi atau kebijakan. Apa solusi alternatif yang harus kita pertimbangkan?. Bagaimana seharusnya kita menerapkan kebijakan?. Tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap memilah-milah opsi kebijakan yang hendak dibuat.

Perumusan kebijakan adalah pengembangan tindakan yang efektif dan dapat diterima untuk menangani apa yang telah ditetapkan dalam agenda kebijakan. Perlu diperhatikan, ada dua bagian dari definisi formulasi kebijakan ini. Pertama, Perumusan yang efektif berarti bahwa kebijakan yang diusulkan dianggap sebagai solusi yang valid, efisien, dan dapat diterapkan untuk masalah yang dihadapi. Jika kebijakan tersebut dipandang tidak efektif atau dalam parakteknya tidak dapat dijalankan, maka tidak ada alasan kuat untuk mengusulkan solusi tersebut sebagai sebuah kebijakan. Fase ini bisa juga disebut sebagai fase analitis dalam perumusan kebijakan publik. Analisis kebijakan harus mampu dan mencoba mengidentifikasi berbagai alternatif dan menemukan alternatif yang efektif. Kedua, formulasi yang dapat diterima berarti bahwa tindakan yang diusulkan kemungkinan akan disahkan oleh pembuat keputusan, biasanya melalui dukungan mayoritas dan proses tawar-menawar dalam politik. Artinya, formulasi tersebut harus layak secara politik. Jika kebijakan tersebut ada kemungkinan ditolak oleh badan pembuat keputusan, mungkin saja kebijakan tersebut kurang praktis dan sulit untuk dipraktekkan. Proses ini bisa disebut sebagai fase politik dalam perumusan kebijakan.

Ada dua aspek dalam perumusan kebijakan: analitis dan politik. Pertama, alternatif kebijakan harus dibuat se-efektif mungkin. Syaratnya perumusan kebijakan harus berdasarkan analisa yang kuat, bisa dipahami dan dapat diartikulasikan dengan jelas. Kedua, pilihan politik di antara alternatif-alternatif ini harus dibuat. Kebijakan harus disahkan melalui proses politik, seperti undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

c) *Adopsi (Pembuatan Keputusan)*

Adopsi adalah tahap di mana keputusan dibuat di tingkat pemerintah, menghasilkan keputusan yang mendukung satu atau lebih

pendekatan untuk mengatasi masalah yang diberikan. Adopsi kebijakan adalah fase ketiga dalam proses kebijakan, di mana kebijakan diadopsi oleh badan-badan pemerintah untuk implementasikan di masa depan. Kebijakan dilegitimasi sebagai hasil dari pernyataan publik atau tindakan pejabat pemerintah; baik yang terpilih maupun yang ditunjuk - presiden, Kongres, legislator negara bagian, pejabat agensi, dan pengadilan. (Palao, 2013). Adopsi kebijakan merupakan proses pembuatan kebijakan yang melibatkan praktek memutuskan mana di antara alternatif kebijakan yang diusulkan, termasuk tidak mengambil tindakan, yang akan digunakan untuk menangani masalah tertentu di dalam masyarakat (Anderson, 2015). Adopsi Kebijakan merujuk pada pilihan di antara alternatif kebijakan yang telah dihasilkan dan memiliki pengaruh terhadap estimasi masalah. Ini adalah tahap politik yang paling terang-terangan tentang pemilihan solusi yang paling potensial untuk menangani masalah, entah bagaimana caranya harus dipilah, dipilih dan direalisasikan untuk digunakan (Brewer dan De Leon, 1983).

Adopsi adalah bagian dari serangkaian prosedur dan standar dalam proses pembuatan kebijakan yang diharapkan mampu mengarahkan semua keadaan ke dalam pilihan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan kebijakan (Howlett dan Geist : 2012). Ini adalah langkah selanjutnya setelah perumusan kebijakan yang mencakup upaya untuk mendapatkan dukungan yang cukup untuk memungkinkan proposal menjadi kebijakan pemerintah. Pada titik ini, sebagian besar proposal kebijakan melalui proses tawar-menawar dan kompromi serta muncul perubahan signifikan (Gitelson, Dudley, dan Dubnick, 2017). Adopsi kebijakan dimulai setelah suatu masalah atau isu ditempatkan dalam agenda kebijakan dan menyusunnya melalui proses legislatif sampai kemudian menjadi agenda keputusan (Birkland, 2007). Ketika semua proposal, alternatif, dan kompromi telah dibuat, maka adopsi akan terjadi dengan cara yang pasti dan publik mengetahuinya. Kebijakan yang telah dirumuskan harus diadopsi oleh lembaga pemerintah terkait agar diberlakukan.

Adopsi Kebijakan sering digunakan secara bergantian dengan kata "Pengambilan Keputusan" oleh sejumlah ahli yang percaya

bahwa konsep-konsep ini saling terkait satu sama lain daripada menjadi kutub yang terpisah. Dalam adopsi kebijakan, Anderson (2011) sering menyebutnya sebagai pengambilan keputusan dalam organisasi. Sementara, Birkland (2011) menyebutnya sebagai pengambilan keputusan politik. Sedangkan Howlett & Ramesh (2003) menyebutnya sebagai keputusan kebijakan.

Berdasarkan gambaran di atas, secara garis besar adopsi kebijakan mengacu pada keluaran (*output*) kebijakan formal dari proses ini, misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, amandemen, dan prosedur administrasi. Keluaran ini bisa mencakup keputusan formal pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan apapun. Namun, tidak menutup kemungkinan suatu kebijakan dapat menjadi keputusan informal, walaupun keluaran kebijakan bersifat formal. Lembaga pembuat kebijakan dapat mengeluarkan tindakan formal walaupun memutuskan untuk tidak mengimplementasikan sepenuhnya; keduanya adalah kebijakan publik, satu formal, satu informal. Misal, pejabat yang baru terpilih sebagai pejabat publik. Pejabat tersebut dapat memilih untuk meninggalkan kebijakan formal yang sudah ada sebelumnya dengan cara memilih untuk tidak menegakkan atau menerapkan kebijakan tersebut.

d) *Implementasi*

Implementasi kebijakan melibatkan penerjemahan tujuan dan sasaran kebijakan ke dalam tindakan. Implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai tahapan keempat dalam siklus kebijakan yang berarti bahwa formulasi kebijakan akan dilaksanakan setelah berlakunya undang-undang, atau tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah yang hendak diselesaikan. Implementasi kebijakan mencerminkan proses perubahan yang kompleks di mana keputusan pemerintah ditransformasikan menjadi program, prosedur, peraturan, atau praktek yang ditujukan untuk perbaikan sosial.

Implementasi adalah tahap penting dari proses pembuatan kebijakan. Ini berarti pelaksanaan hukum di mana berbagai pemangku kepentingan, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk

memberlakukan kebijakan dengan maksud untuk mencapai tujuan kebijakan (Stewart *et al.*, 2008). Implementasi dapat dipandang sebagai proses, output, dan hasil, serta melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik kontrol. Implementasi adalah proses interaksi antara menetapkan tujuan dan tindakan yang diarahkan untuk mencapainya (Pressman & Wildavsky, 1973). Simon (2010), memandang implementasi sebagai penerapan kebijakan oleh perangkat administrasi pemerintah untuk mencapai tujuan. Secara khusus, implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh individu dalam sektor publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Meter & Horn, 1975). Implementasi adalah kesenjangan antara maksud kebijakan dan hasil (Maznamin & Sabatier, 1989; Smith & Larimer, 2009). Studi implementasi, oleh karena itu, memberikan penekanan pada pemahaman tentang keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik dengan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Parameter implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dapat secara langsung mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Menurut Sabatier dan Mazmanian (1995) ada beberapa faktor yang menentukan dampak aktual suatu kebijakan dan seberapa baik ia mencapai tujuannya. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Jenis dan kerumitan masalah yang dibahas.
2. Besarnya perubahan yang diharapkan dan kelompok-kelompok yang ditargetkan oleh kebijakan.
3. Sumber daya manusia dan keuangan yang dikhususkan untuk implementasi, dan
4. Struktur Serta peraturan administrasi yang akan diberlakukan untuk mendukung implementasi kebijakan

Secara garis besar, para ahli memiliki definisi yang berbeda-beda tentang implementasi. Jika definisi-definisi tersebut dikategorisasi, maka akan ada dua kategori definisi implementasi. Salah satu definisi implementasi yang paling awal adalah "kemampuan untuk menjalin hubungan dengan tindakan berikutnya dalam rantai

sebab-akibat sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan" (Pressman dan Wildavsky, 1973). Mazmanian dan Sabatier (1983) adalah di antara penulis yang paling sering dikutip di lapangan; mereka mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan atau keputusan pengadilan. Mungkin definisi implementasi yang paling jelas yang menunjukkan betapa pentingnya hal itu dan seberapa besar adanya kesenjangan dalam model perencanaan tipikal adalah apa yang diajukan oleh Wanderman et al. (2008). Model tersebut membantu mengungkap "apa" yang perlu terjadi, baik itu pada penciptaan intervensi untuk menanggapi masalah tertentu atau jenis praktek yang paling cocok untuk melakukan intervensi berdasarkan konteks tertentu.

Dari gambaran di atas, kita bisa memahami bahwa implementasi itu fokus pada bagaimana seseorang dapat menghasilkan perubahan melalui intervensi tertentu. Implementasi adalah "serangkaian kegiatan khusus yang dirancang untuk mempraktekkan kegiatan atau program dari dimensi yang diketahui... proses dan tujuannya dijelaskan secara cukup rinci, sehingga pengamat independen dapat mendeteksi keberadaan dan kekuatan adanya 'rangkaian kegiatan spesifik' terkait dengan implementasi" (Fixsen et al., 2005). Implementasi mengacu pada "aktivitas awal setelah adanya keputusan untuk mengadopsi inovasi dan berakhir ketika penggunaan inovasi menjadi praktek rutin" (Meyers, Sivakumar, dan Nakata, 1999).

Durlak dan DuPre (2008), secara umum memandang implementasi sebagai sesuatu yang "terdiri dari program yang saat ini hendak disampaikan dalam pengaturan tertentu". Bagi Domitrovich et al. (2008), implementasi adalah fokus pada suatu entitas yang "telah memutuskan untuk mengadopsi suatu program, tetapi sebelum itu dipertahankan atau secara formal diintegrasikan ke dalam suatu sistem". Burke, Morris, dan McGarrigle (2012), mengatakan bahwa bidang implementasi mencakup hampir setiap sektor dan oleh karenanya dapat merujuk pada penyampaian rencana atau tindakan apapun. Karena alasan inilah para cendekiawan mencirikan implementasi sebagai suatu proses (Dimitrakopoulos

dan Richardson, 2001) dengan "multi-stage" dan perkembangan krakternya" (McLaughlin, 1987).

Maka, secara keseluruhan, implementasi adalah administrasi dari keputusan kebijakan, di dalamnya termasuk berbagai tindakan seperti mengembangkan peraturan dan memilih cara terbaik untuk menegakkan hukum dan peraturan tersebut. Implementasi adalah titik di mana tanggung jawab pembuatan kebijakan bergeser ke lembaga dan departemen pemerintahan. Bergantung pada sifat keputusan kebijakan, keleluasaan yang dimiliki oleh para agen administratif saat menyusun peraturan, menetapkan standar, dan mengembangkan strategi penegakan hukum.

e) *Evaluasi*

Tahap terakhir dari siklus kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Fase ini sangat penting, karena dengan evaluasi pembuat kebijakan bisa memperoleh gambaran tentang indikator keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. Ini adalah tahap di mana suatu kebijakan dievaluasi, untuk memverifikasi apakah implementasi dan dampaknya selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan secara eksplisit maupun implisit. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh aparat pemerintah atau pihak eksternal dengan melalui proses konsultasi. Evaluasi implementasi kebijakan bisa dilakukan dengan melakukan monitoring secara langsung terhadap suatu kebijakan. Hasil pemantauan dicatat dan disampaikan secara sistematis kepada pimpinan untuk kemudian dievaluasi.

Evaluasi kebijakan publik adalah alat pendukung pengambilan keputusan yang memberikan informasi berguna tentang kebijakan publik saat ini. Dengan menilai dampak suatu tindakan, evaluator berupaya memahami dan menjelaskan bagaimana efek ini terjadi. Evaluator juga dapat menganalisis proses penerapan suatu tindakan. Evaluasi adalah proses yang secara kritis memeriksa suatu program. Melalui aktivitas ini, para evaluator dapat merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan publik atau pengembangan kebijakan.

Evaluasi adalah aktivitas yang melibatkan pengumpulan data dan analisis informasi tentang kegiatan, karakteristik, dan hasil program. Tujuannya adalah untuk membuat penilaian tentang suatu

program, untuk meningkatkan efektivitasnya, dan atau untuk menginformasikan keputusan pemrograman (Patton, 1987). Evaluasi kebijakan menerapkan prinsip dan metode evaluasi untuk memeriksa konten, implementasi, dan dampak suatu kebijakan. Maka evaluasi merupakan aktivitas yang dengannya kita mengembangkan pemahaman tentang capaian, prestasi, nilai, dan utilitas suatu kebijakan. David Nachmias (1979), mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai pemeriksaan obyektif, sistematis, empiris dari dampak kebijakan yang sedang berlangsung dan program publik terhadap target mereka dalam hal tujuan yang ingin mereka capai.

Evaluasi terdiri dari analisis keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Pemilihan alat analisis yang tepat tergantung pada jenis kebijakan yang akan dievaluasi. Evaluasi harus berfokus pada efek yang dihasilkan oleh tindakan, apakah diinginkan atau tidak, langsung atau tidak langsung, dan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Para evaluator harus hati-hati dalam menentukan alat analisa kebijakan. Maka harus ditetapkan dulu apa yang akan dievaluasi?. Apakah evaluasi akan dilakukan pada implementasi atau dampaknya. evaluator harus membuat sejumlah kriteria yang bisa digunakan dengan mudah seperti keefektifan, relevansi, keadilan, keberlanjutan, konsistensi, dll. Ingram dan Mann (1980) mengingatkan para evaluator agar hati-hati dalam menggunakan konsep “keberhasilan” dan “kegagalan” sebagai bahan tolak ukur atau penarikan kesimpulan suatu kebijakan. Bagi Ingram dan Mann (1980) konsep seperti itu sangat “licin” dan sering kali sangat subyektif. Kadang kala, tujuan kebijakan publik sering kali dinyatakan dengan tidak jelas untuk mengetahui apakah dan sejauh mana kebijakan tersebut bisa dicapai. Selain itu, sering kali pula tidak semua aktor mengetahui kebijakan utama dari suatu kebijakan.

Agar kita lebih bisa memahami evaluasi secara mudah dan tepat, maka kita perlu untuk memahami evaluasi dalam proses kebijakan. Karenanya, penting bagi kita untuk memahami bagaimana evaluasi kebijakan bisa cocok dengan proses kebijakan. Memahami konteks ini bisa memberikan pemahaman yang meningkat tentang mengapa evaluasi kebijakan sangat penting untuk memajukan

bidang kebijakan. Meskipun ada banyak teori mengenai proses kebijakan dan mekanisme perubahan kebijakan, proses perubahan kebijakan sering dikonseptualisasikan dalam beberapa tahap utama seperti yang ditunjukkan pada gambar 14 berikut:

Gambar 14. Fase pengembangan kebijakan dan jenis evaluasi



Evaluasi adalah bagian integral dari setiap langkah dalam proses kebijakan. Meskipun langkah-langkah ini disusun secara berurutan, pada kenyataannya, langkah-langkah di atas sifatnya melingkar.

Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, maka secara garis besar, ada tiga jenis evaluasi. Di mana, jenis-jenis evaluasi tersebut berfokus pada masing-masing tahapan (fase) proses kebijakan. Jenis-jenis evaluasi tersebut di antaranya :

1. Evaluasi Konten Kebijakan

Apakah konten kebijakan telah dengan jelas mengartikulasikan tujuan kebijakan, implementasinya, dan logika yang mendasari mengapa kebijakan tersebut akan menghasilkan perubahan yang diinginkan?. Mengevaluasi pengembangan kebijakan membantu memahami konteks, konten, dan implementasi.

2. Evaluasi Implementasi Kebijakan

Apakah kebijakan diterapkan sebagaimana dimaksud?. Implementasi kebijakan adalah komponen penting dalam memahami efektivitasnya. Evaluasi implementasi kebijakan dapat memberikan informasi penting tentang hambatan, fasilitasi implementasi, dan perbandingan antara berbagai komponen atau intensitas implementasi.

3. Evaluasi Dampak Kebijakan

Apakah kebijakan telah membuahkan hasil dan ada dampak yang diinginkan?. Penting untuk di evaluasi hasil dari jangka pendek

dan menengah kebijakan. Jenis evaluasi yang dipilih tergantung pada banyak faktor, dan sering kali diperlukan lebih dari satu jenis evaluasi. Setiap jenis evaluasi dapat memberikan informasi yang berharga untuk perencanaan dan interpretasi dari jenis evaluasi lainnya (konten, implementasi, dan dampak) selain mengungkap konsekuensi yang tidak disengaja.

Melakukan evaluasi bukan tanpa tantangan, ada beberapa potensi masalah yang akan menghambat kegiatan evaluasi. Berikut beberapa tantangan yang perlu diantisipasi ketika melakukan kegiatan evaluasi:

Tabel 10. Potensi Tantangan Evaluasi Kebijakan

- Kurangnya sumber daya atau tanggung jawab yang jelas untuk melakukan evaluasi	- Kurangnya basis bukti (data dan informasi) yang kuat untuk mendukung kebijakan
- Kekhawatiran akan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan kurangnya penguasaan metode evaluasi kebijakan	- Faktor eksternal dan kontekstual, seperti kondisi ekonomi atau kesadaran publik
- Kurangnya “kontrol” atas implementasi kebijakan	- Akses ke sumber data yang minim dan kurang sesuai
- Laju kebijakan yang cepat	- Kurangnya perhitungan dalam menyusun langkah-langkah yang tepat
- Pengawasan politik dan keinginan untuk menghasilkan analisa evaluasi yang cepat	- Kesulitan dalam mengidentifikasi komunitas pembanding yang tepat

D. Siklus Kebijakan

Istilah siklus kebijakan mengacu pada pola yang berulang-ulang yang ditunjukkan melalui prosedur yang mengarah pada pembuatan kebijakan publik. Siklus kebijakan menggambarkan cara di mana suatu

isu berkembang dari ide-ide awal, melalui fase implementasi hingga membuah hasil, evaluasi, dan menyusun agenda-agenda baru.

Konsep siklus kebijakan dikembangkan oleh Harold Lasswell di AS pada 1950-an. Pada saat itu, Lasswell menggambarkan ilmu kebijakan publik sebagai multidisiplin, penyelesaian masalah, dan normatif eksplisit (Howlett dan Ramesh, 2003). Atas dasar karakteristik ini, Lasswell mengembangkan konsep siklus kebijakan, yang dibagi menjadi tujuh tahap mendasar dalam pengambilan keputusan. Tujuh tahap yang dimaksud Lasswell (1956) adalah: intelijen, promosi, preskripsi, invokasi, aplikasi, terminasi, dan penilaian (*appraisal*). Model yang diajukan oleh Lasswell sangat berhasil sebagai kerangka dasar untuk bidang studi kebijakan dan menjadi titik awal dari pengembangan berbagai tipologi proses kebijakan. Antara tahun 1960-an dan 1970-an model yang diajukan Lasswell menjadi bahan rujukan dalam pengembangan model-model tahapan kebijakan. Sejumlah variasi yang berbeda dari tipologi tahapan kebijakan kemudian bermunculan. Kemunculan model-model baru menawarkan diferensiasi lebih lanjut dari (sub-) tahapan. Misal, versi yang dikembangkan oleh Brewer dan deLeon (1983), May dan Wildavsky (1978), Anderson (1975), dan Jenkins (1978) adalah yang paling banyak diadopsi hingga sekarang. Saat ini, diferensiasi antara penetapan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi (akhirnya mengarah pada terminasi) telah menjadi cara konvensional untuk menggambarkan kronologi proses kebijakan.

Meskipun tiga karakteristik yang diidentifikasi oleh Lasswell sehubungan dengan analisis kebijakan telah bertahan dalam waktu yang lama, saat ini, sebagian besar model siklusnya banyak dikritik pengamat karena pendekatannya yang terpecah-pecah terhadap faktor-faktor penjelas. Howlett dan Ramesh (2003) kemudian mengembangkan model baru dengan membagi siklus kebijakan menjadi lima tahap: penetapan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan kebijakan publik, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Meskipun kelimanya penting, ketiganya - penetapan agenda, perumusan dan implementasi - juga tidak kalah penting untuk memahami siklus kebijakan.

Agenda Setting adalah tahap pertama dalam siklus kebijakan, mengacu pada proses di mana kondisi sosial diakui dan dianggap telah berkembang menjadi "masalah publik" - tidak lagi tunduk pada takdir sosial atau alam, juga bukan milik ruang privat - dengan demikian menjadi fokus perdebatan dan kontroversi di media dan politik (Garraud, 2004). Penentuan agenda adalah tahap kritis dalam siklus kebijakan karena dinamikanya memiliki dampak yang menentukan pada keseluruhan proses kebijakan dan kebijakan yang dihasilkannya (Lemieux, 2002; Howlett dan Ramesh, 2003). Penetapan agenda adalah proses yang dikonstruksi secara sosial (Howlett dan Ramesh, 2003), di mana para aktor dan institusi, yang dipengaruhi oleh ideologi mereka, memainkan peran mendasar dalam menentukan masalah atau masalah yang memerlukan tindakan dari pihak pemerintah.

Setelah adanya masalah dan kebutuhan untuk memperbaikinya telah diakui (Howlett dan Ramesh, 2003), tahap selanjutnya dalam siklus kebijakan adalah perumusan kebijakan. Tahapan ini melibatkan tindakan mengidentifikasi dan menilai solusi yang mungkin untuk masalah kebijakan, menimbang pro dan kontra solusi, dan memutuskan mana yang harus diterima dan ditolak (Howlett dan Ramesh, 2003). Ketika opsi telah diidentifikasi, para pembuat kebijakan akan dihadapkan pada dua kendala. Pertama, Kendala substantif. kendala terkait dengan sifat masalah itu sendiri dan memerlukan banyak penggunaan sumber daya negara untuk menyelesaikan masalah (Howlett dan Ramesh, 2003). Kedua, kendala prosedural. Kendala ini mempengaruhi semua aspek dari tahap perumusan. Kendala ini dapat dikarakteristikkan sebagai kendala kelembagaan, kendala berdasarkan prosedur pemerintah, kendala sebagai hal yang taktis, dan kendala hubungan antara berbagai aktor atau kelompok sosial.

Tahap penting ketiga adalah implementasi, atau proses pemberlakuan kebijakan publik. Ini adalah situasi di mana keputusan diberlakukan melalui arahan-arahan pemerintah dan dihadapkan dengan kenyataan (Mégie, 2004). Umumnya ada perbedaan antara maksud kebijakan dan hasilnya (Mégie, 2004), yang berasal dari peran yang dimainkan oleh para aktornya, terutama pegawai negeri yang diberikan tanggung jawab untuk mengawal atau mengontrol implementasi. Kecen-

derungan pribadi pegawai negeri sipil (ideologi, minat, pemikiran, dll.) Dapat memengaruhi persepsi dan bahkan niat mereka ketika harus menerapkan kebijakan. Namun, tampaknya faktor utama yang mempengaruhi perilaku pegawai negeri adalah perilaku mereka dalam suatu organisasi (Brooks, 1998).

Dalam tahap ini, budaya organisasi memiliki pengaruh yang menentu, karena ia mentransmisikan norma-norma ideologis dan profesional, serta teknik-teknik khusus agensi, yang dapat memengaruhi proses implementasi (Brooks, 1998). Aktor eksternal juga bisa memperlebar kesenjangan antara niat pemerintah dan hasil yang dapat diamati. Misalnya, kelompok penekan, kelompok lobi atau pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan khusus dalam suatu kebijakan dapat mempengaruhi cara di mana pegawai negeri sipil memastikan implementasinya, suatu keadaan yang Selznick istilahkan sebagai kooptasi (Brooks, 1998).

Selain Agenda Setting, Formulasi kebijakan, dan Implementasi Kebijakan, beberapa ahli kebijakan memasukkan evaluasi kebijakan sebagai hal yang tak kalah pentingnya dalam siklus kebijakan. Pembuatan kebijakan seharusnya berkontribusi pada penyelesaian masalah atau setidaknya pada pengurangan beban masalah (Jan dan Wegrich, 2006). Selama tahap evaluasi dari siklus kebijakan, hasil-hasil kebijakan yang dimaksudkan akan menjadi pusat perhatian. Alasan normatif yang masuk akal bahwa, pada akhirnya, pembuatan kebijakan harus dinilai berdasarkan tujuan dan dampak yang dimaksud. Penilaian akan menjadi titik awal evaluasi kebijakan.

Namun, evaluasi tidak hanya berkaitan dengan tahap akhir dari siklus kebijakan yang berakhir bersamaan dengan berakhirnya suatu kebijakan atau bersamaan dengan desain ulang kebijakan yang mendasarkan dirinya pada agenda setting dan persepsi masalah yang dimodifikasi. Pada saat yang sama, penelitian evaluasi membentuk subdisiplin terpisah dalam ilmu kebijakan yang berfokus pada hasil yang diinginkan dan konsekuensi kebijakan yang tidak diinginkan. Studi evaluasi tidak hanya terbatas pada tahap tertentu dalam siklus kebijakan; sebaliknya, perspektif evaluasi diterapkan pada keseluruhan

proses pembuatan kebijakan dan dari berbagai perspektif dalam hal waktu (*ex ante*, *ex post*).

Tabel 11. Proses Pembuatan Kebijakan

TAHAPAN	INFORMASI YANG AKAN DITRANSMISIKAN OLEH AKTOR KEBIJAKAN SOSIAL	
Penetapan Agenda (Agenda Setting)	Penataan masalah	
	1	Mengidentifikasi situasi masalah dan mengumpulkan bukti yang menunjukkan besarnya masalah. Informasi ini ditujukan untuk para pembuat keputusan serta pemangku kepentingan lainnya.
	2	<ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan pentingnya masalah dan faktor penentu. • Menyusun kerangka kerja untuk menjawab masalah
	3	Identifikasi data yang menentukan dan relevan untuk mengkarakterisasi masalah.
Formulasi Kebijakan	Prediksi	
	1	Menunjukkan pengungkit dan kebijakan mana yang memungkinkan untuk melakukan intervensi.
	2	Menentukan konsekuensi dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan dan mendokumentasikan dampaknya terhadap masalah dan faktor-faktor penentu
	3	Merinci dampak dari setiap opsi.
	4	<ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan, menetapkan biaya, dan menetapkan manfaat yang hendak dicapai di masa depan • Penetapan-penetapan bersumber dari semua skenario strategis yang disusun menggunakan informasi yang dihasilkan oleh prediksi.
Implementasi Kebijakan	Monitoring	
	1	Mendokumentasikan konsekuensi dari kebijakan yang diadopsi sebelumnya dan berpartisipasi dalam implementasinya.
	2	<ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan analisa

		<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan keterampilan teknis, • Menggunakan pengetahuan para ahli • Menggunakan pengalaman praktis • Penekanan pada kemungkinan untuk menerapkan bukti-bukti yang dikumpulkan dari berbagai situasi dan konteks yang berbeda.
Evaluasi Kebijakan	Evaluasi	
	1	Mengembangkan mekanisme monitoring.
	2	Mengungkap perbedaan antara hasil kebijakan yang diharapkan dan hasil aktual
	3	Melakukan evaluasi yang kompleks.

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEBIJAKAN SOSIAL

Kebijakan dan Administrasi Sosial adalah subjek akademik yang menumpukan perhatiannya pada studi layanan sosial dan negara kesejahteraan. Subjek ini berkembang pada awal abad ke-20 sebagai pelengkap studi kesejahteraan sosial, yang ditujukan untuk orang-orang yang secara profesional akan terlibat dalam administrasi kesejahteraan. Selama empat puluh tahun terakhir, jangkauan dan luasnya subjek kajian ini telah berkembang sangat pesat. Kajian-kajiannya meliputi:

1. Kebijakan dan praktik administrasi dalam layanan sosial, termasuk administrasi kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, layanan ketenagakerjaan, perawatan masyarakat dan manajemen perumahan.
2. Masalah sosial, termasuk kejahatan, kecacatan, pengangguran, kesehatan mental, ketidakmampuan dalam belajar, dan masalah lansia.
3. Masalah yang berkaitan dengan kerugian sosial, seperti masalah ras, jenis kelamin, dan kemiskinan
4. Hal-hal yang berkaitan dengan respons sosial kolektif terhadap kondisi-kondisi sosial. Kebijakan Sosial adalah bidang studi, bukan disiplin. Kajian ini meminjam berbagai istilah, konsep, definisi, dan teori dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, pekerjaan sosial, psikologi, ekonomi, ilmu politik, manajemen, sejarah, filsafat, dan hukum (Spicker, 2007; Rahimi & Noruzi, 2011).

A. Administrasi Sosial

Untuk mencapai maksud dan tujuan kesejahteraan sosial, pemerintah merumuskan kebijakan dan membuat program sosial. Dalam menjalankannya, pemerintah membuat undang-undang sosial, mengalokasikan bantuan keuangan, dan menyiapkan organisasi pelaksana serta administrasi dalam bentuk kementerian dan departemen. Dalam praktiknya, pemerintah kadang kala juga mencari (menjalin) kemitraan

dengan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dari berbagai program kesejahteraan sosial yang telah disusunnya. Prinsipnya, Semua kegiatan Administrasi yang dilakukan di bidang pelayanan sosial dan kesejahteraan sosial dianggap sebagai bidang administrasi kesejahteraan sosial.

Menurut Titmus (1948), administrasi sosial secara luas dapat didefinisikan sebagai studi layanan sosial yang objeknya adalah peningkatan kondisi kehidupan individu dalam pengaturan keluarga dan hubungan kelompok. Sedangkan Donnison (1961) mendefinisikan administrasi sosial sebagai studi pengembangan, struktur dan praktik layanan sosial. Sementara, Forder (1974) melihat administrasi sosial erat kaitannya dengan studi sistem kesejahteraan, dan khususnya layanan sosial yang disponsori oleh pemerintah. Administrasi sosial adalah Studi tentang pengaturan dan kebijakan sosial yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial — terutama sistem kesejahteraan negara (Spicker, 2007).

B. Kebijakan dan Administrasi Sosial

Kebijakan dan Administrasi Sosial merupakan bidang studi yang memiliki perhatian pada kajian layanan sosial dan negara kesejahteraan. Kajian ini erat kaitannya dengan kebijakan sosial dan kesejahteraan. Kebijakan sosial mengacu pada pedoman, prinsip, peraturan dan kegiatan yang memengaruhi kondisi kehidupan yang kondusif bagi kesejahteraan manusia. Departemen Kebijakan Sosial *London School of Economics* (LSE) mendefinisikan kebijakan sosial sebagai "subjek interdisipliner dan terapan yang berkaitan dengan analisis tanggapan masyarakat terhadap kebutuhan sosial. Kajian ini berkembang mulai awal abad ke-20 sebagai pelengkap kajian pekerjaan sosial. Bidang kajian ini dikembangkan untuk orang-orang yang secara khusus akan dan atau sedang menekuni profesi bidang kesejahteraan sosial. Dalam empat puluh tahun terakhir, jangkauan dan luasnya subjek ini telahpun berkembang pesat (Spicker, 2014).

Administrasi sosial berkaitan dengan masalah sosial dan dengan cara apa masyarakat akan merespons masalah-masalah tersebut. Kajian bidang ini meliputi praktik kebijakan dan administrasi dalam

layanan sosial, termasuk di dalamnya administrasi kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, layanan ketenagakerjaan, perawatan masyarakat dan manajemen perumahan. Selain itu praktek administrasi sosial juga mencakup penanganan masalah-masalah sosial, seperti persoalan kejahatan, disabilitas, pengangguran, kesehatan mental, ketidakmampuan belajar, dan perawatan kesejahteraan untuk orang lanjut usia. Cakupan lainnya dari administrasi sosial adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan dampak atau kerugian sosial, seperti persoalan ras, gender, dan kemiskinan. Administrasi sosial didesain khusus untuk merespons berbagai isu-isu dan kondisi sosial yang menjadi masalah penting dalam kelompok masyarakat atau warga negara.

Kebijakan dan Administrasi Sosial adalah subjek akademik yang peduli dengan studi layanan sosial dan negara kesejahteraan (Spicker, 2007). Studi ini berkembang pada awal abad ke-20 sebagai pelengkap studi pekerjaan sosial, yang ditujukan untuk orang-orang yang secara profesional akan terlibat dalam administrasi kesejahteraan. Selama empat puluh tahun terakhir, jangkauan dan luasnya subjek telah berkembang.

Kajian-kajian Kebijakan dan Administrasi Sosial meliputi:

1. Praktik kebijakan dan administrasi dalam layanan sosial, termasuk administrasi kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, layanan ketenagakerjaan, perawatan masyarakat dan manajemen perumahan.
2. Masalah-masalah sosial, termasuk kejahatan, kecacatan, pengangguran, kesehatan mental, ketidakmampuan dalam belajar, dan masyarakat usia tua.
3. Masalah yang berkaitan dengan kerugian sosial, termasuk ras, gender, dan kemiskinan.
4. Tanggapan kolektif terhadap kondisi sosial.

Sementara, kebijakan Sosial adalah bidang studi, bukan disiplin ilmu pengetahuan; teori, konsep, dan istilahnya, meminjam dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya untuk mengembangkan kajian dalam bidang studi tersebut. Disiplin ilmu pengetahuan yang paling berkontribusi adalah disiplin ilmu pengetahuan sosiologi, pekerjaan sosial, psikologi, ekonomi, ilmu politik, manajemen, sejarah, filsafat, dan hukum.

C. Administrasi Kesejahteraan Sosial

Ensiklopedia ilmu-ilmu sosial menggambarkan administrasi kesejahteraan sosial sebagai negara kesejahteraan yang mengambil tanggung jawab untuk menyediakan standar sub-sistem minimum bagi warganya. Negara kesejahteraan adalah negara yang memberikan layanan luas kepada rakyat. Dengan demikian, dalam negara kesejahteraan, administrasi memasuki kehidupan ekonomi, politik, sosial dan pendidikan individu. Ini juga menyediakan layanan kepada individu, mulai dari kelahiran hingga kematian individu. Negara akan melayani orang tua, sakit, yatim piatu, janda, tak berdaya, tertindas, dan orang-orang cacat kapan pun mereka membutuhkan layanan.

Dalam konteks masalah sosial saat ini, ukuran layanan kesejahteraan yang disediakan oleh semakin banyak organisasi menjadikan administrasi sangat penting. Layanan, skema, proyek, dan program kesejahteraan sosial menjadi semakin kompleks. Terlambat, telah disadari bahwa program kesejahteraan sosial perlu memiliki individu yang terlatih dan berkualitas untuk menjalankan fungsi kesejahteraan sosial secara efektif. Akibatnya, dikatakan bahwa untuk melayani orang secara efektif perlu mempekerjakan profesional karena akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar dengan kesulitan minimum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan kesejahteraan sosial, pemerintah merumuskan kebijakan dan program sosial dan dalam menjalankannya, memberlakukan undang-undang sosial, mengalokasikan bantuan keuangan dan menyediakan hubungan organisasi dan administrasi dalam bentuk kementerian dan departemen. Ini juga mencari kemitraan organisasi non-pemerintah untuk pelaksanaan yang efektif dari berbagai program kesejahteraan sosial. Administrasi semua kegiatan ini dilakukan di bidang pelayanan sosial dan kesejahteraan sosial dianggap jatuh dalam bidang administrasi kesejahteraan sosial.

Administrasi kesejahteraan sosial adalah tentang cara merubah kebijakan sosial menjadi layanan sosial. Proses ini melibatkan administrasi publik dan swasta. Kidneigh (1950) mendefinisikan administrasi kesejahteraan sosial sebagai "proses mengubah kebijakan sosial menjadi layanan sosial ... melalui proses dua arah: (i) ... mengubah kebijakan

menjadi layanan sosial yang konkret dan (ii) penggunaan pengalaman dalam merekomendasikan modifikasi kebijakan. Definisi ini, tentu saja, mencakup gagasan bahwa administrasi adalah proses mengubah kebijakan menjadi program dan tindakan.

Sedangkan menurut Friedlander (1958), administrasi agensi sosial menerjemahkan ketentuan undang-undang agensi sosial dan tujuan lembaga filantropi swasta serta badan amal keagamaan ke dalam dinamika layanan dan manfaat bagi kemanusiaan. Menurut Arthur Dunham (1962), administrasi adalah proses memberikan dukungan atau memfasilitasi kegiatan yang perlu dan tidak disengaja dengan layanan oleh agen sosial. Kegiatan administrasi berkisar pada penentuan fungsi, kebijakan, dan kepemimpinan eksekutif hingga operasional kegiatan rutin seperti menyimpan catatan dan akun serta melakukan pemeliharaan layanan. Tracker (1971) menafsirkan administrasi kesejahteraan sosial sebagai proses bekerjasama dengan orang lain dengan cara melepaskan dan menghubungkan energi yang mereka miliki sehingga mereka menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penyediaan layanan dan program kesejahteraan masyarakat yang diperlukan.

American Council of Social Work Education dalam kurikulum studinya, telah memberikan definisi yang komprehensif tentang administrasi kesejahteraan sosial. Menurutnya, administrasi adalah proses mengubah sumber daya masyarakat menjadi program pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan standar yang telah disepakati oleh mereka yang terlibat dalam penyediaan layanan. Definisi ini cukup kreatif karena ia menyusunnya secara jelas terkait peran dan hubungan yang diatur sedemikian rupa untuk mengubah dan meningkatkan produk secara total. Di dalamnya melibatkan proses studi penyelesaian masalah, diagnosis, dan perawatan.

Oleh karena itu, berdasarkan definisi di atas, penulis menemukan adanya sebuah proses yang mencakup pengetahuan, pemahaman, prinsip dan cara interaksi yang pasti. Fokus utamanya adalah pada kesesuaian dan aksesibilitas layanan sosial kepada yang membutuhkan. Pekerjaan sosial memungkinkan proses administrasi melalui bimbingan, perencanaan, stimulasi, organisasi, menciptakan struktur, koordinasi

dan penelitian. Untuk memenuhi tujuan utama administrasi yang telah ditetapkan dengan baik, kebijakan harus diubah sesuai dengan program yang telah dirumuskan, anggaran yang telah ditetapkan, jumlah dan sumber keuangan yang telah ditetapkan, jumlah dan kualifikasi personel, dan prosedur seleksi yang telah dibuat.

Rosemary Sarri (1971) telah menguraikan kegiatan administrasi kesejahteraan sosial secara terperinci, sebagai berikut:

1. Penerjemahan mandat sosial ke dalam kebijakan dan tujuan operasional untuk memandu perilaku organisasi;
2. Desain struktur dan proses organisasi di mana tujuan dapat dicapai;
3. Mengamankan sumber daya dalam bentuk bahan, staf, klien dan legitimasi masyarakat yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup organisasi;
4. Seleksi dan rekayasa teknologi yang diperlukan;
5. Mengoptimalkan perilaku organisasi yang diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi; dan
6. Evaluasi kinerja organisasi untuk memfasilitasi pemecahan masalah yang sistematis dan berkesinambungan.

Administrasi kesejahteraan sosial memiliki berbagai fitur, diantaranya:

1. Secara khusus berkaitan dengan identifikasi tujuan sosial dan perumusan serta implementasi program.
2. Administrasi kesejahteraan sosial mencakup tiga aspek masalah sosial:
 - a) Pemulihan fungsi sosial yang terganggu.
 - b) Penyediaan sumber daya - sosial dan individu, untuk fungsi sosial yang lebih efektif.
 - c) Pencegahan disfungsi sosial.
3. Setiap lembaga-lembaga sosial harus memiliki dewan pemerintahan sebagai badan puncak untuk pengambilan keputusan akhir.
4. Diperlukan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal bersama dengan partisipasi aktif masyarakat, sehingga tujuan akhir dapat tercapai.

5. Ada Porsi tertentu (khusus) yang disediakan untuk bertahan hidup. Porsi aktivitas tidak boleh membatasi kapasitas orang-orang yang terlibat untuk mencapai hasil kuantitatif dan kualitatif.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial tersusun melalui proses kerja sama dan memastikan partisipasi anggota dalam administrasi kegiatan mereka.
7. Pemahaman terhadap karakter dan kualitas tenaga kerja (staf) yang dikuantifikasi secara profesional berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan wewenang dalam lembaga.

Mengapa Administrasi Kesejahteraan Sosial diperlukan?, ada beberapa alasan yang menunjukkan betapa pentingnya kesejahteraan sosial. Pertama, masalah Sosial – publik harus mengetahui penyebab terjadinya masalah sosial, sehingga pemerintah dan publik bisa merancang model atau skema pencegahan serta pengobatannya melalui partisipasi publik dan implementasi undang-undang sosial yang efektif. Kedua, Layanan Sosial - layanan sosial dimaksudkan untuk masyarakat umum melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan dll. Pemerintah dan publik harus membuat fasilitas layanan sosial lebih efektif untuk menyelamatkan masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Ketiga, Jaminan Sosial - untuk membuat dan menerapkan bantuan sosial yang efektif serta penyediaan asuransi sosial. Tujuannya untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan karena pengangguran, cacat atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan dan usia tua melalui asuransi sosial dan bantuan sosial. Keempat, Kebijakan Sosial – publik melalui pemerintah berkewajiban membuat kebijakan sosial yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, kebijakan sosial merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan melalui tindakan sosial. Kelima, Pekerjaan Sosial – kerja-kerja sosial dilakukan untuk membantu orang memecahkan masalah pribadi, keluarga, dan masyarakat melalui peningkatan fungsi-fungsi sosial.

Dari gambaran di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa administrasi kesejahteraan sosial memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut diantaranya:

- a) Untuk menerjemahkan mandat sosial ke dalam kebijakan dan sasaran operasional yang memandu perilaku organisasi.
- b) Untuk merancang struktur dan proses organisasi di mana tujuan dapat dicapai.
- c) Untuk mengamankan sumber daya dalam bentuk bahan, staf, klien dan masyarakat sasaran yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan kelangsungan hidup organisasi.
- d) Seleksi dan rekayasa pengetahuan yang diperlukan.
- e) Optimalisasi perilaku organisasi yang diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas.
- f) Untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam rangka memfasilitasi pemecahan masalah secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk memudahkan evaluasi, maka diperlukan beberapa prinsip administrasi kesejahteraan sosial sebagai indikator kinerja. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:
 - 1. Prinsip kejelasan dalam agensi.
 - 2. Prinsip program berdasarkan kebutuhan aktual (Program berbasis kebutuhan).
 - 3. Prinsip koordinasi.
 - 4. Prinsip organisasi agensi yang sehat.
 - 5. Prinsip fungsionalisme (Orang yang tepat di tempat yang tepat dengan keterampilan yang tepat).
 - 6. Prinsip kebijakan personel dan kondisi kerja yang baik.
 - 7. Prinsip otoritas dan delegasi.
 - 8. Prinsip tingkatan tugas dan tanggung jawab.
 - 9. Prinsip keinginan untuk melayani manusia (layanan berkualitas).
 - 10. Prinsip rentang kendali (untuk memperhatikan bidang pekerjaan seseorang).
 - 11. Prinsip membangun hubungan masyarakat yang sehat.
 - 12. Prinsip demokrasi.
 - 13. Prinsip anggaran yang sehat.
 - 14. Prinsip pencatatan (penatausahaan).
 - 15. Prinsip pelayanan administrasi dan pemeliharaan yang tepat.
 - 16. Prinsip Penilaian Diri (evaluasi Diri).

Berdasarkan uraian konsep dan definisi di atas, maka, administrasi kesejahteraan sosial secara keseluruhan memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan pendanaan.

D. Layanan Publik

Layanan publik tidak bisa secara langsung disamakan dengan "sektor publik". Sektor publik umumnya mengacu pada organisasi yang dikendalikan langsung oleh pemerintah. Dalam pengendaliannya, di dalamnya bisa mencakup layanan kepada publik, industri yang dinasionalisasi, dan organ pemerintah sendiri. Layanan publik meliputi organisasi negara, tindakan sukarela, dan perilaku timbal balik yang memiliki tujuan publik.

Layanan publik memiliki empat karakteristik utama:

1. Layanan publik adalah layanan yang menawarkan fasilitas secara langsung kepada orang-orang atau publik (bukan hanya untuk organisasi);
2. Layanan publik bersifat publik, dalam arti bahwa mereka dipandu oleh kebijakan;
3. Layanan publik bersifat redistributif, karena orang yang membayar bukanlah orang yang diuntungkan; dan
4. Layanan publik dioperasikan sebagai perwalian: tugas pertama, perwalian adalah untuk badan yang membangun perwalian (pemerintah atau penyandang dana), dan tugas kedua, adalah untuk penerima manfaat (Spicker, 2009)

Karena tugas utama didasarkan pada kebijakan, layanan publik harus hemat biaya. Bahkan, dalam prakteknya, sebagian besar layanan publik tidak memiliki opsi untuk memilih penerima manfaat. Opsi layanan publik bergantung pada struktur layanan publik. Struktur layanan sangat bervariasi, bergantung kepada struktur pemerintah, sejarah, dan pengembangan layanan. Banyak negara yang memiliki banyak lembaga, skema, dan program yang kompleks. Menurut Billis (1993), struktur layanan memiliki lima skema atau strata yang sistematis. Pertama, menangani masalah sebagai sebuah tuntutan. Ini merupakan

pendekatan reaktif, di mana layanan disediakan sebagai respons terhadap permintaan tertentu; respons yang dibuat ditentukan oleh orang yang membuatnya. Kedua, menangani masalah sebagai sebuah situasi. Pada umumnya, ini merupakan tahapan di mana para profesional bekerja; penilaian yang dilakukan oleh profesional dapat menentukan masalah dan respons yang harus dilakukan. Ketiga, Penyediaan layanan sistematis. Merupakan tanggung jawab untuk melakukan fungsi tertentu dalam suatu layanan. Keempat, Penyediaan layanan komprehensif. merupakan organisasi dan arah layanan atau program, seperti departemen perumahan atau departemen layanan sosial. Ada fokus teritorial yang luas, dan respons spesifik yang tidak ditentukan. Kelima, Cakupan bidang yang komprehensif. Merupakan tahapan pembuatan kebijakan dan perencanaan, menciptakan kerangka kerja layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Level ini terkadang hilang ketika cakupan dilakukan melalui program dan layanan dari pemerintah yang bersifat *ad hoc*.

E. Sejarah Perkembangan Layanan Sosial

Layanan sosial telah berkembang pada awal abad ke-20, di mana pada saat itu, gagasan tentang tanggung jawab sosial telah berkembang dan menyebar luas. Pada tahun 1960, Amerika Serikat melaksanakan perang melawan kemiskinan sebagai strategi usaha sosial. Tekanan telah berubah dari usaha sosial yang bersifat rehabilitas kepada orang-orang miskin, dari usaha kesejahteraan anak dan keluarga tradisional, usaha probasi dan usaha-usaha klinis kepada pendidikan, konseling jabatan dan latihan. Usaha-usaha tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan (*skills*) atau dengan mengurangi kesulitan dalam fungsionalitas pribadi. Harapannya masyarakat dapat ditingkatkan kondisi kehidupannya. Bertahun-tahun lamanya strategi tersebut selalu dikritik. Salah satu pihak dari kelompok pengkritik menyarankan adanya perbaikan strategi dalam meningkatkan pendapatan individu. Sementara, dilain pihak, sebagian pengkritik menyarankan adanya penguatan pada kekuasaan politik (*political power*) yang dikhususkan untuk orang-orang miskin, terutama kepada golongan miskin negro, sebab mereka berasumsi bahwa dengan perubahan kekuasaan politik

maka akan dapat menciptakan distribusi sumber yang memadai untuk meniadakan kemiskinan.

Pelayanan sosial kemudian berkembang dan mencakup aspek kesehatan, pendidikan, perumahan, demikian juga program kesejahteraan anak, keluarga, pelayanan sosial bagi lanjut usia dan berbagai program konseling serta bantuan dalam bidang pendidikan, rumah sakit dan sebagainya. Hingga hari ini, model-model pelayanan sosial semakin meluas hampir mencakup segala bidang yang berkaitan dengan kebutuhan sosial manusia. Berikut beberapa bidang praktek pelayanan sosial:

1. Program day care dan child care
2. Home makers dan home helps
3. Bimbingan dan konseling pribadi dan keluarga, termasuk konseling perkawinan.
4. Aktivitas kesejahteraan anak, seperti pengasuhan anak (foster care), adopsi usaha-usaha protektif bagi anak-anak terlantar dan anak-anak nakal.
5. Program probation dan parole
6. Usaha-usaha keluarga berencana
7. Pusat-pusat komunitas untuk pemuda atau remaja serta lanjut usia
8. Program kesejahteraan bagi warga lanjut usia
9. Kerja-kerja terap kelompok bagi golongan yang mengalami gangguan (penderita cacat fisik, mental, sosial)
10. Program-program bagi kesejahteraan masyarakat desa
11. Program-program bagi para migran\Program bantuan bagi daerah-daerah miskin
12. Program-program yang berhubungan dengan pemberian informasi, nasehat, dan sebagainya
13. Program-program institusional bagi anak-anak terlantar, lanjut usia atau jompo

F. Layanan Kesejahteraan Sosial

Layanan sosial, juga disebut sebagai layanan kesejahteraan atau pekerjaan sosial, salah satu dari banyak layanan publik atau pribadi yang dimaksudkan untuk membantu orang atau kelompok yang kurang

beruntung, tertekan, atau rentan. Istilah layanan sosial juga menunjukkan profesi yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas pemberian layanan.

Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial yang mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya.

Layanan sosial dan layanan kesejahteraan sosial memiliki fitur yang sama, walaupun keduanya memiliki tujuan khusus yang berbeda. Membantu orang yang tidak berdaya merupakan bentuk layanan sosial. Layanan sosial diberikan kepada siapa pun berdasarkan keinginan untuk melayani orang lain yang diilhami oleh perasaan untuk membantu orang lain. Dengan demikian istilah 'layanan sosial' digunakan untuk menunjukkan bantuan yang diberikan oleh sukarelawan kepada individu atau kelompok pada saat dibutuhkan atau untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau masyarakat melalui upaya pribadi atau dengan tindakan kolektif. Layanan sosial tidak memerlukan pelatihan dalam pekerjaan sosial atau keterampilan profesional dalam prakteknya. Sedangkan layanan kesejahteraan sosial dirancang untuk bagian masyarakat yang lebih lemah atau layanan yang dirancang untuk kelompok orang tertentu. Tujuan layanan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara umum. Sedangkan layanan kesejahteraan disediakan untuk kelompok masyarakat yang lemah, sehingga bisa membantu mereka dalam mencapai kesejahteraan. Walaupun berbeda tujuan, kedua layanan ini saling melengkapi.

Dalam pengertian umum, istilah layanan sosial merujuk pada kegiatan yang terorganisir untuk kepentingan konservasi, perlindungan, dan peningkatan sumber daya manusia. Karakteristik mendasar dari layanan sosial adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan dan mempersonalisasikan respons berbagai kebutuhan manusia. Aktivitas layanan sosial melibatkan pandangan yang holistik tentang individu dan melihat kebutuhan yang paling lemah dan paling rentan dan memastikan hak asasi manusia yang fundamental bagi semua

orang. Layanan sosial mendorong pengembangan kapasitas individu sehingga mereka memungkinkan memiliki kehidupan yang produktif dan memuaskan secara pribadi.

Layanan sosial adalah serangkaian layanan publik yang disediakan oleh pemerintah, swasta, organisasi nirlaba dan lembaga swadaya masyarakat. Layanan publik ini bertujuan untuk menciptakan organisasi yang lebih efektif, membangun komunitas yang lebih kuat, serta mempromosikan kesetaraan dan peluang. Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditunjukkan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, dan bahkan kriminalitas. Layanan sosial meliputi manfaat dan fasilitas seperti pendidikan, subsidi makanan, perawatan kesehatan, asuransi, pemadam kebakaran, pelatihan kerja dan perumahan bersubsidi, adopsi, manajemen masyarakat, penelitian kebijakan, dan lobi.

Pelayanan sosial ditujukan untuk membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial adalah aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu para anggota masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya. Menurut Miley, *et. al*, (2016), pelayanan sosial sebagai suatu dukungan untuk meningkatkan keberfungsian sosial atau untuk memenuhi kebutuhan individu, antar individu, maupun lembaga. Sedangkan menurut Kahn (1976), pelayanan sosial sebagai pelayanan yang diberikan oleh lembaga kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial pada hakekatnya dibuat untuk memberikan bantuan kepada individu dan masyarakat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang semakin rumit itu. Pelayanan adalah usaha untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik materi maupun non materi agar orang lain dapat mengatasi masalahnya sendiri (Suparlan, 1983).

Menurut Johnson (dalam Fahrudin, 2012), pelayanan sosial sebagai program dan tindakan-tindakan yang memperkerjakan para pekerja sosial atau tenaga profesional yang berkaitan dan diarahkan untuk tujuan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, Johnson menekankan pelayanan sosial kepada program kerja yang dikerjakan oleh pekerja sosial atau tenaga profesional yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, Johnson tidak secara spesifik menjelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga profesional. Cara yang paling sederhana untuk menyatakan tentang pelayanan sosial adalah pendapat Dolgoff dan Feldstein (2003), yang menyatakan pelayanan sosial sebagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial. Sedangkan Romanyshyn (dalam Fahrudin, 2012) menyatakan bahwa pelayanan sosial adalah usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui sumber-sumber sosial pendukung, dan serangkaian proses yang meningkatkan kemampuan individu dan keluarga untuk mengatasi stres dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal. Disini, Dolgoff dan Feldstein berpandangan bahwa pelayanan sosial harus dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, sedangkan Romanyshyn lebih menekankan pada keberfungsian sosial individu dan keluarga yang didukung dengan sumber-sumber sosial.

Titmuss (1987), mengemukakan bahwa pelayanan sosial ditinjau dari perspektif masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang.
2. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk melindungi masyarakat.
3. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai suatu investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional.
4. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai program kompensasi bagi orang-orang yang tidak mendapat pelayanan sosial misalnya kompensasi kecelakaan industri dan sebagainya.

Di Amerika Serikat, pelayanan sosial diartikan sebagai suatu aktivitas yang terorganisir yang bertujuan untuk menolong melakukan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Tujuan ini dapat dicapai melalui teknik dan metode yang diciptakan untuk memungkinkan individu, kelompok, dan masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta mampu mengatasi masalah penyesuaian sebagai akibat terjadinya perubahan-perubahan baru dalam masyarakat melalui tindakan-tindakan kooperatif untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi. Sementara, di Inggris, pelayanan sosial mencakup berbagai tindakan yang kompleks untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Motif utamanya, masyarakat secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab untuk menolong masyarakat yang lemah dan kurang beruntung dalam memberikan perlindungan dengan pelayanan yang tidak mungkin mereka penuhi sendiri.

G. Penyediaan (pelaksanaan) Layanan Sosial

Penyediaan layanan sosial memiliki target dan pendistribusian. Dalam targetnya, kebijakan sosial harus mampu mempengaruhi seseorang. Dalam prakteknya setiap upaya untuk mengidentifikasi kelompok klien secara spesifik dapat disebut sebagai 'penargetan'. Kebijakan dapat difokuskan pada serangkaian kelompok yang berbeda-beda: individu, rumah tangga, keluarga, komunitas, dan sebagian dari populasi. Walaupun distribusi sebagian besar bersifat universal, faktanya distribusi bersifat kategoris, dan ditargetkan secara khusus bagi orang-orang yang membutuhkan (seperti anak-anak atau orang tua) sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan kelompok.

Menurut Spicker (2007), ada tiga masalah utama yang mempengaruhi efisiensi layanan yang ditargetkan. Pertama, *deadweight*. Orang menerima layanan atau manfaat, tetapi keadaan mereka tidak terpengaruh secara material oleh tindakan tersebut. Kedua, *Spillovers*. Siapa yang perlu dibantu dan siapa yang perlu membantu. Ketiga, *low takeup*. Ada kegagalan untuk menjangkau mereka yang menjadi sasaran kebijakan.

Penargetan layanan kadang-kadang bermasalah ketika ada selektivitas (layanan yang terbatas pada orang miskin, atau orang yang membutuhkan); masalahnya terletak pada bagaimana membuat ukuran (indikator) pengecualian dalam pemberian layanan kepada penerima. Beberapa tahapan penargetan kadang kala tidak dapat dihindari, sehingga memaksa pemerintah untuk memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut.

Pendistribusi di sektor swasta, berkaitan erat dengan permintaan dan penawaran yang diatur oleh mekanisme harga. Harga yang lebih tinggi berarti lebih banyak penawaran dan lebih sedikit permintaan. Dalam mekanisme layanan publik, permintaan dan pasokan tidak menutup kemungkinan harus dijatah. Pasokan dapat dibatasi melalui beberapa tindakan berikut :

1. Penolakan, melalui pembuatan akses yang terbatas dan aturan kelayakan.
2. Pembuatan daftar antrean
3. Penyaringan dan defleksi
4. Dilusi - memberikan layanan yang lebih sedikit.

Sementara, permintaan dapat dibatasi melalui beberapa tindakan berikut:

1. Kualifikasi kelayakan
2. Memberikan biaya tambahan kepada konsumen - misalnya, melalui biaya; atau
3. Pencegahan.

Pelaksanaan pelayanan sosial mencakup adanya perbuatan yang aktif antara pemberi dan penerima. Bahwa untuk mencapai sasaran sebaik mungkin maka pelaksanaan pelayanan sosial mempergunakan sumber-sumber tersedia sehingga benar-benar efisien dan tepat guna. Sehubungan dengan itu maka dalam konsepsi *social service delivery*, sasaran utama adalah si penerima bantuan (*beneficiary group*). Dilihat dari sasaran perubahan maka sasarannya adalah sumber daya manusia dan sumber-sumber natural. Pelayanan sosial tidak hanya mengganti atau berusaha memperbaiki keluarga dan bentuk-bentuk organisasi

sosial, tetapi juga merupakan penemuan sosial yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia modern dalam berbagai hubungan dan peran-perannya sama halnya seperti inovasi teknologi yang berfungsi sebagai tanggapan terhadap persyaratan fisik dari kehidupan modern.

H. Universalitas dan Selektivitas dalam Pelayanan Sosial

Pendekatan universal dan selektif dalam kesejahteraan sosial erat hubungannya dengan pendekatan residual dan institusional. Universalitas lahir sesudah perang dunia II berakhir. Di mana pada saat itu, masyarakat berada dalam suasana masyarakat egalitarian. Semua orang memiliki kewajiban membayar sejumlah nilai yang sama dan semua orang akan memperoleh keuntungan yang sama (*all pay at the same rate benefit at same rate a social minimum*). Universalitas berangkat dari konsep residual yang menyatakan bahwa pelayanan sosial bersifat temporer (sementara) dan dibutuhkan hanya pada saat orang berada dalam tekanan. Karena itu, universalitas menjadi sebuah konsep alternatif, yaitu sebuah sistem di mana orang-orang memenuhi syarat untuk memperoleh pelayanan sosial apa bila pendapatannya di bawah tingkat tertentu yang disebut *main test*.

Dalam prakteknya, ada dua hambatan yang sering menyertai konsep universalitas. Pertama, pelayanan sosial harus ditujukan kepada orang-orang yang memiliki masalah dan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dalam hal ini, pelayanan sosial tidak dirancang atau diorganisir untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kedua, pelayanan tersebut sangat mahal. Universalitas sebagai suatu falsafah pelayanan sosial dalam prakteknya kadang tidak realistis. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan dan program-program yang dirancang oleh pembuat kebijakan hanya menguntungkan kelompok masyarakat yang tergolong mampu. Sebaliknya, pendekatan selektivitas menekankan bahwa sumber-sumber yang terbatas tersebut hanya akan dipergunakan untuk masyarakat yang sangat memerlukannya. Suatu masyarakat yang ingin mengadopsi pendekatan universalitas harus menyesuaikan dengan tingkat kesejahteraan pembangunan dan sumber pendapatannya.

I. Fungsi-fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial bertujuan untuk penyembuhan, perlindungan, dan rehabilitasi. Pelayanan sosial berfungsi untuk memberikan pertolongan kepada seseorang baik secara individu maupun di dalam kelompok atau keluarga dan masyarakat agar mampu mengatasi masalah-masalahnya. Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga mereka dapat berkembang dan mereka bisa mendapatkan sebuah perlindungan. Selain itu dengan adanya pelayanan sosial masyarakat bisa mendapatkan akses, informasi dan nasihat yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerja sama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Pelayanan sosial telah dan mungkin akan diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, tergantung dari tujuan pengklasifikasian. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi dari pelayanan sosial adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial
4. Mobilisasi dan penciptaan sumber-sumber masyarakat dan tujuan pembangunan
5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.

Menurut Fahrudin (2012) fungsi-fungsi pelayanan sosial adalah:

1. Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan
2. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
3. Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat.

Sementara, Kahn (1976), menyatakan bahwa fungsi utama pelayanan sosial adalah:

1. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan
Pelayanan ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam diri anak dan pemuda melalui program-program pemeliharaan, pendidikan non formal dan pengembangan. Tujuannya yaitu untuk menanamkan nilai-nilai masyarakat dalam usaha pengembangan kepribadian anak. Bentuk-bentuk pelayanan sosial yang bisa dilakukan:
 - a) Program penitipan anak.
 - b) Program-program kegiatan bagi remaja dan pemuda.
 - c) Program-program pengisian waktu luang bagi anak dan remaja dalam keluarga.
2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan, dan rehabilitasi
Pelayanan ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada seseorang, baik secara individual maupun di dalam kelompok keluarga dan masyarakat agar mampu mengatasi masalah-masalahnya. Bentuk-bentuk pelayanan sosial tersebut antara lain:
 - a) Bimbingan sosial bagi keluarga
 - b) Program asuhan keluarga dan adopsi anak
 - c) Program bimbingan bagi anak nakal dan bebas hukuman
 - d) Program-program rehabilitasi bagi penderita cacat
 - e) Program-program bagi lanjut usia
 - f) Program-program penyembuhan bagi penderita gangguan mental
 - g) Program-program bimbingan bagi anak-anak yang mengalami masalah dalam bidang pendidikan
 - h) Program-program bimbingan bagi para pasien di rumah sakit.
Pelayanan sosial untuk tujuan menyembuhkan, memberikan bantuan, rehabilitasi, perlindungan sosial biasanya melalui kegiatan program dalam suatu lembaga misalnya lembaga panti, lembaga rehabilitasi, dan lain-lain. Tujuan dari pelayanan ini adalah memulihkan kemampuan peranan sosial dan memberi bantuan guna penyesuaian yang memadai dengan lingkungan sosialnya. Bentuk pelayanan panti merupakan salah satu pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan

perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak-anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial, dan sebagainya. Pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan misalnya pelayanan di Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Karya, dan lain-lain.

3. Pelayanan akses sosial akses

Kebutuhan akan akses program sosial disebabkan karena:

- a) Adanya birokrasi modern
- b) Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hal-hal tertentu dan kewajiban akan tanggung jawab
- c) Diskriminasi, dan
- d) Jarak geografis lembaga-lembaga pelayanan dari tempat orang-orang yang memerlukan pelayanan sosial

Tujuan pelayanan kesejahteraan sosial adalah mengaktualkan potensi klien. Sementara tugas pelayanan sosial adalah memberikan pelayanan bantuan, santunan, bekal lain untuk membangkitkan motivasi klien, dan mengorganisasi lingkungan yang sesuai atau mungkin disesuaikan. Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang di masa lampau menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Perkembangan pelayanan sosial yang sangat cepat, motivasi yang beraneka ragam, di antara para penyusunnya dan besarnya beban kasus maupun tenaga yang terlibat di dalamnya menyebabkan perlunya menggunakan pelayanan.

Dengan adanya berbagai kesenjangan tersebut, maka pelayanan sosial secara tidak langsung mempunyai fungsi sebagai akses untuk menciptakan hubungan yang sehat antar berbagai program, sehingga program-program tersebut dapat berfungsi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Pelayanan akses bukanlah semata mata memberikan informasi tetapi juga termasuk menghubungkan seseorang dengan sumber-sumber yang diperlukan dengan melaksanakan program-program referral.

Fungsi tambahan dari pelayanan sosial ialah menciptakan partisipasi anggota masyarakat untuk mengatasi malah-masalah sosial. Harapannya, agar masyarakat mampu mengatasi hambatan-hambatan sosial dalam pembagian politis, yaitu untuk mendistribusikan sumber-sumber dan kekuasaan.

J. Tahap-tahap Pelayanan Sosial

Tahap-tahap Pelayanan Sosial dalam prosesnya mengacu pada tahap-tahap pelayanan sosial seperti yang diusulkan oleh Siporin (1993). Dalam usulannya, Siporin membagi tahapan-tahapan sosial ke dalam beberapa bagian, diantaranya :

1. Tahap *Engagement*, *Intake* dan Kontrak.

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Pada akhirnya dapatlah dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

2. Tahap Penilaian

Proses penilaian merupakan proses pengungkapan dan pemahaman terhadap masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien. Dalam rangka *assessment* ini pekerja sosial dapat mempergunakan teknik-teknik wawancara,

observasi dan teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap tepat.

3. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut, siapa sarannya dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan haruslah berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan sebelumnya oleh pekerja sosial.

4. Tahap Melaksanakan Program

Berdasarkan rencana intervensi di atas maka selanjutnya pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.

5. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan-hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh klien, yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

6. Tahap Terminasi

Tahap ini dilakukan apabila tujuan pertolongan telah dicapai atau terjadi kegiatan *referral*, bisa juga karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten. Pelaksanaan proses pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga sosial melibatkan beberapa profesi tidak hanya pekerja sosial saja, pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan.

Sebelum mendefinisikan advokasi kebijakan sosial, perlu bagi kita untuk melihat konsep advokasi secara umum dan advokasi kebijakan secara khusus. Istilah 'advokasi' sering digunakan dalam situasi seolah-olah semua orang memiliki pemahaman yang sama tentangnya. Pada kenyataannya, ada banyak definisi advokasi dan banyak perdebatan mengenai mana yang paling tepat untuk digunakan. Sederhananya, advokasi adalah tindakan atau proses untuk memohon atau berdebat demi tujuan, ide, kelompok, atau kebijakan. Ini mencakup strategi multifaset dan Multi-level yang dapat diambil untuk membawa perubahan sosial. Bisa dikatakan, advokasi merupakan cara untuk mempengaruhi orang, kebijakan, praktek, struktur, dan sistem untuk menghasilkan sebuah perubahan. advokasi dapat mencakup pekerjaan yang berfokus pada satu masalah tertentu, kampanye yang berlangsung dalam periode waktu tertentu, atau pekerjaan berkelanjutan yang membahas berbagai masalah. Advokasi dapat dilakukan di tingkat internasional, nasional, regional atau lokal. Dalam banyak kasus, advokasi kebijakan yang efektif bekerja melalui apa yang dapat didefinisikan sebagai jaringan atau aliansi advokasi. Advokasi adalah kelompok organisasi dan individu yang bekerja bersama untuk mencapai perubahan dalam kebijakan, posisi, atau program. Secara umum, misi advokasi adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana kebutuhan dan kepentingan individu atau kelompok yang terpinggirkan (rentan) diwakili dan ditangani.

Inisiatif yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan penting dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi sering disebut sebagai advokasi. Inisiatif advokasi ini pada dasarnya dilihat sebagai proses berbicara atas nama individu, terutama kelompok rentan, dengan tujuan membawa perubahan sistemik. Advokasi sering kali melibatkan proses mobilisasi individu dan organisasi yang berpotensi terkena dampak untuk berpartisipasi bersama dengan advokat

untuk melakukan kampanye. Dalam banyak kasus, inisiatif advokasi juga bertujuan untuk memberdayakan individu untuk memperjuangkan diri mereka sendiri dengan berbicara (Mayoux, 2003).

Kata advokasi berasal dari bahasa latin *advocare*, yang berarti 'memerlukan bantuan'. Advokasi melibatkan advokat, biasanya individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan advokasi yang berkomunikasi dengan kelompok sasaran dan bertanggung jawab untuk membawa perubahan. Kelompok sasaran memiliki potensi (kekuatan) untuk melakukan perubahan dan diadvokasi. Istilah advokasi sangat luas, di dalamnya termasuk inisiatif yang dilakukan secara sukarela oleh individu atau organisasi untuk membawa perubahan sosial, dan termasuk dukungan dan adopsi penyebab tertentu oleh penerima manfaat.

A. Advokasi, Konsep dan Definisi

Sebelum mendefinisikan advokasi kebijakan, perlu untuk melihat konsep advokasi terlebih dahulu. Ada banyak definisi advokasi dan ada banyak perdebatan mengenainya. Mana yang paling tepat untuk digunakan, hal tersebut memerlukan pemahaman yang lebih luas. Advokasi dan kata "Advokat," berasal dari hukum Romawi kuno. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan mereka yang dipanggil untuk membantu seseorang, atau seseorang yang mengambil peran untuk melakukan pembelaan atas nama orang lain, seperti pengacara dalam di bidang hukum. Arti paling mendasar dari advokasi adalah untuk mewakili, mempromosikan, membela beberapa orang, mengawal kepentingan, dan memperjuangkan pendapat. Advokasi Adalah proses yang disengaja untuk mempengaruhi para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. Advokasi digunakan untuk memengaruhi pilihan dan tindakan mereka dalam membuat undang-undang, menyusun peraturan, dan cara mendistribusikan sumber daya yang berpengaruh terhadap kesejahteraan banyak orang. Advokasi melibatkan penyampaian pesan yang dimaksudkan untuk memengaruhi pemikiran, perspektif, dan tindakan para pemimpin, politisi, pembuat kebijakan, perencana, dan pihak lain yang berwenang. Advokasi pada dasarnya adalah tentang perubahan kebijakan yang mencakup tiga bidang

kegiatan. Pertama, mengkritisi kebijakan yang berada pada tempat yang tidak semestinya (berbasis kebutuhan). Kedua, menyempurnakan kebijakan yang berbahaya atau tidak efektif. Ketiga, memastikan kebijakan yang baik untuk diikuti, diterapkan, dan ditegakkan.

Advokasi adalah segala upaya untuk mempengaruhi kebijakan dan praktek publik atau lainnya terkait keputusan elit institusional (Grant Craft, 2005; Jenkins, 2006; Casey dan Dalton, 2006). Advokasi melibatkan dukungan aktif dari sudut pandang atau tindakan program (Salamon, 2002) dan dapat mencakup masalah-masalah hukum dan politik dan terkadang melalui proses-proses yang tidak begitu kasat mata untuk mempengaruhi. Kegiatan advokasi dapat ditujukan langsung pada pengambil keputusan atau bagi mereka yang mungkin berusaha untuk mempengaruhi secara tidak langsung melalui pembentukan opini publik dan niat para pemilih atau dengan menyebarkan model alternatif praktek-praktek kebijakan.

Advokasi selain dilihat sebagai upaya untuk mempengaruhi pemerintah dan sektor publik, advokasi juga dapat digunakan untuk mempromosikan perubahan di sektor swasta. Dalam Advokasi ada tindakan yang disengaja untuk meningkatkan kekuatan suatu organisasi untuk mempengaruhi aktor yang lain dalam proses pembuatan kebijakan. Advokasi juga bisa digunakan di dalam sektor nirlaba untuk menggambarkan aspek pekerjaan ini, termasuk aktivisme, menasihati, berkampanye, berkomentar, konsultasi, keterlibatan, memberikan suara, memberikan masukan, lobi, negosiasi, pengorganisasian, kerjasama penyusunan kebijakan, aksi politik, dan aksi sosial, yang semuanya digunakan untuk menggambarkan upaya mempengaruhi secara langsung proses Kebijakan Publik. Sementara, istilah-istilah seperti mendidik, menyebarkan informasi, berinovasi dan pemodelan digunakan untuk menggambarkan kegiatan tidak langsung. Ada perbedaan yang jelas dalam arti antara istilah-istilah ini, dan dalam keadaan tertentu ada definisi khusus yang membedakan antara advokasi, kampanye, dan lobi.

Sederhananya, advokasi adalah suatu tindakan atau proses memohon atau mengajak berdebat demi suatu tujuan, ide, kelompok atau kebijakan. Tindakan ini mencakup berbagai strategi dan proses

multilevel yang dapat diambil untuk membawa perubahan sosial secara luas. Tindakan ini adalah tentang cara memengaruhi orang, tentang kebijakan, tentang praktek, tentang struktur, dan tentang sistem untuk menghasilkan perubahan. Kegiatan advokasi dapat mencakup pekerjaan yang hanya fokus pada masalah spesifik, kampanye dalam periode waktu tertentu atau pekerjaan berkelanjutan yang membahas berbagai masalah.

Ada banyak definisi tentang advokasi kebijakan, namun, pada intinya advokasi adalah sejumlah ide yang muncul secara terus menerus. Advokasi kebijakan memiliki beberapa karakter khusus seperti:

1. Strategi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan atau kegiatan — upaya advokasi atau kampanye adalah rencana kegiatan terstruktur dan berurutan dengan tujuan untuk memulai, mengarahkan, atau mencegah perubahan kebijakan tertentu.
2. Audiensi dengan para pembuat keputusan — target utama dari setiap upaya advokasi adalah untuk memengaruhi mereka yang memegang kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, advokat dapat berbicara langsung dengan para pemegang otoritas dalam upaya advokasi mereka; dalam kasus lain, mereka perlu menekan para pemegang otoritas ini dengan berbicara kepada audien sekunder (misalnya, penasihat mereka, media, publik).
3. Suatu proses yang disengaja dari aktivitas komunikasi persuasif — para advokat berusaha membuat para audien tertarget memahami, diyakinkan, dan mengerti atas ide-ide yang diusulkan. Audien tertarget harus bisa merasakan urgensi untuk bertindak berdasarkan pada argumen yang telah diusulkan.
4. Proses yang membutuhkan momentum dan dukungan dari gagasan atau rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Ketika mencoba untuk membuat perubahan dalam kebijakan publik, prosesnya biasanya memakan waktu yang relatif lama (lambat). Karena bagaimanapun, mengubah posisi dan keadaan memerlukan keterlibatan, diskusi, argumen, dan negosiasi yang berkelanjutan, tidak cukup hanya sekali.

5. Dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat terorganisir — biasanya upaya advokasi dilakukan oleh organisasi, asosiasi, atau koalisi masyarakat yang mewakili kepentingan atau posisi populasi tertentu.

Aktivitas advokasi melibatkan beberapa elemen kunci. Advokasi adalah semua hal yang berkaitan dengan perubahan sikap, budaya, tren, tradisi, cara baru, pemikiran baru, dan gaya hidup baru. Karena itu, advokasi banyak berkaitan dengan mempengaruhi (melalui kampanye dan lobi) pembuat kebijakan, komunitas, perencana, dan politisi untuk menanggapi tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat awam - kaum miskin. Hal tersebut diarahkan untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih responsif, didorong oleh banyak orang, dan berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok rentan. Advokasi akan sangat tergantung pada lingkungan politik, rezim kebijakan, konteks sosial-budaya, kapasitas, keahlian (keterampilan), minat para aktor, ruang bagi kelompok sipil, dan peluang yang tersedia.

Advokasi adalah proses yang disengaja untuk mengelola informasi dan pengetahuan dengan tujuan yang jelas untuk mempengaruhi dan/atau mengubah kebijakan, praktek, dinamika kekuasaan, sikap dan/atau kegiatan yang secara langsung berdampak positif pada kehidupan. Advokasi dapat dilakukan oleh populasi yang terkena dampak langsung atau tidak langsung, atau oleh pihak ketiga atas nama populasi yang terkena dampak, termasuk orang-orang di dalam dan di luar pemerintahan atau posisi kekuasaan lainnya. Definisi ini mencakup inisiatif advokasi, di mana hasil yang ditargetkan adalah perubahan kebijakan (advokasi kebijakan) atau perubahan perilaku, sikap, atau pengetahuan yang dimiliki individu atau kelompok.

Inisiatif advokasi dapat dibagi ke dalam berbagai bentuk. Coffman (2009) membaginya ke dalam 3 bentuk inisiatif advokasi:

- a. Advokasi Kebijakan

Tindakan yang masuk dalam kelompok ini mencakup inisiatif atau program yang menargetkan perubahan kebijakan atau undang-undang yang pada gilirannya dapat mempengaruhi seluruh sistem socio-politik. Program advokasi kebijakan biasanya menargetkan

orang-orang yang berada dalam lingkaran administrasi, seperti legislator dan pejabat terpilih. Advokasi kebijakan bertujuan untuk membuat kebijakan baru atau mengubah atau memperbaiki yang sudah ada, dan sering menguntungkan populasi yang kurang beruntung. Tindakan advokasi kebijakan ini biasanya melibatkan individu dalam posisi kekuasaan (mis. legislator).

b. Advokasi Sistem

Merupakan inisiatif advokasi yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam program dan praktek di tingkat organisasi atau masyarakat untuk memberi manfaat bagi populasi yang dimaksud. Bentuk dan target advokasi model ini adalah membentuk badan-badan lokal untuk membawa perubahan.

c. Advokasi untuk perubahan sikap dan perilaku

Merupakan program advokasi yang melibatkan dan menargetkan individu atau komunitas. Hasil yang diinginkan adalah perubahan perilaku atau sikap di antara individu atau komunitas.

Selain itu, inisiatif advokasi juga dapat diklasifikasikan menurut saluran komunikasi yang mereka gunakan. Misalnya, advokasi yang menggunakan saluran media massa dan komunikasi secara strategis untuk membawa perubahan sosial.

Advokasi dapat dilakukan di tingkat internasional, nasional, regional ataupun lokal. Dalam kebanyakan kasus, advokasi kebijakan yang efektif bekerja melalui apa yang disebut sebagai jaringan advokasi atau aliansi. Jaringan ini adalah sekelompok organisasi dan individu yang bekerja bersama untuk mencapai perubahan dalam kebijakan, posisi, atau pemrograman. Secara umum misi advokasi adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana kebutuhan dan kepentingan individu atau kelompok yang terpinggirkan diwakili dan ditangani dengan baik, tepat, dan benar.

Berdasarkan gambaran di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa advokasi merupakan proses yang terencana, terarah, terfokus, jangka panjang, terorganisir, sistematis, terarah, dan disengaja untuk memengaruhi masalah kepentingan publik dan mengubah hubungan kekuasaan untuk meningkatkan kehidupan orang yang kehilangan

haknya (dikecualikan) atau bertujuan untuk mempengaruhi beberapa perubahan, kebijakan atau proses. Advokasi adalah proses transformasi sosial yang bertujuan untuk membentuk arah partisipasi publik; kebijakan dan program publik untuk memberi manfaat bagi penegakan HAM terhadap orang-orang terpinggirkan dan menjaga lingkungan. Proses advokasi harus mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, saling menghormati, dan akuntabilitas sebagai inti dari advokasi.

Maka, secara keseluruhan, poin penting dari advokasi kebijakan adalah tentang:

1. Politik, perubahan sosial, nilai-nilai, kepercayaan, kesadaran, pengetahuan, perspektif, tuntutan, dan identitas.
2. Mempengaruhi mereka yang berwenang dalam penanganan isu-isu sosial dan publik.
3. Membangun identitas yang kuat, koalisi, jaringan, kelompok-kelompok organisasi demokratis, dan gerakan sosial, yang membuat mereka yang berkuasa bertanggung jawab.
4. Meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan persepsi warga untuk memengaruhi arah dan proses kebijakan.
5. Kebijakan apa yang akan kita coba untuk di ubah?, dan mengapa kita memutuskan untuk melakukan hal tersebut?

B. Tipe-tipe Advokasi

Adalah penting untuk memperjelas jenis-jenis serta definisi advokasi yang berbeda-beda. Beberapa tipe advokasi yang umum di antaranya:

1. Advokasi Hukum (*Statutory*)

Bisa diinstruksikan (*Instructed*) atau tidak diinstruksikan (*Non-Instructed*). Pertama, Advokasi yang diinstruksikan (*Instructed*). Individu memberi tahu advokat tentang apa yang ingin mereka katakan dan lakukan. Di sini, advokat memiliki peran untuk bekerja dengan orang tersebut guna menyatukan apa yang mereka katakan dengan cara menempatkan sudut pandang mereka dengan jelas. Advokat mendukung apa yang ingin mereka capai. Kedua, Advokasi tanpa instruksi (*Non-Instructed*). Ketika seseorang tidak memiliki kapasitas untuk memberi tahu advokat apa yang ingin

mereka lakukan, advokat menggunakan pendekatan lain untuk memastikan pilihan hidup individu tidak terganggu. Bisa jadi, karena cedera otak, masalah kesehatan mental, penyalahgunaan zat atau ketidaksadaran sementara, seseorang tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Maka, tugas advokat adalah memastikan kepentingan utama mereka terwakili.

Ada empat pendekatan yang diakui untuk advokasi *Non-Structured* ini, di mana advokat harus berusaha untuk mengintegrasikan. Empat pendekatan tersebut diantaranya:

- a) Pendekatan berbasis hak – Semua manusia memiliki hak fundamental (Hak Asasi Manusi) tertentu yang dapat didefinisikan dan diukur.
 - b) Pendekatan yang berpusat pada orang - berdasarkan pada pengembangan hubungan jangka panjang, saling percaya dan saling menghormati antara advokat dan orang yang di advokasi.
 - c) Pendekatan pengamatan - menempatkan klien dalam fokus perhatian guna dicarikan cara yang terbaik untuk mendukung mereka
 - d) Pendekatan saksi/pengamat - Advokat mengamati atau menyaksikan cara seseorang mengendalikan hidupnya.
2. Advokasi Diri (*Self Advocacy*)

Advokasi Diri adalah di mana orang dapat berbicara untuk diri mereka sendiri, membuat pilihan sendiri dan membiarkan orang lain tahu bagaimana perasaan mereka. Advokasi diri mengacu pada kemampuan individu untuk mengkomunikasikan kepentingan, keinginan, kebutuhan, dan haknya secara efektif. Dirinya mengakui bahwa advokat adalah orang yang ahli berdasarkan pengalaman dan kemampuan advokat untuk melibatkan mereka dalam berbicara untuk diri mereka sendiri tentang hal-hal yang penting bagi mereka. Hal tersebut bermakna bahwa orang dapat meminta apa yang mereka inginkan dan butuhkan serta untuk memberi tahu orang lain tentang pikiran dan perasaan mereka.

Tujuan advokasi diri adalah agar orang memutuskan apa yang mereka inginkan dan melaksanakan rencana untuk membantu mereka mendapatkannya. Advokasi diri berbeda dari bentuk

advokasi lain. Dalam model ini, individu menilai sendiri atas situasi atau masalah yang dialaminya. Kemudian, individu tersebut berbicara untuk kebutuhannya sendiri. Tujuan akhir dari semua bentuk advokasi ini adalah untuk mendukung orang untuk melakukan advokasi sendiri sejauh yang mereka mampu.

3. Advokasi Kelompok (*Group Advocacy*)

Advokasi kelompok melibatkan banyak orang dengan berbagai pengalaman dan posisi. Nilai-nilai bersama yang terkumpul dalam kelompok tersebut kemudian digunakan sebagai bahan untuk saling berbicara dan mendengarkan satu sama lain tentang masalah apa yang penting bagi mereka. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk mempengaruhi opini publik, kebijakan, dan penyediaan layanan. Kelompok bisa sangat bervariasi dalam ukuran, pengaruh, dan motif.

4. Advokasi Sebaya (*Peer Advocacy*)

Advokasi sebaya mengacu pada tindakan atau dukungan dengan cara berbagi pengalaman antar orang yang memiliki nasib, keadaan, status, dan kondisi yang serupa. Misalnya, kelompok disabilitas. Mereka, sesama disabilitas akan dikumpulkan untuk memperkuat pemahaman tentang kondisi mereka masing-masing dengan cara berbagi pengalaman, ide, dan gagasan untuk kepentingan mereka sendiri. Advokat hanya berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan terhadap kepentingan mereka. Mereka didorong untuk saling berempati sehingga memiliki kesepahaman bersama terkait kondisi dan kebutuhan mereka, sehingga bisa memperkuat komunitas mereka.

5. Advokasi Warga (*Citizen Advocacy*)

Advokasi warga bertujuan untuk melibatkan orang-orang di komunitas lokal mereka dengan memungkinkan mereka untuk bersuara dan membuat keputusan tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Advokasi model ini biasanya bersifat jangka panjang, tidak terbatas waktu, dan berlangsung selama warga negara tersebut masih terus melakukan usaha-usaha advokasi. Advokasi ini akan berkelanjutan selama individu-individu tersebut menginginkannya. Mereka biasanya tidak dibayar

dan beroperasi dengan dukungan yang terkoordinasi dari mereka sendiri.

6. Advokasi Profesional (*Professional Advocacy*)

Advokat independen yang dibayar untuk mendukung dan memungkinkan seseorang untuk berbicara dan mewakili pandangan mereka, biasanya model advokasi ini berlangsung selama terjadinya masa perubahan besar atau krisis. Advokasi semacam ini berbasis masalah dan advokat mungkin hanya perlu bekerja dengan orang tersebut untuk waktu yang singkat hingga masalah terselesaikan.

7. Advokasi Legislatif

Advokasi yang dilakukan untuk memperjuangkan ide, gagasan, dan usulan yang datang dari masyarakat. Advokasi ini tentang kegiatan yang memperjuangkan ide agar menjadi sistem hukum atau produk kebijakan.

8. Advokasi Yudisial

Merupakan bentuk advokasi yang merepresentasikan secara langsung aktivitas individu atau kelompok dalam proses peradilan.

9. Advokasi Administratif

Model ini lebih kepada usaha atau cara untuk mempengaruhi para pelaksana kebijakan terkait program atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Misal, masalah pelayanan publik.

10. Advokasi Akar Rumput

Advokasi yang dilakukan dengan cara mengerahkan massa. Tujuan advokasi ini adalah untuk membangun gerakan massa untuk memengaruhi pembuat kebijakan.

C. Advokasi Kebijakan

Pertama-tama kita harus mulai dengan pemahaman bersama tentang apa yang kita maksudkan dengan advokasi kebijakan. Dalam berbagai literatur akademik tentang bentuk spesifik dari advokasi kebijakan, ternyata cukup mudah untuk mengidentifikasinya (misalnya, Lobi, kerja media, kampanye, dll.). Reid (2001), mencatat bahwa advokasi adalah sesuatu yang kita kenali ketika kita melihatnya,

tetapi tidak memiliki definisi: “Tidak ada kesepakatan tentang kegiatan mana yang merupakan advokasi, dan tidak ada sumber pasti yang memberikan laporan lengkap tentang berbagai jenis kegiatan dan strategi yang digunakan kelompok tertentu untuk mempengaruhi proses kebijakan. Ketidakhadiran dalam literatur akademik dari pemahaman bersama tentang bentuk, konteks, elemen, dinamika, dan penanda efektivitas advokasi kebijakan membuat konsep ini sangat menantang (Arons, 2000). Namun, ketika kita melihat bagaimana istilah advokasi kebijakan telah digunakan dalam literatur akademik dan profesional, beberapa karakteristik yang menentukan muncul. Pertama, advokasi kebijakan diprakarsai oleh warga, yang bertindak secara individu atau secara kolektif (Reid, 2001) sering diwakili oleh organisasi nirlaba (Reed, 2006). Warga negara yang diwakili mungkin memiliki kekuatan relatif lebih sedikit dalam masyarakat atau mungkin tidak dapat mewakili kepentingan mereka sendiri, seperti orang miskin atau anak-anak (Jansson, 2010; Schlozman & Tierney, 1986). Pendekatan "dari bawah ke atas" yang diprakarsai oleh para pemangku kepentingan warga negara terlihat sangat kontras dengan kegiatan partisipasi publik "top-down" yang diprakarsai oleh badan-badan pemerintah, termasuk alat penjangkauan yang sudah dikenal seperti audiensi publik, survei pendapat warga, dll. (McLavery, 2011).

Kedua, metode advokasi kebijakan melibatkan proses yang disengaja (Sprechmann & Pelton, 2001) untuk mempengaruhi pengambil keputusan (Jenkins, 1987) atau mempengaruhi agenda sosial atau sipil (Schmid, Bar, dan Nirel, 2008) untuk membangun kemauan politik. Pendekatan advokasi khusus yang dijelaskan oleh Hopkins (1992) meliputi: advokasi terprogram (atau isu), ketika suatu organisasi mengambil posisi pada ranah kebijakan yang memengaruhi pekerjaan mereka; advokasi legislatif, atau melobi legislator; kegiatan kampanye politik untuk mendukung atau menentang kandidat politik; demonstrasi, menggalang dukungan publik terkait masalah atau kebijakan; melakukan boikot untuk mendorong atau mencegah bisnis dengan entitas yang ditargetkan; dan litigasi, atau menggunakan tindakan hukum untuk menunjukkan suatu sebab. McCarthy dan Castelli (2002) menambahkan daftar advokasi akar rumput atau aktivitas yang

melibatkan warga secara individu dalam upaya advokasi sebagai advokasi kebijakan. Sementara beberapa ahli lainnya, menganggap pembangunan kapasitas sebagai advokasi kebijakan (Morariu et al., 2009).

Kebijakan adalah tentang nilai-nilai, kepercayaan, perspektif, tujuan, target dan asumsi mendasar, yang menginformasikan kerangka kerja untuk fasilitasi pembangunan. Selain masalah-masalah ini, dalam analisis kebijakan kita harus mencari pengalaman dari mana kebijakan tersebut menarik, konteks dan situasi di sekitar kebijakan, lembaga dan struktur, masalah yang ingin ditanggapi oleh kebijakan, solusi yang akan diusulkan, dan kelemahan umum serta kekuatan kebijakan. Ketika beberapa kelompok terlibat dalam kerja rancang bangun kebijakan, mereka akan mengembangkan sejumlah definisi operasional yang pada akhirnya akan mengarah pada penjelasan dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses advokasi.

Kebijakan bisa juga sebagai seperangkat arahan dan atau pedoman wajib, yang berfungsi untuk mengatur keputusan, terutama yang bersifat administratif dan atau manajerial. Pengaturan dapat terjadi pada tingkat mana pun dari suatu organisasi yang dilakukan oleh sekumpulan orang (orang yang berada dalam kondisi memegang otoritas). Kebijakan dapat dilihat sebagai rencana atau tindakan atau serangkaian peraturan yang diadopsi oleh pemerintah, lembaga bisnis atau lembaga lain yang dirancang untuk mempengaruhi dan menentukan keputusan atau prosedur. Kebijakan sangat erat kaitannya dengan Agenda kebijakan. Agenda-agenda tersebut berkisar pada masalah prioritas yang ingin dikerjakan.

Advokasi kebijakan merupakan salah satu bentuk advokasi dari tiga jenis advokasi. Pertama, Advokasi Kasus. Advokasi kasus (*casework*) adalah usaha untuk menyelesaikan masalah seseorang, keluarga, atau suatu komunitas tertentu dalam suatu waktu. Kedua, Advokasi Isu; Advokasi ini adalah tentang usaha untuk meningkatkan atau mengembangkan suatu kesadaran terkait suatu masalah. Ketiga, Advokasi Kebijakan; Advokasi ini merupakan advokasi kebijakan berbasis solusi. Alih-alih memecahkan suatu masalah yang dialami seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam suatu waktu, atau hanya sekedar

meningkatkan kesadaran tentang suatu masalah, dalam advokasi kebijakan kita diwajibkan untuk menganalisis penyebab timbulnya suatu masalah dan mengembangkan sebuah kebijakan baru berbasis solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan perubahan jangka panjang. Mekanisme kebijakan formal, seperti hukum atau peraturan pemerintah, adalah bagian penting dari advokasi kebijakan, karena jenis pekerjaan ini sering kali berupaya untuk mengubah cara lembaga resmi menangani atau membelanjakan uang terhadap suatu masalah.

Advokasi kebijakan adalah bentuk khusus dari bentuk-bentuk advokasi yang jumlahnya banyak. Advokasi adalah proses mengambil tindakan, menggunakan serangkaian strategi, untuk mempengaruhi pembuatan dan pengembangan kebijakan sosial. Strategi tersebut menggunakan beberapa tindakan khusus yang diarahkan untuk mengubah kebijakan, posisi atau program. Secara khusus, advokasi kebijakan berupaya untuk menetapkan kebijakan baru, memperbaiki kebijakan yang ada dan atau menantang sebagian undang-undang yang berdampak negatif terhadap individu atau kelompok tertentu.

Advokasi kebijakan melihat secara khusus tentang kebijakan yang merupakan seperangkat undang-undang (atau jenis undang-undang lainnya) yang diambil oleh pemerintah, atau badan pemerintah lainnya yang memiliki jangkauan lokal, nasional, regional maupun internasional. Pengembangannya, melibatkan sistem tindakan (atau tidak bertindak), langkah-langkah pengaturan, tindakan legislatif, keputusan pengadilan, dan prioritas pendanaan terkait masalah tertentu. Singkatnya, advokasi kebijakan diarahkan untuk membentuk kebijakan publik atau kebijakan sosial.

Advokasi kebijakan mengacu pada prakarsa yang terorganisir yang berupaya untuk mengubah suatu kebijakan atau undang-undang resmi, atau cara penerapan dari sebuah peraturan. Upaya advokasi kebijakan biasanya berusaha mencoba menetapkan kebijakan baru, memperbaiki kebijakan yang ada atau menentang pengembangan kebijakan yang menciptakan kesulitan atau ketidakadilan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat, khususnya masyarakat rentan atau kelompok yang kurang beruntung. Untuk terlibat dalam sebuah ad-

vokasi kebijakan, organisasi dan individu perlu tahu banyak hal terkait kegiatan advokasi, tidak hanya sekedar tahu bagaimana cara mengidentifikasi masalah, tetapi mereka juga harus tahu bagaimana cara mengisolasi penyebab masalah, menganalisis bukti-bukti masalah, melakukan penelitian, mengembangkan pendapat, membuat opsi kebijakan yang layak dan memahami cara menghitung biayanya (misalnya, mengukur berapa biaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan).

Advokasi kebijakan melibatkan perubahan mekanisme legislatif. Advokasi kebijakan sering kali berupaya untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat pengambilan keputusan, seperti pada pejabat publik, pegawai negeri, pejabat terpilih, dan legislator. Tetapi agar benar-benar efektif, advokasi kebijakan juga harus melibatkan partisipasi warga negara. Warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam membuat perubahan terhadap sebuah kebijakan.

Gambar 15. Ringkasan Advokasi Kebijakan



Ada beberapa jenis perubahan kebijakan, seperti: mengembangkan kebijakan baru, memperbarui atau mengubah kebijakan yang sudah

ada, menghilangkan kebijakan yang dianggap berbahaya, dan mengalokasikan atau mengelola sumber daya anggaran. Implementasi Kebijakan juga dapat mengambil beberapa bentuk berbeda, termasuk: menyebarkan kebijakan, melaksanakan kebijakan, mencairkan dana dengan tepat, atau menunjukkan akuntabilitas untuk kebijakan yang berkomitmen, serta membawa menegakkan kebijakan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan hukum.

Advokasi kebijakan melibatkan upaya untuk mencapai perubahan di bidang tertentu dengan berupaya memengaruhi kebijakan publik - termasuk di dalamnya Undang-undang, peraturan, dan praktek pemerintah. Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan sepanjang kegiatan advokasi kebijakan, diantaranya:

1. Penelitian dan Penyebaran (*Dissemination*)

Penelitian yang kredibel adalah alat yang sangat baik untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah. Hasil penelitian yang kredibel juga bisa menjelaskan dampak berkelanjutan dari suatu kebijakan atau kondisi yang merisaukan pada individu, komunitas dan negara.

2. Meningkatkan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran publik merupakan hal yang penting untuk mendorong terjadinya tindakan atas suatu masalah. Karena publik sering kali tidak sepenuhnya menyadari adanya masalah atau dimensinya. Upaya membangun kesadaran ini dapat mengambil banyak bentuk, termasuk berkomunikasi melalui media massa, membuat iklan, berceramah di depan audien yang berpengaruh, dan memberikan kesaksian kepada parlemen.

3. Pengorganisasian Masyarakat

Mendukung masyarakat dengan mengorganisir mereka adalah komponen penting dari advokasi kebijakan. Dengan melakukan pengorganisasian memungkinkan mereka yang terkena dampak bisa menyuarakan keprihatinan mereka dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pejabat pemerintah dan entitas swasta lainnya yang berpengaruh.

4. Mobilisasi Akar Rumput

Menunjukkan adanya dukungan publik yang luas terhadap perubahan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut

merupakan modal sosial untuk mencapai keberhasilan tujuan. Memobilisasi koalisi untuk mendorong kesadaran publik yang lebih besar terhadap suatu masalah akan memperbesar peluang (berdampak) terhadap terjadinya perubahan kebijakan.

5. Membangun Kapasitas:

Meningkatkan kemampuan para pelaku advokasi, memperkuat jaringan infrastruktur, dan mengembangkan keanggotaan organisasi merupakan salah satu cara penting lainnya untuk memungkinkan perubahan jangka panjang.

6. Pengembangan Kebijakan

Mengembangkan opsi kebijakan dapat membantu mempercepat perubahan. Para advokat membuat sejumlah opsi (alternatif) atau saran kebijakan yang dapat dipercaya untuk memecahkan masalah untuk diusulkan kepada pembuat kebijakan. Dalam tahap pengembangan ini advokat dan pembuat kebijakan bisa duduk bersama untuk mendiskusikan sejumlah usulan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan publik.

7. Lobi

Terkait dengan pengembangan kebijakan, beberapa lembaga donor atau individu dapat mendukung organisasi advokasi untuk terlibat secara langsung dengan pembuat kebijakan, tujuannya adalah untuk mempengaruhi hasil kebijakan. Dalam posisi ini advokat melakukan agitasi, berdebat, membangun opini, dan melakukan pendekatan langsung kepada pembuat kebijakan untuk merubah, memperbaiki atau menghapus kebijakan.

8. Litigasi:

Merupakan alat lama yang digunakan secara efektif oleh para advokat, yaitu dengan cara mengambil tindakan hukum untuk mencapai perubahan yang diinginkan atau melawan kebijakan dan praktek yang tidak diinginkan.

Dari penjelasan di atas tentang advokasi kebijakan maka ada beberapa poin kunci untuk memahami advokasi kebijakan. Secara keseluruhan, advokasi kebijakan merupakan jenis atau bentuk advokasi tertentu yang jumlahnya banyak. Advokasi merupakan proses meng-

ambil tindakan dan menggunakan serangkaian strategi untuk mempengaruhi pembuatan dan pengembangan kebijakan publik. Secara khusus, advokasi kebijakan berupaya untuk:

- a) Menetapkan kebijakan baru;
- b) Memperbaiki kebijakan yang ada dan/atau;
- c) Menolak undang-undang yang berdampak negatif pada individu atau kelompok tertentu.

Advokasi kebijakan secara spesifik berhubungan langsung dengan kebijakan publik. Dalam kebijakan publik ada seperangkat undang-undang (atau jenis undang-undang lainnya) yang diambil oleh pemerintah, atau badan pemerintahan lain yang memiliki peraturan lokal, nasional, jangkauan regional atau internasional. Dalam prakteknya, kebijakan publik melibatkan serangkaian sistem tindakan (melakukan atau tidak), tindakan regulatif, tindakan legislatif, keputusan yudisial, dan prioritas pendanaan mengenai masalah tertentu. Singkatnya, advokasi kebijakan diarahkan pada pembentukan kebijakan publik.

Jadi, Advokasi kebijakan merupakan usaha untuk mempengaruhi atau mendukung individu, komunitas, atau lembaga yang berkaitan dengan masalah kebijakan, misalnya regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini bermakna bahwa para advokat juga memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, berbagai bentuk kegiatan advokasi bisa dilakukan sebagai upaya memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) organisasi kelompok kepentingan, asosiasi, organisasi massa, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kegiatan advokasi bisa berupa pendidikan, penyadaran massa, pengorganisasian kelompok-kelompok kepentingan, pemberian bantuan hukum yang mengedepankan pembelaan hak-hak dan kepentingan organisasi atau kelompok kepentingan, dan kegiatan melobi lembaga-lembaga pembuat kebijakan.

Kegiatan advokasi yang baik akan fokus pada satu masalah atau isu strategis kebijakan publik tertentu. Dengan demikian, langkah awal terpenting dalam kegiatan advokasi adalah memilih dan menetapkan isu kebijakan publik yang benar-benar strategis untuk dijadikan sebagai sasaran advokasi.

D. Advokasi Sosial

Munculnya gagasan advokasi sosial berkaitan dengan masalah keadilan sosial _ advokasi sosial muncul dalam rangka membela dan menjunjung harga diri manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan hak-hak yang terkandung dalam komunitas. Di mana, nilai dan hak tersebut terabaikan, direndahkan, mengalami ketidaksetaraan, dan dirugikan atau didiskriminasi. Advokasi Sosial dilakukan manakala melihat suatu kondisi yang tidak menunjukkan keberpihakan pada orang yang bermasalah dalam mengakses pelayanan sosial. Ada beberapa tema yang berkaitan dengan advokasi sosial seperti masalah-masalah hak-hak sipil, hak individu, pembangunan komunitas, komunikasi dan kesadaran, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Tujuan advokasi sosial bermaksud untuk mengubah kebijakan, program atau kedudukan dari pemerintah, institusi atau organisasi. Lebih fokusnya, tujuan advokasi sosial adalah apa yang ingin kita ubah, siapa yang akan melakukan perubahan itu, seberapa banyak, dan kapan. Advokasi sosial adalah menolong orang atau sekelompok orang yang rentan untuk mencapai layanan tertentu ketika individu atau kelompok tersebut ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan (Zastrow, 1999).

Selain itu Advokasi Sosial juga bertujuan untuk mempromosikan perilaku inklusif serta mendorong dan memulai perubahan sosial. Di dalamnya ada usaha untuk memberdayakan orang agar bisa menggunakan hak yang mereka miliki serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Intinya, advokasi sosial bekerja untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Advokasi Sosial memberdayakan orang untuk berbicara untuk diri mereka sendiri dan menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka, menggunakan hak-hak tersebut saat dibutuhkan dan terlibat serta

mempengaruhi keputusan yang sedang dibuat tentang kehidupan dan masa depan mereka. Secara khusus advokasi sosial berusaha untuk mempromosikan inklusi sosial, mendorong terjadinya perubahan sosial, memberdayakan orang untuk menggunakan hak mereka, mendorong orang untuk mempengaruhi keputusan, mendorong orang untuk meningkatkan kesejahteraan, dan mempromosikan kesetaraan serta keadilan.

Ada Tiga aspek advokasi sosial yang harus dipahami. Pertama, Perubahan sosial – advokasi sosial bekerja untuk menyadarkan orang dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Kedua, Proses pemecahan masalah - bantu dan beri tahu pihak yang terkena dampak tentang sumber daya dan strategi yang dapat mereka gunakan untuk mengelola tantangan yang mereka hadapi. Ketiga, Pemberdayaan dan pembebasan - mendorong orang untuk mengambil tindakan agar terjadi perubahan-perubahan.

Setiap organisasi yang melakukan kegiatan penyadaran masyarakat terkait poin-poin di atas dapat dianggap sebagai organisasi advokasi sosial. Tujuan dari organisasi advokasi sosial adalah untuk mendukung hak-hak hukum dan hak alamiah mereka yang tidak dapat membela diri, sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial.

E. Advokasi dan Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah istilah yang sangat luas untuk ditransformasikan (besar atau kecil) sebagai ukuran perubahan pada sebagian, atau seluruh, masyarakat atau kelompok tertentu. Perubahan sosial terdiri dari banyak konsep, yang kadang-kadang kita anggap remeh atau bahkan kita benar-benar tidak mengerti tentang adanya transformasi sosial. Satu hal yang pasti, tidak ada struktur sosial masyarakat yang tetap sama. Struktur ini dinamis dan terus bergerak.

Dalam pandangan Sosiolog, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam interaksi dan hubungan manusia yang mengubah institusi budaya dan sosial. Perubahan ini terjadi seiring waktu dan sering kali memiliki konsekuensi yang mendalam dan berjangka panjang bagi masyarakat. Ada perubahan mekanisme dalam struktur sosial, yang ditandai dengan perubahan simbol budaya, aturan

perilaku, organisasi sosial, atau sistem nilai. Perubahan sosial bisa terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dalam satu masyarakat. Perubahan ini kemudian memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Sedangkan menurut para sosiolog, tujuan advokasi adalah menempatkan perubahan sosial sebagai bagian dari dinamika yang dikendalikan oleh masyarakat. Perubahan sosial sendiri gampang terjadi. Sebab, ia bisa terjadi karena berbagai hal, seperti tekanan demografis, konflik kepentingan, penemuan teknologi, perkembangan sistem kepercayaan, perubahan alat produksi, terbukanya hubungan dengan dunia internasional dan sebagainya. Kalau tidak ada perubahan sosial dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat tersebut tidak dinamis.

Tetapi, idealnya perubahan sosial dalam satu sistem sosial dikendalikan oleh masyarakat. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi obyek semata dalam sebuah perubahan sosial. Masyarakatlah yang harus menjadi subyek perubahan sosial. Kalau ini sudah terjadi, maka masyarakat bisa mengendalikan dinamika perkembangan mereka sendiri.

Advokasi kebijakan mengajak masyarakat untuk menjadi subyek dalam perubahan sosial. Advokasi mengajak masyarakat agar ikut mengendalikan perkembangan yang terjadi pada diri mereka. Advokasi mengajak masyarakat untuk tidak bersedia dijadikan sebagai objek oleh pihak penguasa ketika menciptakan sebuah perubahan sosial. Misi advokasi sangat sederhana: kalau ada perubahan sosial dalam sebuah masyarakat—berapa pun luasnya, maka masyarakat harus ikut menentukan arah perubahan itu.

Bertolak dari sini kita bisa mengatakan bahwa advokasi hanya mungkin berhasil di negara yang demokratis. Sebab, salah satu prinsip dalam demokrasi, seperti ditulis oleh Dahl (2001), demokrasi membantu rakyat melindungi kepentingan dasarnya. Lewat advokasi, rakyat disadarkan bahwa mereka punya hak dan kesempatan untuk melindungi kepentingan mereka. Rakyat digugah bahwa mereka perlu menjadi obyek dalam perubahan yang menyangkut diri mereka sendiri.

Dalam konteks perubahan sosial, setidaknya terdapat dua bidang kerja yang menjadi garapan advokasi. Pertama, ideologis. Dalam konteks ini advokasi ingin mengubah tatanan yang ada. Hanya tatanan barulah yang dipercaya bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang nyaman dan sejahtera. Karena menyangkut kepercayaan, ia bisa sangat ketat, tetapi bisa juga biasa saja. Yang jelas, kepercayaan sulit berubah. Ia sudah merupakan sumber kebenaran. Kedua, strategis. Di sini advokasi digunakan untuk memenangkan pertarungan. Ia dipercaya bisa memberikan kemenangan bagi pihak yang melakukannya. Karena itu, ia dipakai sebagai usaha untuk meng-counter isu-isu yang diungkapkan oleh pihak lawan. Semakin banyak isu yang diungkapkan oleh pihak lawan, semakin keras pula usaha untuk meng-counternya.

F. Menggunakan Advokasi Kebijakan Sebagai Advokasi Sosial

Ada banyak alasan mengapa advokasi kebijakan adalah cara yang efektif untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Sebagai permulaan, undang-undang dan kebijakan diterapkan di seluruh yurisdiksi negara. Karena itu mempengaruhi banyak orang, terkadang bisa mempengaruhi seluruh populasi negara atau wilayah. Advokasi kebijakan menargetkan pembuat keputusan dan kebijakan, orang-orang yang diamanatkan untuk mengembangkan kebijakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Dengan memberi tahu mereka tentang kesenjangan dan kekurangan terkait kebijakan yang dirancangnya, maka akan memungkinkan terjadinya pergeseran norma dan praktek sosial.

Selain itu, advokasi kebijakan mengambil peranan untuk meningkatkan skala - artinya memiliki kemampuan untuk menjangkau sejumlah besar orang. Advokasi kebijakan juga akan mempengaruhi orang-orang yang menuntut hak-hak mereka, karena mereka dilindungi oleh hukum. Terakhir, advokasi kebijakan mendorong pemerintah untuk berkomitmen dalam menerapkan strategi yang terkandung dalam kebijakan atau undang-undang, untuk mendanai dan mendukung masyarakat sipil, serta mengadopsi praktek-praktek terbaik yang dikembangkan oleh masyarakat sipil.

G. Hasil yang Diharapkan dari Advokasi Kebijakan

Ketika kita berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dan praktek publik, kita harus terus menerus bekerja untuk meminta, mendorong, dan meyakinkan para pejabat dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap seluruh siklus kebijakan, bahwa kebijakan yang baik itu secara positif memengaruhi kehidupan masyarakat. Advokasi yang baik atau berhasil harus mengarah pada berbagai mekanisme yang dilembagakan untuk memastikan bahwa:

- a. Kebijakan ditetapkan dengan dan melalui keterlibatan publik
- b. Implementasi kebijakan dilakukan dengan partisipasi masyarakat dan adanya pengawasan publik.
- c. Dampak kebijakan dinilai di arena publik
- d. Struktur yang secara demokratis mewakili kepentingan masyarakat harus diwujudkan.
- e. Komunitas dan warga menuntut adanya akuntabilitas.
- f. mengubah sikap dan menciptakan harapan.
- g. Membangun sistem, mengidentifikasi tujuan yang jelas, memiliki rencana aksi, menyuarakan kasus atau masalah untuk perubahan.

H. Tujuan, dan Fungsi Advokasi

Mengapa kita terlibat dalam Advokasi?. Advokasi memiliki beberapa tujuan dan fungsi penting dalam pembangunan masyarakat. Tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan penyampaian pendapat atau usaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan sosial.

Berikut beberapa tujuan advokasi kebijakan:

1. Membantu para mitra dan komunitas lokal untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dibutuhkan oleh analisis kebijakan, jaringan, dan lobi.
2. Membantu mitra dan pemimpin lokal dalam mengembangkan kapasitas strategis dan kompetensi baru sebagai analis, advokat reformasi, animator, katalisator dan agen perubahan.
3. Melatih mitra untuk mengembangkan alat dan mempertajam keterampilan dalam mobilisasi sosial, strategi politik, dan analisis tren sosial, ekonomi, dan politik.

4. Memperlengkapi para mitra dengan keterampilan dan kemampuan dalam memobilisasi energi kesukarelawanan untuk mengatalisasi perubahan sistem dan kebijakan, memantau perumusan dan implementasi kebijakan serta terlibat secara efektif dalam membangun jejaring dan membangun solidaritas.
5. Memengaruhi perubahan kebijakan dan mendapatkan komitmen untuk bertindak dari mereka yang berwenang.
6. Advokasi menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah jangka panjang. Aktivitas advokasi akan memberikan sejumlah input berupa informasi, data, masukan, kritikan, dan usulan terkait permasalahan dasar dan kebutuhan publik.
7. Bagi populasi besar hal tersebut bisa memecahkan masalah secara sekaligus. Advokasi akan membantu menyelesaikan isu-isu publik secara komprehensif.
8. Melalui advokasi kita (pelaku, pengguna, dan pembuat kebijakan) dapat mengalihkan sumber daya ke tempat yang paling membutuhkan secara tepat.
9. Mengundang keterlibatan warga dalam memecahkan masalah publik. Advokasi akan memberikan ruang yang sangat terbuka bagi keterlibatan warga masyarakat melalui kegiatan pembangunan partisipatoris.
10. Bisa menciptakan perubahan dalam jangka waktu yang lama.

Tujuan advokasi pada akhirnya adalah perubahan kebijakan (Reisman, Gienapp & Stachowiak, 2007) atau proses pembuatan kebijakan, umumnya untuk membuatnya lebih mudah diakses oleh publik dan transparansi; tujuan terakhir ini disebut "advokasi partisipatif" daripada advokasi kebijakan (Chapman & Wameyo, 2001). Dalam hal perubahan kebijakan, tujuannya mungkin untuk mengadopsi, memodifikasi, atau menolak opsi kebijakan tertentu (Moore, 2011). Dengan demikian, untuk meringkas karakterisasi utama dari seluruh literatur akademik dan bentuk-bentuk praktis, maka advokasi kebijakan bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang disengaja dan diprakarsai oleh publik untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Sementara fungsi advokasi kebijakan berfungsi untuk:

1. Meningkatkan kuantitas partisipasi dalam perencanaan kebijakan.
2. Memanfaatkan perubahan melalui kampanye dengan kebijakan yang ada.
3. Membantu melakukan penafsiran terhadap suatu kebijakan.
4. membuat kerangka kerja untuk kebijakan baru.
5. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan.
6. Melakukan peninjauan terhadap isi, proses, partisipasi, dan struktur kebijakan.
7. Mengembangkan kebijakan bayangan atau membuat proses kebijakan alternatif.
8. Mengubah prioritas dan tindakan kebijakan.
9. Terlibat dalam dialog kebijakan.
10. Membangun koalisi, kemitraan, dan jaringan seputar kebijakan.

I. Komponen-komponen Inti Advokasi Kebijakan

Dalam melakukan advokasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Komponen-komponen ini merupakan kunci kegiatan advokasi. Saya menyebutnya sebagai Komponen inti advokasi. Komponen-komponen tersebut diantaranya:

a) Kapasitas untuk Advokasi Kebijakan yang Efektif

Banyak kapasitas organisasi politik dan masyarakat sipil berkembang seperti alur tangga di bawah ini, mereka memulainya dari kapasitas paling dasar dan terus berkembang maju hingga memiliki kemampuan evaluatif. Kemauan dan pengalaman yang intens memberikan peluang sekaligus memaksa mereka untuk terus berkembang hingga memiliki kemampuan yang sangat memadai dan efektif dalam melakukan kegiatan advokasi kebijakan.

Gambar 16. Diagram Kapasitas Advokasi Kebijakan yang Efektif



Pada bagian tangga paling bawah adalah pemberian layanan, meningkatkan kesadaran, dan membangun kapasitas. Itu adalah area di mana banyak organisasi masyarakat bisa memfokuskan fungsi inti mereka. Mereka bisa fokus pada komunitas lokal, memainkan peranan kunci dalam memberikan berbagai jenis layanan, membangun kesadaran tentang isu-isu tertentu dan membangun kapasitas dalam komunitas yang mereka layani. Kelompok-kelompok masyarakat ini telah memiliki cukup kemampuan untuk melakukan advokasi. Pengalaman organisasi masyarakat ini akan terus berkembang hingga pada tahap paling tinggi, yaitu tahap kemampuan untuk melakukan evaluasi.

Dalam prakteknya, bukan hanya Organisasi masyarakat yang melakukan ini. Aktivitas ini juga banyak dilakukan oleh organisasi partai politik. Bahkan, beberapa partai politik secara khusus membentuk organ sayap untuk melakukan kegiatan yang fokus pada pelayanan sosial. Namun yang paling penting, agar suatu masya-

rakat dapat maju dan gerak roda kegiatan advokasi tetap stabil, Organisasi Masyarakat dan organisasi politik harus mengembangkan kapasitas internal mereka agar bisa terus berkembang. Ini bermakna, bahwa mereka secara kritis harus terus mengembangkan kemampuan untuk berkembang, berkomunikasi, menerapkan, dan melacak kebijakan sebagai undang-undang atau peraturan.

b) Kapasitas Organisasi untuk Advokasi Kebijakan

Salah satu cara untuk menilai tingkat kesiapan kita dalam melakukan advokasi kebijakan adalah dengan melakukan penilaian kapasitas diri dan lembaga kita. Beberapa bahan inventaris pertanyaan berikut ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur kapasitas kita dalam melakukan advokasi kebijakan.

Tabel 11. Daftar Inventaris Pertanyaan Pengukuran Kapasitas Diri dan Lembaga

KREDIBILITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkah saya/organisasi kami berbicara secara sah atas nama mereka yang terkena dampak masalah ini? • Apakah saya/apakah organisasi kami bisa dianggap obyektif dan dapat dipercaya? Bisakah kita dianggap partisan secara politis? • Apakah saya/apakah organisasi kami dikenal dan dihormati oleh para pembuat keputusan?
IDENTIFIKASI ISU	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Saya/Apakah organisasi kami memiliki kapasitas untuk melakukan latihan identifikasi masalah, seperti survei, penilaian masyarakat, FGD, atau bentuk penelitian lainnya dengan menggunakan standar terbaik? • Jika saya/kami tidak dapat melakukan latihan identifikasi masalah saya/kami sendiri, apakah saya/kami memiliki akses terhadap hasil penelitian atau data yang baik dari sumber lain?
KAJIAN, ANALIS, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah saya / Apakah organisasi kami telah sepenuhnya memahami masalah yang telah diidentifikasi untuk advokasi? Apakah saya/kami akan dianggap ahli dalam masalah ini?

-
- Apakah saya/Apakah organisasi kami memiliki kapasitas yang memadai untuk mengumpulkan dan menganalisis data atau melakukan penelitian tentang masalah yang diidentifikasi untuk advokasi?
 - Jika tidak, apakah saya/kami memiliki akses ke bentuk informasi lain dari data yang dapat diandalkan dan mampu untuk diterapkan dari temuan tersebut untuk masalah ini?
 - Apakah Saya/Apakah organisasi kami memiliki kapasitas untuk menganalisis informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan saya/kami membuat kebijakan yang sah, alternatif atau solusi masalah?
 - Jika tidak, apakah saya / kami memiliki mitra yang dapat diandalkan untuk masalah ini?
 - Apakah saya/Apakah organisasi kami memiliki keterampilan yang sangat memadai untuk mengeluarkan (menyusun) proposal kebijakan dan mengidentifikasi aliran pendapatan untuk implementasi?
 - Jika tidak, apakah saya/kami memiliki mitra yang dapat menyediakan kapasitas ini?

**PENJANGKAUAN
MASYARAKAT
DAN
PENGORGANISASI
AN AKAR RUMPUT**

- Apakah saya/apakah organisasi kami dikenal dan dihormati oleh masyarakat lokal yang terkena dampak masalah ini?
 - Apakah saya/kami memiliki hubungan yang kuat dengan tokoh masyarakat di daerah tersebut?
 - Apakah saya/kami tahu dan mengerti bagaimana caranya mendapatkan informasi tentang audien tertarget di daerah tersebut?
 - Apakah saya/kami memiliki sumber daya dan kapasitas keterampilan untuk mengatur kegiatan dan melakukan mobilisasi di daerah tersebut?
 - Siapa kelompok yang akan saya/kami layani sekarang? Bagaimana mereka terhubung dengan masalah ini?
-

<p>HUBUNGAN DENGAN PENGAMBIL KEPUTUSAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah saya/apakah organisasi kami dikenal dan dihormati oleh mereka yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang masalah tersebut? • Apakah saya/Apakah organisasi kami memiliki hubungan khusus untuk menjalin komunikasi dan bentuk keterlibatan lainnya dengan pembuat keputusan tentang masalah ini? • Jika saya/kami tidak memiliki hubungan langsung yang sesuai dengan pembuat keputusan, bisakah saya/kami bermitra dengan organisasi atau individu lain yang sama-sama melakukan advokasi terhadap masalah yang sama?
<p>MEMAHAMI PEROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah saya/Apakah organisasi kami memahami bagaimana dan kapan keputusan tentang masalah ini dibuat? • Apakah saya/Apakah organisasi kami bisa mengakses hasil-hasil pertemuan atau format lainnya tentang pembuatan keputusan masalah tersebut?
<p>KOMUNIKASI EKSTERNAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah saya/kami memiliki kapasitas yang baik untuk mengubah hasil penelitian dan kebijakan menjadi sebuah pesan singkat dan jelas untuk para audien yang menjadi target? • Apakah saya/kita memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi para audien utama guna kepentingan mobilisasi? Apakah saya/kita tahu cara untuk mencari tahu di mana para audien ini bisa mendapatkan informasi dan sarana komunikasi apa yang paling efektif bagi mereka?
<p>KOMUNIKASI INTERNAL UNTUK ORGANISASI MASYARAKAN DAN KOALISI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah organisasi kita sudah memiliki sikap kepemimpinan yang kuat untuk melakukan pengembangan advokasi dan kebijakan? • Apakah semua orang di dalam organisasi telah memahami dengan baik peran dan

	<p>tanggung jawab masing-masing dalam hal pengembangan kebijakan dan advokasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada mekanisme khusus untuk seluruh anggota bagaimana cara untuk mengetahui prioritas-prioritas dan tujuan kegiatan?
<p>KEMAMPUAN UNTUK MEMBENTUK JARINGAN DAN KOALISI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah saya/Apakah organisasi kita memiliki anggota profesional yang memiliki jaringan luas, jaringan koalisi atau jaringan kemitraan? • Apakah saya/Apakah organisasi kita memiliki hubungan kerja yang baik dengan orang lain yang menangani masalah ini, termasuk organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahan? • Apakah saya/Apakah kita dalam posisi untuk memaksimalkan dampak dari upaya advokasi kebijakan kita dengan cara membangun kemitraan dengan organisasi atau individu lain yang membawa kekuatan dan aset yang berbeda dari kita sendiri?
<p>MENAJEMEN SUMBER DAYA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah saya/kita memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai tujuan advokasi kebijakan? • Apakah saya/kita telah memiliki kapasitas untuk merekrut dan melatih sukarelawan dalam batas waktu kampanye advokasi kebijakan yang telah ditentukan? • Apakah saya/kita memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mencapai tujuan advokasi kebijakan? • Apakah kita bisa mengelola waktu kita dengan cukup baik untuk mencapai tujuan advokasi? Apakah tindakan dan pencapaian prioritas telah memiliki sumber daya yang memadai dan waktu yang cukup? • Apakah ada sumber daya manusia atau materi lain yang perlu saya/kita sediakan untuk kegiatan kampanye ini?

Sumber: Diolah dari berbagai Sumber

J. Elemen Kampanye Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan adalah serangkaian tindakan tertarget yang diarahkan kepada para pengambil kebijakan atau pembuat keputusan untuk mendukung perubahan tertentu. Unsur-unsur Kampanye Advokasi Kebijakan berfokus pada upaya untuk mencapai perubahan kebijakan yang diinginkan.

Ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan advokasi kebijakan, di antaranya :

1. Kumpulkan Informasi Latar Belakang

Sebelum kita memulai kampanye advokasi, lakukan riset terlebih dahulu. Kita harus yakin bahwa perubahan kebijakan itu merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kita juga perlu untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan penting dan bukti-bukti terbaru, hukum dan peraturan saat ini, serta memahami kesenjangan apa yang sedang terjadi saat ini. Teliti setiap upaya advokasi masalah yang sama di masa lalu. Pengetahuan dan pemahaman tersebut penting sebagai bahan pendukung kegiatan kampanye advokasi kebijakan. Ini bisa membantu Advokat memprediksi keberhasilan dan kegagalan.

2. Tetapkan Tujuan Kebijakan dengan Jelas

Kampanye yang sukses dimulai dengan tujuan yang jelas, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat dengan waktu. Pastikan tujuan advokasi berhubungan dengan perubahan kebijakan yang disertai dengan bukti-bukti yang ada. Tujuan mencakup hal-hal berikut: aktor kebijakan atau pembuat keputusan, tindakan atau keputusan yang kita inginkan, dan jadwal yang kita inginkan untuk bertindak atau memutuskan.

3. Bangun Kemitraan yang Kuat

Bekerja dalam koalisi atau kemitraan dengan orang lain adalah cara terbaik untuk menunjukkan dukungan untuk masalah Anda. Identifikasi kelompok inti organisasi yang akan bekerja bersama untuk melakukan kampanye. Selanjutnya, kenali koalisi lama dan koalisi baru yang bersedia berbicara untuk mendukung tujuan kita. Untuk mengidentifikasi mitra-mitra tersebut, maka kita bisa melihat asal atau latar belakang calon mitra. Apakah calon mitra berlatar

belakang masyarakat sipil, kelompok profesional dari bidang yang sesuai dengan isu dan permasalahan, pendidikan, ekonomi, kelompok ilmiah (pusat kajian) atau dari kelompok bisnis.

4. Pahami Lanskap Politik

Memahami proses pembuatan kebijakan, aktor yang terlibat dalam pembuat keputusan, dan influencer mana yang menjadi target adalah kunci untuk mencapai tujuan advokasi. Setelah memahami lanskap politik, buatlah strategi, kapan saatnya terlibat dalam proses, melakukan intervensi, dan mempengaruhi target advokasi. Penting bagi advokat, untuk mengetahui posisi pembuatan keputusan terkait tujuan perubahan kebijakan. Advokat perlu mengidentifikasi kelompok-kelompok oposisi yang akan ditemui guna mencari dukungan.

5. Bantu Kembangkan Undang-undang atau Peraturan

Sebagai seorang advokat, peran yang akan kita mainkan selama fase ini cenderung bervariasi. Memiliki pengacara atau pakar kebijakan sebagai sumber daya sangat penting. Paling tidak, mereka dapat membantu kita menganalisis kekuatan dan kelemahan kebijakan yang ada atau yang muncul sesuai dengan praktek terbaik berbasis bukti.

6. Tentukan Apa yang Tidak Bisa Dinegosiasikan

Kompromi terkadang diperlukan dalam advokasi. Namun, penting untuk mengetahui batasan-batasan kita. Bersama mitra inti, kita perlu untuk bersama-sama menentukan batasan-batasan apa saja yang tidak bisa dinegosiasikan, idealnya hal tersebut dilakukan pada fase awal proses advokasi.

7. Identifikasi Tokoh Berpengaruh dan Pendukung kebijakan

Sponsor yang kuat dan bersedia untuk memperjuangkan kebijakan selama proses perubahan kebijakan tersebut adalah aset yang berharga untuk melakukan kampanye apapun. Cari pembuat kebijakan yang berpengaruh dan dihormati di dalam lembaga yang dituju atau lembaga yang relevan atau lembaga yang berada di posisi kunci yang dapat Anda percayai untuk bertindak sebagai mitra yang loyal dan efektif. Ingatlah, hal ini memerlukan waktu untuk membangun kesepahaman. Bertemu dengan mereka secara

teratur untuk memahami keprihatinan dan kebutuhan mereka, mencari cara terbaik untuk bisa bekerja sama, dan berbagi informasi.

8. Merumuskan Rencana Aksi

Rencana aksi adalah peta jalan kita untuk melakukan kampanye, merumuskan tujuan, menyusun strategi, dan menyampaikan pesan. Pertimbangkan dengan cermat semua elemen rencana Anda (termasuk di dalamnya rencana kerja sama dengan kelompok mitra). Selain kegiatan-kegiatan utama, rencana aksi juga harus mampu menguraikan dengan jelas sumber daya yang diperlukan, orang-orang yang bertanggung jawab, dan garis waktu pelaksanaan aksi. Ingatlah, bahwa rencana Anda adalah dokumen hidup yang harus ditinjau dan dicermati secara teratur, rutin, dan diperbarui saat lanskap politik berubah.

9. Jalankan Kampanye

Dengan rencana yang terperinci, sekarang saatnya untuk mengimplementasikannya. Perlu diingat bahwa kampanye yang sukses membutuhkan perencanaan strategis bersama dengan implementasi strategis. Proses kampanye yang dinamis dan terus berubah akan mengharuskan Anda untuk selalu merespons setiap peristiwa yang tidak terduga, seperti timbulnya ketidaksepakatan dalam jaringan advokasi, mengubah sasaran, dan membentuk jaringan mitra baru. Jangan takut untuk menjadi fleksibel, kaji terus setiap tahap perencanaan, lakukan pembaharuan jika diperlukan.

10. Pantau dan Evaluasi Setiap Pencapaian

Memantau dan mengevaluasi implementasi setiap rencana advokasi akan menjadi salah satu kegiatan yang paling kritis dari kegiatan kampanye, tetapi hal ini sering kali diabaikan oleh para pelaku. Meninjau dan mengkaji tiap pencapaian akan menjadi poin tersendiri bagi kita dan mitra untuk terus bertanggung jawab atas tindakan yang telah direncanakan. Pemantauan dan evaluasi juga akan mengungkapkan apakah tindakan yang telah dilakukan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Jika kegiatan kampanye tidak menghasilkan kemajuan, maka para pelaku advokasi perlu untuk melakukan penilaian ulang atas perencanaan kegiatan. Lakukan penyesuaian jika diperlukan.

11. Rayakan Kesuksesan dan Tetap Terlibat

Kampanye advokasi yang sukses kadang kala membutuhkan banyak waktu dan melelahkan. Bahkan jika tujuan Anda tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, paling tidak gerakan advokasi telah memberikan pendidikan kepada para pengambil kebijakan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tataran ideal apa yang harus dilalui. Selain itu, paling tidak, gerakan advokasi telah diketahui oleh publik dan terekam dengan baik. Harapannya, publik tahu apa masalah yang Anda sedang perjuangkan, sehingga akan mendapatkan dukungan massa untuk terus menerus memberikan tekanan kepada para pembuat kebijakan. Rayakan setiap keberhasilan, baik itu besar maupun kecil, pastikan kita berterima kasih kepada para pendukung atas komitmen mereka untuk terus mendukung keberlanjutan advokasi. Setelah Anda mencapai perubahan kebijakan, pastikan tahap implementasi adalah tujuan advokasi berikutnya. Kampanye tidak hanya sekedar berakhir dengan perubahan undang-undang atau perubahan kebijakan: mendorong terwujudnya implementasi yang mengacu pada perubahan kebijakan juga tak kalah pentingnya.

K. Empat Lingkup Pengaruh: Siapa yang terlibat dalam kebijakan advokasi?

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan (aktivitas) multi-level. Advokasi kebijakan dalam pendekatannya bertujuan untuk mengubah kebijakan agar lebih adil dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Agar efektif, organisasi perlu melibatkan orang lain dan lembaga lain yang menjadi kunci pengembangan atau perumusan undang-undang. Berikut adalah kelompok-kelompok yang sering terlibat dalam proses advokasi kebijakan, di antaranya: Pemerintah, Masyarakat sipil, Media Massa, dan Komunitas.

Dalam prosesnya, pengembangan kebijakan publik sering diinformasikan oleh masing-masing kelompok ini. Misalnya, pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan undang-undang yang diidentifikasi oleh masyarakat sipil sebagai kebijakan anti-demokrasi, bermasalah, dan atau kebijakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena

itu, meskipun kelompok ini sering dilihat sebagai entitas yang terpisah, pada kenyataannya, mereka saling terkait dan saling menguatkan. Setiap adanya inisiatif advokasi kebijakan, maka advokat harus siap untuk melibatkan (terlibat) dengan masing-masing kelompok tersebut. Tujuannya adalah untuk membuat hasil kebijakan memiliki dampak yang positif.

Siapakah Pemerintah?. Pemerintah bukanlah entitas yang homogen (seragam) atau statis, tetapi bersifat multifaset dan cair. Lembaga pemerintah dalam waktu tertentu, mungkin enggan untuk terlibat dalam persoalan-persoalan sipil. Namun, bisa juga, lembaga pemerintah yang berbeda atau perwakilan pemerintah yang berbeda, dapat menyambut dengan tangan terbuka dan menghargai keterlibatan sipil. Beberapa lembaga Pemerintahan dalam waktu tertentu mungkin kurang setuju dengan keterlibatan kelompok sipil sehingga mereka menolak terlibat. Ketika melakukan advokasi kebijakan, sangat penting untuk memahami bagaimana lembaga pemerintah beroperasi dan khususnya, siapa yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Beberapa pejabat pemerintah menyambut dengan tangan terbuka adanya tekanan eksternal yang datang dari kelompok sipil dan memberikan ruang yang sangat terbuka bagi mereka, sementara yang lain bisa melakukan penolakan dengan berbagai macam alasan. Dalam kondisi seperti ini, tugas advokat adalah membangun hubungan yang memungkinkan terbangunnya pemahaman bersama tentang cara beroperasi di lingkungan yang cair ini.

Siapakah Komunitas?. Karena tujuan advokasi kebijakan adalah untuk memperluas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan/atau mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok yang terpengaruh, penting bagi organisasi advokasi untuk mengidentifikasi secara tepat siapa yang akan terpengaruh (atau ditinggalkan) dari proposal kebijakan yang dibuat oleh pembuat Kebijakan. Dalam beberapa kasus, komunitas yang terkena dampak dapat terdiri dari kelompok yang berada di wilayah geografis tertentu, atau orang-orang yang terpinggirkan secara sosial, misalnya, perempuan, kelompok kulit berwarna (ras), penyandang cacat, pengungsi atau migran, anak-anak dan remaja atau komunitas miskin. Selama proses advokasi kebijakan, masyarakat harus diajak

bermusyawarah untuk menangkap pandangan dan pengalaman mereka, serta hasil apa yang mereka inginkan dari inisiatif advokasi kebijakan.

Siapakah media?. Media terdiri dari sumber media tradisional, seperti media cetak, film, radio dan non-tradisional, seperti *World Wide Web* (internet), dan media sosial. Sumber media ini adalah “medium” komunikasi yang bisa digunakan untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan kepada masyarakat luas. Media cetak terdiri dari surat kabar nasional dan lokal, majalah, buletin dan publikasi lainnya. Pesan berupa video sebagian besar bisa disampaikan melalui televisi, meskipun radio sendiri juga bisa menjadi alat komunikasi yang lebih populer mengingat radio lebih murah dan lebih mudah diakses daripada televisi atau internet. Namun, dengan menjamurnya ponsel pintar, penggunaan internet, dan jaringan sosial tertentu seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya telah menjadi alat komunikasi yang sangat berdampak, terutama dalam situasi konflik, di mana negara memiliki kendali atas media arus utama seperti radio dan televisi. Kampanye advokasi kebijakan yang efektif harus melibatkan berbagai media ini untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan mengingatkan masyarakat terhadap masalah atau sebab-sebab tertentu.

Siapakah Masyarakat Sipil?. Masyarakat sipil berbeda dari lembaga pemerintah dan sektor swasta. Namun, sebagai salah satu strategi advokasi, masyarakat sipil bisa bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan pemerintah untuk membawa perubahan sosial. Organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi nirlaba, organisasi berbasis masyarakat (ORMAS), dan sejumlah kelompok masyarakat sipil lainnya yang didirikan di luar pemerintah. Organisasi masyarakat sipil sering dipandang sebagai “suara rakyat”, sehingga bisa bertindak untuk kepentingan individu atau kelompok yang terpinggirkan.

Melalui upaya mereka, masyarakat sipil dapat:

- a. Melobi (upaya untuk mempengaruhi) pemerintah untuk mengadopsi atau mengubah undang-undang dan kebijakan;

- b. Memberikan masukan tentang undang-undang dan kebijakan melalui penelitian dan data yang dikumpulkan melalui penyediaan layanan konsultasi dengan masyarakat dan cara yang lain;
- c. Meminta pertanggungjawaban pemerintah karena gagal memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka;
- d. Membantu pemerintah untuk menerapkan undang-undang dan kebijakan;
- e. Menyampaikan kebutuhan dan keprihatinan kelompok masyarakat sipil atau orang yang terpinggirkan kepada pemerintah atau kepada masyarakat yang lebih luas.

L. Mengembangkan Strategi Advokasi

Untuk memastikan bahwa strategi advokasi telah relevan dan terfokus, advokat disarankan untuk melakukan penilaian terhadap lanskap masalah yang ingin ditangani oleh organisasi advokat. Tim advokat harus mampu mengumpulkan sebagian besar data informasi terkait target dan tujuan kegiatan melalui riset pustaka dan/atau diskusi dengan para kolega. Wawancara dengan pemangku kepentingan dapat membantu mengisi celah keterbatasan data maupun informasi.

Dalam mengembangkan strategi advokasi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis data informasi:

- a. Kebijakan yang mengatur masalah yang sedang ditangani. Temukan adanya kesenjangan dalam pengembangan atau implementasinya.
- b. Lembaga pemerintah yang relevan dengan masalah yang kita tangani. Pastikan tanggapan pemerintah terhadap kegiatan advokasi yang dilakukan, positif atau negatif.
- c. Mitra potensial untuk advokasi, termasuk kelompok kepentingan, entitas sektor swasta, para koalisi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, seperti tenaga profesional di bidang kesehatan dan anggota masyarakat.
- d. Bukti untuk mendukung perubahan yang Anda inginkan.

M. Tahapan Perencanaan Advokasi

Ketika merencanakan kegiatan advokasi, tahapan-tahapan berikut ini sangat penting untuk diperhatikan:

1. Membangun Identitas

Menyepakati tujuan, berorientasi pada mandat, konstituen, nilai-nilai dan prinsip-prinsip panduan advokasi. Ini adalah tentang pembentukan komite, jaringan, koalisi, organisasi, aliansi dll.

2. Mobilisasi & Pemetaan

Sumber daya, aktor, institusi, sekutu, target dan analisis lingkungan pemangku kepentingan termasuk posisi mereka. Analisis dari penilaian pemangku kepentingan, lingkungan, dan risiko. Mengumpulkan informasi kebijakan dan politik. Apa debat politik utama, siapa yang sedang berada dalam debat? Siapa orang yang memiliki masalah atau telah menyebabkan konflik di masa lalu? Bagaimana hal tersebut diselesaikan?

3. Mengembangkan visi bersama atau pemahaman bersama membangun hubungan strategis, kepekaan, pendidikan untuk mengubah sikap, menciptakan harapan, dan membentuk perspektif.

4. Definisi dan penjabaran masalah kebijakan

Identifikasi tema kebijakan, analisis lingkungan kebijakan, pemahaman masalah, pengambilan posisi atau opsi. Bagaimana kebijakan itu memengaruhi Anda dan orang miskin?.

5. Identifikasi tujuan dan objek

Di mana kegiatan tersebut akan berputar, termasuk refleksi diri/ analisis kekuatan dan kelemahan - analisis SWOT.

6. Strategi kampanye

Rencana peluncuran dan desain metodologi.

7. Monitoring dan Evaluasi

Mengembangkan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi.

N. Memilih Pendekatan Advokasi

Tidak ada strategi yang baku terkait aktivitas advokasi. Kerja-kerja advokasi sebagian besar dipengaruhi oleh konteks sosial-politik, target lembaga, objek, masalah kebijakan, dan aktor. Tetapi, apapun konteksnya, seseorang perlu mempertimbangkan berbagai macam risiko yang akan timbul, berbagai kemungkinan yang akan terjadi, dan peluang yang ditawarkan masing-masing pendekatan. Tujuan utama advokasi adalah membuka ruang politik untuk melakukan

negosiasi. Strategi kerja advokasi tidak hanya terbatas pada kampanye dan lobi semata, banyak kerja-kerja yang lain seperti pengembangan kapasitas dan kapabilitas objek advokasi.

Tabel 12. Contoh Strategi Advokasi

Kampanye		Lobi	
1	Mobilisasi Sosial, Kesadaran & sensitisasi	1	Melakukan Dialog kebijakan
2	Membuat Intrik di balik layar	2	Ruang rapat dan negosiasi
3	Melakukan Aksi massa misalnya demonstrasi , boikot, dll.	3	Kemitraan, Kerjasama & kolaborasi
4	Menggelar Rapat umum/forum publik	4	Analisis dan ringkasan kebijakan
5	Membuka Posko, Melakukan boikot & pemogokan	5	Model peran & praktek yang baik
6	Mobilisasi komunitas & sosial	6	Studi kasus
7	Penelitian dan penyebaran informasi atau berbagi Pengetahuan	7	Memanfaatkan perubahan melalui sumber daya dengan mendukung proses
8	Media kampanye, forum publik, pendidikan kewarganegaraan, dll.	8	Penyusunan kebijakan
9	-	9	Pendidikan, pelatihan dan persuasi
10	-	10	Penggunaan mitra, Seperti Lembaga Donor untuk memanfaatkan perubahan
11	-	11	Gunakan inovasi dan contoh yang baik

O. Memilih Strategi Advokasi yang Efektif

Memilih strategi yang efektif adalah keharusan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tujuan dan target advokasi tercapai

dengan maksimal. Ada beberapa pertimbangan untuk memilih strategi yang baik. Berikut beberapa pertimbangan tersebut:

- a. Tujuan kebijakan yang terdefinisi dengan baik
- b. Pemahaman yang jelas tentang masalah atau kebijakan yang ditargetkan oleh para aktor.
- c. Siapa yang ada di dalam koalisi - donor, LSM, Ormas, lembaga semi pemerintah, dll. Penting untuk kita memahami mitra atau calon mitra. Intinya ini tentang Kemitraan dan bagaimana proses partisipasinya.
- d. Keterampilan dan kapasitas, termasuk sumber daya, jumlah, aliansi, koalisi, dan mitra.
- e. Belajar dari pengalaman diri dan orang lain yang sebelumnya pernah melakukan – analisa secara jujur tentang kesuksesan dan kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu.
- f. Inovasi dan kreativitas.
- g. Ruang dan peluang.
- h. Arahan dan mandat strategis, termasuk pemilihan area dan batasan, motivasi dan karakter
- i. Keberlanjutan dan peningkatan.

P. Tujuh Tahapan Advokasi Kebijakan yang Efektif

Meskipun langkah-langkah ini disajikan secara berurutan, dalam banyak kasus, beberapa proses ini bisa saja terjadi secara bersamaan. Selain itu, organisasi advokat mungkin perlu meninjau kembali langkah-langkah tertentu di bawah ini. Oleh karena itu, panduan langkah demi langkah ini adalah garis besar yang dapat dikonsultasikan, didiskusikan, dan disesuaikan ketika melakukan atau merencanakan strategi advokasi kebijakan.

Tabel 13. Tahapan Advokasi Kebijakan yang Efektif

TAHAPAN	AKTIVITAS	TINDAKAN
I	Identifikasi Masalah	Mulailah dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang dan atau akan dihadapi. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang mun-

cul dalam kebijakan, para advokat harus:

- Melakukan penelitian formatif: di dalamnya termasuk melakukan pemindaian atau analisis kebijakan yang melibatkan proses membaca kebijakan, mengkritisi kebijakan, dan mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi dalam kebijakan
 - Memahami lanskap akuntabilitas: organisasi mana saja yang menangani masalah yang serupa dan bagaimana arsitektur akuntabilitas mereka.
 - Lakukan konsultasi kepada komunitas: libatkan komunitas yang terpengaruh (terdampak) untuk melihat apakah ada yang tertinggal dalam analisis kebijakan yang telah anda lakukan. Pelibatan komunitas terdampak akan membantu kita selaku advokat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman mereka. Aktivitas Konsultasi kepada masyarakat terdampak harus menjadi proses yang berkelanjutan.
 - Strategi: organisasi Anda perlu menentukan arah terkait tindakan apa yang akan diambil berdasarkan hasil penelitian formatif, lanskap akuntabilitas, dan konsultasi kepada masyarakat.
-

II	Menilai Prioritas, Sumber Daya, dan Risiko Organisasi	Setelah Anda mengidentifikasi masalah, Anda harus menentukan apakah organisasi Anda telah memiliki sumber keuangan yang cukup dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan advokasi kebijakan. Penting juga untuk menentukan apakah akan ada risiko yang timbul bagi organisasi Anda, ketika organisasi anda terlibat dalam kegiatan advokasi kebijakan.
III	Libatkan Komunitas	Lakukan mobilisasi komunitas sehingga mereka menjadi komunitas yang aktif. Proses ini di dalamnya termasuk: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat - Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan aliterasi, diskusi, dan penyampaian informasi. Berikan pemahaman bagaimana cara membuat, menyusun, dan mendistribusikan materi advokasi baik itu melalui pamflet, booklet, atau manual yang menyediakan informasi yang relevan; - Memobilisasi masyarakat untuk melakukan aksi secara langsung. Apapun bentuknya, seperti kampanye, menyampaikan protes, atau pawai bersama apabila diperlukan.
IV	Libatkan Masyarakat Sipil	Membangun jaringan advokasi dan aliansi dengan organisasi masyarakat sipil terkait. Anda perlu mengidentifikasi mitra yang relevan yang

memiliki minat dalam masalah yang sama atau yang dapat berkontribusi melalui keahlian atau sumber daya yang dimilikinya untuk kegiatan advokasi kebijakan. Anda dapat bergabung dengan koalisi yang ada yang sedang melakukan, atau berencana untuk melakukan advokasi kebijakan untuk mengatasi masalah ini; atau Anda dapat membentuk aliansi baru.

Penting untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab mereka yang berada dalam struktur aliansi untuk menghindari konflik dan untuk memastikan bahwa aliansi beroperasi secara efektif dan optimal. Pastikan Anda bermitra dengan organisasi, atau orang-orang, yang berbagi pendirian dan pandangan Anda, yang berkomitmen pada tujuan aliansi dan untuk memenuhi peran dan tugas mereka dalam aliansi. Namun, waspadai 3 hal berikut:

- Waspadai jebakan dalam membangun aliansi: mencapai konsensus dalam kelompok besar terkadang dapat menyulitkan dan menghabiskan waktu. Anda mungkin harus mengambil tanggung jawab lebih dari apa yang anda bayangkan;
- Sadar akan kekuatan yang mungkin Anda miliki dalam aliansi. Pastikan Anda tidak menyalahgunakan kekuatan ini;

- Bersikaplah rendah hati, belajarlah untuk mendengarkan dan jangan memaksakan pandangan atau prioritas Anda kepada pada orang lain.

Advokasi kebijakan biasanya berupaya melibatkan berbagai aktor pemerintahan yang meliputi pegawai, pembuat kebijakan, pejabat terpilih (kepala daerah), dan legislator serta menteri.

Organisasi harus membangun hubungan dengan para pengambil keputusan seperti pembuat kebijakan dan staf pelaksana kebijakan. Dalam membangun hubungan-hubungan ini, organisasi tersebut harus melibatkan para pejabat dengan membuat rekomendasi (pengajuan) kepada lembaga-lembaga yang terlibat atau ditugaskan untuk melakukan penelitian tentang masalah atau bidang hukum atau kebijakan tertentu untuk mengembangkan undang-undang baru, atau mengubah undang-undang yang ada atau kebijakan yang sudah ada. Rekomendasi harus didukung dengan alasan yang logis dan kuat. Selain itu, waspadai siapa yang merupakan sekutu, lawan, atau yang berbeda dengan posisi Anda, sehingga Anda dapat menyusun strategi yang ditargetkan untuk terlibat dengan mereka pada level yang berbeda dan untuk memengaruhi mereka untuk mendukung posisi Anda.

v Libatkan
Pemerintah

VI	Libatkan Media	<p>Media dapat digunakan sebagai sumber daya untuk membantu kegiatan advokasi kebijakan, untuk mendapatkan dukungan masyarakat, dan mempengaruhi para pembuat kebijakan. Organisasi Anda harus mengidentifikasi sumber media mana yang harus didekati untuk menyampaikan pesan utama kepada publik. Aktivitas ini dapat mencakup penulisan artikel dan siaran pers untuk media cetak; menggunakan media sosial untuk menulis potongan opini organisasi; atau menggunakan radio atau televisi untuk wawancara atau debat, yang dapat memfasilitasi dialog publik tentang masalah ini. Cobalah untuk melibatkan anggota masyarakat jika memungkinkan.</p>
VII	Mengukur Efek (memantau, mengevaluasi, dan meminta pertanggungjawaban)	<p>Selama proses advokasi kebijakan, Anda harus menyadari dampak kegiatan Anda terhadap orang-orang di lapangan serta di level tertinggi pemerintahan. Dengan melakukan itu, Anda akan dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan upaya yang lebih besar, strategi baru atau mereka yang perlu dimintai pertanggungjawabannya. Misalnya, jika tidak cukup banyak orang yang menyadari adanya masalah, Anda mungkin perlu meningkatkan dengan cara melibatkan media untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, atau Anda mungkin perlu memperkuat</p>

basis dukungan Anda dengan mengundang lebih banyak organisasi masyarakat sipil untuk bergabung dengan tujuan Anda. Anda bahkan dapat mempertimbangkan untuk melembagakan proses hukum terhadap pemerintah melalui pengadilan jika kegiatan advokasi kebijakan Anda tidak berhasil dan kebijakan tersebut, misalnya, melanggar hak asasi manusia. Pastikan juga untuk terus memantau implementasi kebijakan dan penegakan hukum (aturan). Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan dan hukum yang terbaik sekalipun tidak akan berarti.

Q. Kemampuan Dasar dalam Melakukan Advokasi Kebijakan

Seseorang yang ingin melakukan Advokasi kebijakan perlu memiliki keterampilan dan sikap dasar. Hal tersebut perlu dimiliki untuk memastikan aktivitas advokasi tidak terganggu. Pengetahuan dan keterampilan Advokat akan terus berkembang seiring berjalannya proses kegiatan advokasi kebijakan. Paling tidak, kemampuan dasar ini akan menjadi modal bagi Advokat untuk terus berkembang dan semakin baik. Berikut beberapa Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh advokat:

1. Kredibilitas

Sebagai seorang advokat, penting untuk dipahami bahwa pemerintah, lembaga, dan masyarakat tempat kita akan melakukan advokasi memercayai organisasi dan menghargai apa yang kita katakan. Salah satu jaminan untuk membuat advokasi menjadi efektif adalah kredibilitas. Keahlian yang berkualitas dan kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan mitra adalah hal yang mutlak dimiliki seorang advokat. Kemampuan untuk membangun kepercayaan yang ditopang dengan keahlian melakukan penelitian dan analisis yang kuat akan membentuk landasan kredibilitas seorang advokat.

2. Keterampilan

Advokasi adalah keterampilan yang menggabungkan pengetahuan, penilaian yang baik dan pemecahan masalah yang kreatif. Membangun keterampilan untuk advokasi membutuhkan komitmen organisasi untuk melakukan (memberikan) pelatihan, pengembangan kapasitas dan mempromosikan kemampuan staf untuk terlibat dengan berbagai macam orang, baik di kantor maupun dengan mitra.

Maka, penting untuk memperhatikan beberapa hal penting berikut:

- a) Apakah kantor memiliki staf dengan keterampilan advokasi yang kuat untuk melakukan analisis, penelitian, dan komunikasi?. Jika tidak, bisakah keterbatasan itu menarik audien, mitra, dan organisasi lain untuk bergabung dengan kita?
 - b) Apakah anggota staf memiliki pengetahuan teknis yang memadai untuk mengembangkan strategi advokasi dan mengimplementasikannya?
 - c) Adakah staf yang memiliki kapasitas dan keterampilan untuk melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi?
- ## 3. Koordinasi dan kepemimpinan antar-kantor

Karena kita semua bekerja untuk tujuan yang sama – terjadinya perubahan yang positif - semua orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah advokat, orang atau organisasi yang bersama-sama melakukan 'advokasi'. Advokasi adalah keterlibatan, karena itu advokasi membutuhkan kolaborasi yang kuat antara anggota dan staf serta budaya kepemimpinan yang kuat untuk membuka jalan kesuksesan advokasi. Harus ada cara-cara kreatif untuk menghubungkan dan menyatukan berbagai sektor/unit program, untuk mengumpulkan bukti secara lebih efektif, untuk menganalisisnya, untuk mengkomunikasikan, dan untuk mempengaruhi masyarakat dan para pembuat keputusan.

Elemen yang perlu dipertimbangkan:

- a) Apakah ada pola koordinasi dan komunikasi yang bertingkat antar sektor untuk bekerja bersama dalam membuat, menyusun, dan mengembangkan strategi advokasi yang terkoordinasi?

- b) Apakah ada kepemimpinan yang kuat di kantor untuk melakukan advokasi, termasuk dukungan dari manajemen paling atas?
 - c) Apakah semua orang di kantor memahami peran dan tanggung jawab advokasi mereka?
 - d) Apakah ada mekanisme untuk semua staf untuk mengetahui prioritas dan pesan advokasi.
4. Kapasitas untuk menghasilkan dan mengkomunikasikan bukti.

Bukti untuk melakukan advokasi memberikan kredibilitas dan otoritas kepada organisasi, sehingga memungkinkan tim advokasi bisa meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendukung suatu masalah. Kemampuan mengumpulkan data, melakukan penelitian, menganalisis data dan situasi, kekuatan organisasi, dan manajemen yang baik akan memberikan bukti yang kuat bahwa organisasi advokat memiliki kredibilitas dan kapasitas.

Bukti-bukti tersebut kemudian harus dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam advokasi kebijakan. Pastikan komunikasi dilakukan pada waktu yang tepat dan komunikasi bisa dipahami oleh audien. Pilih format terbaik untuk menyampaikan informasi - sehingga pengetahuan bisa dikomunikasikan dengan jelas, dapat diserap dan berdampak pada tujuan. Tampilkan masalah di lapangan berdasarkan bukti yang dihasilkan melalui serangkaian kajian. Tunjukkan penyebab terjadinya masalah dan berikan solusi untuk masalah tersebut. Sampaikan dengan transparan tentang metodologi yang digunakan dalam menggali data. Tidak melebih-lebihkan temuan dan berdasarkan fakta. Perilaku seperti itu akan menambah kredibilitas dan akan membantu advokat dalam mendapatkan keuntungan dan dukungan ketika sedang melakukan proses advokasi.

5. Kemampuan menilai risiko

Ada risiko ketika memilih untuk melakukan advokasi. Begitu juga sebaliknya, ada risiko ketika memilih untuk tidak melakukan advokasi. Apapun pilihannya, semuanya dapat memengaruhi kredibilitas dan otoritas tim advokat, atau mitra advokat. Semua orang yang terlibat akan terpengaruh oleh pilihan-pilihan tersebut. Sebagai advokat, baik perseorangan maupun atas nama organisasi, kita

perlu mengevaluasi setiap potensi risiko yang akan terjadi ketika melakukan advokasi atau tidak melakukan advokasi. Dengan melakukan evaluasi advokat juga bisa memprediksi potensi keuntungan dan kerugian yang akan diraih ketika melakukan advokasi dan tidak melakukan advokasi. Harapannya, dengan adanya evaluasi, advokat bisa mengelola risiko ketika melakukan advokasi.

Ada beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan ketika menilai risiko advokasi:

- a) Apakah anggota staf telah bersedia, telah didorong dan telah didukung dalam mengambil risiko advokasi yang telah dikalkulasikan sebelumnya?
 - b) Apakah organisasi memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan mitigasi risiko dan keahlian dalam bidang manajemen risiko?
 - c) Apakah para advokat telah memiliki bukti yang kuat untuk melakukan advokasi?
 - d) Berdasarkan analisa risiko, apakah para advokat dapat diandalkan?. Pastikan fungsi koordinasi berjalan dengan baik, kepemimpinan internal kuat, dan kemitraan sudah terjalin dengan baik (misalnya dengan Yayasan, LSM, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan lembaga-lembaga pemerintah yang bermitra dengan kita). Pastikan lembaga-lembaga mitra yang dimaksud bisa membantu meminimalkan risiko.
 - e) Apakah semua risiko dan keuntungan jangka panjang maupun jangka pendek telah diperhitungkan dengan cermat?, terutama yang berkaitan dengan dampak bagi kelompok yang diadvokasi, orang-orang yang terlibat dalam proses advokasi. Pastikan risiko-risiko tersebut tidak mengancam kredibilitas advokat, pendanaan, dan tujuan strategis advokasi.
 - f) Apakah analisis kerentanan dan kapasitas telah dilakukan?. Pastikan semuanya telah dilakukan untuk mengurangi potensi risiko.
6. Mitra dan jaringan yang membentuk basis luas untuk advokasi
- Kemampuan untuk membangun hubungan - pribadi, publik dan kelembagaan - sangat penting untuk advokasi yang efektif. Hubungan yang baik memungkinkan organisasi untuk menjangkau

sasaran secara efektif, atau mengatasi kesenjangan dengan cara menghubungkan sasaran dengan komunitas yang berpengaruh, serta menghasilkan massa yang kritis terhadap permasalahan yang sedang di advokasi. Membangun hubungan semacam itu membutuhkan pemahaman akan dinamika kekuasaan dan memiliki kapasitas untuk melibatkan khalayak melalui berbagai platform dan forum. Ketika hubungan dipupuk dengan baik, orang-orang akan merespons dan memberikan dukungan kepada Anda, tetapi Anda juga harus siap untuk merespons dengan cara yang tepat waktu dan tekun. Timbal balik, responsif, dan tanggung jawab memperkuat, membangun, dan mempertahankan kemitraan adalah kunci penting dalam advokasi

Ada beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam membangun basis advokasi, di antaranya:

- a) Seberapa kuat keterlibatan kita dengan lembaga pemerintahan, misal: Kementerian sosial, Kesehatan, dan Pendidikan?
 - b) Seberapa kuat keterlibatan kita dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perekonomian?
 - c) Seberapa kuat keterlibatan dengan lembaga Donor? Misal: Bank Dunia dan/atau lembaga keuangan internasional lainnya?
 - d) Seberapa kuat keterlibatan kita dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama?
 - e) Seberapa kuat keterlibatan kita dengan LSM domestik (lokal), lembaga *think tank*, lembaga pusat kajian, dan universitas untuk menghasilkan kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di advokasi?
 - f) Seberapa kuat keterlibatan kita dengan sektor swasta?
 - g) Apakah kita memiliki sekretariat bersama yang akan digunakan oleh mitra koalisi, aliansi atau jaringan?. Jika demikian, apakah mereka juga terlibat secara langsung dalam kegiatan advokasi tersebut?
7. Sumber daya yang memadai untuk melakukan Advokasi secara intensif.

Kegiatan advokasi kadang kala membutuhkan investasi dana yang tidak sedikit, membutuhkan waktu, membutuhkan tim, dan materi. Sokongan dana tersebut kadang kala dibutuhkan dalam periode waktu yang panjang. Ketersediaan sumber daya sering mengubah bentuk strategi advokasi dan bagaimana itu direncanakan. Karena itu, sangat penting untuk mengetahui kemungkinan sumber daya apa yang akan tersedia untuk melakukan advokasi dari awal hingga selesai.

Ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan terkait ketersediaan sumber daya, diantaranya:

- a) Apakah memiliki sumber daya yang memadai - keuangan, waktu, keterampilan, pengetahuan – untuk melakukan advokasi?
- b) Apakah ada upaya lain yang sedang dilakukan untuk memobilisasi sumber daya tambahan, baik finansial maupun non-finansial, melalui donor, individu, atau sektor swasta?
- c) Apakah ada upaya untuk menunjukkan bagaimana sumber daya yang tersedia untuk melakukan advokasi dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibanding uang dan waktu yang telah disediakan?
- d) Dapatkah tujuan advokasi diintegrasikan?, misalnya, menggabungkan kesehatan, pendidikan dan perlindungan anak?

R. Monitoring dan Evaluasi Advokasi Kebijakan

Beberapa dari kita mungkin sudah terbiasa dengan kegiatan monitoring dan evaluasi (M&E) sebuah proyek dan program. Monitoring dan evaluasi bisa membantu melacak kemajuan sebuah proyek, meningkatkan kinerja, dan mencapai hasil yang ditetapkan. Namun, monitoring dan evaluasi untuk proyek dan advokasi itu dua hal yang berbeda. Dalam konteks advokasi, monitoring dan evaluasi bisa membantu advokat untuk menentukan cara terbaik dalam mendemonstrasikan kemajuan capaian sasaran dan sasaran strategi advokasi kita.

Monitoring adalah proses sistematis mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi atau data tentang indikator proyek tertentu untuk: melacak kemajuan pelaksanaan proyek, melacak kemajuan untuk mencapai tujuan, mempertanggungjawabkan peng-

gunaan dana yang telah dialokasikan, dan menjadi petunjuk bagi manajemen dan membuat keputusan. Informasi tersebut digunakan oleh staf proyek, pihak manajemen, dan para pemangku kepentingan. Monitoring berlangsung selama proses penerapan strategi advokasi kebijakan, sementara evaluasi dilakukan menjelang akhir kegiatan advokasi.

Sementara, Evaluasi dibuat untuk mengukur keberhasilan intervensi kebijakan yang telah dipilih advokat. Evaluasi fokus pada hasil dan dampak proyek. Keluarannya adalah hasil atau akibat yang disebabkan oleh atau dikaitkan dengan proyek, program, atau kebijakan. Sebagai akibat dari perubahan kebijakan dampaknya bisa bertahan lama. Tujuan evaluasi adalah untuk menginformasikan keputusan, membandingkan ekspektasi dengan hasil, dan memeriksa faktor kontekstual dan kausalitas untuk lebih memahami pencapaian. Oleh sebab itu, penting untuk merencanakan monitoring dan evaluasi sebelum strategi advokasi kebijakan diterapkan; Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari pengembangan strategi. Advokasi merupakan aktivitas yang bersifat kontinuitas dan tidak berakhir - advokasi adalah proses pembelajaran perencanaan, refleksi, dan tindakan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu aktivitas advokasi harus dievaluasi dengan cara yang sama seperti kampanye komunikasi lainnya. Karena advokasi sering kali hanya memberikan hasil parsial, tim advokasi perlu memantau dan mengukur secara teratur dan obyektif apa yang telah dicapai dan apa lagi yang harus dilakukan.

Monitoring adalah ukuran kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kegiatan mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak. Sedangkan Evaluasi adalah tentang menilai kualitas dan dampak kegiatan. Evaluasi menanyakan mengapa beberapa tindakan berjalan dengan baik dan yang lainnya tidak, dan mengapa beberapa kegiatan memiliki dampak yang diinginkan sementara yang lainnya tidak. Evaluasi proses (bagaimana Anda bekerja) dan evaluasi dampak (apa yang berubah) merupakan beberapa contoh dari pekerjaan evaluasi.

Kegiatan advokasi yang sering kali dilakukan di lingkungan yang bergejolak. Sering kali, kita tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti

setiap langkah dalam proses advokasi sesuai dengan model yang disajikan di sini. Namun demikian, pemahaman yang sistematis dari proses advokasi akan membantu advokat merencanakan dengan bijaksana, menggunakan sumber daya secara efisien, dan tetap fokus pada tujuan advokasi.

Ada banyak cara untuk memantau dan mengevaluasi kerja advokasi. Metodenya bisa: kualitatif (misalnya studi kasus, cerita, pendapat, kuesioner survei) atau kuantitatif (misalnya statistik atau tren yang menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu). Metode monitoring harus dipilih sesuai dengan indikator yang Anda pilih untuk mengevaluasi dampak pekerjaan Anda. Metode monitoring mungkin termasuk:

- a) Menyimpan catatan pertemuan, korespondensi atau percakapan dengan khalayak sasaran dan tanggapan yang diperoleh dari hasil wawancara;
- b) Melacak kapan pesan penting atau catatan singkat Anda digunakan oleh pejabat terpilih, *influncer*, atau media;
- c) Melakukan survei dan wawancara untuk menentukan dampak tindakan yang Anda lakukan;
- d) Memantau media dan melacak liputan topik yang berkenaan dengan kegiatan advokasi Anda di media.

Evaluasi harus didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan di awal proses perencanaan advokasi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diajukan untuk mengevaluasi dampak kegiatan advokasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

- 1) Sudahkah tujuan advokasi tercapai?
- 2) Berapa banyak pertemuan yang Anda lakukan dengan pembuat keputusan (target utama) dan apa hasil dari pertemuan tersebut?
- 3) Tindakan apa yang telah diambil oleh pembuat keputusan tersebut?
- 4) Apakah situasinya lebih baik daripada sebelum dilakukan advokasi? Seberapa banyak perubahannya? Jika tidak ada perubahan, bagaimana Anda bisa mengubah metode advokasi Anda?
- 5) Setelah mengamati hasil keseluruhan, apa yang akan anda lakukan?

- 6) Apakah orang-orang yang terlibat dalam upaya advokasi senang dengan hasil dan cara kerja yang telah dilakukan? Apakah mereka masih terlibat?

Advokasi sering kali merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi, daripada hanya bertujuan untuk satu kebijakan atau bagian dari undang-undang, rencana advokasi mungkin memiliki tujuan dan sasaran ganda atau bahkan berubah. Idealnya, rencana advokasi harus dirancang agar berkelanjutan dari waktu ke waktu. Merencanakan kesinambungan berarti mengartikulasikan tujuan jangka panjang, menjaga koalisi fungsional bersama dan menyesuaikan metode advokasi saat situasi berubah.

Dalam waktu jangka panjang, Anda perlu mengevaluasi situasi yang dihasilkan dari kegiatan advokasi. Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi, dan tindakan yang perlu direkomendasikan untuk dilakukan, seperti:

- 1) Jika terjadi perubahan kebijakan yang diinginkan, pantau implementasinya.
- 2) Jika perubahan kebijakan yang diinginkan tidak terjadi, tinjau strategi dan tindakan advokasi sebelumnya, revisi strategi, lakukan proses advokasi baru atau identifikasi tindakan lain yang akan diambil.
- 3) Kembangkan rencana untuk mempertahankan atau memperkuat perubahan yang diinginkan.

Tabel 14. Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi

No	Istilah-istilah Umum Monitoring dan Evaluasi	Terminologi
1	Tujuan (<i>Goal</i>)	Tujuan tingkat tinggi – di mana proyek, program, atau kebijakan dimaksudkan untuk berkontribusi; pernyataan luas tentang hasil yang diinginkan, biasanya jangka panjang, dari suatu program/intervensi.

		Tujuan membantu pengembangan program/intervensi. Setiap tujuan memiliki seperangkat tujuan spesifik yang saling terkait, yang jika dipenuhi secara kolektif akan memungkinkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
2	Aktivitas (<i>Activity</i>)	Tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari strategi advokasi untuk mencapai tujuan.
3	Data	Informasi atau fakta (kuantitatif/kualitatif) spesifik yang dikumpulkan dan dianalisis.
4	Metode Pengumpulan Data (<i>Data Collection Methods</i>)	Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber informasi, mengumpulkan informasi, dan meminimalkan bias selama evaluasi.
5	Dampak (<i>Impact</i>)	Hasil atau akibat yang disebabkan oleh suatu proyek atau program. Istilah Dampak sering digunakan untuk merujuk pada efek tingkat tinggi dari suatu program yang terjadi dalam jangka menengah atau panjang, dapat disengaja atau tidak disengaja, dan positif atau negatif.
6	Indikator (<i>Indicator</i>)	Variabel kuantitatif atau kualitatif yang memberikan cara yang valid dan andal untuk mengukur pencapaian, menilai kinerja, atau mencerminkan perubahan yang terkait dengan intervensi.
7	Masukan (<i>Inputs</i>)	Sumber daya keuangan, manusia, dan material yang digunakan dalam program/intervensi.
8	Model Logika (<i>Logic Model</i>)	Representasi, sering kali visual, yang menyediakan peta jalan untuk menunjukkan urutan kejadian terkait kebutuhan program yang direncanakan dengan

		keluaran dan hasil yang diinginkan dari program.
9	Objektif (<i>Objective</i>)	Pernyataan hasil program/intervensi yang diinginkan yang memenuhi kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-phased</i> (SMART). Kemajuan menuju suatu tujuan biasanya dicapai melalui tujuan tertentu.
10	Hasil (<i>Outcomes</i>)	Efek jangka pendek dan menengah dari keluaran intervensi, seperti perubahan dalam pengetahuan, sikap, keyakinan, perilaku. Hasil mengukur keefektifan strategi dan menjawab pertanyaan: Apa efek yang dimiliki suatu kegiatan?
11	Keluaran (<i>Output</i>)	Hasil kegiatan program/intervensi; produk atau hasil langsung dari kegiatan program/intervensi, seperti jumlah sesi konseling HIV yang diselesaikan, jumlah orang yang dilayani, atau jumlah kondom yang didistribusikan. Keluaran mengukur kemajuan dalam pelaksanaan strategi dan menjawab pertanyaan: Apakah kegiatan telah dilakukan?
12	Rencana Pemantauan Kinerja	Rencana yang digunakan untuk menjelaskan tujuan, sasaran, indikator, target proyek, proses untuk mengumpulkan data, melacak sumber informasi, dan menganalisis data untuk memantau dan menilai kinerja.
13	Target	Tujuan program/intervensi. Dinyatakan sebagai nilai yang terukur; nilai yang diinginkan untuk indikator pada titik waktu tertentu. Definisi alternatif: Hasil yang ditentukan, sering dinyatakan dengan nilai indikator, yang ingin dicapai oleh suatu proyek, program, atau kebijakan.

Seperti yang sah disebutkan di atas, bahwa Monitoring dan evaluasi untuk Advokasi Kebijakan itu berbeda dengan Monitoring dan Evaluasi untuk Program. Untuk memahami perbedaannya, maka kita harus paham Model Logika (*Logic Model*) Monitoring dan Evaluasi.

Model logika (*Logic Model*) adalah dasar dari banyak kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Model logika (*Logic Model*) menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh program dan apa yang capaian apa yang diharapkan dari program tersebut. Model logika (*Logic Model*) merupakan aplikasi Monitoring dan Evaluasi yang baik untuk diterapkan dalam program kita. Komponen-komponen dalam Model logika (*Logic Model*) menggambarkan hubungan antara pekerjaan yang direncanakan dengan hasil yang diinginkan.

Gambar 17. Struktur Dasar Model Logika



Agar lebih Paham, mari kita buat contoh proyek (program). Berikut adalah contoh sederhana dari model logika. “Proyek” yang akan kita buat ada adalah proyek “Pesta Perkawinan”. Di sini, Input adalah sumber daya yang masuk ke dalam program atau proyek, seperti uang, staf, peralatan, dan bahan atau perlengkapan yang sudah disediakan. Untuk *Input* dalam kegiatan ini terdiri dari pasangan, anggaran, tempat, anggota keluarga, undangan, dan Vendor. Dalam contoh ini, aktivitasnya meliputi menyewa vendor, perlengkapan pernikahan, akad nikah, Resepsi, dan berbulan madu. Outputnya adalah hasil dari kegiatan, seperti jumlah foto yang diambil pada saat prosesi akad nikah dan resepsi. Hasilnya adalah efek yang dicapai — calon pengantin menikah dan menikmati waktu bersama dengan undangan dan keluarga. Dampaknya adalah ikatan keluarga yang lebih kuat dan bertahan lama.

Tabel 15. Contoh Model Logika

INPUT →	AKTIVITAS →	OUTPUT →	HASIL →	DAMPAK
Calon Pasangan	Menyewa Vendor	Cetak Photo	Calon Pasangan:	Ikatan Keluarga yang Kuat
Anggaran	Menyiapkan Prosesi	Surat Nikah	- Selesai Prosesi Akad Nikah	Terbentuknya Keluarga Bahagia dan Panjang Umur
Tempat	Akad Nikah	Katering untuk Pesta	- Pelaksanan Resepsi Berhasil	
Keluarga dan Undangan	Resepsi	Tukar Pasang Cincin	- Pasangan pengantin Menikmati Pesta perkawinannya	
Vendor	Berbulan Madu	Penerimaan Kado		

Untuk mengukur Input, kegiatan, keluaran, dan hasil, kita membutuhkan indikator. Di sini indikator akan menentukan data yang akan kita kumpulkan. Indikator adalah variabel (nilainya bisa berubah) yang mengukur komponen program atau proyek (input, kegiatan, keluaran dan hasil). Indikator bisa berupa kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kuantitatif dapat dihitung, contohnya jumlah jarak yang ditempuh, atau penghitungan — seperti tarif, rasio, atau persentase. Salah satu contoh yang bisa digunakan adalah contoh di atas, Kegiatan Pesta Perkawinan, misalnya kita ingin membuat indikator prosentase foto yang dicetak dari total foto yang diambil dalam pesta tersebut. Masih dari contoh yang sama, untuk contoh indikator input kita bisa mengukur jumlah dan jenis kelamin anggota keluarga dan teman yang datang ke pesta pernikahan tersebut.

Indikator harus ditulis dengan baik dan didefinisikan dengan baik. Secara Khusus Indikator membantu menstandarkan pengumpulan

data program. Ada beberapa karakteristik indikator yang baik. Pertama, harus Valid, atau ukuran yang akurat dari perilaku, praktek, atau tugas yang merupakan keluaran atau hasil yang diharapkan dari aktivitas. Kedua, harus Presisi — atau didefinisikan secara operasional dengan istilah yang jelas. Ketiga, Bisa diukur atau dikuantifikasi dengan menggunakan alat yang tersedia. Penting untuk mendokumentasikan sumber data yang akan Anda gunakan untuk mengukur indikator Anda dan cara Anda mengumpulkan data tersebut. Kebanyakan rencana Monitoring dan Evaluasi disusun dalam bentuk matriks indikator atau rencana monitoring kinerja. Keempat, Sebuah indikator juga harus dapat diandalkan — artinya dapat diukur secara konsisten dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Kelima, indikator tersebut harus bisa dibandingkan — atau dapat diukur dalam konteks atau periode waktu yang berbeda. Keenam, Indikator juga harus terikat waktu — tenggat dan target pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi. Ketujuh, indikator harus terprogram dengan baik dan terukur. Jangan sampai mengumpulkan data tentang sesuatu hanya karena Anda bisa mengerjakannya; alih-alih, fokuslah pada hal-hal yang membantu menginformasikan hasil yang diharapkan, membantu perbaikan program, dan membantu pembuatan keputusan oleh manajemen.

Sekarang, mari kita lihat Monitoring dan Evaluasi untuk kegiatan advokasi. Ingat, monitoring adalah memantau aktivitas rutin dari input dan output. Sedangkan Evaluasi mengukur dampak program yang terjadi dari waktu ke waktu. Mari kita lihat lebih dalam tentang jenis indikator yang cocok untuk Monitoring dan Evaluasi advokasi. Indikator sesuai dengan berbagai tahap/komponen model logika. Kita sepakati bahwa Indikator proses/keluaran adalah hasil langsung dari kegiatan; misalnya, "jumlah mitra baru yang terlibat dalam koalisi". Sedangkan, indikator hasil sementara dari aktivitas adalah efek yang menunjukkan "jumlah mitra baru yang berbagi harapan dan disetujui oleh koalisi". Terakhir, untuk Indikator hasil jangka panjang adalah perubahan kebijakan yang kita anjurkan.

Sekarang mari kita lihat di mana indikator yang cocok dengan model logika?. Untuk contoh model logika ini, kita akan melakukan

advokasi program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah akses layanan kesehatan bagi penderita HIV (ODHA). Indikator untuk mengukur aktivitas "melibatkan mitra baru dalam koalisi", dapat juga berupa "jumlah mitra yang dihubungi". Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya mitra yang terlibat dalam koalisi. Indikatornya adalah "jumlah mitra yang terlibat dalam koalisi". Maksud dari "mitra terlibat" adalah mitra yang harus menandatangani memorandum, menugaskan salah satu stafnya untuk mewakili organisasi dalam koalisi, dan menghadiri setiap pertemuan. Untuk memastikan setiap orang memiliki definisi yang sama, maka dibuatlah dokumentasi beserta dengan indikatornya. Sementara, Hasil adalah mitra baru yang secara aktif berpartisipasi dalam koalisi. Indikatornya dapat diukur dengan "jumlah mitra baru yang berbagi harapan yang disetujui oleh koalisi."

Terakhir adalah dampak, indikatornya adalah "jumlah ODHA yang mengakses layanan". Dampaknya dapat diukur melalui Monitoring yang dilakukan secara rutin. Agar bisa mengukur dengan tepat adanya perubahan setelah intervensi, istilah seperti "layanan" dan "mengakses" juga perlu didefinisikan dalam matriks indikator atau lembar referensi untuk menentukan jenis layanan dan bagaimana mereka diakses.



Ada beberapa ciri khusus dalam memantau dan mengevaluasi kerja-kerja advokasi. Pertama, Kerangka waktu tidak dapat diprediksi, berapa lama kita akan melakukannya?. Aktivitas advokasi kebijakan, sering kali membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan tak jarang

hingga bertahun-tahun. Makanya, penting untuk tidak hanya fokus pada "kesuksesan" kebijakan akhir sebagai ukuran keberhasilan. Mengumpulkan data Monitoring dan Evaluasi untuk melihat perkembangan sementara dari advokasi dapat memberikan sejumlah gambaran (kemajuan) dari kegiatan advokasi. Kedua, Strategi advokasi sering berubah seiring dengan lanskap kebijakan yang berubah. Ketika melakukan Monitoring dan Evaluasi, tidak menutup kemungkinan kita harus menyesuaikan indikator dan hasil yang diharapkan untuk memastikannya tetap realistis. Ketiga, Konteks merupakan pertimbangan penting ketika mengidentifikasi pendekatan Monitoring dan Evaluasi apa yang akan digunakan dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam menafsirkan data evaluasi. Misalnya, kemajuan dalam mencapai tujuan akan dipengaruhi oleh keterbukaan para pemangku kepentingan untuk berubah. Pertimbangan lainnya adalah tingkat pengaruh yang dapat dimiliki pemangku kepentingan; jika kekuasaan pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu orang atau lembaga, ini mungkin akan berpengaruh pada jumlah perubahan yang mungkin dilakukan.

Ada sebuah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan, "Bagaimana kita bisa secara efektif melakukan Monitoring dan Evaluasi advokasi, jika itu bergantung pada informasi yang sering kali tidak dapat diakses, seperti pernyataan pejabat pembuat kebijakan?". Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi advokasi. Dalam kasus ini, beberapa cara konvensional (kebiasaan) dalam pengumpulan data Monitoring dan Evaluasi, seperti wawancara, survei, FGD, dan observasi masih bisa digunakan. Namun, ada juga metode unik yang bisa digunakan untuk lebih mempermudah dalam pengumpulan data, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan perencanaan kerja advokasi. Mari kita bahas dua opsi unik yang dimaksud — baik pada peringkat pembuat kebijakan maupun pada peringkat pengamatan peristiwa.

Gambar 19. Penggunaan Metode dalam Pengumpulan Data

TRADISIONAL	UNIK	
Wawancara	Bellwether Methodology	Champion Tracking
Survei	Intense Period Debiefs	Media Scorecards
FGD	Critical Incident Timelines	360-Degree Critical Incident Reviews
Pengamatan Peristiwa	System Mapping	Research Panels
Poling	Policymaker Ratings	Social Media Tracking
Studi Kasus	Intercept Interviews	Rapid Response Research

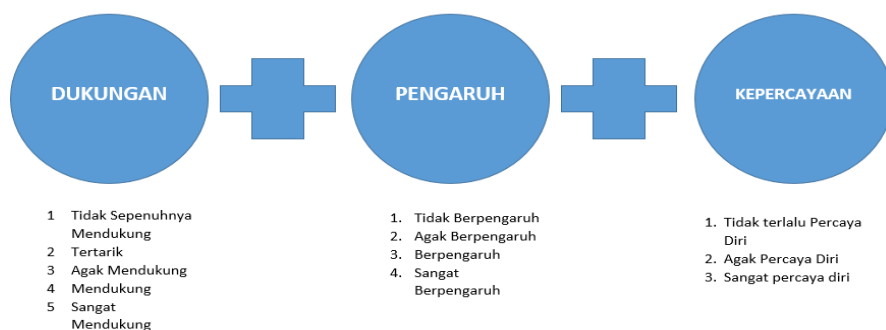
Sumber : *Building on The Easy Wins: A Framework for planning and Evaluating Proactive Long-Term Policy Advocacy. Health Policy; 2015*

Penyusunan Penilaian Pembuat Kebijakan (*Policymaker Ratings*) adalah menilai pembuat kebijakan pada masalah tertentu. Sistem peringkat dapat digunakan untuk mengukur dukungan pembuat kebijakan terhadap usaha perubahan kebijakan yang ditargetkan. Metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil dari intervensi kebijakan tertentu atau mengumpulkan data dalam rangka menyusun strategi advokasi dan menentukan target.

Advokat dapat memberikan skor kepada pembuat kebijakan setelah melihat tiga karakteristik berbeda — dukungan mereka terhadap tujuan Advokasi, pengaruh mereka, dan tingkat kepercayaan advokat terhadap peringkat tersebut. Organisasi Advokasi perlu menentukan skala penilaian dan menetapkan indikator perilaku apa yang diperlukan untuk memberikan skor penilaian untuk masing-masing karakteristik tersebut. Sumber Informasi untuk memberikan penilaian dapat berasal dari apa yang sudah kita ketahui atau melalui hasil pengamatan langsung terhadap pembuat kebijakan. Penting untuk menerapkan skala penilaian ini secara konsisten terhadap seluruh pembuat kebijakan.

Untuk melihat adanya perubahan sebagai hasil dari intervensi kebijakan, selesaikan penilaian pada tahap awal dan pada tahap akhir dan amati perbedaannya. Konsistensi dalam penilaian adalah kunci untuk melihat adanya perubahan. Kita harus menunjukkan kepada seluruh Stakeholder bahwa penilaian tersebut kita lakukan dengan membandingkannya dari waktu ke waktu. Selain itu, penilaian yang kita lakukan dapat digunakan untuk mendokumentasikan kontribusi kita terhadap perubahan kebijakan.

Gambar 20. Contoh Metode Policymaker Ratings



Catatan: Anda harus mengidentifikasi karakteristik atau perilaku yang dapat diamati yang membedakan setiap "level" pada skala untuk konsistensi antara penilai dan peringkat.

Dikembangkan Oleh: Julia Coffman, Harvard Family Research Project

DAFTAR PUSTAKA

- Afonja Simi and Pearce Olu (eds.) (1984): *Social Change in Nigeria*. Essex, Longman.
- Ake Claude (1981): *A Political Economy of Africa*. Nigeria, Longman.
- Altan, Ö. Z. (2009). *Sosyal Politika Dersleri*, (3. Baskı). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
- Amalinda Savirani dan Ian Wilson (2018). *Menyoal jarak: Hunian sosial bagi masyarakat miskin, Inside Indonesia*, Retrived From: <https://www.insideindonesia.org/menyoal-jarak-hunian-sosial-bagi-masyarakat-miskin>
- Anderson, D. (1991) *The Unmentionable Face of Poverty in the Nineties: Domestic Incompetence, Improvidence and Male Irresponsibility in Low Income Families*, London, Social Affairs Unit.
- Anderson, J. E.,(2015) *Public Policymaking*, 8th Edition. Cengage Learning
- Anele K.A (1999): *Social Change and Social Problems in Nigeria*. Port Harcourt, Springhold.
- Annur, C. M., (2021), *Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja (Februari 2021)*, Diakses pada 9 September 2021, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/05/191-juta-penduduk-usia-kerja-terdampak-covid-19-pada-februari-2021>
- Aravacık, E. D. (2018). *Social Policy and the Welfare State*. In *Public Economics and Finance*. IntechOpen.
- Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1970). *Power and poverty: Theory and practice*. Oxford University Press
- Barash, P. (1981) *Sociobiology: The Whisperings Within*, London, Fontana.
- Barker, R. L. (2003). *The social work dictionary (5th ed.)*. Washington, DC: NASW Press.
- Barker, R. L. (2003). *The social work dictionary*.

- Barlow, J. and Duncan, S. (1994), Success and failure in housing provision. European systems compared. Oxford: Pergamon Press.
- Barnes, J., & Srivenkataramana, T. (1982). Ideology and the Welfare State: An Examination of Wilensky's Conclusions. *Social Service Review*, 56 (2), 230-245. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/60000100>.
- Barrientos, Armando. 2012. "Welfare Regimes." InterAmerican Wiki: Terms - Concepts - Critical Perspectives. www.uni-bielefeld.de/cias/wiki/w_Welfare_Regims.html.
- Bempah, B.S.O. (2012). Policy Implementation: Budgeting and Financial Management Practices of District Health Directorates in Ghana. Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok
- Benson, C. and E. Clay (2003). Economic and Financial Impacts of Natural Disasters: as Assessment of Their Effects and Options for Mitigatin: Synthesis Report. . Overseas Development Initiative and Disaster Management Facility. Washington D.C., World Bank.
- Berger, P. and Luckmann, T. (1967) *The Social Construction of Reality*, London, Allen Lane.
- Bernard, J. (1958). Social problems as problems of decision. *Social Problems*, 6(3), 212-221.
- Beveridge, William, H. (2015). *Voluntary Action (Works of William H. Beveridge) : A Report on Methods of Social Advance*. Taylor & Francis Ltd. London, United Kingdom.
- Bilton et al eds (2002) *Introduction to Sociology*, Fourth Edition, Macmillan, London
- Blakemore, K., & Warwick-Booth, L. (2013). *Social Policy: An Introduction: An Introduction*. McGraw-Hill Education (UK).
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Boyd, E. M., Reynolds, J. R., Tillman, K. H., & Martin, P. Y. (2011). Adolescent girls' race/ethnic status, identities, and drive for thinness. *Social Science Research*, 40(2), 667–684.

- Brewer, G. D., DeLeon, P., (1983), *The foundations of policy analysis*, Pacific Grove, Calif. : Brooks/Cole Pub. Co.
- Brezinski, Z. (2005). *The Dilemma of the Last Sovereign. the American Interest*.
- Briggs, A. (1961). *The Welfare State in Historical Perspective*. *European Journal of Sociology / Archives Européennes De Sociologie / Europäisches Archiv Für Soziologie*, 2(2), 221-258. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/23987939>
- Brooks, S. (1998). *Public Policy in Canada: An Introduction*, Don Mills, ON, Oxford University Press.
- Brown, M., Madge, N. (1983), *Despite the welfare state*, Heinemann.
- Burr, V. (1995) *An Introduction to Social Constructionism*, London, Routledge.
- Cacioppo JT and Cacioppo S. (2011), *Social relationships and health: The toxic effects of perceived social isolation*. *Soc Personal Psychol Compass* 2014; 8:2:58-72
- Cahnman, W. J. (1962). *Culture, civilization, and social change*. *The Sociological Quarterly*, 3(2), 93-106.
- Casey, John (2004), —*Third Sector Participation in the Policy Process: A Framework for Comparative Analysis*. *Policy and Politics*. Vol. 32, No. 2, pp. 39-256.
- Casey, John and Dalton, Bronwen (2006). *The Best of Times, the Worst of Times: Community Sector Advocacy in the Age of Compacts*. *Australian Journal of Political Science*. Vol. 41, No. 1, 23-38.
- Chapman, J. & Wameyo, A. (2001). *Monitoring and evaluating advocacy: A scoping study*. Action Aid. Retrieved from: <http://www.actionaid.org/assets/pdf/Scoping%20advocacy%20paper%202001.pdf>
- Clarke, J. and Critcher, C. (1985) *The Devil Makes Work: Leisure in Capitalist Britain*, London, Macmillan.
- Clifford Singer, MD (2018), *Health Effects of Social Isolation and Loneliness*. *Journal of Aging*. Retrieved from : <https://www.aginglifecarejournal.org/health-effects-of-social-isolation-and-loneliness/>

- Cobb, Roger W. and Charles D. Elder. 1972. *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building*. Boston: Allyn and Bacon.
- Cohen, P. (2000). In the country of the blind: youth studies and cultural studies in Britain. In Pickford, J. (ed.) *Youth Justice: Theory and Practice*. London: Cavendish.
- Colby, Ira. C (2014). *Encyclopedia of Social Work*, accessed online. (c) National Association of Social Workers and Oxford University Press USA, 2018.
- Collins Randall and Makowsky Michael (1998): *The Discovery of Society*. McGraw-Hill
- Connor J, Rodgers A, Priest P. Randomized studies of income supplementation: A lost opportunity to assess health outcomes. *Journal of Epidemiology and Community Health*. 1999;53:725–730.
- CSE/NDC (eds) (1977) *Capitalism and the Rule of Law*, London, Macmillan on behalf of Conference of Socialist Economists/National Deviancy Conference.
- D Billis, 1993, *Organising public and voluntary agencies*, Routledge.
- Daly, M. (2003). Governance and Social Policy. *Journal of Social Policy*, 32(1), 113-128. doi:10.1017/S0047279402006840.
- Davis, K. (1949). *Human society*. Macmillan.
- Dawson, C. A., & Gettys, W. E. (1948). *An introduction to sociology*. Ronald Press Company.
- Deacon, A. 2002. *Perspectives on Welfare*. Buckingham: Open University Press.
- Deacon, B. (2007). *Global social policy and governance*. Sage.
- Dean, M. (1991) *The Constitution of Poverty*, London, Routledge.
- Dear, R. B. (1995). Social welfare policy. In R. L. Edwards & J. G. Hobbs. *Encyclopedia of Social Work* (19th ed., vol. 3, pp. 2226–2237). Washington, DC: NASW Press.
- Dennis, N and Erdos, N (1993) *Families without fatherhood*, Institute for the study of civil society, London

- Deutsch, M. (2000). Justice and conflict. In M. Deutsch & P. T. Coleman (Eds.), *The Handbook of conflict resolution: theory and practice*. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Publishers.
- DiNitto, D. M and Johnson, D. H. (2016). *Social Welfare: Politics and Public Policy*. 8th Edition. Pearson Education, Inc.
- DiNitto, Diana, M. (1991). *Social Welfare; Politics and public Policy*. Third Edition. Prentice Hall. New jersey.
- Dobelstein, Andrew W.(1990).*Social Welfare: policy and analysis*. Nelson-hall Publishers. chicago
- Downes, D & Rock, P (1995) *Understanding Deviance*, Oxford University Press, New-York
- Dunham, Arthur, (1893).*The outlook for community development, an international symposium, compiled and edited by Arthur Dunham on the basis of contributions from some forty commentators. Expanded from a paper, "The outlook for community development," presented at the National Conference on Social Welfare, Chicago, May 12, 1958. Ann Arbor, School of Social Work, University of Michigan.*
- Dunn, William, N (2004) *Public policy analysis: an introduction*. Third Edition. Pearson Prentice Hall
- Durkheim Emile (1952): *Suicide: A Study in Sociology*. Transl. by John Spaulding. London, Rutledge
- Durkheim, É. (1952). *Suicide* (J. Spaulding & G. Simpson, Trans.). New York, NY: Free Press. (Original work published 1897).
- Dworkin, R. (2001). *Sovereign virtue*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Dworkin, R. (2001). *Sovereign virtue*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Easterlin, R. A. 2001b. "Life cycle welfare: evidence and conjecture." *Journal of Socio Economics* 30: 31–61.
- Eitzen D Stanley, Maxine Baca-Zinn, and Kelly Eitzen Smith (2009): *Social Problems*. (11th Edition). Boston . Allyn and Bacon.
- Ekpenyong Stephen (1993): *Elements of Sociology*. Lagos, African Heritage Research & Publication.

- Ellwood, C. A. (1901). The theory of imitation in social psychology. *American Journal of Sociology*, 6(6), 721-741.
- Epstein, G. A. (2006). Introduction: Financialization and the World Economy. *Financialization and the World Economy*. G. A. Epstein, Edward Elgar.
- Erdal, L. (2014). Türkiye'de Sosyal Politika ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli. *Sosyoekonomi*, 22(22).
- Ersöz, H. Y. (2011). Sosyal politikada yerelleşme. İstanbul Ticaret Odası.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Esping-Andersen, G. (1999). *Social Foundations of Postindustrial Economies*. Oxford: Oxford University Press.
- Essays, UK. (November 2018). *Social Problems: Causes and Solutions*. Retrieved from <https://www.ukessays.com/essays/sociology/social-problems-causes-solutions-8407.php?vref=1>
- Fayol, H. (2002). *Critical Evaluations in Business and Management*. Edited by John C. Wood and Michael C. Wood. Vol. 1. Routledge. London.
- Feinstein JS. (1993). The relationship between socioeconomic status and health: A review of the literature. *The Milbank Quarterly*. 71:279–322.
- Finch, J. (1984), *Education as social policy*, Longmans.
- Fisher, A. (2001). *Critical thinking: an introduction*. New York: Cambridge University Press
- Fleming, M. 1952. "A cardinal concept of welfare." *The Quarterly Journal of Economics* 66 (3): 366–384.
- Fligstein, N. and L. Markowitz (1990). *Financial Reorganization of American Corporations in the 1980s*. *Sociology and the Public Agenda*. W. J. Wilson. Newbury Park, Sage.
- Fosu, A. K. (2011). *Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries*. Helsingki, UNU-WIDER.
- Foucault, M. (1972) *The Archaeology of Knowledge*, London, Tavistock.

- Foucault, M. (1976) *The History of Sexuality. An Introduction*, Harmondsworth, Penguin.
- Foucault, M. (1979) *Discipline and Punish*, Harmondsworth, Penguin.
- Friedman, T. L. (2005). *The world is flat: a brief history of the twenty-first century*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Frumkin, M., & Lloyd, G. (1995). Social work education. In R. L. Edwards & J. G. Hobbs (Eds.), *Encyclopedia of Social Work* (19th ed). (pp. 2238–2247). Washington, DC: NASW Press.
- Fulcher, J & Scot, J (2006) *Sociology, Third Edition*, Oxford University Press, Oxford
- Fuller, R., & Myers, R. (1941). Some Aspects of a Theory of Social Problems. *American Sociological Review*, 6(1), 24-32. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2086338>
- Gans Herbert J (1972): *The Positive Functions of Poverty*. In *The American Journal of Sociology*, Vol 78. No 2. (Sep., 1972). Pp. 275-289. Accessed April 18, 2016 at url: <http://links.jstor.org/journals/ucpress.html>
- Gans, H. J. (1972). The positive functions of poverty. *American Journal of Sociology*, 78, 275–289.
- Garraud, P. (2004). “Agenda/Émergence,” in L. Boussaguet, S. Jacquot and P. Ravinet, *Dictionnaire des politiques publiques*, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, pp. 49-56.
- George, V. (1968). *Social Security: Beveridge and After*. New York and London, Humanities Press and Routledge & Kegan Paul.
- George, V. And Page, R. 1995. *Modern Thinkers on Welfare*. London: Prentice Hall.
- Gerth, H. H., & Mills, C. W. (Eds.). (2014). *From Max Weber: essays in sociology*. Routledge.
- Giddens, Anthony (1996): *Sociology*. 6th Edition. London. Macmillan.
- Gilbert, N. & Terrell, P. (2008). *Dimensions of Social Welfare Policy* (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
- Gilbert, Neil (1986). *Dimensions of Social Welfar Policy*. Second Edition. Prentice-Hall. New Jersey.
- Gilder, G. (1981) *Wealth and Poverty*, New York, Basic Books.

- Gillin and Gillin (1950), *Cultural Sociology*, The Macmillan Company, New York.
- Ginsberg, M. (1958). Social change. *The British journal of sociology*, 9(3), 205-229.
- Ginsberg, Morris (1949), *Studies in Sociology*, Methuen, London.
- Gitelson, A. R., Dudley, R. L., Dubnick, M. J., (2017) *American Government: Myths and Realities*, 2016 Election Edition. Oxford University Press, USA
- Gladden, E. N. (1972), *The essentials of public administration*: London Staple Press
- Gough, I. (2004). Welfare regimes in development contexts: a global and regional analysis. In I. Gough & G. Wood (Eds.), *Insecurity and welfare regimes in Asia, Africa and Latin America*. London: Cambridge University Press.
- Gramsci, A. (1971) *Selections from the Prison Notebooks*, London, Lawrence and Wishart.
- GrantCraft (2005). *Advocacy Funding: The Philanthropy of Changing Minds*. GrantCraft, New York: The Ford Foundation. www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageid=1309
- Green, L. W. (2001). From research to “best practices” in other settings and populations. *American journal of health behavior*, 25(3), 165-178.
- Greenberg R. (1981): *Methodological Issues in Survey Research on the Inhibition of Crime*. In *Journal of Criminal Law and Criminology*. 1094
- Greve, B. (2008). *What is Welfare?*. *Central European Journal of Public Policy* Vol. 2—No. 1—July 2008—pp 50–73. ISSN 1802–4866.
- Greve, B. (2014). *Welfare and the Welfare State: present and future*. Oxon: Routledge.
- Grinin, L. (2010). *The role of an individual in history: A reconsideration*. Available at SSRN 1752886.

- Grinnell, R. and Unrau, Y. (2004) *Social work research and evaluation: Quantitative and Qualitative Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- H L A Hart, 1961, *The concept of law*, Oxford: Oxford University Press.
- Hagenbuch, W. (1958). *Social Economics*. Cambridge Univ. Press.
- Haggerty, J. (1931). *The training of social workers*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Hall, C. (1998) 'A family for nation and empire', in Lewis, G. (ed.) *Forming Nation, Framing Welfare*, London, Routledge in association with The Open University.
- Hall, S. (1988) *The Hard Road to Renewal*, London, Verso.
- Hall, S., Lumley, R. and McLennan, G. (1978) 'Politics and ideology: Gramsci', in Centre for Contemporary Cultural Studies, *On Ideology*, London, Hutchinson.
- Hamlin, C. (1998). *Public health and social justice in the age of Chadwick: Britain, 1800-1854*. Cambridge University Press.
- Harold L. Wilensky and Charles N. Lebeaux. (1965). *Industrial Society and Social Welfare. The Impact of Industrialization on the Supply and Organization of Social Welfare Services in the United States*. Free Press.
- Herbert Blumer G. (1969): *Symbolic Interactionism: Perspectives and Method*. N. Jersey, Prentice-Hall.
- Herrnstein, R.T. and Murray, C. (1994) *The Bell Curve. Intelligence and Class Structure in American Life*, New York, Free Press.
- Hobhouse, L. T., & Hobhouse, L. T. (1994). *Hobhouse: Liberalism and Other Writings*. Cambridge University Press.
- Hogwood, B. W., Gunn, L. A., & Archibald, S. (1984). *Policy analysis for the real world (Vol. 69)*. Oxford: Oxford University Press.
- Horton, P.B. dan C.L. Hunt, 1991, *Sosiologi (jilid 1)*. Jakarta: Erlangga
- Howlett, M. and M. Ramesh (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, Toronto, Oxford University Press.
- Howlett, Michael, and Geist Sarah. 2012. "The Policy Making Process." In *Routledge Handbook of Public Policy*, Eduardo Araral, Scott Fritzen, Michael Howlett, Ramesh M., and Xun Wu. London: Routledge, 17–26.

- Hudson, B. (2000) *The changing role of social care*. Jessica Kingsley Publishers.
- Hughes, G. and Lewis, G. (1998) *Unsettling Welfare: The Reconstruction of Social Policy*, London, Routledge in association with The Open University.
- Idrani (1998): *Textbook of Sociology for Nurses*. New Delhi. Jaypee Brothers.
- J Veit-Wilson (eds) *Law, Power and Poverty*, Bergen: Comparative Research Programme on Poverty, pp 137–148.
- J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. Berkley: University of California Press.
- Jann, W., Wegrich, K.(2006). 4 Theories of the Policy Cycle, in *Handbook of Public Policy Analysis, Theory, Politics, and Methods*. Edited by Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney. CRC Press Taylor & Francis Group. Edited by
- Jayani, D. H.,(2005), *Jumlah Pekerja Informal Indonesia (Februari 2018-Februari 2021)*, Diakses pada 9 September 2021, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/07/berapa-jumlah-pekerja-informal-pada-februari-2021>
- Jehanih, D. (2007). *Teori siklus perubahan sosio-budaya* Pitirim A. Sorokin.
- Jenkins, J. Craig (2006). *Nonprofit Organizations and Policy Advocacy*. In Powell, Walter W., and Steinberg, Richard (eds.) (2006). *The Nonprofit Sector: A Research Handbook*, 2nd edition. New Haven, CT: Yale University Press.
- Johnson, C. H., Vicary, J. R., Heist, C. L. & Corneal D. A. (2001). Moderate alcohol and tobacco use during pregnancy and child behavior outcomes. *The Journal of Primary Prevention*, 21 (3), 367 – 378.
- Johnson, H. Wayne. (1998). *The Social Services: An Introduction*. F.E. Peacock Publishers.
- Kahn, A. J. (1976). Service delivery at the neighborhood level: Experience, theory, and fads. *Social Service Review*, 50(1), 23-56.

- Kaufmann, F. and Leisering, L. (2015). Social Policy, Welfare State. In The Blackwell Encyclopedia of Sociology, G. Ritzer (Ed.). doi:10.1002/9781405165518.wbeoss174.pub2
- Kendall, K. (2002). Council on social work education, its antecedents and first twenty years. Alexandria, VA: Council on Social Work Education.
- Kennett, P. (Ed.). (2006). A handbook of comparative social policy. Edward Elgar Publishing.
- King, R., Orloff, M., Virsilas, T., Pande, T., (2017), Confronting the Urban Housing Crisis in the Global South: Adequate, Secure, and Affordable Housing, WORKING PAPER, Washington, DC: World Resources Institute. Available online at: www.citiesforall.org.
- Konty M. (2005): Micro-Anomie: The Cognitive Foundations of the Relationship Between Anomie and Deviance. *Criminology*, 43, 107-131.
- Kwok, J (2003). Social welfare, social capital and social work: personal reflection of a Hong Kong Social Worker. *Journal of Social Policy and Social Work*, Japan College of Social Work.
- Lembaga Penelitian SMERU Research Institute, (2018), National Report, Child Poverty And Disparities In Indonesia: Challenges For Inclusive Growth
- Lemieux, V. (2002). L'étude des politiques publiques, Québec, Presses de l'Université Laval.
- Lentell, H. (1998) 'Families of meaning: contemporary discourses of the family', in Lewis, G. (ed.) *Forming Nation, Framing Welfare*, London, Routledge in association with The Open University.
- Levin, J, Innis, K, Carroll, W & Bourne, R (2000) *Social Problems, causes, consequences, Interventions*, Second Edition, Oxford University Press, new-York
- Levitas, R. (ed.) (1986) *The Ideology of the New Right*, Cambridge, Polity Press.
- Lorber, J. (2010). *Gender Inequality: Feminist Theories and Politics*. New York, NY: Oxford University Press.
- Lunberg, I. (1979). Social implications of split brain research. *Free Inquiry in Creative Sociology*, 7(2), 112-116.

- Luther H. Gulick (1937). Notes on the Theory of Organization in Papers on the Science of Administration. Eds. Luther H. Gulick and Lyndall F. Urwick. New York: Harcourt.
- MacIver, R.M. and Page, C.H. (1996), Society: An Introductory Analysis, Macmillan India Ltd., Delhi
- Maiese, M. (May 2004). Retributive Justice. Retrieved January 20, 2007 from http://www.beyondintractability.org/essay/distributive_justice/.
- Maiese, M. (October 2003c). Restorative justice. Retrieved January 20, 2007 from http://www.beyondintractability.org/essay/restorative_justice/
- Malim, M. & Birch, A. (1998). Introductory Psychology. Hampshire: Palgrave.
- Mallon, Gerald P and Peg McCartt Hess. (2005). Child Welfare For Twenty-First Century. A Handbook of Practices, Policies, and Program. Columbia University Press.
- Marshall, T. H. (1950). Citizenship And Social Class and Other Essays. Cambridge At The University Press.
- Marx, K. (1906). Capital. New York, NY: Random House. (Original work published 1867).
- Marx, K., & Engels, F. (1962). The communist manifesto. In Marx and Engels: Selected works (Vol. 2, pp. 21–65). Moscow, Russia: Foreign Language Publishing House. (Original work published 1848).
- Marx, H. E. (1922). The Political and Social Philosophy of Auguste Comte. The Open Court, 1922(7), 3.
- Maslow, A. H. (1981). Motivation and personality. Prabhat Prakashan.
- Maxwell, S and Kenway, P (2001) The Challenge of Ending rural poverty, Oxford University Press, Oxford
- May, et al eds (2001) Understanding Social problems, Blackwell Publishers,
- Mazmanian, D. A. & Sabatier, P. A. (1989). Implementation and public policy. Lanham: University Press of America.
- McCool, D. (1995). Public policy theories, models, and concepts: An anthology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

- McNeill, P & Townley, C (1986) *Fundamentals of Sociology*, Second Edition, Hutchinson, London
- Mead, Margaret ., (1964) *Anthropology, a human science*, Van Nostrand. Princeton, N.J
- Mégie, A. (2004). "Mise en œuvre," in L. Boussaguet, S. Jacquot and P. Ravinet, *Dictionnaire des politiques publiques*, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, pp. 283-289.
- Mencher, S. (1967). Ideology and the Welfare Society. *Social Work*, 12(3), 3-11. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/23710363>Journal :
- Messner S.F and Rosenfeld R. (2007): *Crime and the American Dream*. 4th ed. CA.Thomson Wadsworth.
- Meter, D. S. V., & Horn, C. E. Smith, K. B., & Larimer, C. W. (2009). *The public policy primer*. Boulder: Westview Press.
- Meter, D. S. V., & Horn, C. E. V. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework, *Administration and Society*, 6, 445-488.
- Midgley, J. (1997). *Social welfare in global context*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781483327945
- Midgley, J., & Livermore, M. (1997). The Developmental Perspective In *Social Work: Educational Implications For A New Century*. *Journal of Social Work Education*, 33(3), 573-585. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/23043090>
- Midgley, J., Livermore, M.(2009). *Handbook of Social Policy*. 2th ed. Sage Publication. USA
- Miley, K. K., O'Melia, M. W., & DuBois, B. L. (2016). *Generalist social work practice: An empowering approach*. Pearson.
- Miller, J. (1976). *Social justice*. Oxford: Clarendon Press.
- Mills, C. W. (1959). *The sociological imagination*. London, United Kingdom: Oxford University Press.
- Mojumdar, K. (1975). *Nepal and the Indian Nationalist Movement*. Firma KL Mukhopadhyay.
- Morel, N. (2007). From subsidiarity to 'free choice': Child-and elder-care policy reforms in France, Belgium, Germany and the Netherlands. *Social Policy & Administration*, 41(6), 618-637.

- Morel, N., & Palier, B. (Eds.). (2011). *Towards a social investment welfare state?: ideas, policies and challenges*. Policy Press.
- Morgenthau, H. J. (1985), *Political among Nations: The struggle for power and peace*.
- Morris, R. (1986). Social welfare policy: trends and issues. In A. Minahan (Ed.), *Encyclopedia of Social Work* (18th ed., vol. 2, pp. 664–681). Silver Spring, MD: National Association of Social Workers.
- Mulroy, E. A., & Lauber, H. (2004). A user-friendly approach to program evaluation and effective community interventions for families at risk of homelessness. *Social work*, 49(4), 573-586.
- Muncie, J. (2004). *Youth and Crime*. 2nd Edition. London: Sage Publications.
- Neugeboren, Bernard (1979) "Social Polics and Social Welfare Administration," *Te Journal of Sociology & Social Welfare: Vol. 6 : Iss. 2 , Article 4*.
- Nicholas R. Nicholson, (2012), *A Review of Social Isolation; An Important but Underassessed Condition in Older Adults*, *The Journal of Primary Prevention*. Retrieved from : <https://www.medscape.com/viewarticle/769914>
- Nisbet, R. (2014). *The quest for community*. Open Road Media.
- No Isolation. (2017, April 18). *What is social isolation?* Retrieved from: www.noisolation.com/global/research/what-is-social-isolation/
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. NY: Basic Books.
- Nurullah Calis & Sirin Targan Calis, 2016. "Social Policy for Education: Assessing Needs of Turkey," *Proceedings of International Academic Conferences 3606152*, International Institute of Social and Economic Sciences.
- OECD (2011), *Families Are Cahanging, Doin Better For Families*.
- Offer, J. (2010). *Herbert Spencer and social theory*. Springer.
- Ogburn, W. F. (1937). *Technological Trends and National Policy: Including the Social Implications of New Inventions*. June, 1937 (No. 360). US Government Printing Office.
- Okodudu S (2010): *Fundamentals of Sociology: 2nd ed*. Port Harcourt. Thompson and Thompson Nig. Ltd

- Oppenheim, C. (1993) *Poverty: The Facts*, London, Child Poverty Action Group.
- Özaydin, M. M. (2008). Küresel Etkilerle Şekillenen Sosyal Politika Analizi Ekseninde Sosyal Politikaların Geleceğini Tartışmak. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(1), 163-180.
- P Spicker, 1997, The prospect for european laws on poverty, in A Kjonstad,
- Panich, M. 2007. "Does Europe need liberal reforms?" *Cambridge Journal of Economics* 31: 145–169
- Pateman, C. (1988). *The sexual contract*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Pero, A. P., Adema, W., Ferraro, V., Frey, V., (2016), Policies to promote access to good-quality affordable housing in OECD countries, OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 176. Head of Publications Service OECD
- Pessoa, J. P. and J. V. Reenen (2012). *Decoupling of Wage Growth and Productivity Growth? Myth and Reality*. C. o. L. Standards. London, London School of Economics
- Pfiffner, J. P. (1985). *Political public administration*.
- Pierson, C. And Castles, F. 2006. *The Welfare State Reader*. Second edition. Oxford: Polity.
- Pigou, A. C. 1950. *The economics of welfare*. Fourth edition. London: Mac millan. pohnpei397. "Why is social welfare policy important or critical?" eNotes, 27 Aug. 2013, <https://www.enotes.com/homework-help/could-someone-explain-why-social-welfare-policy-449876>. Accessed 26 Jan. 2019.
- Platt, J. (199D 'The contribution of social science', in Loney, M. et al. (eds) *The State or the Market: Politics and Welfare in Contemporary Britain*, second edition, London, Sage.
- Plummer, K. (1992) 'Speaking its name: inventing a gay and lesbian studies', in Plummer, K. (ed.) *Modern Homosexualities*, London, Routledge.

- Polkinghorne, D. (2004) *Practice and the human sciences: The case for a judgement-based practice of care* (Suny Series in the Philosophy of the social sciences). New York: New York State University Press.
- Priandaru, D. L., (2021), Daftar negara paling bahagia 2018-2020, Indonesia urutan berapa?. Diakses pada 28 September 2021, dari <https://newssetup.kontan.co.id/news/daftar-negara-paling-bahagia-2018-2020-indonesia-urutan-berapa?page=all>
- R Berki, 1979, *State and society*, in J Hayward, R Berki (eds) *State and society in contemporary Europe*, Oxford: Martin Robertson, p.1.
- Raab, E & Selznick (1964), *Major Social Problems*, Paterson and Company, Evanston, Illinois
- Rawls, J. (1971). *Theory of justice*. Harvard, MA: Harvard University Press.
- Reamer, F. G. (1989). *Toward ethical practice: The relevance of ethical theory*. *Social Thought*, 15(3-4), 67-78.
- Reinhardt, j. M., (1952), *Social problems and social policy*, American Book Co.
- Reisman, J., Gienapp, A., & Stachowiak, S. (2007). *A guide to measuring advocacy and policy*. Prepared by Organizational Research Services for Annie E. Casey Foundation.
- Ripley, R. B. (1985). *Stages of the policy process*. In D. McCool (Ed.), (1995). *Public policy theories, models, and concepts: An anthology*, (pp. 157-161). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Rittel, H. & Webber, M. (1973). *Dilemmas in a General Theory of Planning*. *Policy Sci* 4:155-169.
- Rohrlich, G. (1977). *Social policy and income distribution*. In J. Turner (Ed.), *Encyclopedia of Social Work* (17th ed., vol. 2). Washington, DC: NASW Press.
- Rose, A. M. (1957). *Theory for the study of social problems*. *Social Problems*, 4(3), 189-199.
- Rubington, E & Weinberg, (1989) *The Study of Social Problems*, Fourth Edition, Oxford University Press, Oxford
- Russell, S. (1986). *The social construction of artefacts: a response to Pinch and Bijker*. *Social studies of science*, 16(2), 331-346.

- Ryan, W. (1976). *Blaming the victim* (Rev. ed.). New York, NY: Vintage Books.
- S Benn, R Peters, 1959, *Social principles and the democratic state*, London: Allen and Unwin.
- S Osborne, Z Radnor, G Nasi, 2013, *A new theory for public Service management?*, *American Review of Public Administration* 43(2) pp 135–58.
- Sabatier P. A. & Mazmanian D. (1995). A conceptual framework of the implementation process. In Theodolou, S. Z. & Cahn, M. A. (Eds.), *Public policy: The essential readings*, (pp. 153-173). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Salamon, Lester (2002). *Explaining Nonprofit Advocacy: An Exploratory Analysis*. Johns Hopkins University, Baltimore: Center for Civil Society Studies, Working Paper Series No. 21. www.jhu.edu/~ccss/publications/ccsswork/workingpaper21.pdf
- Samuel S. Shermis & James L. Barth (1979) *Defining Social Problems, Theory & Research in Social Education*, 7:1, 1-19, DOI: 10.1080/00933104.1979.10506047
- Satu Data Ketenagakerjaan, (2021), Diakses pada 9 September 2021, dari <https://satudata.kemnaker.go.id/details/data/Jumlah%20Kepesertaan%20BPJS%20Ketenagakerjaan%20sampai%20dengan%20Juli%202021%20adalah%20sebanyak%2049,06%20juta%20orang%20pekerja> serta
- Savard, J.-F. with the collaboration of R. Banville (2012). “Policy Cycles,” in L. Côté and J.-F. Savard (eds.), *Encyclopedic Dictionary of Public Administration*, [online], www.dictionnaire.enap.ca
- Scott J. and Marshall G. (2005): *A Dictionary of Sociology*. Oxford, UK. Oxford University Press.
- Selçuk, F. Ü. (2009). *Sosyal politika: tarihsel zorunluluk yaklaşımı yerine liberalizmle ortaklaşan temellerden alternatif kuramsal inşalara*. *Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi*, (2), 1-26.
- Shaxson, N., J. Christensen, et al. (2012). *Inequality: You don't know the half of it*. London, Tax Justice Network.

- Simon, C. A. (2010). *Public policy: Preferences and outcomes* [2 nd edt]. New York: Pearson Educations.
- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The quarterly journal of economics*, 69(1), 99-118.
- Simpkins, O. N. (1952). MERRILL and ELDREDGE. *Culture and Society: An Introduction to Sociology* (Book Review). *Social Forces*, 31(1), 375.
- Smart, C. (1995) *Law, Crime and Sexuality*, London, Sage.
- Smith, N. E., & Hinkle, R. C. (1979). Sumner versus Keller and the social evolutionism of early American sociology. *Sociological Inquiry*, 49(1), 41-48.
- Sorokin Pitirim (1947): *Society, Culture and Personality*. New York, Harper.
- Sorokin Pitirim (1998): *Social Space, Social Distance and Social Position*. In: *On the Practice of Sociology*. Barry V. Johnston (ed.). Chicago. University of Chicago Press, pp. 206-212.
- Spector, M & Kitsuse, J (2000) *Constructing Social Problems*, Transaction, New-Jersey
- Spicker, P (2019), *Health care, An introduction to Social Policy*, <http://spicker.uk/social-policy/health.htm>, obtained on 28 July 2019.
- Spicker, P. (1988). *Principles of social welfare an introduction to thinking about the welfare state*. Routledge.
- Spicker, P. (2000). *The Welfare State: a general theory*. Sage Publications.
- Spicker, Paul (2009), *The nature of a public service*, *International Journal of Public Administration*, 32(11) 970-991.
- Spicker, Paul, (2014), *an introduction to Social Policy*, *Social Policy*, available online at: <http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/index.htm>
- Splenger Oswald (1932): *The Decline of the West*. Transl. by Charles Atkinson. New York. Oxford University Press.
- Stein, Ludwig. (1923). *Die soziale frage : im lichte der philosophie / Ludwig Stein*. [Stuttgart] :: Verlag Von Ferdinand Enke,.

- Stevens, C.A., (1995), *Public Housing Redevelopment As Social Policy, Urban Policy and Research*.
- Steward Julian H. (1955): *Theory of Culture Change: The Methodology of Multi-linear Evolution*. The University of Illinois Press
- Stewart, J. J., Hedge, D. M., & Lester, J. P. (2008). *Public policy: An evolutionary approach* (3rd ed.). Boston: Thomsom Wordsworth. Pressman,
- Stocking, G. W. (Ed.). (1987). *Malinowski, Rivers, Benedict and others: essays on culture and personality* (Vol. 4). Univ of Wisconsin Press.
- Stone, D, (2002), *Policy paradox*, New York: Norton.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sumarnonugroho, T. 1984. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Hanindita
- Sumner, L. W. 1996. *Welfare, Happiness and Ethics*. Oxford: Clarendon Press.
- Suradi, (2005). *Perubahan Sosial Budaya: Implikasinya Terhadap Pelayanan Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat*. Surabaya: Swastika Media Cipta.
- Sutherland E.H (1939): *Principles of Criminology*. Philadelphia, J.B Lippincott.
- Talas, C. (1992). *Türkiye'nin açıklamalı sosyal politika tarihi*. Bilgi Yayınevi.
- Taylor-Gooby, P. (2004). *New Risks and Social Change. New Risks, New Welfare*. P. Taylor-Gooby. Oxford, Oxford University Press.
- Terris M. (2011). *A social policy for health*. 1968. *American journal of public health*, 101(2), 250–252. doi:10.2105/ajph.101.2.250
- Terry, George, R. and Franklin, Stephen, G. (2000). *Principles of Management*, AITBS, Delhi.
- The State of Food and Agriculture, 2001 (FAO 2001) which includes references to the studies, methodological details and caveats. Institute of Medicine, Committee on Monitoring Access to

- Personal Health Care Services. Access to Health Care in America. Millman M, editor. Washington, DC: National Academies Press; 1993.
- Thomas A. Birkland and Kathryn L. Schwaeble (2019), Agenda Setting and the Policy Process: Focusing Events. Subject: Policy, Administration, and Bureaucracy, Online Publication Date: Jun 2019, DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.165
- Tinbergen, J. 1991. "On the measurement of welfare." *Journal of Econometrics* 50 : 7–13.
- Titmuss, R. M. 1987. *The Philosophy of Welfare: Selected Writings of Richard M. Titmuss*. London: Allen & Unwin.
- Titmuss, R. (1966). The relationship between schools of social work, social research, and social policy. *Journal of Education for Social Work*. Spring. (1), 68–75.
- Titmuss, R. M. 1968. *Commitment to Welfare*. London: Allen & Unwin.
- Toffler, A., & Alvin, T. (1980). *The third wave* (Vol. 484). New York: Bantam books.
- Tong, R. (1993). *Feminine and feminist ethics*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
- Tonnies, Ferdinand (1957): *Community and Society*, transl. by C. Loomis, Michigan State University, E Lansing.
- Townsend, P. (1975). *Sociology and social policy*. London: Lane.
- Tylor, E. B. (1871). *Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, art and custom* (Vol. 2). J. Murray.
- UN ISDR (2005). *Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters*. UN ISDR. Geneva, UN ISDR.
- Van Praag, B. M. S. 1993. "The relativity of the welfare concept." In *The Quality of Life*, ed. M. Nussbaun and A. Sen. Oxford: Oxford University Press.
- Van Praag, B. M. S. And Frijters, P. 1999. "The measurement of welfare and well-being: The Leyden approach." In *Foundations of Hedonic Psychology: Scientific Perspectives on Enjoyment*

- and Suffering, ed. D. Kahneman, E. Diener, and N. Schwarz. New York: Russell Sage Foundation.
- Vargas-Hernandez, J., Noruzi, M. R., & Ali, I. F. N. H. (2011). What is policy, social policy and social policy changing?. *International Journal of Business and Social Science*, 2(10), 287-291.
- Walker, A. 1997. "Whither welfare?" In *The Student's Companion to Sociology*, ed. C. Ballard, J. Gubbay, and C. Middleton. Oxford: Blackwell.
- Walker, R. 2005. *Social Security and Welfare: Concepts and Comparisons*. Berkshire: Open University Press.
- Walsh, M. E., Furfey, P. H., (1958), *Social Problems and Social Action*. Prentice-Hall
- Ward, L. F. (1905). Evolution of social structures. *American Journal of Sociology*, 10(5), 589-605.
- White, L. A. (1975). The concept of culture (pp. 3-14). Columbia University Press.
- Whitehead, Margaret. (1992). The Concepts and Principles of Equity and Health. *International Journal Health Serv*, 22:429-45
- Wickenden, E. (1976). A perspective on social services: An essay review. *Social Service Review*, 50(4), 570-585.
- Wilensky, H., & Lebeaux, C. (1965). *Industrial society and social welfare*. New York: Free Press.
- Williams, R. 1976. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. Glasgow: Fontana.
- Wilson, G. (1981) *Love and Instinct*, London, Temple Smith. With a high prevalence, and an increasing number of older persons, social isolation will impact the health, well-being, and quality of life of numerous older adults now and in the foreseeable future.
- World Bank. 1995. *Toward gender equality : the role of public policy : an overview (English)*. Development in Practice. Washington, D.C. : The World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/443031468764979471/Toward-gender-equality-the-role-of-public-policy-an-overview>

- Yi, I. (2015), New challenges for and new directions in social policy, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Switzerland
- Zastrow, Charles, (2009) Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People. Brooks/Cole.Cengage Learning.
- Zastrow, Charles. (1999). The Practice of Social Work (six edition). Illinois: Pacióc Grove, Brook/Cole Publishing Co.
- Zimmerman, S. L. (1979). Policy, social policy, and family policy. Journal of Marriage and the Family. 41, 467–495.



Dekki Umamur Rais, S.Sos., M.Soc.Sc. lulus S1 di Program studi Administrasi Negara di Universitas Jember (FISIP UNEJ) tahun 2010 dan Lulus S2 di program Master Psikologi Perkembangan Manusia, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tahun 2014. Saat ini penulis Aktif di berbagai kegiatan advokasi Kebijakan publik dan Pemberdayaan Masyarakat, Khususnya masyarakat pedesaan dan Pemerintah Desa. Penulis Juga aktif memberikan pelatihan baik itu kepada masyarakat, lembaga profesional, dan lembaga pemerintahan. Selain itu, melalui lembaga yang dipimpinnya yaitu Pusat Studi Desa Indonesia (PUSDI) juga terlibat dalam serangkaian kegiatan kajian tentang desa dan Pemerintahan Daerah. Penulis juga pernah terlibat dalam kegiatan proyek dari NGO Internasional seperti World Vision dan MOHE. Selain aktif dalam kegiatan pemberdayaan, penulis juga merupakan seorang Dosen di sebuah PT di Kota Malang.



Dody Setyawan, S.Sos., M.AP, lahir di Pamekasan Madura beberapa dekade silam dan mengenyam sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Banyuwangi Jawa Timur. Penulis menyelesaikan studi S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan S2 Magister Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tung-gadewi Malang (Unitri). Saat ini sedang menempuh studi S3 Adminis-trasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Pada tahun 2010 mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk mengikuti program Magang Dosen Muda dan satu paket dengan pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach* (AA) di Universitas Airlangga Surabaya. Dalam bidang penelitian dan pengabdian, penulis beberapa kali meraih hibah pengabdian pada masyarakat dan hibah penelitian dosen muda

sampai penelitian *multi years* dari pemerintah. Penulis menjadi Dosen Administrasi Publik di Unitri sejak tahun 2009 dan tersertifikasi di bidang kebijakan publik. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium Administrasi Publik dan saat ini menjadi koordinator konsentrasi kebijakan publik di program studi yang sama. Selain itu penulis juga aktif di *Indonesian Association for Public Administration (IAPA)* sebagai pengurus daerah Jawa Timur, pegiat di *Malang Corruption Watch (MCW)*, pendiri *Iqra' Education Center Malang*. Buku yang pernah ditulis antara lain: *Kebijakan dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender*, 2018; *Pengantar Kebijakan Publik*, 2017; *Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender*, 2016. Selain itu, beberapa artikel tentang kebijakan terbit di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Motto penulis “Yakin Usaha Sampai dengan Ridho Allah SWT”.

KEBIJAKAN SOSIAL

SEJARAH, TEORI, DAN PRAKTIK



Sebagian besar negara demokrasi modern hari ini merupakan 'negara kesejahteraan'. Tetapi, demokrasi telah mengubah wajah, peran, dan fungsi pemerintahan yang sesungguhnya. Saat ini, melalui konsep 'negara kesejahteraan', makna demokrasi telah didefinisikan kembali melalui serangkaian kebijakan yang mampu memenuhi hajat hidup orang banyak.

Adanya kesenjangan yang sangat besar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dalam suatu negara tidak hanya menunjukkan adanya tanda-tanda kegagalan sebuah negara dalam mengelola keadilan sosial, tetapi kemiskinan yang akut dengan perbedaan penguasaan ekonomi yang mencolok akan menimbulkan dampak buruk dalam segala segi kehidupan masyarakat. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka dikembangkanlah konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), sebuah sistem kenegaraan yang berusaha untuk memperkecil jurang pemisah antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin melalui berbagai usaha pelayanan kesejahteraan untuk warga negaranya.

Titik tekan dari negara kesejahteraan, selain demokrasi adalah keadilan sosial. Keadilan Sosial merupakan persamaan hak bagi semua manusia dan jalan untuk memberikan peluang kepada seluruh manusia untuk bermanfaat bagi kemajuan sosial maupun ekonomi tanpa perbedaan. Dari sinilah asal mula lahirnya pendekatan Kebijakan sosial. Keadilan yang dirumuskan melalui serangkaian kebijakan sosial untuk mewujudkan keadilan demi mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan melalui pemberian layanan-layanan sosial dan sistem pengaman sosial oleh negara kepada warga negaranya.

Buku ini penting untuk dibaca oleh para Mahasiswa, Akademisi, pemerintah, dan Praktisi yang memiliki perhatian pada masalah-masalah sosial. Buku ini dilengkapi dengan sejumlah metode yang bisa digunakan untuk kepentingan Best Practice kebijakan sosial. Pembaca bisa belajar, memahami dan sekaligus mempraktikkannya. Selain itu, dalam buku ini juga dibahas tentang sejarah perkembangan negara kesejahteraan sebagai cikal bakal lahirnya pendekatan kebijakan sosial. Buku ini akan memberikan perspektif baru kepada pembacanya, bagaimana cara memahami dan menganalisa masalah dan isu-isu sosial. Pembaca juga akan diajak untuk memahami bagaimana perubahan sosial bisa terjadi dan bagaimana prosesnya serta bagaimana cara menyelesaikannya melalui proses kebijakan sosial.

forind
Penerbit

Penerbit Forind
Jl. Raya Tlogomas V No. 24
Tlogomas Malang 65141
Telp. 081233992973
Email : forind_publishing@yahoo.com

ISBN 978-623-99722-2-6

